MENJAWAB PERSOALAN PENDIDIKAN DI ERA REFORMASI

ANTOLOGI PEMIKIRAN

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
uny

MENJAWAB PERSOALAN PENDIDIKAN DI ERA REFORMASI

ANTOLOGI PEMIKIRAN ROCHMAT WAHAB

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta
Pasal 2:
1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana
Pasal 72:
1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MENJAWAB PERSOALAN PENDIDIKAN DI ERA REFORMASI

ANTOLOGI PEMIKIRAN ROCHMAT WAHAB

UNY PRESS

MENJAWAB PERSOALAN PENDIDIKAN DI ERA REFORMASI
Antologi Pemikiran Rochmat Wahab
Oleh Rochmat Wahab

Cetakan I, November 2017

Editor: Sismono La Ode
Desain Visual: MS Lubis
Ilustrasi: freepik.com

Diterbitkan oleh
UNY Press
Jl Gejayan, Gg Alamanda, Kompleks FT
Kampus UNY Karangmalang, Yogyakarta
Telp: 0274-586168 ekstensi 279

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
x + 522 hlm; 17,5 x 25 cm

Catatan Editor

ANTOLOGI Pemikiran Rochmat Wahab merupakan buah karya Prof. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., selama kurun waktu satu dekade. Tulisan-tulisan ini tersebar di pelbagai media massa dan juga dituangkan di pelbagai forum akademis dan seminar-seminar non akademis. Tema-tema yang ditulis tidak lepas dari latar belakang pendidikan dan aktivitas sosial Rochmat Wahab. Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan UNY ini bukan saja pakar dibidang anak berbakat dan berkebutuhan khusus, namun ia juga pakar di bidang agama, pendidikan keluarga, sosial budaya, kepemudaan, kurikulum, dan tentu pendidikan secara umum.

Selama Menjadi Rektor UNY 2009-2017, tulisan-tulisan Rochmat tidak berhenti, justru di tengah kesibukannya, ia selalu mengisi kolom media massa. Koran ternama dan tertua di Indonesia selalu menempatkan tulisannya di rubrik *Analisis*. Sebuah rubrik yang tidak semua penulis mampu menembusnya. Baginya, aktivitas menulis adalah ibadah, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Dengan terus menulis maka manusia akan selalu terus berbagi dengan pembaca (baca: umat). Bahkan, menurutnya ketika ia tak menulis, para "umat" selalu menanyakannya baik melalui email, sms, bbm, ataupun WA.

Antologi Pemikiran Rochmat Wahab diberi tajuk *Menjawab Persoalan Pendidikan di Era Reformasi*. Betapa tidak, buah pemikiran Rochmat Wahab selalu menjawab persoalan-persoalan pendidikan di era reformasi, bahkan menjadi rujukan pelbagai kalangan akademis dan kritikus dunia pendidikan. Jika ada isu-isu krusial pendidikan (dan juga yang lain) Prof. Rochmat pasti menjawabnya dengan tulisan.

Beberapa isu pendidikan, agama, sosial, dan budaya dalam buku ini terlahir di zamannya, meskipun begitu substansi yang disampaikan masih relevan dengan isu-isu kekinian. Setidaknya cara berpikir kritis, kontrukstif, dan solutif yang ditawarkan Rochmat Wahab dapat menjadi salah satu pijakan dalam menganalisis persoalan-persoalan pendidikan, sosial, budaya, agama kekinian.

Sebagai seorang akademis, tentu Rochmat Wahab amat memahami siklus Hegel: Tesa-Antitesa-Sintesa. Oleh karenanya, pemikiran ini membutuhkan tegur sapa perspektif dari pembaca. Dengan begitu Antitesa pembaca melahirkan Sintesa yang amat berguna bagi perkembangan keilmuan dan kebutuhan publik. Selamat membaca! Tabik

Sismono La Ode, M.A.

Daftar Isi

Sistem dan Orientasi Pendidikan

- Menegakkan Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila — 3
- Mengkritisi Sistem Pendidikan Nasional, Aktualisasi Otonomi Pendidikan dan Alokasi Anggaran Pendidikan — 13
- Implementasi Prinsip Keadilan Sosial Bidang Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi — 20
- Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan — 34
- Mengukur Komitmen dan Kapabilitas Kabinet Indonesia Bersatu dalam Membawa Perubahan Bangsa; Bidang Pendidikan — 36
- Menyiapkan Pendidikan bagi 'Generasi Emas' — 43
- Mempertanyakan Komitmen Negara terhadap Pendidikan — 47
- Kebangkitan Nasional dalam Perspektif Pendidikan — 51
- Rehabilitasi Pendidikan Pasca Erupsi Merapi — 55
- Mengkaji Implementasi UU Sisdiknas terhadap PTK Akademigas — 57
- Pendidikan untuk Kebangkitan Bangsa — 63
- Mengkritisi Pendidikan Berbasis Kompetensi dan Berwawasan Moral — 66

Anak, Ibu, dan Pendidikan

- Anak Indonesia: Berakhlak Mulia dan Berprestasi — 73
- Anak Sehat, Kreatif, dan Berakhlaq Mulia — 76
- Anak Indonesia Sejahtera, Berkualitas dan Terlindungi — 78
- Anak dan Masa Depan Bangsa — 81
- Ibu dan Pendidikan — 84
- KMS dan Dampaknya — 86
- Kontroversi Kartini Kita! — 89
- Menyelamatkan 'Generasi Emas' Anak — 93
- Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif — 95

Pendidikan Persekolahan

- Model Sekolah Berbasis Nilai — 109
- Manajemen Berbasis Sekolah — 115
- Menyoal MBS — 117
- Peranan Pengawasan dalam Manajemen Berbasis Sekolah dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan — 119
- Pro Kontra Kuota PPDB — 127
- Pentingnya Membaca — 131
- Pembelajaran yang Efektif, Efisien, dan Menarik Sesuai dengan Perkembangan Teknologi Modern — 134
- Lesson Study, untuk Tingkatkan Mutu Sekolah Inklusif — 143
- Darurat Kekerasan di Sekolah: Sekolah sebagai Tempat Pesemaian Nilai-nilai Sosial Kemanusiaan — 146
- Strategi Meningkatkan Prestasi Belajar — 148
- Strategi Pengembangan SMAN 4 Yogyakarta Menuju Sekolah Kategori Mandiri — 150
- Wawasan tentang Sekolah Nasional Berstandar Internasional — 155
- Pasca Pembubaran RSBI/SBI — 161
- Pertukaran Pelajar — 164
- Peluang dan Strategis Studi Lanjut — 167

Pendidikan Karakter

- Membentuk Karakter — 173
- Menghasilkan Insan Berkarakter dan Bermartabat — 175
- Pendidikan Hasilkan Insan Unggul — 177
- Pendidikan Karakter: Insan Bermoral dan Profesional — 179
- Pendidikan Karakter untuk Semua — 181
- Pendidikan Islam untuk Penanganan Korupsi — 183
- Posisi Pendidikan Agama dalam UU Sisdiknas — 188
- Rekonstruksi Peran Pendidikan Agama dalam Membangun Masyarakat Humanis dan Pluralis — 195
- Politik Pendidikan Agama dalam RUU Sisdiknas — 200
- Pendidikan Karakter yang Efektif — 204
- Riset Membangun Insan Berkarakter — 207
- Strategi dan Implementasi Pendidikan Karakter di SMP — 210
- UNY Kedepankan Pendidikan Karakter — 215

Kurikulum

- Telaah Kritis Kurikulum 2004: Konsep, Persiapan, dan Pelaksanaan — 227
- Catatan Terhadap Konsep Kurikulum 2013 — 237
- Perubahan Kurikulum, Sudah 'Sunnatullah' — 241
- Mengawal Implementasi Kurikulum 2013 — 243
- Menyoroti UNAS dan US — 246
- Refleksi UN dan UASBN — 248
- UNAS Dilarang? — 252
- Mengulang Ujian Nasional 2009? — 254

Profesionalisme Guru

- Guru Profesional — 259
- Agar Guru Bekerja Prima — 261
- Pengembangan Profesionalisme Guru — 264
- Profesionalisme Guru Madrasah — 272
- Pengembangan Moral Calon Guru SD dan TK Guna Mengantisipasi Demoralisasi Generasi Muda — 276
- Sertifikasi Guru, Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan — 280
- Kesejahteraan Guru Profesional — 292
- Gaji Guru Pasca Anggaran Pendidikan 20 Persen — 294
- Pendidikan dan Konseling Bagi Anak Berbakat — 297
- Mengenal Anak Berbakat Akademik dan Upaya Mengidentifikasinya — 299
- Anak Berbakat Berprestasi Kurang (*The Underachieving Gifted*) dan Strategi Penanganannya — 310
- Pengelolaan Pendidikan Anak *'Gifted'* — 322
- Konsep Dasar Penyelenggaraan Program Akselerasi Pendidikan — 337
- Kontribusi Konseling Sosial-Personal untuk Keberhasilan Studi Anak Berbakat Akademik — 347
- Konseling Bagi Anak Berbakat Akademik — 371
- Bimbingan Sosial-Pribadi dalam Layanan BK Berbasis Kompetensi — 385
- Pengembangan Tema-tema Penelitian dalam Konseling — 401

Pendidikan Tinggi

- Tantangan dan Pengembangan 'Center of Excellence' — 409
- Kebijakan UNY dalam Pengembangan KKN — 412
- Membelajarkan Tradisi Intelektual Ummat sebagai Proses Pendidikan Masyarakat Berkebangsaan — 420
- Psikologi Belajar — 425
- Menghadapi Kontroversi BHP — 435

- Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) Ditinjau dari Perspektif Filosofis dan Sosiologis — 437
- Perguruan Tinggi Yogyakarta — 442
- Kontribusi UNY untuk Pendidikan Karakter — 444
- UNY Menuju 'World Class University' — 447
- Pengembangan Akademik UNY Menuju 'World Class University' — 451
- Meningkatkan Efektivitas Kepenasehatan Akademik — 455
- Mengembangkan KKN Kontekstual — 462
- SPMB atau UMPTN? — 472
- Menghadapi SNMPTN 2012 — 474
- Hasil UN DIY dan SNMPTN — 476

Pembinaan Pemuda, Masyarakat, dan Olahraga

- Sumpah Pemuda dan Pendidikan — 481
- Isi-isu Pendidikan di DIY — 483
- Refeleksi 66 Tahun HMI: Menuju Gerakan Intelektual Kreatif — 490
- Memaknai Kebangkitan Nasional — 496
- Menghargai Perjuangan Pahlawan — 499
- HUT RI ke-65: Masyarakat Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan — 501
- Partisipasi Masyarakat dalam Otonomi Pendidikan — 504
- Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pesantren dalam Menghadapi Tantangan Global — 511
- Peran Edukatif Media Massa dalam Mencerdaskan Masyarakat — 516
- Haornas: Prestasi dan Kesejahteraan — 519

Sistem dan Orientasi Pendidikan

Memantapkan dan menegakkan sistem pendidikan nasional perlu terus diupayakan, sehingga sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila mampu mencerdaskan kehidupan rakyat, yang pada akhirnya mampu menjunjung tinggi martabat bangsa Indonesia.

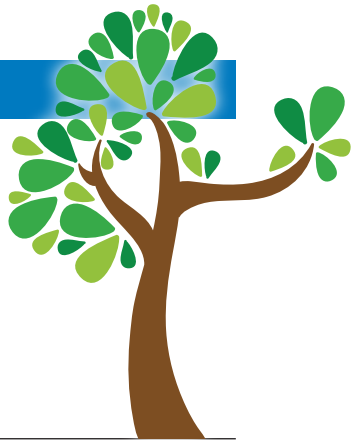

Menegakkan Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila

Pengantar

Pada hakekatnya, pendidikan nasional merupakan suatu kekuatan *(*power*)*. Theodore Brameld (1965) menegaskan bahwa *education is power. A*rtinya, dengan pendidikan seseorang bisa menguasai dunia. Seiring dengan itu Francis Bacon (Brameld, 1965) berpendapat bahwa *"Knowledge is power"*. Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah saw, yaitu: "Barang siapa yang ingin menghendaki dunia hendaknya menguasai ilmu, barang siapa yang menghendaki akhirat hendaknya menguasai ilmu, dan barang siapa yang ingin menguasai dunia dan akhirat hendaknya menguasai ilmu". Dengan demikian semakin yakin akan pentingnya pendidikan nasional dalam kehidupan bangsa dan negara.

Menyadari akan posisi pendidikan nasional, maka visi pendidikan sebagaimana yang tersurat dalam Penjelasan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Atas dasar visi itu, diharapkan pendidikan nasional dapat dijadikan suatu faktor yang sangat strategis dalam membangun bangsa Indopnesia di masa depan.

Walau pendidikan memiliki posisi sangat strategis, kenyataannya kinerja pendidikan nasional masih jauh dari yang diharapkan, bahkan hampir tiada henti-hentinya beberapa anggota masyarakat menghujat sistem pendidikan nasional, di antaranya berkenaan dengan peraturan perundang-undangannya, desain kurikulum, sistem evaluasi, anggaran pendidikan, dan sebagainya.

Terlepas dari persoalan yang ada di seputar praktek pendidikan nasional, bangsa Indonesia berkepentingan untuk menghadapi kompetisi global. Untuk itu sistem pendidikan nasional tetap menjadi tumpuan bangsa dan negara.

Karena itulah perlu diupayakan berbagai strategi menegakkan sistem pendidikan nasional menuju masa depan Indonesia yang cerah.

Realita Sistem Pendidikan Nasional Dewasa ini

Mengingat luasnya cakupan sistem pendidikan nasional, pembahasan akan lebih diarahkan kepada beberapa komponen, di antaranya sebagai berikut:

1. Landasan yuridis formal pendidikan nasional yang ada masih banyak mendapat sorotan. Sorotan terhadap Undang-undang Sistem pendidikan Nasional (USPN/UU Sisdiknas), Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD), dan Peraturan Pemerintah (PP), Standar Nasional Pendidikan tidak dapat dihindari terutama yang berkenaan dengan Badan Hukum Pendidikan (BHP), Ujian Nasional, Kualifikasi dan Kompetensi Guru, Anggaran Pendidikan dan sebagainya. Sorotan terhadap setiap peraturan perundangan bisa dimaklumi, karena hampir setiap undang-undang dibuat pasti menimbulkan pro dan kontra. Sikap pro biasanya muncul bagi pihak yang diuntungkan, sebaliknya sikap kontra muncul biasanya dari pihak yang merasa untuk sementara tidak diuntungkan, walau pada akhirnya tidak jarang dapat mendukungnya ketika sudah mengetahui manfaatnya.
2. Kemampuan, kesiapan dan komitmen peserta didik. Perubahan dan dinamika sosial dan budaya yang terjadi dewasa ini berpengaruh secara berarti terhadap kemampuan, kesiapan dan komitmen peserta didik dalam belajar. Kondisi ini belum sepenuhnya dijadikan landasan pijak guru dalam mengembangkan program dan proses pendidikan dan pembelajarannya, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas pendidikan belum sepenuhnya menggembirakan, karena belum dapat menjamin kepuasan *stakeholders* utamanya.
3. Isi kurikulum mendapatkan sorotan yang tajam. Isi kurikulum yang tertuang pada Bab X pasal 7 37 pada UUSPN menunjukkan bahwa kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah tidak memuat lagi Pancasila sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan, namun diharapkan nilai-nilai Pancasila lebih utamanya diakomodasi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, di samping diharapkan dapat diinternalisasikan dalam mata pelajaran lainnya. Yang tidak dapat dipungkiri dan dapat dipahami bahwa Pancasila secara eksplisit ditiadakan dari kurikulum, artinya pancasila sudah tidak dipandang penting.
4. Kurikulum yang dijadikan acuan mengembangkan program pendidikan nampaknya baru didasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan, sebagaimana yang dinyatakan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasio-

nal No. 22 dan No. 23 tahun 2006. Jika hanya dua standar ini yang dijadikan acuannya, maka proses pendidikan belum dapat dijamin memiliki efektivitas yang tinggi sebagaimana seharusnya.

5. Kualifikasi dan kompetensi guru masih *under-qualified*. Jika mengacu pada tuntutan undang-undang dan kualitas pendidikan yang diharapkan, mayoritas kualifikasi dan kompetensi guru masih jauh dari yang seharusnya.
6. Proses pembelajaran dan pendidikan yang ada cenderung masih di bawah standar. Hal ini diperkuat bahwa proses pembelajaran dan pendidikan cenderung hanya menuntut *low level thinking skills, misalnya lebih banyak menuntut hafalan.* Demikian juga proses belajaran lebih cenderung *one-way trafic system* dan kurang melibatkan peserta didik.
7. Sistem evaluasi pendidikan yang digunakan belum komprehensif. Sistem evaluasi pendidikan lebih cenderung mengandalkan penilaian akademik untuk menentukan keberhasilan pendidikan peserta didik, misalnya hanya melalui keberhasilan mengikuti Unas, di samping belum melibatkan aspek-aspek lainnya, sehingga terjadi ketidak-ajegan dalam proses pendidikan, karena tidak sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Masih rendahnya profesionalisme pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan atau birokrasi pendidikan masih menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang belum menggembirakan, diindikasikan dengan beberapa hal, di antaranya: penentuan pejabat di lingkungan pendidikan tidak selalu ber-*track record* baik di bidang pendidikan; penentuan kepala sekolah dan penempatannya masih kurang transparan, sehingga tidak selalu diperoleh *the right man on the right place*.
9. Ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan masih terbatas. Sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia masih belum mencukupi, terlebih-lebih untuk sekolah dasar yang sebagian besarnya merupakan bangunan inpres (Instruksi Presiden). Demikian pula sarana-prasarana Sekolah Menengah yang ada di daerah pedesaan, apalagi sekolah-sekolah yang tersedia di pedesaan jauh lebih banyak. Kalau sekiranya sudah tersedia, masih dijumpai cukup banyak yang belum dioptimalkan penggunaannya.
10. Sistem pengawasan penyelenggaraan pendidikan cenderung dilakukan oleh pengawas yang masih belum membanggakan, karena penentuan pengawas seringkali tidak didasarkan pada kompetensi, melainkan karena usia, apalagi sering kali penentuan pengawas hanya ditentukan oleh kepentingan untuk memperpanjang masa pensiun.

Idealita Sistem Pendidikan Nasional

Setelah memperhatikan sejumlah persoalan berkenaan dengan praktek pendidikan nasional dewasa ini, kiranya ke depan sistem pendidikan nasional seyogyanya dapat diwujudkan sebagaimana dapat dirumuskan berikut ini:

1. Segala peraturan perundang-undangan organik bidang pendidikan perlu diakselerasi penyelesaiannya dengan tetap mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak terkait, terutama para stakeholders, baik pada level pusat, daerah, maupun institusi, sehingga dapat memperlancar operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan untuk semua jenjang, jenis dan satuan pendidikan. Untuk menghindari adanya benturan antara satu peraturan dan lainnya, perlu diupayakan secara optimal koherensinya.
2. Sistem pendidikan nasional yang digalakkan perlu ditekankan adanya pembebasan dari diskriminasi perlakuan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip HAM, sehingga demokratisasi pendidikan dapat dijamin di muka bumi Indonesia. Dalam penyelenggaran pendidikan harus terus dihindarkan dari upaya marginalisasi warga tak beruntung, dan sebaliknya perlu terus digalakkan keberpihakan terhadap mereka, sehingga martabatnya tetap terjaga.
3. Keberadaan peserta didik, baik sebagai input, sebagai unsur penting dalam proses pendidikan, maupun sebagai unsur penting dalam evaluasi pembelajaran atau pendidikan, perlu diapresiasi eksistensinya, apakah terkait baik dengan kondisi dan kemampuannya, maupun kinerjanya. Dalam situasi yang demikian bahwa penekanan yang lebih penting, bukan terletak pada keberhasilan atau kegagalannya dalam mengikuti proses pendidikan, melainkan sejauh mana peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya.
4. Kurikulum dalam praktek *(Curriculum in action)* yang dibangun sebaiknya mempertimbangkan beberapa aspek penting, tidak hanya bertumpu pada standar-standar yang ada (apakah standar isi dan standar kompetensi lulusan), melainkan juga potensi dan kebutuhan peserta didik serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Selain daripada itu untuk menjamin bahwa Pancasila menjadi dasar sistem pendidikan nasional, maka nilai-nilai Pancasila seharusnya dapat diakomodasi, terutama lewat mata pelajaran Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan bahasa Indonesia, di samping mata pelajaran-mata pelajaran lainnya. Untuk itu sangat diperlukan suatu rambu-rambu implementasi nilai-nilai Pancasila, sehingga memudahkan para guru, di samping tenaga kependidikan lainnya. Cara ini boleh jadi lebih efektif daripada cara yang digunakan pada kurikulum sebelumnya yang secara eksplisit ada mata pelajaran

Pendidikan Pancasila, tetapi sangat kental dengan muatan politisnya, sehingga pendekatan yang digunakan cenderung bersifat dogmatis yang kurang bernuansa humanis, bahkan tidak membuka peluang yang cukup untuk berpikir dan bersikap kritis. Akibatnya banyak terjadi kontra produktif. Selain itu, untuk menjamin adanya kemampuan adaptif para peserta didik, kiranya *hidden curriculum* perlu dipertimbangkan dan diakomodasi dalam implementasi kurikulum, sehingga setiap guru harus menyadari akan pentingnya dan perlunya mentransformasikan *hidden curriculum* dalam proses pembelajaran dan pendidikan yang menjadi tanggungjawab mereka.

5. Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perlu terus diupayakan seiring dengan tuntutan guru, dosen, dan pendidik lainnya sebagai tenaga profesi. Untuk menjamin keprofesionalan guru, organisasi profesi perlu dijauhkan dari kepentingan politis yang berlebihan, di samping perlu terus dijaga komitmennya dengan kepentingan profesional, termasuk dalam penegakan kode etik organisasi profesi. Sertifikasi guru atau dosen, seyogyanya tidak bersifat permanen, melainkan temporal guna menjamin kepentingan layanan publik yang memuaskan. Karena itu legalisasi sertifikat profesi pendidik untuk guru dan dosen seharusnya bersifat periodik. Persoalan *time frame*-nya perlu dirumuskan berdasarkan hasil kajian dan konvensi di antara para *stakeholders*.
6. Efektivitas suatu pengelolaan persekolahan tidak dapat dilepaskan dari peran penting kepemimpinan pendidikan *(educational leadership)*. Pimpinan institusi pendidikan yang efektif dan produktif seharusnya menjaga *common values and goals*, sehingga institusi yang dipimpinnya memiliki efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Pimpinan institusi pendidikan seharusnya mampu menunjukkan lebih pada *academic leadership* daripada *beurocratic leadership*. Demikian juga dalam konteks Indonesia, kepemimpinan pendidikan hendaknya diorientasikan kepada pemberian keteladanan, membangun kemauan, dan mendorong kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran dan pendidikan.
7. Proses pembelajaran dan pendidikan yang efektif hendaknya lebih didorong untuk *transfer of principle* daripada *transfer of information*, mengutamakan berpikir kreatif *(divergent thinking)* daripada berpikir konformis *(convergent thinking),* menekankan *cooperative learning* daripada *competitive learning.* Demikian juga dalam proses pembelajaran dan pendidikan hendaknya di samping peduli pada *instructional effect*, tetapi juga terhadap *nurturant effect.*
8. Untuk menjamin hasil pendidikan yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan institusional, maka sistem evaluasi pembelajaran dan pendi-

dikan yang perlu ditegakkan hendaknya difokuskan pada penilaian aspek non akademik (moral, kepribadian, keterampilan) yang sama pentingnya dengan aspek akademik, sehingga bentukan lulusannya dapat mencerminkan individu yang utuh.

9. Seiring dengan otonomi pendidikan, maka guna menjamin keutuhan bangsa dan negara sungguh diperlukan keseimbangan pengelolaan pendidikan dengan prinsip *balancing decentralization and centralization (Bauman, 1996).* Dengan demikian akan terjamin kekuatan dan keunggulan lokal tetap terjaga, sementara itu keutuhan negara kesatuan juga terjaga. Sebagaimana yang dikemukakan Tilaar (2002), bahwa pendidikan nasional hendaknya dapat menjadi perekat bangsa. Kendatipun otonomi diberikan sepenuhnya kepada kepala daerah, untuk jabatan struktural bidang pendidikan akan jauh bisa dikendalikan manakala ditangani oleh orang-orang yang menguasai bidang pendidikan. Dengan demikian diharapkan kepentingan profesional lebih diutamakan daripada kepentingan politis.
10. Standar sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan perlu segera dirumuskan yang selanjutnya perlu diupayakan perwujudannya guna menunjang pencapaian pendidikan yang bermutu. Walau demikian, untuk menjamin praktek pendidikan yang terlepas dari lingkungan fisik, sosial dan budayanya, perlu mempertimbangkan dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber dan fasilitas pendidikan yang berarti. Di samping upaya ini dapat meningkatkan efisiensi, sangatlah mungkin dapat mendorong peningkatan kreativitas, karena terbuka untuk berkreasi dan bertindak secara kontekstual.
11. Untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan, maka program pengawasan perlu diarahkan kepada pengawasan kinerja *(performance audit),* terutama dikaitkan dengan pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan satuan pendidikan yang dilanjutkan dengan pembinaan sehingga kegiatan pengawasan dapat memberikan manfaat. Guna menjamin kehadiran sistem pengawasan yang efektif, kiranya rekrutmen tenaga pengawas perlu dilakukan secara profesional dengan terus dilakukan pembinaan, sehingga dapat bertindak secara profesional.
12. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak bisa diabaikan, karena itu untuk menegakkan sistem pendidikan nasional sangat memerlukan TIK, baik untuk kepentingan manajerial maupun instruksional. Untuk menjamin efektivitas TIK perlu diproteksi dari intervensi yang mengkontaminasi proses dan produk pendidikan nasional.

Hambatan dan Tantangan

Dalam rangka menegakkan sistem pendidikan nasional, dapat diidentifikasi ada beberapa hambatan dan tantangan yang perlu dihadapi. *Pertama*, hambatan yang terkait dengan kelembagaan, personalia, anggaran, fasilitas, dan dukungan masyarakat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelembagaan pendidikan yang sudah dirancang melalui RUU BHP cenderung memiliki potensi masalah, terutama bagi pendidikan dasar dan menengah. Jika hal ini tidak segera diantisipasi alternatif solusinya, diduga akan menjadi persoalan dan hambatan yang serius bagi kelancaran pengelolaan pendidikan. Demikian juga posisi institusi pendidikan di bawah Depdiknas dan Depag, di bawah pengelolaan pemerintah dan swasta.
2. Setelah penyelenggaraan pendidikan diotonomikan, ada kecenderungan bahwa penentuan para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan kurang begitu mempertimbangkan *track-record*-nya. Demikian pula dalam penentuan Kepala sekolah tidak jarang muatan politisnya lebih menonjol, sehingga berkonsekuensi logis terhadap rendahnya kemandirian kerja mereka. Yang juga sangat penting disadari, bahwa hampir 2/3-nya dari seluruh pendidik belum memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana yang diharapkan dalam UUGD.
3. Anggaran pendidikan yang ditetapkan dengan ukuran minimal 20 %, baik untuk APBN maupun APBD, pada hakekatnya berpotensi bagi tingkat kelancaran penyelenggaraan pendidikan. Jika dikaitkan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, maka paling tidak, perlu disadari bahwa 20% APBN dan APBD yang diungkapkan dalam UU No. 20 tahun 2005 tentang Sisdiknas Bab XIII dan pasal 49, menurut hemat penulis, dana yang dialokasikan untuk Pemerintah dan Pemerintah Provinsi relatif terlalu tinggi, jika dikaitkan dengan kewenangan yang diberikan. Sebaliknya dana yang dialokasikan di pemerintah kabupaten relatif sedikit jika dikaitkan dengan kewenangan tanggung jawab yang harus dipikul, terutama sebagai penyelenggara pendidikan dasar dan menengah.
4. Sarana dan prasarana pendidikan yang jauh memadai dari ukuran standar secara potensial dapat menghambat proses pendidikan, apalagi jika dikaitkan dengan dinamika masyarakat dan kemajuan ipteks dewasa ini. Fasilitas untuk akses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi yang sudah mendesak tidak dapat dihindarkan. Jika kondisi ini tidak segera da-

pat diwujudkan, sangat mungkin ketertinggalan bangsa Indonesia dalam mencapai pendidikan bermutu menjadi problem yang serius.

5. Jika dicermati sungguh-sungguh, dukungan masyarakat, terutama masyarakat dunia usaha dan dunia industri (DUDI) terhadap penyelenggaraan semua jenjang pendidikan masih terbatas. Padahal tanggung jawab pendidikan ada di pundak pemerintah, sekolah, dan masyarakat. DUDI cenderung menanti lulusan untuk rekrutmen tenaga barunya, tanpa ada *sharing* yang cukup dalam proses pendidikannya.

*Kedua***,** tantangan yang dapat muncul terkait dengan arus globalisasi, arus informasi, kemajuan ipteks, dapat digambarkan lebih detail sebagai berikut:

1. Globalisasi memungkinkan adanya akses yang terbuka, terutama dalam kehidupan ekonomi. Dengan begitu transaksi ekonomi tidak ada pembatasan yang mutlak, sejak terhitung saat konvensi telah disepakati. Ketidaksiapan setiap warga negara Indonesia dalam berkompetisi dapat menyebabkan bangsa Ini akan menjadi tamu di negara sendiri. Di samping itu globalisasi jika tidak diantisipasi dapat mengancam eksistensi Indonesia sebagai suatu negara.
2. Arus informasi yang begitu deras seiring dengan globalisasi tidak dapat dibendung dengan mudah. Lebih membahayakan lagi jika arus informasi itu memiliki muatan nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pengendalian dan filterisasi pengaruh budaya luar yang tidak dapat dilakukan secara efektif dan mantap, cenderung dapat merusak sendi-sendi nilai bangsa, bahkan bisa mengancam disintegrasi.
3. Kemajuan ipteks selain mendatangkan kesejahteraan, juga berdampak negatif terhadap kesehatan lingkungan dan polusi-polusi lain yang membahayakan kesehatan manusia. Untuk memanfaatkan kehadiran kemajuan iptkes, sangat dituntut bangunan masyarakat yang berbasis pengetahuan.

Strategi Pendidikan Nasional

Untuk menegakkan Sistem Pendidikan Nasional yang mampu memberikan makna bagi kehidupan bangsa, dapat dilakukan melalui beberapa strategi. *Pertama,* **Gerakan peduli pendidikan.** Strategi ini diharapkan dapat mendorong semua pihak mampu berkiprah terhadap terjadinya praktek pendidikan yang efektif, baik pendidikan formal, non formal, maupun informal. Karena pendidikan dipandang sebagai upaya yang strategis dalam memanusiakan maunusia. Dengan demikian semua pihak diharapkan bisa menunjukkan andil yang sebesar-besarnya terhadap terjadinya proses pendidikan.

Kedua, **Semua mengawal mutu.** Mutu pendidikan sangatlah berarti bagi upaya mengangkat martabat individu, masyarakat dan bangsa. Karena itu semua pihak, yang di antaranya: guru, orangtua, kepala sekolah, dan terutama peserta didik sendiri menjadi faktor penting dalam menentukan mutu pendidikan. Keseriusan dan komitmen yang tinggi di antara mereka menjadi kunci utama dalam mengantarkan mutu pendidikan.

Ketiga, **Pendidikan moral menjadi tanggung jawab semua.** Untuk menjamin kedamaian hidup di Indonesia khususnya, dan di muka bumi pada umumnya, setiap insan Indonesia perlu membekali diri dengan pendidikan moral yang memadai, sehingga dapat mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Karena itulah semua pihak diharapkan mau berpartisipasi secara ikhlas untuk mengawal pendidikan moral, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat.

Keempat, ***Political will*** **para eksekutif dan legislatif.** Adanya *political will* para eksekutif dan legislatif memiliki kontribusi yang berarti bagi perumusan kebijakan dan jaminan peraturan perundang-undangan yang memperlancar proses pendidikan yang bermutu bagi semua warga negara, tanpa perkecualian karena alasan apapun. Tapi perlu dicatat, seperti yang dikemukakan oleh Tilaar (2006) bahwa untuk kepentingan membangun manusia utuh melalui pendidikan nasional seharusnya dihindari dari kepentingan politik.

Kelima, **Pemantapan pendidikan seumur hidup.** Rentangan hidup manusia dari lahir sampai meninggal dunia selalu dihadapkan berbagai persoalan hidup yang tiada henti di mana pun mereka berada. Untuk menjamin eksistensi kehidupan insan Indonesia, baik untuk dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, kiranya pendidikan seumur hidup seharusnya menjadi kebutuhan setiap insan Indonesia, tanpa terkecuali. Sebagaimana yang ditegaskan dalam prinsip-prinsip pendidikan nasional, yaitu *life-long learning.*

Keenam, **Perlunya menjaga konsistensi inovasi pendidikan.** Pembaharuan pendekatan atau paradigma pendidikan atau apapun yang terkait dengan praktek pendidikan akan lebih bermakna manakala tetap dijaga konsistensinya dengan sistem pendidikan nasional dan pandangan terhadap peserta didik sebagai insan Indonesia yang utuh. Jika hal ini tidak mendapat perhatian yang cukup, bahkan diabaikan, boleh jadi kehadiran inovasi pendidikan sangat bersifat pragmatis dan tidak memiliki nilai ideal.

Penutup

Sistem Pendidikan Nasional yang terus diperbaharui seiring dengan Amandemen UUD 1945 dan perubahan paradigma kebijakan publik, nampaknya tak bisa lepas dari sorotan dari berbagai pihak, baik yang bersifat personal, kolektif,

maupun institusional. Mereka sangat menghendaki bahwa sistem pendidikan nasional dapat memuaskannya, baik pada tataran konsep maupun praktik.

Memang pada kenyataannya dalam batas tertentu konsep dan praktek sistem pendidikan nasional, di samping telah memberikan kepuasan banyak pihak, juga belum bisa memberi kepuasan beberapa pihak. Untuk itulah perlu terus diupayakan pembenahan pada level konsep sampai pada level operasional. Yang sering terjadi pada tataran konsep baik, namun ternyata pada tataran operasional tidak tampil optimal, misalnya praktek tidak didukung dengan kinerja yang profesional, sehingga hasilnya masih belum memuaskan.

Atas dasar itulah memantapkan dan menegakkan sistem pendidikan nasional perlu terus diupayakan, sehingga sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila mampu mencerdaskan kehidupan rakyat, yang pada akhirnya mampu menjunjung tinggi martabat bangsa Indonesia, karena sistem pendidikan nasional mampu menghasilkan insan yang beriman, bertaqwa, beradab, cerdas, produktif, dan mampu memberikan manfaat, baik bagi dirinya sendiri, sesama manusia, bangsa, maupun lingkungan pada umumnya.

Tulisan ini disampaikan dalam Sarasehan dalam rangka memperingati Hari lahir Pancasila dari Klaster Pendidikan dengan tema "Sistem Pendidikan Nasional untuk Membangun Peradaban Indonesia yang dijiwai oleh Nilai-nilai Pancasila" pada 30 April - 1 Mei 2007 di Balai Senat UGM Bulaksumur Yogyakarta).

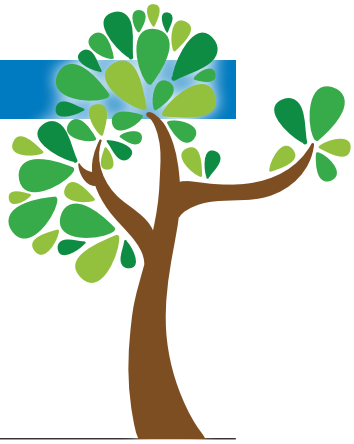

Mengkritisi Sistem Pendidikan Nasional, Aktualisasi Otonomi Pendidikan dan Alokasi Anggaran Pendidikan

Pengantar

Dewasa ini Indonesia menghadapi dua persoalan penting yang tidak dapat dihindari, yaitu persoalan internal berkenaan kondisi krisis multidimensional dan adanya gerakan reformasi, serta persoalan eksternal berkenaan dengan perdagangan bebas dan gerakan globalisasi. Diyakini bahwa untuk menghadapi persoalan ini upaya yang paling efektif adalah melalui strategi pendidikan, karena pendidikan dipandang mampu memenuhi *capasity building,* baik personal maupun institusional.

Menyadari akan eksistensi pendidikan dalam proses pembangunan bangsa Indonesia, maka pembaharuan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya yang harus dilakukan, sehingga dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi dan akan terjadi di Indonesia. Karena itulah substansi UU Sisdiknas relatif berbeda dengan substansi UU Sisdiknas sebelumnya, karena sebagai konsekuensi dari perubahan yang terjadi.

Untuk dapat memahami Sistem Pendidikan Nasional dan beberapa implikasinya, maka selanjutnya akan dibahas lebih lanjut:

Memahami Sistem Pendidikan Nasional

Dalam memahami Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), setidak-tidaknya ada beberapa poin penting. Poin-poin penting tersebut di antaranya adalah hakekat pendidikan, tujuan pendidikan nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan, subjek pendidikan, ketenagaan, kurikulum, kelembagaan, evaluasi, dan partisipasi masyarakat

Pertama, hakekat pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya sadar dalam mendewasakan individu sebagai co-subjek objek, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, yang memungkinkan individu dapat mewujudkan

dirinya sesuai dengan fitrahnya, baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai khalifah di atas bumi. Karena itu diupayakan jangan sampai terjadi reduksi pemahaman, sehingga hakekat pendidikan memiliki makna tidak lebih baik daripada pengajaran *(instruction)*.

Kedua, bahwa sadar akan tujuan nasional, maka tujuan pendidikan nasional lebih difokuskan pada usaha membentuk manusia seutuhnya (*insan kamil*), yaitu manusia yang mampu menunjukkan sebagai hamba Tuhan yang memiliki jati diri dan kemandirian, sebagai makhluk Tuhan termulia yang memiliki kesalehan sosial, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi manusia lainnya, melainkan juga bagi keseluruhan lingkungan yang melingkupi dirinya. Kandungan makna di balik rumusan tujuan pendidikan nasional adalah sangat luas dan kaya, namun semuanya itu membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh untuk merealisasikannya, karena pada kenyataan historis bahwa menjabarkannya ke dalam rencana tindakan merupakan suatu pekerjaan yang sangat sulit.

Ketiga, bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu substansi yang dipandang sangat esensial dalam melandasi model sistem pendidikan nasional yang pada UU Sistem Pendidikan Nasional sebelumnya tidak pernah ada. Dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dirumuskan sejumlah kata, frase, dan kalimat kunci yang sangat penting dalam menegakkan dan mengembangkan penyelenggaraan pendidikan, sehingga benar-benar mampu mengantarkan setiap insan manusia menjadi warga negara yang bermartabat. Beberapa prinsip-prinsip yang patut diangkat, di antaranya bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif; pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna; pendidikan diselenggarakan dengan mengacu pada *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso*, dan *tutwuri handayani*; dan sebagainya. Namun pada kenyataannya tidak mudah mengaktualisasikan nilai-nilai luhur yang terkandung tersebut. Untuk itu perlu upaya bersama yang sinergis dan produktif dalam mensukseskannya.

Keempat, bahwa subjek pendidikan mencakup semua anak bangsa tanpa dikecualikan oleh potensi, karakteristik, jenis kelamin, ras, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Hal ini merupakan konsekuensi logis demokrasi yang ditegakkan. Secara jujur untuk merealisasikannya yang ideal tidaklah mudah. Untuk itulah dibutuhkan suatu pengorbanan yang tulus dari semua pihak, terutama orangtua, guru, sekolah, dunia industri dan bisnis.

Kelima, bahwa ketenagaan dalam melayani anak di jenis pendidikan apa pun dibutuhkan tenaga yang handal dan profesional. Karena tidak sedikit ditemukan di lapangan, bahwa secara kuantitatif sudah tersedia tenaga gurunya secara memadai, namun secara kualitatif kondisi dan kinerja tenaga masih be-

lum banyak yang memenuhi kriteria kompetensi minimal. Karena itu pembuatan program pembinaan perlu terus diupayakan.

Aktualisasi Penyelenggaraan Pendidikan dalam Otonomi Pendidikan

Berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan, ada sejumlah aspek penting, terutama dikaitkan dengan otonomi pendidikan.

Pertama, debirokratisasi. Menyadari akan berbagai hambatan sistem dan birokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan, maka dalam era otonomi pendidikan banyak hal yang perlu ditinjau ulang berbagai aturan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, di samping pembuatan keputusan dalam pembuatan program pendidikan dan implementasinya. Upaya yang demikian dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Hanya saja perlu dicermati bahwa tidak semua orang yang diserahi dalam birokrasi pendidikan memiliki kualifikasi yang sesuai, sehingga debirokratisasi justru menimbulkan banyak pemborosan yang tidak harus terjadi.

Kedua, desentralisasi dan dekonsentrasi. Diasumsikan bahwa ujung tombak pendidikan di daerah lah yang jauh lebih mengetahui kondisi objektif dan potensi daerahnya sendiri, sehingga desentralisasi dan dekonsentrasi merupakan cara yang lebih efektif dalam mengembangkan pengelolaan birokrasi pendidikan. Perencanaan yang dibuat dari bawah dengan mempertimbangkan visi dan misi pendidikan nasional, diharapkan dapat menghasilkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan. Pada prakteknya, daerah sudah mampu membuat program sesuai dengan kebutuhannya, walaupun masih jauh dari ideal, karena ada sejumlah daerah yang masih mengandalkan program yang dibuat pusat.

Ketiga, Manajemen Berbasis Sekolah. Berdasarkan UU Sisdiknas, manajemen pendidikan bertumpu pada sekolah, artinya bahwa kepala sekolah dan guru merupakan tumpuan membangun kualitas pendidikan, dengan dukungan orangtua dan masyarakat. Dalam konteks ini, sekolah memiliki kebebasan yang tinggi dalam menentukan visi dan misinya. Hanya saja sampai kini baru sejumlah kecil sekolah yang sudah mampu menunjukkan kemampuannnya dalam mengembangkan program dan melaksanakannya. Yang demikian terjadi diduga bisa disebabkan oleh rasa terbelenggu oleh cara lama, keengganan untuk berubah, atau kekurangberanian membuat keputusan baru.

Keempat, Otonomi Kampus. Kampus, terutama sebagai institusi pendidikan tinggi yang berstatus negeri dalam batas tertentu, menjadi bagian dari birokrasi harus menunjukkan ketundukannya kepada pemerintah. Namun kampus, tanpa memandang statusnya, merupakan wilayah kekuasaan tersendiri yang memiliki karakteristik tertentu sebagai masyarakat ilmiah. Karena itulah

kampus memiliki otonomi yang sangat tinggi, terlebih-lebih dikuatkan dengan gerakan demokratisasi pendidikan. Otonomi kampus yang tinggi ternyata belum mampu menjadi contoh yang baik dalam mengembangkan demokrasi.

Anggaran Pendidikan berdasarkan Sisdiknas dan kemungkinan Aktualisasinya

Pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Artinya, penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, pemerintah, atau masyarakat saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama-sama, sesuai dengan tingkat kepentingannya. Terutama untuk tingkat pendidikan dasar, pada hakekatnya lebih menjadi tanggung jawab pemerintah, karena pendidikan dasar merupakan *public goods*. Sedang pendidikan menengah ke atas dapat diklaim sebagai tanggung jawab bersama, bahkan masyarakat harus menopangnya, karena pendidikan menengah ke atas merupakan *private goods*.

Sungguh disayangkan, bahwa pendidikan dasar belum sepenuhnya menjadi *public goods*, karena terbukti bahwa pemerintah belum secara total mampu mengupayakan semua peserta didik pendidikan dasar terbebaskan dari biaya pendidikan. Apalagi untuk memenuhi tingkat kualitas tertentu. Padahal membangun pendidikan yang berkualitas secara keseluruhan harus bermula dari terbangunnya pendidikan dasar yang benar-benar berkualitas.

Perlu diketahui bahwa selama ini pendidikan lebih banyak ditopang oleh keluarga dan masyarakat. Padahal yang seharusnya menjadi *stakeholders* pendidikan juga para dunia industri dan bisnis. Karena itulah dunia industri dan bisnis merupakan potensi besar dalam pendanaan pendidikan.

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Dewasa ini telah diupayakan pengelolaan dana pendidikan secara penuh tanggung jawab. Namun pada kenyataannya masih perlu kerja keras dalam menentukan pembagian dana secara adil dengan mempertimbangkan beberapa kondisi dan latar belakang.

Berdasarkan UUD 1945 dan UU Sisdiknas, anggaran pendidikan untuk operasional pendidikan seharusnya sekitar 20% APBN dan APBD. Angka ini secara politis sangat berarti, karena selama ini anggaran pendidikan tak pernah melebihi dari 5% dari APBN dan APBD. Menurut hemat penulis, angka 20% belum menunjukkan solusi yang efektif, karena tugas pokok dan fungsi antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota berbeda. Agar lebih fair, anggaran pendidikan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota seharusnya lebih dari 20% dari APBD-nya. Demikian pula anggaran pendidikan untuk pemerintah daerah propinsi bisa lebih kurang dari 20%.

Selain itu, secara akademik pada dasarnya penentuan anggaran pendidikan seharusnya tidak menggunakan ukuran yang dibandingkan dengan APBN, namun yang lebih efektif, berapa *unit cost* setiap unit pendidikan untuk ukuran kualitas tertentu. Karena itu ukuran persentase anggaran jika dibandingkan dengan APBN, seharusnya bersifat fluktuatif, tergantung pada kebutuhan untuk mencapai tingkat kualitas yang diinginkan.

Beberapa Persoalan dan Alternatif Solusinya

Selain dari persoalan-persoalan di atas, yang perlu mendapat sorotan lebih jauh di antaranya persoalan kurikulum, metodologi, evaluasi, dan ketenagaan.

*Pertama***,** kurikulum. Akhir-akhir ini kurikulum menjadi sorotan semua, karena kurikulum sebagai suatu komponen pendidikan sangat mewarnai lulusan yang akan dihasilkan oleh setiap jenjang dan jenis pendidikan. Bahkan berbagai segemen masyarakat masih mempertanyakan relevansi kurikulum yang sedang dalam proses sosialisasi. Untuk dapat menjamin efektivitas kurikulum, maka upaya modifikasi desain dan implementasi kurikulum perlu terus dimantapkan, sehingga benar-benar dapat mendukung tercapainya visi dan misi pendidikan yang telah dirumuskan.

*Kedua***,** metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan salah satu kunci keberhasilan proses pembelajaran. Namun yang terjadi dewasa ini sebagian besar proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran konvensional yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi dengan tujuan dan materi yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.

Ketiga, evaluasi pendidikan dan pembelajaran. Menentukan keberhasilan pendidikan peserta didik pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sangat esensial dalam sistem pendidikan persekolahan, terutama berkenaan dengan pembuatan keputusan tentang kualitas individu dan institusi.. Hanya saja apa yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan pendidikan evaluasi pendidikan dan pembelajaran belum dilakukan secara profesional, sehingga masih menimbulkan banyak keresahan. Bertitik tolak dari itulah maka perlu terus diupayakan adanya perbaikan sistem evaluasi, dengan melakukan penilaian secara komprehensif yang menempatkan semua domain pendidikan (afektif, kognitif, dan psikomotor) dalam posisi yang seimbang, sesuai dengan kepentingannya.

Keempat, ketenagaan. Banyak faktor yang ikut menentukan kualitas pendidikan, salah satu yang sangat penting adalah keprofesionalan tenaga kependidikan. Keberadaan tenaga kependidikan dewasa ini untuk semua jenjang sudah diupayakan peningkatan kualitasnya, baik melalui *preservise training* maupun

in service-training. Akan tetapi kenyataannya masih jauh dari apa yang diharapkan, apakah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Karena itulah ke depan perlu diupayakan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga tenaga kependidikan dapat mengendalikan dan mengerahkan segala aktivitas pendidikan secara efektif dan efisien. Perlu diketahui bahwa tenaga kependidikan lainnya yang tidak kalah pentingnya, selain guru dan kepala sekolah, adalah konselor dan pengawas (supervisor). Kehadiran tenaga kependidikan ini dengan penampilan yang profesional diharapkan mampu memberikan pencerahan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

Implikasi bagi Penyelenggaraan Pendidikan Islam

Setelah mengikuti uraian-uraian di atas, maka implikasi bagi penyelenggaraan pendidikan Islam, di antaranya :

1. Untuk dapat membangun sistem pendidikan Islam yang mantap, kiranya diperlukan sekali suatu kontruksi filosofi dan teori pendidikan yang mantap, sehingga mampu menghasilkan insan kamil.
2. Anak sebagai subjek pendidikan seharusnya dipandang sebagai individu yang sesuai dengan fitrahnya, sehingga kehadirannya di hadapan Allah swt setelah melalui proses pendidikan tidak tertolak dan tidak akan pernah tertolak.
3. Program pendidikan Islam akan memiliki efektivitas yang tinggi, manakala dalam pengembangan dan formulasinya mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan anak, serta tuntutan zaman dan lingkungan.
4. Metodologi pendidikan dan pembelajaran agama Islam yang relevan dan efektif, manakala mempertimbangkan kasih sayang dan keteladanan sebagai andalannya, dengan tetap mengakomodasi metode-metode lain yang dipandang tepat, sehingga mampu menfasilitasi terciptanya kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang menyenangkan.
5. Penyelenggaraan Pendidikan Islam yang selama ini sebagian besarnya dikelola secara otonom kiranya mendapat legitimasi dan penguatan, sehingga untuk dapat lebih produktifnya perlu terus diupayakan peningkatan profesionalisme manajemennnya.
6. Untuk dapat menjamin keberhasilan misi pendidikan Islam, kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan seharusnya menjadi syarat kunci. Oleh karenanya, peningkatan wawasan, keterampilan, dan perbaikan sikap dan nilai bagi tenaga kependidikan pendidikan Islam. perlu terus diupayakan.
7. Evaluasi yang efektif dan bertanggungjawab bagi pendidikan Islam sebenarnya tidaklah bergantung pada aspek kognitif, melainkan yang jauh lebih

penting adalah aspek afektif dan psikomotor, karena dapat dikatakan individu itu memiliki nilai yang baik untuk pendidikan agama, bukan hanya pencapaian prestasi akademiknya semata, melainkan amaliahnya yang dilakukan dengan keajegan dan kesungguhan.

8. Akhirnya bahwa penyelenggaraan pendidikan Islam yang hidup matinya sangat bergantung pada dana masyarakat, kiranya sebagai konsekuensi logis dari tanggung jawab pendanaan pendidikan yang berada di tangan bersama, maka sudah saatnya pemerintah dan pemerintah daerah terus meningkatkan dukungannya secara adil.

Penutup

Demikianlah beberapa pokok pikiran dalam mengkritisi Sistem Pendidikan Nasional, otonomi pendidikan dan alokasi anggoran pendidikan. Sistem pendidikan yang baik tidak hanya terbatas pada rumusan konsep, melainkan yang jauh lebih penting adalah mengimplementasikannya secara bertanggung jawab. Semoga paparan ini dapat mentriger untuk bangkitnya diskusi yang lebih hangat.

Tulisan ini Disajikan dan dibahas dalam Seminar Nasional Pendidikan, yang diselenggarakan PP Al-Ihya Ulumuddin dan BEM Institut Agama Islam Al-Ghazali, Cilacap pada tanggal 12 Agustus 2004.

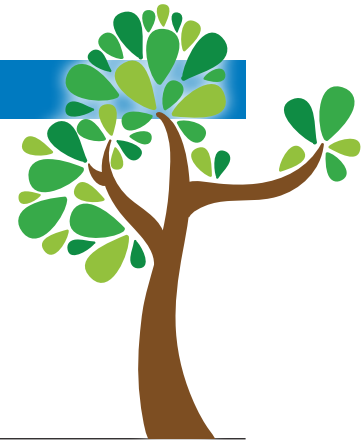

Implementasi Prinsip Keadilan Sosial Bidang Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi

Pengantar

Salah satu tujuan pendirian negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub pada pembukaan UUD 1945. Artinya, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam kehidupan bangsa Indonesia, terlebih-lebih sangat berarti ketika peranannya dalam membekali setiap insan Indonesia untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks dan kompetitif.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, sehingga sudah sepatutnya jika kita selalu memperbanyak rasa syukur kepada Tuhan Yang Rahman dan Rahiim atas nikmat yang tidak ternilai harganya dan tak terhitung banyaknya. Namun perlu disadari, bahwa sumber daya alam yang terus dikonsumsi dan dimanfaatkan dari waktu ke waktu tentu akan semakin habis. Karena itulah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia di masa depan, di tengah-tengah terbatasnya sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia (SDM) sudah tidak bisa dielakkan dan menjadi kebutuhan semua pihak.

Diyakini sepenuhnya bahwa strategi yang paling efektif dalam pengembangan SDM adalah pendidikan yang mantap. Pemerintah dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah mengawal pembangunan pendidikan dari masa ke masa. Telah banyak hasil yang dapat dicapai dan dirasakan. Namun secara objektif banyak hal yang perlu terus diupayakan untuk membangun pendidikan yang lebih efektif dan fungsional, sehingga mampu memberi kemampuan dan bekal bagi setiap insan Indonesia.

Pada kenyataannya, layanan pendidikan, terutama melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, belum dapat diakses oleh semua warga negara, terutama bagi kelompok tak beruntung, baik terkait dengan aspek fisik, mental, intelektual, geografis, ekonomis, kultural, maupun gender. Atas dasar itulah

melalui semangat reformasi, UUSPN/UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 mengamanatkan melalui salah satu pasalnya tentang prinsip pendidikan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Prinsip pendidikan tersebut seyogyanya dijadikan acuan dalam memberikan layanan pendidikan nasional, namun pada prakteknya tidak sedikit pemerintah dan masyarakat belum berhasil mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Banyak faktor yang belum mendukung sepenuhnya dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, terlebih di era pasca reformasi. Untuk itu dapat diidentifikasi dan dicarikan solusinya, sehingga pendidikan untuk semua dapat diwujudkan, sehingga dapat memberi kepuasan bagi semua.

Konsep dan Landasan Legal Keadilan

Lahirnya prinsip-prinsip pendidikan pada hakekatnya tidak bisa dilepaskan dari misi reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Salah satu agendanya yang paling penting adalah menegakkan keadilan bagi semua, yang dilandasi oleh nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Keadilan memang penting, apalagi keadilan tidak bisa dipisahkan dari dasar negara kita, Pancasila. Lebih khususnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan merupakan kata kunci dalam konteks ini. Untuk mengetahui makna keadilan lebih mendalam, secara konseptual di antaranya dapat mengacu pada pendapat Murtadla al Muthahhari (Nurkholis Madjid, 1992) bahwa keadilan dapat dipahami melalui empat pengertian pokok:

Pertama, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang *(mawzan, balanced),* tidak pincang.

Kedua, keadilan mengandung makna persamaan *(musawah, ega-lite)* dan tiadanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Maka salah satu maksud ungkapan bahwa seseorang telah bertindak adil ialah jika ia memperlakukan semua orang secara sama.

Ketiga, pengertian keadilan tidak utuh jika kita tidak memperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa yang berhak *(ithaa kulli dzii haqqq haqqahuu).* Maka kedzaliman dalam kaitannya dengan pengertian ini ialah perampasan hak dari orang yang berhak, dan pelanggaran hak orang yang tak berhak.

Keempat, keadilan Tuhan *(al-'Ad'l al-Ilaahii),* berupa kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediannya untuk menerima eksistensi dirinya sendiri dan pertumbuhannya ke arah kesempurnaan.

Di antara keempat pengertian keadilan tersebut yang sangat dekat dengan pengertian prinsip keadilan sosial adalah pengertian kedua dan ketiga. Artinya, setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan tidak memperoleh perlakuan diskriminaif, serta memperoleh perhatian baik berkenaan dengan hak pribadi maupun penunaian hak-haknya.

Berangkat dari makna keadilan, kiranya dapat ditemukan sejumlah landasan hukum yang memperkuat posisi keadilan bagi akses pendidikan. Setidaktidaknya dapat dijumpai dalam beberapa landasan hukum di antaranya:

1. UU Republik Indonesia No 20 tentang SPN/Sisdiknas tahun 2003, yang berbunyi:
   a. Pasal 4 ayat 1, bahwa "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa".
   b. Pasal 5 ayat 1, bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu"
   c. Pasal 5 ayat 2, Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
   d. Pasal 5 ayat 3, Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
   e. Pasal 5 ayat 4, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
   f. Pasal 5 ayat 5, setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
2. Konvensi Hak Anak yang Ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No.44/25 Tertanggal 20 November 1989, Yang Berbunyi:
   a. Pasal 29:
      Ayat 1: Negara-negara Peserta sependapat bahwa pendidikan anak harus diarahkan untuk: Pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya...
   b. Pasal 31:
      Ayat 1: Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikannya, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.

3. The Salamanca World Conference on Special Needs Education (UNESCO, 1994) mendeklarasikan bahwa :
   - *every child has a fundamental right to education, and must be given the opportunity to achieve and maintain an acceptable level of learning,*
   - *every child has unique characteristics, interests, abilities and learning needs,*
   - *education systems should be designed and educational programs implemented to take into account the wide diversity of these characteristics and needs,*
   - *those with special educational needs must have access to regular schools which should accommodate them within a child centered pedagogy capable of meeting these needs*

Atas dasar landasan legal tersebut di atas, maka setiap warga sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum nasional dan internasional yang sangat kuat untuk memiliki akses yang sama terhadap pendidikan bermutu, dan berhak mendapat pemenuhan hak yang sama dari layanan pendidikan bermutu pula. Lebih jelasnya, setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan hukum dalam mengakses pendidikan, terutama pendidikan dasar sembilan tahun yang telah ditetapkan menjadi salah satu kebijakan utama Depatemen Pendidikan Nasional (kini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud).

Dengan demikian, pemerintah memiliki kewajiban penuh untuk mengusahakan terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu didukung dengan berbagai komponen yang memenuhi standar nasional, baik itu terkait dengan standar isi pendidikan, proses pendidikan, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, manajemen pendidikan, pendanaan pendidikan, maupun standar penilaian pendidikan.

Untuk mewujudkan layanan pendidikan yang mampu memenuhi standar nasional tidaklah mudah, sehingga masih dijumpai polemik berkepanjangan ketika diterapkan standar penilaian dalam rangka memenuhi standar isi dan kompetensi lulusan, sementara standar-standar lainnya belum terpenuhi, misalnya standar sarana dan prasarana pendidikan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan belum terpenuhi.

Hal ini menjadi tantangan baik bagi pemerintah maupun masyarakat untuk segera mampu menformulasikan semua standar yang dilanjutkan dengan gerakan untuk mengimplementasikan standar dengan penuh tanggung jawab. Penundaan untuk menuntaskan semua standar, hanya akan memperpanjang dan memperbanyak masalah pendidikan, yang sebenarnya sudah sarat dengan masalah-masalah lainnya.

Realitas Pendidikan Dewasa Ini

Layanan pendidikan telah berkembang pesat untuk semua, termasuk warga Indonesia yang berkebutuhan khusus dan yang tak beruntung secara geografis, ekonomis, kultural, dan sosial. Sudah semakin banyak praktek layanan pendidikan melalui jalur formal, nonformal, bahkan informal pun telah diupayakan untuk perbaikan program dan pengelolaannya. Di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi yang semakin tidak menentu, secara langsung atau tidak langsung berdampak terhadap praktek pendidikan. Karena itulah tidak bisa dipungkiri, jika masih cukup banyak realitas layanan pendidikan yang belum menggembirakan, terutama bagi para *stakeholder*.

Pertama, akses pendidikan. Telah diupayakan untuk memantapkan program dan pengelolaan pendidikan bermutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan untuk melayani setiap warga, bahkan setiap daerahpun telah berusaha keras untuk mewujudkan Sekolah Berstandar Internasional dalam rangka merespons arus globalisasi.

Namun di sisi lain ternyata semakin banyak warga negara yang mengalami kesulitan untuk memperoleh akses pendidikan yang bermutu pada semua jenis dan jenjang. Terlebih-lebih ketika ada sejumlah kepala daerah yang menutup diri untuk masuknya peserta didik baru dari luar daerah. Hanya tinggal impian dan keinginan, karena tak semudah itu dapat mewujudkannya, walau modal relatif sudah tercukupi. Demikian juga masih terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum *welcome* dan *helpfull* terhadap kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus.

*Kedua***,** kurikulum dan program. Pemerintah selalu berusaha untuk melakukan *updating* kurikulum untuk disesuaikan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan individu. Model desain kurikulum yang dipilih selalu bergeser disesuaikan dengan perkembangan teori dan kondisi empirik. Bahkan model kurikulum yang paling akhir, khususnya untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik, terutama kebijakan otonomi. Atas dasar itulah muncul Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Menyadari kondisi tersebut, kiranya semakin banyak persoalan berkenaan dengan pengembangan kurikulum dan program pembelajaran yang harus dirumuskan oleh institusi pendidikan. Di satu sisi kurikulum harus sesuai dengan standar isi dan kompetensi lulusan, di sisi lain kurikulum dan program pembelajaran harus disesuaikan dengan keragaman potensi dan karakteristik peserta didik. Sementara itu kemampuan setiap sekolah sangat relatif dalam pengembangan KTSP, ada sekolah-sekolah yang sudah relatif mapan dengan dukungan SDM yang memadai, tetapi ada juga sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan SDM yang memadai. Disinyalir, kiranya jumlah institusi pendi-

dikan yang sudah mapan dan memiliki kemampuan pengembangan SDM relatif jauh lebih sedikit.

Ketiga, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemauan politik *(political will)* pemerintah telah nampak dalam menghargai profesi guru, yang dikuatkan dengan deklarasi Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk mewujudkan undang-undang ini telah dikeluarkan Permen berkenaan dengan sertifikasi guru dan dosen sebagai acuan untuk penyelenggaraan program sertifikasi.

Dalam batas-batas tertentu peraturan perundang-undangan ini telah dilakukan, sehingga berdampak terhadap geliat kinerja guru dan dosen, walau belum nampak berarti pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pendidikan sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan utama pelaksanaan sertifikasi pendidik. Proses sertifikasi guru melalui portofolio pada tahun pertama telah berjalan dengan baik, walau masih dirasakan belum memuaskan sepenuhnya, karena proses sertifikasi masih diwarnai beberapa kasus manipulasi.

Keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan sangatlah strategis dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Namun sayangnya tidak semua pendidik dan tenaga kependidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar, telah mendapatkan jaminan kesejahteraan yang memadai, terutama mereka yang belum berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Keempat, pembiayaan pendidikan. UUD 1945 yang diamandemen telah mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan minimal sebanyak 20% dari APBN dan atau APBD. Ditegaskan pula pada UU No. 20 tahun 2003 tentang SPN/Sisdiknas pada pasal 49 ayat 1, bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% APBD.

Namun tanpa diduga, tiba-tiba kita seperti disambar petir di siang bolong, dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-V/2007 yang menguji Pasal 49 ayat (1) UU No.20/2003 tentang Sisdiknas memutuskan bahwa *"Dana pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD"*. Rumusan ini dinilai lebih relevan dengan apa yang terkandung dalam UUD 1945, bahwa pendidik merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional. Konsekuensinya, gaji pendidik harus dikeluarkan dari rumusan ayat tersebut, sehingga gaji pendidik (yang di dalamnya guru dan dosen) termasuk di dalam alokasi dana pendidikan. Jika dikaji lebih teliti, diduga pendidikan sudah dipolitisir sedemikian rupa, akibatnya semakin jelas bahwa pemerintah sangat tidak berpihak pada dunia pendidikan. Dengan demikian, pendidikan bermutu untuk semua hanya sebatas slogan, bahkan semakin termarginalkan.

Angka 20% bukanlah jumlah yang besar, melainkan jumlah yang sangat kecil, sehingga keinginan untuk memajukan pendidikan Indonesia semakin jauh dari kenyataan dan hanya dalam angan-angan saja. Dapat diilustrasikan dengan kondisi guru yang sekarang (2007) berjumlah 2.783.321 orang, yang 1.528.472 orang di antaranya pegawai negeri sipil. Jika rata-rata gaji setiap bulannya sekitar Rp 2 juta (gaji pokok dan tunjangan fungsional), maka setiap tahunnya harus tersedia Rp 36.683.328.000.000. Sementara itu tunjangan profesi sekitar Rp 1,5 juta perbulannya, maka untuk tahun ini harus tersedia uang sebanyak Rp 360 miliar bagi guru yang berjumlah sekitar 200 ribu orang yang selanjutnya akan terus bertambah. Dengan demikian total uang yang harus tersedia untuk tahun ini sebanyak Rp 37.043.328.000.000 (kurang lebih Rp 37 triliun). Sementara itu APBN untuk sektor pendidikan tahun ini sekitar 44 trilyun. Jika dihitung secara keseluruhan, maka diperkirakan anggaran pendidikan sudah mencapai 18% dari APBN.

Jika demikian halnya, maka upaya untuk meningkatkan biaya operasional pendidikan sudah tidak diperlukan usaha yang serius, karena keseluruhan biaya pendidikan yang harus ditanggung dipandang sudah memadai. Padahal kondisi pendidikan sekarang dengan biaya yang ada, sungguh sulit untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia sebagaimana yang diharapkan.

Kelima, sarana dan prasarana pendidikan. Setiap tahun pemerintah telah mengusahakan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana baru, apalagi pada awal tahun 2000an seluruh bangun institusi pendidikan memerlukan rehabilitasi yang serius, di samping tambahan ruang kelas dan sekolah baru, sebagai konsekuensi tambahan penduduk. Demikian juga untuk mengimbangi kemajuan teknologi informasi, jaringan pendidikan nasional pun telah dibangun di seluruh Indonesia melalui kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi.

Teknologi informasi diharapkan tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivititas manajerial, melainkan juga aktivitas instruksional pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Dengan memanfaatkan kemajuan TI, diharapkan sekali dapat memperluas akses pendidikan yang bermutu bagi semua.

Walaupun kini memasuki era TI, namun berdasarkan kemampuan pemerintah dan masyarakat yang terbatas, di samping adanya kecenderungan krisis energi yang ditandai dengan pembatasan penggunaan energi listrik, sehingga berakibat bahwa sebagian besar sekolah dan siswa belum dapat memanfaatkan TI secara optimal.

*Keenam***,** pengelolaan pendidikan. Kebijakan Otonomi dalam kebijakan publik ternyata berdampak langsung terhadap kebijakan pendidikan, yang terwujud dalam bentuk desentralisasi pengelolaan pendidikan. Pada era sebelum

reformasi, pengelolaan pendidikan sepenuhnya dikendalikan secara sentral. Pemerintah Daerah dan sekolah bertanggung jawab mengimplementasikan program yang sudah direncanakan oleh pusat. Sebaliknya pada era pasca reformasi, pengelolaan pendidikan cenderung dikendalikan oleh pemerintah daerah propinsi terutama pendidikan luar biasa, dan pemerintah daerah kabupaten/kota terutama pendidikan dasar dan menengah. Bahkan untuk pengelolaan teknis edukatif sepenuhnya dikendalikan oleh sekolah berdasarkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah.

Walaupun prinsip otonomi pendidikan menjadi acuan dalam pengelolaan pendidikan, namun pada kenyataannya masih cukup banyak sekolah yang belum punya kepala sekolah yang memiliki keberanian profesional dalam mengawal kegiatan teknis edukatif. Demikian pula tidak sedikit pemerintah daerah kabupaten/kota yang terlalu jauh melangkah dalam pengelolaan dan pengendalian program pendidikan, sehingga membuat kepala sekolah tak berdaya.

Persoalan lain berkenaan dengan pengelolaan pendidikan adalah munculnya kebijakan Badan Hukum Pendidikan (BHP). Berlarut-larutnya RUU BHP tidak bisa lepas dari resistensi sebagian besar masyarakat terhadap kehadiran RUU BHP. Munculnya RUU BHP tentu mengundang respons pro dan kontra. Apapun hasilnya, yang jelas perubahan pengelolaan institusi pendidikan perlu dilakukan penataan sehingga seiring dengan perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan.

*Ketujuh***,** penilaian pendidikan. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, salah satu upaya sistematis yang telah dilakukan pemerintah adalah menetapkan standar penilaian yang diwujudkan dengan Ujian Nasional (UN). Pelaksanaan UN didasarkan atas UU RI No.20 tahun 2003 pasal 58 ayat 2, bahwa Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Landasan hukum ini pada hakekatnya sudah jelas, namun dalam implementasinya terdapat banyak tafsiran yang dapat dikatagorikan menjadi kelompok pro dan kontra. Pihak pro Ujian Nasional berpendapat bahwa ujian akhir jenjang harus dilakukan oleh pihak independen, sehingga terhindar dari penilaian subjektif. Diakui pula bahwa ujian Nasional bukanlah satu-satunya variabel dalam penentuan kelulusan, karena ada variabel lain yang juga sangat penting, yaitu ujian sekolah dan penilaian terhadap perilaku atau budi pekerti.

Kedua pihak kontra ujian nasional berpendapat bahwa yang paling tepat menentukan kelulusan adalah sekolah, karena sekolah dan terutama gurulah yang lebih mengetahui keseluruhan pertumbuhan dan kemajuan anak selama studi. Penilaian sesaat dan penilaian terhadap beberapa mata pelajaran diya-

kini bahwa penilaian itu belum sepenuhnya dapat menggambarkan kondisi anak secara utuh dan benar.

Di samping itu bahwa *passing grade* ujian nasional dipandang belum dikaitkan sepenuhnya dengan keragaman potensi dan kondisi anak, sekolah, dam daerah. Ada kesan bahwa penentuan *passing grade* selalu menimbulkan kerugian bagi peserta didik yang tak beruntung, terutama dikaitkan dengan kondisi potensi dan kondisi anak dan kehidupan ekonomi keluarga, geografi tempat tinggal, dan keterbelakangan budaya anak. Hal ini semakin memperkuat bahwa pemberlakuan ujian nasional dan penetapan *passing grade* secara nasional mencerminkan adanya perlukan yang tidak fair terhadap peserta didik, karena tidak mempedulikan latar belakangnya.

Untuk mendapatkan informasi tentang kemajuan dan keberhasilan belajar, memang sangat diperlukan suatu sistem penilaian yang tepat dan komprehensif, sehingga tidak menimbulkan banyak dampak negatif.

*Kedelapan***,** pendidikan nonformal dan informal. UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 5 ayat (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna dan ayat (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Jika memperhatikan pasal dan ayat tersebut, maka jalur pendidikan non formal dan pendidikan informal secara hukum mendapatkan kedudukan dan rekognisi yang sama dengan jalur pendidikan formal, sehingga tidak ada alasan yang kuat untuk meng-*underestimate* terhadap eksistensi pendidikan nonformal dan informal. Kehadiran pendidikan nonformal dan informal yang memiliki kedudukan sejajar merupakan kemudahan yang dapat diakses bagi warga negara yang memiliki kesulitan dan kendala apapun dalam menjangkau pendidikan formal. Tidak adanya perbedaan perlakuan di antara ketiga jalur pendidikan meneguhkan bahwa sistem pendidikan nasional tidak membiarkan adanya perlakuan diskriminatif.

Keberadaan pendidikan nonformal dan informal pada hakekatnya tidak cukup hanya pengakuan saja, melainkan yang jauh lebih penting adalah pengelolaan pendidikan nonformal dan informal perlu terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga dapat memberikan kontribusi secara berarti, terutama mampu memberikan pilihan bagi masyarakat untuk layanan pendidikan bagi semua dengan jaminan kualitas yang tidak diragukan. Untuk mewujudkan layanan yang demikian memang dibutuhkan komitmen yang tinggi bagi penyelenggara dan pengelola pendidikan nonformal dan informal. Namun pada kenyataannya hingga kini baru sejumlah kecil layanan pendidikan nonformal dan informal yang mampu memberikan kepuasan bagi para *stakeholder*.

Demikian sejumlah persoalan praktek pendidikan yang terus muncul seiring dengan perubahan kebijakan di politik, sosial, ekonomi, dan sektor lainnya. Munculnya isu bidang pendidikan ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia sungguh memiliki dinamika seiring dengan perubahan sosial dan budaya yang semakin sulit dikendalikan.

Solusi Strategis Persoalan Pendidikan

Menyadari akan ragamnya persoalan-persoalan pendidikan yang tidak akan pernah berhenti ini, dengan mempertimbangkan berbagai potensi baik landasan formal, berbagai ragam keahlian SDM, dan partisipasi masyarakat, maka dapat diawarkan sejumlah alternatif solusi strategis.

Pertama, menjamin ketuntasan akses pendidikan, terutama jenjang pendidikan dasar. Memperoleh akses pendidikan adalah sebagai kewajiban, dan sekaligus sebagai kebutuhan. Kemampuan ekonomik Indonesia, baik pemerintah maupun warga atau masyarakatnya, sebenarnya tidak masalah untuk memberikan jaminan pendidikan bermutu bagi semua. Komitmen bangsa sudah ditetapkan dalam berbagai sumber hukum. Yang sangat penting untuk diupayakan adalah perlunya kebijakan *affirmative action* yang mendorong terciptanya masyarakat inklusif yang sekaligus perlu dikembangkan pendidikan inklusif, sehingga terbukanya pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat dengan segala keterbatasannya, baik segi fisik, mental, sosial, emosional, ekonomik, maupun kultural, untuk memiliki kesamaan dalam mengakses layanan pendidikan bermutu.

Kedua, merancang dan mengimplementasikan kurikulum dan program pendidikan yang bermutu dan relevan. Orientasi pendidikan yang mengarahkan kepada pembentukan manusia utuh dan bisa hidup *well-adaptive*, kiranya perlu diikuti dengan rancangan kurikulum yang dibangun berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, dan perkembangan teknologi. Kendati kurikulum telah dirumuskan dengan baik dan komprehensif, namun pada tataran implementasi perlu didukung dengan pemikiran yang kreatif, sehingga kehadiran kurikulum masih memiliki relevansi yang tinggi. Untuk itulah pengembangan kurikulum di lapangan perlu dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga kurikulum selalu fungsional bagi berbagai ragam peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Ketiga, mengupayakan peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Salah satu kunci utama untuk membangun sekolah dan pendidikan berkualitas adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Karena itulah perhatian pemerintah terus meningkat dan membaik terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam waktu yang sama diharapkan sekali bahwa

upaya pemerintah memperoleh respons yang searah dari para pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga upaya yang sangat positif dapat menghasilkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu peningkatan kualitas pendidikan.

Untuk peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan seharusnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait, terutama para *stakeholders* dalam berbagai bentuk dukungan, sehingga memungkinkan program peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Sebaliknya pendidik dan tenaga kependidikan sendiri diharapkan juga dapat secara proaktif mengembangkan dirinya sendiri sesuai dengan tuntutan masyarakat, sehingga terjadi peningkatan profesionalisme secara berarti.

*Keempat***,** mengupayakan pendanaan pendidikan pada semua program pendidikan sesuai dengan prioritas pembangunan pendidikan, terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun seiring juga dengan misi *Millinium Development Goals (MDGs).* Menyadari akan tuntutan ini, maka upaya serius dalam pembiayaan pendidikan dasar secara menyeluruh perlu diperjuangkan. Mungkin juga dengan langkah pendidikan gratis untuk pendidikan dasar, sehingga dapat mengatasi setiap anak yang mengalami berbagai hambatan untuk akses pendidikan dasar dengan segala latar belakangnya. Salah satu upaya yang diyakini mampu menunjang kesuksesan wajar dikdas adalah perlunya semua guru pada sekolah negeri dan swasta diangkat menjadi pegawai negeri dengan tetap mempertimbangkan rasio antara guru dan peserta didik, serta relevansi program studi guru dengan tugas mengajarnya.

Menyadari akan prioritas program tersebut, maka pendidikan dasar dapat di-*claim* sebagai *public goods,* sehingga segala konsekuensi pembiayaan pendidikan untuk semua kebutuhan pelaksanaan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian ada peluang terbuka untuk pembiayaan pendidikan yang melebihi dari standar diperoleh dari masyarakat, sepanjang dapat dijaga akuntabilitasnya terhadap publik.

*Kelima***,** mengadakan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai edukatif. Satu sisi bahwa kondisi fisik hampir sebagian besar Sekolah Dasar Inpres akhir-akhir ini memerlukan rehabilitasi total untuk menjadi tempat belajar yang layak dan kondusif. Di sisi lain perlu diadakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang didasarkan atas kemajuan teknologi, terutama teknologi informatika dan komunikasi, sehingga pembelajaran di era informasi ini dapat berlangsung secara terbuka dan terus menerus.

Demikian juga yang perlu dikembangkan di seluruh institusi pendidikan adalah adanya sarana dan prasarana yang *accessable* bagi semua individu, ter-

masuk yang berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana yang mendidik sangat perlu diupayakan, sehingga keberadaannya dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kreativitas peserta didik.

Keenam, mendorong pengelolaan pendidikan yang akuntabel dan transparan. Seiring dengan adanya kebijakan publik otonomi daerah, maka pengelolaan pendidikan juga menginsip-prinsip otonomi, sehingga yang terjadi dewasa ini bahwa setiap kebijakan dan program pendidikan cenderung didesentralisasikan, baik itu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maupun pendidikan tinggi.

Pergeseran pengelolaan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi ternyata tidak berjalan mulus. Artinya, proses perubahan itu memerlukan proses. Kecepatan proses perubahan sangat tergantung banyak hal, terutama tergantung pada kesiapan sumber daya manusianya. Bahkan di daerah tertentu boleh jadi terdapat bias interpretasi, sehingga yang semestinya kepala sekolah memiliki kewenangan yang cukup karena didasarkan atas prinsip Manajemen Berbasis Sekolah, namun pada kenyataannya banyak kepala sekolah menjadi "mandul", tak berdaya, karena kepala daerah menancapkan kekuasaannya melebihi dari batas cakupan tugas pokok dan fungsinya. Pada kondisi inilah, pertimbangan politis sangat menonjol, sehingga otonomi pendidikan tidak dapat bekerja efektif.

Kendatipun desentralisasi itu suatu keniscayaan, namun untuk menjaga keutuhan negara Indonesia sebagai suatu kesatuan, maka sangat diperlukan orientasi pendidikan yang berbasis keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi atau *balanced decentralization-centralization*. Dengan diharapkan dua orientasi dapat diwujudkan secara seimbang, baik untuk memenuhi kebutuhan daerah yang memiliki keunikan kebutuhan dan untuk memenuhi kebutuhan nasional yang membutuhan pemilikan visi bersama.

*Ketujuh***,** mengupayakan penilaian pendidikan yang komprehensif. Tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan merupakan komitmen bangsa Indonesia untuk menuju pembentukan manusia seutuhnya. Dengan demikian, kriteria kelulusan suatu satuan pendidikan seharusnya tidak hanya dibatasi pada aspek akademik saja, melainkan aspek-aspek lainnya, terutama aspek moralnya.

Selain itu sistem penilaian yang digunakan dalam proses pendidikan lebih cenderung bersifat *judgmental,* padahal yang jauh lebih penting adalah penilaian yang bersifat apresiatif yang diwujudkan dengan pemberian rekognisi terhadap setiap perubahan perilaku yang terjadi pada diri peserta didik. Dalam situasi yang demikian penilaian yang digunakan lebih *motivating* dan *encouraging*, sehingga peserta didik merasa memiliki martabat dan berarti dalam kehi-

dupannya. Keterbatan peserta didik dalam aspek apapun diharapkan sekali tidak mempengaruhi proses penilaian terhadap dirinya, sehingga peserta didik memiliki pandangan positif terhadap dirinya sendiri dan memiliki *self esteem* yang patut menjadi kebanggaan dirinya sendiri juga.

Kedelapan, memelihara, mengembangkan dan memaknai pendidikan nonformal dan informal secara produktif. Di era pra reformasi, terjadi *underestimate* terhadap kedudukan pendidikan nonformal dan informal. Namun, kini setelah era reformasi bahwa pengakuan terhadap pendidikan nonformal dan informal menjadi lebih baik dan meningkat, sehingga kedudukannya sejajar dengan pendidikan formal.

Pengakuan ini seharusnya disikapi oleh komunitas pendidikan nonformal dan informal secara positif yang ditunjukkan dengan rekonstruksi filosofi dan konsep pendidikan nonformal dan informal, yang diikuti dengan perumusan kebijakan dan program pendidikan yang mampu memberikan nilai pemberdayaan, sehingga produk pendidikan nonformal dan informal benar-benar dapat diakui sejajar, bahkan untuk bidang-bidang tertentu dapat melebihi dari produk pendidikan formal.

Penutup

Reformasi memang meniupkan angin perubahan, terutama adanya penegakan rasa keadilan di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Untuk menjamin layanan pendidikan yang berkeadilan, kiranya sangat diperlukan adanya pencepatan pembuatan undang-undang organik, di samping amandemen dan perubahan perundang-undangan yang dapat diterapkan secara fungsioanl di lapangan.

Prinsip keadilan mendorong munculnya perlakuan yang sama antara institusi publik dan swasta. Demikian pula pada setiap warga negara tanpa mempedulikan kondisi dan potensinya, termasuk invidu yang berkebutuhan khusus dan tak beruntung secara fisik, sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga semakin terbukanya akses bagi mereka dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang bermutu bagi semua.

Upaya peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan pada semua jenjang merupakan suatu langkah strategis yang harus didukung oleh semua pihak, baik institusi maupun sumber daya manusia yang ada di belakangnya. Untuk dapat menjamin keberartian peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan, maka diharapkan sekali adanya keberpihakan pada semua, sehingga dapat meningkatkan produktivitas institusi, SDM dan lulusan.

Peningkatan tatakelola pendidikan dan akuntabilitas publik terus diupayakan dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai *stakeholder*

pendidikan. Karena itu pengawasan pendidikan terus ditingkatkan kinerjanya, yang ditekankan pada kepentingan yang sama antara akuntabilitas kinerja dan finansial. Untuk menjamin hasil pengawasan memiliki kualitas yang handal, sangat diperlukan keterlibatan para *stakeholder* dan unsur kendali baik melalui komite sekolah, dewan pendidikan, tim penjamin mutu dan dewan auditor internal.

Akhirnya ke depan perlu terus digalakkan adanya komitmen oleh semua, baik institusi maupun pendidik dan tenaga kependidikan untuk keberhasilan pendidikan bagi semua dengan kualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan.

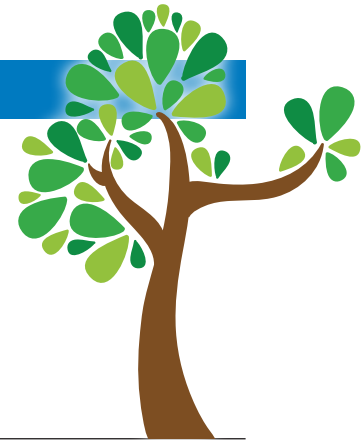

Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

PERINGATAN Hari Pendidikan Nasional 2009 mengangkat tema *Pendidikan Sains, Teknologi & Seni Menjamin Pembangunan Berkelanjutan dan meningkatkan Daya Saing Bangsa***.** Tema Hardiknas ini sungguh memiliki misi seiring dengan hakekat pendidikan, yaitu pendidikan menjadikan setiap individu dapat eksis dan berkembang sehingga mampu menyesuaikan dengan lingkungan, dan pendidikan menjadikan setiap individu berkualitas secara kompetitif.

Untuk menjadikan individu yang eksis secara berkelanjutan di manapun dan kapanpun, setidak-tidaknya ada lima kompetensi dasar (Imam Ghozali; Evers etc., 1998), di antaranya yaitu: *Morality and religiousity, self management skills, communicating skills, ability to manage people and tasks, and ability to manage change and innovation*.

Pertama, *morality and religiousity* merupakan suatu sifat kepribadian yang pokok bagi kehidupan setiap insan yang ingin hidupnya mencapai kebahagiaan hakiki.

Kedua, self management skills adalah kecakapan yang terkait dengan pengendalian diri dan manajemen diri, sehingga perilakunya menunjukkan kematangan pribadi dan terhindar dari dorongan emosi yang menyesatkan. Ketiga, *communicating skills, yaitu* kecakapan berkomunikasi dan mengekspresikan diri serta mengapresiasi ide baik secara oral maupun tertulis.

Keempat, ability to manage people and tasks, suatu kecakapan sosial dan kepemimpinan yang sangat diperlukan setiap individu dalam dunia kerja, organisasi dan masyarakat.

Kelima, ability to manage change and innovation suatu kecakapan mengelola perubahan dan hasil inovasi, karena individu dan masyarakat selalu dinamis, yang selalu berubah setiap saat di manapun berada.

Kemampuan ini menjadi kebutuhan setiap inidvidu, tanpa mengenal jenis kesarjanaan dalam bidang keahlian apapun. Dengan kata lain, kompetensi dasar tersebut sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Jika ingin menyempurnakan kompetensi dasar tersebut, maka setiap individu, perlu memiliki kemampuan beradaptasi. Kemampuan ini diharapkan sekali dapat membantu setiap individu untuk bisa diterima oleh siapapun dan di manapaun, sehingga individu itu dapat bekerja dan hidup dengan rasa nyaman. Yang pada akhirnya dia mampu menunjukkan kinerja yang lebih produktif secara berkelanjutan. Sayangnya, mayoritas sarjana cenderung lebih mementingkan pencapaian prestasi akademik, kurang peduli terhadap kompetensi dasar tersebut.

Selanjutnya untuk menjadikan peserta didik memiliki kemampuan daya saing yang handal**,** diperlukan kemampuan dan kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi ini memang sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan dunia yang membutuhkan tenaga profesional dan terampil. Karena itulah pendidikan pada setiap jenjang perlu terus diorientasikan pada program dan kegiatannya untuk membekali kegiatan akademik, profesional dan keterampilan, sehingga menjadikan lulusan siap merespons pasar dan dalam waktu yang sama mampu menciptakan lapangan kerja sesuai dengan bidangnya dan kondisi lokal atau daerah. Upaya ini memang tidak mudah, karena membutuhkan kesungguhan dalam belajar, keberanian berinovasi, dan dukungan dana untuk memulai aktivitas.

Di samping pendidikan diharapkan dapat membuat inidvidu eksis dan berkembang, individu terdidik diharapkan juga mampu memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan alam dan menjaga keselamatan manusia dan kedamaian di antara mereka. Perbedaan antara indvidu yang terfasilitasi oleh demokrasi di Indonesia, seyogyanya dimaknai sebagai peluang untuk saling *sharing* dan mencerahkan, bukan sebaliknya, memberikan kebebasan untuk mempertahankan pendapat dan pendirian masing-masing, sehingga berakhir dengan konflik yang seringkali bisa merugikan.

Karena itulah pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan harus ditopang dengan pendidikan inklusif, pendidikan untuk semua, pendidikan untuk perdamaian, dan pendidikan lingkungan. Jika berbagai upaya pendidikan tersebut dapat dilakukan secara sinergis, penulis beryakinan makna pendidikan yang berorientasikan memanusiakan manusia insya Allah akan dapat dicapai lebih optimal.

Artikel di SKH Kedaulatan Rakyat menyambut Hardiknas 2009.

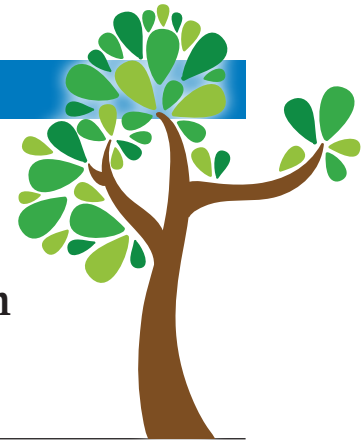

Mengukur Komitmen dan Kapabilitas Kabinet Indonesia Bersatu dalam Membawa Perubahan Bangsa; Bidang Pendidikan

Pengantar

Bangsa Indonesia yang menuju ke arah perubahan bangsa secara potensial dan aktual menghadapi persoalan internal dan eksternal. Secara internal, bangsa ini masih berada dalam kondisi krisis yang berkepanjangan, terlebih-lebih terkait dengan kemampuan kerja maupun moral. Secara eksternal, semakin sengitnya kompetisi global dan masuknya budaya asing yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai bangsa.

Kondisi-kondisi tersebut dapat merupakan tantangan dan hambatan bangsa Indonesia dalam percaturan hidup di tengah-tengah kehidupan global. Memang bangsa Indonesia dalam era informasi dewasa ini tidak dapat menghindarkan diri, namun sebaliknya harus terus mengupayakan dalam pengembangan diri baik secara individual maupun kolektif.

Keinginan melakukan perubahan - yang menjadi tekad pemerintahan baru Indonesia - merupakan suatu komitmen yang sangat patut dihargai dan disambut, terlebih-lebih di bidang pendidikan. Perubahan di bidang pendidikan dapat menjadi langkah yang sangat strategis, karena menyentuh pada pelaku perubahan dan pembangunan bangsa menuju Indonesia baru.

Persoalan Pendidikan di Indonesia

Banyak persoalan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia, yang sungguh menuntut pemerintah baru dan masyarakat untuk terlibat di dalamnya.

Pertama, keterbatasan akses pendidikan anak bangsa akibat ketidakberuntungan ekonomis, geografis, budaya, kondisi fisik, dan sebagainya. Terbatasnya akses pendidikan bagi anak bangsa, tidak hanya karena mahalnya biaya pendidikan, jauhnya tempat pendidikan, bias gender, melainkan juga kecacatan.

Kedua, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Rendahnya intake, proses, dan prestasi lulusan, sehingga dapat berpengaruh terhadap kemampuan lulusan untuk menghadapi kompetisi di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah percaturan ekonomi global. Namun yang jauh lebih penting adalah rendahnya kualitas pendidikan dapat berpengaruh terhadap kepribadian dan moralitas bangsa.

Ketiga, rendahnya efisiensi pengelolaan pendidikan karena masih banyak praktek KKN. Rendahnya efisiensi pengelolaan pendidikan dapat mengurangi produktivitas pendidikan, sehingga menyebabkan pendidikan berbiaya tinggi, yang pada akhirnya praktek pendidikan yang terjadi hanya untuk sejumlah kecil anak bangsa.

Keempat. masih banyak guru dan dosen yang belum menunjukkan kualifikasi yang memadai. Akibatnya kualitas proses dan produk pendidikan kurang dapat dijamin.

Kelima, para birokrat dan politisi belum menunjukkan *political will* yang menggembirakan terhadap pendidikan. Akibatnya pendidikan belum dianggap sebagai faktor kunci untuk melakukan perubahan bangsa.

Keenam, masih rendahnya kepedulian dan partisipasi dunia usaha dan bisnis terhadap pendidikan. Akibatnya pembiayaan pendidikan hanya bertumpu pada pemerintah dan orangtua. Sungguh berat yang harus ditanggung oleh masyarakat, padahal stakeholders pendidikan juga para dunia usaha dan industri (Dudi).

Menuju Perubahan Bangsa

Perubahan merupakan kata kunci yang sangat penting dan strategis untuk memberikan jawaban terhadap krisis yang dilanda bangsa Indonesia ini. Jika diperhatikan benar sikap `hipokrit` bangsa, terutama para pengambil keputusan, masih lebih menguasai setiap langkah upayanya, di samping memang penyelesaian krisis bangsa masih bersifat parsial, belum komprehensif.

Paradigma kepemimpinan bangsa memang harus diubah. Perubahan itu dapat diwujudkan dalam berbagai hal. *Pertama*, visi kepemimpinan bahwa pimpinan bukanlah penguasa, melainkan pelayan, pemegang amanah, dan khalifah Allah di bumi dan sekaligus sebagai hamba-Nya.

Kedua, pimpinan dipandang bukan hanya sebagai bos atau manager, melainkan *leader* yang menjadikan warga negara sebagai subjek. *Ketiga*, manajemen terbuka menjadi prinsip dalam mengemban kepemimpinan pada semua level. *Keempat*, hubungan antar pimpinan lebih bersifat *networking*, daripada hierarkhis. *Kelima*, pemberdayaan terhadap masyarakat merupakan kunci pembangunan bangsa.

Mengkritisi Visi dan Kebijakan Kabinet Indonesia Baru bidang Pendidikan

Berdasarkan tekad Kabinet Indonesia Bersatu, bahwa Kabinet Indonesia Bersatu memiliki komitmen untuk melakukan Kontrak Politik. Kontrak politik di antaranya dapat diwujudkan agenda 100 hari dan agenda jangka menengah, 5 tahun.

Agenda 100 Hari Depdiknas

a. Kebijakan perbukuan tingkat SD s.d SM yang *customer oriented* dengan ketentuan keberlakuan buku teks untuk 5 tahun.
b. Kebijakan SPP dengan sistem subsidi silang, disertai dengan sistem governance yang baik untuk penarikan, penyimpangan, penggunaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban dana masyarakat.
c. Bekerja sama dengan pemerintah daerah tertentu memberlakukan ketentuan Wajib Belajar 12 tahun di daerahnya melalui instrumen hukum perda.
d. Mencanangkan guru sebagai suatu profesi seperti halnya akuntan, dokter, pengacara, dlsb yang bersetifikat dan bernomor register, serta memiliki kode etik.
e. Magang kepala sekolah dari daerah tertinggal pada sekolah dari daerah maju.
f. Restrukturisasi Depdiknas dengan menghilangkan Dirjen Olahraga dan membagi Dirjen Dikdasmen menjadi Dirjen Dikdas dan Dikmenum.

Jika memperhatikan enam butir agenda Depdiknas 100 hari, nampak bahwa Menteri belum sepenuhnya memahami persoalan pendidikan nasional, bahkan yang jauh lebih penting adalah UU RI. No 20 tahun 2003. Ada beberapa hal penting yang patut direnungi, di antaranya:

- Persoalannya bukan soal waktu membikin ketentuan atau aturan yang menyangkut pengadaan buku, namun substansi yang dipandang penting dari pengadaan buku. Bahwa kehadiran buku teks tidak bisa dipisahkan dari kurikulum yang menjadi acuannya. Kurikulum selama ini selalu berkisar usianya selama sekitar 10 tahun, tetapi mengapa buku teks dibatasi hanya lima tahun. Jika, terjadi perubahan informasi dan perkembangan ilmu dan teknologi, akan lebih efisien manakala yang dilakukan adalah membuat buku atau teks suplemen bagi guru, bukan melakukan perubahan buku bagi siswa, karena cara ini memerlukan biaya tinggi.
- Kebijakan SPP sebenarnya hanya berlaku untuk SMA, tetapi untuk SD dan SMP seharusnya tidak ada, karena sebagai konsekuensi dari Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Baik untuk biaya di sekolah negeri maupun

swasta, biaya pendidikan dasar minimal wajib ditanggung oleh pemerintah. Jika ada sekolah yang menghendaki biaya untuk peningkatan proses pendidikan sebagai konsekuensi dari program, dapat dilakukan melalui pembicaraan dengan komite sekolah, apakah akan terjadi subsidi silang atau apapun cara lainnya yang dapat diterima oleh orangtua pada khususnya.

- Upaya ini baik sekali untuk mendorong daerah-daerah tertentu yang sudah berhasil menuntaskan Wajar 9 tahun. Namun jumlah daerah propinsi dan kabupaten/kota yang sudah berhasil baru dalam hitungan jari, masih banyak sekali yang belum berhasil. Jika persoalan pemerataan yang menjadi kepeduliannya, justru perlu dicari alternatif cara yang dapat mengakselerasi penuntasan Wajar 9 tahun.
- Memantapkan status guru sebagai jabatan profesional bukanlah merupakan upaya singkat, namun membutuhkan proses yang panjang. Yang dapat dilakukan untuk jangka pendek hanya yang bersifat administratif saja, misalkan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sudah lama menjadi bahan kajian semua pihak. Namun sangat disayangkan bahwa konsep UU Guru hanya lebih terkait dengan aspek kesejahteraan, perlindungan hukum, dan status sosial guru, padahal yang jauh lebih berarti adalah peningkatan kompetensi dan mutu guru.
- Upaya magang kepala sekolah daerah tertinggal ke daerah maju bukanlah suatu yang baru, karena selama ini sudah ada program semacam ini, bahkan lebih baik, termasuk mengirim kepala sekolah daerah maju ke daerah tertinggal sebagai upaya pendampingan langsung. Dengan demikian terjadi *sharing* dua arah. Tentu saja tidak menutup kemungkinan antar kepala sekolah di suatu provinsi saja, karena ada sisi positif yang dapat diambil, yaitu kesamaan latar belakang sosial dan budaya.
- Pembagian Dirjen Dikdasmen menjadi dua direktorat jenderal mengindikasikan bahwa adanya keterbatasan pemahaman terhadap otonomi pendidikan yang selama ini sedang berproses. Tugas pokok dan fungsi Dirjen Dikdasmen yang semula dimiliki pada era sentralisasi, sebagian besar telah dialihkan ke dinas kota/kabupaten, sehingga tidak cukup alasan untuk membagi dua dirjen, jika ingin menghendaki peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Agenda Depdiknas 5 tahun ke depan

a. Penyelenggaraan pendidikan jalur formal yang terkait dengan kondisi institusi dan peserta didik yang didukung oleh konstitusi yang ada dan rasa keadilan.

b. Penyelenggaraan pendidikan jalur non formal lebih diorientasikan kepada layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dan tetap berbasis pada masyarakat.
c. Pendidikan nasional diorientasikan membangun manusia seutuhnya.
d. Kurikulum dan Standar Kompetensi Nasional diharapkan mampu mengantar peserta didik memiliki kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya.
e. Ujian Akhir Nasional masih diperlukan untuk mengendalikan mutu, terutama untuk SD sampai dengan SMA.
f. Guru dikembangkan menjadi sebuah profesi seperti halnya akuntan, dokter, pengacara, dlsb yang bersertifikat dan bernomor register, serta memiliki kode etik.
g. Untuk mengendalikan mutu proses pendidikan pada jalur dan jenjang pendidikan manapun, pemerintah bertanggungjawab menetapkan buku tertentu sebagai buku acuan bagi peserta didik.
h. Setiap lembaga pendidikan mengembangkan sarana perustakaan sesuai dengan status dan fungsinya.
i. Prasarana dan sarana (selain perpustakaan dan buku) dilakukan oleh lembaga pendidikan di bawah pengawasan lembaga perwakilan stakeholders yang relevan.
j. Pengendalian mutu pendidikan secara menyeluruh dilakukan melalui penjaminan mutu dan akreditasi.

Jika memperhatikan kebijakan pendidikan nasional 5 tahun ke depan, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, yaitu di antaranya:

- Untuk menghasilkan suatu praktek penyelenggaraan pendidikan formal perlu ketuntasan dalam pemahaman terhadap kondisi objektif peserta didik dan kemampuan institusi.
- Pada prakteknya tidak semua jalur pendidikan non formal mampu menerapkan misinya, karena tidak semua pelaku pendidikan di masyarakat memiliki kesanggupan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat.
- Paradigma membangun manusia, merupakan suatu yang ideal, tetapi dalam implementasinya ternyata tidak mudah,.
- Kurikulum yang diorentasikan untuk menghasilkan lulusan ynag kompeten memang sangat penting, namun dalam implementasinya perlu memungkinkan peserta didik dapat menjadi agen perubahan dan mampu menyesuaikan dengan tuntutan pembangunan.

- Ujian Akhir Nasional masih dipandang sebagai aspek penting dalam pengendalian mutu pendidikan, terutama untuk SD sampai dengan SM. Namun UAN seyogyanya bukan dianggap sebagai satu-satunya variabel penting dalam penentuan kelulusan, apalagi dikaitkan dengan rumusan tujuan institusional pendidikan.
- Dalam pengelolaan guru, menjadikan guru sebagai suatu profesi merupakan upaya yang sungguh terpuji, namun untuk penentuan keprofesionalan guru, organisasi profesi dewasa ini masih belum dapat dipercaya sepenuhnya menjadi satu-satunya lembaga penentu. Dengan demikian Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) masih bisa diberikan kepercayaan untuk mengemban amanat ini.
- Untuk pengendalian mutu proses pendidikan memang pemerintah yang didukung tim yang kompeten cukup tepat dapat menentukan buku teks bagi peserta didik, namun untuk pendidikan tinggi sepenuhnya berada di tangan dosen yang mengampunya.
- Perjuangan untuk berhasilnya anggaran 20% untuk pendidikan perlu disikapi secara kritis, karena pada tataran implementasinya perlu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Bisa saja di daerah tertentu, anggaran yang perlu disiapkan untuk ukuran kualitas tertentu, cukup tersedia 18%, dari APBD namun di daerah lain, anggaran yang perlu disiapkan untuk ukuran kualitas yang sama perlu disiapkan sejumlah 25% dari APBD.
- Pengendalian mutu pendidikan perlu terus dilakukan sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Namun kehadiran misi penjaminan mutu dan akreditasi perlu didukung dengan akuntabilitas kinerjanya, karena seringkali lebih dipentingkan formalitas administratifnya saja.

Alternatif Solusi Kebijakan Bidang Pendidikan

1. *Melakukan baseline survey*
   Baseline survey merupakan upaya yang strategis untuk membangun suatu data base, yang pada akhirnya sangat bermanfaat bagi pembuatan rencana baik jangka pendek, menengah, maupun, panjang.
2. *Rekrutmen dan pembinaan guru*
   Rekrutmen guru dan tenaga kependidikan lainnnya yang dilakukan secara profesional, sangatlah berarti bagi rekrutmen yang dibangun lebih bersifat administrative dan politis.
3. *Mempercepat launching RPP*
   Untuk dapat mempercepat implementasi UU Sisdiknas perlu dipercepat proses penyelesaian draf dan pendeklarasian PP-PP-nya, sehingga dapat dijadikan pijakan dalam operasional penyelenggaraan pendidikan.

4. *Kebijakan UAN*
   Untuk mengendalikan mutu pendidikan perlu dilakukan UAN secara bertanggungjawab.
5. *Kurikulum baru*
   Kurikulum baru yang sudah diujicobakan perlu segera diresmikan dan dilaunchingkan, sehingga ada kejelasan langkah kegiatan pendidikan di lapangan
6. *Pajak pendidikan*
   Untuk membantu pengadaan dana pendidikan perlu ada pajak pendidikan bagi dunia usaha dan inindustri.
7. *Pembebasan SPP dan subsidi minimal*
   Pembebasan SPP perlu dilakukan bagi semua siswa SD dan SMP yang diwujudkan berupa sumbangan minimal untuk operasional pendidikan, sedang bagi siswa berkemampuan tinggi yang tak mampu secara finansial perlu dibebaskan SPP-nya.
8. *KKN di lingkungan Depdiknas*
   Untuk menjamin pemerintahan bersih di lingkungan Depdiknas (kini Depdikbud), perlu dibersihkan praktek-praktek KKN dengan tetap berkoordinasi dengan sektor lain.
9. *Pemberantasan Narkoba*
   Untuk menjamin keberhasilan pendidikan bagi generasi penerus, maka upaya pemberantasan narkoba di semua lini perlu terus dilakukan secara intensif dan koordinatif.

Penutup

Ada kesan bahwa pendidikan belum dijadikan panglima dalam program pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu, sehingga belum banyak berharap bahwa krisis dapat diselesaikan dalam waktu dekat, karena manusia sebagai pelaku pelaku utama pembangunan belum jadi prioritas dalam kebijakan dan program Kabinet Indonesia Bersatu. Demikian beberapa pokok pikiran yang dapat dijadikan bahan untuk men-*encorage* peserta dalam menghasilkan ide-ide yang dapat memberikan solusi dalam persoalan pendidikan yang lebih luas.

Dibahas pada Seminar Nasional The New Life of Indonesia dengan Tema mengukur Komitmen dan Kapabilitas Kabinet Indonesia Bersatu dalam membawa Perubahan Bangsa", yang diselenggarakan pada Rabu, 1 Desember 2004 di Aula Fakultas Ekonomi UNS.

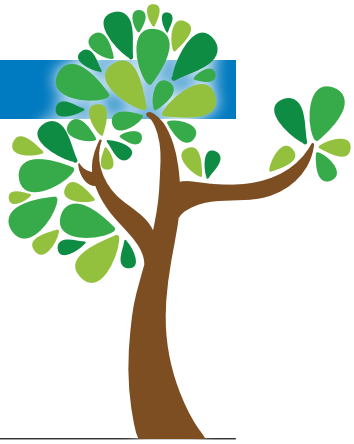

Menyiapkan Pendidikan bagi 'Generasi Emas'

GENERASI 2045 dalam sejarah perjalanan Indonesia menduduki posisi penting, karena bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan. Mengangkat wacana generasi 2045 sengaja dilakukan secara intensif diharapkan sekali mampu melahirkan suatu impian besar bagi seluruh bangsa Indonesia akan bangkitnya generasi emas yang mampu memberikan kebaikan dan kebesaran bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan kebangkitan generasi emas, kita tidak bisa lepas dari tantangan abad 21 dan tantangan kondisi objektif Indonesia di saat ini dan saat mendatang. Semua tantangan yang ada di sekitar kita, insya Allah dapat diatasi dengan strategi pendidikan.

Menuju Generasi 2045

Generasi 2045 atau Generasi Masa Depan, yang jelas persoalan masa depan bukan hanya persoalan se-dekade atau dua dekade, se-abad atau dua abad yang akan datang, namun hakekatnya adalah membicarakan masa depan yang tak terbatas. Hanya saja diangkatnya Generasi 2045 dimaksudkan untuk memfokuskan arah kita untuk bangkit di saat yang penting. Untuk memasuki masa depan, siapapun dan di manapun, setiap insan dan bangsa sangat menghendaki bahagia dunia dan akhirat. Karena itu siapapun perlu berpegang teguh pada ajaran agamanya, cinta tanah air, bertumpu pada kondisi dan potensi bangsa dan negara, serta menunjukkan sikap dan tindakan proaktif dan adaptif terhadap perubahan zaman dan global.

Kita patut bersyukur bahwa tahun 2045 mendatang Indoensia akan diisi oleh generasi emas yang sekarang berusia 0 sampai 20 tahun yang jumlahnya hampir 100 jutaan orang. Mereka pada saat itu akan berada pada usia produktif dalam jumlah mayoritas di antara kelompok usia lainnya penduduk Indonesia. Kelompok usia ini akan menjadi solusi dan sumber kekuatan bangsa, jika me-

reka disiapkan dengan asuhan, pendidikan dan latihan yang efektif, sehingga potensi mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Mereka akan menjadi generasi berjati diri dan produktif. Sebaliknya bahwa generasi emas ini akan tidak berarti banyak, bahkan akan menjadi persoalan besar, jika mereka tidak belajar dan bekerja keras serta seluruh elemen bangsa tidak menunjukkan kebersamaan dalam menciptakan pendidikan berkualitas, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Pada abad ke-21 tuntutan untuk dapat hidup dan bekerja dengan sukses terus berubah. Untuk menghadapi tuntutan yang terus berubah ini, sangat diperlukan pengetahun lebih baik dan berbeda sesuai dengan tuntutan dan kondisi. Untuk sukses dalam memenuhi tuntutan tersebut sangat diperlukan penguasaan kecakapan tertentu yang relevan. Daniel H. Pink (2005) melalui bukunya *A Whole New Mind*, menyatakan bahwa pada era abad 21, telah bergerak dari *Information Era ke Conceptual Era.* Artinya bahwa di Abad 21 seseorang akan berhasil hidupnya, jika dia menguasai konsep atau ide daripada hanya menguasai informasi saja. Dengan kata lain, menguasai informasi saja tidak cukup, kalau tidak menguasai konsep di balik itu. Dengan demikian kemampuan untuk mensinergikan fungsi otak kiri (berpikir sekuensial, logik, dan analitik) dan fungsi otak kanan (berpikir non-linier, intuitif, dan holistik), sangatlah diperlukan. Dengan mengoptimalkan sinergi kedua fungsi otak itu akan muncullah kemampuan kreatif yang memang menjadi kemampuan dasar untuk menghasilkan ide-ide baru yang sangat diperlukan dalam menghadapi dunia yang sangat cepat berubah.

Di samping itu untuk menghadapi realitas tantangan, ada sejumlah keterampilan tertentu yang harus dikuasai. NCREL and Metiri Group (2003) melalui tulisannya yang berjudul *"enGauge 21st century skills: Literacy in the digital Era"*, menjelaskan ada empat kluster keterampilan yang harus dikuasai dalam menghadapi abad 21, yaitu: *Digital-age Literacy, inventing thinking, Effective communication,* dan *High productivity.* Adalah disadari sepenuhnya bahwa berbagai keterampilan untuk sukses hidup di abad 21 tersebut cenderung bersifat duniawiyah, padahal kita sebagai umat beragama dan insan pancasilais memiliki kebutuhan dan tujuan lebih dari itu. Kita tidak hanya ingin hidup sukses dan bahagia di dunia saja, melainkan juga sukses dan bahagia di akhirat kelak. Karena itu keterampilan apapun yang hendak dikembangkan seharusnya selalu dilandasi nilai-nilai spiritual, sehingga terjadi keseimbangan hidup.

Isu-isu Mutakhir Pendidikan

Untuk mengantarkan generasi emas 2045, perlu diangkat sejumlah isu-isu pendidikan yang mutakhir. *Pertama,* **pendidikan usia dini** sangat diperlukan

untuk mengisi dan memproses usia emas, sehingga terbangun landasan yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Ketepatan cara mendidik waktu usia dini menjadikan modal penting bagi kelanjutan hidupnya. Ingat kata Freud, anak adalah ayahnya manusia (*child is a father of man*).

Kedua, **pendidikan universal 12 tahun** menunjukkan bahwa untuk berhasil memasuki era abad ke-21 adalah setiap insan mampu menunjukkan pendidikan lebih yang dibuktikan dengan minimal pendidikan menengah. Dengan pendidikan menengah diharapkan setiap insan Indonesia dapat memenuhi tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta melek dalam dunia digital. Selanjutnya untuk menyelamatkan generasi emas perlu diberikan akses lebih terbuka untuk studi di perguruan tinggi dengan memberikan dukungan biaya bagi warga negara yang berpotensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi.

Ketiga, **pendidikan karakter** sangatlah diperlukan bangsa Indonesia, terutama dalam membentuk insan Indonesia yang berkarakter, insan yang religius, bertanggungjawab, cinta Indonesia, berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan, demikian juga menjauhkan diri dari tindakan konflik dan diskriminatif. Untuk mengefektifkan pendidikan karakter, sangat diperlukan pendidikan karakter yang komprehensif, baik melalui kurikulum terpisah *(separated curriculum),* misalnya pendidikan agama, pendidikan pancasila, pendidikan kewarganegaraan, maupun melalui kurikulum terintegrasi *(integrated curriculum)* misalnya pendidikan karakter yang diintegrasikan materi atau metodenya melalui mata pelajaran lainnya, misalnya pelajaran bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan sebagainya. Demikian pula implementasi pendidikan karakter dapat dilakukan melalui aktivitas akademik dan non-akademik.

Keempat, **pembelajaran kreatif** mendorong kemampuan mensinergikan fungsi otak kiri dan kanan, yang sangat diperlukan untuk mengembangkan kecakapan berpikir divergen, kreatif, lateral, dan kritis. Dengan kemampuan berpikir kreatif, setiap insan diharapkan mampu menghadapi tantangan pada generasi dan zamannya. Kiranya perlu mendapatkan pehatian tersendiri bahwa pemiliki ide-ide kreatif adalah pemilik dan pemimpin masa depan.

Kelima, **pendidikan inklusif** dipandang sangat penting bagi insan Indonesia yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini sepenuhnya dilandasi oleh demokrasi pendidikan, hak asasi manusia, dan prinsip pendidikan untuk semua. Dengan kondisi keterbatasan dan kelainan apapun bukanlah menjadi alasan utama untuk tidak bisa mengakses layanan pendidikan. Karena itu ke depan perlu ada jaminan pendidikan bermutu untuk semua melalui pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif akan dapat berlangsung dengan baik, jika dalam waktu yang sama dibangun masyarakat inklusif.

Keenam, **Pendidikan multikultural** diyakini dapat menjadi solusi yang efektif dan edukatif terhadap keragaman yang semakin meningkat, baik berkenaan dengan suku bangsa, ras, agama, dan budaya yang terjadi di Indonesia. Di tahun 2015 kita memasuki komunitas Asean, artinya bahwa keragaman kita semakin meningkat, belum lagi jika memasuki komunitas Asia dan Dunia. Manusia pada dasarnya unik, di balik keunikan itu ada potensi kelebihan dan kekurangan. Untuk tetap terjaga martabat manusianya hingga sampai akhir zaman, maka yang sangat diperlukan adalah terbangunnya sikap saling respek dan menghargai kelebihan masing-masing. Pendidikan multikultural hendaknya diimplementasikan secara optimal untuk tetap menjaga dignity insan Indonesia pada era 2045 kelak.

Ketujuh, Pendidikan berbasis ICT sangatlah diperlukan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat informasi. Karena berlangsungnya proses pendidikan tidaklah hanya bertumpu pada rumah dan sekolah, melainkan bertumpu pada *"anywhere"*. Artinya, proses pendidikan ke depan akan lebih berlangsung secara massif di manapun kita berada. Karena itu pengelolan pendidikan, proses pembelajaran, metode pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, perlu digarap secara serius, sehingga tidak menurunkan nilai-nilai penting pendidikan, yaitu memanusiakan manusia, bukan merobotkan manusia.

Beberapa Isu tersebut tentu sangat mungkin berkembang lebih banyak lagi dan lebih dalam persoalannya, karena kecepatan kemajuan ipteks dewasa ini sangatlah tinggi. Konsekuensinya bahwa dinamika perubahan perilaku manusia tidak bisa dikendalikan dengan mudah. Namun demikian esensinya adalah bagaimana adaptasi sistem pendidikan ini perlu dilakukan sepanjang waktu seiring dengan tuntutan zaman dan generasi, sehingga manusia tetap menduduki posisi terhormat, baik di depan mata orang lain atau bangsa lain, maupun di mata Allah Swt.

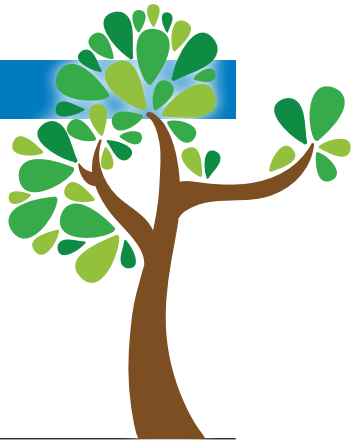

Mempertanyakan Komitmen Negara terhadap Pendidikan

Pengantar

Persaingan bebas yang semakin mengglobal menjadikan pendidikan sebagai wahana yang sangat menentukan, karena pendidikan berkaitan erat dengan peningkatan kualitas manusia sebagai pelaku utamanya. Agar bangsa Indonesia tetap eksis dan dapat berperan aktif, maka sumber daya manusianya perlu mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas pula.

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian. Selain itu juga mengembangkan dan menyebarluaskan ipteks serta mengupayakan penggunaaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.(PP 30/1990).

Menyadari hal tersebut kiranya sangat jelas bahwa keberadaan perguruan tinggi sangatlah strategis dalam pengembangan sumber daya manusia sebagai andalan utama dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian negara tidak dapat mengelakkan kehadiran perguruan tinggi. Walau perguruan tinggi dipandang strategis, hingga kini angka partisipasi kasar (APK) baru mencapai 12,8 %. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar bangsa Indonesia belum mampu mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.

Posisi Perguruan Tinggi dalam Kehidupan Bernegara

Posisi perguruan tinggi pada dasarnya sangatlah strategis di dalam pembangunan bangsa, terlebih-lebih di era kompetisi dewasa ini, karena perguruan tinggi secara potensial merupakan institusi yang sangat bertanggungjawab dalam menghasilkan sumber daya yang handal. Karena itulah upaya pembina-

an perguruan tinggi perlu terus diupayakan. Satryo Soemantri B. (Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi, 2001) menegaskan bahwa arah pembinaan perguruan tinggi, di antaranya sebagai berikut: (1) merupakan bagian integral dari usaha pembangunan nasional maupun daerah; (2) merupakan penghubung antara dunia ipteks dan kebutuhan masyarakat; (3) melaksanakan pendidikan berdasarkan pola pemikiran yang analitik dan berorientasi pada pemecahan masalah dengan pandangan masa depan; (4) berpartisipasi dalam perbaikan serta pengembangan mutu kehidupan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan penerapannya, pengertian dan kerja sama internasional dalam usaha mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia; dan (5) memungkinkan terlaksananya pengembangan seluruh kemampuan serta kepribadian manusia, mobilitas dalam memperoleh pengalaman pendidikan, diversifikasi dan demokratisasi dalam pendidikan dan proses belajar, mobilisasi sumber masyarakat untuk pendidikan, dan pertumbuhan kegairahan riset.

Wujud perguruan tinggi dewasa ini di satu sisi cukup menggembirakan, karena berada dalam pembinaan pola tunggal, yang tidak ada lagi dikotomi PTN dan PTS yang dimanifestasikan melalui pembentukan Badan akreditasi Nasional (BAN). Yang menjadi beda hanya pada sektor pengelolaan dan sumber pembiayaannya. Seiring dengan ini juga dikembangkan paradigma baru pendidikan tinggi yang bertumpu kepada tiga pilar utama, yakni kemandirian dalam pengelolaan atau otonomi, akuntabilitas (*accountability*), dan jaminan mutu (*quality assurance*).

Kemandirian dalam pengelolaan tidak hanya berkaitan dengan persoalan menajerial saja, melainkan juga persoalan substansi akademik. Akuntabilitas hendaknya diartikan bukan saja terhadap pemerintah sebagai Pembina atau pemberi dana dan sumber daya lainnya, melainkan juga terhadap masyarakat pemakai hasil lulusan dan hasil pengembangan iptek, termasuk terhadap organisasi profesi dan dunia usaha-industri. Akhirnya jaminan mutu perlu terus diupayakan secara dinamis seiring dengan tuntutan lapangan dan persaingan global.

Pendidikan Tinggi merupakan proses yang mahal

Dewasa ini sering terlontar tuntutan masyarakat adanya pendidikan murah dan berkualitas. Secara emosional setiap orang sungguh memberikan dukungan yang sangat positif terhadap ungkapan tersebut. Namun bagaimana mewujudkannya, tentu tidaklah mudah, karena sangat dibutuhkan idealisme pelaku yang sangat luar biasa.

Djoko Santoso (2000), menyatakan bahwa pendidikan tinggi pada umumnya dan pendidikan teknologi pada khususnya merupakan suatu proses pendi-

dikan yang juga merupakan proses peradaban yang mahal. Hal ini terjadi karena apa yang harus dihasilkan harus bersifat profesional, sehingga menjurus kepada sifat *"cost center"*. Kebutuhan yang besar antara lain kebutuhan untuk penelitian. Pernyataan ini memberi isyarat bahwa untuk membangun perguruan tinggi yang berkualitas sangatlah diperlukan biaya yang mahal.

Dalam menghadapi perguruan tinggi yang berbiaya tinggi seharusnya tidak menjebak kita untuk berhenti sampai di sini, yang lebih penting adalah bagaimana mengupayakan dana yang diperlukan itu tidak banyak membebani mahasiswa. Untuk itulah diperlukan kepiawaian pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pengelolaan secara lebih profesional.

Pendidikan Tinggi: *Public Goods atau Private Goods*

Pendidikan pada hakekatnya menjadi hajat orang banyak, bahkan semua anak bangsa, sehingga pendidikan pada dasarnya merupakan *public goods*, terutama jika dikaitkan dengan pendidikan dasar sembilan tahun dengan standar kualitas minimal. Bagaimana dengan pendidikan tinggi? Di satu sisi pendidikan tinggi merupakan *public goods* jika dimaksudkan untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang memang menjadi kebutuhan dasar anak bangsa dan negara, namun di sisi lain pendidikan tinggi merupakan *private goods* jika kehadirannya menawarkan pilihan bagi masyarakat.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas semakin jelas, bahwa kehadiran PTN dan PTS yang memberikan banyak pilihan kepada masyarakat tidak bisa dilepaskan dari visi dan misinya. Pemerintah seharusnya benar-benar adil dalam mengembangkan kebijakannya dan mengimplementasikannya, dengan tanpa ada tendensi untuk semakin membebani masyarakat dalam pengelolaan perguruan tinggi.

Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Perguruan Tinggi

Pada dasarnya pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap eksistensi dan pengembangan perguruan tinggi, di samping orangtua dan masyarakat sebagai pengguna lulusan. Sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah, ada sejumlah upaya yang seharusnya dapat dilakukan pemerintah (baru) ke depan di antaranya:

1. Melaksanakan kendali manajemen perguruan tinggi dengan melakukan akreditasi secara bertanggungjawab.
2. Melakukan rekonstruksi pola pemberian dana secara lebih adil kepada perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

3. Memberi tindakan tegas kepada pelaku pelanggaran baik secara institusional maupun individual, terutama dalam pemberian gelar atau ijazah.
4. Memberi dukungan dana yang memadai bagi penyelenggaraan program studi tertentu yang menjadi kunci hajat bangsa dan masyarakat.
5. Memberi dukungan penuh dalam pembiayaan studi bagi yang potensial, tetapi tidak memiliki kemampuan cukup secara ekonomis.
6. Memberi perlindungan dan jaminan hak cipta yang dihasilkan oleh masyarakat, terutama yang di jajaran perguruan tinggi.
7. Memberi jaminan dan penghargaan terhadap dunia usaha dan bisnis bagi yang membangun kerjasama dalam riset dan kegiatan pendukung akademik lainnya, di samping memberikan sanksi kepada mereka yang tertutup dalam bekerja sama dengan perguruan tinggi.
8. Menjamin terjadinya transpanrasi pengelolaan perguruan tinggi yang selama ini masih belum menggembirakan.
9. Mengendalikan rekrutmen lulusan di berbagai dunia kerja yang bebas KKN, guna menjaga kegairahan mahasiswa selama proses pendidikannya.
10. Melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan program pendidikan baik pada PTN atau PTS, sehingga dapat menjamin keberlanjutan institusi.

Penutup

Demikianlah beberapa hal penting yang dapat menjadi *trigger* dalam rangkaian Workshop Pendidikan tentang Demokratisasi Pendidikan di Perguruan Tinggi, semoga dapat memberikan kontribusi bagi terbentuknya forum yang mampu memberikan pencerahan terhadap kehidupan pendidikan di Indonesia. Amin.

Tulisan ini dibahas dalam Workshop Pendidikan yang diselenggarakan oleh LABDA Jogjakarta, BEM KM UGM, BEM UNY pada 25 September 2004 di Wisma Sargede Jl. Pramuka Yogyakarta.

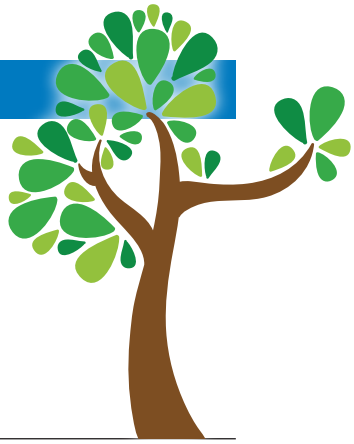

Kebangkitan Nasional dalam Perspektif Pendidikan

DEWASA ini banyak orang merasa bangga dengan perjuangan para pahlawan, yang telah berhasil membangun kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga mampu bangkit dari kehancuran dari sepak terjang penjajah. Bahkan sampai mampu membangun rasa persatuan dan kesatuan yang dibingkai melalui sumpah pemuda, yang pada akhirnya berhasil memproklamirkan Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Walau telah mencapai kemerdekaaan, Indonesia tetap dihadapkan dinamika sosial, bahkan sampai pada puncaknya terjadi koreksi total pada pertengahan tahun 1960-an dan akhir tahun 90-an, sehingga Indonesia sedikit terselamatkan dari krisis multidimensional, yang dampaknya hingga kini masih belum tuntas diselesaikan, walau sudah berjalan 10 tahun. Apalagi dipersulit dengan adanya sejumlah kelompok masyarakat yang menafsirkan reformasi secara 'kebablasan', sehingga menimbulkan kesan yang kurang positif terhadap gerakan reformasi.

Bulan Mei 2008 pada hakekatnya patut dijadikan wahana sekaligus momentum bagi kita semua untuk melakukan refleksi diri terhadap eksistensi bangsa Indonesia yang sudah berjuang lebih intensif selama 100 tahun. Sebagai bangsa yang cerdas dan *smart*, tidak akan berhenti dengan membanggakan keberhasilan perjuangan masa lalu oleh pemimpin-pemimpin terdahulu di berbagai bidang, namun yang jauh lebih penting adalah menjadikan perjalanan sejarah sebagai pengalaman dan modal yang berharga untuk membangun masa depan Indonesia yang damai, adil, demokratis, dan sejahtera, sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat insan Indonesia, baik sebagai personal, masyarakat, maupun bangsa.

Di samping kekuatan dan capaian yang telah kita raih setelah Indonesia bangkit, maka sudah sepatutnya kita menempatkan dan membangun landasan

yang kuat bagi tegak dan berkembangnya bangsa Indonesia di masa-masa mendatang, khususnya 100 tahun mendatang. Karena itu sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, tidak boleh terjebak oleh *ilah-ilah* yang bersifat materialistik, kapitalistik, maupun hedonistik. Melainkan kita seharusnya menempatkan insan Indonesia sebagai hamba yang taat kepada Tuhannya, di samping menjadi pemimpin dan khalifah di bumi yang mampu mempertanggungjawabkan terhadap amanah yang dipercayakan di pundaknya.

Secara futuristik, seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai keunggulan potensi dan karya, secara mandiri dan otonom senantiasa mempersiapkan diri untuk dapat berkiprah, baik secara personal maupun kolektif, sehingga setiap insan tidak menyia-nyiakan hidupnya, karena mampu memberikan kontribusi secara signifikan bagi pembangunan bangsa dan negara, bahkan masyarakat dunia. Ingat, sebaik-baik di antara kamu adalah yang bermanfaat bagi orang banyak.

Menyadari akan era global dan hidup di tengah-tengah alam semesta, maka insan Indonesia harus menyadari akan keunggulan yang diberikan oleh Tuhan di antara insan-insan di belahan dunia lainnya. Mari kita perhatikan, bahwa Indonesia berada di tengah-tengah khatulistiwa dengan memiliki dua musim yang bergiliran sesuai dengan siklusnya, memiliki jumlah waktu pada siang dan malamnya secara seimbang, serta memiliki kekayaan daratan dan lautan yang tiada terkira. Semuanya itu menjadi lingkungan dan sumber daya alam yang sangat berharga bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai insan yang mengakui akan keagungan Tuhannya, sudah seharusnya rasa syukur dijunjung setinggi-tingginya yang diwujudkan dengan menjaga lingkungan alam beserta seisinya secara bertanggung jawab. Bukan sebaliknya, beramai-ramai dan bersukaria untuk mengekploitasi kekayaan alam secara berlebihan, sehingga berpotensi memberikan dampak bagi ketidakseimbangan struktur dan kondisi alam dan seisinya, yang pada akhirnya dikhawatirkan mengancam keamanan, keselamatan dan kesejahteraan insan Indonesia khususnya, dan manusia dunia pada umumnya.

Atas dasar itulah, maka untuk memasuki abad kedua kebangkitan bangsa Indonesia, maka sangat diperlukan suatu sistem pendidikan holistik *(Tarbiyyatul Kaamilah)*. Artinya bahwa pendidikan perlu diorientasikan untuk membangun kesadaran ilahiyah, kompetensi psikologik, kecakapan fisikal, keterampilan sosial, kesadaran lingkungan, komitmen kebangsaan, respek terhadap kemanusiaan, dan kreativitas dalam menghadapi masa depan. Karena itu pendidikan harus dipandang sebagai kebutuhan, bukan lagi sebagai politik balas budi. Dalam rangka untuk mengantarkan insan Indonesia yang mampu menjadi hamba Allah yang taat kepada-Nya yang mampu memberi keteladanan

bagi orang lainnya dan khalifah di atas bumi yang bertanggungjawab kepada sesama dan lingkungannya yang dilandasi dengan rasa tawadlu'.

Pendidikan ke depan diharapkan mampu dijadikan sebagai suatu strategi unggulan untuk menjaga martabat manusia dan bangsa Indonesia sebagai makhluk paling sempurna (Q.S. Attiin:4). Walau disadari bahwa praksis pendidikan yang ada di depan mata kita tidak secara otomatis mampu mewujudkan misinya yang terpuji itu. Oleh karenanya untuk menjadikan strategi pendidikan tetap memiliki nilai fungsional bagi kebangkitan bangsa Indonesia, perlu sekali dijaga koherensinya antara satu orientasi pendidikan dan orientasi pendidikan lainnya, konsistensi filosofi, sistem pendidikan dan pengelolaan pembelajaran, kesinambungan substansi dan metodologi pendidikan antar jenjang, serta sistem evaluasi pendidikannya, sehingga dapat diperoleh lulusan yang mencapai kelengkapan bentuk sesuai dengan *level*-nya.

Pemerintah sebagai unsur terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan seharusnya mampu dan wajib memberikan jaminan bagi pemberian layanan pendidikan bermutu bagi semua warga Indonesia, yang sementara ini diutamakan untuk jenjang pendidikan dasar. Karena diyakini bahwa pendidikan merupakan suatu *public goods*. Sebaliknya layanan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi merupakan suatu *private goods,* sehingga peran masyarakat terutama orangtua masih dituntut untuk berpartisipasi, bahkan untuk pendidikan dasar yang *rannking*-nya di atas rata-rata masih dimungkinkan untuk melibatkan orangtua, terutama yang memang institusi-institusi pendidikan itu masih menginginkan biaya dan dukungan keahlian guna menjamin mutu pengelolaan pendidikan.

Menyadari akan nilai strategisnya bidang pendidikan bagi masa depan bangsa Indonesia, maka diharapkan sekali pembangunan sistem pendidikan nasional dapat dijadikan prioritas secara terus menerus sampai dicapainya kemandirian masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan di tengah-tengah percaturan global. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak, yang dapat diwujudkan dengan adanya kemurnian niat *(purified intention)* dan kemauan baik *(good willingness)* untuk memberikan sesuatu yang baik bagi orang lain. Perilaku yang konstruktif pada level personal dan kolektif perlu dijadikan budaya dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat yang dilandasi dengan mengharapkan ridlo dari Allah swt, Tuhan yang Rahman dan Rahiim.

Demikian pula, pendidikan harus dijadikan pahlawan, bukan politik dan ekonomi, dalam membangun insan-insan Indonesia masa depan, walau politik dan ekonomi juga penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, setiap sektor kehidupan seharusnya memiliki misi pendidikan, di samping bertumpu pada peran

strategis pendidikan dalam menghadapi setiap persoalan saat ini maupun persoalan mendatang. Dengan pendidikan, diharapkan proses humanisasi terus berlangsung, sehingga kehadiran setiap insan tetap bermartabat *(dignified)* dan berperadaban *(civilized)*.

Tulisan ini merupakan naskah Analisis KR menyambut Hari Kebangkitan Nasional 2008.

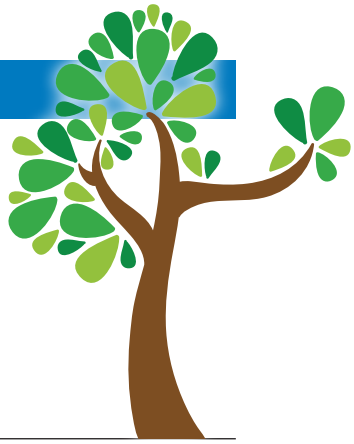

Rehabilitasi Pendidikan Pasca Erupsi Merapi

DIY dan Jateng pada 2006 (Mei) mendapat mushibah gempa bumi di wilayah Bantul, Klaten dan sekitarnya. Kemudian mendapat mushibah yang tak kalah dahsyat melalui erupsi gunung Merapi yang diawali pada 26 Oktober 2010 dan diperkuat 5 November 2010 dengan muntahan lahar panas yang membuat kerusakan bangunan dan pepohonan serta menelan banyak korban tewas, cacat dan luka, bahkan trauma psikis. Kejadian ini merusak banyak hunian, pertanian, pekebunan dan tempat pendidikan semua jenjang dan jenis pendidikan.

Kejadian erupsi merapi ini sungguh menguji keberagamaan, keahlian, dan rasa kesetiakawanan kita. Upaya-upaya pemulihan dan *recovery* secara berangsur-berangsur dilakukan, di antaranya pendirian *shelter-shelter,* pengaktifan pusat kegiatan ekonomi (pasar-pasar tradisional), dan sebagainya. Upaya yang tidak boleh ditunda-tunda adalah pemulihan kegiatan pendidikan bagi para peserta didik yang mendapatkan dampak erupsi merapi, baik yang sudah kembali ke huniannya masing-masing, maupun yang masih dalam pengungsian, terlebih-lebih bagi yang rumah dan wilayahnya rusak berat.

Menurut hemat penulis, ada berbagai upaya pendidikan yang dapat dilakukan terhadap masyarakat yang mendapatkan dampak erupsi merapi.

Pertama, masyarakat yang mendapatkan dampak langsung yang kehilangan anggota keluarga dan hartanya, serta kerusakan rumahnya, perlu mendapatkan penyuluhan agama yang mampu membuat mereka dapat menerima mushibah dengan sabar, ikhlas dan tawakkal, konseling traumatik yang dapat mengeliminir trauma psikologis, dan pelatihan keterampilan yang dapat membekali keterampilan dan keahlian sebagai pilihan kerja lainnya. Upaya-upaya ini tidak hanya dimaksudkan untuk membekali diri dan kecakapan untuk kembali ke tempat hunian semula, melainkan juga untuk sejumlah warga yang akan transmigrasi ke tempat lain (misalnya ke Kalimantan). Adapun para peserta didik

dari kelompok ini selama pengungsian, perlu memperoleh pendidikan sesegera mungkin, baik melalui pengintegrasian dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar tempat pengungsian yang menyatukan dengan sesama kelasnya atau membuka kelas paralel pada *shift* siang/sore. Demikian juga peserta didik diberi layanan pendidikan di sekolah yang dibangun di lingkungan *shelter-shelter* sebagai kesatuan paket dalam pendirian *shelter*.

Kedua, masyarakat yang mendapatkan dampak langsung yang tidak kehilangan anggota keluarga dan hartanya, serta kerusakan rumahnya. Awalnya, mereka diwajibkan mengungsi, namun kemudian dibolehkan kembali ke rumahnya masing-masing. Untuk menghadapi masyarakat kelompok ini sangat diperlukan pendidikan masyarakat yang diorientasikan kepada penyuluhan tentang erupsi gunung api dan berbagai dampaknya, sehingga mereka dapat bersikap positif dan terjauhkan dari trauma psikis. Semua aktivitas pendidikan dapat diupayakan berjalan normal, jika perlu ada upaya yang lebih serius untuk meningkatkan intensitas layanan dan mutu pendidikannya pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Layanan pendidikan bermutu diharapkan dapat membangun sikap optimis, sehingga setiap warga masyarakat memiliki kesiapan untuk menghadapi berbagai tantangan baik menghadapi kemungkinan erupsi gunung merapi lagi atau migrasi ke tempat lain dengan bekal keterampilan atau keahlian yang memadai.

*Ketiga***,** masyarakat yang mendapat dampak tidak langsung dan tidak perlu mengungsi. Masyarakat kelompok ini kadang menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran berlebihan, sehingga sampai muncul anggapan bahwa tinggal di DIY dan Jateng tidak aman. Sikap yang demikian sangat berlebihan, bahkan tidak edukatif dan tidak bermanfaat bagi semua. Untuk menghadapi masyarakat ini sangat diperlukan pendidikan masyarakat yang diorientasikan untuk menyadarkan semua insan bahwa setiap kehidupan di dunia ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan dan tantangan. Semakin banyak persoalan dan tantangan yang dihadapi seseorang, maka semakin cerdas, mantap, dan andal seseorang itu dalam hidupnya, karena dia memang hidupnya sudah teruji.

Pasca erupsi Merapi sungguh menuntut adanya pemulihan infrastruktur pendidikan di wilayah sekitar Gunung Merapi, pengembangan pendidikan berorientasi lingkungan dan pendidikan berkesinambungan, di samping menuntut pengembangan program pendidikan alternatif yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, serta perbaikan sikap masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bermutu, sehingga mampu membekali masyarakat dalam menghadapi tantangan di zamannya. Untuk itu perbaikan pembangunan pendidikan seharusnya dijauhkan dari kepentingan politis, melainkan lebih diteknakan pada kepentingan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

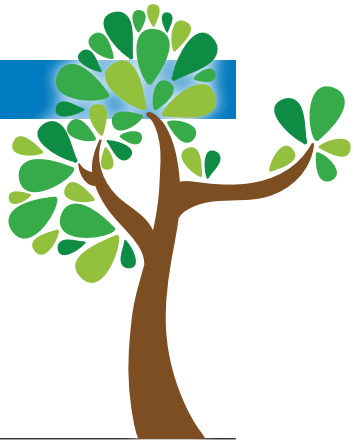

Mengkaji Implementasi UU Sisdiknas terhadap PTK Akademigas

Pengantar

Sangat disadari bahwa dalam era global dirasakan semakin banyak tantangan. Karena itu untuk tetap eksis dan mampu memenangkan persaingan, sangat diperlukan suatu kemampuan dan keahlian yang kompetitif. Menyadari akan tuntutan tersebut, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan berusaha terus untuk memberdayakan SDM-nya dengan mengadakan pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan nonformal. Yang salah satunya dapat diwujudkan dengan pendirian Akademi Mineral dan Gas (AKADEMIGAS).

Untuk memperoleh kemampuan dan keahlian kompetitif, dibutuhkan adanya suatu sistem pendidikan yang bermutu pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Di sisi lain bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas).

Berdasar isi dari UU tersebut, Departemen ESDM sangatlah tepat untuk mengembangkan kapasitas SDM-nya melalui pendirian suatu institusi pendidikan. Persoalannya sekarang, apakah program-program studi yang dikembangkan oleh AKAMIGAS benar adanya berdasarkan UU No 20 tentang Sisdiknas.

Untuk mengetahui lebih lanjut, kiranya baik sekali dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Ragam Pendidikan Kedinasan

Pendidikan Kedinasan pada hakekatnya telah lahir cukup lama seiring dengan kehadiran dan perkembangan sektor pembangunan. Karena itulah bisa dipahami, bahwa dewasa ini banyak ragam pendidikan kedinasan.

1. Berdasarkan Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Tahun 2005 dalam Buku III tentang Perguruan Tinggi Agama dan Kedinasan, Departemen Pendidikan Nasional: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, maka Perguruan Tinggi Kedinasan di Indonesia yang telah terakreditasi di antaranya:

   a. Pendidikan Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan (2-D3 PS)
   b. Akedmi Pimpinan Perusahaan, Jakarta (5-D3 PS)
   c. Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta (11-S1 PS)
   d. ST Ilmu Kepolisian PTIK, Jakarta (1-S1 PS)
   e. ST Hukum Militer, Jakarta (1-S1 PS)
   f. ST Ilmu Administrasi LAN, Jakarta (5-S1 PS)
   g. Akademi Kimia Analis, Bogor (1-D3 PS)
   h. ST Ilmu Administrasi LAN Bandung (3-S1 PS)
   i. ST Teknologi TNI Angkatan Laut (5-S1 PS)
   j. Akademi Teknik Industri Makasar (3-D3 PS)
   k. ST Ilmu Administrasi LAN Makassar (5-S1 PS)

   Pada prakteknya masih banyak jenis satuan pendidikan kedinasan di Indonesia yang belum terdaftar dan terakreditasi, sehingga pada kesempatan ini sulit dikemukakan. Diharapkan informasi ini dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan AKIMGAS ke depan.

2. Akademi Minyak dan Gas Bumi (Sekolah Tinggi Energi dan Mineral) Berdasarkan Website Akademi Minyak dan Gas Bumi (STEM), Cepu-Blora bahwa pada tahun akademik 2005/2006 terdiri 5 Jurusan yang terdiri atas (1) Jurusan Eksploitasi – Produksi, (2) Jurusan Proses Aplikasi, (3)) Jurusan Teknik Umum, (4) *Management Services*, dan (5) Pemasaran dan Niaga. Demikian juga Program studinya dari Jenjang diploma I sd IV sebanyak 16 yang terdiri atas:

   a. Program Studi Geologi
   b. Program Studi Pemboran
   c. Program Studi Produksi
   d. Program Studi *Refrenery*
   e. Program Studi Teknologi Gas
   f. Program Studi *Gas Processing*
   g. Program Studi Laboratorium Pengolahan
   h. Program Studi *Fire & Safety*

i. Program Studi *Utilities*
j. Program Studi *Instrument* & Elka
k. Program Studi Teknik Mesin Lapangan
l. Program Studi Teknik Mesin Kilang
m. Program Studi Teknik Listrik Perminyakan
n. Program Studi Teknik Sipil Perminyakan
o. Program Studi Sistem Informatika Migas
p. Program Studi *Management Services* Migas
q. Program Studi Pemasaran Dan Niaga

Output yang dituju program Diploma-Diplomanya adalah menghasilkan SDM yang memiliki keterampilan tinggi dalam profesinya, berkeahlian sesuai dengan kualifikasi bidang profesinya, serta memiliki kemampuan menerapkan keterampilan dan keahliannya secara kompeten dan profesional pada pekerjaannya.

Pendidikan Kedinasan Menurut UUSPN

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 29, menyatakan Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Di samping itu pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

Berdasarkan UU Sisdiknas tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang pada prakteknya program itu berada setelah program sarjana atau dilpoma IV. Implikasinya bahwa tidak dibenarkan pendidikan kedinasan membuka program pendidikan diploma. Semua program pendidikan jenjang sarjana dan diploma diselenggarakan oleh perguruan tinggi pada umumnya, baik itu pada Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi.

Pendidikan kedinasan pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan keahlian dalam pelaksanaan tugas, terutama bagi pegawai negeri atau calon pegawai negeri baik yang ada di lingkungan departemen atau non-departemen, yang telah memiliki kualifikasi akademik baik jenjang S1 atau D4. Dengan demikian tidak dibenarkan juga calon peserta didik yang belum memiliki kualifikasi minimal sarjana atau berdilpoma empat.

Penyelenggaraan pendidikan kedinasan dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. Artinya, pendidikan kedinasan bisa dilakukan

melalui penyelenggaraan pendidikan dengan program utuh sekitar 38-40 sks dalam satu waktu utuh melalui suatu institusi pendidikan tertentu, atau salah satu satuan pendidikan tinggi, apakah institut atau sekolah tinggi melalui jalur pendidikan formal, atau melalui jalur pendidikan non formal, misalnya dengan *earning credit systems*.

Jika pendidikan kedinasan merupakan suatu pendidikan profesi, maka pendidik dan tenaga kependidikannya, seharusnya memiliki kualifikasi minimal jenjang pendidikan magister (S2). Hal ini sejalan dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang SPN/Sisdiknas pada pasal 42 yang berbunyi bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi minimal dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selain itu diperkuat oleh UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 46 bahwa (1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian; (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana; (3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen; dan (4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (c) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi.

Pendidikan kedinasan merupakan institusi pendidikan yang di bawah naungan Departemen atau Non Departemen yang pembiayaannya menjadi tanggung jawab APBN lewat departemen atau nondepartemen yang bersangkutan. Jika Departemen atau Nondepartemen menyelenggarakan pendidikan di luar cakupan pendidikan kedinasan, maka tanggung jawab pembiayaannya di luar APBN (yang ada di departemen atau nondepertemen yang bersangkutan.

Implementasi UU Sisdiknas terhadap Akamigas (STEM)

UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pada hakekatnya mengatur semua kegiatan pendidikan, melalui semua jenis dan jenjang pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Dengan demikian tidaklah salah jika Departemen ESDM melalui Badan Diklatnya mengembangkan suatu program pendidikan bagi SDM-nya untuk terus meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahliannya, sehingga mereka dapat bekerja lebih produktif.

Seiring dengan disahkannya UU Sisdiknas, adalah langkah yang tepat bagi Badan Diklat Departemen ESDM untuk mengubah institusinya yang semula

Akademi Minyak dan Gas Bumi (AKAMIGAS) menjadi Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM), karena Pendidikan Kedinasan pada hakekatnya adalah suatu pendidikan profesi, yang penyelenggaraannya bagi lulusan S1 atau Diploma IV. Secara yuridis dan akademik, Sekolah Tinggi adalah salah satu institusi pendidikan tinggi yang berhak menyelenggarakan program profesi, selain universitas atau institut. Tentu saja Sekolah Tinggi dapat saja menyelenggarakan program sarjana dan diploma. Sebaliknya Akademi adalah salah satu institusi pendidikan tinggi yang hanya berhak menyelenggarakan program dilploma, sehingga Akademi tidak pada tempatnya menjadi suatu pendidikan kedinasan.

Mengingat Departemen ESDM masih memerlukan tenaga terampil dan semi profesional yang membutuhkan pendidikan jenjang diploma, maka penyelenggaraan pendidikannya tidak harus di bawah pendidikan kedinasan, melainkan di bawah payung pendidikan tinggi pada umumnya. Dengan demikian Departemen ESDM melalui Badan Diklatnya hanya berhak menyelenggarakan pendidikan kedinasan, baik melalui jalur pendidikan formal, maupun jalur pendidikan non-formal. Adapun calon peserta didiknya dapat merekrut dari pegawai negeri sipil maupun calon pegawai negeri. Yang penting mereka sudah memiliki kualifikasi sarjana atau diploma IV.

Menyangkut soal pendidik dan tenaga kependidikan untuk STEM, berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No.14 tahun 2005, maka dosen untuk STEM harus berkualifikasi minimal S2 atau yang memiliki prestasi luar biasa yang sangat dibutuhkan oleh STEM. Dengan demikian untuk dapat menjamin standar pendidik dan tenaga kependidikan pada STEM, diharapkan sekali semua dosen dapat segera memenuhi kualifikasi tersebut.

Berkenaan dengan pendanaan, penyelenggaraan STEM sebagai pendidikan kedinasan sepenuhnya mendapat dukungan biaya dari APBN lewat Departemen ESDM. Sementara itu STEM dapat saja menyelenggarakan program Sarjana (S1) atau diploma I sd IV, namun pembiayaannya tidak menjadi begian dari pendidikan kedinasan (yang bersumber dari APBN), melainkan dapat diatasi oleh swadaya lembaga, yayasan atau seharusnya berhak juga mendapatkan subsidi pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional.

Penutup

Kebutuhan merespons tuntutan dan tantangan global dalam berbagai sektor, khususnya sektor energi dan sumber daya mineral, tidak dapat dihindari. Untuk mengatasinya, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan di lingkungan Departemen ESDM merupakan langkah mutlak. Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan seharusnya minimal memenuhi rambu-rambu akademik dan legal formal, sehingga hasil yang dica-

pai tidak hanya pencapaian profesionalisme, melainkan juga *output* atau lulusan pendidikan dan pelatihannya mendapat jaminan hukum.

Dengan dikeluarkannya UU No. 20 tahun 2003, maka AKADEMIGAS perlu sekali melakukan rekonstruksi sistem kelembagaan, sehingga keberadaannya dapat memberikan jaminan akuntabilitas publik, yang pada akhirnya dapat memuaskan semua stakeholders. Semoga Renstra Kelembagaan segera dapat terwujud guna melahirkan lulusan-lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif secara nasional dan internasional.

Tulisan ini disampaikan dan dibahas melalui Forum Komunikasi Dosen PTK AKAMIGAS, Cepu, Blora, Jawa Tengah di Hotel Sahid Yogyakarta, pada 14 Juli 2006.

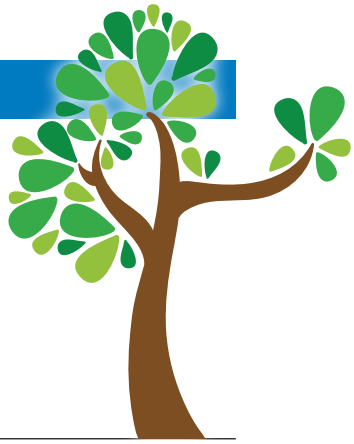

Pendidikan untuk Kebangkitan Bangsa

TANGGAL 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional merupakan perwujudan apresiasi yang sangat tinggi bagi tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantoro yang dilahirkan di Yogyakarta. Apresiasi atas prestasinya dalam meletakkan dasar-dasar pedagogis bagi sistem pendidikan nasional.

Secara historis, pada 1908, pendidikan memang sangat penting, karena pendidikan, di samping irigrasi dan transmigrasi, dipandang sebagai salah satu politik etis atau politik balas budi. Hal ini diwujudkan dengan berdirinya Sekolah Dasar Kelas Pertama yang ditujukan untuk pelayanan pendidikan bagi anak-anak tokoh terkemuka pribumi, bangsawan, dan penduduk yang disebut *Hollandsch Inlandsch School atau HIS,* Sekolah Rendah yang diperluas atau *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO),* Sekolah Menengah Umum sebagai kelanjutan dari MULO yaitu *Algemeene Midlbaar School (AMS)*, Sekolah Pendidikan Guru *(Kweekschool),* Sekolah Dokter Jawa yang disebut *School tot Opleiding voor Indische Artsen (STOVIA)* yang kini Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), dan Lembaga Pendidikan Tinggi Teknik yang disebut *Technise Hoge School (THS)* yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB).

Peran Strategis

Pendidikan di awal abad 20 berperan strategis karena dianggap mampu menaikkan status sosial anak dan mampu menghasilkan cendekiawan. Dengan kata lain, pendidikan diyakini sebagai salah satu ikhtiar penting dan efektif untuk meningkatkan derajat manusia, sehingga eksistensi manusia menjadi lebih terhormat. Ingat firman Allah swt bahwa "Allah swt mengangkat derajat orang-orang beriman dan menuntut ilmu di antara kamu (Q.S. Al-Mujaadalah:11).

Jika pendidikan saat itu lebih diarahkan pada target personal, pendidikan dalam konteks kini dan mendatang diharapkan ditargetkan kepada bangsa

sebagai suatu kesatuan. Ini tidak berlebihan jika dikaitkan dengan tujuan pendirian negara Indonesia, yang salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan saat itu memang sanggup menghasilkan sejumlah cendekiawan ideal yang memiliki tanggung jawab akademik, moral, dan sosial. Karena itulah para cendekiawan tidak hanya mampu menghasilkan karya-karya akademiknya yang handal, bersikap dan berperilaku terpuji, melainkan juga mereka mampu mendirikan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang pada akhirnya dapat membangun kekuatan kolektif dan kebangsaan. Dengan demikian pada akhirnya para cendekiawan, di samping izin Allah swt-Tuhan yang Maha Kuasa, dapat mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan, kebebasan, dan kejayaan bangsa Indonesia.

Pendidikan sebagai Modal Kebangkitan

Atas dasar pemikiran sebelumnya, maka sangatlah relevan bahwa tema Hardiknas 2008 *"Hardiknas 2008 Sebagai Bagian Dari Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Bangsa"* dapat dikaitkan dengan peringatan 100 tahun kebangkitan bangsa. Suatu tema yang belum pernah terjadi dan berpotensi untuk bangkitkan kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara, menuju masa depan Indonesia yang lebih cemerlang dan bermartabat.

Selain daripada itu, kiranya tidak berlebihan jika dikaitkan dengan visi pendidikan nasional yang menempatkan pendidikan pada posisi yang strategis sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa dalam mengantarkan perjalanan bangsa, terutama dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan menghadapi tantangan jaman dalam era informasi dan era ide dewasa ini.

Pendidikan nasional pada hakekatnya memiliki dua perspektif. Perspektif *pertama,* pendidikan nasional merupakan agen perubahan bagi semua sektor pembangunan, sehingga pendidikan nasional perlu terus didorong untuk berprestasi dengan harapan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat berdampak tidak hanya bagi eksistensi, pengembangan dan kesinambungan kehidupan pendidikan nasional, tetapi juga bagi kehidupan semua sektor.

Artinya, pendidikan jadi faktor kunci dalam kehidupan bangsa di tengah percaturan dunia baik kini dan mendatang. Bahkan implementasi sistem pendidikan nasional yang benar, diyakini mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan kehidupan di dunia dan di akhirat (di tengah-tengah masyarakat berpengetahuan atau *knowledge society* dan masyarakat bermoral).

Perspektif *kedua,* pendidikan nasional merupakan suatu solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat secara luas melalui karya-karya, baik pada tataran ide maupun tataran produk kerja. Dalam konteks ini setiap persoalan insan dan bangsa Indonesia, baik kecil maupun besar, diharapkan sekali mampu

dijawab oleh sistem pendidikan nasional yang mantap, baik pada tataran legal maupun empirik yang dikawal oleh para pendidik dan tenaga kependidikan (baik dalam institusi pendidikan formal, informal, maupun nonformal). Dalam kondisi ini pendidikan memainkan peran yang strategis sebagai solusi bagi setiap persoalan sertiap warga, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan.

Orientasi Baru Pendidikan

Untuk dapat menjamin posisi pendidikan nasional lebih strategis, perlu dimantapkan orientasi baru pendidikan, yang diawali dengan memantapkan pandangan terhadap hakekat peserta didik, sistem pendidikan nasional yang terbarukan dan *integrated,* serta model manajemen sekolah, manajamen kelas dan pembelajaran yang mendidik dan menyenangkan, sehingga sistem pendidikan nasional mampu menghasilkan insan yang bermoral, rasional, kompeten, *well-adapted,* dan berperan sebagai agen perubahan. Yang pada akhirnya, mereka diharapkan mampu menjadi subjek pembangunan nasional produktif, kreatif dan futuristik. Untuk itu dalam proses pendidikan sangatlah diperlukan internalisasi nilai-nilai religiusitas, akademik, kebangsaan dan kemanusiaan.

Jika dewasa ini selalu dipersoalkan tentang kualitas pendidikan nasional, hal ini tidak berarti bahwa kita tidak memiliki harapan sedikitpun kepada peran pendidikan nasional. Menurut hemat saya, yang patut dipersoalkan adalah kinerja pendidikan nasional yang masih belum sepenuhnya mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan kompetitif dalam menghadapi era global, tanpa melupakan eksistensi jati dirinya sebagai hamba Tuhan. Sungguh disadari bahwa kemajaun pendidikan nasional laksana deret hitung, sementara itu perubahan sosial laksana deret ukur. Dengan begitu untuk mengakselerasi kemajuan pendidikan nasional diperlukan sinergi semua pihak secara optimal.

Akhirnya, untuk menjadikan sistem pendidikan nasional mampu mewujudkan cita-citanya, kiranya perlu dimantapkan *political will* pemerintah (baik para eksekutif, legislatif, maupun yudikatif) untuk mensukseskan dan memprioritaskan posisi sistem pendidikan nasional sebagai PAHLAWAN pembangunan bangsa dan negara Indonesia di masa kini dan mendatang. Demikian pula sebaliknya, hendaknya bangsa Indonesia terus meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional, yang pada akhirnya dapat diyakini mampu memberikan solusi terhadap semua masalah yang dihadapi manusia Indonesia dan dunia. Singkatnya perlu ditegakkan secara simultan, *All for Education and Education for All.*

Tulisan ini merupakan naskah Analisis KR edisi Hari Pendidikan Nasional 2018.

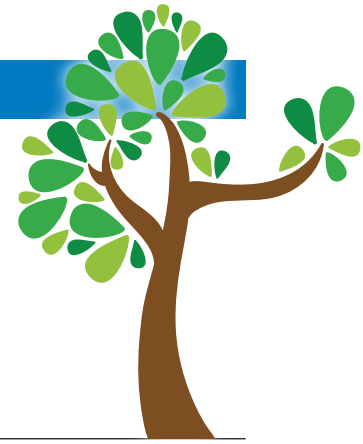

Mengkritisi Pendidikan Berbasis Kompetensi dan Berwawasan Moral

SUWARSIH Madya telah melakukan kajian secara cermat terhadap Pendidikan Berbasis Kompetensi dan Berwawasan Moral dengan mempertimbangkan aspek konseptual, di samping kondisi empirik pelaksanaan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Setelah me*review* tulisannya secara mendalam, ada beberapa hal yang perlu dikritisi, di antaranya: analisis tentang ketidakberhasilan pendidikan nasional, alasan PBKBM sebagai pilihan orientasi yang tepat, pemahaman tentang aliran yang mendasari pendidikan berbasis kompetensi, penentuan keberhasilan yang dikaitkan dengan proses dan produk, implikasi pendidikan guru prajabatan dan dalam jabatan, program pendidikan guru yang diarahkan pada kompetensi yang bervisi moral, dan seleksi calon mahasiswa

Pertama, ketidakberhasilan pendidikan nasional. Ketidakberhasilan pendidikan nasional menurut Suwarsih Madya lebih banyak disebabkan oleh pengalaman yang diperoleh di sekolah terlalu berat pada pengembangan kemampuan akademik saja, tanpa disinggung aspek lainnya. Saya sependapat dengan dugaan tersebut, tetapi menurut hemat saya aspek lainnya yang sangat penting untuk menghadapi kompetisi global adalah kompetensi dasar yang mencakup keterampilan memanaj diri, keterampilan berkomunikasi, keterampilan mengelola orang dan tugas, dan kemampuan mobilisasi inovasi dan perubahan, sebagaimana dikemukakan Evers, Rush, dan Berdrow (1998) melalui bukunya *The Bases of Competence: Skills for Lifelong Learning and Employability.* Tentu saja di samping kecakapan tersebut, yang juga sama-sama pentingnya adalah sikap dan perilaku yang religius. Hampir setiap peserta didik belum sepenuhnya mendapat kecakapan dasar tersebut melalui program yang sistematis dan terarah, di samping pembinaan kehidupan beragama yang belum optimal.

Di samping itu dinyatakan oleh Suwarsih Madya bahwa tujuan pendidikan nasional jelas masih sangat jauh dari tercapai. Pernyataan ini tidaklah sepe-

nuhnya salah, hanya yang perlu dipahami adalah, bahwa rumusan tujuan pendidikan nasional kita memang sangatlah ideal, sehingga tidaklah mudah untuk mancapainya, kendatipun implementasi pendidikan sudah diupayakan dengan sebaik mungkin.

Lain halnya dengan rumusan tujuan pendidikan Amerika Serikat (AS) yang dapat diukur dan dicapai pada waktu tertentu, karena memang dilandasi filosofi pragmatisme, misalnya pada tahun 2000, semua anak Amerika yang akan memulai sekolah siap belajar *(by the year 2000, all children in America will start school ready to learn), sebagaimana yang dikemukan oleh Laurie E. Gronlund (1993) dalam artikelnya Understanding the National Goal.*

Bandingkan dengan rumusan tujaun pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berdasar rumusan tersebut, kiranya perlu disadari bahwa rumusan tujuan memang sangat terkait dengan filosofi pendidikan yang mendasarinya. Namun lepas dari itu semuanya bahwa apapun wujud rumusan tujuan pendidikan, yang penting adalah bagaimana menjabarkan tujuan itu menjadi sejumlah kebijakan pendidikan yang memiliki konsistensi dari filosofi sampai ke operasionalisasinya. Sementara itu tujuan pendidikan nasional tidak selalu ditindaklanjuti secara konsisten dalam implementasinya, baik pada tataran sistem sampai ke tataran operasionalnya.

Kedua, Pendidikan Berbasis Kompetensi dan Berwawasan Moral (untuk seterusnya cukup disebut PBKBM) dianggap sebagai pilihan orientasi pendidikan yang tepat dalam konteks reformasi pendidikan. Jika itu hanya dikaitkan dengan upaya mengembangkan manusia berkualitas yang siap berkiprah secara berjaya dalam dunia ipteks yang mengglobal sebagaimana dinyatakan Suwarsih Madya, maka penjelasan PBKBM sebagai orientasi pendidikan belumlah cukup. Menurut hemat saya, melalui PBKBM, diharapkan Indonesia tidak hanya membangun pendidikan untuk mengantarkan warga negaranya yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) saja, melainkan juga iman dan takwa (imtak), karena kedua hal esensial inilah yang perwujudannya dapat saling menunjang secara fungsional diharapkan mampu mengantarkan kejajayaan bangsa Indonesia dalam era apapun.

Ketiga, pendidikan berbasis kompetensi yang sekarang dikembangkan lebih banyak didasarkan pada aliran rekonstruksi sosial, sebagaimana diungkapkan oleh Suwarsih Madya. Padahal jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional dan tantangan zaman, maka aliran yang perlu dan tepat melandasi pendidikan berbasis kompetensi adalah aliran eklektik di antara paranealisme, essensialisme, behaviorisme, progressivisme, dan *social reconstructivisne.* Dengan begitu pendidikan berbasis kompetensi dalam konteks ini, di samping

diharapkan menjadikan individu yang kompeten, juga memiliki kemampuan adaptif, agen perubahan, dan bermoral.

Menyadari akan tuntutan atas kondisi tersebut, kiranya sangat relevan bahwa pendidikan nasional yang kita bangun tidaklah dimaksudkan untuk mencerdaskan intelektual dan kinestetis saja, melainkan juga diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual. Individu yang kita harapkan dari sistem pendidikan nasional kita, bukan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan (kompeten) saja, melainkan individu yang juga hidupnya dilandasi dengan nilai-nilai religiusitas.

Keempat, penentuan keberhasilan tidak hanya dikaitkan dengan proses dan produk saja melainkan juga *input* dan dampak *(outacome).* Menurut hemat saya, apa yang disampaikan Suwarsih Madya bahwa untuk menilai pencapaian standar kompetensi cukup dilakukan terhadap keterlibatan peserta didik selama proses pendidikan (proses) dan penguasan materi yang telah ditetapkan sebelumnya (produk) saja. Jika demikian halnya, maka belumlah memadai, karena untuk melakukan penilaian yang lebih humanis dan pedagogis, dipandang perlu melakukan penilaian terhadap *input* dan dampaknya.

Penilaian terhadap *input* dianggap penting, karena setiap peserta didik memiliki keunikan dan perbedaan, sehingga tidaklah fair kalau setiap peserta didik diperlakukan dengan suatu standar yang sama untuk menentukan keberhasilannya. Demikian juga, bahwa penilaian terhadap dampak pendidikan (pengajaran lebih khususnya) sangatlah penting, karena dampak penyerta *(nurturant effect)* dari setiap proses pembelajaran dan pendidikan sangatlah berarti bagi kehidupan, terutama dalam kehidupan di masyarakat.

Kelima, implikasi pendidikan guru prajabatan (proses mempribadi) dan dalam jabatan (lebih dari mengajar, *as researcher*). Sumarsih Madya menegaskan bahwa implikasi bagi pendidikan guru prajabatan lebih menekankan pentingnya akan perbaikan keterampilan mengajar.

Keterampilan mengajar memang baik sekali untuk peningkatan kompetensi, namun keterampilan itu belum sepenuhnya mampu memberikan bekal bagi perbaikan kepribadian guru, sehingga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan iklim yang kondusif bagi perbaikan kepribadian mahasiswa pendidikan guru. Cara berpakaian yang rapi dan sopan serta pergaulan antar pribadi yang akrab merupakan iklim yang sehat dan kontributif, bagi terbentuknya kepribadian positif untuk seorang pendidik.

Selain itu, dalam pengembangan program pendidikan guru, kiranya perlu sekali dimungkinkan penanaman kompetensi yang bervisi moral. Artinya bahwa program pendidikan guru perlu mencerminkan suatu upaya penanaman kompetensi yang dilandasi dengan nilai-nilai kemanuasiaan dan keagamaan.

Sementara itu implikasi pendidikan guru dalam jabatan adalah untuk peningkatan kompetensi yang menurut hemat saya bahwa tidaklah seorang guru itu hanya diarahkan untuk memperbaikan keahlian mengajar saja, melainkan perlu sekali mereka dibekali kecakapan dalam meneliti dan membimbing. Kecakapan meneliti dimaksudkan untuk dapat meng-*update* ilmu dan metodologinya dalam mengajar, sehingga kegiatan pembelajarannya selalu dan lebih fungsional. Selanjutnya, kecakapan membimbing dimaksudkan untuk dapat menfasilitasi dan membantu guru secara efektif dalam mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, baik yang mengalami kesulitan maupun memiliki potensi unggul.

Keenam, pembenahan seleksi mahasiswa calon guru (MCG). Suwarsih Madya mengintrodusir bahwa seleksi yang lebih efektif untuk MCG adalah seleksi berdasarkan tingkat kemampuan akademik dan kemampuan khusus, serta kepribadian. Apa yang dikemukakan memang lebih lengkap daripada biasanya, namun yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya ditelusur minat dan *track-record* selama masih belajar pada jenjang sebelumnya, terutama catatan-catatan penting mengenai tingkah laku MCG, sehingga diperlukan sekali referensi dari gurunya.

Di samping itu untuk menjamin kualitas MCG, menurut hemat saya tidak hanya bertumpu pada proses rekrutmen saja, namun yang juga sama-sama pentingnya adalah penilaian yang dilakukan secara terus menerus terus terhadap semua aspek MCG selama proses pendidikannya, sehingga diperoleh portofolio yang sangat bermanfaat bagi penentuan kelulusan MCG pada akhir studinya. Hasil tes kepribadian memang penting, namun yang lebih penting lagi adalah segala perilaku yang terjadi selama proses pendidikannya. Jika kondisi ini diperhitungkan benar, impian tentang pendidikan berbasis kompetensi dan berwawasan moral akan menjadi kenyataan *(the dream comes true)*.

Akhirnya bahwa ujung dari semua aktivitas pendidikan adalah bertumpu pada pendidikan berbasis kompetensi dan berwawasan religius (menurut hemat penulis lebih luas dan bermakna daripada berwawasan moral). Oleh karena itu pendidikan tersebut diharapkan mampu menjadikan khalifah di bumi yang bertanggung jawab dan sekaligus hamba Allah swt yang taat.

Anak, Ibu,
dan Pendidikan

Strategi pendidikan keluarga dan pendidikan yang efektif adalah menanamkan nilai lama yang diyakini baik yang diiringi dengan keteladanan, dan mentransformasikan nilai-nilai baru yang lebih baik dalam suasana dialogis.

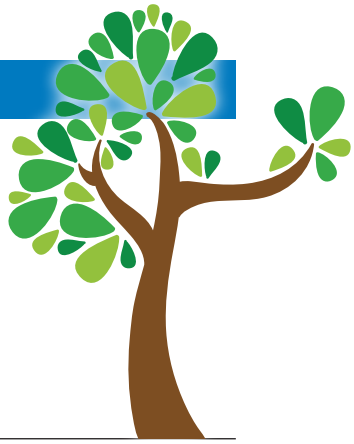

Anak Indonesia: Berakhlak Mulia dan Berprestasi

PERINGATAN Hari Anak Nasional, pada 23 Juli 2010, mengangkat tema: Anak Indonesia Belajar untuk Masa Depan, dengan sub tema: Kami Anak Indonesia, jujur, Berakhlak Mulia, Sehat, Cerdas, dan Berprestasi. Berdasar tema dan sub tema, dibuatlah judul *Anak Indonesia: Berakhlak Mulia dan Berprestasi*.

Diangkatnya judul ini didasarkan atas keprihatian terhadap adanya kecenderungan dekadensi moral dan rendahnya prestasi pada anak-anak Indonesia di tengah-tengah zaman terbuka dan kompetitif. Dekadensi moral nampaknya tidak hanya mengena anak-anak usia SMA-MA saja, melainkan juga sampai merambah ke usia SMP-MTs, bahkan usia SD-MI. Demikian juga secara agregat, prestasi anak-anak Indonesia dewasa ini, baik bidang IPA, Matematika, dan Membaca, masih cukup memprihatinkan bila dibandingkan dengan anak-anak bangsa lain.

Melalui peringatan HAN tahun 2010, diharapkan sekali semua pihak memfokuskan perhatiannya kepada penciptaan anak menjadi generasi unggul baik dalam aspek akhlaq-nya, maupun prestasinya. Akhlaq mulia merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Ingat akan hadits Rasulullah saw, *"Innamaa bu'its-tu liutammima makaarimal akhlaaq"*, yang artinya: Aku dibangkitkan di bumi ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlaq (Al-Hadits).

Hadits ini memberikan inspirasi bahwa akhlaq mulia merupakan suatu yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Mari kita cermati, bahwa persoalan perilaku yang tercela di rumah, bisa menghancurkan rumah tangga. Persoalan perilaku tercela di sekolah, bisa merusak bangunan dan budaya di sekolah. Persoalan perilaku tercela di kantor, bisa merusak tatanan dan pengelolaan kantor. Persoalan perilaku tercela di masyarakat, bisa merusak sosial dan kehidupan masyarakat dan bangsa.

Yang jelas kita wajib mengatasi dan menghindari adanya kerusakan moral pada masyarakat, terutama pada kelompok anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Dalam waktu yang sama, kita harus melakukan gerakan pembinaan moral, yang akhir-akhir ini sedang digalakkan oleh Kementeriaan Pendidikan Nasional melalui salah satu kebijakan pokoknya, yaitu menegakkan pendidikan karakter, baik untuk pembinaan moralitas keagamaan, maupun pembinaan rasa kebangsaan di antara anak-anak bangsa Indonesia. Menyadari akan pentingnya pembinaan pendidikan karakter bagi perbaikan akhlaq, maka sudah menjadi kebutuhan bagi kita semua untuk mendukung adanya gerakan pendidikan karakter. Artinya semua warga, orangtua, guru/dosen, tokoh masyarakat, dan jurnalis, serta siapapun sebagai warga negara, seharusnya terlibat secara intensif dalam mengawal implementasi pendidikan karakter secara kontekstual.

Selanjutnya bahwa prestasi cemerlang yang disertai dengan kemampuan kreatif merupakan indikator penting keunggulan seseorang dan suatu bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan yang dinamis di era global dan terbuka. Karena itu menjadi kebutuhan kita untuk dapat mengidentifikasi segala ragam potensi unggul pada anak sedini mungkin yang dilanjutkan dengan intervensi dini dan pembinaan secara berkelanjutan, sehingga karunia Tuhan itu dapat tumbuh dan berkembang optimal, yang pada akhirnya bisa bermanfaat bagi orang lain dan tidak sia-sia.

Untuk dapat meraih keagungan akhlaq mulia dan prestasi cemerlang dalam berbagai bidang pada diri anak, pendidikan merupakan suatu upaya dan langkah yang paling strategis. Dalam konteks ini, pendidikan keluarga merupakan pilar pertama dan utama, di samping pilar sekolah, tempat ibadah, masyarakat dan media masa. Keluarga sebagai institusi pendidikan dan semua anggota keluarga, terutama kedua orangtua memiliki kewajiban moral untuk dapat memainkan peran penting dalam menyiapkan anak berakhlaq mulia dan berprestasi. Memang kondisi sosial dan ekonomi dewasa ini menuntut orangtua lebih banyak orientasi aktivitasnya di luar rumah. Namun dengan teknologi modern yang dilandasi kesadaran beragama, orangtua di tengah-tengah kesibukannya seharusnya tetap dapat memainkan tugas pengasuhan, pendidikan, dan pengawasan atau pengendalian sesuai dengan kondisinya masing-masing, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kualitas komunikasi yang baik dan menyenangkan.

Menyadari akan pentingnya kebutuhan untuk menghasilkan generasi berkhlaq mulia dan berprestasi (ber-IMTAQ dan ber-IPTEKS tinggi), kiranya sudah saatnya digalakkan Pendidikan Pengasuhan (*Parenting Education)* dan Pendidikan Nilai bagi Orangtua *(Values Education for Parents)* di seluruh In-

donesia, terutama bagi keluarga muda, bahkan bagi yang menjelang pernikahan. Mengapa demikian, karena kehadiran anak dalam suatu keluarga membutuhkan orangtua yang terdidik, yaitu orangtua yang menerima secara ikhlas kehadiran anaknya apapun kondisinya dan mampu mendidik anaknya dengan baik yang penuh kasih sayang, bahkan terjauhkan dari sikap penolakan *(rejection)* dan sikap pengabaian *(ignorance)*.

Adalah diyakini bahwa strategi pendidikan keluarga dan pendidikan yang efektif adalah menanamkan nilai lama yang diyakini baik yang diiringi dengan keteladanan, dan mentrasnformasikan nilai-nilai baru yang lebih baik dalam suasana dialogis. Akhirnya perlu direnungkan, bahwa anak adalah amanah dari Allah swt, yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya.

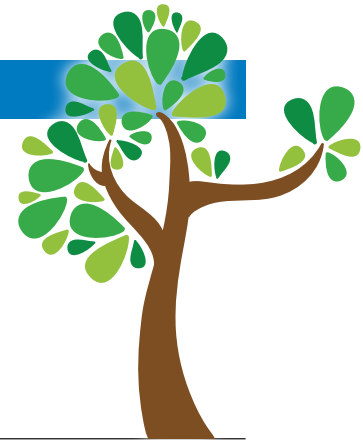

Anak Sehat, Kreatif, dan Berakhlaq Mulia

HARI ini sebagai anak, di masa depan menjadi orang dewasa yang berhasil. Jika mengkondisikan dan mendidik anak di masa kecil dilakukan dengan benar, maka pada saat dewasanya diyakini, insya Allah akan menjadi orang yang berkembang optimal dan sukses hidupnya. Hal inilah yang menjadi impian setiap orangtua, pendidik, dan pemimpin bangsa.

Menyadari akan kompleksitas kehidupan dewasa ini, terlebih-lebih di negara yang sedang berkembang dan di tengah-tengah kehidupan global, anak-anak Indonesia menghadapi persoalan yang sangat berat. Untuk menghadapi tantangan ini dan menyelamatkan masa depan anak Indonesia, salah satu langkah strategis adalah Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2011 mengambil tema *Anak Indonesia yang Sehat, Kreatif, dan Berakhlaq Mulia*.

Anak sehat merupakan impian setiap orangtua, sehingga hampir semuanya terus berusaha menggunakan hartanya untuk kesehatan anak, terlebih-lebih di awal-awal masa pertumbuhan dan perkembangannya. Begitu pentingnya kesehatan, Rasulullah memberikan anjuran kuat terhadap pentingnya kesehatan, sebagaimana sabdanya: *"Adzdzibuu auladakum fish-shibaahata warimaayata"* yang artinya, didiklah anak-anakmu dengan berenang dan melempar".

Mengapa berenang dan melempar? Karena kedua jenis olahraga ini sangat menuntut gerak semua anggota tubuh dan menjadi bekal keselamatan untuk menghadapi musibah banjir, di samping melatih konsentrasi yang sangat diperlukan dalam menghadapi persoalan hidup. Terlepas dari komitmen orangtua, jaminan kesehatan anak perlu mendapatkan prioritas dari program pemerintah.

Anak kreatif seharusnya menjadi obsesi bagi semua, karena tidak ada individu yang *zero creativity*. Anak kreatif diyakini akan mampu menghadapi persoalan hidup dengan kemampuan adaptasi yang tinggi di manapun dan kapan-

pun berada. Untuk menjadi kreatif, perlu dibiasakan beraktivitas yang dilandasi dengan berpikir *divergent,* di samping berpikir *konvergent* atau konformis. Cara berpikir *divergent* ini memang sangat penting, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw, melalui sabdanya: *Innaa abnaa-akum li zamaanin ghairi zamaanikum wa li-jailin ghairi jailikum*, yang artinya: Sesungguhnya anak-anakmu dididik untuk zamannya bukan zamanmu, untuk generasinya bukan generasimu. Begitu pentingnya kemampuan kreatif bagi keberadaan individu dalam hidupnya, sehingga iklim belajar di mana pun berada perlu dimungkinkan terjadinya kebebasan berekspresi, di samping berpikir lateral, intuitif, dan holistik.

Anak berakhlaq mulia merupakan dambaan bagi semua, karena dengan akhlaq mulia tidak hanya dapat menjamin kebahagiaan hidup di dunia, melainkan juga kebahagiaan hidup di akhirat. Akhlaq mulia merupakan sesuatu yang sangat penting dan berarti dalam kehidupan, sehingga Rasulullah saw diutus di bumi ini terutama untuk menyempurnakan akhlaq, sebagaimana sabdanya: *Innamaa buits-tu liutammima makaarimal akhlaaq (*Al-Hadits), yang artinya sesungguhnya tidaklah aku diutus oleh Allah swt, kecuali untuk menyempurnakan akhlaq".

Saat itu memang Rasulullah dihadapkan pada kondisi masyarakat jahiliyah dan tak beradab, karena terjadi kerusakan moral yang berat. Bahkan kerusakan moral di muka bumi hingga kini belum saja berakhir. Kita bisa memahami betapa kacaunya hidup di suatu tempat yang penduduknya berakhlak tak terpuji atau tercela. Anak kita tidak boleh menjadi mangsa orang-orang yang tak bermoral. Karena itu, orangtua, pendidik, dan tokoh masyarakat perlu terus menunjukkan tanggung jawabnya untuk membina perilaku anak, sehingga mereka memiliki akhlaq mulia yang bisa memberikan rasa kedamaian dan kebahagiaan, baik bagi dirinya, orangtua, masyarakat maupun warga dunia.

Untuk menjamin anak sehat, kreatif, dan berakhlaq mulia, semua pilar pendidikan yang mencakup keluarga, sekolah, masyarakat, institusi agama, pemerintah dan mass media, diharapkan sekali secara terus menerus mampu menunjukkan peran sertanya yang sinergis dan konstruktif. Karena tujuan yang mulia itu tidak akan mungkin bisa dicapai hanya dengan bertumpu pada salah satu pilar saja, walaupun kuncinya tetap ada di tangan keluarga.

Tulisan ini merupakan artikel menyambut Hari Anak Nasional, 23 Juli 2011.

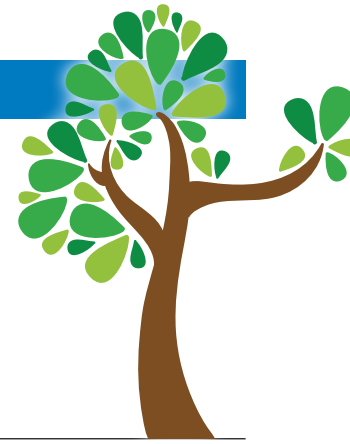

Anak Indonesia Sejahtera, Berkualitas dan Terlindungi

PADA 23 Juli 2008 diperingati sebagai Hari Anak Nasional (HAN) dengan subtema: *Anak Indonesia Sejahtera, Berkualitas dan Terlindungi*. HAN dideklarasikan pertama kali hampir seperempat abad yang lalu, tepatnya tg 23 Juli 1984 melalui Kepres RI No.44 tahun 1984.

Penetapan HAN didasarkan atas komitmen bangsa Indonesia untuk memberikan jaminan perlindungan dan hak-hak anak yang telah menjadi komitmen nasional dan internasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan orangtua untuk memberikan jaminan kehidupan yang lebih menyejahterakan, menyelamatkan dan menyenangkan.

Namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai anak-anak Indonesia yang belum merasakan kebahagiaan sebagaimana seharusnya, bahkan cukup menderita, baik itu dalam kondisi kekurangan gizi, belum berkesempatan mengenyam pendidikan, dan mendapatkan perlakuan kekerasan, sehingga mereka tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Akibatnya hidup mereka terpinggirkan dan terlupakan di tengah-tengah masyarakat, yang pada akhirnya mereka tidak bisa merasakan kehidupan yang sejahtera, tidak dapat mencapai prestasi yang gemilang, dan tidak mampu menyelamatkan diri dari tindakan eksploitatif yang kejam. Karena itu tidak heran bahwa jumlah anak-anak yang terlantar di berbagai daerah semakin tak terkendalikan, walaupun berbagai upaya telah dilakukan.

Mengapa kondisi yang "mengerikan" dan "menyesakkan" itu terus berlangsung. Setidak-tidaknya kondisi tersebut disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diindikasikan dengan rendahnya tanggung jawab orangtua terhadap tugas mengasuh, mendidik dan melindungi dan terbatasnya kemampuan ekonomik orangtua dalam menafkahi dan menghidupi anaknya. Sebaliknya faktor eksternal dapat diindikasikan

dengan kurangnya kepedulian dan seringnya kekerasan oleh guru serta rendahnya komitmen masyarakat dalam proteksi kehidupan anak-anak dari berita-berita kekerasan.

Untuk dapat mengantarkan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas, dan terlindungi, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan:

Pertama, memberikan pendidikan orangtua untuk lebih bertanggungjawab melalui pendidikan orangtua *(parent eduaction*), karena tidak semua orang yang memasuki pernikahan secara otomatis memiliki kesiapan untuk mengasuh, melindungi, dan mendidik anak-anaknya.

*Kedua***,** menjadikan sekolah yang mampu secara produktif menghasilkan lulusan yang kompeten dan kompetitif, sehingga mereka memiliki kesiapan untuk menghadapi tantangan di mana dan kapanpun berada.

Ketiga, mendorong pemerintah dapat menunjukkan *political will* untuk memberikan jaminan kesehatan, pendidikan, dan keselamatan hidup sebagai *public goods,* sehingga mereka dapat menikmati kondisi fisik yang sehat, dapat berpartisipasi dalam pendidikan minimal jenjang pendidikan dasar dengan kualitas standar nasional, dan keselamatan dari kekerasan orang dewasa baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa terhambat oleh keterbatasan baik secara fisik, intelektual, ekonomis, geografis, maupun kultural.

*Keempat***,** menghimbau para ahli dalam berbagai bidang untuk menunjukkan komitmennya terhadap publik (sebagai salah satu tanggung jawab moral seorang intelektual) yang ditunjukkan dengan upaya memperjuangkan karya-karyanya semata-mata untuk mengangkat derajat anak-anak, sehingga mereka dapat mencapai hidup yang sejahtera, berprestasi bidang akademik dan non akademik secara optimal, dan merasa terlindungi keamanan dan keselamatan dirinya dari kekerasan (baik secara fisik, seksual, sosial, maupun kultural).

*Kelima***,** menghimbau para tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawal dan mengendalikan dengan melakukan *filter* terutama terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang dibawa oleh teknologi, baik melalui produk-produk teknologi maupun media masa yang bertentangan dengan nilai-nilai terpuji yang dibutuhkan anak-anak.

Untuk mengupayakan keberadaan orangtua, guru, pemerintah, ahli, dan tokoh masyarakat memiliki efektivitas yang tinggi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, tidaklah mudah. Satu jawaban yang paling penting adalah perlunya tanggung jawab moral dan sosial yang dilandasi atas tanggung jawab kekhalifahan di hadapan Allah swt, sehingga keberadaannya dapat menyelamatkan anak-anak untuk menuju masa depan yang menjanjikan dan kehidupan yang lebih baik.

Akhirnya dengan memperhatikan uraian di atas, untuk mensukseskan HAN tahun ini, semua pihak yang terdiri atas orangtua, sekolah, pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat seharusnya berkoordinasi secara sinergis dalam mengupayakan terciptanya suasana yang kondusif di manapun dan kapanpun, guna mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan, sehingga mereka dapat merasakan hidup sejahtera, berkualitas, dan terlindungi, terutama dalam menghadapi kehidupan yang lebih kompleks dan kompetitif. Semoga!

Tulisan ini merupakan artikel menyambut Hari Anak Nasional 2008.

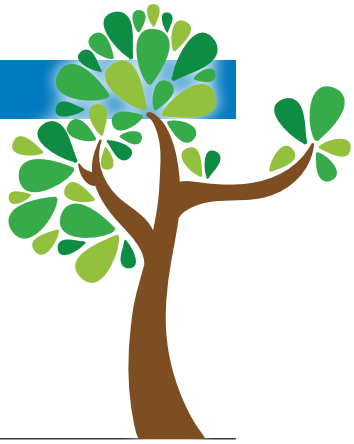

Anak dan Masa Depan Bangsa

PERINGATAN Hari Anak Nasional (HAN) 23 Juli 2009 mengangkat tema "Saya Anak Indonesia Kreatif, Inovatif, dan Unggul untuk Menghadapi Tantangan di Masa Depan". Tema ini sangat tepat, karena seluruh anak Indonesia harus disiapkan untuk mampu mengatasi tantangan masa depannya. Ingat sabda Rasulullah saw, yang berbunyi: *Innaa abnaa-akum qad khaliquu li zamaanin ghairi zamaanikum wa li jailin ghairi jailikum"* yang artinya "Sesungguhnya anak-anakmu dijadikan oleh Allah swt untuk zamannya, bukan zamanmu dan untuk generasinya bukan generasimu." (Al-Hadits).

Orangtua dan pendidik yang bertanggungjawab tentu tidak akan menjadikan dan membiarkan anaknya tanpa memiliki persiapan diri yang memadai. Mereka akan bekerja keras untuk mencari bekal untuk anak-anaknya dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya, bahkan jauh lebih baik daripada masa kecilnya sendiri. Jika anak-anak tidak memiliki kapasitas diri yang memadai dalam menghadapi zamannya kelak, boleh jadi mereka tidak akan bisa eksis bahkan menjadi korban zaman *(na'udzubillahi min dzaalik)*.

Kemajuan sain dan teknologi dewasa ini menghadirkan dampak positif dan negatif. Dampak positif sain dan teknologi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan hidup bagi seluruh manusia, karena sain dapat memuaskan dan memberi kemudahan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, berbisnis, dan dalam kehidupan lainnya yang lebih luas.

Sebaliknya dampak negatifnya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan hubungan sosial, bahkan dapat merusak budaya dan tata nilai kehidupan dan kemanusiaan. Karenanya, dalam perubahan zaman yang cepat, tidak ada pilihan kecuali menyiapkan anak Indonesia yang mampu mengantisipasi tantangan masa depan dengan bimbingan dan pendidikan yang tepat dan terarah.

Ada beberapa alternatif upaya bimbingan dan pendidikan yang diyakini

mampu menghasilkan anak-anak yang kreatif, inovatif, dan unggul, sehingga mampu mengantarkan bangsa yang siap menghadapi tantangan masa depan:

*Pertama***,** mendidik anak dengan kasih sayang, karena persoalan pendidikan adalah persoalan kasih sayang, kata Langeveld seorang ahli pendidikan, yang memperkuat ayat kedua dan ketiga *Q.S. Al-Fatihah*, yaitu "segala puji hanya bagi Allah swt, Tuhan (yang mendidik) seluruh alam dengan kasih dan sayang-Nya". Apapun bentuk bimbingan dan didikan orangtua dan guru seharusnya didasari rasa kasih sayang.

*Kedua***,** mengajar, membimbing dan mendidik anak dengan cara berpikir divergen, di samping cara berfikir konvergen. Memang anak-anak perlu diajar dan dididik berpikir konvergen yang diwujudkan dengan berpikir logis, linier, sistematis, dan rasional, jika anak-anak diharapkan dapat memiliki *common sense* dan nalar yang baik, namun yang juga tidak kalah pentingnya, anak-anak perlu didik dengan berpikir divergen, yang diwujudkan dengan berpikir, lateral, holistik, intuititif, dan kritis. Kemampuan berpikir divergen sangat dibutuhkan bagi anak-anak untuk dapat kreatif, sehingga mereka memiliki kemampuan yang lebih dalam menghadapi tantangan masa depan yang relatif berbeda dengan generasi sebelumnya. Anak-anak diberi kesempatan untuk mengembangkan berpikir alternatif dan kritis.

Ketiga, membiasakan anak untuk belajar dengan menggunakan metode eksperimen, *discovery learning,* dan *problem solving*. Dengan terbiasa menggunakan metode-metode tersebut dalam pembelajarannya, diharapkan sekali anak-anak mampu meningkatkan kemampuan inovatifnya, sehingga mereka akan produktif dalam memecahkan masalah dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat, di manapun dan kapanpun mereka berada.

*Keempat***,** mendorong anak-anak untuk berprestasi optimal, sesuai dengan potensinya. Untuk itu apresiasi dan *encouraging* perlu terus dilakukan, serta insentif psikologis perlu diberikan, sehingga anak-anak bisa *self-actualized* dan *fully functioning* yang pada akhirnya mereka mampu menampilkan prestasi yang unggul, terlebih-lebih mereka mampu mengangkat keunggulan lokal (*local genious).* Ingat bahwa berapa banyak dari kelompok insan yang sedikit dan berkualitas (unggul) mampu mengenyahkan kelompok insan yang banyak (yang tak berkualitas) atas seizin Allah swt.

Berbagai alternatif upaya tersebut memang tidak mudah dilakukan, apalagi di antara kita sering kali menyalahkan orang lain *(blaming others),* di samping kita sering berlebihan mentolerir anak-anak yang tidak belajar dan bekerja keras. Akibatnya, banyak anak yang memiliki 'keberanian' yang berlebihan, sampai-sampai melakukan tindakan desktruktif terhadap lingkungannya. Karena itulah, dengan sikap *husnudz-dzan*, mari kita dorong setiap anak dengan segala

potensinya untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat, walau kecil. Secara akumulatif, insya Allah mereka baik secara personal maupun kolektif sebagai bangsa akan memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan pada zamannya. Akhirnya diharapkan sekali, generasi mendatang merupakan generasi yang lebih kuat dan cerdas, bukan generasi yang lebih lemah dan terbelakang. Semoga!

Tulisan ini merupakan artikel menyambut peringatan HAN 2009.

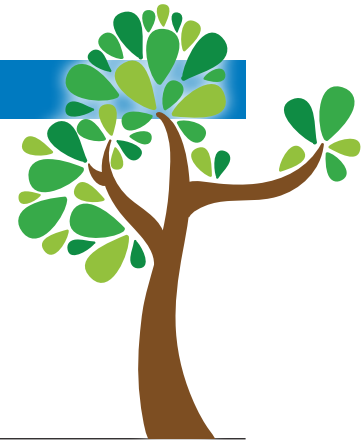

Ibu dan Pendidikan

SETIAP tahun pada tanggal 22 Desember, kita merayakan Hari Ibu. Perayaan Hari Ibu dilakukan hampir di seluruh dunia, hanya waktunya yang berbeda-beda. Di antara 12 bulan setahun, hanya bulan Januari, Juli, dan September yang tidak ada peringatan hari ibu.

Sebagian besar Hari Ibu dirayakan pada minggu kedua dan ketiga Maret, terutama terjadi di Timur Tengah dan minggu kedua Mei terjadi di Amerika Serikat dan 75 negara lainnya. Penentuan waktu perayaan Hari Ibu sering dikaitkan dengan kesejarahan dalam memperjuangkan posisi ibu di tengah-tengah keluarga dan masyarakat.

Indonesia menentukan Hari Ibu dikaitkan dengan momentum Kongres Perempuan Indonesia I pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta, tepatnya di suatu gedung yang kemudian dikenal sebagai Mandalabhakti Wanitatama di Jalan Adisucipto. Kongres dihadiri wakil sekitar 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera. Hasil dari kongres salah satunya membentuk Kongres Perempuan yang kini dikenal sebagai Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Organisasi ini masih eksis sampai sekarang.

Berbagai isu yang saat itu dipikirkan untuk digarap adalah persatuan perempuan Nusantara; pelibatan perempuan dalam perjuangan melawan kemerdekaan; pelibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan bangsa; perdagangan anak-anak dan kaum perempuan; perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita; pernikahan usia dini bagi perempuan, dan sebagainya.

Jika memperhatikan wacana tersebut, nampak yang diperjuangkan oleh Kowani cenderung lebih pada memperjuangkan peran perempuan dalam politik, di samping peran pada sektor lainnya. Pada prakteknya, peran politik boleh diambil, boleh tidak diambil, yang semuanya tergantung pada potensi, minat, atau peluang yang ada.

Selain dari peran, perempuan sebagai ibu memiliki fungsi dalam hidupnya yang salah satunya adalah bidang pendidikan. Artinya bahwa tanggung jawab pendidikan secara fitrah menyatu pada keberadaan perempuan sebagai ibu. Karena sebagai fungsi, maka ibu tidak memiliki alasan apapun untuk menolak tanggungjawabnya di bidang pendidikan, terutama bagi anak-anaknya. Alasan karier, tugas kemasyarakatan, dan tugas dakwah sekalipun belum cukup menjadi alasan bagi ibu meninggalkan tugas mendidik anaknya. Ingat Hadits Rasulullah saw *"...Al mar-atu raa'iyyatun fii baiti zaujihaa wa wamas-ulatin 'an raiyyatihaa"..."* Artinya:"...Perempuan itu pemimpin di rumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya...".

Di balik matan hadits tersebut terkandung makna bahwa perempuan memiliki tanggung jawab menjaga rumah yang ditinggalkan oleh suaminya untuk mencari nafkah. Yang dipertanggungjawabkan bukan hanya hal-hal yang bersifat fisik, melainkan yang jauh lebih penting adalah hal-hal yan bersifat non fisik, yaitu mengasuh dan mendidik anak-anaknya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya.

Untuk dapat menjadi ibu yang bermartabat dan terpuji, maka ibu harus lebih mengutamakan tanggungjawabnya dalam mendidik, kendatipun harus sibuk dalam kariernya. Karena ibu adalah pendidik pertama dan utama. Namun demikian, suatu keluarga yang ibunya aktif bekerja, kiranya keutuhan keluarga akan tetap terjaga, jika suami mampu *sharing* dalam mengemban tugas dengan istri, sehingga tanggung jawab yang sangat berat dalam mendidik anak dapat diatasi.

Dalam tugas mendidik anak, ibu harus mengawali tugasnya dengan mengupayakan pemberian makanan dan minuman yang halal dan baik. Makanan dan minuman yang terjaga kehalalan dan kebaikannya akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya, sehingga menjadi individu yang sehat dan kuat.

Untuk menjadikan anak sebagai individu yang berperilaku baik dan terpuji, ibu harus memanfaatkan masa-masa awal pertumbuhan dan perkembangan anaknya dengan pengkondisian diri. Kita ingat sabda Rasulullah saw, *"man sabba 'ala syai-in syabba alaih*", artinya: Barang siapa mengkondisikan sesuatu maka pada akhirnya akan terbentuk apa yang dikondisikan itu". Apapun kesibukan ibu dan selengkap apapun pembantu ibu dalam suatu keluarga (karena kaya atau tingginya derajat status sosialnya) pendampingan terhadap anak perlu diupayakan secara optimal. Sentuhan kasih sayang ibu secara langsung sangat berarti bagi anak.

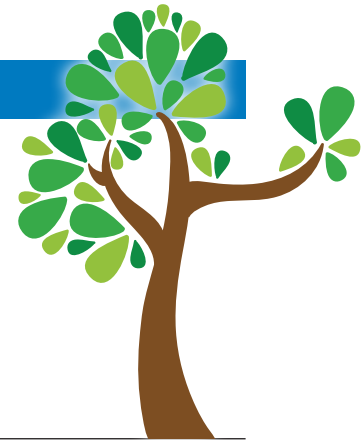

KMS dan Dampaknya

KARTU Menuju Sejahtera (KMS) suatu *vocabulary* baru dalam praktek layanan pendidikan, terlebih-lebih di lingkungan Kota Yogyakarta. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan pemerataan akses pendidikan yang bermutu. Walau KMS dalam konteks ini semula muncul di Kota Yogyakarta, namun pada akhirnya menjadi wacana dan menarik orang-orang se DIY, bahkan menjangkau ke masyarakat wilayah di luar Yogyakarta, terutama yang berkepentingan untuk mengakses pendidikan di Kota Yogyakarta. Kehadiran KMS sangat mengundang semua warga masyarakat, karena itu muncullah suatu pertanyaan besar, bagaimana dampak KMS bagi perbaikan mutu pendidikan?

Kiranya patut diapresiasi tentang ide dasar yang melandasi kebijakan pemerintah yang memberikan jaminan pendidikan bermutu bagi peserta didik dari keluarga tak beruntung secara ekonomik dengan pemberian kuota tertentu, berupa kesempatan yang sangat longgar untuk mengakses pendidikan pada sekolah negeri di wilayah kota Yogyakarta. Kebijakan pemerintah tersebut menggambarkan keberpihakan pemerintah terhadap kaum lemah atau *economically disadvantaged group*. Apakah keberpihakan ini suatu solusi terbaik? Untuk menguji efektivitas kebijakan tersebut, marilah kita cermati fenomena yang ada dan dampaknya.

Pemanfaatan KMS pada prakteknya direspons secara heterogin. Fenomena yang ada bahwa ada kuota peserta didik baru di sekolah negeri tertentu yang hampir semua dipenuhi, sebaliknya ada juga sekolah negeri yang hanya dimasuki seorang dan tiga peserta didik yang ber-KMS, terutama terjadi pada sekolah negeri yang favorit. Calon peserta didik yang ber-KMS ada yang dari keluarga KMS baik dari wilayah kota, maupun ada juga yang berasal dari luar wilayah kota. Mereka juga ada yang memang benar-benar dari keluarga yang ber-KMS,

namun ada juga yang berasal dari keluarga mampu yang menggunakan KMS dari keluarganya yang tinggal di kota.

Atas dasar itu dapat diinfrensikan, bahwa terjadi korelasi negatif, semakin favorit sekolahnya, semakin sedikit jumlah calon peserta didik yang ber-KMS. Dengan begitu ide penggunaan KMS nampaknya belum menjadi solusi yang tepat untuk menjamin kesempatan pendidikan bermutu bagi *unreacheble kids*, yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.

Dampak positif dari kebijakan KMS secara selintas, di antaranya: adanya pemberian kesempatan yang terbuka bagi anak ber-KMS untuk mengakses sekolah negeri yang tidak pernah terjadi sebelumnya, bahkan sekolah negeri yang favoritpun; adanya kesempatan yang luas bagi anak potensial untuk mengembangkan diri secara optimal; terciptanya sekolah inklusif yang dapat mengkomodir semua peserta didik; pemberian kesempatan bagi peserta didik yang mampu baik secara akademik maupun non akademik, terutama aspek ekonomik; dan sebagainya.

Sebaliknya, setelah adanya kebijakan penggunaan KMS ternyata menimbulkan dampak negatif, di antaranya: terjadi manipulasi informasi tentang perpindahan penduduk, sekolah dipaksa menerima calon peserta didik "yang tak *cualified*" untuk belajar di sekolah negeri unggulan, ada beberapa peserta didik KMS yang mengindikasikan memiliki kesulitan beradaptasi dengan teman-temannya.

Untuk memberikan jaminan kelancaran dan kesuksesan implementasi kebijakan penggunaan KMS, maka ditawarkan sejumlah alternatif solusi terhadap peserta didik ber-KMS, di antaranya: (1) pemerintah memberikan layanan belajar tambahan di manapun yang disukai (tidak harus di Taman Pintar sebagaimana ditawarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta), (2) sekolah menyiapkan buku teks yang diperlukan untuk dibawa pulang, (3) sekolah menyediakan fasilitas ICT yang siap diakses kapanpun, pemerintah daerah memberikan beasiswa untuk biaya personal, (4) konselor bertanggungjawab memberikan layanan bimbingan secara menyeluruh, baik layanan bimbingan akademik, bimbingan personal-sosial, maupun bimbingan karier dengan lebih menekankan pada tindakan preventif dan developmental, (5) guru bertanggungjawab dalam memberikan *remedial teaching* dan *enrichment teaching,* (6) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) memberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, minat dan bakatnya, (7) dan orangtua seharusnya memberi kelonggaran kepada anak untuk kegiatan sekolah, kendatipun boleh juga dilibatkan untuk kegiatan keluarga dan masyarakat sepanjang tidak mengganggu kegiatan sekolah.

Sebagai catatan akhir, bahwa kebijakan implementasi KMS seharusnya dipandang secara komprehensif. Artinya bahwa peserta didik ber-KMS harus dilayani tidak hanya sebatas proses penerimaan peserta didik saja, melainkan juga selama proses pendidikan perlu terus dikawal dengan tidak menjadikan layanan pendidikannya bersifat eksklusif, melainkan bersifat inklusif. Semua unsur sekolah, termasuk komite sekolah, perlu memiliki *common vision* terhadap kebijakan ini, sehingga tercipta iklim yang kondusif.

Demikian juga dinas pendidikan perlu terus melakukan monitoring, jika perlu memberikan intervensi konstruktif, dengan tetap menghargai otonomi manajemen pada tingkat sekolah. Semoga!

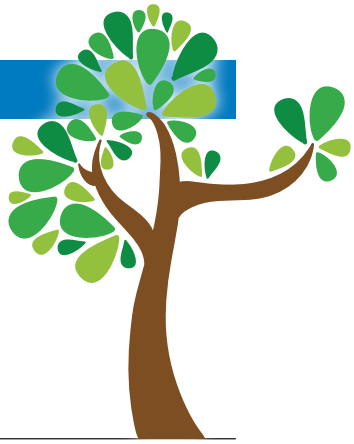

Kontroversi Kartini Kita!

SETIAP setiap tahun menjelang 21 April, kita selalu diingatkan akan hari lahir seorang pahlawan perempuan yang memperjuangkan emansipasi perempuan Indonesia, Raden Ajeng Kartini (Lahir di Jepara, 21 April 1879 – Wafat di Rembang, 17 September 1904). Pada tanggal tersebut kita selalu disuguhi dengan perayaan dan peringatan yang berkenaan dengan beliau, Seminar Keperempuan, Lomba Peragaan Busana Nasional, Parade Anak-Anak Putri berpakaian Kebaya, dan lain-lain.

Kepahlawanan RA Kartini sungguh terpatri di benak setiap perempuan Indonesia, tak ada yang meragukannya. Pemikirannya yang tertuang dalam Buku Habis Gelap Terbitlah Terang menjadi bukti bagaimana 'perjuangan; beliau mengangkat harkat dan martabat kaumnya. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengaburkan makna sejarah dari perjuangan beliau, tulisan ini hanya upaya untuk memberi pemahaman yang lebih baik dalam memaknai perjuangan beliau.

Raden Ajeng Kartini hanya sempat menjalani hidup teramat singkat, 25 tahun. Pada 17 September 1904, ketika melahirkan putra pertamanya, pahlawan penggerak emansipasi wanita itu meninggal dunia. Namun, hidup yang teramat singkat itu mampu menjadi inspirasi selama 100 tahun bagi perempuan-perempuan Indonesia untuk bangkit memposisikan harkat, martabat dan karyanya.

Melalui surat-suratnya kepada para sahabatnya di Eropa yang dikumpulkan dalam bentuk buku berjudul Door Duisternis tot Licht yang artinya Habis Gelap Terbitlah Terang oleh Mr. J.H. Abendanon, pikiran dan pandangan Kartini dituturkan demi untuk memajukan nasib perempuan Jawa agar memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Pikiran dan pandangan Kartini kemudian menjadi sumber inspirasi dan motivasi pergerakan kebangsaan nasional kala itu, tidak saja bagi kaum perempuan.

Hampir seabad setelah Kartini meninggal, kaum perempuan sudah bisa menunjukkan eksistensi dan dominasinya di segala bidang. Sudah sangat jarang terdengar perempuan yang hidup dalam kungkungan; tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu. Kalaupun ada, itu hanya karena faktor ekonomi semata yang diusung keluarganya.

Terkadang perempuan bisa menjadi kekuatan penyeimbang dan pengontrol akan kebijakan dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah, karena jelajah kemampuannya yang bisa memahami semua aspek hidup. Belum lagi secara kuantitas, perempuan menjadi objek politik yang cukup signifikan untuk meraup suara. Yang mungkin akan menjadi hambatan hanyalah tatkala mereka berhadapan dengan kekuatan ekonomi, sosial dan politik, hal yang sama juga dialami oleh kaum lelaki.

Namun siapa sebenarnya sosok RA Kartini yang sering disebut-sebut itu? Ibarat adagium yang diciptakan oleh para penyanyi Seurieus, Pahlawan juga Manusia. Sosok Kartini tak luput dari sisi kontroversial yang dimunculkan oleh pihak-pihak yang mempertanyakan keotentikan surat-surat Kartini vis a vis orisinalitas pemikirannya. Apakah betul RA Kartini itu mampu mengucurkan pikiran-pikiran *avant garde* (melampaui zaman nya) saat feodalisme masih mencengkeram kuat dalam struktur sosial Jawa, sementara pendidikan bagi kaum perempuan saat itu sangat langka dan kalaupun ada, terbatas pada pelajaran keterampilan untuk menopang karier rumahtangganya.

Walaupun pada kenyataannya RA Kartini yang hidup dalam lingkungan ningrat Jawa, mampu memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan Belanda dan melahap literatur-literatur penting hingga umur 12 tahun. Dengan kemampuan bahasa Belanda yang bagus, Kartini belajar banyak hal dari "Barat": buku-buku sastra dan majalah dibacanya untuk memberikan diskursus mengenai arti modernisme, feminisme dan kebebasan berpikir.

Kesempatan untuk belajar di negeri Belanda diperolehnya ketika itu dengan adanya tawaran beasiswa dari pemerintah Kerajaan Belanda, namun budaya aristokrat Jawa juga yang membuatnya tak kuasa melawan arus. Beliau kemudian menjalani ritual perempuan Jawa, dipingit dan dinikahkan. Beasiswa itu kemudian, atas permintaan Kartini, dialihkan ke seorang pemuda cerdas asal Bukittinggi, kelak dikenal sebagai KH Agus Salim.

Berikut ini adalah beberapa kontroversi yang menjadi pertanyaan banyak kalangan akan sosok RA Kartini;

Kontroversi-1. Keaslian pemikiran RA Kartini dalam surat-suratnya diragukan. Ada dugaan bahwa J.H. Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda saat itu, melakukan editing atau merekayasa surat-

surat Kartini. Kecurigaan ini timbul karena memang buku Kartini terbit saat pemerintahan kolonial Belanda menjalankan politik etis di Hindia Belanda, dan Abendanon termasuk yang berkepentingan dan mendukung politik etis. Hingga saat ini pun sebagian besar naskah asli surat tak diketahui keberadaannya. Kita hanya disuguhi tulisan-tulisan yang bersumber dari buku yang diterbitkan oleh Abendanon semata.

Kontroversi-2. RA Kartini dianggap tidak konsisten dalam memperjuangkan pemikiran akan nasib perempuan Jawa. Dalam banyak tulisannya beliau selalu mempertanyakan tradisi Jawa (dan agama Islam) yang dianggap menghambat kemajuan perempuan, seperti tak dibolehkan bersekolah, dipingit ketika mulai baligh, dinikahkan dengan laki-laki tak dikenal, menjadi korban poligami. Kartini juga mempertanyakan tentang agama yang dijadikan pembenaran bagi kaum laki-laki untuk berpoligami. Bagi Kartini, lengkap sudah penderitaan perempuan Jawa yang dunianya hanya sebatas tembok rumah dan tersedia untuk dimadu pula.

Namun demikian, bertolak belakang dengan pemikirannya, RA Kartini rupanya menerima untuk dinikahkan (bahkan dipoligami) dengan bupati Rembang, Raden Adipati Joyodiningrat, yang sudah pernah memiliki tiga istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903, pada usia 24 tahun. Pada saat menjelang pernikahan, terdapat perubahan penilaian Kartini soal adat Jawa. Ia menjadi lebih toleran. Ia menganggap pernikahan akan membawa keuntungan tersendiri dalam mewujudkan keinginan mendirikan sekolah bagi para perempuan bumiputra kala itu.

Kontroversi-3. RA Kartini dianggap hanya berbicara untuk ruang lingkup Jawa saja, tak pernah menyinggung suku atau bangsa lain di Indonesia/Hindia Belanda. Pemikiran-pemikirannya dituangkan dalam rangka memperjuangan nasib perempuan Jawa, bukan nasib perempuan secara keseluruhan. Walaupun demikian ide-idenya dianggap menyeluruh secara nasional karena mengandung sesuatu yang universal.

Kontroversi-4. Tidak jelas persinggungan RA Kartini dengan perlawanan melawan penjajahan Belanda seperti umumnya pahlawan yang kita kenal. Tak pernah terlihat dalam tulisan dan pemikirannya adanya keinginan RA Kartini untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda saat itu, apalagi membopong senjata sebagaimana Pahlawan Wanita lainnya seperti; Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dien, Cut Nyak Meutia, Emmy Saelan atau Christina Martha Tiahahu.

Kontroversi-5. Dari sudut pandang sejarah, pemikiran RA Kartini dalam emansipasi wanita lebih bergaung daripada tokoh wanita lainnya asal Sunda, Raden Dewi Sartika, walaupun langkah gerak Dewi Sartika justru lebih prog-

resif. RA Kartini lebih terkenal dengan pemikiran-pemikirannya, sedang Dewi Sartika tak hanya giat berpikir, tapi juga mengimplementasikan pemikirannya ke gerak nyata dalam masyarakat dengan mendirikan sekolah khusus putri, Sekolah Kaoetamaan Istri pada tahun 1902. So, siapa sebenarnya yang lebih patut untuk dihargai, RA Kartini atau Dewi Sartika? Hanya terbatas pemikiran atau gerak nyata?

Kontroversi-6. Penetapan tanggal kelahiran RA Kartini 21 April sebagai hari besar juga diperdebatkan karena terkesan terlalu melebih-lebihkan sosok beliau, sementara masih ada pahlawan wanita lain yang tidak kalah hebat dengan Kartini. Menurut mereka, wilayah perjuangan Kartini itu hanyalah di Jepara dan Rembang saja, Kartini juga tidak pernah memanggul senjata melawan penjajah. Mereka mengusulkan untuk merayakan Hari Perempuan secara umum pada tanggal 22 Desember.

Namun demikian, terlepas dari berbagai kontroversi diatas, kita tetap harus mengakui bahwasanya RA Kartini tidak hanya seorang tokoh emansipasi wanita yang mengangkat derajat kaum wanita Indonesia saja, melainkan adalah tokoh nasional. Artinya, dengan ide dan gagasan pembaruannya tersebut dia telah berjuang untuk kepentingan bangsanya.

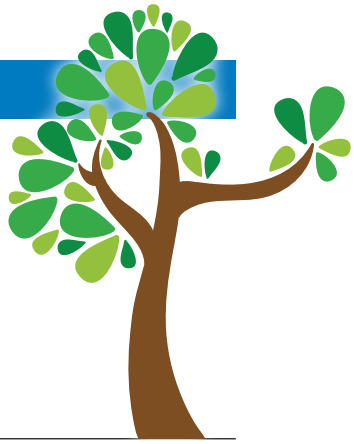

Menyelamatkan ‘Generasi Emas’ Anak

KITA sangat bersyukur karena Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2014 mengangkat tema: Indonesia satu aksi, Stop kekerasan terhadap anak. Tema ini sangat diorientasikan untuk menyelamatkan kehidupan anak dari berbagai kemungkinan bentuk kekerasan dan eksploitasi. Sungguh disadari bahwa anak yang terhindar dari kekerasan diyakini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik dan optimal. Yang pada akhirnya diharapkan akan menjadi sosok individu yang utuh, bertaqwa, sehat, cerdas, terampil, dan produktif.

Dewasa ini kekerasan terhadap anak terjadi di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kejadian ini menggambarkan adanya aggresivitas orang dewasa yang kurang bertanggungjawab, baik orangtua, guru, maupun masyarakat. Mereka seharusnya melindungi, mengayomi, mengasuh, dan mendidik dengan baik, justru di antara mereka bertindak sebaliknya, yang tidak hanya merusak fisik, melainkan yang jauh lebih berat adalah merusak mental dan psikisnya.

Kekerasan yang muncul terhadap anak dewasa ini sangat beragam, di antaranya: ada yang berupa benturan benda keras pada seluruh bagian tubuh anak, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis. Kekerasan ini tidak hanya berakibat sakit yang bersifat temporal saja, melainkan juga ada kekarasan yang bisa menimbulkan kecacatan fisik dan trauma mental yang dapat berdampak negatif secara permanen.

Apapun bentuk kekarasan yang terjadi pada anak, diduga dapat berdampak terhadap perilakunya. Karena anak tidak hanya menerima kekerasan saja, tapi yang jauh lebih berbahaya adalah anak membentuk karakter dirinya yang pada saat usia berikutnya menjadi individu yang agresif dan dapat berbahaya terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Inilah yang sangat dikhawa-

tirkan, kekerasan akan tumbuh dan berkembang terus menerus, bahkan bisa meluas, jika tidak segera diatasi.

Anak adalah amanah Allah swt, karena itulah anak wajib diselamatkan dari berbagai kekerasan. Ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi dan mencegah terjadinya kekarasan:

Pertama, orangtua bertindak secara dini menjamin terciptanya iklim keluarga yang penuh kasih sayang, kedamaian, toleransi, dan keadilan, serta menghindarkan dari hukuman fisik.

Kedua, guru di sekolah mampu menunjukkan sikap *welcome*, ramah, dan mengayomi, serta menciptakan iklim sekolah yang aman dan inklusif, di samping menerapkan hukuman non-fisik yang mendidik *(punishment by reward)*.

Ketiga, masyarakat menciptakan kondisi lingkungan yang rukun, peduli, dan harmoni, serta menjamin anggota masyarakat bebas konflik, anti diskriminasi, dan kooperatif.

Keempat, pemerintah menjamin dapat melindungi pertumbuhan dan perkembangan seluruh anak Indonesia tanpa membedakan status sosial dan ekonomi, dan melindungi keamanan dan keselamatan anak dengan memberikan sanksi dan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Kelima, media massa didorong untuk mengurangi dan menghilangkan informasi dan gambar yang provokatif dan merangsang timbulnya kekerasan.

Semua upaya tersebut tidaklah mudah dilakukan, kecuali adanya *good willingness* bagi semua orang dewasa dan pihak terkait untuk menyelamatkan kehidupan anak demi masa depan anak dan bangsa Indonesia yang lebih baik, damai, aman dan sejahtera.

Karena itulah kita sangat berharap pemerintahan yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Drs. H. M. Jusuf Kalla mampu menunjukkan komitmennya dalam menjamin keamanan dan keselamatan, serta kesejahteraan anak Indonesia menuju Generasi Emas.

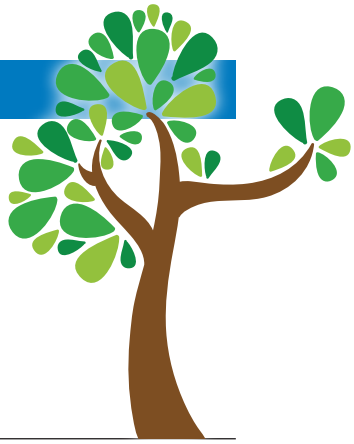

Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif

Pengantar

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai, baik secara lahir maupun batin. Dengan kata lain, setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmoni dan bahagia yang sering disebut keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah.*

Pada kenyataannya, tak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi hidupnya, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau kesedihan dan saling takut dan benci di antara sesamanya.

Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ironisnya jumlah kekerasan yang terjadi semakin hari semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Lihat tabel di bawah ini):

Jumlah Kasus Kekerasan yang Terjadi dalam Rumah Tangga/Domestik di LBH APIK JAKARTA Tahun 1998-2002

Jenis Kasus	1998	1999	2000	2001	2002
Kekerasan Fisik	33	52	69	82	86
Kekerasan Psikis	119	122	174	76	250
Kekerasan Ekonomi	58	58	85	16	135
Kekerasan Seksual	3	15	1	0	7
Perkosaan	1	10	0	0	0
Pelecehan Seksual	2	5	1	0	0
Ingkar Janji	0	0	3	14	5
Dating Violence	0	0	0	0	7
Penganiayaan Anak	0	0	0	0	1

Data tersebut mengindikasikan kecenderungan terjadinya peningkatan KDRT di Jakarta, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, bahkan di Indonesia. Almira At-Thahirah (2006) menjelaskan, sekitar 24 juta perempuan dari 217 juta penduduk Indonesia, terutama di pedesaan, mengakui pernah mengalami kekerasan dan yang terbesar adalah KDRT.

Komnas perempuan pada tahun 2001 melakukan survei pada 14 daerah di Indonesia (Aceh, Palembang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTT). Hasilnya menunjukkan bahwa kaum perempuan paling banyak mengalami kekerasan dan penganiayaan oleh *orang-orang terdekatnya* serta tindak perkosaan di lingkungan komunitasnya sendiri. Selain itu terdapat 60% kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orangtua mereka! (Seto Mulyadi, *Komnas Anak*).

(Zastrow & Bowker (1984) menegaskan, jumlah ini memang tidak sebanyak angka KDRT di AS yang melebihi dari 50% dari keluarga Amerika Serikat yang mengalami KDRT. Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya KDRT, yaitu faktor internal dan eksternal. Secara internal, KDRT dapat terjadi sebagai akibat dari semakin lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga setiap anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak deterministik dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah.

Secara eksternal, KDRT muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya, maupun pasangannya.

KDRT dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya, terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberi perhatian yang memadai untuk penyelamatan, terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitarnya.

Untuk lebih memahami persoalan KDRT, selanjutnya akan digali lebih jauh tentang makna KDRT, penyebab-penyebabnya, dampak KDRT, dan berbagai pendekatan untuk penangannya.

Makna Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya: Kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik; kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya.

Undang-Undang No 23/2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang ,terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Demikian juga pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (a) Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau (c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Lau dan Kosberg, (1984) melalui studinya menegaskan, ada empat tipe kekerasan, di antaranya: *physical abuse, psychological abuse, material abuse or theft of money or personal property, dan violation of right.* Berdasarkan studinya anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif.

Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan secara detail:

*Pertama***,** kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.

Kedua, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang menginti-

midasi dan menyiksa, memberi ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.

Ketiga, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8): (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Keempat, penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9). Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti: penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

Penyebab Terjadinya KDRT

Zastrow & Browker (1984) menyatakan, ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustasi-agresi, dan teori kontrol.

Pertama, teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki suatu instink agressif yang sudah dibawa sejak lahir. Sigmund Freud menteorikan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain dan dirinya sendiri. Robert Ardery yang menyarankan bahwa manusia memiliki instink untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah, yang sering mengarahkan pada perilaku konflik antar pribadi yang penuh kekerasan.

Konrad Lorenz menegaskan bahwa agresi dan kekerasan adalah sangat berguna untuk survive. Manusia dan hewan yang agresif lebih cocok untuk mem-

buat keturunan dan survive, sementara itu manusia atau hewan yang kurang sagresif memungkinkan untuk mati satu demi satu. Agresi pada hakekatnya membantu untuk menegakkan suatu sistem dominan, dengan demikian memberikan struktur dan stabilitas untuk kelompok.

Beberapa ahli teori biologis berhipotesis bahwa hormon seks pria menyebabkan perilaku yang lebih agresif. Di sisi lain, ahli teori belajar verteori bahwa perbedaann perilaku agresif terutama disebabkan oleh perbedaan sosialisasi terhadap pria dan wanita.

*Kedua***,** teori frustasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa sesorang yang frustasi sering terlibat dalam tindakan agresif. Orang frustasi sering menyerang sumber frustasinya atau memindahkan frustasinya ke orang lain. Misalnya, seorang remaja (*teenager)* yang diejek oleh orang lain mungkin membalas dendam, sama halnya seekor binatang kesayangan yang digoda. Seorang pengangguran yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan mungkin memukul istri dan anak-anaknya.

Suatu persoalan penting dengan teori ini, bahwa teori ini tidak menjelaskan mengapa frustasi mengarahkan terjadinya tindakan kekerasan pada sejumlah orang, tidak pada orang lain. Diakui bahwa sebagian besar tindakan agresif dan kekerasan nampak tidak berkaitan dengan frustasi. Misalnya, seorang pembunuh pofesional tidak harus menjadi frustasi untuk melakukan penyerangan.

Walaupun teori frustasi-agresi sebagian besar dikembangkan oleh para psikolog, beberapa sosiolog telah menerapkan teori untuk suatu kelompok besar. Mereka memperhatikan perkampungan miskin dan kotor di pusat kota dan dihuni oleh kaum minoritas telah menunjukkan angka kekerasan yang tinggi. Mereka berpendapat bahwa kemiskinan, kekurangan kesempatan, dan ketidakadilan lainnya di wilayah ini sangat membuat frustasi penduduknya. Penduduk semua menginginkan semua benda yang mereka lihat dan dimiliki oleh orang lain, serta tak ada hak yang sah sedikitpun untuk menggunakannya. Akibatnya, mereka frustasi dan berusaha untuk menyerangnya. Teori ini memberikan penjelasan yang masuk akal terhadap angka kekarasan yang tinggi bagi penduduk minoritas.

*Ketiga***,** teori ini menjelaskan bahwa orang-orang yang hubungannya dengan orang lain tidak memuaskan dan tidak tepat mudah untuk terpaksa berbuat kekerasan ketika usaha-usahanya untuk berhubungan dengan orang lain menghadapi situasi frustasi. Teori ini berpegang bahwa orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan orang lain yang sangat berarti cenderung lebih mampu dengan baik mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang impulsif.

Travis Hirschi memberikan dukungan kepada teori ini melalu temuannya bahwa remaja putera yang memiliki sejarah perilaku agresif secara fisik cenderung tidak memiliki hubungan yang dekat dengan orang lain. Selain itu juga dinyatakan bahwa kekerasan mengalami jumlah yang lebih tinggi di antara para eks narapidana dan orang-orang lain yang terasingkan dari teman-teman dan keluarganya daripada orang-orang Amerika pada umumnya.

Setelah memperhatikan ketiga teori tersebut, kiranya variasi kekerasan di masyarakat untuk sementara ini disebabkan oleh tiga faktor tersebut. Bagaimana dengan penyebab munculnya KDRT, lebih khususnya di Indonesia. Menurut hemat saya, KDRT di Indonesia ternyata bukan sekedar masalah ketimpangan *gender*. Hal tersebut acapkali terjadi karena:

- Kurang komunikasi, Ketidakharmonisan.
- Alasan Ekonomi
- Ketidakmampuan mengendalikan emosi
- Ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun, dan juga
- Kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba.

Dampak KDRT terhadap Anak

Marianne James, *Senior Research* pada Australian Institute of Criminology (1994), menegaskan bahwa KDRT memiliki dampak yang sangat berarti terhadap perilaku anak, baik berkenaan dengan kemampuan kognitif, kemampuan pemecahan masalah, maupun fungsi mengatasi masalah dan emosi. Adapun dampak KDRT secara rinci akan dibahas berdasarkan tahapan perkembangannya sebagai berikut:

1. Dampak terhadap Anak Berusia Bayi

Usia bayi sering menunjukkan keterbatasannya dalam kaitannya dengan kemampuan kognitif dan beradaptasi. Jaffe dkk (1990) menyatakan bahwa anak bayi yang menyaksikan terjadinya kekerasan antara pasangan bapak dan ibu sering dicirikan dengan anak yang memiliki kesehatan yang buruk, kebiasaan tidur yang jelek, dan teriakan yang berlebihan. Bahkan kemungkinan juga anak-anak itu menunjukkan penderitaan yang serius. Hal ini berkonsekuensi logis terhadap kebutuhan dasarnya yang diperoleh dari ibunya saat mengalami gangguan yang sangat berarti. Kondisi ini pula berdampak lanjutan bagi ketidaknormalan dalam pertumbuhan dan perkembangannya yang sering kali diwujudkan dalam problem emosinya, bahkan sangat terkait dengan persoalan kelancaran dalam berkomunikasi.

2. Dampak terhadap Anak Kecil

Dalam tahun kedua fase perkembangan, anak-anak mengembangkan upaya dasarnya untuk mengaitkan penyebab perilaku dengan ekspresi emosinya. Penelitian Cummings dkk (1981) menilai terhadap ekspresi marah dan kasih sayang yang terjadi secara alamiah dan berpura-pura. Selanjutnya ditegaskan bahwa ekspresi marah dapat menyebabkan bahaya atau kesulitan pada anak kecil. Kesulitan ini semakin menjadi lebih nampak, ketika ekspresi verbal dibarengi dengan serangan fisik oleh anggota keluarga lainnya. Bahkan banyak peneliti berhipotesis bahwa penampilan emosi yang kasar dapat mengancam rasa aman anak dalam kaitannya dengan lingkungan sosialnya.

Pada tahun ketiga ditemukan anak-anak yang merespons dalam interaksinya dengan kemarahan, maka yang ditimbulkannya adalah adanya sikap agresif terhadap teman sebayanya. Yang menarik bahwa anak laki-laki cenderung lebih agresif daripada anak-anak perempuan selama simulasi, sebaliknya anak perempuan cenderung lebih *distress* daripada anak laki-laki. Selanjutnya dapat dikemukakan pula bahwa dampak KDRT terhadap anak usia muda (anak kecil) sering digambarkan dengan problem perilaku, seperti seringnya sakit, memiliki rasa malu yang serius, memiliki *self-esteem* yang rendah, dan memiliki masalah selama dalam pengasuhan, terutama masalah sosial, misalnya: memukul, menggigit, dan suka mendebat.

3. Dampak terhadap Anak Usia Pra-sekolah

Cumming (1981) melakukan penelitian tentang KDRT terhadap anak-anak yang berusia TK, pra sekolah, sekitar 5 atau 6 tahun. Dilaporkannya bahwa Anak-anak yang memperoleh rasa distress pada usia sebelumnya dapat diidentifikasi tiga tipe reaksi perilaku. *Pertama*, 46%-nya menunjukkan emosi negatif yang diwujudkan dengan perilaku marah yang diikuti setelahnya dengan rasa sedih dan berkeinginan untuk menghalangi atau campur tangan. *Kedua,* 17%-nya tidak menunjukkan emosi, tetapi setelah itu mereka marah. *Ketiga,* lebih dari sepertiganya, menunjukkan perasaan emosional yang tinggi (baik positif maupun negatif) selama berargumentasi. Keempat, mereka bahagia, tetapi sebagian besar di antara mereka cenderung menunjukkan sikap agresif secara fisik dan verbal terhadap teman sebayanya.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap 77 anak, Davis dan Carlson (1987) menemukan anak-anak TK yang menunjukkan perilaku reaksi agresif dan kesulitan makan pada pria lebih tinggi daripada wanita. Hughes (1988) melakukan penelitian terhadap ibu dan anak-anak yang usia TK dan non-TK, baik dari kelompok yang tidak menyaksikan KDRT maupun yang menyaksikan KDRT. Disimpulkan bahwa kelompok yang menyaksikan KDRT menunjukkan tingkat

distress yang jauh lebih tinggi, dan kelompok anak-anak TK menunjukkan perilaku distres yang lebih tinggi daripada anak-anak non-TK.

DeLange (1986) melalui pengamatannya bahwa KDRT berdampak terhadap kompetensi perkembangan sosial-kognitif anak usia pra-sekolah. Ini dapat dijelaskan bahwa anak-anak pra-sekolah yang dipisahkan secara sosial dari teman sebayanya, bahkan tidak berkesempatan untuk berhubungan dengan kegiatan atau minat teman sebayanya juga, maka mereka cenderung memiliki beberapa masalah yang terkait dengan orang dewasa.

4. Dampak terhadap Anak Usia SD

Jaffe dkk (1990) menyatakan bahwa pada usia SD, orangtua merupakan suatu model peran yang sangat berarti. Baik anak pria maupun wanita yang menyaksikan KDRT secara cepat belajar bahwa kekerasan adalah suatu cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan kemanusiaan. Mereka lebih mampu mengekspresikan ketakutan dan kecemasannya berkenaan dengan perilaku orangtuanya. Hughes (1986) menemukan bahwa anak-anak usia SD seringkali memiliki kesulitan tentang pekerjaan sekolahnya, yang diwujudkan dengan prestasi akademik yang jelek, tidak ingin pergi ke sekolah, dan kesulitan dalam konsentrasi.

Wolfe et.al, 1986: Jaffe et.al, 1986, Christopoulus et al, 1987 menguatkan melalui studinya, bahwa anak-anak dari keluarga yang mengalami kekerasan domestik cenderung memiliki problem perilaku lebih banyak dan kompetensi sosialnya lebih rendah daripada keluarga yang tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara studi yang dilakukan terhadap anak-anak Australia, (Mathias et.al, 1995) sebanyak 22 anak dari usia 6 sd 11 tahun menunjukkan bahwa kelompok anak-anak yang secara historis mengalami kekerasan dalam rumah tangganya cenderung mengalami problem perilaku pada tinggi batas ambang sampai tingkat berat, memiliki kecakapan adaptif di bawah rata-rata, memiliki kemampuan membaca di bawah usia kronologisnya, dan memiliki kecemasan pada tingkat menengah sampai dengan tingkat tinggi.

5. Dampak terhadap Anak remaja

Pada usia ini biasanya kecakapan kognitif dan kemampuan beradaptasi telah mencapai suatu fase perkembangan yang meliputi dinamika keluarga dan jaringan sosial di luar rumah, seperti kelompok teman sebaya dan pengaruh sekolah. Dengan kata lain, anak-anak remaja sadar bahwa ada cara-cara yang berbeda dalam berpikir, merasa, dan berperilaku dalam kehidupan di dunia ini. Misalnya studi Davis dan Carlson (1987) menyimpulkan bahwa hidup dalam

keluarga yang penuh kekarasan cenderung dapat meningkatkan kemungkinan menjadikan isteri yang tersiksa, sementara itu Hughes dan Barad (1983) mengemukakan dari hasil studinya bahwa angka kejadian kekerasan yang tinggi dalam keluarga yang dilakukan oleh ayah cenderung dapat menimbulkan korban kekerasan, terutama anak-anaknya. Tetapi ditekankan pula oleh Rosenbaum dan O'Leary (1981) bahwa tidak semua anak yang hidup kesehariannya dalam hubungan yang penuh kekerasan akan mengulangi pengalaman itu. Artinya bahwa seberat apapun kekerasan yang ada dalam rumah tangga, tidak sepenuhnya kekerasan itu berdampak kepada semua anak remaja, tergantung ketahanan mental dan kekuatan pribadi anak remaja tersebut.

Dari banyak penelitian menunjukkan bahwa konflik antar kedua orangtua yang disaksikan oleh anak-anaknya yang sudah remaja cenderung berdampak yang sangat berarti, terutama anak remaja pria cenderung lebih agresif, sebaliknya anak remaja wanita cenderung lebih dipresif.

Upaya Penanganan KDRT

Pada hakekatnya secara psikologis dan pedagogis ada dua pendekatan yang dapat dilakukan menangani KDRT, yaitu pendekatan kuratif dan preventif.

1. Pendekatan kuratif:
   a. Menyelenggarakan pendidikan orangtua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis.
   b. Memberi keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika sewaktu-waktu terjadi KDRT.
   c. Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya KDRT.
   d. Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari KDRT.
   e. Membekali calon suami istri atau orangtua baru untuk menjamin kehidupan yang harmoni, damai, dan saling pengertian, sehingga dapat terhindar dari perilaku KDRT.
   f. Melakukan *filter* terhadap media massa, baik cetak maupun elektronik, yang menampilkan informasi kekerasan.
   g. Mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya.
   h. Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang terkena KDRT, tanpa sedikitpun melemparkan kesalahan terhadap korban KDRT.

i. Mendorong dan menfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkungannya.

2. Pendekatan kuratif:
   a. Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya.
   b. Memberikan *incentive* bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, mengeliminir, dan menghilangkan salah satu bentuk KDRT secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan.
   c. Menentukan pilihan model penanganan KDRT sesuai dengan kondisi korban KDRT dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam keluarga, sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi.
   d. Membawa korban KDRT ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini, sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis sampai serius.
   e. Menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi pelakunya.
   f. Mendorong pelaku KDRT untuk sesegera mungkin melakukan pertaubatan diri kepada Allah swt, akan kekeliruan dan kesalahan dalam berbuat kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menjamin rasa aman bagi semua anggota keluarga.
   g. Pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktek KDRT dengan mengacu pada UU tentang PKDRT, sehingga tidak berdampak jelek bagi kehidupan masyarakat.

Pilihan tindakan preventif dan kuratif yang tepat sangat tergantung pada kondisi riil KDRT, kemampuan dan kesanggupan anggota keluarga untuk keluar dari praketk KDRT, kepedulian masyarakat sekitarnya, serta ketegasan pemerintah menindak praktek KDRT yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Kesimpulan

Setiap keluarga pada awalnya selalu mendambakan kehidupan rumah tangga yang aman, nyaman, dan membahagiakan. Secara fitrah perbedaan individual dan lingkungan sosial budaya berpotensi untuk menimbulkan konflik. Bila konflik sekecil apapun tidak segera dapat diatasi, sangatlah mungkin berkem-

bang menjadi KDRT. Kejadian KDRT dapat terwujud dalam bentuk yang ringan sampai berat, bahkan dapat menimbulkan korban kematian, sesuatu yang seharusnya dihindari.

Untuk dapat menyikapi KDRT secara efektif, perlu sekali setiap anggota keluarga memiliki kemampuan dan keterampilan mengatasi KDRT, sehingga tidak menimbulkan pengorbanan yang fatal. Tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan bagi anggota keluarga yang sudah memiliki usia kematangan tertentu dan memiliki keberanian untuk bersikap dan bertindak. Sebaliknya jika anggota keluarga tidak memiliki daya dan kemampuan untuk menghadapi KDRT, secara proaktif masyarakat, para ahli, dan pemerintah perlu mengambil inisiatif untuk ikut serta dalam penanganan korban KDRT, sehingga dapat segera menyelamatkan dan menghindarkan anggota keluarga dari kejadian yang tidak diinginkan.

Pendidikan Persekolahan

Untuk melakukan pendidikan karakter yang efektif tidak cukup dengan memasang poster atau memberi kuliah khusus pendidikan karakter. Justru yang lebih penting adalah bagaimana memfokuskan kepada seseorang yang memperlakukan anak.

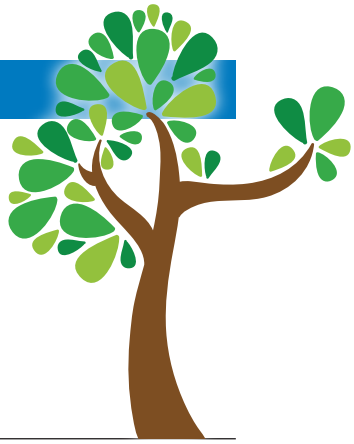

Model Sekolah Berbasis Nilai

Pengantar

Setiap di antara kita sangat berharap terciptanya individu, sebagai orang yang baik *(good person)* dan warga negara yang baik *(good citizen),* bahkan masyarakat yang baik *(good community),* sehingga hidup penuh kebahagiaan dan kedamaian. Namun apa yang terjadi dewasa ini di Indonesia dan di dunia, masih banyak persoalan yang ada di depan dan di sekitar kita yang tidak bisa diabaikan, sehingga kita tidak dapat atau belum dapat menikmati kehidupan yang baik dan kehidupan yang penuh kebahagiaan, keharmonisan, dan kedamaian.

Orang yang baik merupakan tujuan utama pendidikan. Oleh karenanya individu dan masyarakat yang baik seharusnya tetap menjadi tujuan dan harapan kita, sehingga kehidupan di dunia ini tidak sia-sia, melainkan kehidupan yang memberi manfaat bagi semua dan yang diridloi Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mencapai hal itu sangat diperlukan suatu sistem pendidikan yang efektif dengan menempatkan aspek nilai atau karakter yang baik sebagai indikator yang paling utama untuk menentukan keberhasilannya, bukan aspek kognitif. Dengan begitu pendidikan berbasis nilai atau karakter menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan, baik untuk kehidupan perseorangan, maupun untuk kehidupan berbangsa.

Adalah sangat diyakini bahwa pendidikan berbasis nilai atau karakter tidak akan bisa berkembang di setiap sekolah dengan baik, jika institusi pendidikan atau sekolah tidak secara sadar mengelola institusi pendidikan atau sekolah dengan berbasis nilai atau karakter. Menjadikan anak berkarakter tentu wajib dididik dalam institusi pendidikan atau sekolah yang memang benar-benar menjadikan nilai atau karakter sebagai ruhnya.

Fenomena Sekolah

Sekolah sebagai institusi pendidikan jalur formal pada kenyataannya sangat bervariasi. Dilihat dari statusnya, ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Dilihat dari tempatnya, ada sekolah di kota besar, di kota kecil, di desa, atau di daerah kejauhan (*remote area*). Dilihat dari kualitasnya, ada sekolah unggulan, sekolah standar, atau sekolah terbelakang. Dilihat dari misi, ada sekolah nasional atau sekolah berbasis agama. Diyakini keragaman sekolah yang ada sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian peserta didik, di samping semua komunitas yang terkait dengan sekolah atau institusi pendidikan itu.

Sekolah negeri umumnya memiliki misi menyelenggarakan pendidikan dengan berbasis pada pembentukan peserta didik menjadi pribadi dan warga negara yang baik. Namun tidak sedikit dijumpai, ada sejumlah sekolah negeri memiliki basis nilai atau karakter yang kuat. Demikian juga sekolah swasta umumnya memiliki misi menyelenggarakan pendidikan dengan berbasis pada pembentukan pribadi yang bermoral atau beragama dan warga Negara yang baik. Khususnya sekolah swasta yang berbasis agama cenderung mengorientasikan kepada pembentukan lulusan yang memiliki komitmen dan amalan agama yang kuat pada jenjang pendidikan manapun.

Walaupun ragam institusi pendidikan atau sekolah tidak dapat dihindari, namun komitmen sekolah untuk mengantarkan peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter, yang diwujudkan dengan perilaku personal yang baik dan terpuji (beriman dan bertaqwa) dan perilaku sosial yang bermanfaat bagi orang lain (rasa kebangsaan dan kemanusiaan).

Pentingnya Membangun Sekolah Berbasis Karakter

Kementerian Pendidikan Nasional (2010) menyatakan bahwa pendidikan karakter pada dasarnya memiliki makna yang lebih mendalam daripada pendidikan moral atau pendidikan agama. Karena pendidikan moral dan pendidikan agama selama ini masih dalam taraf mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, dan sejumlah nilai moral dan ajaran agama. Sedangkan pendidikan karakter tidak hanya pada tingkat memahamkan nilai-nilai baik dan buruk, melainkan juga mendorong untuk merasakan nilai-nilai baik dan buruk, serta menunjukkan perilaku yang baik dan menghindari perilaku yang buruk.

Menurut hemat penulis, mestinya pendidikan moral dan agama, juga tidak dapat dibenarkan jika hanya berorientasi pada mengajarkan hal-hal yang benar dan buruk, melainkan juga memahamkan dengan membiasakan yang benar dan menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk, melatih peserta didik untuk merasakan kebaikan nilai-nilai moral dan agama, serta mendorong peserta didik untuk berperilaku yang dilandasi dengan nilai-nilai moral dan agama.

Bagaimana dengan pendidikan karakter bangsa? Menurut hemat penulis, pendidikan karakter bangsa memang merupakan suatu strategi yang paling efektif dalam membangun karakter bangsa *(nation character building)* untuk memberi jaminan terhadap perilaku yang sesuai dengan norma yang diyakini, terutama norma dalam hidup berbangsa. Demikian juga pendidikan karakter bangsa diyakini bermanfaat untuk mendidik seseorang sebagai pribadi dan warga negara bertanggungjawab terhadap kesalahan dan kekeliruan yang dibuat sehingga nampak dipertanyakan loyalitasnya sebagai warga negara yang baik. Yang selanjutnya ada keberanian meminta maaf kepada orang yang menjadi korbannya, sehingga terhindar dari sikap mendzalimi, demikian juga ada keberanian untuk melakukan koreksi terhadap perilakunya sendiri, sehingga merasa bangga sebagai warga negara dan bangsa, bahkan memiliki komitmen dan kesiapan untuk bela negara.

Ciri-ciri Perkembangan Moral dan Persoalan yang Dihadapi Anak Usia SMP

Perkembangan karakter pada usia remaja pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari perkembangannya di usia anak-anak. William Damon (2002) menyatakan bahwa perkembangan karakter pada usia remaja sebenarnya diorientasikan kepada dua hal, yaitu (1) pengembangan *moral reasoning,* dan (2) pembentukan *moral identity*.

Pertama, pengembangan *moral reasoning* pada hakekatnya menyoal tentang pengembangan kapasitas individu dalam menentukan benar atau salah berdasarkan keputusan moral dan *moral judgment* secara efektif dan matang. Pada usia remaja, dalam menentukan benar atau buruk pada posisi orientasi terhadap diri sendiri dan sosial. Pada masa ini sering disebut sebagai masa antara *(in between periode)* atau masa transisi *(transitional periode)*.

Di satu sisi, dalam membuat penalaran moral ditentukan oleh pertimbangan menguntungkan dirinya sendiri, namun dalam waktu yang sama ditentukan juga oleh pertimbangan yang dapat menguntungkan pihak lain. Karena berada pada posisi transisi, maka persoalan yang potensial muncul adalah *altruisme, cheating, delinquency,* dan perilaku sosial berisiku (praktek seksual yang tidak aman dan penggunaan obat).

Kedua, pembentukan identitas moral, sebenarnya bermula dari pencarian identitas diri. Identitas moral diindikasikan dengan adanya *self-concept,* yang pada akhirnya dapat diperoleh *self-identity.* Pada usia SMP sebenarnya merupakan hal sangat kritikal dalam pencarian identitas. Jika kita salah dalam menjadikan sesuatu rujukannya, maka pembentukan dirinya lebih cenderung ke arah yang tidak baik, bahkan menjadikan idola dari seseorang yang memiliki

figur yang kurang baik. Sebaliknya, jika anak remaja ini memiliki figur tokoh baik dalam keilmuan, keagamaan, maupun politik, maka dirinya pada akhirnya akan terbentuk sebagai individu yang baik.

Terbentuknya karakter individu tidaklah muncul dengan sendirinya, namun dipengaruhi oleh lingkungannya. Adapun faktor lingkungan yang menduduki posisi strategis adalah orangtua. Selain daripada itu faktor lain yang sangat berpengaruh, di antaranya: sekolah, teman sebaya, masyarakat (media), agama, dan biologi.

Kiranya cukup jelas bahwa pengasuhan orangtua sangatlah berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Ada beberapa variabel orangtua yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter, di antaranya: kasih sayang orangtua *(parental affection),* keteladanan *(modeling),* ekspresi terhadap nilai, respek terhadap anak, dan diskusi terbuka dengan anak.

Faktor kedua yang sangat penting dalam pembentukan karakter adalah sekolah. Sekolah pada hakekatnya dapat berpengaruh terhadap *self-concept* anak (meliputi *self-esteem*), nilai-nilai, kematangan penalaran moral, inklinasi dan perilaku prososial, pengetahuan tentang moralitas, dan sebagainya.

Faktor ketiga adalah keberadaan teman sebaya. Memang teman sebaya sudah memiliki sedikit dampak terhadap pembentukan karakter sejak usia dini, namun puncaknya berada usia remaja. Teman sebaya pada hakekatnya memiliki dampak terhadap konsep diri, keterampilan sosial (resolusi konflik, membangun dan memelihara persahabatan), pengembangan penalaran moral, keterlibatan dalam perilaku berisiko, dan sebagainya.

Faktor berikutnya adalah komunitas berpengaruh terhadap pembentukan karakter juga berpusat pada penampilan media masa, karakteristik kehidupan tetangga, dan nilai-nilai kultural. Media massa jelas-jelas berpengaruh terhadap sikap curiga (rasial, jenis seksual, usia), agresi dan rasa aman. Agama juga dapat dikaitkan dengan perilaku berisiko rendah dan kesehatan mental yang lebih baik. Demikian juga, terkait dengan biologis bahwa variabel menunjukkan kotroversi, karena di satu sisi bilogis dapat menunjukkan pengaruh yang sangat kuat terhadap aspek karakter (altruisme, risk taking), namun di balik itu biologis tidak berpengaruh

Rambu-rambu Pendidikan Karakter Efektif

1. Bagaimana seseorang memperlakukan anak *(How people threat the child)*
   Untuk melakukan pendidikan karakter yang efektif tidaklah cukup dengan memasang poster atau memberi kuliah atau adanya kurikulum khusus pendidikan karakter. Justru yang lebih penting adalah bagaimana menfokuskan kepada seseorang yang memperlakukan anak. Bagaimana pengalaman

kehidupan anak itu dalam keseharian, bagaimana anak-anak itu diperlakukan dengan respek atau diabaikan. Kondisi inilah yang berdampak pada karakter anak.

2. Bagaimana seseorang memperlakukan orang lain di depan anak *(How significant others treat other people in the child's presence)*
3. Sekolah mengharapkan semua anggota sekolah berkarakter baik *(Expect good character of all members)*
4. Menampilkan karakter positif *(exposing positive character)*
5. Kesempatan mempraktekkan suatu karakter yang baik *(Opportunities to practice a good character).*
6. Kesempatan untuk menalar, berdebat, dan merefleksikan isu moral *Opportunities to reason about, debate, amd reflect on moral issues.*
7. Orangtua secara aktif dan positif terlibat dalam program pendidikan karakter di sekolah.
8. *Parents are actively and positively involved in the sc*

Strategi efektif pendidikan karakter bagi anak SMP

- Keteladaan
- Pembelajaran
  - Pengintegrasian pendidikan karakter dalam materi pelajaran
  - Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler
- Pemberdayaan dan pembudayaan

Penutup dan Rekomendasi: Implementasi Pendidikan karakter di SMP

Untuk mengimplementasikan pendidikan karakter di SMP, ada sejumlah langkah di antaranya:

1. Sekolah mengambil peran kepemimpinan untuk staf, orangtua, dan peserta didik secara bersama-sama untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan elemen karakter yang mereka ingin tekankan. Secara kolektif dan sinergis di antara personil sekolah, orangtua dan peserta didik melakukan identifikasi terhadap elemen pendidikan karakter yang ingin ditekankan. Kiranya kurang dibenarkan bahwa setiap unsur pendidikan karakter melakukan identifikasi elemen pendidikan karakter sendiri-sendiri.
2. Memberi latihan kepada staf tentang bagaimana mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kehidupan dan budaya sekolah. Setiap personil pendidikan di sekolah sangat diharapkan mampu mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kehidupan dan budaya sekolah. Untuk menjamin

efektivitas pendidikan karakter, kiranya perlu sekali dilakukan integrasi nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam aktivitas dan budaya sekolah, sehingga pendidikan karakter mampu berkontribusi secara signifikan bagi perbaikan kehidupan di sekolah.

3. Membentuk kemitraan yang vital dengan orangtua dan masyarakat sehingga peserta didik mendengar informasi yang konsisten tentang sifat-sifat karakter yang esensial untuk sukses di sekolah dan sukses di masyarakat. Membangun kemitraan antara sekolah dengan orangtua dan masyarakat merupakan upaya yang strategis, terutama untuk menghindarkan diri dari
4. Memberikan kesempatan kepada pimpinan sekolah, guru, dan orangtua.

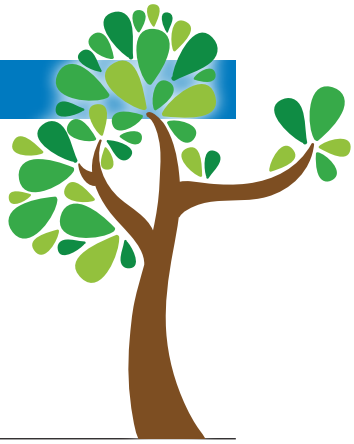

Manajemen Berbasis Sekolah

MANAJEMEN Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu dari agenda reformasi pendidikan, terutama terkait dengan desentralisasi pendidikan sebagai upaya memperbaiki praksis pendidikan, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan kompetitif di tengah-tengah persaingan global. Hal ini diperkuat dengan pendapat White (Peterson:1991) bahwa MBS dimaksudkan untuk memperbaiki lingkungan belajar dan mengajar, sehingga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa secara optimal.

Sebelum reformasi, pengelolaan pendidikan cenderung dikendalikan secara sentral, akibatnya ragam kebutuhan setiap sekolah tidak sepenuhnya dapat dipenuhi secara memuaskan. Di samping itu segala keputusan yang *top-down* berdampak terhadap setiap satuan pendidikan, sehingga dalam implementasinya tidak dapat terlaksana secara optimal. Dalam situasi seperti ini demokratisasi pendidikan tidak dapat terwujud, kreativitas terasa sulit berkembang, dan kemandirian pun sulit dicapai.

Menyadari akan kondisi tersebut, diharapkan sekali MBS dapat memberi harapan baru, karena diyakini bahwa sekolah sendiri jauh lebih tahu tentang kondisinya sendiri, sehingga diharapkan mampu memberi program pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa.

Di samping itu MBS diharapkan dapat menjamin setiap keputusan yang dibuat lebih berkualitas, karena keputusan itu dibuat dengan melibatkan banyak pihak, bukan oleh sekolah sendiri. Yang tidak kalah pentingnya, MBS diharapkan mampu meningkatkan komunikasi di antara para *stakeholder* yang terdiri atas: birokrat pendidikan, pengawas pendidikan, kepala sekolah (KS), guru, orangtua, anggota masyarakat, dan peserta didik, karena mereka berkedudukan sama-sama pentingnya.

Namun kenyataannya, MBS tidak dapat diwujudkan dengan mudah. Hal ini setidak-tidaknya disebabkan oleh kuatnya birokrasi pendidikan pada level kabupaten/kota yang mengendalikan gerak dan langkah sekolah, sehingga Kepala Sekolah (KS) tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk mengelola operasional sekolah, baik dalam aspek akademik maupun administratif. Bahkan boleh dikatakan bahwa cukup banyak KS yang tak berdaya, karena tidak memiliki cukup ruang untuk berkreasi dalam menyelesaikan masalahnya sendiri.

Cukup banyak praktek pengelolaan pendidikan yang dapat ditemukan di lapangan, misalnya: KS tidak memiliki kekuasaan penuh dalam penerimaan peserta didik baru karena sebagian besar keputusan hanya ditentukan oleh hasil sistem penerimaan peserta didik baru dengan *Real Time Online* (RTO); KS hanya menerima jatah tertentu dalam penerimaan anggaran dari pemerintah daerah (Pemda) yang jumlahnya jauh dari kebutuhan riil terutama sekolah kategori maju, sementara itu tidak mudah menentukan sumbangan dari orangtua setelah cukup banyak intervensi LSM yang melampui batas; KS menerima keputusan tata tertib dari pemda termasuk seragam sekolah, sementara itu seragam dan identitasnya dapat dijadikan kebanggaan sekolah; dan sebagaianya.

Peraturan Daerah (Perda) bidang pendidikan memang diperlukan, terutama untuk melakukan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan, sehingga setiap institusi pendidikan dapat menjamin efektivitas dan efisiensinya. Namun Perda acap kali berisi ketentuan yang terlalu detail, sehingga membuat KS tidak bisa bergerak, sehingga kreativitas pimpinan tidak dapat berkembang. Konsekuensi logisnya, kinerja sekolah tidak bisa optimal, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bermanfaat dan tanggap terhadap tuntutan zaman dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat.

Atas dasar itulah, maka untuk dapat menegakkan MBS, diharapkan sekali pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan dapat memainkan perannya secara proporsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga tidak melakukan intervensi secara berlebihan. Demikian juga KS perlu menampilkan keberanian profesional dengan tetap menempatkan pertimbangan akademik lebih tinggi daripada dikendalikan oleh ketakutan birokratik dalam membuat keputusan-keputusan penting untuk pengelolaan sekolah, walau bisa dimaklumi bahwa ketakutan akan pemberhentian atau pemutasian tugas oleh Kepala Dinas di antara sejumlah KS tidak bisa dihindari.

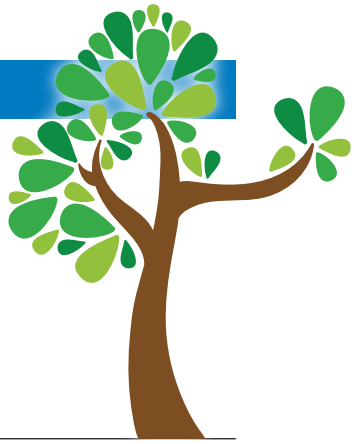

Menyoal MBS

AKHIR-AKHIR ini otonomi pengelolaan pendidikan pada tingkat sekolah sungguh patut mendapat sorotan. Karena pada kenyataannya, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang pada awal tahun 2000-an diharapkan dapat memainkan peran penting dalam pengelolaan pendidikan pada tingkat sekolah, MBS tidak dapat berjalan secara optimal. Kepala Sekolah (KS) yang seharusnya sebagai penentu kebijakan dan pengendali program tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan terdapat kesan bahwa KS tampil secara konvensional, lebih takut bergerak dibandingkan dari era otonomi.

Lebih parah lagi, jika KS sekarang di daerah tertentu hingga bulan ketiga tahun ajaran 2009/2010 belum memperoleh pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS-nya). Belum lagi sekolah dan Komite Sekolah tidak memiliki keleluasan untuk melakukan penarikan uang sekolah sesuai yang diinginkan, karena berbenturan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Kondisi ini sangat menghambat perjalanan kegiatan pendidikan semua sekolah negeri, terutama sekolah favorit yang seharusnya mereka memiliki kegiatan yang padat. Berbagai program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara layak. Bahkan ditemui sejumlah guru sudah mulai menunjukkan apatisnya. Bisa dibayangkan, jika iklim yang semacam ini akan terjadi secara berkepanjangan.

Jika dikaitkan dengan suatu kasus di Kota Yogya, maka secara hipotetik Yogya yang memiliki obsesi membangun pendidikan bermutu, tidak akan mudah dapat direalisasikan, jika MBS tidak mendapat jaminan dari pemerintah daerah secara optimal. Boleh jadi Yogya sebagai kota idaman untuk perebutan sekolah hanya tinggal kenangan, karena sekolah sudah tidak memiliki kebanggaan lagi untuk ditawarkan ke masyarakat luas, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia.

Tanpa mengurangi penghargaan terhadap kepala pemerintah daerah yang memiliki wilayah dan kekuasaan di daerahnya, pengelolaan pendidikan pada tingkat institusi pendidikan perlu dikembalikan kepada *khiththah* atau *track*-nya. Kepala sekolah seharusnya memainkan peran penting dalam pengelolaan praktek pendidikan di sekolahnya, tanpa diintervensi secara berlebihan oleh peraturan daerah dan kebijakan Kepala Daerah. Kepala sekolah memiliki kebebasan akademik secara bertanggungjawab dalam mengendalikan program-program di sekolah, tanpa dibayang-bayangi oleh ketakutan berkenaan dengan kebijakan mutasi sebagai akibat "ketidaktaatan" kepada pimpinan.

Untuk dapat menghindari penyimpangan implementasi otonomi pengelolaan pendidikan, kiranya perlu segera ditata ulang sesuai dengan rambu-rambu pengelolaan pendidikan dengan terus menerus mendorong terjadinya revitalisasi MBS. Komite sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya secara sinergis memperoleh haknya secara optimal yang disertai dengan tanggung jawab yang penuh.

Untuk mewujudkan revitaliasi MBS, kepala sekolah harus mampu menunjukkan tanggung jawabnya, baik kepada Dinas Pendidikan dan Kepala Pemerintah daerah, orangtua, masyarakat (LSM, Ormas, Organisasi Profesi, lembaga bisnis/industri), organisasi profesi, alumni, maupun peserta didik sebagai subjek utamanya. Sebaliknya bahwa kepala sekolah harus membatasi kewenangan dan kekuasaannya dengan tampil yang penuh rasa hendah hati *(tawadlu')* dan mengembangkan sikap kooperatif dengan institusi di luar sekolahnya.

Akhirnya, untuk menjamin implementasi MBS secara tepat dan bertanggungjawab, maka sangat dipandang perlu untuk melaksanakan evaluasi menyeluruh secara nasional, daerah, dan sekolah. Hasil evaluasi dapat dijadikan suatu masukan yang sangat berarti dalam mengawali siklus pemerintahan baru. Dalam konteks inilah, kebijakan revitalisasi MBS merupakan suatu pilihan terbaik, sehingga dapat dicapai peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, serta perbaikan akuntabilitas bidang pendidikan bagi institusi terkait dan masyarakat secara luas.

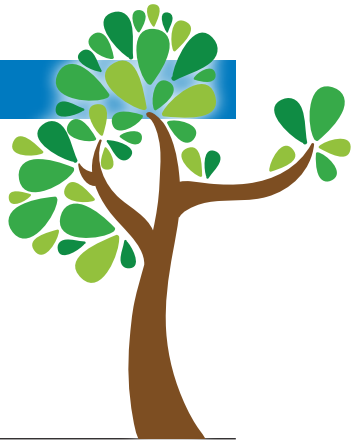

Peranan Pengawasan dalam Manajemen Berbasis Sekolah dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Pengantar

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu dari beberapa agenda reformasi pendidikan yang diusulkan, terutama terkait dengan upaya memperbaiki praksis pendidikan, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan kompetitif di tengah-tengah persaingan global. Hal ini diperkuat dengan pendapat White (Peterson:1991) bahwa tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah adalah memperbaiki lingkungan belajar dan mengajar bagi siswa, sehingga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa secara optimal.

Selama ini pengelolaan pendidikan cenderung dikendalikan dari sentral (pusat), akibatnya kebutuhan yang beragam di setiap sekolah, tidak sepenuhnya dapat dipenuhi secara lebih memuaskan. Di samping itu segala keputusan selalu dibuat di pusat, sehingga pelaku pendidikan di tingkat sekolah seakan-akan tidak ikut memilikinya. Dalam situasi seperti ini demokratisasi pendidikan tidak dapat terwujud, kreativitas terasa sulit berkembang, dan kemandirian pun berada mendekati titik nol.

Menyadari akan kondisi tersebut, diharapkan sekali Manajemen Berbasis Sekolah (untuk seterusnya disebut MBS) dapat memberi harapan baru, yaitu mampu memberikan program pendidikan yang lebih baik bagi siswa, karena sumber yang tersedia akan dapat secara langsung sesuai kebutuhan siswa.

Di samping itu MBS diharapkan dapat menjamin setiap keputusan yang dibuat lebih berkualitas, karena keputusan itu dibuat oleh kelompok, bukan oleh individu. Yang tidak kalah pentingnya, MBS diharapkan mampu meningkatkan komunikasi di antara para *stakeholder* yang terdiri atas: birokrat pendidikan, pengawas pendidikan, kepala sekolah, guru, orangtua, anggota masyarakat, dan siswa.

Namun kenyataannya tidaklah keberadaan MBS otomatis dapat meningkatkan kualitas pendidikan, tanpa ada pengawasan yang dilaksanakan secara komprehensif. Dengan demikian pengawasan memiliki peranan yang sangat strategis dalam menjamin efektivitas penerapan MBS sebagai perwujudan otonomi pendidikan.

Mengenal MBS

MBS pada dasarnya merupakan terjemahan dari *School Based Management*. Untuk memahami MBS, setidak-tidaknya dapat memperhatikan Atebury dan Hord (Kathleen Catton, 2001) yang mengidentifikasi beberapa istilah yang dapat menjelaskan MBS, di antaranya: desentralisasi, restrukturisasi, manajemen berbasis tempat, manajemen berbasis sekolah, pembuatan keputusan partisipatoris, otonomi berbasis sekolah, manajemen yang terdesentralisasikan, pembuatan keputusan bersama, pemberdayaan sekolah, pemerintahan bersama, otoritas yang terdesentralisasikan, pembuatan keputusan berbasis sekolah, otonomi yang bertanggungjawab, konsep sekolah yang otonom, desentralisasi administratif, dan pemerintahan yang berbasis sekolah. Kalau diperhatikan dengan sungguh-sungguh istilah-istilah ini cukup membingungkan, namun yang penting adalah semua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu sekolah memiliki peran sentral dalam reformasi pendidikan dewasa ini.

Setelah mengkaji beberapa definisi, yang bahkan seringkali ambigius, Malen, Ogawa, dan Kranz (Mohfman, Wohlstetter, dkk:1994) menegaskan definisi MBS, bahwa "MBS dapat dipandang secara konseptual sebagai suatu perubahan formal dari struktur pemerintahan, sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah secara individual sebagai unit utama perbaikan dan bersandar pada redistribusi otoritas pembuatan keputusan sebagai alat utama perbaikan kinerja pendidikan"

MBS memungkinkan semua *shareholder*, yang mencakup kepala sekolah, guru, orangtua, siswa, dan anggota masyarakat lainnya memiliki kekuasaan yang sama-sama pentingnya untuk diperhatikan dalam proses pendidikan. Konfigurasi kekuasaan dalam pengelolaan sekolah bersifat kontekstual. Ada yang memungkinkan MBS dapat memberikan kekuasaan yang lebih kepada anggota staf sekolah dan masyarakat. Demikian juga ada MBS yang memberi kekuasaan kepada orangtua murid, bahkan secara khusus memiliki kekuasaan yang luas, baik yang menyangkut penggajian kepala sekolah dan memutuskan anggaran sekolah. Memang keanggotaan MBS pada umumya didominasi oleh guru dan kepala sekolah. Yang penting bahwa sekolah menjadi kunci utama dalam pengelolaan pendidikan.

Berbagai Keuntungan MBS

Pada tahun 1988, sebuah kelompok kerja *(task force)* yang terdiri dari *the American Association of School Administrators, the National Association of Elementary School Pricipals, and the National Association of Secondary School Principals* (Kubick, 1988) mengidentifikasi ada sembilan keuntungan dari penerapan MBS, di antaranya: (1) secara formal mengenal keahlian dan kompetensi orang-orang yang bekerja dalam setiap sekolah untuk membuat keputusan dalam memperbaiki pembelajaran, (2) memberikan kesempatan kepada guru, anggota staf lainnya, dan masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembuatan keputusan, (3) memperbaiki moral guru, (4) menfokuskan kepada akuntabilitas keputusan, (5) menjamin sumber keuangan dan instruksional sejalan dengan tujuan instruksional yang dikembangkan dalam setiap sekolah, (6) memelihara dan mendorong pemimpin baru pada semua level, (7) meningkatkan kuantitas dan kualitas komunikasi, (8) setiap fleksibilitas sekolah dapat memenuhi kebutuhan siswanya, sehingga dapat mengarahkan kepada kreativitas yang lebih besar dalam disain program, dan (9) anggaran sekolah juga dapat menjadi lebih realistik. Selain daripada itu Peterson (1991) mempertegas tentang keuntungan MBS, di antaranya: MBS menciptakan sumber-sumber kepemimpinan baru, menegakkan akuntabilitas, dan meluruskan prioritas anggaran dan instruksional.

Beberapa keuntungan tersebut, MBS memiliki kecenderungan mampu memberdayakan sekolah, sehingga sekolah diharapkan dapat lebih aktif dan dinamis dalam mengimplementasikan setiap programnya yang telah disepakati. Dengan demikian MBS tidak hanya dapat meningkatkan patisipasi semua pihak terkait dalam proses pendidikan, melainkan juga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas, karena lebih banyak pihak yang terlibat dalam pemantauan proses pendidikan yang berlangsung.

Di antara banyak keuntungan MBS tersebut, ada satu kata kunci yang sangat penting adalah akuntabilitas pendidikan. Akuntabilitas pendidikan mengindikasikan betapa pentingnnya pengawasan dalam proses pendidikan, baik pengawasan internal maupun eksternal. Dengan mengefektifkan pelaksanaan pengawasan, diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan MBS, yang pada akhirnya dapat memperbaiki kualitas pendidikan.

Bentuk SBM yang Terbaik

Untuk mengevaluasi efektivitas MBS tidaklah mudah, karena banyak variasi yang akan terjadi dalam prakteknya. Dalam suatu sistem MBS, terjadi pengalihan kekuasaan dari pemerintah ke pemerintah daerah propinsi atau kabupaten/kota, dari pemerintah daerah propinsi atau kabupaten ke pengawas

sekolah, dari pengawas sekolah ke kepala sekolah, dari kepala sekolah ke anggota masyarakat sekolah, seperti guru dan orangtua, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih.

Selain daripada itu yang tidak kalah penting adalah keputusan yang dibuat dalam suatu sekolah sangatlah bervariatif. Hal ini dapat saja disebabkan oleh kondisi empirik di setiap sekolah. Pengambilan keputusan dapat saja disebabkan oleh dominasi kepala sekolah, guru, atau orangtua, apakah terkait dengan pengembangan kurikulum di sekolah, anggaran sekolah, maupun ketenagaan dalam sekolah.

Untuk dapat meraih keberhasilan dalam penerapan MBS, Oswald (1995) mengusulkan, kepala sekolah harus menggunakan suatu pendekatan tim dalam pembuatan keputusan. Jika langkah ini dilakukan, maka diharapkan dukungan terhadap MBS semakin positif, para guru akan lebih positif terhadap pimpinan sekolah dan lebih *committed* terhadap tujuan sekolah, termasuk juga terhadap program-program sekolah.

Orangtua dan anggota masyarakat akan lebih supportif terhadap sekolah, kareka sekolah memiliki lebih banyak pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan. Dalam kondisi seperti ini orangtua dan anggota masyarakat lainnya dapat melakukan peran pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Bila peran pengawasan dapat diwujudkan secara aktif, objektif dan terarah, maka orangtua dan anggota masyarakat lainnya dapat termudahkan dalam proses pembuatan keputusan.

Peran MBS dalam Meningkatkan Prestasi Siswa

Bagaimana MBS dapat meningkatkan prestasi siswa. Peterson (1991) menegaskan bahwa kinerja siswa sangatlah mungkin diperbaiki ketika manajemen pendidikan itu lebih disentralkan ke sekolah daripada ke pemerintah kabupaten/kota. Dengan pola manajemen seperti ini, para guru dan kepala sekolah dapat dengan mudahnya menyesuaikan diri dengan kebutuhan sekolah dan siswa secara lebih spesifik. Bahkan ditegaskan pula bahwa mereka akan merasa bimbang, manakala mereka harus menerapkan segala agenda reformasi pendidikan, sementara itu mereka tidak terlibat dalam proses perencanaannya.

Yang menarik bahwa penelitian yang dilakukan oleh Oswald (1995) belum menemukan suatu hubungan antara MBS dan prestasi siswa. Wohlstetter dan koleganya (Oswald,1995) menegaskan bahwa memperbaiki kinerja sekolah mungkin merupakan suatu harapan yang tidak realistik dalam reformasi pemerintahan yang menghilangkan keseimbangan kekuasaan dalam sistem pendidikan terhadap sekolah.

Tetapi Drury dan Levin (Oswald,1995) memberikan informasi yang lebih detil bahwa MBS memang berkontribusi terhadap empat hasil yang *intermediate*, yang pada gilirannya memiliki potensi dapat mengarahkan kepada perbaikan prestasi siswa; yaitu di antaranya: peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber dan personil, peningkatan profesionalisme guru, implementasi reformasi kurikulum, dan peningkatan keterlibatan masyarakat.

Empat kondisi tersebut diyakini dapat memberi sumbangan bagi peningkatan prestasi siswa. Dengan kata lain bahwa MBS pada dasarnya berpengaruh secara tidak langsung terhadap peningkatan prestasi siswa. Lebih jelasnya bahwa sekolah yang menerapkan MBS yang dibarengi dengan reformasi kurikulum dan instruksional cenderung dapat memperbaiki prestasi akademik siswa dan menjadikan sekolah sebagai tempat yang lebih menarik untuk bekerja. Tanpa kombinasi dengan pembaharuan kurikulum dan instruksional, MBS hanya dipandang sebagai bagian dari suatu reformasi politik semata.

Selain daripada empat hal tersebut, melalui dua studi kasus di Canada (Peterson, 1991) menyarankan pembuatan keputusan yang didesentralisasikan menciptakan suatu lingkungan pendidikan yang lebih efektif. Hal ini diperkuat dengan hasil kajian tahunan terhadap sekolah yang menunjukkan bahwa kepuasan siswa SLTP dan SM berada pada posisi yang tinggi di sebagian daerah yang telah menerapkan reformasi pendidikan. Para siswa mengalami perbaikan pada sejumlah bidang kunci, di antaranya: kegunaan dan efektivitas mata pelajaran dan penekanan sekolah terhadap keterampilan dasar.

Selanjutnya Rosenholtz (Peterson,1991) menyatakan bahwa pembuatan keputusan kolektif telah mengarahkan kepada peningkatan kejelasan guru tentang tujuan dan metode instruksional dan efektivitas pengajarannya . Hal ini dapat terjadi karena proses pembelajaran dibangun bersama-sama dengan siswa, sehingga materi instruksional diyakini dapat memenuhi kebutuhan dan potensi siswa. Sejalan dengan itu, penelitian menunjukkan bahwa MBS memperbaiki kepuasan guru, terutama ketika guru memiliki peran yang lebih substantif daripada hanya sekedar menasihati. Dalam suasana yang demikian guru merasa lebih terhormat dan bermartabat, karena memiliki kontribusi yang lebih fungsional.

Diakui bahwa MBS belum konsisten dan stabil dalam memberikan dukungan terhadap perbaikan prestasi siswa, sehingga diharapkan perlu berhati-hati dalam menerapkan MBS, sehingga kehadiran MBS lebih bermakna bagi keberhasilan pendidikan, khusunya lagi bagi keberhasilan belajar siswa, bukan justru menjadi kontra produktif.

Akhirnya perlu diperhatikan bahwa selain kehati-hatian dalam penerapan MBS, pengawasan yang dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi terhadap penerapan MBS perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional, sehingga misi MBS dapat terpenuhi secara memuaskan.

Upaya MBS dalam Meningkatkan Prestasi Siswa

Kehadiran MBS memang dikehendaki dapat meningkatkan prestasi siswa. Namun keinginan itu tidaklah secara otomatis dapat terwujud. Karena MBS yang tidak ditangani secara serius, dapat cenderung mengalami kegagalan. Untuk menunjang keberhasilan MBS, Peterson (1991) menegaskan perlu adanya jaringan komunikasi yang kuat, suatu komitmen finansial terhadap pertumbuhan dan pelatihan yang profesional bagi tenaga kependidikan, dan *back up* dari semua komponen dari masyarakat sekolah.

Yang tidak kalah pentingnya juga guru harus disiapkan untuk memiliki tanggung jawab dan kekuasaan yang berarti, mengambil inisiatif dalam perbaikan sekolah di bawah MBS, dan bertanggungjawab terhadap publik yang terkait dengan kinerjanya. Dengan kata lain, MBS memungkinkan guru memiliki posisi yang sangat strategis menentukan perbaikan kenerja penddikan.

Selanjutnya untuk mengefektifkan MBS dalam perannya memperbaiki prestasi siswa, diharapkan frekuensi dan kualitas penilaian perlu terus ditingkatkan, sehingga memungkinkan dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian program secepatnya. Untuk kepentingan penilaian, perlu dilibatkan para pengawas fungsional, dalam hal ini pengawas bidang studi dan pengelolaan sekolah yang profesional dan akuntabel. Di samping itu perhatian dan kepedulian para stakeholder pendidikan hendaknya lebih ditingkatkan terhadap penerapan MBS yang memang memerlukan partisipasi dan dukungannya secara aktif.

Problem di Balik MBS dan Tanggung Jawab Stakeholder

Untuk menghindari adanya kontra produktif dari MBS, maka perlu diidentifikasi sejumlah masalah yang potensial di balik MBS, di antaranya: (1) MBS mencakup lebih banyak stakeholder, sehingga kadang-kadang menyulitkan dalam pembuatan keputusan, (2) MBS potensial untuk tidak efisien, karena setiap langkah harus melibatkan banyak pihak, (3) kinerja sekolah yang agak ganjil, karena banyaknya intervensi dari luar, (4) adanya kebutuhan yang meningkat terhadap pengembangan staf, (5) adanya kebingungan terhadap peran dan tanggung jawab yang baru di antara anggota sekolah dan institusi yang terkait, dan (6) adanya kesulitan melakukan koordinasi di antara unsur dalam pengelolaan sekolah. Persoalan yang sangat penting adalah akuntabilitas. Sebuah sekolah menginginkan suatu otoritas yang melebihi keputusan, tetapi publik (masyarakat) akan tetap memegang bahwa Komisi/Dewan Sekolah merasa lebih akuntabel terhadap hasil keputusan itu. Kondisi yang demikian ini

cukup merepotkan sekolah dalam menjalankan roda kegiatannya, karena terjadi benturan antara dua pihak.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya pengetahuan stakeholder tentang MBS, terutama yang berkenaan dengan bagaimana MBS itu bekerja, yang secara rinci mencakup: kurangnya keterampilan pembuatan keputusan, komunikasi, dan kepercayaan di antara para *stakeholder*; aturan yang membatasi kekuasaan dan keterlibatan waktu guru; dan keengganan beberapa pengelola *(administrator)* dan guru untuk mengizinkan pihak lain untuk mengambil alih kekuasaan dalam pembuatan keputusan.

Yang jelas, ketika MBS itu diterapkan diharapkan para stakeholder sekolah itu benar-benar memahami MBS secara komprehensif, baik konsep maupun prakteknya. Untuk meningkatkan efektivitas MBS dikaitkan dengan keberadaan stakeholder, yaitu semua pihak yang terlibat dalam implementasi MBS sebaiknya mengetahui keputusan mana yang seharusnya di-*share,* oleh siapa, dan pada level apa dalam organisasi.

Bertitik tolak dari itulah, maka kata kunci yang menjelaskan peran administrasi adalah fasilitasi. Artinya bahwa Kantor Dinas diharapkan lebih cenderung menfasilitasi daripada mengontrol tindakan sekolah, dengan menformulasikan dan mendefinisikan kebijakan umum dan tujuan pendidikan. Pengawas sekolah juga memberi kesempatan pengembangan profesional, mendorong melakukan eksperimentasi dalam metode pembelajaran, berperan sebagai sebuah model dengan menggunakan MBS sendiri, dan menciptakan hubungan komunikasi antara sekolah dan staf kantor Dinas.

Pada tingkat bangunan, kepala sekolah selalu menjadi figur kunci dalam memelihara pengelolaan bersama dalam sekolah. Kepala sekolah tidak hanya meningkatkan tanggung jawab dan otoritasnya dalam keputusan program sekolah, kurikulum, dan personil, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas bagi keberhasilan siswa dan program. Kepala sekolah harus menjadi pemimpin dan delegasi tim yang unggul.

Pemberdayaan dan akuntabilitas guru merupakan unsur utama dalam MBS. Guru mempengaruhi keputusan dengan berpartisipasi dalam merencanakan, mengembangkan, memantau, dan memperbaiki program instruksional dalam sekolah. Akhirnya keterlibatan orangtua adalah esensial untuk implementasi MBS yang sukses. Argumen keterlibatan orangtua bersandar pada dua keuntungan bagi anak, yaitu: sikap yang lebih baik kepada sekolah dan keberhasilan pendidikan yang lebih tinggi.

Penutup

Untuk menjamin kesuksesan penerapan MBS, terutama dalam meningkatkan prestasi siswa, maka para stakeholder, tanpa terkecuali perlu terus meningkatkan pemahamannya terhadap konsep MBS dan implementasinya. Mereka seharusnya dapat memahami peran baru, tanggung jawab, dan akuntabilitasnya masing-masing.

Kepala sekolah dan Kepala Dinas diharapkan sekali lebih supportif dan menjamin dengan adanya saluran komunikasi yang akan memungkinkan terjadi kontak setiap saat, sehingga dapat terbangun institusi sekolah yang lebih efektif, efisien dan produktif. Untuk itu kepala sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan diharapkan secara konsisten dapat memerankan fungsi pengawasan dan supervisi terhadap penyelenggaraan MBS, sehingga misi MBS dapat terwujud secara bertanggung jawab.

Memang dalam euphoria reformasi dewasa ini, posisi komisi/dewan sekolah dikhawatirkan dapat mengancam eksistensi sekolah, jika tidak dikendalikan. Apakah itu yang terkait dengan keterlibatan dalam pengambilan keputusan untuk perumusan kebijakan sekolah ataupun dukungan terhadap pelaksanaan program pendidikan. Oleh karenanya komite/dewan sekolah diharapkan dapat mengawal dan mengawasi perjalanan MBS yang mulai digelindingkan ini.

Selain daripada itu fleksibilitas sangat diperlukan dalam penerapan MBS, sehingga memungkinkan adanya variasi format MBS yang terkait sekali dengan potensi para stakeholders dan lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap kehidupan sekolah. Yang jelas MBS bukanlah sebagai bagian dari kebijakan politik semata, melainkan MBS yang lebih penting merupakan wujud desentralisasi pengelolaan pendidikan yang memungkinkan dapat mendorong pemberdayaan bagi semua stakeholders, utamanya siswa, guru, kepala sekolah, dan orangtua.

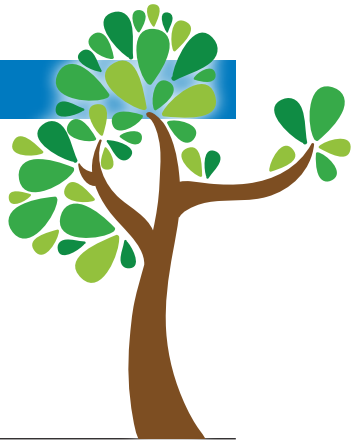

Pro Kontra Kuota PPDB

MENJELANG Juli 2008**,** kita dihadapkan persoalan yang sangat menarik berkenaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terutama untuk jenjang SMP dan SMA Negeri di wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan data Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, bahwa peserta didik berasal dari kota yang belajar di SMP Negeri sebanyak 54,4 persen (dari 10.233 orang) dan di SMA Negeri sebanyak 36 persen (dari 7.597 orang), sebaliknya sebanyak 700 orang peserta didik asal kota yang belajar di luar kota.

Menyadari kondisi tersebut, Walikota Yogyakarta menetapkan Perwal No. 236/KEP/2007 tentang Kuota Peserta Didik Baru Masuk SMP dan SMA Negeri di Kota Yogyakarta yang menegaskan bahwa kuota peserta didik baru masuk SMP dan SMA Negeri di Kota Yogyakarta untuk tahun pelajaran 2008/2009 sebagai berikut: (1) Peserta didik baru penduduk Kota Yogyakarta mendapat kuota 70%, yang berasal dari luar kota Yogyakata dalam Propinsi DIY mendapat kuota 20%, dan yang berasal dari luar Propinsi DIY mendapat kuota 5%.

Ditegaskan bahwa pengeluaran Perwal tersebut bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada keinginan untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar dua belas tahun dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk Kota Yogyakarta dalam mengenyam pendidikan di Kota Yogyakarta, terutama pada SMP dan SMA Negeri.

Kebijakan Walikota ini kenyataannya menimbulkan sikap pro dan kontra. Pihak pro menegaskan bahwa kebijakan PPDB (1) memberikan peluang kepada warga kota lebih longgar untuk mengakses SMP dan SMA Negeri di kota, bahkan sekolah yang favorit sekalipun, (2) dapat mendorong pemerintah kabupaten di lingkungan DIY untuk memacu sekolah di wilayahnya untuk maju, (3) dapat memudahkan dalam pemberian bantuan langsung berupa beasiswa bagi

peserta didik dari keluarga miskin, dan (4) merupakan perwujudan janji kampanye Walikota yang harus ditepati.

Bagaimana dengan pihak yang kontra, mereka berpendapat bahwa kebijakan PPDB (1) mengurangi peluang warga dari luar kota, padahal di antara mereka sudah belajar pada jenjang sebelumnya di wilayah kota, (2) dipandang kurang menguntungkan bagi hampir semua sekolah negeri, terutama SMA Negeri merasa ketakutan akan mendapatkan *input* yang kualitasnya di bawah standar, (3) dinilai sebagai bentuk arogansi dari pemerintah kota, karena itu soal PPDB seharusnya dikembalikan pada suasana kompetisi yang sehat dan *fair,* sementara itu perlu diingat bahwa Yogya pada hakekatnya merupakan wilayah yang kecil dan menyatu dengan milayah sekitarnya, dan (4) melalui sistem kuota, pada hakekatnya membunuh nilai-nilai luhur dalam pendidikan, karena tidak memberikan kebebasan untuk memilih.

Walau sikap pro dan kontra yang dibarengi dengan sejumlah argumentasi sangat bisa dimaklumi, namun persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlalu tanpa dilakukan kajian yang lebih mendalam. Apalagi kalau dicermati lebih jauh bahwa Yogya sebagai kota pendidikan, pada kenyataannya sekarang bukan dikaitkan dengan keunggulan perguruan tingginya yang ada di wilayahnya, melainkan pendidikan menengah ke bawah. Keunggulan kota Yogya inilah yang menyebabkan banyak orangtua di luar kota menginginkan sekali anaknya dapat belajar di kota Yogya. Namun dengan keluarnya Perwal, banyak orangtua yang di luar Yogya dibayangi sikap *"uncertain"*.

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. *Pertama,* jika Walikota membuat kebijakan itu didasarkan pada adanya data yang di tangan, maka ketentuan kuota 70 persen bagi warga kota untuk SMP dan SMA Negeri pada dasarnya kurang tepat. Mengapa, perhatikan illustrasi sebagai berikut: Berdasarkan data yang ada terdapat 700 orang dari keluarga miskin yang sekolah di luar wilayah kota. Dengan asumsi proporsi yang sama pada kelompok peserta didik SMP dan SMA Negeri, maka berdasarkan proporsi peserta didik di SMP dan SMA dari 700 orang diperkirakan sebanyak 402 orang peserta didik SMP dan 298 orang SMA. Jika mereka harus diakomodasi di SMP dan SMA Negeri, maka jumlah peserta didik SMP Negeri berasal dari kota sebanyak 5.971 orang (5.569 + 402 orang) sekitar 59%, dan jumlah peserta didik SMA Negeri berasal dari kota sebanyak 3.033 orang (2.735 orang) sekitar 40%. Dengan memperhatikan kondisi empirik ini, maka kuota yang lebih realistis bukan lagi angka 70%, melainkan 60%-65% untuk SMPN dan 40%-45% untuk SMAN.

Kedua, pembatasan yang dilakukan terhadap siswa berpotensi dari luar kota, diduga akan berdampak terhadap hampir semua SMAN, 10 dari 11 SMAN, bahkan 7 dari 16 SMPN di wilayah kota, terutama pada SMPN dan SMAN kata-

gori favorit. Walau proses itu juga penting dan sangat menentukan, tapi *intake* yang baik dan berkualitas juga sangat penting dalam menghasilkan lulusan bermutu. Namun jika ketentuan kuota tetap berlaku berdasarkan Perwal, maka diduga akan berdampak terhadap penurunan kualitas pendidikan secara keseluruhan, sebaliknya akan menjadi peluang bagi kabupaten sekitar untuk memajukan SMP dan SMA negeri yang ada di sekitar kota.

Ketiga, posisi kota Yogya secara geografis terletak di wilayah yang menyatu dengan wilayah kabupaten lainnya, bahkan tidak terisolasi. Kondisi ini memungkinkan terjadinya kemudahan mobilitas warga, termasuk peserta didik. Berdasarkan kondisi inilah, kiranya sangat kurang strategis jika kuota ditetapkan tanpa mempertimbangkan realita yang ada. Dengan penetapan kuota ini, pihak yang lebih dirugikan adalah warga kabupaten di lingkungan Provinsi DIY, bukan di luar propinsi, karena calon PDB dari luar propinsi memperoleh kuota sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sekitar 0,2% untuk luar Provinsi DIY dan 5% untuk dalam Provinsi DIY.

Keempat, rate SPP siswa SMP dan SMA Negeri selama ini diberlakukan umum bagi semua peserta didik, tanpa memperhatikan asal usulnya. Sangat dimaklumi bahwa pemerintah kota merasa terbebani untuk membiayai peserta didik dari luar wilayah kota. Jika demikian, kiranya sangatlah realistis bila peserta didik dari luar kota dibebani SPP lebih banyak dari peserta didik dari kota sebagai upaya kompensasi. Misalnya, jika SPP untuk peserta didik SMA Negeri "X" asal kota sebanyak Rp 150.000,00/bulan, maka SPP untuk yang berasal luar kota dalam DIY sebanyak Rp 200.000,00/bulan dan yang berasal dari luar propinsi DIY sebanyak Rp 250.000,00/bulan.

Variasi *rate* ini disesuaikan dengan posisi otonomi pada tingkat kabupaten. Berkenaan dengan besaran SPP, maka hal ini analog dengan model pembayaran *tuition fee* untuk mahasiswa *in-state* sebanyak US$ 1.500/smt, mahasiswa *out-off-state* sebanyak US$ 2.500/smt, dan mahasiswa asing sebanyak US$ 4.500/smt. Variasi *rate* ini didasarkan atas tingkat otonomi pemerintahan pada provinsi. Upaya ini perlu dijadikan alternatif untuk *fund-raising,* karena sekolah-sekolah favorit akan merasa kesulitan untuk meningkatkan kualitas program dan kegiatannya, jika anggaran sekolah yang diperoleh dari pemerintah kota sangat terbatas.

Kelima**,** perlu dimaklumi bahwa kecenderungan penduduk di Indonesia, termasuk Yogyakarta mengikuti *trend* di luar negeri. Warga negara berstatus sosial tinggi cenderung membangun huniannya di daerah pinggiran kota *(suburb areas)*, bukan di dalam kota *(inner city)*. Artinya bahwa dalam konteks Yogyakarta, maka mereka sekarang hampir mayoritas berhuni di luar kota Yogyakarta, tepatnya di wilayah kabupaten. Kendatipun otonomi berada di tingkat

kota atau kabupaten, untuk dapat mengatasi solusi semua bidang kehidupan ke depan, khususnya bidang pendidikan, pemerintah kota dan kabupaten di wilayah DIY sebaiknya semakin meningkatkan kerjasama dan sinerginya dengan pendampingan dan koordinasi dari pemerintah propinsi DIY.

Keenam**,** ada kecenderungan bahwa cukup banyak orangtua yang sudah dan mau memindahkan anaknya menjadi warga kota, agar anaknya memiliki peluang yang lebih banyak. Walaupun langkah ini dibenarkan oleh kebijakan walikota, namun menurut hemat saya kebijakan ini kurang mendidik, karena solusi ini bermuatan kepura-puraan, sehingga dapat mendorong tindakan manipulatif. Apa mungkin anak itu berpisah dari orangtuanya, jangan-jangan hanya untuk kepentingan mendaftar saja, tapi begitu sudah diterima, yang bersangkutan kembali lagi bersama orangtuanya.

Akhirnya perlu dimaklumi bahwa otonomi daerah perlu dipahami secara kontekstual, bukan tekstual, sehingga dapat terhindar dari pembuatan kebijakan yang kontra produktif. Demikian juga dalam melihat suatu sektor pembangunan, khususnya sektor pendidikan perlu disikapi secara komprehensif, bukan parsial, sehingga dapat juga terhindar dari penyelesaian persoalan pendidikan yang bersifat fragmentaris. Semoga!

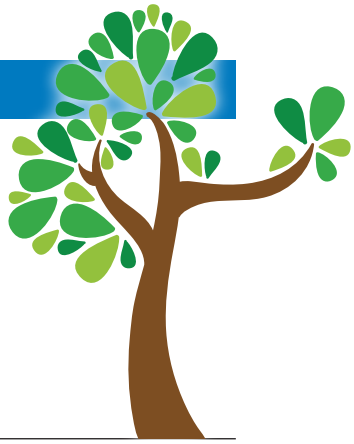

Pentingnya Membaca

PERINTAH membaca merupakan wahyu pertama dari Allah swt untuk Muhammad saw, insan pilihan di muka bumi sebagai tanda kenabian dan kerasulannya. Hal ini diperkuat dengan turunnya ayat 1-5 dari Al-Qur-an Surat Al-Alaq. Wahyu ini menekankan pentingnya membaca dalam proses kehidupan manusia, sehingga wujud jati dirinya sebagai makhluk yang bermartabat.

Membaca dalam konteks ini tidak hanya dibatasi untuk membaca ayat-ayat *qauliyah*, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an dan apa yang tertuang dalam As-Sunnah (segala ucapan, keinginan dan perilaku Rasulullah), melainkan juga membaca ayat-ayat *kauniyah* (apa yang tersebar di antara bumi dan langit) yang harus kita baca, sehingga bisa bermanfaat dan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan akhirat.

Membaca ayat-ayat *qauliyah* yang dapat dilakukan dengan benar, insya Allah dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah swt, demikian juga dapat meningkatkan hubungan kita dengan sesama.

Ketika tanah Arab dan sekitarnya dihuni dan dikuasai oleh masyarakat jahiliyah, maka sekitar 13,5 abad yang lalu Allah swt menurunkan seorang terpilih yang ditugasi untuk mencerdaskan dan mencerahkan kehidupannya, sehingga mereka dapat keluar dari era kegelapan menuju ke alam yang terang benderang *(minadz dzuluumaati ilan nuur).* Dampak positifnya sangat dapat kita rasakan hingga kini. Muhammad dikukuhkan sebagai Rasulullah dengan wahyu pertamanya (*Q.S Al-Alaq:1-5)* yang menekankan pada pentingnya ilmu dan perintah untuk menuntutnya.

Pada hakekatnya ilmu berasal dari huruf I, L, dan M. Ketiga huruf itu dapat dipahami di antaranya; I berarti *'Illiyyiin:* Ilmu membuat orang yang memiliki ilmu menempati posisi yang tinggi, L berarti *Lathiif:* Ilmu membuat orang memiliki hati yang halus dan lembut, tenang dan pemurah (dermawan), dan M

berarti *Mulk:* Ilmu membuat orang berjiwa pemimpin dan memiliki kekuasaan. Atas dasar itu maka ilmu sungguh memiliki fungsi memanusiakan manusia, bahkan mengantarkan manusia menuju bentukan diri yang bermartabat sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk yang terbaik dan tersempurna di antara makhluk-makhluk lain, baik sebagai *'abdullah* yang mampu menjadi *uswatun hasanah*, maupun sebagai *khalifah fil ardzi* yang *tawadlu'*.

Allah swt berfirman *"Qul hal yastwill ladziina ya'maluuna walladziina laa ya'lamuun* (Q.S. Az Zumaar, 9). Artinya:"Katakanlah (hai Muhammad), apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu?" Jelaslah bahwa orang berilmu itu hakekatnya sungguh berbeda dan menunjukkan perilaku yang berbeda juga. Bahkan perbedaannya itu dipertegas, bahwa orang yang berilmu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah swt dengan beberapa derajat. (SQ. Al-Mujadalah:11).

Namun mengapa masih banyak dijumpai orang berpendidikan yang derajatnya rendah, bahkan sering kali nampak masih menganggur? Secara kasuistik bisa dipahami, namun jika itu secara sistemik maka itu tidak seharusnya terjadi. Dalam prakteknya tidak sedikit dijumpai orang yang hanya ingin meraih ijazah, namun tidak disertai dengan belajar yang sungguh-sungguh untuk menguasai ilmu atau kompetensi tertentu. Jika orang itu belajar sungguh-sungguh dan menguasai kecakapan tertentu, insya Allah dapat dijamin bahwa baik untuk mencari pekerjaan maupun menciptakan pekerjaan sendiri, peluang mereka lebih mudah. Demikian juga untuk promosi apapun, dengan ilmu insya Allah mereka akan dapat raih relatif lebih mudah.

Bagaimana dengan keutamaan ilmu, Nabi saw bersabda *"Afdhaalun naasil mu'minul 'aalimul ladzii inihtiija ilaihi nafa'a wa inistughniya 'an-hu aghnaa nafsah"*. Artinya, bahwa manusia yang terbaik ialah mu'min yang berilmu, jika diperlukan dia berguna, dan jika tidak diperlukan, maka dia dapat mengurus dirinya sendiri". Betapa mulianya orang berilmu, karena kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat sering kali menyenangkan dan tidak merepotkan, apalagi membebani. Jika masih ada orang berilmu yang membebani di sekitar kita, maka dapat dipertanyakan akan keilmuannya itu. Bahkan boleh jadi, ekstrimnya mereka tidak dianggap sebagai orang yang berilmu kendatipun memiliki gelar tertinggi.

Yang juga menarik untuk diperhatikan bahwa kelebihan orang berilmu, sekalipun dia sedang tidur pun mereka memiliki kelebihan daripada orang tak berilmu. Rasulullah saw bersabda *"NAUMU AL-'AALIM KHAIRUN MIN 'IBAADATI AL-JAAHIL"* (diambil dari *Minhajul Mutakllimiin*). Artinya bahwa tidurnya orang berilmu itu lebih utama dan lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Dari hadits ini dapat ditafsirkan bahwa orang yang berilmu tidur tentu

diniati dengan ibadah, dan dimaksudkan untuk dapat melaksanakan ibadah yang lebih banyak lagi ketika mereka sudah bangun. Sedangkan orang yang bodoh beribadah tidak memiliki makna apa-apa, karena ibadahnya tidak didasari oleh pengetahuan tentang jenis ibadah itu, sehingga ibadahnya bisa sia-sia.

Bahkan lebih tegas lagi, Nabi Muhammad saw bersabda: MAUTUL 'AALIM MAUTUL 'AALAM, Artinya bahwa "Meninggalnya seorang alim, berarti pertanda binasanya alam semesta". Hadits ini mengisyaratkan bahwa dunia ini akan menjadi binasa bila semua orang berilmu itu mati, karena orang yang tak berilmu akan terlibat pertikaian untuk memperebutkan kekuasaan sehingga kerusakan alam menjadi akibatnya.

Mudah-mudahan orang berilmu semakin meningkat dan mau mengamalkan ilmunya, sehingga dapat meraih kehidupan yang tercerahkan, dan terhindar dari kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang merugikan. Untuk menyelamatkan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat, tidak semua orang berilmu harus mencapai keahlian, melainkan sesuai dengan potensinya, yang penting bagi mereka menghilangkan kebodohan dan mengamalkannya secara optimal.

Ingat sabda Rasulullah saw, "*Man araada ad-dun-ya fa'alaisa bi al-'ilmi, wa man araada al-aakhirat fa 'alaisa bi al'ilmi, wa man araadahumaa fa 'alaisa bi al'ilmi* (H.R. Bukhori dan Muslim). Artinya: "Barang siapa menghendaki dunia maka dicapai dengan ilmu, barangsiapa yang menghendaki akhirat, maka dicapai dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dicapai dengan ilmu pula".

Menyadari akan kemuliaan ilmu, maka kita sebagai makhluk yang dinamis, perlu terus menuntut ilmu sampai ke liang lahat, sehingga hidup kita dapat menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks di era terbuka dewasa ini. Terlebih-lebih di era informasi yang memungkinkan berbagai informasi dapat menembus ke semua sudut-sudut dunia.

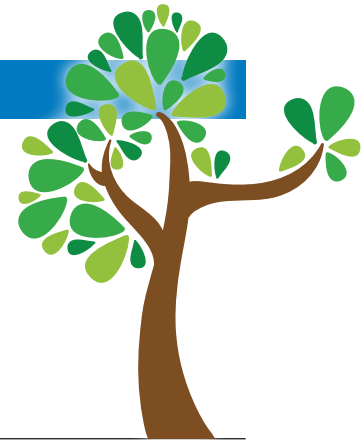

Pembelajaran yang Efektif, Efisien, dan Menarik Sesuai dengan Perkembangan Teknologi Modern

PENGANTAR

Pada kenyataan dewasa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang mengalami perubahan yang begitu cepat, bahkan semakin kompleks. Menurut *President of Harvard University*, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi duplikasi setiap 100 tahun dari tahun 1700 sampai dengan tahun 1900, setiap 20 tahunan pada tahun 1940, setiap 7 tahunan pada tahun 1970an, setiap 2 tahun pada tahun 2004 dan diperkirakan terjadi duplikasi setiap 35 hari pada tahun 2015. Artinya, kemajuan teknologi informasi memainkan peran penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menyadari hal itu, maka pendidikan seharusnya bersikap pro aktif terhadap kemajuan iptek yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, maka proses pendidikan perlu sekali mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama perkembangan pesat teknologi informasi dan komputer (TIK). Tak terkecuali, menurut hemat penulis, pengelolaan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan angkatan bersenjata akan mencapai efektivitas dan efisiensi tinggi, manakala dalam aktivitas manajerial dan instruksionalnya dapat memanfaatkan TIK secara optimal.

Walau dalam suatu institusi pendidikan sudah memiliki sarana dan prasarana TIK yang memadai, proses pendidikan dan pembelajaran belum tentu dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Ada salah satu komponen penting dalam proses pendidikan, yaitu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan Orang Dewasa

1. Makna Pembelajaran Orang Dewasa

Berdasar berbagai rujukan, pada awalnya dapat dibedakan antara pendidikan untuk anak dan pendidikan untuk orang dewasa. John Mihall dan Helen Belleti (1999) menyatakan bahwa:

> *"The term "pedagogy" was derived from the Greek words "paid" (meaning "child") and "agogus" (meaning "leading"). Thus, it is defined as the art and science of teaching children. The term "Andragogy" was coined by researchers of adult learning in order to contrast their beliefs about learning to the pedagogical model. Malcolm Knowles first introduced the concept in the US in 1968. The concept of andragogy implies self-directedness and an active student role, as well as solution-centered activities. It was derived from the Greek word "aner" (with the stem andr-) meaning "man, not boy."*

Berdasarkan pengertian tersebut, maka jelaslah bahwa kata pendidikan bersifat generik, tidak bersifat spesifik. Artinya, pendidikan dapat dimengerti sebagai pendidikan untuk anak atau pendidikan untuk orang dewasa. Jika sasaran pendidikan militer itu cenderung kelompok orang dewasa, maka sistem pendidikannya lebih tepat disebut andragogi. Untuk mendalami lebih jauh lagi tentang perbedaan antara pedagogi dan andragogi, maka berikut ini akan disampaikan perbedaan antara peserta didik anak-anak dan orang dewasa.

Differences Between Children And Adults As Learners*

Children	Adults
Rely on others to decide what is important to be learned	Decide for themselves what is important to be learned.
Accept the important being presented at face value.	Need to validate the information based on their beliefs and experience.
Expect what they are learning to be useful in their long-term future.	Expect what they are learning to be immediately useful.
Have little or no experience upon which to draw – are relatively "clean to draw slates."	Have much experience upon which – may have fixed viewpoints
Little ability to serve as a knowledgeable resource to teacher or fellow classmates.	Significant ability to serve a knowledgeable resource to trainer and fellow learners

* John Mihall dan Helen Belleti (1999)

Di samping penjelasan detail tentang perbedaan antara pendidikan anak (pedagogi) dan pendidikan orang dewasa (andragogi), ada konsep lain yang menunjuk persoalan yang sama dan memiliki makna yang relatif berbeda. Knowles

et. al (http://www.ejhs.org/volume8/Glickman2.htm) menegaskan, ada perbedaan cukup berarti antara *adult education* dan *andragogy*.

Pertama, "andro" berdasarkan bahasa Greeks berarti orang laki-laki, bukan untuk semua orang, sedangkan yang lebih disukai banyak orang adalah penggunaan istilah yang netral gender.

Kedua, "agogous" berarti "pemimpin dari" yang menurut bahasa Greeks sebagai pemimpin dari anak-anak laki-laki, sedang yang lebih disukai kebanyakan orang adalah pendidik *(educator)* sebagai fasilitator. Dua pengertian yang berbeda itu kiranya memperkuat bahwa *adult education* lebih tepat digunakan daripada *andragogy*. Berdasarkan pengertian ini, maka peserta didik lebih dipandang sebagai subyek daripada objek.

Dalam konteks pendidikan militer, nampaknya dibutuhkan suatu modifikasi tertentu. Di satu sisi, pendidikan perlu dipahami sebagai *adult education,* ketika dibutuhkan proses pendampingan dan fasilitasi terhadap peserta didik. Namun dalam waktu yang sama pendidikan bagi militer perlu sekali dimaknai sebagai *pedagogi,* ketika dibutuhkan proses penanaman nilai-nilai yang harus dimiliki oleh peserta didik, misalnya: penanaman Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma.

2. Prinsip-prinsio pembelajaran orang dewasa

Menurut John Mihall dan Helen Belleti (1999), prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, di antaranya:

1. *Focus on "real world" problems.*
2. *Emphasize how the learning can be applied.*
3. *Relate the learning to the learners' goals.*
4. *Relate the materials to the learners' past experiences.*
5. *Allow debate and challenge of ideas.*
6. *Listen to and respect the opinions of learners.*
7. *Encourage learners to be resources to you and to each other.*
8. *Treat learners like adults.*
9. *Give learners "control".*

Jika memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, maka pembelajaran orang dewasa memang mendorong peserta didik untuk terlibat pada persoalan dunia riil dan mengaitkan belajar dengan kebutuhan atau tujuannya, serta mengaitkan materi belajar dengan masa lalunya, sehingga peserta didik benar-benar merasakan asyik dalam belajar. Dalam situasi yang begini, peserta didik sungguh menjadi sumber utama proses pembelajaran.

Selain itu, pembelajaan orang dewasa memungkinkan untuk terjadinya debat dan menantang ide-ide. Dalam situasi yang demikian dimungkinkan terjadinya saling mendengar dan respek terhadap ide masing-masing. Bahkan dalam waktu sama pembelajaran orang dewasa dapat mendorong peserta didik untuk saling menjadi sumber di antara satu dan lainnya. Peserta didik sungguh dianggap sebagai orang dewasa, bukan lagi sebagai anak-anak, karenanya dia diamanati untuk mengontrol perilakunya sendiri.

Alhasil, pembelajaran orang dewasa menempatkan peserta didik sebagai pusat atau titik tolak dari munculnya proses pembelajaran. Dalam situasi yang demikian dapat diyakini bahwa aktivitas belajar dapat memungkinkan peserta didik mampu menunjukkan aktivitasnya secara total.

Mengajar yang Efektif, Efisien dan Menarik

1. Mengajar yang Efektif

Edwin S. Ellis, Lou Anne Worthington, and Martha J. Larkin menegaskan bahwa *Effective teaching and effective student learning have been a central focus of current educational reform movements.* Artinya bahwa mengajar dan belajar efektif merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam proses pembelajaran. Pembelajaran harus bermakna, sehingga berdampak positif, terutama bagi peserta didik sendiri.

Jika dikaji lebih mendalam maka mengajar efektif bertumpu pada *belief system* yang mencakup beberapa pandangan di antaranya:

1. *Pupils learn best in a positive and nurturing environment established by teachers who believe that every pupil is capable of learning.*
2. *All pupils have areas of strengths and interests that can be useful in advancing pupil learning. Effective teachers establish an instructional environment that will draw on these strengths.*
3. *Differentiated instruction addresses pupils' diverse abilities, cultures, languages, and cognitive skills.*
4. *Teachers take into account the whole pupil; in other words, they attend to the cognitive, affective, social, and physical dimensions when developing an instructional program.*
5. *Active engagement and interaction facilitate pupil learning.*
6. *New learning is built upon previously learned information. Learning is enhanced when prior knowledge and cultural and social experiences are valued, acknowledged, and leveraged throughout the curriculum.*
7. *Pupil learning is both individually and socially constructed; it is influenced by cultural, familial, and social context.*

8. *Meaningful assessment is both formative and summative; it relies on multiple measures, including informal observations.*

Berdasarkan keyakinan tersebut maka ada sejumlah prinsip mengajar efektif yang perlu dipertimbangkan, di antaranya:

- **Principle 1:** *Students learn more when they are engaged actively during an instructional task.*
- **Principle 2:** *High and moderate success rates are correlated positively with student learning outcomes, and low success rates are correlated negatively with student learning outcomes.*
- **Principle 3:** *Increased opportunity to learn content is correlated positively with increased student achievement. Therefore, the more content covered, the greater the potent/al for student learning.*
- **Principle 4:** *Students achieve more in classes in which they spend much of their time being directly taught or supervised by their teacher.*
- **Principle 5:** *Students can become independent, self-regulated learners through instruction that is deliberately and carefully scaffolded.*
- **Principle 6:** *The critical forms of knowledge associated with strategic learning are (a) declarative knowledge, (b) procedural knowledge, and (c) conditional knowledge. Each of these must be addressed if students are to become independent, self-regulated learners.*
- **Principle 7:** *Learning is increased when teaching is presented in a manner that assists students in organizing, storing, and retrieving knowledge.*
- **Principle 8:** *Students can become more independent, self-regulated learners through strategic instruction.*
- **Principle 9:** *Students can become independent, self-regulated learners through instruction that is explicit.*
- **Principle 10:** *By teaching sameness both within and across subjects, teachers promote the ability of students to access potentially relevant knowledge in novel problem-solving situations.*

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut, maka D Meetoo menegaskan bahwa ada sejumlah metode yang mampu menunjukkan efektivitas yang tinggi, di antaranya:

1. *Cooperative learning or group work*
2. *Discovery or guided discovery learning/ Active learning*
3. *Expository learning*
4. *Brainstorming*

5. *Demonstration method*
6. *Mind mapping*
7. *Role play*
8. *Differentiation*

Kita sadar bahwa tidak ada metode yang terbaik, karena efektivitas metode sangat terkait dengan konteksnya, siapa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, materi yang dipelajari, di mana tempat belajar, waktu dilaksanakan proses pembelajaran, dan tujuan belajar yang harus dicapai.

2. Mengajar Efisien

Berdasarkan Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki) *bahwa Efficient learning method is a type of teaching developed to transfer knowledge, understanding and information to students as efficiently as possible, using information technology tools. It typically employs alternatives to traditional teaching methods such as textbooks and classrooms, by using interactive and distance education techniques together with audio-visual media.* Hal ini menegaskan bahwa pemanfaatan ICT dalam kegiatan instruksional memiliki efisiensi yang sangat tinggi, tidak hanya terkait dengan hambatan waktu, tempat, maupun biaya.

Wadi D. Haddad berdasarkan riset dan pengalamannya telah menunjukkan bahwa ada sejumlah kontribusi terhadap pengembangan pendidikan dan pembelajaran, di antaranya:

> *"expanding access, increasing efficiency, enhancing quality of learning and teaching, and improving policy planning and management. ICTs also offer possibilities in facilitating skill formation, sustaining lifelong learning, and advancing community linkages. Planning for effective use of ICTs for education necessitates an understanding of the potential of technologies to meet different educational objectives and, consequently, to decide which of these objectives is pursued. This decision affects the choice of technologies and modalities of use."*

Berdasarkan pendapat Hadad tersebut kian kuat bahwa pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan ICT dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran tidak dibatasi oleh empat dinding, pembelajaran dapat terjadi kapan saja, dan pembelajaran dilakukan di mana saja.

Selanjutnya UT Austin faculty and faculty-student/staff teams (www.utexas.edu/academic/diia/iitap/guideline.php) menegaskan bahwa *Entries should demonstrate how the instructor's approach promotes students' knowledge and skills and makes teaching and learning more effective, relevant, and efficient. Ideally, entries should:*

- *create engaging learning experiences that help achieve teaching and learning goals*
- *synthesize knowledge and content into a creative, innovative system*
- *support faculty and students in effective and efficient teaching and learning*
- *model, demonstrate, integrate, and contextualize concepts and concept relationships*
- *support the direct application of knowledge and skills*
- *support the assessment and evaluation of knowledge and skills*
- *align with discipline knowledge*
- *include multiple levels or organization schemas more likely to be integrated into multiple contexts for multiple audiences*
- *be scalable and extensible to many learners*

Berdasar kutipan di atas menunjukkan bahwa betapa ICT dapat berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan dan pembelajaran, baik itu terkait dengan aspek akademik maupun non akademik.

3. Pembelajaran yang Menyenangkan

Belajar seharusnya menyenangkan, karena itu pendidik atau instruktur bertanggungjawab memberikan lingkungan yang kondusif untuk belajar dengan cara yang menyenangkan pula (http://darkwing.uoregon.edu). Belajar yang menyenangkan merupakan kebutuhan setiap peserta didik, karena dengan suasana yang senang dalam belajar setiap peserta didik dapat berkespresi secara optimal.

Saya meyakini ada dua sumber utama kesenangan. *Pertama*, ketika lingkungan hidup dan aktif, peserta didik akan mencari dan menikmati waktu belajar. *Kedua*, ketika muncul rasa kepuasan terhadap hasil tugasnya, yaitu adanya perasaan belajar sesuatu dan memperoleh kemajuan. Kepuasan intelektual ini sangatlah penting dalam rangkaian proses belajar.

Menciptakan lingkungan belajar yang positif dan suasana yang hidup adalah penting. Pendidik atau instruktur *always* senyum, bicara dengan suara jelas, dan menggunakan gerakan-gerakan yang menarik perhatian peserta didik. Demikian juga seorang pendidik/instruktur perlu juga membawa bahan, gambar, foto, atau video sepanjang itu sesuai untuk memberikan informasi yang lebih kontekstual dengan materi pembelajaran.

Ketika diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aktif dan dinamik, pendidik/instruktur perlu mengakomodasi berbagai gaya belajar yang sesuai. Menunjukkan sikap yang fleksibel adalah sangat penting bagi seorang pendidik/instruktur yang tidak hanya untuk mengkomodasikan berbagai gaya belajar

dan kepribadian yang berbeda, melainkan juga untuk mengajar materi pembelajaran tertentu. Pendidik/instruktur perlu tahu apa yang dirasakan lebih sulit atau lebih mudah bagi peserta didik secara umum pada kelompok pertama, tetapi perlu diingat bahwa setiap kelas adalah berbeda.

Hal lain yang seharusnya ada dari sebuah lingkungan belajar positif adalah pendidik/instruktur seharusnya supportif. Banyak hal yang dapat diambil pelajaran ketika terjadi kesalahan dalam suatu kelas. Pendidik/instruktur dapat melemparkan suatu pertanyaan dengan menciptakan suatu suasana yang nyaman, tidak menakutkan, terutama terhadap yang membuat kesalahan dalam membuat pertanyaan.

Demikian juga peserta didik perlu diberi umpan balik sebanyak mungkin ketika mengembalikan tugas. Apalagi peserta didik telah bekerja keras untuk menyelesaikan tugas itu. Jika ditemukan kesalahan dan tidak dilakukan koreksi, maka kita (peserta didik dan pendidik/instruktur) sungguh kehilangan suatu kesempatan yang baik. Bentuk dukungan lain terhadap peserta didik adalah memberikan sumber atau rujukan untuk dikaji lebih jauh lagi oleh mahasiswa dengan beberapa usaha, di antaranya memperkenalkan website, buku, dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan, baik ketika dalam kampus, maupun di luar kampus.

Untuk meningkatkan rasa memiliki prestasi bagi mahasiswa yang merupakan sumber kesenangan kedua dalam belajar, maka menetapkan tujuan yang jelas adalah penting. *Pertama*, berdasarkan tujuan kurikulum dan analisis kebutuhan, sebagai pendidik perlu menetapkan tujuan akhir program atau kelas sebagai suatu keutuhan dan meyakinkan bahwa peserta didik seharusnya menyadari akan hal itu dan memahaminya. Dengan mengetahui tujuan itu peserta didik dapat belajar secara independen di luar kelas. Dari perspektif pendidik/instruktur, bahwa semua aktivitas seharusnya memiliki suatu tujuan untuk mencapai tujuan akhir.

Kedua, untuk memiliki tujuan yang jelas dalam setiap kelompok program, pendidik seharusnya menampilkan diri yang terbaik dalam mengajar sesuai dengan konteksnya. Demikian juga pendidik/ instruktur seharusnya menunjukkan perilaku yang semi autentik yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan konteksnya.

Akhirnya perlu disadari bahwa mengajar adalah suatu pengalaman belajar. Pendidik belajar sesuatu dari kegiatan mengajar setiap harinya dan memodifikasi pendekatan mengajarnya di hadapan peserta didiknya selama kedudukannya sebagai pusat kegiatan dalam kelas. Tetapi ingat bahwa sebagian besar waktu bagi peserta didik dewasa, bahkan dalam batas tertentu peserta didik usia anak-anak, mereka lah yang menjadi pusat aktivitas belajar dalam kelas.

Penutup

Pendidikan yang ditegakkan, lebih khususnya proses pembelajaran di institusi manapun yang diciptakan, seharusnya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang tidak hanya terkait dengan pencapaian hasil yang terbaik, namun implementasi pembelajaran dapat dilakukan dengan model pembelajaran yang efektif dan efisien, serta dalam suasana yang menyenangkan. Untuk memberikan nilai tambah terhadap model pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan, kiranya perlu dimuati dengan nilai-nilai moralitas dan religiusitas sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, sehingga tidak hanya memiliki manfaat *duniawiyah*, melainkan manfaat *ukhrawiyah*.

Apapun proses pembelajaran yang dapat dilakukan, baik itu melalui model pembelajaran yang efektif, efisien, maupun "*fun*" tidaklah bisa dilepaskan dengan kehadiran ICT, sehingga pendidik/instruktur dan peserta didik, seharusnya melek ICT dan dapat menggunakannya secara tepat dan terkendali.

Untuk meningkatkan efektivitas dan produkivitas pembelajaran, sistem pembelajaran di lingkungan Akademik Angkatan Udara seyogyanya lebih menekankan prinsip-prinsip *adult education* dan *paedagogy* secara simultan dan proporsional, sehingga tujuan pendidikan AAU dapat dicapai secara optimal.

Demikianlah beberapa pokok pikiran yang dapat dijadikan bahan diskusi dalam sesi ini. Semoga dapat meng-*encourage* para peserta untuk dapat berpartisipasi aktif. Semoga ada manfaatnya.

Tulisan ini disajikan dan dibahas dalam seminar pendidikan tentang *Pemanfaatan Teknologi Modern Guna Meningkatkan Kemampuan Pendidik Akademi Angkatan Udara* yang diselenggarakan oleh Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta pada 24 Juni 2009 di Kampus AAU Yogyakarta.

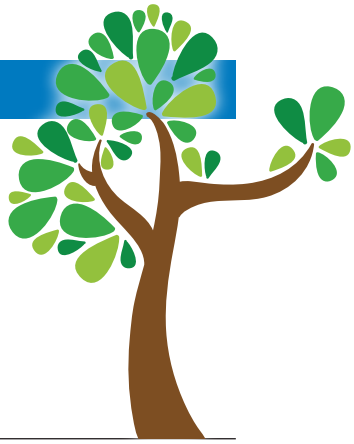

Lesson Study, untuk Tingkatkan Mutu Sekolah Inklusif

SEKOLAH inklusif dewasa ini semakin diperlukan, terutama ketika kebijakan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun harus dituntaskan. Hal ini tidak hanya karena setiap warga negara harus dipenuhi haknya untuk memperoleh kesempatan pendidikan, namun yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kondisi nyata bahwa penyelenggaraan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus masih relatif terbatas dan lebih terkonsentrasi lokasinya di kota-kota provinsi dan kabupaten/kota.

Di Indonesia, jumlah sekolah inklusif sebagai alternatif masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan. Hal ini diperkuat dengan belum tuntasnya program wajib belajar enam tahun, bahkan juga program wajib belajar sembilan tahun. Diduga kuat, sebagian besar jumlah warga negara yang berkebutuhan khususlah yang masih belum dapat memperoleh akses pendidikan. Untuk itu dalam rangka mencapai salah satu *Millenium Development Goals*, perlu diupayakan lebih serius untuk membangun sekolah inklusif, sehingga dapat mengakselerasi penuntasan pendidikan bagi semua anak hingga usia 15 tahun.

Sungguh disadari bahwa pada hakekatnya kita tidak hanya terbatas pada keinginan untuk mendirikan sekolah inklusif saja, melainkan yang perlu diupayakan secara terus menerus adalah peningkatan mutu sekolah inklusif, sehingga kehadirannnya benar-benar sama dengan sekolah reguler, jika mungkin dapat memberikan nilai dan manfaat lebih banyak, terutama bagi optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak berkebutuhan khusus. Yang tidak hanya diorientasikan untuk peningkatan kualitas bidang akademiknya saja, melainkan juga aspek non-akademiknya.

Ada sejumlah strategi yang dapat dipilih dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus baik yang berlangsung di sekolah, termasuk sekolah inklusif, di antaranya penerapan pembelajaran yang ber-

pusat pada siswa *(student centered approachs),* pembelajaran berdiferensiasi *(individualized education programs),* pendekatan analisa tugas *(task analyses approaches),* pendekatan *lesson study,* dan sebagainya. Secara historis *Lesson study* berasal dari Jepang yang merupakan suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegialitas, *mutual learning* untuk membangun komunitas belajar.

Setidak-tidaknya ada sejumlah alasan yang melandasi pentingnya *lesson study* bagi peningkatan mutu sekolah inklusif.

Pertama, lesson study selalu menghendaki proses pembelajarannya bermula dari suatu masalah yang nyata. Kondisi ini sangat dibutuhkan oleh suatu pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusif yang selalu menghendaki kehadiran pembelajaran fungsional dan kontekstual, sehingga bermanfaat bagi semua, terutama bagi peserta didik.

Kedua, lesson study sangat menghendaki terciptanya pembelajaran secara kolaboratif, terutama guru yang sebidang, sehingga tercipta iklim yang memungkinkan untuk terjadinya suatu pembelajaran kolaboratif antar guru. Kondisi ini sangat sejalan dengan tuntutan sekolah inklusif yang menghendaki keterlibatan guru pendidikan khusus sebagai *partner* guru kelas atau bidang studi, di samping dalam batas tertentu kehadiran kolega guru kelas atau bidang studi untuk bisa *sharing* dalam memecahkan masalah dan memperlancar proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus.

Ketiga, *lesson study* mendorong terciptanya suatu iklim *mutual learning,* baik antar peserta didik, antara peserta didik dan guru, dan antara guru dan guru sebidang. Dalam kondisi sekolah inklusif, disadari sepenuhnya bahwa individu yang ada di dalam suatu kelas dan sekolah menunjukkan keragaman yang sangat berarti. Namun di balik keragaman, diharapkan sekali dapat ditangkap *common values* yang merupakan titik pijakan bagi terciptanya suatu bangun sekolah inklusif. Dengan demikian *mutual learning* yang menjadi salah satu inti dari *lesson study* dapat memberikan pencerahan sekolah inklusif, karena dapat menfasilitasi terciptanya suasana belajar antar anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya, karena di antara dua kelompok anak-anak tersebut sangat boleh jadi bisa *mutually give and take*.

Keempat, *lesson study* memotivasi untuk membangun suatu komunitas belajar. Artinya bahwa *lesson study* pada prakteknya mampu mendorong semua warga sekolah inklusif untuk terus belajar, sehingga dapat membekali kemampuan untuk *life long learners.* Terlebih-lebih bagi anak berkebutuhan khusus sangat memerlukan aktivitas belajar yang diharapkan sangat berarti baik untuk kehidupan sendiri, maupun hidup di tengah-tengah masyarakat.

Walaupun tidak diragukan bahwa *lesson study* mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sekolah inklusif, namun signifikansi *lesson study* sangat tergantung pula pada pengelola, sekaligus pengendali utamanya. Artinya, seberapa kepala sekolah, para guru, guru pembimbing khusus, dan para peserta didik menunjukkan komitmennya untuk terlibat secara intensif dan produktif dalam mendorong terciptanya kemampuan memecahkan masalah *(problem solving),* belajar mandiri *(independent learning),* dan belajar sepanjang hayat *(life long learning).*

Akhirnya, untuk menjadikan *lesson study* dapat berkontrubusi secara signifikan bagi peningkatan kualitas sekolah inklusif, dirasakan perlu sekali dukungan secara sinergis dari segenap birokrat pendidikan, para ahli pendidikan terkait, praktisi pendidikan, tokoh masyarakat, dan orangtua, sehingga tercipta masyarakat belajar yang tidak hanya dibatasi pada lingkungan sekolah, namun juga di lingkungan masyarakat secara luas. Dalam suasana yang demikian diharapkan sekali dapat mendorong munculnya problem-problem yang kontekstual, sehingga semua peserta didik di sekolah inklusif dapat memiliki kapasitas dan kecakapan untuk menghadapi persoalan-persoalan riil di tengah-tengah masyarakat.

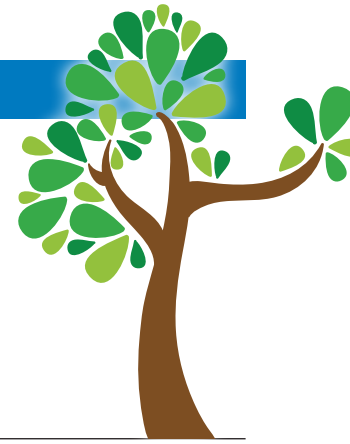

Darurat Kekerasan di Sekolah: Sekolah sebagai Tempat Pesemaian Nilai-nilai Sosial Kemanusiaan

1. Fenomena adanya kekerasan fisik ndan seksual (*physical and sexual harassement*) di sekolah dewasa ini baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengalami kenaikan yang signifikan.
2. Untuk mengatasi persoalan ini sangat dibutuhkan penanaman nilai, baik nilai keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Pendidikan nilai dapat dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat.
3. Pendidikan nilai sangat dikehendaki untuk menjaga fitrah manusia yang ada pada anak-anak, sehingga pada akhirnya mereka menjadi insan seutuhnya *(insan kamil*). Untuk itu selama proses pertumbuhan dan perkembangannya, tidak boleh terkontaminasi oleh tindakan-tindakan yang tak mendidik dan tak manusia. Lebih jauhnya proses pertumbuhan dan perkembangan anak harus bebas dari kekearasan fisik dan sekual.
4. Terutama dalam proses pendidikan, anak-anak wajib memiliki pendidik, baik orangtua, guru, atau orang dewasa lainnya yang memiliki kompetensi mendidik secara baik. Khususnya di sekolah kehadiran pendidikan dan tenaga pendidik harus mampu menunjukkan perilaku mendidik, membimbing, mengasuh, mengajar, dan melatih dengan tindakan yang edukatif dan memberdayakan, bukan mengeksploitasi maupun menindas.
5. Pendidikan nilai terhadap anak-anak, dapat dilakukan secara terpisah dan terintegrasi. Secara terpisah, pendidikan nilai dapat diwujudkan dengan pendidikan agama, pendidikan moral Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidik budi pekerti dan sebagainya. Secara terintegrasi, pendidikan nilai dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran mata pelajaran lain, apakah mata pelajaran bahasa, olahraga, seni, matematika, sains, atau IPS.
6. Untuk pendidikan nilai yang efektif, dapat dilakukan pendekatan penanaman nilai, pendekatan perkembangan moral, pendekatan analisis nilai,

pendekatan klarifikasi nilai, dan pendekatan pembelajaran berbuat. Pemilihan pendekatan pendidikan nilai sangat dengan materinya.

7. Untuk menciptakan pendidikan nilai yang efektif sangat diperlukan sifat-sifat pendidik, di antaranya: keteladanan, perilaku edukatif, perilaku protektif dan *care*, perilaku respek, tindakan persuasif, pembelajaran kooperatif, perilaku santun, menciptakan suasana damai, dan perilaku bersih.
8. Untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berkebangsaan, dan berperikemanusiaan, sekolah perlu ditata lingkungan fisiknya, dilengkapi struktur kepengurusan yang disertai dengan tugas pokok dan fungsinya, kepemimpinan sekolah yang kuat, hadirnya pendidik yang profesional, adanya kemitraan antara pengurus sekolah, guru, orangtua, dan masyarakat.

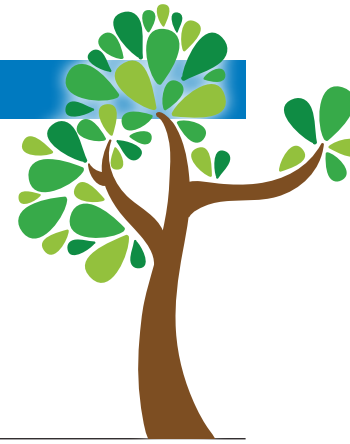

Strategi Meningkatkan Prestasi Belajar

Pengantar

Setiap peserta didik pada hakekatnya memiliki potensi dan menginginkan berprestasi secara optimal. Namun tidak semua peserta didik dapat meraih prestasi yang membanggakan, karena banyak faktor yang menyebabkannya. Salah satunya adalah belum diterapkannya strategi belajar yang efektif. Pada bagian selanjutnya akan dibahas tuntas strategi meningkatkan prestasi belajar.

Membuat Rencana Peningkatan Prestasi

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan berkenaan dengan pembuatan rencana peningkatan prestasi, di antaranya:

a. Mengembangkan sikap positif terhadap sekolah.
b. Menentukan tujuan yang masuk akal untuk peserta didik.
c. Mengupayakan kondisi yang mantap di rumah dan di sekolah
d. Melengkapi segala piranti untuk belajar
e. Menetapkan jadwal kegiatan yang realistis
f. Mengatasi masalah-masalah sekolah
g. Meyakini bahwa teman-teman sekelas sejalan dengan dirinya.

Mendapatkan yang Terbaik di Kelas

a. Selalu tampil secara berarti di kelas, sehingga tidak dianggap absen.
b. Menyesuaikan dengan tuntutan kelas yang berbeda (mengikuti ceramah guru, diskusi kelas, bekerja di laboratorium, dan sebagainya).
c. Mengusahakan terus untuk berpartisipasi secara akademik di kelas.
d. Mengajukan pertanyaan yang inteligen.
e. Mengatasi rasa malu (yang tidak wajar) di kelas.

f. Mengatasi distraktor di kelas.
g. Mengembangkan kebiasaan mendengar di dalam kelas
h. Membuat catatan pelajaran secara terorganisir.

Belajar dan Mengerjakan Tugas

a. Menyelesaikan tugas dengan benar.
b. Menghentikan kebiasaan menunda pekerjaan.
c. Menentukan waktu yang terbaik untuk menyelesaikan tugas.
d. Membaca buku secara sistematis
e. Mengembangkan teknik-teknik belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya.
f. Mengembangkan mata pelajaraan IPA, IPS, Matematika, bahasa, dan sebagainya.

Mempersiapkan Diri untuk Menghadapi Kuis atau Tes

a. Rencana langkah demi langkah untuk Persiapan Tes.
b. Teknik penyiapan tes khusus.
c. Mengikuti tes dan ujian.
d. Menyiapkan diri untuk hadapi dengan tes yang berbeda.
e. Menyiapkan dan mengikuti ujian akhir.

Menulis dan Menyelesaikan Tugas

a. Mengawali penyelesaian tugas
b. Mengindetifikasi *audience* (siapa yang akan menjadi target tulisan atau tugas)
c. Menulis suatu kalimat yang mengarahkan.
d. Membuat suatu paragrap yang baik.
e. Menulis rangkuman
f. Menulis kritik atau komentar.
g. Menulis laporan buku.

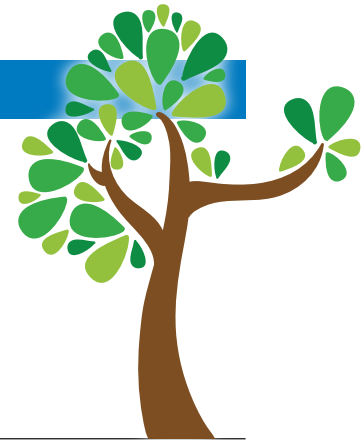

Strategi Pengembangan SMAN 4 Yogyakarta Menuju Sekolah Kategori Mandiri

Latar Belakang

- Dalam era otonomi, pengelolaan pendidikan seharusnya menggunakan pendekatan manajemen berbasis sekolah.
- Dalam waktu yang sama, penyelenggaraan pendidikan juga seharusnya bersandar pada standar nasional pendidikan.
- Dalam penyelenggaraan pendidikan terutama dikaitkan dengan standar nasional pendidikan, dapat dikelompokkan menjadi sekolah katagori standar dan sekolah katagori mandiri.
- Sekolah kategori mandiri pada hakekatnya memiliki tuntutan standar yang lebih tinggi.
- Pada kenyataannya kinerja SMAN 4 dapat di-klaim sebagai sekolah kelas menengah.
- Untuk mewujudkan SMAN 4 menjadi sekolah kategori mandiri (SKM) sangat dibutuhkan suatu strategi yang efektif.

Kondisi Aktual SMAN 4

- Input siswa, derajat akademik, ekonomi sosial orangtua termasuk kategori menengah ke bawah.
- Infrastruktur IT tersedia tetapi belum memadai.
- Kredibilitas guru dalam mengajar cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan.
- Formulasi visi dan misi belum mantap
- Komitmen terhadap mutu di antara seluruh unsur sekolah masih belum optimal.
- Kondisi dana pendidikan masih terbatas.

Kriteri SKM

Sekolah Kategori Mandiri (SKM): sekolah yang mampu mengoptimasikan pencapaian tujuan pendidikan, potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sekolah Kategori Mandiri memiliki persyaratan minimal sebagai berikut:

a. Dukungan Internal
   1). Kinerja Sekolah
      a). Terakreditasi A (bagi yang sudah diakreditasi)
      b). Rerata nilai UN tiga tahun terakhir minimum 7,00
      c). Persentase kelulusan UN ≥ 90 % untuk tiga tahun terakhir
      d). Animo tiga tahun terakhir lebih dari daya tampung
      e). Prestasi akademik dan non akademik yang dicapai
      f). Melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS)
      g). Jumlah siswa per kelas maksimal 32 orang
      h). Ada pertemuan rutin pimpinan dengan guru
      i). Ada pertemuan rutin sekolah dengan orangtua
   2). Kurikulum
      a). Memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mencerminkan kurikulum Sekolah Kategori Mandiri
      b). Beban belajar dinyatakan dengan Satuan Kredit Semester.
      c). Mata pelajaran yang harus diikuti oleh peserta didik dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu wajib (mata pelajaran pokok) dan pilihan (paket dan bebas).
   3). Ketersediaan Panduan pelaksanaan
      a). Memiliki pedoman pembelajaran
      b). Memiliki pedoman pemilihan mata pelajaran sesuai dengan potensi dan minat
      c). Memiliki panduan menjajagi potensi peserta didik
      d). Memiliki pedoman penilaian
   4). Kesiapan sekolah
      a). Sekolah menyatakan ingin melaksanakan Sistem Kredit Semester
      b). Persentase guru yang menyatakan ingin melaksanakan SKS ≥ 90%
      c). Pernyataan staf administrasi akademik bersedia melaksanakan SKS
      d). Kemampuan staf administrasi akademik dalam menggunakan komputer
   5). Kesiapan Sumber Daya Manusia
      a). Persentase guru memenuhi kualifikasi akademik ≥ 75%

b). Relevansi guru setiap mata pelajaran dengan latar belakang pendidikan (90 %)
c). Rasio guru dan siswa 1: 20
d). Jumlah tenaga administrasi akademik sesuai ketentuan
e). Guru bimbingan dan konseling (BK)

6). Ketersediaan Fasilitas
a). Ruang kepala Sekolah
b). Ruang wakil kepala sekolah
c). Ruang guru
d). Ruang bimbingan
e). Ruang Unit Kesehatan
f). Tempat Olah Raga
g). Tempat ibadah
h). Lapangan bermain
i). Komputer untuk administrasi
j). Memiliki laboratorium: (1) Bahasa, (2) Teknologi informasi/komputer, (3) Fisika, (4) Kimia, (5) Biologi, (6) Multimedia, dan (7) IPS.
k). Perpustakaan memiliki koleksi buku tiap mata pelajaran dan dikelola.
l). Layananan bimbingan dan konseling.

b. Dukungan Eksternal
1). Dukungan dari komite sekolah
2). Persentase orangtua yang menyatakan bersedia putranya mengikuti pembelajaran dengan SKS ≥ 60 %
3). Dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota secara tertulis (kebijakan dan fasilitas/pembiayaan)
4). Dukungan tenaga pendamping/nara sumber dalam keseluruhan proses pengambangan dan pelaksanaan SKM

Persoalan-persoalan yang Dihadapi SMAN 4 menuju SKM

Jika memperhatikan kondisi SMAN 4, kiranya ada sejumlah persoalan yang masih perlu dihadapi di antaranya:

a. Persyaratan minimal prestasi akademik yang belum dapat dicapai dengan mudah, bila dikaitkan dengan *intake*-nya.
b. Kondisi SDM-nya yang masih berada pada level cukup memadai, bila dibandingkan dengan persyaratan SKM yang SDM-nya harus mencapai kualifikasi akademik, relevansi latar belakang pendidikan, dan komitmennya untuk maju.

c. Belum adanya visi bersama secara mantap di antara keluarga besar SMAN 4.
d. Pimpinan SMAN 4 yang relatif baru, sehingga diduga belum memahami sepenuhnya segala aspek yang ada terkait keberadaan SMAN, baik yang terkait dengan kondisi SDM, infra struktur, maupun stakeholders penting.
e. Pertemuan rutin secara fungsional dengan orangtua yang belum sepenuhnya dapat dilakukan.

Potensi SMAN 4 untuk menuju Sekolah Kategori Mandiri

Menurut hemat saya ada sejumlah potensi SMAN 4 yang dapat diidentifikasi, di antaranya:

a. Usia sekolah yang cukup panjang dan secara historis memiliki riwayat sukses di masa-masa lalu.
b. Posisi sekolah yang sangat strategis, baik dilihat dari kemudahan akses tempat, ketenangan tempat, dan fasilitas tempat ibadah, dan kelengkapan *open-space* untuk kegiatan di luar kelas.
c. Adanya kemauan keras pimpinan sekolah dan jajarannya untuk maju.
d. Adanya sejumlah guru, staf administrasi, orangtua, dan alumni yang memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan sekolah.
e. Adanya dukungan yang positif dari Dinas Pendidikan dan Komite sekolah.

Upaya Pengembangan Menuju SKM

Untuk dapat mewujudkan SMAN 4 Yogyakarta menuju Sekolah Kategori Mandiri, perlu diwujudkan dengan strategi:

a. Memantapkan komitmen dan meningkatkan kinerja kepala sekolah dan segenap jajaran pimpinan sekolah (wakil KS dan Wali Kelas).
b. Meningkatkan dan memantapkan visi bersama dalam rangka memajukan sekolah.
c. Membangun kolegialitas di antara para guru dan pembina peserta didik dalam berbagai aktivitas kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler.
d. Menetapkan ekspektasi tinggi bagi peserta didik dengan tetap memperhatikan potensi dan kondisinya.
e. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM secara terus menerus sehingga dapat menjamin profesionalisme kinerjanya.
f. Menetapkan dan mengembangkan program pengajaran pengayaan dan remedial secara dinamis dan kontekstual.
g. Menciptakan lingkungan sosial dan fisik yang kondusif bagi terselenggaranya aktivitas pendidikan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah.

h. Mendorong keterlibatan yang lebih fungsional dari komite sekolah dan orangtua untuk mendukung terselenggaranya program menuju SKM.
i. Membangun kultur sekolah yang lebih sehat bagi terselenggaranya proses pendidikan yang bermutu.
j. Membangun jaringan dengan berbagai *stakeholders* dan pihak lain yang terkait dengan upaya SKM.
k. Mengupayakan dana pendidikan yang mencukupi dari berbagai sumber yang halal dan tak mengikat dengan menggunakannya secara efisien, transparan dan akuntabel.
l. Mengadakan, memelihara, dan memanfaatkan fasilitas pendidikan yang memenuhi standar nasional, sehingga dapat mendukung proses pendidikan secara optimal.
m. Mendorong semua guru dan siswa untuk menghasilkan karya-karya inovatif.
n. Melakukan pengendalian mutu secara internal dan eksternal, sehingga dapat memberikan jaminan akuntabilitas bagi publik.
o. Membangun *image* SMAN secara sehat yang dilandasi dengan kesadaran kolektif *(collective awareness)*.

Penutup

Posisi SKM merupakan posisi sekolah yang "bergengsi", karena diindikasikan dengan kinerjanya yang di atas standar nasional. Karena itu tidaklah mungkin penyelenggaraan sekolah itu hanya bertumpu pada kinerja rata-rata. Dengan kata lain, semua pihak harus dapat menunjukkan komitmennya untuk maju bersama, yang diwujudkan dengan tanggung jawab dan kinerja yang optimal, di atas rata-rata.

Untuk dapat mewujudkan SKM secepatnya dengan hasil yang membanggakan, perlu dilakukan *base-line survey* secara objektif dan perlunya dibuat renstra SMAN 4 Yogyakarta secara mantap, sehingga dapat dirumuskan capaian dari tahun ke tahun kemajuan sehingga dapat menuju SKM yang handal.

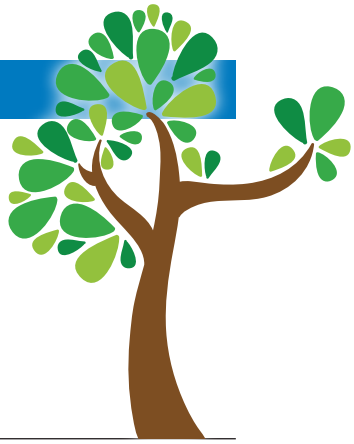

Wawasan tentang Sekolah Nasional Berstandar Internasional

Rasionale

- Era global menuntut kemampuan tinggi dan kompetitif.
- Untuk menghasilkan manusia kompetitif dibutuhkan sistem pendidikan yang berkualitas dan bertaraf internasional.
- UURI No. 20 tahun 2003, pasal 50, ayat (3), menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- Berdasarkan landasan hukum, tuntutan kehidupan global, dan potensi yang dimiliki sekolah unggulan, membangun Sekolah Nasional Bertaraf Internasional (SNBI) merupakan suatu kebutuhan.

Mengenal SNBI

Yang dimaksud SNBI adalah sekolah yang dibangun dengan berlandaskan pada standar internasional, setidak-tidaknya standar isi, proses, kompetensi kelulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan dan penilaiannya. Kendatipun akhir-akhir ini SNBI diharapkan dapat dibangun sebanyak 100 sekolah di 18 Provinsi, dan 72 Kabupaten/Kota di Indonesia, namun perlu dilaksanakan dengan dukungan sejumlah komponen yang memenuhi standar internasional, sehingga tidak terjadi reduksi SNBI.

SNBI bukanlah sekedar nama, melainkan lebih jauh dari itu esensi dan fungsinya seyogyanya dapat mencerminkan sebuah sekolah yang benar-benar mampu menunjukkan proses pendidikan yang handal, demikian juga lulusan-nya memiliki kecakapan untuk bersaing secara internasional. Pemahaman internasional dalam konteks ini memang relatif, karena hingga kini belum ada standar internasional yang berlaku secara universal. Namun yang diharapkan

standar internasional dalam konteks ini adalah standar dengan ukuran yang berlaku di negara-negara maju tertentu atau negara-negara Asia Tenggara, Asia, Australia dan sebagainya.

Komponen Utama SNBI

1. Visi, Misi, dan Tujuan

a. Visi SNBI

Menghasilkan lulusan yang berprestasi minimal di tingkat asean yang bertaqwa dan berakhlak mulia, serta memiliki komitmen kebangsaan.

b. Misi SNBI

1) Mengembangkan keimanan dan ketaqwaan, serta akhlak mulia melalui pengembangan program pendidikan, pengendalian proses pendidikan dan penciptaan lingkungan pendidikan yang kondusif.
2) Mengembangkan kemampuan akademik siswa melalui modifikasi kurikulum dalam konteks lokal, nasional, dan internasional yang mendorong penguasaan kecakapan inovatif, sehingga meghasilkan lulusan yang kompetitif tingkat internasional.
3) Mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang bervariasi serta penciptaan kultur sekolah yang bertanggungjawab.
4) Mengembangkan kecakapan sosial dan kepemimpinan siswa baik melalui kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler, sehingga memiliki kemampuan jaringan internasional secara produktif.

c. Tujuan SNBI

1) Meningkatkan prestasi, mutu dan relevansi pendidikan sesuai dengan tuntutan global.
2) Mendorong terwujudnya tata kelola, akuntabilitas pengelolaan pendidikan, dan pencitraan publik.
3) Mendorong sekolah untuk melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS) secara optimal dengan memilih rujukan standar internasional berdasarkan preferensinya.
4) Mendorong dan meningkatkan peranserta orangtua dan masyarakat dalam penyelenggaraan program sekolah yang kompetitif.
5) Memberikan dukungan sekaligus rangsangan kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) mengembangkan SDM yang dimilikinya.
6) Mendorong adanya gerakan peningkatan mutu pendidikan.

2. Kompetensi Lulusan

Lulusan SNBI diharapkan terutama secara akademik mampu menunjukkan kecakapan sejajar dengan lulusan yang sederajat dengan lulusan sekolah di luar negeri yang menjadi rujukan SNBI, misalnya ASEAN, negara-negara Asia-Pasifik, Australia, Eropa, atau Amerika Serikat.Di samping itu, kompetensi lain yang seharusnya menjadi *concern* adalah kompetensi moral, sosial dan fisik yang prima.

3. Kurikulum, Proses Pendidikan dan Sistem Evaluasi

Kurikulum SNBI pada hakekatnya tetap bertumpu pada kurikulum nasional, namun dalam implementasinya perlu pengembangan kurikulum dengan mengakomodasi standar internasional. Dengan demikian, jika dewasa kini sekolah-sekolah di Indonesia menggunakan standar kelulusan 4,26, maka SNBI dalam meluluskan siswanya perlu ditingkatkan passing grade-nya, misalnya 5,6 atau 6, dan sebagainya.

Selanjutnya proses pendidikan SNBI seharusnya memiliki kualitas yang berbeda, baik manajemen kelasnya, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan sarana pembelajaran, bahasa pengantar, dan lingkungan belajarnya. Manajemen kelasnya bisa dilakukan dengan *moving class*, atau menyediakan sejumlah media dan sumber belajar di kelas tetapnya jika tidak menggunakan *moving class*. Materi pembelajaran hendaknya dikemas dengan bahan-bahan yang tersedia langsung maupun rujukan yang dapat diakses pada kesempatan di luar jam pembelajaran. Metode pembelajaran hendaknya digunakan secara eklektik sesuai dengan kebutuhan, yang paling utama bahwa metode yang digunakan di samping untuk mendorong siswa aktif dan berinovasi dalam pembelajaran, metode pembalajaran mampu memfasilitasi siswa dalam menyerap informasi dan pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Bahkan dalam batas-batas tertentu, guru dapat menerapkan model pembelajaran kuantum, model *accelarated learnin, cooperative learning,* dan sebagainya.

Media dan sarana pembelajaran seharusnya disediakan selengkap mungkin, sehingga mampu memfasilitasi semua siswa untuk berakitivitas dan belajar. Terlebih-lebih di era informasi, penggunaan multi media dalam proses pembelajaran merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Demikian pula penyediaan perpustakaan yang lengkap dengan koleksi-koleksinya sesuai dengan kebutuhan SNBI harus diwujudkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih produktif.

SNBI dalam proses pendidikan perlu didukung bahasa pengantar baik bahasa Indonesia maupun bahasa internasional (misal. Inggris). Dengan kata lain bahwa dalam proses pemantapan SNBI perlu ditunjang dengan pengguna-

an bilingual (Indonesia & Inggris). Penggunaan bilingual boleh jadi bisa digunakan pada awal rintisan dan pada masa-masa seterusnya. Karena bilngual diyakini tidak hanya untuk mengefektifkan komunikasi, melainkan juga untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap mater-materi yang membutuhkan kejelasan bahasa.

SNBI juga perlu didukung dengan lingkungan belajar kondusif, dengan menciptakan lingkungan fisik sekolah dan kelas yang bebas dari kontaminasi dan polusi udara dan suara, sehingga tercipta suatu lingkungan belajar yang nyaman dan enak. Demikinan juga SNBI perlu didukung oleh lingkungan sosial yang mampu menjamin ketenangan dan kenyamanan diri, sehingga terhindar dari ketakutan, kekhawatiran, dan konflik sosial.

Akhirnya, sistem penilaian pendidikan bidang akademik yang dikembangkan harus berlandaskan pada standar internasional, di samping mengacu pada visi dan nilai yang menjadi acuan SNBI, misalnya aspek afektif (moral) dan psikomotoriknya (kinerja).

4. Pendidik dan Tenaga kependidikan

Pada dasarnya ketenagaan yang dibutuhkan oleh SNBI, di antaranya: guru, konselor, kepala sekolah, pengawas, laboran, pustakawan, pelatih, staf administrasi, dokter, dan konsultan (tenaga ahli) atau dan *Native speakers.* Kesemua tenaga diharapkan dapat dipenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensinya, minimal sebagaimana yang tercantum dalam UURI No. 14 No 2005 tentang Guru dan Dosen. Lebih jauh dari itu kepala sekolah, guru, konselor, dan konsultan (tenaga ahli), diharapkan mereka minimal memiliki pengalaman empirik melalui visitasi ke sekolah-sekolah internasional, sekolah-sekolah di luar negeri, dan memiliki keterampilan bahasa internasional (misal: bahasa Inggris), di samping yang utama mereka diharapkan sekali memiliki kinerja yang handal sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menjamin kinerja dapat *well-perform*, perlu diberikan *incentive* yang memadai sesuai dengan prestasi dan pengabdiannya.

5. Manajemen Sekolah

SNBI hendaknya dikembangkan dengan perencanaan yang matang dengan memiliki visi ke depan yang *achievable*. Pengorganisasian kegiatan dilakukan dengan penuh sinergis di antara komponen-komponen penting di sekolah, sehingga keberadaan semua komponen berfungsi secara optimal. Kepemimpinan sekolah yang dibangun hendaknya bersifat demokratis dan transformatif, sehingga semua unsur merasa terberdayakan.

6. Partisipasi Orangtua dan Masyarakat

Keberadaam SNBI pada hakekatnya tidak bisa dipisahkan dari orangtua dan masyarakat sebagai *stakeholders*-nya. Semua *stakeholders* harus dijamin kepuasaannya dari layanan pendidikan sebagai *core-business*–nya. Karena kepala sekolah seharusnya berjuang keras untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringannya dengan orangtua dan masyarakat, demikian juga para ahli dan perguruan tinggi yang ada di sekitarnya. Partisipasi orangtua, masyarakat, pihak lainnya yang terkait dapat bersifat manajerial, akademik, finansial, material, psikologis, kultural, dan mediatif.

7. Monitoring dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Dalam meningkatkan produktifitas dan efektivitas pendidikan perlu dilakukan monitoring dan penjaminan mutu pendidikan secara periodik dan terus menerus. Hasil monitoring diharapkan dapat dijadikan *feedback* untuk perbaikan proses pendidikan selanjutnya, sehingga SNBI dapat terjamin akuntabilitasnya di depan publik.

Dalam melakukan kendali mutu SNBI perlu memilih standar yang digunakan sebagai *banchmark* sekolahnya, apakah dengan standar internasionalnya menggunakan standar ASEAN, Asia Pasifik, Australia, Eropa, atau Amerika, atau gabungan dari itu, misalnya *Cambridge Certificate, International Baccalaureate* (IB), dan *Victorian Certificate of Education (VCE).*

Upaya Pengembangan SNBI

Untuk dapat mengimlementasikan SNBI secara efektif dan efisien, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya, di antaranya:

- Dibutuhkannya kepemimpinan pendidikan yang kuat, bertanggungjawab, kreatif, partisipatif, dan transformatif.
- Penciptaan kultur sekolah yang diwujudkan dengan lingkungan belajar dan pergaulan yang etikal di sekolah.
- Perlunya komitmen semua *stakeholder* sehingga tercipta *common vision.*
- Perlunya penetapan standar kualitas input, proses, dan produk yang dilandasi dengan ekspektasi yang tinggi.
- Perlunya pengembangan keterampilan mengajar dan belajar yang mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif.
- Perlunya kerja tim (kolegialitas dan kolaborasi) yang produktif.
- Perlunya penciptaan disiplin sekolah melalui pendekatan yang humanis.

- Perlunya dikembangkan networking dengan institusi-instusi terkait, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan program pendidikan.
- Perlunya internalisasi nilai dan budaya bangsa (termasuk nilai keagamaan) dan *filter* terhadap masuknya nilai dan budaya asing yang bertentangan.
- Perlunya penilaian kinerja siswa dan sekolah secara kontinyu, bertanggungjawab, dan edukatif.
- Perlunya jaminan hak dan tanggung jawab siswa sehingga menjamin terjadinya proses pembelajaran yang efektif.
- Perlunya dukungan layanan bimbingan dan konseling bagi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup siswa.

Penutup

Kehadiran SNBI tidak hanya didasarkan pada kondisi empirik global, melainkan juga dibangun di atas landasan hukum yang jelas, di samping menjadi kebutuhan bangsa untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi minimal setaraf dengan kompetensi anak-anak di negara lain untuk jenjang yang sama. SNBI diharapkan tidak hanya menfasilitasi setiap siswa yang mengikuti pendidikan untuk melakukan mobilitas yang bebas di negara-negara lain yang memiliki kesamaan standar, melainkan juga memberikan kemudahan bagi anak-anak bangsa lain yang terpaksa harus belajar di Indonesia tanpa mengalami kerugian yang berarti.

Untuk menghasilkan SNBI yang terpercaya, kiranya perlu terus menerus dilakukan peningkatan kapasitas institusi dan personalia, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetitif.

Tulisan ini disajikan dan dibahas dalam Lokakarya untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar tahun ajaran 2006/2007 bagi Guru dan Karyawan SMAN 1 Yogyakarta pada 2 sd 4 Juli 2006 di Pakem Sari Pakembinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta

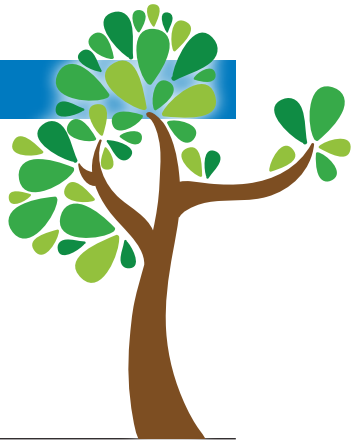

Pasca Pembubaran RSBI/SBI

SAMBUTAN penuh kebahagiaan menyelimuti keberhasilan orangtua murid, aktivis pendidikan, dan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) terhadap Putusan No.05/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi RI, berkenaan dengan Pencabutan pasal 50 ayat (3) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar hukum pendidikan bertaraf internasional pada tanggal 8 Januari 2013. Mereka menyambut bahagia, karena telah berjuang keras, menghabiskan energi cukup banyak, dan memakan waktu cukup lama yang dimulai 28 Desember 2011. Ungkapan riang gembira juga nampak di luar para pemohon, karena diyakini bahwa sudah tidak ada lagi institusi pendidikan yang memberikan kesan perlakuan "deskriminatif".

Putusan ini diyakini oleh MK dapat memenuhi penegakan HAM bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dinyatakan secara konstitusional bahwa pendidikan bermutu dimaksudkan untuk semua dan tidak hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu saja. Pemerintah berkewajiban menanggung semua biaya pendidikan, sehingga tidak boleh terjadi adanya warga yang gagal mengakses pendidikan hanya disebabkan oleh ketidakberuntungan secara ekonomik. Demikian juga, penerapan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam praktek pendidikan tidaklah dapat dibenarkan, karena dikhawatirkan dapat menkontaminasi jati diri bangsa.

Menghadapi Putusan MK tersebut, kiranya sangatlah positif respons Bapak Mendikbud, yang diindikasikan dengan sikap pemerintah yang menghargai dan menghormati terhadap Putusan MK dan siap menindaklanjutinya, bagaimana solusi yang terbaik menghadapi realitas di lapangan, sehingga tercipta situasi yang kondusif untuk menciptakan penyelenggaraan pendidik yang efektif.

Sebelum merumuskan langkah-langkah positif pasca Putusan MK, kiranya cukup penting dapat disampaikan alasan kuat munculnya pasal 50 ayat (3) UU-

SPN 2003. Bahwa gagasan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional / Sekolah Bertaraf Internasional (SBI/RSBI) awalnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional. Mengapa demikian, karena secara historis sebelum UUSPN disahkan, anak Indonesia dari keluarga berpendidikan tinggi dan keluarga mampu yang menghargai pentingnya pendidikan secara berangsur-angsur jumlahnya meningkat yang menuntut ilmu ke luar negeri, terutama untuk jenjang Sekolah Menengah ke bawah. Untuk mengendalikan arus jumlah anak yang menuntut ilmu ke luar negeri, dan menjamin rasa kebangsaan anak-anak Indonesia, sangat dipandang perlu untuk mendirikan RSBI/SBI dengan biaya yang lebih murah daripada belajar di luar negeri atau sekolah internasional yang dikelola oleh diplomat asing dan swasta.

Persoalan biaya tinggi yang ada di RSBI/SBI sebenarnya bukanlah sesuatu yang serius, sepanjang pengelolaannya dilakukan secara terbuka yang diwujudkan dengan pelaksanaan audit setiap tahunnya oleh Kantor Akuntan Independen. Demikian pula penggunaan bahasa asing dalam proses pendidikan di RSBI/SBI pada hakekatnya sangat membantu anak-anak untuk berpartisipasi secara langsung di era digital, di samping tidaklah terlalu membahayakan jatidiri peserta didik sebagai warga bangsa Indonesia, karena pada prakteknya di sekolah bahwa penggunaan dwi-bahasa *(bilingual)* merupakan kebutuhan utama dalam proses pembelajaran dan pendidikan.

Nah, sekarang bagaimana penyelesaian RSBI/SBI pasca Putusan MK? Semua RSBI/SBI, diharapkan sekali dapat diatasi dengan langkah-langkah konstruktif, di antaranya: 1) RSBI/SBI diarahkan menjadi Sekolah Unggulan yang dikelola secara profesional, sehingga menjadi rujukan untuk *banchmark*, 2) Sekolah Unggulan didorong untuk menjadi sekolah yang mandiri, dengan tetap di-*back-up* pembiayaannya oleh pemerintah bagi sekolah negeri, dan oleh yayasan bagi sekolah swasta, 3) Sekolah Unggulan dapat diakses oleh semua anak yang berpotensi akademik tinggi dengan memberikan kuota minimal 20% bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomis, 4) Sekolah Unggulan seharus mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk belajar, terutama bagi peserta didik yang beruntung, baik secara ekonomik, sosial, maupun geografis, dan 5) Komite Sekolah Unggulan didorong aktif untuk mengembangkan jaringan dengan pihak luar, sehingga mampu memperoleh donatur secara terus menerus untuk menunjang semua aktivitas akademik dan non-akademik yang telah dirancang.

Demikianlah beberapa catatan kecil pasca Putusan MK, semoga dapat menginspirasi kita semua untuk terus dapat mengupayakan sekolah efektif untuk semua, sehingga dapat mengantarkan generasi masa depan yang lebih baik,

produktif, dan kreatif. RSBI/SBI boleh dibubarkan, namun spirit untuk mengupayakan Sekolah Unggulan harus terus dipelihara dan dikembangkan, sehingga generasi masa depan memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi tantangan pada jamannya. Semoga!

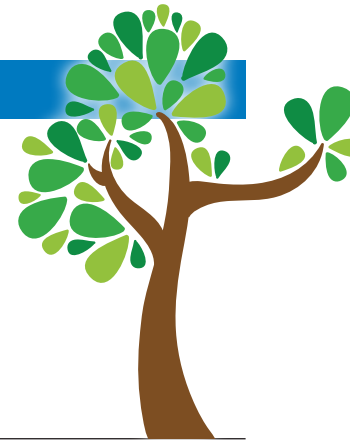

Pertukaran Pelajar

GAUNG Ultah Kemerdekaan RI ke-64 tahun yang meneguhkan perlunya kesatuan dan persatuan pelan-pelan mulai kita tinggalkan. Gelar Apresiasi Budaya Antar Etnis 2009 yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi DIY dari 28 sd 30 Juli 2009 tinggal menyisakan sejumlah kesan positif. Jika kita secara personal, kolektif, atau dan institusional tidak menjaga komitmen untuk mengutamakan kesatuan dan persatuan, maka boleh jadi konflik horizontal berpotensi muncul di mana-mana, baik pada skala kecil maupun besar.

Memang setiap pribadi, kelompok, suku, dan bangsa secara fitrah memiliki perbedaan. Perbedaan sepatutnya saling diapresiasi, ingat bahwa perbedaan adalah rahmat *(Ikhtilaafi ummatii rahmatun).* Untuk mengantisipasi benturan kepentingan dan konflik sosial dan kultural, sebagai konsekuensi dari perbedaan, kiranya ide pertukaran pelajar dalam setting dunia persekolahan perlu diupayakan.

Pertukaran pelajar dewasa ini telah berlangsung cukup lama, baik secara nasional maupun internasional, walalupun baru dirasakan sejumlah kecil pelajar. Kegiatan ini sungguh mendapatkan apresiasi yang besar baik bagi pelajar sendiri maupun sekolah, dan daerah atau dan bangsa yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan program ini.

Setidak-tidaknya program pertukaran pelajar bermanfaat di antaranya: mengenal lebih jauh kebesaran Tuhan, karena dapat menyaksikan ciptaan Tuhan di belahan dunia lain; membangun *cultural understanding,* karena Indonesia dan dunia memiliki multi kultur; mengembangkan respek terhadap orang lain, karena setiap orang, suku bangsa, dan bangsa lain memiliki martabat yang patut dihargai; memantapkan persatuan dan kesatuan, karena setiap suku bangsa di Indonesia merupakan satu kesatuan dari bangsa Indonesia, atau suatu bangsa merupakan satu kesatuan dari di antara bangsa-bangsa atau umat ma-

nusia yang sama-sama memiliki hak hidup di muka bumi; dan *sharing* pengalaman akademik, karena seorang siswa, suatu sekolah dan daerah dapat memperoleh pengalaman akademik dari siswa, sekolah atau daerah lain yang lebih maju dalam waktu tertentu, tanpa harus pindah sekolah.

Selama ini hampir semua para pelajar didorong untuk mengejar ketertinggalan akademik, padahal pada prakteknya mereka akan berhadapan dengan dunia yang jauh lebih kompleks yang tidak hanya memerlukan pengalaman akademik semata. Karenanya program Pertukaran Pelajar perlu dijadikan suatu agenda tersendiri bagi sekolah dan daerah. Untuk menjadikan program Pertukaran Pelajar ini memiliki makna yang luas dan sebanyak-banyaknya, maka perlu dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak (*mutual benefits*).

Untuk dapat merealisasikan program Pertukaran Pelajar, pemerintah dan masyarakat Yogyakarta yang diyakini memiliki keunggulan akademik dan budaya dapat membuka akses dan memberikan pelayanan yang ramah, santun, dan menyenangkan sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga para pelajar pendatang memiliki kesan positif yang mendalam yang pada akhirnya dapat terdesiminasikan ke khalayak yang lebih luas. Juga didorong semua pihak dapat belajar banyak dari para pelajar tamu.

Sebaliknya, para pelajar Yogya yang potensial perlu secara aktif dan proaktif menguasai keunggulan Yogya untuk dibawa ke daerah lain, di samping para pelajar belajar bertanggungjawab untuk tampil prima di daerah lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga mereka memperoleh manfaat dari keunggulan Yogya. Tentu saja para pelajar Yogja sebaiknya memperoleh keunggulan yang ada di daerah dan sekolah tempat belajar yang nantinya dapat di-sharingkan ke teman-teman dan masyarakat yang ada di Yogya.

Perlu disadari dengan benar, bahwa program Pertukaran Pelajar ini tidak hanya memiliki dampak positif terhadap pelajar sendiri, melainkan juga bagi Pemda, masyarakat, dan bangsa. Antar pemda dapat terbangun kerjasama yang saling menguntungkan. Masyarakat dapat memperoleh keuntungan sosial, budaya, dan ekonomik. Demikian juga antar bangsa dapat terbangun perdamaian dunia. Yang pada akhirnya dapat mengokohkan kekuatan rasa kebangsaan dan kemanusiaan.

Walaupun program Pertukaran Pelajar memiliki banyak nilai positifnya, namun boleh jadi akan berdampak negatif jika pengelolaannya tidak mantap. Beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya: program ini harus disusun secara bersama-sama antar daerah yang terkait, didukung dengan dana yang memadai, dikelola oleh personil-personil terlatih, program-programnya disosialisasikan secara meluas terutama ke pihak terkait, diberikan fasilitas yang

memadai, masyarakat dan instansi terkait diminta dukungan, peserta diberikan jaminan kesehatan dan keamanan.

Akhirnya, program pertukaran pelajar akan dapat bermakna yang strategis sebagai pengikat hubungan antar warga dan suku bangsa di Indonesia, serta antar bangsa di seluruh dunia, jika program tersebut dikelola dengan baik yang dilandasi dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, serta nilai-nilai moralitas yang menjadi pegangan hidupnya. Ingat kata bijak "satu orang musuh adalah terlalu banyak, seribu teman adalah terlalu sedikit."

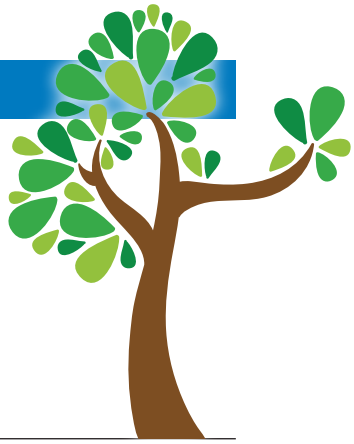

Peluang dan Strategis Studi Lanjut

Mengapa Studi Lanjut

- Untuk memenuhi kewajiban menuntut ilmu.
- Untuk peningkatan kapasitas diri.
- Untuk meneningkatan *self-esteem*.
- Untuk meningkatkan produktivitas diri.
- Untuk memantapkan modal promosi diri.
- Untuk dapat memberikan kontribusi dalam memenuhi dan penyelesaian permasalahan ummat.

Waktu Studi Lanjut

- Sedini mungkin
- Kapan saja
- Ketika ada kesiapan diri
- Ketika sudah terpenuhi kesiapan akademik
- Ketika modal tersedia
- Ketika beasiswa tersedia
- Ketika mendapatkan ijin

Peluang Studi Lanjut

- Studi lanjut terbuka bagi siapapun yang berminat baik di dalam maupun di luar negeri, tergantung pada kemampuan akademik, dana, dan syarat-syarat lainnya yang tidak bisa dipisahkan.
- Banyak program studi lanjut yang tersedia, tetapi perlu dipilih program studi yang prospektif.
- Kesempatan studi lanjut bisa berasal dari pemerintah maupun lembaga *non-government* baik dalam negeri maupun luar negeri.

- Beasiswa studi lanjut yang tersedia dari institusi yang kredibal biasanya terutama diberikan kepada siapapun yang berstatus pegawai negeri atau mengabdi di suatu LSM.
- Beasiswa studi lanjut juga bisa diberikan kepada siapapun yang belum terikat dengan suatu lembaga, namun setelah studi biasanya harus mengabdikan kepada lembaga yang telah disepakati sebelum dan selama beasiswa diberikan.

Hambatan Studi lanjut

- Kesiapan mental
- Rendahnya kesiapan akademik
- Keterbatasan penguasaan bahasa asing
- Keterbatasan Dana
- Minimnya dukungan keluarga
- Rendahnya keterampilan sosial dan kemampuan penyesuaian diri.
- Rendahnya kemampuan manajemen waktu
- Kultur yang tak kondusif

Strategi Studi Lanjut

"Untuk menyiasati studi lanjut bisa bertindak secara reaktif dan proaktif"

- Tempat studi dapat di dalam atau luar negeri, asalkan mempertimbangkan kualitas institusi pendidikannya.
- Khususnya studi luar negeri perlu mempertimbangkan negara tujuan. Yang seringkali menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan negara tujuan, di antaranya: bahasa pengantar, biaya, kemungkinan bisa kerja baik selama maupun setelah studi.
- Pilihan program studi perlu sesuai dengan bidang, pekerjaan, pesan pemberi dana (sponsor), dan lain-lain, di samping kebermanfaatan selanjutnya.
- Waktu studi disesuaikan dengan kesiapan diri dan kondisi lingkungan.
- Studi Lanjut dapat dilakukan dengan biaya sendiri atau bantuan beasiswa.
- Studi lanjut menjadi lebih bermakna, jika lebih mengutamakan peningkatan kompetensi dan penguasaan bidang keahlian, daripada sekedar mencari status.
- Dukungan dana berupa beasiswa untuk studi lanjut dapat diakses melalui internet, pameran pendidikan, perusahaan besar, atau perwakilan negara.
- Perlunya memiliki kemauan, kemampuan, dan keseriusan untuk meraih sukses dalam melaksanakan studi lanjut. (Kesiapan mental, fisik, dan kecakapan sosial secara total).

- Penekanan biaya studi bisa dilakukan sehemat mungkin dengan mengendalikan gaya hidup.
- Menggunakan jasa konsultan pendidikan untuk studi lanjut seperlunya, jika memungkinkan dapat menyelesaikan sendiri urusan persiapan studi, karena yang demikian jauh lebih baik. Jika pilihannya jatuh pada penggunaan konsultan pendidikan, maka perlu adanya kehati-hatian dalam menentukan pilihan jasa konsultan.
- Untuk dapat menyelesaikan studi lanjut secara efektif dan efisien, perlu menyiapkan dan terus memantapkan kemampuan membaca dan menulis.

Pendidikan Karakter

Karakter umat dan bangsa tidak akan pernah terbangun dengan baik jika tidak ada gerakan pendidikan karakter, yang melibatkan semua unsur utamanya dengan memberikan kewenangan penuh kepada orangtua pendidik, tokoh masyarakat/agama, dan redaktur massmedia.

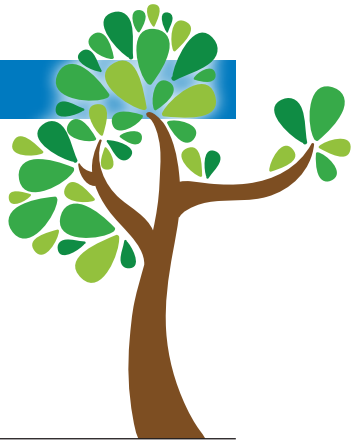

Membentuk Karakter

FENOMENA karakter manusia dewasa ini sangat beragam. Ada karakter yang menggambarkan manusia sangat beradab dan bermartabat, sehingga menyenangkan dan memberi jaminan keamanan dan keselamatan orang lain atau lingkungan. Sebaliknya ada juga karakter menusia yang sangat kurang terpuji, jauh dari beradab, sehingga bertindak kekerasan, bahkan mengganggu dan merusak orang lain dan lingkungan. Ingat bahwa Allah swt tidak suka kepada manusia yang membikin kerusakan di atas bumi, sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi QS. A-lQashah, ayat 77, *"...Laa tabghil fasada fil-ardhi, innallooha laa yuhibbul mufsidiin"*.

Mengapa terjadi ragam karakter itu, setidak-tidaknya karakter itu dapat dipengaruhi oleh bawaan dari orangtuanya, di samping tidak sedikit karakter itu akibat dari pengaruh lingkungan baik fisik, sosial, maupun budaya di mana individu itu berada. Terlebih-lebih di era informasi saat ini, sangat banyak ditemukan informasi yang kering dan nihil dari misi nilai, bahkan benturan dengan nilai dan budaya kita. Demikian juga perlakuan orang lain, baik teman sebaya, maupun orang dewasa yang tidak bertanggungjawab, sehingga membentuk karakter individu yang jauh dari nilai dan budaya bangsa, bahkan perlakuan orang dewasa sampai-sampai menimbulkan korban fatal, meninggal dunia. Nyaris kita kehilangan respek antar sesama.

Tidak ada upaya yang menjadi pilihan utama, kecuali setiap individu harus dibimbing dan dibina sehingga individu itu memiliki karakter yang terbaik, karakter yang terpuji, dan karakter yang mulia. Insan dijadikan Allah swt sebagai makhluk terbaik, termulia, bahkan makhluk yang paling sempurna, bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Namun di sisi lain kemuliaan dan kesempurnaan itu menjadi sirna ketika individu itu menunjukkan karakter yang tercela dan tak terpuji, apalagi karakter yang jauh dari sifat-siafat manusia.

Ingat bahwa atas kesadaran terhadap kondisi bangsa Arab dalam era Jahiliyah, Allah swt sengaja bangkitkan salah seorang manusia terpilih, Nabi Muhammad saw, semata-mata untuk menyempurnakan akhlaq dan memperbaiki karakter manusia, sehingga dapat meraih kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Kini saatnya kita dihadapkan persoalan, bagaimana strategi yang efektif untuk membentuk karakter di era persimpangan ini. Indonesia di satu sisi memimpikan suatu Zaman Indonesia Emas, yang diindikasikan dengan Indonesia jaya, Indonesia adil, Indonesia sejahtera, dan Indonesia makmur. Untuk menuju ke era itu sudah barang tentu diperlukan generasi berkarakter dan bermartabat. Nah untuk membangun generasi berkarakter dan bermartabat, perlu dibangun konsistensi, koherensi dan kesinambungan sistem dan pelaksanaan pendidikan keluarga, pendidikan sekolah dan pendidikan dengan menekankan trasnfer nilai-nilai. Demikian pula perlu dibangun institusi keagamaan yang disiplin menfilter kultur asing yang tidak baik, dan menegakkan misi edukatif media massa.

Akhirnya sangatlah disadari bahwa karakter umat dan bangsa, tidak akan pernah terbangun dengan baik, jika tidak ada gerakan pendidikan karakter, yang melibatkan semua unsur utamanya dengan memberikan kewenangan penuh kepada orangtua pendidik, tokoh masyarakat/agama, dan redaktur massmedia. Pihak-pihak penting ini perlu memberikan keteladanan, membimbing, mengasuh, dan mendidik, serta mentransformasikan nilai-nilai religius, personal, sosial, dan kebangsaan, yang dilakukan secara sinergis. Untuk efektifnya membangun karakter individu sangat diperlukan alat pendidikan, baik itu *reward* maupun *punishment* yang edukatif. Semoga puasa Ramadhan dapat menginspirasi semua pihak untuk menunjukkan tanggung jawabnya dalam membangun karakter ummat dan bangsa yang dilandasi dengan kasih sayang.

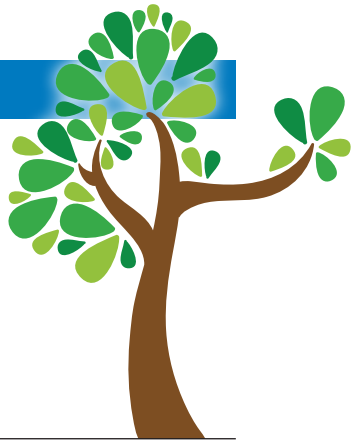

Menghasilkan Insan Berkarakter dan Bermartabat

DIES natalis ke-48 mengangkat tema "Menghasilkan Insan Berkarakter dan Bermartabat". Pemilihan tema ini dimaksudkan terutama untuk mengukuhkan posisinya sebagai universitas yang memiliki *core business* pendidikan, dan sekaligus sebagai LPTK yang meneguhkan dirinya *leading in character education*. Atas dasar inilah UNY ingin terus memainkan peran yang sangat penting dalam menghasilkan insan berkarakter dan bermartabat di tengah-tengah bangsa Indonesia masa depan.

Walaupun reformasi menyeluruh telah diupayakan di Indonesia, namun dewasa ini kondisi bangsa Indonesia belum terbebaskan dari multikrisis, bahkan kita masih terus dibayang-bayangi dengan korupsi dan krisis moral yang tiada henti, sehingga tidak sedikit terjadi perilaku yang kontras dengan identitas bangsa Indonesia, yang seharusnya setiap warga negara Indonesia memiliki pribadi pancasilais, yang mengedepankan perilaku religius, perilaku humanis, perilaku kolektif dan kooperatif, perilaku demokratis, dan perilaku peduli. Nampak masih banyak terjadi perilaku ingkar agama bermuatan maksiat, perilaku tak manusiawi yang menurunkan harga diri, perilaku konflik yang mengancam keutuhan bangsa, perilaku bebas berekspresi yang menindas hak orang lain, dan perilaku individualis yang tak peduli dengan orang yang lemah dan termarginalkan.

Perilaku yang tidak seiring dengan norma-norma etis dan sosial tersebut, sangat boleh jadi dalam batas tertentu dapat mengancam identitas kepribadian Indonesia, sehingga dapat muncul rasa tak bangga sebagai bangsa Indonesia yang bermartabat. Kondisi yang demikian tidak bisa dibiarkan mengancam insan Indonesia kini dan masa depan, sehingga sangat diperlukan upaya strategis dan sistematis melalui pendidikan karakter.

Pendidikan karakter yang mantap sangat diyakini dapat menyelesaikan kondisi krisis multi dimensi, sebagaimana Allah swt memberikan misi utama kehadiran Rasulullah saw dalam menghadapi kejahiliyahan pada saat itu, yang akhirnya pendidikan karakter dapat mengantarkan pembentukan insan berkarakter dan bermartabat.

Diyakini sepenuhnya bahwa pendidikan karakter akan sangat efektif, jika implementasinya dilakukan melalui gerakan, yang tidak hanya dilakukan melalui pilar institusi pendidikan, melainkan juga melalui keluarga, masyarakat, tempat ibadah, dan media massa. Semua pilar harus memiliki visi yang sama dan bergerak secara sinergis menuju ke arah yang sama, yaitu memanusiakan manusia menuju pembentukan insan berkarakter dan bermartabat.

Untuk menjamin efektivitas pendidikan karakter di institusi pendidikan, pendekatan yang efektif seharusnya tidaklah hanya bertumpu pada kurikulum terpisah, misalnya melalui mata Pelajaran Agama, Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan negara, dan bahasa Indonesia, melainkan juga kurikulum terpadu, misalnya melalui pelajaran-pelajaran lainnya dan kegiatan-kegiatan ektrakurikuler dan kokurikuler. Dengan demikian implementasi pendidikan karakter harus melibatkan semua pendidik dan tenaga kependidikan di bawah tanggung jawab pimpinan institusi pendidikan.

Untuk mengupayakan pendidikan karakter yang efektif, sangat diperlukan pembiasaan perilaku terpuji sedini mungkin dan keteladanan orang dewasa baik orangtua, guru, tokoh masyarakat, pejabat negara, dan tokoh agama dalam berbagai konteks kehidupan. Demikian pula pemberian hadiah, sanksi dan hukuman perlu diterapkan secara adil dan edukatif yang dilandasi rasa kasih sayang terhadap setiap individu yang berperilaku baik dan terpuji, serta yang berperilaku melanggar hukum dan norma sosial. Karena itu sudah saatnya setiap insan Indonesia mulai berlomba-lomba berbuat kebajikan dan perilaku bermanfaat untuk orang lain, bukan membiarkan perilaku suka menuntut dan menyalahkan orang lain, apalagi bersikap dan berperilaku agressif dan eksploitatif.

Akhirnya kita semua harus yakin bahwa pendidikan yang kita bangun seharusnya mampu menjadikan semua individu yang hidup di bumi Indonesia bangga sebagai warga Indonesia yang berkarakter dan bermartabat, yang diindikasikan dengan kehidupan yang religius, memiliki rasa "malu", mengutamakan persaudaraan dan persatuan, respek antar sesama, dan peduli terhadap lainnya. Dengan demikian diharapkan sekali secara berangsur-angsur terbangun kehidupan yang damai dan penuh rasa saling menyayangi dalam kehidupan bekeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semoga!

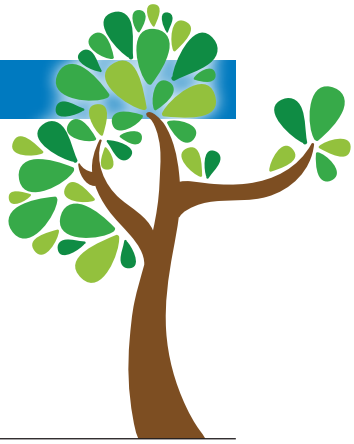

Pendidikan Hasilkan Insan Unggul

KINI kita berada di era global, era kompetisi terbuka. Semua warga dunia harus siap menghadapi era ini, tanpa terkecuali warga Indonesia. Hanya orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan diri, yang khawatir sekali, bahkan menentang hadirnya era global.

Kita ingat bahwa globalisasi merupakan fitrah, sebagaimana kehadiran Rasulullah saw itu untuk seluruh alam. Artinya bahwa setiap umat manusia seharusnya siap memberikan manfaat bagi seluruh alam. Karena itulah kita semua tanpa terkecuali perlu menyiapkan diri untuk menghadapi era global, lebih khususnya insan Indonesia harus siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada awal tahun 2016.

Siapa yang memiliki kesiapan untuk menghadapi era global? Tentu saja yang tidak bisa diragukan adalah insan unggul. Insan yang memiliki kemampuan dan kompetensi unggul dan hebat, yang mampu berkompetisi dengan siapapun, di manapun dan kapanpun.

Karena pentingnya mewujudkan insan unggul, UNY dalam memperingati Dies Natalisnya yang ke-51 mengambil tema *"Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Olahraga untuk Mewujudkan Insan Unggul"*. Semoga tema ini memberi inspirasi bagi kita semua, bagaimana bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga yang dibina UNY dapat berkontribusi untuk mewujudkan insan unggul.

Dalam bahasa psikologi, insan unggul dapat disebut *productive person* (Guilmore), *No-limit person* (W. Dyer), *fully fungtioning person* (Rogers), *self actualized person* (Maslow), *Insan kamil* (M. Iqbal), dan insan seutuhnya (Indonesia). Kita mengharapkan hadir insan-insan yang memiliki kepribadian produktif yang selalu siap berkarya secara kompetitif. Kita menginginkan insan yang

mampu mencapai puncak prestasi klimak. Kita memimpikan hadirnya insan-insan yang mampu menunjukkan dirinya berfungsi sepenuh dalam hidupnya.

Kita merindukan hadir insan-insan yang sanggup mengaktualisasikan potensi-potensinya. Kita sangat mengobsesikan hadirnya insan-insan yang sempurna pribadi dan perilakunya. Demikian juga bangsa Indonesia telah mengorientasikan wujud warganya menjadi manusia seutuhnya. Insan unggul pada hakekatnya dicirikan dengan capaian bentuk yang terbaik dan yang optimal, sehingga menjadi insan yang terbaik pula. Hal ini sejalan dengan kemauan sang Pencipta, bagaimana kita menjadi makhluk yang terbaik, sekaligus menjadi insan yang terbaik.

Untuk menjadikan insan yang terbaik, dengan kata lain insan unggul dan berintegritas, bahwa upaya yang paling efektif adalah pendidikan. Pendidikan memang menjadikan insan menjadi berperadaban, tidak hanya memiliki ilmu dan keterampilan yang memadai, melainkan juga memiliki akhlaq dan moral yang terpuji. Pendidikan menjadikan insan yang memiliki sifat-sifat ilahiyah, berakhlaq, mandiri, manusiawi, kreatif, pintar, bersatu, demokratis, dan berkepedulian sosial. Jika sifat-sifat dapat mempribadi pada setiap insan lulusan pendidikan. Demikian juga setiap insan berpendidikan harus siap berkompetisi secara sehat. Coba perhatikan anjuran untuk berlomba-lomba dalam kebaikan *(fastabiqul khairat)*.

Strategi pendidikan yang perlu diterapkan adalah memungkinkan pembelajaran yang mengedepankan berpikir konvergen terutama untuk mentransferkan nilai-nilai kebenaran yang diyakini dalam rangka pedidikan karakter, menerapkan berpikir divergen terutama untuk menanamkan kemampuan berpikir kreatif melalui aktivitas pemecahan masalah (problem solving) dalam rangka pendidikan kritis, serta menerapkan berpikir sinergis terutama menanamkan kemampuan kolaboratif melalui aktivitas pembelajaran kooperatif.

Proses pendidikan yang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran yang variatif dan simultan, diharapkan sekali mampu menghasilkan insan unggul, yang tidak hanya mampu menampilkan prestasi yang terbaik, melainkan juga mampu menunjkkan jiwa respek terhadap yang lainnya. Bahkan bisa melahirkan pribadi yang rendah hati (tawadlu').

Akhirnya, menjadi keinginan semua di antara kita bahwa pendidikan yang dapat dihadirkan UNY dalam menfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan individu menuju insan unggul, adalah mengupayakan institusi yang efektif, program pendidikan yang visioner dan fleksibel, kehadiran pendidik yang profesional yang menginspirasi, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, iklim akademik yang kondusif, dan jaringan sosial dan institusi dunia usaha dan industri yang memberikan akses untuk pemantapan keahlian.

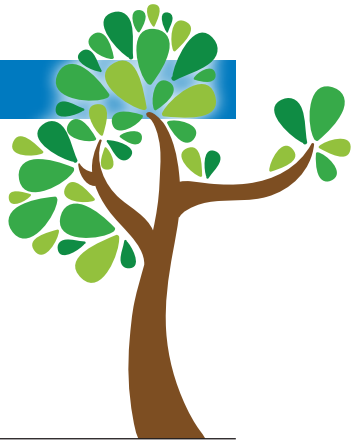

Pendidikan Karakter: Insan Bermoral dan Profesional

KASUS kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi belakangan ini semakin meluas. Tdak hanya terjadi di tempat publik, melainkan justru yang mengejutkan terjadi pula di tempat-tempat pendidikan, bahkan di rumah sendiri. Adapun pelakunya tidak hanya sembarang orang dewasa yang tercela perilakunya, melainkan juga para guru atau orang dewasa di sekolah dan di rumah yang semestinya mereka harus melindungi dan menjaganya. Semuanya ini merupakan akibat dari orang-orang yang tidak memiliki moral dan perilaku terpuji. Kita sepakat bahwa ini merupakan kejadian darurat, kejadian yang wajib segera mendapatkan penanganan secara sistemik. Tidak bisa diabaikan dan dibiarkan terus menerus.

Selain itu dapat dijumpai di tengah-tengah masyarakat bahwa orang yang berpendidikan tinggi, tidak selalu mampu menunjukkan kemampuan profesionalnya, kendatipun mereka sudah memegang sertifikat atau diploma profesi tertentu. Perilaku yang muncul bahwa mereka tidak hanya bekerja asal-asalan saja dan tidak didukung oleh kompetensi akademiknya, melainkan juga tidak dilandasi dengan moral dan etika profesi yang harus dijunjung tinggi. Akibatnya, hasil pekerjaannya tidak dapat terjamin kualitas dan kredibilitasnya, bahkan sering kali karya-karyanya mengecewakan *customer*-nya.

Menyadari akan adanya ketimpangan tersebut di atas, kiranya pendidikan karakter dapat memainkan peran yang optimal dalam proses pendidikan. Pendidikan karakter yang dimaksudkan harus mampu memainkan peran yang penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai esensial melalui materi, metode, situasi dan lingkungan serta aspek lainnya, sehingga menghasilkan insan-insan bermoral dan profesional.

Pendidikan karakter pada hakekatnya bukanlah menjadi tanggung jawab pendidik mata pelajaran agama, pendidikan budi pekerti, pendidikan pancasila

dan pendidikan kewarganegaraan saja. Namun pendidikan karakter itu hakekatnya dapat dilakukan melalui mata pelajaran lainnya, bukan hanya mata pelajaran akademik, mata pelajaran matematika, IPA, IPS dan sebagainya, melainkan juga mata pelajaran non-akademik, seperti mata pelajaran seni dan olahraga. Mata pelajaran seni yang dimasuki dengan misi pendidikan karakter, akan lebih indah prosesnya dan produknya, karena karya seni itu mengandung nilai moral.

Karya seni yang semacam ini sering dapat menginspirasi orang lain, bukan sebaliknya karya seni yang berpotensi memprovokasi perilaku maksiat dan perilaku tak terpuji. Demikian pula pembelajaran olahraga yang dimuati nilai-nilai moral, cenderung akan mudah untuk membangun sportivitas dan *fairness*. Sebaliknya pembelajaran olahraga yang kering atau bebas nilai, maka olahraga yang dilakukan tidak hanya merusak nilai-nilai olahraga itu sendiri tapi juga mengganggu orang lain, bahkan merusak penampilan olahraga itu sendiri, karena sudah mengingkari nilai-nilai luhur olahraga.

Pendidikan karakter juga memiliki nilai strategis dalam membangun profesionalisme. Dalam dunia akademik sungguh tidak dibenarkan mengabaikan sikap ilmiah yang menjadi identitas yang diunggulkan dari setiap para intelektual, misalnya dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan plagiasi. Jika hal ini diabaikan boleh jadi akan terjadi serangan balik terhadap para intelektual itu, bahkan bisa menjatuhkan ke tempat yang serendah-rendahnya, sehingga menjadi hina. Ingat bahwa kejujuran seorang intelektual adalah sangat mutlak adanya.

Walau pendidikan karakter memiliki manfaat yang banyak dan dampak positif yang meluas serta tak diragukan akan nilai pentingnya, namun mengimplementasikan pendidikan karakter itu tidaklah mudah. Pendidikan karakter membutuhan proses yang berkesinambungan. Pendidikan karakter menuntut konsep yang komprehensif. Pendidikan karakter sangat menghendaki keteladanan. Pendidikan karakter memerlukan dukungan dari semua fihak, tidak hanya para orangtua, pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama, media masa, dan masyarakat secara luas. Pendidikan karakter memerlukan materi yang relevan dengan dengan kondisi individu. Pendidikan karakter memerlukan lingkungan yang kondusif. Pendidikan karakter perlu menyesuaikan zaman dan usia individu. Jika semuanya itu dalam batas tertentu dapat diupayakan, Insya Allah pendidikan karakter dapat menghasilkan insan bermoral dan profesional. Semoga!

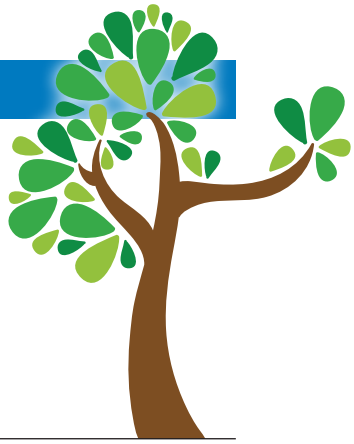

Pendidikan Karakter untuk Semua

SELAMA ini UNY telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan nasional, baik melalui sumbangan pemikirannya, maupun peran sertanya dalam mengawal praktek pendidikan. Sadar akan visi UNY dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, maka pada dies natalisnya tahun 2011, UNY mengambil tema Pendidikan Karakter untuk Semua.

Adalah disadari bahwa dewasa ini krisis identitas, baik sebagai pribadi maupun bangsa terjadi hampir di setiap wilayah Indonesia. Walaupun praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dilarang keras, tetapi masih saja terjadi. Demikian juga, kendatipun kita sudah berikrar akan pentingnya empat pilar dalam membangun bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi masih saja terjadi keinginan seorang atau sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya untuk membuat bentukan negara Indonesia yang lain.

Untuk ikut serta berkontribusi dalam memecahkan persoalan bangsa, maka UNY berkomitmen menunjukkan fungsi dan perannya dalam mengelola pendidikannya dengan lebih menekankan pendidikan karakter yang diharapkan mampu membentuk individu yang berkepribadian dan berkebangsaan, yaitu individu bermoral yang taat ibadahnya dan bertanggungjawab dalam mengemban tugas kekhalifahan. Kita sepakat bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu membentuk karakter yang baik.

Menyadari akan pentingnya pendidikan karakter, maka yang menjadi targetnya adalah internal civitas akademika UNY dan eksternal masyarakat dan media massa. Civitas akademika UNY mencakup mahasiswa, dosen dan staf administratif.

Pertama, bahwa semua mahasiswa menjadi target, terutama mahasiswa program studi kependidikan, karena mereka memiliki tanggung yang lebih be-

rat, terlebih-lebih di kemudian hari akan terlibat langsung dalam proses pembentukan generasi mendatang.

Kedua, bahwa semua dosen, bukan hanya dosen Agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan saja, diharapkan mampu menjadi model dan sanggup mentransformasikan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan melalui proses pembelajaran apapun mata kuliahnya dengan menempatkan posisi yang penting aspek moral dalam penentuan kelulusan.

Ketiga, semua staf administratif ikut bertanggungjawab dalam melayani mahasiswa dan *stakeholder* lainnya dengan santun, adil dan menyenangkan.

Masyarakat dan media massa menjadi target pendidikan karakter, karena diharapkan baik mahasiswa, dosen, maupun staf adiminstratif UNY mampu memberikan pengaruh positif bagi masyarakat dan media masa di manapun mereka berada. Sebaliknya, di harapkan juga dalam batas tertentu masyarakat yang berkompeten dan media massa bisa berkontribusi terhadap implementasi pendidikan karakter di kampus.

Dalam mengimplementasikan pendidikan karakter yang lebih komprehensif, kiranya diperlukan berbagai upaya lainnya yang mampu meningkatkan efektivitas pendidikan karakter, di antaranya: mengendalikan semua kegiatan kemahasiswaan baik di kampus maupun di luar kampus, mengendalikan kuliah dan kegiatan berkenaan dengan waktu ibadah, menggunakan pendekatan persuasif dalam implementasikan pendidikan karakter melalui media seni, dan dukungan pemerintah dalam mengendalikan tempat hiburan bagi mahasiswa. Semoga dengan pendidikan karakter yang komprehensif, dapat menghadirkan generasi mendatang yang lebih baik.

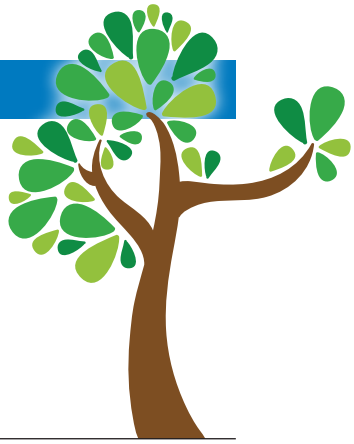

Pendidikan Islam untuk Penanganan Korupsi

Pengantar

Korupsi merupakan suatu perilaku yang merugikan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Merugikan terhadap diri sendiri karena korupsi pada hakekatnya tidak hanya merusak kehidupan individu itu sendiri, melainkan tindakan korupsi tidak mampu menjamin kebahagiaan bagi diri sendiri baik di kala hidup dunia maupun di akhirat. Merugikan orang lain, karena korupsi merupakan tindakan yang merampas hak orang lain dan boleh jadi dapat merusak lingkungan fisik dan sosial. Bahkan World Bank menegaskan bahwa korupsi merupakan *"the single greatest obstacle to economic and social development"*.

Perilaku korupsi bukan merupakan suatu yang asing di telinga kita, karena wacana korupsi telah menjadi bahan pembicaraan di mana-mana, baik di lingkungan akademisi maupun para awam, baik di lingkungan agamawan maupun "preman". Lebih jauh dari itu, perilaku korupsi pada kenyataannya bukanlah sekedar wacana saja, namun yang menarik adalah perilaku korupsi sudah menjadi bagian dari perilaku kehidupan banyak orang.

Menyadari akan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi, maka perlu dilakukan upaya-upaya penanganan secara sistematis dan terus menerus, baik yang terkait dengan upaya penumpasan maupun penangkalan atau pencegahan. Dalam konteks ke depan upaya pencegahan atau penangkalan merupakan salah satu upaya yang sangat strategis.

Penyebab Timbulnya Korupsi

Mengapa korupsi terjadi? Dreher, A. , Kostogiannis, C., dan McCorriston, S. (2004) mengidentifikasi ada empat faktor yang menjadi penyebab munculnya korupsi, yaitu faktor politis dan judisial, faktor historis, faktor sosial dan budaya, dan faktor ekonomik. Faktor sosial dan budaya pada hakekatnya terkait dengan

sikap moral. Orang yang memiliki kualitas moral yang terpuji *(mahmudah)* cenderung menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan korupsi. Mereka dalam membuat keputusan dan mengimplementasikan program dalam berbagai kegiatannya cenderung menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain atau pihak lain. Demikian juga sebaliknya bahwa orang-orang yang masih dikendalikan hidupnya oleh kualitas moral yang tercela *(madzmumah)* cenderung di antaranya mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang terkait dengan korupsi.

Jika memperhatikan Corruption in South Africa, Results of an Expert Panel Survey (2001), maka penyebab yang paling penting akan terjadinya tindakan korupsi adalah menurunnya moral dan etika di masyarakat Afrika Selatan (35%), yang diikuti dengan dorongan untuk memperkaya diri (25%), kondisi sosial dan ekonomik (18%), dan sebagainya.

Figure 1: Respondents' perceptions of the causes of corruption in South Africa (n=191)

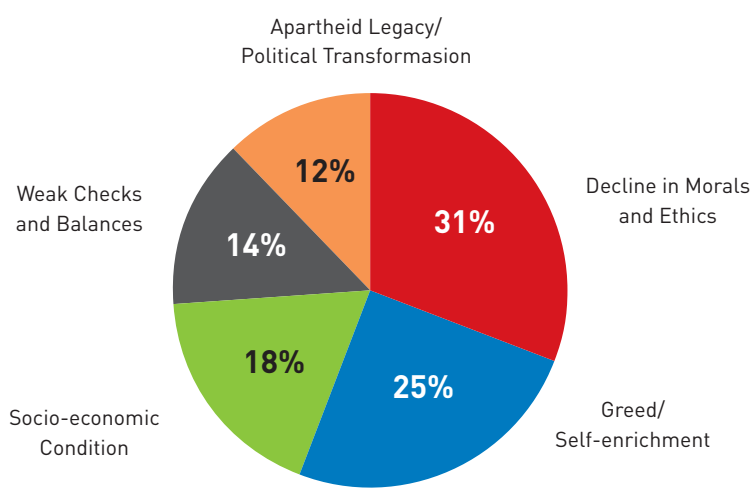

Berdasarkan kasus di Afrika Selatan, dapat dipahami bahwa penurunan kesadaran moral dan etik merupakan faktor yang sangat penting dalam perilaku korupsi. Bagaimana perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia, selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut.

Korupsi di Indonesia

Arifianto, Alexander menegaskan, ada tiga teori yang dapat menjelaskan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu *mainstream economic theory, patrimonialism theory, and kleptocratic state theory*.

Pertama, teori ini menjelaskan bahwa negara sering bertindak monopoli terhadap aktivitas ekonomi negara.

Kedua, teori ini berpendapat bahwa korupsi dapat berperan sebagai cara untuk meningkatkan integrasi politis di antara suku bangsa, partai, dan fraksi dalam pemerintahan.

Ketiga, teori ini menyatakan bahwa korupsi endemik berada dalam regim yang dikendalikan oleh pimpinan negara yang memiliki tujuan melalui posisinya hanya untuk memperkaya diri.

Selanjutnya ditegaskan bahwa ada sejumlah konsekuensi dari praktek korupsi di Indionesia, di antaranya:

> *First, corruption imposed a high burden in business transactions, since virtually all transactions with government bureaucrats require huge illicit payments (Robertson-Snape 2000).*
>
> *Second, corruption is also has a huge impact on the culture of Indonesians. It becomes a norm right now that any dealings between citizens and government officials have to be sealed with payment of bribes (Robertson-Snape 2000).*
>
> *Third, corruption has destroyed confidence among citizens toward government officials and bureaucrats, which has reduced their authority among citizens.*
>
> *Finally, corruption has been blamed as one of the cause of social grievances that are widespread in many part of Indonesia that if not being addressed immediately, could bring the Indonesian state to the brink of collapse.*

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi sangat berdampak kepada perusakan kehidupan ekonomi, budaya, pribadi dan sosial. Artinya, korupsi dapat menghancurkan kehidupan individual, masyarakat dan bangsa.

Untuk mengatasi korupsi Arifianto, A., di antaranya 1) mengurangi peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi, 2) membuat hukum anti-korupsi dan menerapkannya secara konsekuen, 3) melakukan reformasi rekrutmen pegawai dan sistem promosi, 4) meningkatkan gaji pegawai dan menyesuaikan gaji yang diberikan dengan pegawai swasta, 5) meningkatkan pengawasan terhadap korupsi secara independen, dan 6) mengorganisasikan pengurangan korupsi jangka panjang yang harus diikuti dengan *political will* yang kuat. Menurut hemat penulis, di antara enam usulan tersebut, usulan no. 3, 5, dan 6 dapat ditem-

puh dengan meningkatkan efektivitas pendidikan, lebih khususnya lagi pendidikan Islam baik, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.

Komponen Pendidikan Islam Dikaitkan dengan Korupsi

Menyadari atas kemungkinan belum efektifnya peran agama dalam membangun masyarakat bersih, maka pendidikan Islam diharapkan dapat dipandang sebagai salah satu strategi yang paling efektif dalam menangani perilaku korupsi kini dan mendatang, terutama dalam penangkalan atau pencegahan. Pendidikan Islam yang komprehensi dan utuh diyakini akan mampu menghasilkan individu bertaqwa (Imam Al-Gazali) atau *insan kamil* (Muhammad Iqbal), yang pada gilirannya mereka tidak hanya mampu mengangkat derajatnya sendiri, melainkan juga derajat dan martabat umat, bahkan masyarakat lain dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Dengan demikian pendidikan Islam tidak hanya menjadikan individu pintar saja, melainkan juga terampil dan bermoral (utuh).

Di antara materi-materi pendidikan Islam, fokus penanganan korupsi seharusnya lebih diarahkan pada pendalaman dan penanam *aqidah,* di samping peningkatan penguasaan dan pemilikan *akhlaqul karimah*. Dengan penguasaan *aqidah,* setiap peserta didik dalam gerak perilakunya lebih dikendalikan dan dibimbing oleh spirit ketauhidan. Dengan demikian terhindar dari *ilah-ilah* lainnya, yang pada akhirnya dapat terhindar dari segala bentuk perilaku korupsi, karena jiwa kejujuran (*shidiq)* telah terinternalisasi dalam dirinya.

Selain daripada itu pengkondisian akhlaqul karimah bagi setiap individu sangat penting dan strategis, karena pemilikan akhlaq mulia dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan diri dan orang lain, baik dalam bentuk korupsi kecil (berupa korupsi waktu) sampai ke bentuk korupsi besar (berupa korupsi uang, jabatan, dan sebagainya).

Proses pendidikan Islam yang efektif memungkinkan semua aktivitas pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan baik, tanpa terkontaminasi oleh perilaku-perilaku tak terpuji. Karena boleh jadi setiap peserta didik dalam meraih keberhasilannya, tanpa mempedulikan etika, sehingga dia menghalalkan segala cara. Akibat dari kondisi ini, maka terjadilah *plagiat.* Perilaku-perilaku tak terpuji ini seharusnya dibrantas sedini mungkin, sehingga tidak sampai mempribadi.

Guru sebagai faktor kunci dalam mengantarkan keberhasilan pendidikan setiap individu tidak bisa diabaikan perannya dalam penanganan korupsi. Guru akan mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi penanganan korupsi, jika guru mampu menunjukkan keteladanan dalam bersikap, berpikir, berbicara dan bertindak selama proses pendidikan. Ada beberapa hal yang

dapat dilakukan oleh guru, di antaranya: guru hendaknya jujur dalam berpendapat, mana pendapat orang lain dan mana pendapat sendiri, guru hendaknya menunjukkan disiplin dalam memanaj waktu belajar sehingga tidak terjadi korupsi waktu, dan sebagainya.

Akhirnya, penggunaan sistem evaluasi pendidikan Islam baik sebagai mata pelajaran maupun institusi perlu dikembangkan secara efektif. Penggunaan sistem evaluasi pendidikan Islam yang tepat akan mampu menghindarkan diri dari perilaku korupsi. Misalnya, pendidikan Islam yang hanya difokuskan pada aspek kognitif, kemungkinan besar akan mendorong peserta didik untuk meraih pencapaian skor tertinggi tanpa memperdulikan caranya, termasuk dengan *cheating*. Budaya *cheating* pada hakekatnya mengkondisikan anak untuk berbuat korupsi. Ironisya, kebiasaan tak terpuji ini ternyata berimbas sampai pada perilaku dewasa, ketika melanjutkan ke perguruan tinggi, sampai dengan saat memperebutkan dunia kerja.

Penutup

Pada hakekatnya korupsi di Indonesia sudah menggurita, dari hari ke hari semakin kompleks, sehingga membutuhkan kemampuan dan keterampilan yang lebih untuk memberantasnya. Banyak strategi telah ditawarkan, namun menurut hemat penulis, insya Allah strategi pendidikan Islam diyakini memiliki efektivitas yang sangat tinggi, jika diterapkan secara konsiten dan komprehensif. Namun demikian tidak bisa dipungkiri, bahwa memberantas korupsi tidak akan pernah berhasil, jika perilaku korupsi itu sudah menjangkau pada dimensi-dimensi yang meluas, terutama korupsi aqidah, etika, dan hukum Islam. Semoga dengan melakukan kajian ini hidup kita semakin terjaga dari kecenderungan berperilaku koruptif.

Tulisan ini dibahas dalam Pengajian I'tikaf Ramadlan XXIII (PIR XIII) di Pondok Pesantren Budi Mulia, pada 30 Oktober 2005.

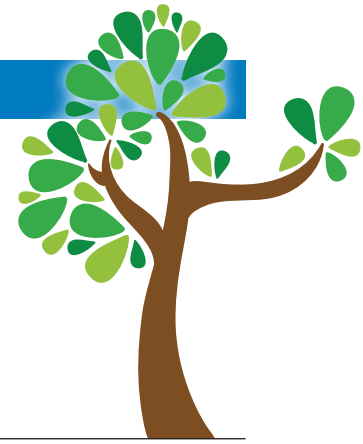

Posisi Pendidikan Agama dalam UU Sisdiknas

Pengantar

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah dikembangkan dari masa ke masa. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukungnya dalam setiap implementasinya dalam rangka membangun manusia Indonesia yang lebih bermartabat, sehingga kualitas warga negara dan masyarakat Indonesia semakin meningkat Namun apa yang nampak secara terbuka di sekitar kita bahwa kondisi bangsa Indonesia tetap masih dalam keadaan terpuruk, yang diindikasikan dengan perilaku amoral semakin merajalela yang mengena warga Indonesia, baik secara individual maupun kolektif, tanpa mengenal umur, tingkat pendidikan, status sosial, tempat tinggal, dan sebagainya.

Menyadari akan kondisi riil tersebut, bukan tanpa sebab, melainkan tanpa banyak diragukan oleh kebanyakan orang bahwa Sisdidnas belum berfungsi dan berperan efektif dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang bermutu, termasuk di dalamnya yaitu berakhlaq terpuji. Bahkan kalau diakui secara jujur, maka pendidikan agama yang telah diberikan dari TK hingga PT belum menunjukkan hasil dan dampak yang positif secara berarti. Hal ini boleh jadi disebabkan pula oleh posisi pendidikan agama belum strategis. Pendidikan agama belum memberi materi yang relevan, proses pendidikan (terutama pembelajarannya) belum kondusif, dan evaluasi pendidikan belum menyeluruh.

Bertitik tolak dari kondisi itulah maka pada bahasan berikut akan dikupas lebih detail berbagai aspek yang menurut hemat penulis sangat penting untuk dikritisi.

Kontroversi Pendidikan Agama dalam RUUSPN

Adalah tidak dapat dipungkiri bahwa dari sekitar 78 pasal RUUSPN, pasal yang menyangkut pendidikan agama mendapat sorotan yang paling banyak.

Sorotan itu berkisar antara pro-kontra pendidikan agama, sehingga menimbulkan kontroversi yang tiada henti. Kedua belah pihak memiliki alasan yang didukung oleh argumentasinya sendiri. Pihak yang pro menegaskan bahwa hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya dan diajar oleh pendidik yang seagama merupakan hak asasi yang harus dilindungi dan pendidikan agama merupakan sub sistem pendidikan nasional yang secara fungsional berguna untuk membentuk individu dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa. Sebaliknya pihak yang kontra menegaskan bahwa pendidikan agama bukanlah menjadi tanggung jawab sekolah, melainkan tanggung jawab orangtua. Pemerintah tidak memiliki hak untuk intervensi terhadap kehidupan agama seseorang.

Pada dasarnya kontroversi pendidikan agama bukanlah suatu yang baru dan ada di tanah air saja, melainkan juga sudah terjadi lama dan ada di manamana. Misalnya yang dapat kita lihat tentang kontroversi *"Seharusnyakah Pendidikan Agama, Moral, Etika, atau Nilai Menjadi Tanggung Jawab Sekolah* (Webb, L. Dean, Metha, Arlene, and Jondan, K. Forbis, (1995), *Foundations of American Education, Second Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.).* Untuk lebih jelasnya kontroversi tersebut dapat dicermati sebagai berikut.

ALASAN YANG PRO	ALASAN YANG MENOLAK
1. Pengajaran Nilai atau Agama bukanlah suatu fenomena baru dan mengikuti pemikir dan ahli terdahulu, seperti Plato, Aristoteles, Dewey, dan Piaget yang mengaitkan nilai dengan perkembangan kognitif, yang memiliki suatu tempat di ruang kelas. 2. Guru-guru dapat berperan sebagai suatu model nilai yang penting untuk para siswanya. 3. Diskusi dilemma moral mengintegrasikan berpikir kritis dan etika, yang mengembangkan keterampilan penalaran moral. 4. Sekolah adalah tempat yang terbaik untuk membantu siswa dalam memahami sikap, preferensi, dan nilainya sendiri. Peranan sekolah adalah membantu siswa dalam menseleksi nilai, sehingga mereka dapat hidup dengan nilai-nilainya. 5. Siswa seharusnya menjadi mahir dalam prinsip-prinsip berpikir tentang moralitas sebagaimana kita mengharapkannya di bidang sain dan ilmu-ilmu sosial.	1. Pengajaran Nilai atau Agama bukanlah bidang garapan sekolah, tapi bidang garapan keluarga dan tempat ibadah (gereja/masjid/dll). 2. Terlalu banyak guru memberikan pelajaran/kuliah siswa/ mahasiswanya tentang pentingnya nilai-nilai "yang cocok" tertentu tanpa mendemonstrasikan nilai-nilai itu melalui tindakan atau perilakunya. 3. Tidak ada individu yang "tanpa nilai *(valueless)"* demikian pula semua guru, karena posisinya, memiliki potensi untuk mendesakkan nilai-nilainya kepada siswanya. 4. Fungsi sekolah adalah mendidik, bukan menarik masuk ke agama atau mengindoktrinasi, karena itu pendidikan moral dan pendidikan nilai bukan bagian dari kegiatan kelas.

Walaupun ada pro-kontra tentang pendidikan agama di sekolah, tetapi kita harus menentukan pilihan mana yang tepat, dengan mempertimbangkan dasar hukum dan kondisi sosial-budaya bangsa Indonesia dewasa ini dan saat mendatang. Kita meyakini benar bahwa bangsa Indonesia secara ideal berlandaskan Pancasila yang diawali dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa.

Demikian juga berdasarkan landasan konstitusional, UUD 1945 pada pasal 31 ayat (3) yang berbunyi bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Setidak-tidaknya bertitik tolak dari kedua landasan tersebut dapat ditegaskan bahwa pendidikan agama di lingkungan lembaga pendidikan formal merupakan suatu keniscayaan. Dengan demikian pendidikan agama adalah suatu keharusan *(as a must)* atau *conditio sain quanon.*

Pentingnya Pendidikan Agama

Pendidikan agama perlu sekali ditegakkan melalui RUUSPN pasal 13, ayat 1a, paling tidak ada beberapa alasan. *Pertama,* pendidikan agama secara konseptual merupakan konsekuensi logis dari filosofi pendidikan yang dipilih dan wujud individu yang dicita-citakan. Dalam melakukan inovasi pendidikan, Arthur K. Ellis dan Jeffrey T. Fouts (1993) menegaskan bahwa ketiga riset (Riset #1, #2, dan #3) harus menunjukkan konsistensi. Yang dimaksud ketiga riset tersebut, yaitu di antaranya: Riset #1 merupakan riset murni yang diorientasikan untuk merumuskan individu yang dicita-citakan, Riset #2 merupakan riset terapan yang diorientasikan untuk menghasilkan sistem pendidikan, dan Riset #3 menunjukkan.riset terapan yang diorientasikan untuk menghasilkan operasional pendidikan. Dengan demikian bahwa tidaklah mungkin kita dapat mewujudkan insan yang beriman, bertaqwa, dan berakhlaq mulia, kalau tidak ada sistem pendidikan yang menjamin adanya pendidikan agama, serta pelaksanaan pendidikan agama yang utuh.

Kedua, pendidikan agama secara legal formal, merupakan tuntutan dalam merealisasikan UUD 1945 pasal 31, ayat 3. yang berbunyi bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa...

Ketiga, pendidikan agama secara HAM, menekankan bahwa untuk setiap anak didik dijamin keberlangsungan kehidupan agamanya oleh beberapa Konvensi Internasional, sehingga tak ada alasan sedikitpun bagi setiap anak didik untuk dibebaskan dari pendidikan agama.

Keempat pendidikan agama wajib diberikan oleh guru yang seagama, karena kehidupan beragama tidaklah mungkin dapat dibentuk hanya melalui transfer pengetahuan agama saja, melainkan sangat dibutuhkan transfer nilai dan transformasi perilaku beragama. Kondisi yang demikian hanya akan dapat dijangkau oleh guru seagama yang mampu mendemonstrasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Kelima, pendidikan agama di sekolah memberikan jaminan terjadinya transformasi nilai-nilai agama secara kontinyu dalam perjalanan kehidupan beragama bagi setiap individu.

Format Pendidikan Agama

Untuk menjamin efektivitas pendidikan agama, pendidikan agama dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. *Pertama,* pendidikan agama dilakukan melalui pembelajaran agama yang lebih menekankan pada penguasaan pengetahuan ilmu agama. *Kedua,* pendidikan agama dilakukan melalui *learning by doing* yang memungkinkan peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan amaliah keagamaan. *Ketiga,* pendidikan agama dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan keorganisasian terutama dalam kegiatan dakwah dan *muamalah*. *Keempat,* pendidikan agama dapat dilakukan melalui kegiatan kajian kritis terhadap ajaran agama, sehingga dapat meningkatkan dan memantapkan keimanan dan ketaqwaannya. *Kelima,* pendidikan agama dapat dilakukan melalui media informasi baik secara tertulis maupun visual. *Keenam,* pendidikan agama dapat dilakukan melalui media bidang studi lainnya. Ketujuh, pendidikan agama dapat dilakukan melalui kegiatan ekstra-kurikuler.

Menyadari akan berbagai kemungkinan wujud pendidikan agama, maka pendidik (guru) agama dapat menentukan pilihannya, mana wujud pendidikan agama yang relevan sangat terkait dengan konteksnya. Dengan begitu, pendidik (guru) agama dituntut kreativitas dan keberanian moralnya untuk menentukan dan menerapkan langkah secara efektif dan kritis dalam menerapkan pendidikan agama. Dalam kondisi yang demikian pendidik (guru) agama perlu terus menyesuaikan materi dan strategi yang relevan dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik.

Sistem Pendidikan Agama: Sebuah Harapan

Pendidikan agama yang terjadi di lapangan sangatlah variatif, dari pendekatan pendidikan agama yang minimal sampai yang optimal. Sayangnya yang mendekati optimal masih sedikit sekali proporsinya, terutama yang menjadikan pendidikan agama sebagai penyerta, bahkan andalan utama dalam proses pendidikan di institusinya, sebagaimana yang tergambarkan pada sejumlah

kecil sekolah Islam terpadu, sekolah Muhammadiyah, dan sekolah Maarif. Di sekolah-sekolah negeri yang ada di daerah tertentu juga memungkinkan pendidikan agama dapat dilaksanakan lebih optimal.

Untuk mengoptimalkan pendidikan agama di sejumlah sekolah tersebut di atas, sehingga dapat memenuhi harapan semua *stakeholder,* terutama para peserta didik, maka dapat dilakukan berbagai cara, di antaranya:

1. Mengembangkan materi pendidikan agama yang berdiferensiasi, yang disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan minat peserta didik, sehingga materinya memiliki relevansi yang tinggi.
2. Menambah waktu pelajaran untuk pendidikan agama dan meningkatan efektivitas penggunaannya.
3. Mengembangkan program ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang relevan, baik melalui pemberian tugas di luar sekolah untuk memperkaya materi yang telah diberikan di sekolah, maupun mengadakan kegiatan pesantren kilat atau bakti sosial ke daerah-daerah tertentu.
4. Memberikan keteladanan beragama bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah sebagai bagian penting selama proses pendidikan.
5. Menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang pendalaman pendidikan agama dan pengamalan agamanya.
6. Menciptakan lingkungan fisik dan non-fisik yang kondusif bagi pencapaian keberhasilan proses pendidikan agama.
7. Menerapkan dan mengembangkan sistem penilaian pendidikan agama yang komprehensif dan menempatkan pendidikan agama sebagai variabel terpenting dalam penentuan keberhasilan peserta didik dalam proses pendidikannya.
8. Melibatkan guru seagama di luar guru agama dalam berbagai kegiatan di sekolah untuk penanam ajaran agama, baik melalui partisipasi langsung dalam kegiatan yang dirancang untuk penanaman nilai-nilai agama, maupun melalui contoh berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari di sekolah atau dan di luar sekolah.
9. Membangun kerjasama fungsional dan harmonis antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan agama.

Implikasi Pendidikan Agama

Implementasi pendidikan agama yang berdasarkan RUUSPN memiliki sejumlah implikasi, di antaranya: *Pertama,* implikasi bagi sekolah, bahwa sekolah dalam menerapkan pendidikan agama seharusnya melakukan rekonstruksi,

termasuk penemuan paradigma baru pendidikan agama, baik yang berlaku di sekolah umum, institusi pendidikan agama maupun madrasah. Hal ini secara ideal sangatlah menjanjikan, bahkan potensial dapat membekali bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan. Namun tanpa didukung oleh SDM yang handal dan sistem yang mantap, upaya rekonstruksi apapun tak akan berarti.

Kedua, implikasi bagi sekolah Islam, bahwa sekolah yang di bawah yayasan agama Islam perlu lebih meningkatkan kualitas layanan pendidikannya, sehingga sekolah tersebut dapat melayani lebih banyak peserta didik yang beragama Islam. Dengan begitu pendidikan agamanya lebih terjamin. Memang untuk merealisasikannya tidaklah mudah, namun dengan segala keterbatasannya sekolah-sekolah Islam perlu terus memantapkan manajemen, up-grading tenaga kependidikan, dan rekrutmen tenaga baru lebih selektif.

Ketiga, implikasi bagi organisasi sosial keagamaan, bahwa peserta didik yang belajar di sekolah yang berada di bawah yayasan agama lain perlu terus dibantu pendidikan agamanya oleh individu atau organisasi sosial keagamaan secara proaktif, di samping oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah yang memang bertanggungjawab menfasilitasinya.

Keempat, implikasi bagi pendidik (guru) agama, bahwa untuk menjamin pilihan anak dalam beragama, pendidik (guru) agama perlu mempertimbangkan materi dan cara yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga dapat dihindari adanya konflik internal.

Kelima, implikasi bagi orangtua, bahwa untuk keberhasilan pendidikan agama orangtua bertanggungjawab untuk menjadi *uswah hasanah* dalam beragama di rumah dan menciptakan lingkungan dan iklim yang kondusif bagi kehidupan beragama anaknya.

Keenam, implikasi bagi manajemen pendidikan agama, bahwa untuk dapat menghindari reduksi pendidikan agama, maka pelaksanaan pendidikan agama tidaklah cukup hanya mengandalkan kegiatan pengajaran agama. Jika kondisi ini tidak dikendalikan, maka tidak menutup kemungkinan dapat terjadi praktek "kemurtadan" secara terselubung, misalnya peserta didik mengambil paket pendidikan agama lainnya hanya untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi.

Ketujuh, implikasi bagi masyarakat, bahwa pendidikan agama akan meraih keberhasilan yang berarti, manakala masyarakat memberikan dukungan positif melalui penciptaan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya, masyarakat mampu memerankan dirinya dalam menyaring budaya asing yang destruktif, yang sangat membahayakan moral peserta didik. Jika masyarakat belum mampu memerankan dirinya secara efektif, maka sangatlah sulit kita dapat mengklaim keberhasilan pendidikan agama, karena peserta menghadapi *double parameter.*

Penutup

Demikian beberapa pokok pikiran yang diharapkan dapat membantu pembaca dalam mengkritisi posisi Pendidikan Agama dalam UUSPN. Memilih dalam menghadapi suatu kontroversi merupakan suatu tuntutan, namun tidak hanya sekedar memilih, karena harus didukung dengan argumentasi yang diyakini dapat dipertanggungjawabkan.

Bertitik tolak dari kesadaran ini, mudah-mudahan kontroversi diharapkan dapat memberikan hikmah yang sebanyak-banyaknya, terutama bagi pihak yang pro, sehingga dalam implementasinya nanti dapat memperkokoh toleransi beragama, bukan sebaliknya.

Tulisan ini dibahas dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh HMJ-PAI, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, di Surabaya pada 8 Mei 2003.

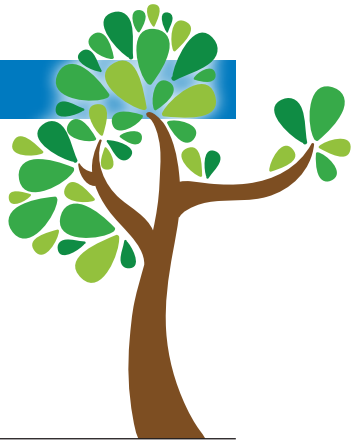

Rekonstruksi Peran Pendidikan Agama dalam Membangun Masyarakat Humanis dan Pluralis

Pengantar

Pendidikan agama secara konvensional berfungsi untuk menjadikan anak beriman dan bertaqwa, serta berakhlaq mulia, sehingga dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dengah penuh kedamaian dan kebahagiaan, tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Dengan kata lain bahwa pendidikan agama dapat membantu peserta didik dalam membangun masyarakat agamis. Masyarakat agamis pada dasarnya memiliki pengertian luas, namun sering kali dipahami dengan pengertian terbatas, sehingga masyarakat agamis hanya menggambarkan masyarakat yang hanya menunjukkan ketaatan dalam menjalankan ritual-ritual agama saja.

Menyadari akan reduksi pengertian masyarakat agamis, maka diangkat berbagai konsep lain, di antaranya yaitu masyarakat humanis dan pluralis, yang merupakan bagian penting dari yang dicita-citakan oleh sistem pendidikan nasional. Masyarakat humanis dan pluralis diharapkan dapat merupakan suatu terminologi yang mampu menggambarkan lebih jelas tentang wujud masyarakat yang diobsesikan, terutama dikaitkan dengan konteks kehidupan dewasa ini.

Walaupun diakui bahwa pendidikan agama belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsinya untuk membangun masyarakat yang taat akan ajaran agamanya, pendidikan agama diharapkan mampu memerankan dirinya dalam membangun masyarakat humanis dan pluralis.

Masyarakat Humanis dan Pluralis

Untuk dapat menghindarkan diri dari pengertian yang berseberangan, maka dianggap sangat perlu merumuskan apa yang dimaksudkan dengan masyarakat humanis dan pluralis. Masyarakat humanis adalah masyarakat yang

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki segala potensi diri yang unik, baik yang menyangkut aspek fisik, mental, sosial, maupun spiritual.

Pada dasarnya manusia dapat diturunkan dari insan. Ali Syariati (Ma'allim, 2003), memahami insan dikaitkan dengan *basyar*, menegaskan bahwa insan memiliki arti lebih dekat dengan keunggulan dan keluhuran nilai-nilai kemanusiaan (*becoming*), sebaliknya basyar lebih dekat dengan arti yang berkaitan dengan persoalan manusia sebagai makhluk bilogi (*being*).

Sementara itu Said Aqil dan Quraish Shihab (1992) (menegaskan bahwa insan secara *lughawi* berarti harmoni, akrab, atau intim, sehingga manusia diidealkan untuk selalu menjaga keharmonisan hidup. Dengan demikian masyarakat humanis dapat dipahami sebagai masyarakat yang benar-benar menjunjung tinggi dan mengapresiasi secara tulus harkat manusia dan fitrah manusia dengan segala sifatnya yang unik – baik hamba Allah maupun khalifah di atas bumi, sehingga terwujud keharmonisan hidup.

Masyarakat pluralis pada hakekatnya secara sekilas dapat diartikan sebagai masyarakat yang plural atau beragam, namun dalam konteks ini dipahami sebagai masyarakat yang menghargai keberagaman anggota masyarakat lain yang memeluk agama lain. Keberagaman bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan seharusnya dihadapi secara bijak. Allah berfirman:"Jika Tuhanmu menghendaki, maka tentunya semua manusia yang ada di muka bumi ini akan beriman! Maka apakah kamu hendak memaksa manusia, di luar kesediaan mereka sendiri, untuk beriman."(QS 10:99).

Setelah mengikuti uraian tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa masyarakat humanis dan pluralis merupakan masyarakat yang secara fenomenal kita hadapi dewasa ini terutama dalam era demokrasi dan global.

Mengapa Perlu Rekonstruksi Peran Pendidikan Agama

Pendidikan agama pada kenyataannya masih jauh dari apa yang diidealkan, yaitu mampu menghasilkan masyarakat yang religius. Hal ini dibuktikan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam ternyata secara moral dan manusiawi belum mampu menunjukkan perilaku yang menunjang kedamaian, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Masih banyak perilaku-perilaku yang mengganggu dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Bahkan tidak sering kita dengar bahwa krisis multidimensional yang dihadapi bangsa Indonesia bertumpu sekali pada krisis moral bangsa, baik secara individual maupun kolektif.

Yang sangat penting bahwa dewasa ini eksistensi pendidikan agama dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan menjadi sorotan tajam para tokoh agama. Memang hal ini bukan isu nasional saja, melainkan isu global yang juga dirasa-

kan oleh bangsa-bangsa lain. Berdasarkan landasan legal-formal, sosiologis, pedagogis, dan psikologis, maka pendidikan agama menurut hemat penulis merupakan "suatu keharusan" (*a must*), bukan lagi pilihan.

Menyadari akan kondisi objektif tersebut, pendidikan agama sebagai sub sistem pendidikan nasional, secara langsung maupun tidak langsung perlu melakukan rekonstruksi peran pendidikan agama, dengan harapan kehadiran pendidikan agama di kemudian hari menjadi lebih strategis dalam ikut serta membangun masyarakat Indonesia, terutama masyarakat humanis dan pluralis.

Substansi Pendidikan Agama

Dengan tanpa mengabaikan arti substansi pendidikan agama selama ini, substansi pendidikan agama lebih bersifat parsial dan bernunsa kognitif (termasuk substansi aqidah, ibadah, akhlak) sehingga sangatlah wajar jika terjadi reduksi terhadap eksistensi pendidikan agama. Aspek-aspek pendidikan agama tersebut memang penting, namun untuk dapat menjadikan pendidikan agama lebih berarti dan kontributif, maka substansinya perlu diformulasikan sekomprehensif mungkin, sehingga perlu dikembangkan aspek lainnya, yaitu aspek amaliah yang bermakna, baik bersifat personal maupun sosial.

Selain daripada itu, substansi perlu dikembangkan berdasarkan tugas perkembangan dan kebutuhan peserta didik, sehingga pendidikan agama benar-benar dapat membantu setiap peserta didik dalam mengembangkan dirinya secara optimal. Sangatlah mungkin bahwa substansi yang dibuat dan dikembangkan kelompok siswa yang satu dan lainnya berbeda, sehingga diperlukan modifikasi atau penyesuaian materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Perlakuan semacam ini merupakan perwujudan apresiasi terhadap keberadaan peserta didik yang memiliki keragaman.

Proses Pendidikan Agama

Proses pendidikan agama selama ini cenderung masih dibatasi oleh program kurikuler secara tertulis dan dibatasi pada empat dinding. Padahal untuk menjadikan pendidikan agama yang fungsional, pendidikan agama seharusnya dikembangkan berdasarkan baik program kurikuler, kokurikuler, maupun ekstra-kurikuler. Demikian juga program pendidikannya dapat dirumuskan baik secara tertulis, maupun tidak tertulis *(hidden curriculum).* Proses pendidikan agama yang selama ini hanya bergantung melalui aktivitas pengajaran, maka untuk efektifnya perlu dikembangkan melalui aktivitas pendidikan, sehingga kegiatan pendidikan agama seharusnya dapat juga berlangsung di luar dinding kelas.

Aktivitas pendidikan agama yang selama ini lebih menuntut kegiatan intelektual, maka untuk dapat meningkatkan efektivitasnya, kegiatan pendidikan agama seharusnya diwarnai kegiatan lainnya, termasuk praktek beribadah dan *muamalah* dengan cara yang bijak, sebagai wujud pengembangan aspek personal dan sosial peserta didik, karena kedua aspek tersebut sangatlah penting dalam kehidupan setiap inividu di tengah-tengah masyarakat. Bahkan lebih jauh lagi manfaat dari proses yang demikian itu akan mendukung terbangunnya masyarakat humanis dan pluralis.

Penilaian Pendidikan Agama

Adalah tidak diragukan, bahwa penilaian yang dilakukan untuk pendidikan agama cenderung lebih mengandalkan pada penilaian kognitif. Itu pun kadang-kadang juga masih dilakukan modifikasi. Padhal untuk idealnya, penilaian yang semacam itu belumlah cukup, bahkan jauh dari ideal. Sesuai dengan hakekat pendidikan agama, yang menjadi targetnya bukanlah aspek kognitif saja, melainkan totalitas dari semua aspek, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jika demikian maka penilaian seharusnya dilakukan terhadap semua aspek dengan menempatkan pengamalan menjadi aspek yang penting dan menentukan. Dengan kata lain keberhasilan dan kegagalan pendidikan agama sangatlah bertumpu pada pengamalan agama peserta didik.

Bahkan lebih jauh dari itu, apabila pendidikan agama sebagai kunci dari bidang studi lainnya dalam setiap satuan pendidikan, maka penilaian agama seharusnya diakukan lebih berhati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun akademik. Namun yang menjadi persoalan adalah tidak jarang pendidikan agama justru dipakai sebagai "*back up*" pendidikan yang sulit dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa pendidikan agama hanya dipakai untuk legalisasi yang lainnya, bahkan untuk kepentingan dakwah. Praktek-praktek pendidikan yang demikianlah yang sebenarnya menyulitkan siapapun yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan agama. Menyadari akan kondisi objektif pelaksanaan pendidikan agama di lapangan, yang paling esensial adalah semuanya itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berorientasi kepada apresiasi yang proporsional terhadap eksistensi peserta didik, sehingga mereka akan siap menjadi anggota masyarakat yang bermartabat dan *wel-adapted.*

Implikasi Rekonstruksi Peran Pendidikan Agama

Rekonstruksi peran pendidikan agama yang kita bangun pada dasarnya memiliki banyak implikasi. *Pertama,* implikasi bagi institusi. Institusi pendidikan apapun seharusnya memiliki komitmen yang sama untuk menempatkan

pendidikan agama sebagai subsistem yang menentukan dalam mengembangkan peserta didik secara utuh, sehingga semua komponen pendidikan dalam suatu institusi pendidikan harus memiliki hubungan interkatif-fungsional.

Kedua, implikasi bagi personil pendidikan (tenaga kependidikan dan non kependidikan). Semua personal pendidikan perlu memiliki bahasa yang sama dalam implementasi pendidikan agama, terlebih-lebih guru agama dan kepala sekolah. Mereka harus menjadi model yang bertanggungjawab bagi transfer dan transformasi nilai-nilai agama. Dengan demikian tuntutan keprofesionalan terhadap kehadiran guru agama merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan.

Ketiga, implikasi bagi peran orangtua dan masyarakat. Orangtua dan masyarakat (tokoh masyarakat) memiliki tanggung jawab yang sama dalam menentukan keberhasilan pendidikan agama, sehingga kerjasama yang baik, harmonis, dan fungsional antara orangtua dan masyarakat dengan sekolah sangat diharapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan dukungan orangtua dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial dan kultural yang kondusif bagi kehidupan beragama.

Penutup

Demikianlah pokok-pokok pikiran yang dapat dikemukakan sebagai pemicu untuk mengembangkan diskusi tentang rekonstruksi peran pendidikan agama dalam membangun masyarakat humanis dan pluralis.

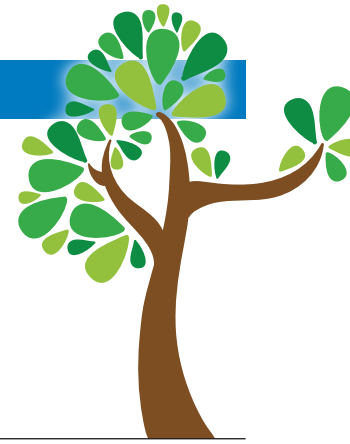

Politik Pendidikan Agama dalam RUU Sisdiknas

Pengantar

Pada awal kelahiran RUU Sisdiknas tidak menarik banyak orang, walaupun Naskah Akademik dan RUU Sisdiknas sendiri pernah dipublikasikan lewat Harian Kompas dan dibahas konsep Naskah Akademik dan RUU Sisdiknas di berbagai wilayah Indonesia, di antaranya: untuk Wilayah Barat Indonesia diselenggarakan di Bogor, Wilayah Tengah di Yogyakarta, dan Wilayah Timur di Mataram dan Surabaya. Namun apa yang terjadi selanjutnya, kontroversi terhadap pasal yang menyangkut pendidikan agama semakin memuncak, bahkan telah didramatisir sedemikian rupa, sehingga seakan-akan kondisi tersebut dapat mengancam keutuhan NKRI.

Menyadari reaksi yang begitu keras, maka dapat dipahami bahwa pendidikan agama telah masuk ke dalam lingkaran politik, bahkan telah dijadikan "taruhan" dalam lobi tingkat tinggi oleh para elite. Kondisi yang demikian sungguh berlebihan, walaupun sulit untuk dihindari. Dikatakan sangat berlebihan, karena sikap yang muncul kadang-kadang mengabaikan "citra" pendidikan agama, yang seharusnya dihadapi dengan bertumpu pada pertimbangan moral.

Dengan tetap menghargai eksistensi yang kontra, maka perlu dipahami bahwa Pendidikan Agama dalam RUU Sisdiknas memiliki rasional dan implikasi yang tidak dapat diabaikan. Tentu saja semuanya sangat terbuka untuk dikritisi. Agar sikap kita lebih proporsional terhadap substansi Pendidikan Agama, maka selanjutnya akan dilakukan pembahan lebih intensif.

Pendidikan Agama merupakan Wilayah publik

Pada dasarnya penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia bila dikaitkan dengan keberadaan negara, pendidikan agama dapat merupakan *public good*, bukan *private good*. *Public good* dapat dipahami bahwa pemerintah (RI)

memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan agama di semua jenjang. Kedudukan pendidikan agama seperti ini juga terjadi di negara-negara Isalam, misalnya Mesir, Jordania, Libia, Kuwait, dan sebagainya, sebagaimana yang digambarkan dalam buku Education in the Islamic World.

Posisi pendidikan agama dalam konteks sistem pendidikan nasional diperkuat oleh Pancasila, terutama sila pertama, di samping sila-sila lainnya, juga pasal 31 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Artinya bahwa tidak ada alasan lebih mendasar yang dapat meniadakan substansi pendidikan yang memungkinkan dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Dengan demikian secara yuridis pendidikan agama merupakan suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Keinginan dan desakan dari manapun yang menghendaki ditiadakannya pendidikan agama pada berbagai jenjang pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang sangat bertentangan secara konstitusional.

Sementara itu di negara lain, pendidikan agama bisa merupakan *private goods*, sehingga pendidikan agama tidak harus dilaksanakan di sekolah atau dalam kendali pemerintah, serta pendidikan agama hanya dapat di-claim sebagai tanggung jawab orangtua dan atau masyarakat. Dalam kondisi ini pemerintah tidak memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelenggaraan pendidikan agama, tetapi keberadaannya bersifat suportif.

Setelah diperhatikan lebih mendalam, bahwa peran keluarga dan masyarakat memang penting bagi pendidikan agama seseorang, tetapi hal ini tidaklah berarti kita dapat menafikan kedudukan sekolah, karena kedudukan sekolah dalam pendidikan agama tidak hanya dijamin secara legal, melainkan juga didukung oleh landasan konseptual dan realitas sosio-kultural.

Kewenangan Negara terhadap penyelenggaraan Pendidikan Agama

Menyadari akan kedudukan pendidikan agama yang berada dalam wilayah publik, maka negara (baca: pemerintah) memiliki kewenangan untuk berbagai hal. *Pertama,* menentukan kebijakan makro pendidikan agama. Dalam konteks ini pemerintah tidaklah memiliki kebebasan yang tak terkendali dalam menentukan kebijakan, melainkan pemerintah dengan penuh rasa tanggung jawab dapat menentukan kebijakan pendidikan agama, terutama untuk jalur pendidikan formal dan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

Kedua, menentukan materi inti pendidikan agama. Dalam konteks ini pemerintah memiliki otoritas, di samping untuk menentukan materi inti pendi-

dikan agama, juga mengakomodasi materi pendidikan agama yang sesuai dengan dua *mainstream*, sehingga dapat membantu guru, apapun latar belakangnya, dalam memenuhi kebutuhan materi peserta didik. Selain itu pemerintah berwenang memfilter materi-materi pendidikan agama yang berpotensi untuk menyesatkan umat dan menimbulkan konflik antar kelompok di masyarakat.

Ketiga, mengendalikan sarana pendidikan agama. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa menutup mata akan keberadaan sarana pendidikan. Oleh karena itu pemerintah seharusnya selalu menilai dan menjaga kualitas sarana pendidikan agama, sehingga dapat terhindar dari upaya-upaya yang kontra produktif.

Keempat, memonitor pelaksanaan pendidikan agama. Pemerintah tidak bisa sama sekali membiarkan pendidikan agama berlangsung di sekolah tanpa di-monitoring. Karena itu untuk menjaga eksistensi pendidikan agama, kiranya perlu sekali melakukan monitoring pelaksanaan pendidikan agama, yang tetap diorientasikan untuk keberhasilan implementasi pendidikan agama, sehingga pelaksanaan pendidikan agama di sekolah dapat berlangsung seefektif dan seefisien mungkin.

Kelima, menjamin ketenagaan pendidikan agama. Dalam konteks ini pemerintah berwewenang untuk mengetahui kriteria dalam merekrut tenaga kependidikannya, sehingga terhindar dari permainan kurang terpuji. Pemerintah juga berwewenang untuk mengarahkan dan mendorong tenaga kependidikan untuk selalu meningkatkan keprofesionalan kita, seiring dengan visi penyelenggara pendidikan agama di kampus atau di luar

Setelah menyadari akan kewenangan pemerintah terhadap pendidikan agama, maka yang lebih penting adalah mengendalikan pemerintah dari kesewenangan dalam mengendalikan penyelenggaraan pendidikan agama di lapangan, karena hal semacam itu akan cenderung dapat membahayakan eksistensi pemerintah sendiri, di samping pihak lain.

Penyelenggaraan Pendidikan Agama oleh Negara: dalam Konteks Budaya-Politik

Menyadari akan kondisi objektif budaya dan kehidupan politik bangsa, maka penyelenggaraan pendidikan agama oleh negara harus mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama,* hindari konflik antar agama dan paham. Penyelenggaraan *pendidikan agama harus diproteksi* sedemikian rupa oleh pemerintah. Hal ini dilindungi Deklarasi Hak Orang-orang yang termasuk Bangsa atau suku bangsa, Agama, dan Bahasa Minoritas, yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 47/135, tertanggal 18 Desember 1992.

Kedua, **libatkan orangtua.** Walaupun sekolahnya sudah sangat maju dalam mengembangkan program pendidikan agama yang sesuai dengan kebutuh-

an, tetapi untuk mensukseskan pendidikan agama bagi anaknya, salah satunya adalah melibatkan orangtua, sehingga orangtua dapat berperan sebagai mitra yang strategis dalam mengembangkan pendidikan anaknya di sekolah. Orangtua wali yang sudah mapan didorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan gedung dan lebih penting berpartisipasi dalam persoalan pendidikan Agama.

Ketiga, **libatkan tokoh agama**. Dalam kehidupan beragama, tokoh agama – yang sering dikenal oleh banyak orang – perlu diberi "ruang khusus" untuk lebih memahami diri, di samping memberikan kesempatan secukupnya untuk *sharing* informasi. Selanjutnya bahwa ketokohan seseorang pada dasarnya tidak hanya diukur usia dan kesenioran, melainkan yang lebih penting adalah penampilan baca kitab kuning, seragam dinas, dan lainnya yang sesuai.

Keempat, **kemitraan sekolah dan tempat ibadah.** Dalam konteks ini, pendidikan agama untuk materi-materi tertentu perlu dicarikan tempat yang kondusif, misalnya tempat ibadah. Dengan demikian pendidikan agama bukan hanya difokuskan kepada realisasi sosial saja, melainkan dia juga seharusnya dikaitkan dengan idealisme.

Kelima, **penekanan pentingnya penilaian afektif dan amaliah.** Seiring dengan hakekat pendidikan agama, maka untuk melihat keberhasilan pendidikan agama, sangatlah perlu mempertimbangkan ranah afektif dan amaliah dalam mengevaluasinya, bahkan pada situasi tertentu dapat dijadikan penentu keberhasilan belajar seseorang, di samping ranah kognitif. Melakukan penilian afektif dan amaliah pada dasarnya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, melainkan membutuhkan keterampilan riil baik penguasaan substensi, maupun penguasaan metodologinya.

Penutup

Setelah melakukan kajian yang intensif, maka dapat dirumuskan bahwa posisi pendidikan agama dalam RUUSPN merupakan sub sistem yang tidak dapat dipisahkan, tetapi sekiranya pendidikan agama ditiadakan dari RUUSPN, maka sistem pendidikan nasional menjadi antropi. Dalam kondisi demikian maka pendidikan agama harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

Mudah-mudahan uraian singkat ini menjadi bahan trigger dalam sesi diskusi. Semoga ada manfaatnya.

Tulisan ini dibahas dalam Seminar dalam rangka Wisuda Sarjana Periode I tahun 2003 STAIN Ponorogo, pada tanggal 7 Juni 2003.

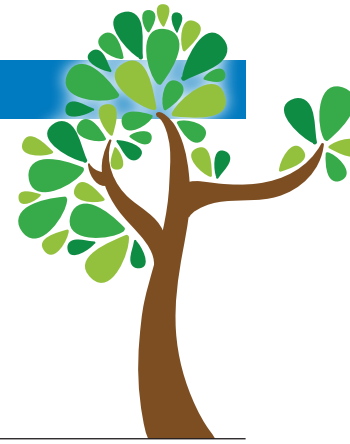

Pendidikan Karakter yang Efektif

DI MASA dulu, kini, dan mendatang, kita selalu merindukan perilaku yang terpuji *(akhlaq mahmudah),* namun pada kenyataannya justru kita tidak bisa menghindar dari praktek-praktek perilaku yang tercela *(akhlaq madzmumah). K*arena itulah sangat bisa dimaklumi dan dapat diterima dengan akal yang sehat dan hati yang bersih, jika Rasulullah saw tidaklah dibangkitkan di bumi ini, kecuali semata-mata untuk menyempurnakan akhlaq, karakter, kepribadian, atau perilaku kita. Menyadari akan kondisi ini kita sangatlah memerlukan kehadiran pendidikan akhlaq atau pendidikan karakter yang efektif.

Namun pada kenyataannya kita tidak selalu dapat melakukan pendidikan akhlaq atau pendidikan karakter. Untuk dapat melakukan pendidikan akhlaq atau pendidikan karakter, setidak-tidaknya kita dapat mengacu pada prinsip-prinsip implementasi pendidikan karakter.

Burret and Rusnak (1994) memperkenalkan 6 prinsip dalam memperbaiki implementasi pendidikan karakter di sekolah.

Pertama, pendidikan karakter seharusnya menjadi bagian dari mata pelajaran-mata pelajaran. Karena itu kurikulum pendidikan karakter tidak seharusnya dipisahkan dari mata pelajaran yang ada. Para guru didorong untuk mengimplementasikan topik-topik pendidikan karakter ke dalam rencana pembelajaran pada setiap harinya.

Kedua, sekolah dan masyarakat merupakan suatu partner vital dalam pengembangan karakter anak-anak. Di masa lalu, anggota masyarakat yang satu dan lainnya saling mengenal, bahkan di suatu lingkungan, desa atau kecamatan mereka saling tahu. Namun di saat ini, tidaklah mudah kita dapat temukan hubungan antar anggota masyarakat sebagaimana di masa lalu. Hal ini sangat bisa dimaklumi, karena mereka saling disibukkan oleh pekerjaan atau karier-

nya masing-masing, bahkan tidak jarang di antara mereka harus tugas keluar kota, sehingga membuat lebih jarang untuk saling bertemu. Untuk mendukung keberhasilan pendidikan karakter bagi anaknya, orangtua perlu dilibatkan dalam organisasi orangtua atau wali murid, bahkan sekali-sekali mereka diundang ke sekolah untuk *sharing* tentang keahlian, pekerjaan, atau pengalaman kerjanya di sekolah, baik di depan anak-anak maupun orangtua murid lainnya. Melalui kemitraan seperti ini, diharapkan dapat memudahkan implementasi pendidikan karakter bagi anaknya.

Ketiga, memberikan suatu lingkungan kelas yang positif untuk mendukung pendidikan karakter. Menciptakan lingkungan kelas yang positif dan kondusif merupakan hal yang sangat penting. Untuk hal ini anak-anak perlu dilibatkan dalam pembelajaran kooperatif, pembentukan kelompok belajar dalam melaksanakan tugas, dan mengupayakan aktivitas belajar dengan diskusi. Penciptaan iklim kelas yang menjamin rasa aman bagi setiap anak ketika belajar, merupakan sesuatu yang sangat positif dapat mendorong anak-anak untuk mengekspresikan idenya dengan mudah dan nyaman. Iklim seperti ini dapat mendorong anak untuk saling respek dalam belajar dan berinteraksi.

Keempat, memberdayakan guru dalam mengimplementasikan pendidikan karakter. Untuk mengimplementasikan pendidikan karakter yang baik sangat dibutuhkan suatu sikap positif dan komitmen guru dalam mengimplementasikan pendidikan karakter. Karena itu guru seharusnya dapat memberdayakan dirinya dengan melibatkan diri ke dalam suatu organisasi profesi, menunjukkan minat kuat dalam membaca jurnal hasil penelitian berkenaan dengan pendidikan karakter, berupaya membangun kedekatan dengan pimpinan sekolah dan orangtua untuk kesuksesan implementasi pendidikan karakter, dan mengundang orangtua ke sekolah untuk membicarakan tugas bersama dalam membangun karakter peserta didik.

Kelima, pendidikan karakter seharusnya didorong melalui kebijakan dan praktek administratif. Untuk menjamin keberhasilan implementasi pendidikan karakter, perlu dibuat suatu aturan atau kebijakan berkenaan dengan implementasi pendidikan karakter di sekolah. Selanjutnya pimpinan sekolah perlu menjadi teladan dalam implementasi aturan atau kebijakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Keenam, pendidikan karakter merupakan pendidikan yang bersifat tindakan. Artinya bahwa dalam pengembangan kurikulum pendidikan karakter, kiranya sangat dipandang perlu melibatkan anak-anak dalam diskusi, refleksi, dan tindakan berkenaan dengan nilai-nilai yang berharga dan moral. Dalam konteks ini anak-anak dapat dilibatkan dengan eksposing berbagai nilai-nilai yang ada melalui kegiatan bermain peran. Selanjutnya diupayakan ada sesi

untuk memberikan komentar-komentar baik terkait dengan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai yang baik, maupun yang kurang baik.

Setelah mencermati prinsip-prinsip tersebut, setidak-tidaknya ada tiga hal yang perlu menjadi renungan kita.

Pertama, bahwa implementasi pendidikan karakter tidak selalu harus diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran, karena pada prakteknya pendidikan karakter sangat diperlukan implementasinya dalam kurikulum terpisah, misalnya: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan.

Kedua, bahwa implementasi kurikulum pendidikan karakter tidaklah hanya bertumpu pada guru dan pimpinan sekolah semata, melainkan juga perlu melibatkan semua pihak yang ada di sekolah, misalnya staf administratif, teknisi, pustakawan, konselor, bahkan penjaga sekolah.

Terakhir, bahwa implementasi pendidikan karakter tidak bersifat parsial, melainkan seharusnya bersifat sistemik. Karena itu implementasi pendidikan karakter harus diupayakan sebagai suatu gerakan, sehingga diperlukan keterlibatan semua pihak dan unsur dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk masyarakat, massmedia, dan semua institusi pemerintah.

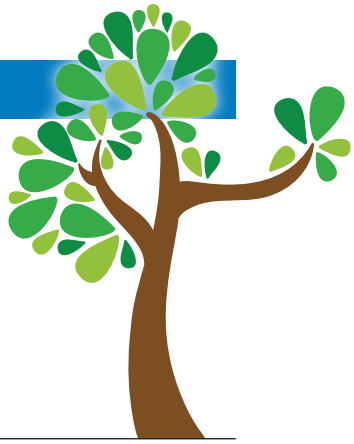

Riset Membangun Insan Berkarakter

RISET adalah satu misi utama kehadiran perguruan tinggi yang memiliki manfaat tidak hanya pengembangan keilmuan, perbaikan proses pendidikan, melainkan juga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat melalui diseminasi hasil-hasil riset yang relevan bagi kebutuhan masyarakat.

Riset di perguruan tinggi yang maju, terutama di universitas riset, diyakini sudah mampu menunjukkan eksistensinya secara fungsional, namun riset di perguruaan tinggi yang baru berdiri dan berkembang, riset baru memiliki kemanfaatan yang terbatas. Di manapun aktivitas riset itu dilakukan, sungguh diharapkan mampu menjadikan insan yang berkarakter.

Akhir-akhir ini di kalangan kaum terpelajar baik mahasiswa, dosen maupun ilmuwan masih ditemukan adanya praktek plagiasi. Suatu tindakan yang sungguh tercela dalam dunia akademik. Mengapa demikian, karena perilaku ini merefleksikan sikap ketidakjujuran dan mengambil hak orang lain tanpa seijin, tanpa sepengetahuan, dan tanpa mengakui keberaadaan pemilik sah ide yang diplagiasi.

Secara universial praktek plagiasi ditentang secara habis-habisan oleh publik secara keseluruhan, bukan hanya komunitas akademik saja. Mengapa demikian, plagiasi pada hakekatnya tidak hanya merugikan orang lain, melainkan juga merugikan dirinya sendiri, karena sanksi terhadap plagiasi tidak hanya sebatas terkait dengan sanksi akademik, melainkan yang jauh labih berat adalah sanksi sosial dan moral. Bahkan menjadikan plagiator menjadi terendahkan martabatnya.

Riset pada dasarnya membutuhkan dan melahirkan sikap ilmiah. Sikap ilmiah (wiki.answer.com) dapat diindikasikan di antaranya dengan sifat 1) memiliki rasa ingin tahu *(curious),* 2) logik dan sistematis, 3) terbuka *(open-minded),* 4) jujur secara intelektual *(intellectually honest),* 5) teguh *(persistent),* 6) kreatif

dan kritis, dan 7) rasional. Dengan begitu, penelitian tidak akan dapat memperoleh hasil yang baik, jika proses penelitian itu mengabaikan sikap ilmiah tersebut, demikian pula riset yang baik berkonsekuensi logis akan menghasilkan sikap ilmiah yang terpuji tersebut.

Bagaimana melakukan riset yang mampu menghasilkan insan berarakter? Ada beberapa upaya untuk melakukan riset penghasil insan berkarakter, di antaranya dalam perumusan masalah, penelusuran teori dan hasil riset terdahulu, pengembangan instrumen, pengolahan data, dan pembuatan laporan.

Pertama, dalam perumusan masalah, untuk menjamin tumbuhnya sikap ilmiah, perlu diupayakan perumusan masalah yang benar-benar orisinal. Jika masalahnya sama, setidak-tidaknya settingnya yang berbeda dengan riset terdahulu, misalnya subjeknya, tempat risetnya, dan variasi variabel penelitiannya yang terlibat.

Kedua, dalam penelusuran teori dan hasil riset terdahulu yang relevan perlu dilakukan secara jujur, sehingga terhindar dari praktek plagiasi teori dan hasil riset terdahulu. Dalam pengambilan teori dan hasil riset perlu dikemukakan sumber dan rujukan secara objektif. Untuk menjamin tumbuhnya sikap ilmiah perlu dibiasakan keterampilan mengutip secara benar sesuai dengan kaidah yang ada, di samping perlu dilakukan perumusan konsep baru yang dibangun melalui konvergensi di antara teori-teori yang ada dikaitkan dengan perspektif futuristik.

Ketiga, berkenaan dengan pengembangan instrumen, upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung terciptanya sikap ilmiah adalah mengembangkan instrumen baru sesuai dengan masalah yang diteliti dengan melakukan uji validasi instrumen sendiri, baik berkenaan dengan reliabilitas, validitas mapun usabilitas. Jika kita bisa menggunakan instrumen yang ada, maka untuk menjamin penelitian kita berkualitas, kita perlu mengadopsi instrumen terstandar dengan melakukan revalidasi sesuai dengan target penelitian dengan tetap menjelaskan dari mana instrumen itu diambil.

Keempat, berkenaan dengan pengolahan data, bahwa untuk menjamin tumbuhnya sikap ilmiah, maka perlu diawali dengan penanganan data secara objektif tanpa melakukan modifikasi yang melanggar kebenaran data. Untuk selanjutnya dalam pengolahan data perlu memilih teknik yang sesuai dengan masalah dan karakteristik datanya, serta jumlah subjek penelitian, dengan tetap mendasarkan pada rambu-rambu analisis data, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang sampai batas-batas tertentu dapat untuk kepentingan generalisasi.

Kelima, berkenaan dengan pembuatan laporan hasil penelitian, upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung terciptanya sikap ilmiah adalah membuat

laporan yang benar-benar orisinil, baik terkait dengan format yang terkait dengan paparan secara tekstual, maupun terkait dengan substansinya. Untuk itulah perlu dibiasakan pemaparan laporan dibuat dengan bahasa sendiri, termasuk melakukan parafrase terhadap kutipan yang daimbil dari pihak sumber lain. Demikian juga perlu diungkapan substansi yang benar-benar didasarkan atas fakta dan data empirik tanpa ada distorsi informasi, sehingga terbangun rumusan laporan yang benar-benar obyektif dan faktual yang didasarkan atas kejujuran.

Jika kita melakukan riset dengan menunjukkan komitmen yang tinggi dengan mengimplementasikan metodologi riset yang relevan secara kritis dan mengikuti nilai-nilai sikap ilmiah secara bertanggungjawab dalam setiap langkahnya, maka dapat diyakini, insya Allah riset memiliki kontribusi dalam pembangunan insan berkarakter.

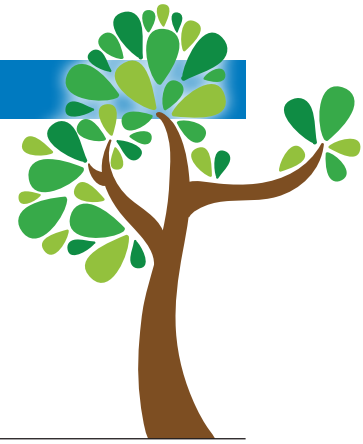

Strategi dan Implementasi Pendidikan Karakter di SMP

Pengantar

Setiap di antara kita sangat berharap terciptanya individu, sebagai orang yang baik *(good person)* dan warga negara yang baik *(good citizen),* bahkan masyarakat yang baik *(good community),* sehingga hidup penuh kedamaian. Namun apa yang terjadi dewasa ini di Indonesia, dan di dunia, masih banyak persoalan yang tidak bisa diabaikan, sehingga kita tidak bisa atau belum bisa menikmati kehidupan yang baik dan kehidupan yang penuh kedamaian.

Orang yang baik merupakan tujuan utama pendidikan. Oleh karenanya individu dan masyarakat yang baik seharusnya tetap menjadi tujuan dan harapan kita, sehingga kehidupan di dunia ini tidak sia-sia, melainkan kehidupan yang memberikan manfaat bagi semua dan kehidupan yang diridloi Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai itu, diperlukan suatu sistem pendidikan yang efektif dengan menempatkan aspek karakter yang baik sebagai indikator paling utama untuk menentukan keberhasilannya, bukan aspek kognitif. Dengan begitu pendidikan karakter bangsa menjadi kebutuhan yang tak bisa dihindarkan, baik untuk kehidupan perseorangan, terutama untuk kehidupan berbangsa.

Adalah sangat diyakini bahwa pendidikan karakter bangsa pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menduduki posisi yang sangat strategis, karena hal ini diperlukan untuk menghadapi peserta didiknya berada pada masa pancaroba, masa transisi antara usia anak dan usia dewasa. Kita sangat menyadari bahwa potensi masalah yang dihadapi anak usia SMP sangat besar, terlebih-lebih soal moralitas dan berkebangsaan, karena itu diperlukan suatu konstruksi pendidikan karakter bangsa yang efektif.

Sebaik apapun program dan materi pendidikan karakter bangsa yang dimiliki untuk peserta didik SMP, masih diperlukan sekali strategi pendidikan karakter bangsa yang efektif, demikian pula langkah-langkah implementasinya,

sehingga pendidikan karakter bangsa memiliki dampak yang positif bagi pembentukan lulusan yang berkepribadian dan berkarakter.

Pentingnya Pendidikan Karakter Bangsa di SMP

Kementerian Pendidikan Nasional (2010) menyatakan bahwa pendidikan karakter pada dasarnya memiliki makna yang lebih mendalam daripada pendidikan moral atau pendidikan agama. Karena pendidikan moral dan pendidikan agama selama ini masih dalam taraf mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, dan sejumlah nilai moral dan ajaran agama. Sedangkan pendidikan karakter tidak hanya pada tingkat memahamkan nilai-nilai baik dan buruk, melainkan juga mendorong untuk merasakan nilai-nilai baik dan buruk, serta menunjukkan perilaku yang baik dan menghindari perilaku yang buruk. Menurut hemat penulis, mestinya pendidikan moral dan agama, juga tidak dapat dibenarkan jika hanya berorientasi pada mengajarkan hal-hal yang benar dan buruk, melainkan juga memahamkan dengan membiasakan yang benar dan menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk, melatih peserta didik untuk merasakan kebaikan nilai-nilai moral dan agama, serta mendorong peserta didik untuk berperilaku yang dilandasi dengan nilai-nilai moral dan agama.

Bagaimana dengan pendidikan karakter bangsa? Menurut hemat saya, pendidikan karakter bangsa memang merupakan suatu strategi yang paling efektif dalam membangun karakter bangsa *(nation character building)* untuk memberikan jaminan terhadap perilaku yang sesuai dengan norma yang diyakini, terutama norma dalam hidup berbangsa. Demikian juga pendidikan karakter bangsa diyakini bermanfaat untuk mendidik seseorang sebagai pribadi dan warga negara bertanggungjawab terhadap kesalahan dan kekeliruan yang dibuat sehingga nampak dipertanyakan loyalitasnya sebagai warga negara yang baik. Yang selanjutnya ada keberanian meminta maaf kepada orang yang menjadi korbannya, sehingga terhindar dari sikap mendzalimi, demikian juga ada keberanian untuk melakukan koreksi terhadap perilakunya sendiri, sehingga merasa bangga sebagai warga negara dan bangsa, bahkan memiliki komitmen dan kesiapan untuk bela negara.

Ciri-ciri Perkembangan Moral dan Persoalan yang Dihadapi Anak Usia SMP

Perkembangan karakter pada usia remaja pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari perkembangannya di usia anak-anak. William Damon (2002) menyatakan bahwa perkembangan karakter pada usia remaja sebenarnya diorientasikan kepada dua hal, yaitu (1) pengembangan *moral reasoning,* dan (2) pembentukan *moral identity*.

*Pertama***,** pengembangan *moral reasoning* pada hakekatnya menyoal pengembangan kapasitas individu dalam menentukan benar atau salah berdasarkan keputusan moral dan *moral judgment* secara efektif dan matang. Pada usia remaja, dalam menentukan benar atau buruk pada posisi orientasi terhadap diri sendiri dan sosial. Masa ini sering disebut masa antara *(in between periode)* atau masa transisi *(transitional periode).* Di satu sisi, dalam membuat penalaran moral ditentukan oleh pertimbangan menguntungkan dirinya sendiri, namun dalam waktu yang sama ditentukan juga oleh pertimbangan yang dapat menguntungkan pihak lain. Karena berada pada posisi transisi, maka persoalan yang potensial muncul adalah *altruisme, cheating, delinquency,* dan perilaku sosial berisiko (praktek seksual yang tidak aman dan penggunaan obat).

Kedua, pembentukan identitas moral, sebenarnya bermula dari pencarian identitas diri. Identitas moral diindikasikan dengan adanya *self-concept,* yang pada akhirnya dapat diperoleh *self-identity.* Pada usia SMP sebenarnya merupakan hal sangat kritikal dalam pencarian identitas. Jika kita salah dalam menjadikan sesuatu rujukannya, maka pembentukan dirinya lebih cenderung ke arah yang tidak baik, bahkan menjadikan idola dari seseorang yang memiliki figur yang kurang baik. Sebaliknya, jika anak remaja ini memiliki figur tokoh baik dalam keilmuan, keagamaan, maupun politik, maka dirinya pada akhirnya akan terbentuk sebagai individu yang baik.

Terbentuknya karakter individu tidaklah muncul dengan sendirinya, namun dipengaruhi oleh lingkungannya. Adapun faktor lingkungan yang menduduki posisi strategis adalah orangtua. Selain daripada itu faktor lain yang sangat berpengaruh, di antaranya: sekolah, teman sebaya, masyarakat (media), agama, dan biologi. Kiranya cukup jelas bahwa pengasuhan orangtua sangatlah berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Ada beberapa variabel orangtua yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter, di antaranya: kasih sayang orangtua *(parental affection),* keteladanan *(modeling),* ekspresi terhadap nilai, respek terhadap anak, dan diskusi terbuka dengan anak.

Faktor kedua yang sangat penting dalam pembentukan karakter adalah sekolah. Sekolah pada hakekatnya dapat berpengaruh terhadap *self-concept* anak (meliputi *self-esteem*), nilai-nilai, kematangan penalaran moral, inklinasi dan perilaku prososial, pengetahuan tentang moralitas, dan sebagainya. **Faktor ketiga** adalah keberadaan teman sebaya. Memang teman sebaya sudah memiliki sedikit dampak terhadap pembentukan karakter sejak usia dini, namun puncaknya berada usia remaja. Teman sebaya pada hakekatnya memiliki dampak terhadap konsep diri, keterampilan sosial (resolusi konflik, membangun dan memelihara persahabatan), pengembangan penalaran moral, keterlibatan dalam perilaku berisiko, dan sebagainya.

Faktor berikutnya adalah komunitas berpengaruh terhadap pembentukan karakter juga berpusat pada penampilan media masa, karakteristik kehidupan tetangga, dan nilai-nilai kultural. Media massa jelas-jelas berpengaruh terhadap sikap curiga (rasial, jenis seksual, usia), agresi dan rasa aman. Agama juga dapat dikaitkan dengan perilaku berisiko rendah dan kesehatan mental yang lebih baik. Demikian juga, terkait dengan biologis bahwa variabel menunjukkan kontroversi, karena di satu sisi bilogis dapat menunjukkan pengaruh yang sangar kuat terhadap aspek karakter (*altruisme, risk taking*), namun di balik itu biologis tidak berpengaruh.

Rambu-rambu Pendidikan Karakter Efektif

1. Bagaimana seseorang memperlakukan anak *(How people threat the child)* Untuk melakukan pendidikan karakter yang efektif tidaklah cukup dengan memasang poster atau memberi kuliah atau adanya kurikulum khusus pendidikan karakter. Justru yang lebih penting adalah bagaimana memfokuskan kepada seseorang yang memperlakukan anak. Bagaimana pengalaman kehidupan anak itu dalam keseharian, bagaimana anak-anak itu diperlakukan dengan respek atau diabaikan. Kondisi inilah yang berdampak pada karakter anak.
2. Bagaimana seseorang memperlakukan orang lain di depan anak *(How significant others treat other people in the child's presence)*
3. Sekolah mengharapkan semua anggota sekolah berkarakter baik *(Expect good character of all members)*
4. Menampilkan karakter positif *(exposing positive character)*
5. Kesempatan mempraktekkan suatu karakter yang baik *(Opportunities to practice a good character)*.
6. Kesempatan untuk menalar, berdebat, dan merefleksikan isu moral *Opportunities to reason about, debate, amd reflect on moral issues.*
7. Orangtua secara aktif dan positif terlibat dalam program pendidikan karakter di sekolah.

Strategi Efektif Pendidikan Karakter bagi Anak SMP

- Keteladaan
- Pembelajaran
  - Pengintegrasian pendidikan karakter dalam materi pelajaran
  - Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler
- Pemberdayaan dan pembudayaan

Implementasi Pendidikan Karakter di SMP

Untuk mengimplementasikan pendidikan karakter di SMP, ada sejumlah langkah di antaranya:

1. Sekolah mengambil peran kepemimpinan untuk staf, orangtua, dan peserta didik secara bersama-sama untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan elemen karakter yang mereka ingin tekankan. Secara kolektif dan sinergis di antara personil sekolah, orangtua dan peserta didik melakukan identifikasi terhadap elemen pendidikan karakter yang ingin ditekankan. Kiranya kurang dibenarkan bahwa setiap unsur pendidikan karakter melakukan identifikasi elemen pendidikan karakter sendiri-sendiri.
2. Memberikan latihan kepada staf tentang bagaimana mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kehidupan dan budaya sekolah. Setiap personil pendidikan di sekolah sangat diharapkan mampu mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kehidupan dan budaya sekolah. Untuk menjamin efektivitas pendidikan karakter, kiranya perlu sekali dilakukan integrasi nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam aktivitas dan budaya sekolah, sehingga pendidikan karakter mampu berkontribusi secara signifikan bagi perbaikan kehidupan di sekolah.
3. Membentuk kemitraan yang vital dengan orangtua dan masyarakat sehingga peserta didik mendengar informasi yang konsisten tentang sifat-sifat karakter yang esensial untuk sukses di sekolah dan sukses di masyarakat. Membangun kemitraan antara sekolah dengan orangtua dan masyarakat merupakan upaya yang strategis, terutama untuk menghindarkan diri dari
4. Memberikan kesempatan kepada pimpinan sekolah, guru, dan orangtua.

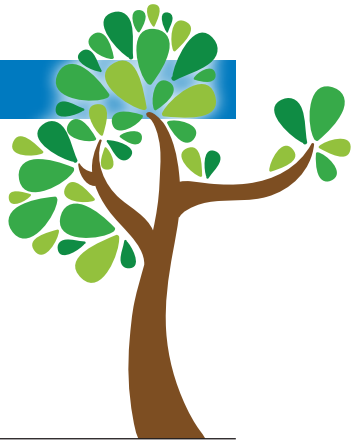

UNY Kedepankan Pendidikan Karakter

Pengantar

Manusai diturunkan ke bumi dihadapkan dua tugas utama atau amanah, yaitu amanah menjadi hamba Tuhan dan khalifah di atas bumi. Dalam praktik kehidupan manusia yang sebenarnya banyak ragam perilaku yang muncul, apakah perilaku terpuji yang digambarkan dengan sikap respek, sikap toleran, sabar, saling membantu, empati, tanggung jawab, dan lainnya atau sebaliknya perilaku yang tercela yang dimanifestasikan dengan sikap tidak hormat, sikap sombong, konflik, bohong, dan lainnya. Diharapkan sekali bagi setiap insan baik sebagai hamba Tuhan maupun khalifah di atas bumi selalu diwarnai dengan sifat-sifat terpuji dan terjauhkan dari sifat-sifat tercela.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapkan sekali setiap warga negara berkarakter dapat menunjukkan perilaku yang baik, bermoral, mandiri, produktif, komitmen sosial dan semangat kebangsaan. Dengan kata lain, setiap warga negara diharapkan sekali berperadaban. Namun apa yang terjadi dalam kehidupan nyata dewasa ini, bahwa hampir di setiap pojok dunia, tak terkecuali di Indonesia, masih banyak dijumpai individu yang lebih suka menunjukkan sikap koruptif dan perilaku provokatif, sehingga konflik pada semua level, baik pada level personal, kelompok, daerah, maupun negara. Mengapa kondisi demikian tejadi? Seringkali yang menjadi kambing hitam bahwa semuanya disebabkan oleh kegagalan praktik pendidikan.

Menyadari akan kondisi tersebut, maka UNY merasa ikut terpanggil untuk dapat berkontribusi dalam menyiapkan generasi terdidik yang dapat memainkan peran penting di masa-masa mendatang.

Fenomena Insan Indonesia

Suatu yang patut disyukuri bahwa reformasi di Indonesia telah terjadi sebagai koreksi terhadap praktek kehidupan bernegara dan berbangsa. Penegakan demokrasi, transparansi, bebas KKN, dan menjunjung tinggi HAM menjadi agenda penting dalam membangun bangsa Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengakhiri praktik politik yang otoriter, tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan perilaku diskriminatif.

Gerakan yang terpuji itu sampai detik ini setidak-tidaknya telah dirasakan hasilnya, walaupun masih cukup jauh dari ideal. Praktik demokrasi telah mewarnai dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam praktek pendidikan, walaupun masih jauh dari membanggakan. Praktik KKN telah mengalami penurunan walaupun belum berarti. Penegakan HAM dan gerakan inklusif terus bergulir walaupun masih terjadi praktek kehidupan yang diskriminatif.

Menegakkan demokrasi merupakan suatu pekerjaan yang sangat menantang dan bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena penegakan demokrasi hanya dapat dilakukan dengan berhasil, jika warga negaranya terdidik. Apa yang terjadi di Indonesia, ternyata dalam penegakan demokrasi masih dijumpai berbagai persoalan, di antara salah satunya yang sangat penting adalah politik uang ***(money politic)*** dan perilaku KKN yang sulit dihindari. Walaupun setiap individu mengetahui dan memahami konsekuensi dari praktek politik uang dan KKN, ternyata tidak mudah juga dapat dihentikan. Belum lagi di sisi lain masih dijumpai implementasi demokrasi dan penegakan HAM yang berlebihan, sehingga tidak bisa dihindari dapat menyulitkan gerak dan langkah setiap individu. Dalam posisi seperti ini, semakin sulit dilakukan untuk menegakkan karakter dan budaya bangsa. Padahal identitas bangsa yang berkarakter merupakan suatu kebutuhan, bahkan suatu keharusan bangsa-bangsa yang mandiri dan memiliki jati diri.

Pentingnya Pendidikan Karakter

Melihat kondisi riil bangsa Indonesia yang belum solid, kukuh, dan terbelah, maka sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, perlu terus mengupayakan terciptanya warga dan bangsa Indonesia yang berkarakter dan berbudaya. Bangsa Indonesia yang beridentitas diri jelas dan memiliki kebanggaan merupakan impian dan cita-cita bagi semua.

Bangsa Indonesia yang berkarakter dan berbudaya ditunjukkan dengan perilaku yang berakar dengan agama yang diyakini, budaya yang melatarbelakangi, dan keluhuran tujuan yang cita-citakan. Dengan demikian setiap individu yang berkarakter seharusnya ditunjukkan dengan perilaku unik sesuai dengan karakteristik kepribadian, nilai-nilai agama yang dianut dan kondisinya

di mana berada. Dalam konteks sebagai warga Indonesia, individu seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesiaan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinenneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Perkembangan karakter individu pada hakekatnya tidak sama antara satu dan lainnya. Hal ini ditegaskan Berkowitz, Marvin W (Damon:2002), yaitu:

> ***First,*** *that we have just established that character is a multifaceted phenomenon.* ***Second,*** *the components of character each have their own developmental trajectories.* ***Third,*** *each person develops at a different rate.* ***Fourth,*** *the developmental sequence and profile of the components of character differ in different individuals.* ***Finally,*** *the components of character tend to develop gradually, or in stages for a long periode of time.*

Perbedaan kecepatan, urutan, dan profile perkembangan karakter sangatlah tergantung pada kondisi internal dan eksternal individu, sehingga dalam mengarahkan pengembangan karakter individu yang efektif sangat diperlukan kemampuan mengakomodasikan faktor-fator yang menyertainya. Perbedaan perkembangan karakter juga berlaku pada usia individu, termasuk pada usia remaja akhir dan dewasa awal (mahasiswa). Latar belakang kehidupan mahasiswa baik di rumah, sekolah maupun masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan karakternya.

Adalah diyakini bahwa untuk menjadikan individu yang berkarakter, pendekatan yang paling strategis adalah pendidikan karakter, tanpa mengabaikan upaya lainnya. Hal ini diperkuat oleh Thomas Lickona, pengarang *Educating for Character*, menyatakan:

> *"Moral education is not a new idea. It is, in fact, as old as education itself. Down through history, in countries all over the world, education has had two great goals: to help young people become smart and to help them become good." Good character is not formed automatically; it is developed over time through a sustained process of teaching, example, learning and practice. It is developed through character education.*

Semakin jelasnya, bagaimana terasa penting pendidikan karakter bagi pembentukan karakter yang baik. Tidaklah mungkin dapat dibentuk karakter yang baik, jika proses pembelajaran itu hanya lebih ditekankan pada kegiatan intelektual. Secara lebih rinci pendidikan karakter juga memiliki kontribusi yang lebih komprehensif, sebagaimana kutipan berkut ini yang diambil dari http://www.icger.org, bahwa:

> *Quality character education helps schools create a safe, caring and inclusive learning environment for every student and supports academic development. It fosters qualities that will help students be successful as citizens, in the workplace, and with the acade-*

mic curriculum. It lays the foundation to help students be successful in all of the goals we have for our public schools. It is the common denominator that will help schools reach all of their goals!

Begitu strategisnya pendidikan karakter, ternyata pendidikan karakter tidak hanya bermanfaat untuk kesuksesan individu dalam proses pendidikan di sekolah atau di kampus, melainkan juga bermanfaat bagi kehidupan individu di tempat kerja dan masyarakat.

Lickona (2002) menegaskan bahwa:

character education as a program that strives to encompass the following; the cognitive, affective, and behavioral aspects of morality. Good character consists of knowing the good, desiring the good, and doing the good. Schools must help children understand the core values, adapt or commit to them and then act upon them in their own lives.

Menyadari akan luasnya cakupan pendidikan karakter, yaitu aspek kognitif, afektif, dan perilaku moralitas, sehingga menjadikan individu sebagai pribadi dan warga negara yang baik, maka sekolah maupun universitas bertanggungjawab penuh memberikan bantuan terhadap peserta didik dalam menguasai nilai-nilai moralitas dan kebangsaan, sehingga menjadi warga negara yang baik.

Rasional UNY Berkomitmen terhadap Pendidikan Karakter

Menyadari akan tuntutan untuk menyelamatkan warga negara dan bangsa Indonesia dari ancaman ekonomi, iptek, politik, dan budaya dari luar negeri serta memenuhi keinginan kuat setiap warga negara dalam meraih cita-citanya, maka UNY sebagai universitas yang berbasis pendidikan memiliki tanggung jawab penuh untuk menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu memberikan kontribusinya yang terbaik bagi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia.

Ada beberapa alasan UNY berkomitmen mengembangkan Pendidikan Karakter. *Pertama*, UNY menetapkan visinya bahwa pada tahun 2025 menjadi universitas kependidikan kelas dunia berlandaskan ketaqwaan, kemandirian dan kecendekiaan. Berdasarkan visi inilah UNY bertekad mengembangkan sistem pendidikannya dapat menghasilkan insan seutuhnya *(insan kamil)* yang mampu menunjukkan pengabdiannya dengan bertaqwa kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana Allah swt dalam salah satu firmannya, "Tidaklah aku ciptakan jin dan bumi kecuali untuk mengabdi (beribadah)". Seiring dengan itu mampu menjadikan insan yang dapat mengemban kekhalifahan di atas bumi, sehingga dapat bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan, sebagaimana difirmankan Allah swt yang artinya bahwa sesungguhnya aku dijadikan

Allah swt di atas bumi, semata-mata untuk menjadi khalifah". Untuk mewujudkan visi tersebut, pendidikan karakter komprehensif dipandang sebagai upaya yang sangat strategis.

Kedua, praktek pendidikan di Indonesia selama ini cenderung mendorong peserta didiknya untuk meraih prestasi akademik setinggi-tingginya, tetapi belum sepenuhnya memperhatikan aspek-aspek lainnya sebagaimana konsep sistem pendidikan nasional. Padahal aspek-aspek lainnya, terutama aspek afektif atau spiritual merupakan aspek yang terpenting dalam kehidupan manusia. Untuk menyiapkan calon pendidik dan ilmuwan yang berkarakter, kiranya UNY merasa perlu untuk mengimplementasikan pendidikan karakter yang mampu menempatkan unsur ketaqwaan sebagai komponen kunci dalam penentuan keberhasilan studi. Kendatipun para mahasiswa mampu menampilkan prestasi akademik secara cemerlang (*cum laude*), namun jika akhlaq dan perilaku moralnya kurang terpuji secara signifikan, maka mereka belum dapat diberikan pengakuan sebagai mahasiswa yang berhasil.

Ketiga, dewasa ini masih juga dirasakan bahwa cukup banyak lulusan perguruan tinggi masih belum mampu menunjukkan integritas kepribadian yang membanggakan, apakah itu yang diwujudkan dengan perilaku yang hipokrit, tidak jujur, tidak ada keberanian, dan ketergantungan. UNY bertekad sekali untuk menghasilkan lulusannya yang berintegritas tinggi, memiliki kejujuran, keberanian, dan kemandirian, serta bertanggungjawab. Untuk mewujudkan harapan itu, pendidikan karakter merupakan suatu strategi yang paling efektif untuk menjadikan lulusannya yang matang, dewasa, kreatif dan kompeten yang mampu bertanggungjawab secara personal dan sosial, sehingga mereka tidak membebani masyarakat dan bangsa.

Keempat, di era informasi dan globalisasi, kehidupan setiap individu tidak bisa membendung pengaruh dunia luar. Jika individu itu tidak memiliki jati diri yang jelas, maka akan menjadi objek dan sasaran pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi. Oleh karena itulah sangat diperlukan individu yang memiliki kemampuan men-filter pengaruh dari luar, termasuk nilai-nilai materialisme, hedonisme, kapitalisme, dan pragmatisme yang berpotensi merusak nilai-nilai religi dan kemanusiaan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, UNY bertekad menjadikan pendidikan karakter sebagai strategi yang mampu mendorong lulusan dan komunitasnya untuk mampu melakukan *filter* terhadap pengaruh yang negatif, dan mampu berkontribusi dalam mewarnai masyarakat dan bangsa dengan nilai-nilai kebaikan dan nilai kemanusiaan.

Selain daripada itu UNY memandang bahwa Pendidikan Karakter diharapkan mampu mendorong semua pihak, terutama dosen dan mahasiswa, terlibat

secara intens untuk menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan, sehingga UNY mampu membekali lulusannya menjadi individu yang memiliki komitmen moral yang terpuji dan memiliki rasa kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Upaya UNY dalam Pengembangan Pendidikan Karakter

UNY dalam pengembangan pendidikan karakter telah melakukan berbagai upaya, baik melalui bidang akademik, manajemen, maupun kemahasiswaan. ***Pertama,*** bidang akademik, telah ditetapkan paket program pendidikan atau kurikulum secara terpisah (separated curriculum) yang diwujudkan dengan paket utuh berupa penambahan SKS untuk matakuliah Pendidikan Agama, penyediaan dan pengemasan mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Kewirausahaan. Dalam waktu yang sama dilakukan penyiapan program pendidikan terpadu, yang diwujudkan melalui penyiapan program pendidikan yang terintegrasi. Materi pendidikan karakter lewat semua matakulih (selain yang baru saja disebut), yang dimanifestasikan dengan kegiatan internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan melalui kegiatan setiap perkuliahan. Di samping itu juga penetapan jam perkulihan yang disesuaikan dengan waktu istirahat, shalat dan makan, sehingga kegiatan perkuliahan berjalan dengan baik, tanpa terganggu.

Selain itu UNY juga memberikan penghargaan akademik, berupa doktor HC kepada Bapak Ary Ginanjar bidang Pendidikan Karakter, sebagai wujud kepedulian tersendiri UNY terhadap Pendidikan Karakter. Diharapkan gaung UNY sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang sangat *concern* kepada pendidikan karakter dapat semakin dikenal lebih meluas.

Kedua, bidang manajemen, UNY terus berusaha melakukan penegakan gerakan transparansi baik pengelolaan SDM (kepegawaian) maupun Keuangan. Pengelolaan kepegawaian dilakukan secara transparan dan profesional baik dalam tataran tataran rekrutmen, maupun tahap pembinaan, sehingga pengelolaan SDM lebih profesional dan kontekstual. Sedangkan pengelolaan keuangan dilakukan lebih akuntabel dan terbuka. Dengan demikian di UNY dapat tercipta *good university governance* dan *clean university govermant.* Alhamdulillah, pimpinan merasa bangga bahwa sejauh ini belum ditemukan pengelolaan keuangan yang menyimpang dan tidak amanah. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil audit Kantor Akuntan Publik tahun 2010 yang memberikan opini Wajar untuk Hal Keuangan.

Gambaran pengelolaan SDM dan keuangan UNY memberikan penguatan bahwa kebersihan pengelolaan SDM dan keuangan dapat menunjang ketenangan bekerja di kampus, sehingga terhindar dari adanya fitnah yang sangat

merugikan semua. Iklim sehat di kampus yang semacam ini merupakan salah satu upaya pengembangan pendidikan karakter di lingkungan UNY. Karena perekrutan staf dosen dan karyawan dilakukan dengan cara yang bersih dan pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan ketentuan yang secara disiplin, maka dapat dijamin bahwa sebagian besar staf (untuk tidak mengatakan semua warga staf) akan merasa aman dan barakah. Insya Allah.

Ketiga, bidang kemahasiswaan, pembinaan kemahasiswan sejak awal sudah dibekali dengan *ESQ Training* khusus mahasiswa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan bahasa dalam mengenali keagungan Tuhan, mengetahui jati diri sebagai hamba Tuhan, dan memantapkan diri untuk menghadapi tugas kekhalifahan. Dilanjutkan dengan pembinaan keagamaan melalui Unit Kerohanian, di samping pelatihan kreativitas, *soft skills* dan kepemimpinan. Pembinaan moralitas mahasiswa dilakukan intensif baik oleh program kemahasiswaan maupun kegiatan kemahasiswaan yang dikelola oleh mahasiswa sendiri (Ormawa).

Keempat, penyediaan fasilitas, UNY berusaha menyediakan fasilitas untuk ibadah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, sehingga setiap insan yang membutuhkan tempat ibadah setiap saat di kampus memiliki rasa aman. Dengan segala keterbatasannya, UNY hanya bisa menyediakan tempat khusus untuk yang beragama Islam. Sedangkan penganut agama lain dapat menggunakan fasilitas UNY sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk kegiatan hari raya agama. Yang dijadikan pertimbangan utamanya, bahwa agama lain dalam penggunaan tempat ibadah tidak sesering yang beragama Islam, sehingga bisa bergabung dengan tempat ibadah di sekitar kampus atau di sekitar rumah tinggal atau di tengah-tengah masyarakat yang memang disiapkan untuk tempat ibadah.

Kelima, kegiatan yang relevan, UNY telah melaksanakan berbagai diskusi, seminar, workshop, riset dan penerbitan baik jurnal maupun buku berkenaan dengan Pendidikan Karakter. Hal ini menggambarkan bahwa UNY benar-benar berkomitmen kuat untuk mengawal implementasi pendidikan karakter. Bahkan terus mengupayakan dapat menemukan berbagai alternatif untuk mensukseskan pelaksanaan pendidikan karakter.

Dukungan dan Hambatan UNY dalam Pengembangan Pendidikan karakter

Secara fitrah setiap warga UNY mencintai karakter yang baik, tanpa membedakan agama, suku, dan budaya, serta asal daerah. Setiap individu sangat mencintai perilaku terpuji dan hidup berdampingan secara damai, sebaliknya sangat membenci perilaku tercela dan hidup bersama yang penuh konflik.

Demikian juga dalam kehidupan kampus, institusi akademik, warga UNY sangat mendambakan munculnya kultur akademik yang sehat dan kondusif, sehingga dapat men-*encourage* semua civitas akademika, terutama dosen dan mahasiswa untuk berlomba-lomba meraih prestasi yang unggul. Prestasi yang unggul dalam konteks ini tidak hanya dibatasi oleh prestasi akademik saja, melainkan juga keluhuran akhlaq. Perubahan *mindset* ini sangat diperlukan, karena dewasa ini cukup banyak dijumpai ahli dan profesional yang tidak memiliki keluhuran akhlaq, sehingga cenderung merugikan kehidupan masyarakat, bahkan sampai mengancam ketenangan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

UNY berusaha terus menghadirkan lingkungan dan iklim akademik dan religius di semua pojok dan unit, sehingga tercipta rasa kedamaian yang menjadi dambaan setiap orang. Kebersamaan yang tercipta dalam kehidupan sehari-hari di kampus, sungguh dapat memperkokoh keutuhan warga kampus, sehingga kampus benar-benar menjadi tempat belajar dan bekerja yang sangat kondusif, yang pada akhirnya mampu mendorong setiap insan untuk produktif. Untuk dapat tetap menjaga kondisi yang nyaman dan damai, maka diperlukan keterlibatan semua untuk menghindari sekecil apapun konflik antar sesama.

Keteladanan para pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan kampus UNY sangatlah dirindukan, karena keteladanan memiliki sumbangan yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi pendidikan karakter. Namun tidaklah mudah dilakukan untuk menegakkan keteladanan, karena banyak ragam universitas dengan berbagai variannya. Keteladanan hendaknya tidak dimaknai secara sempit, hanya satu aspek saja, melainkan keteladanan pada semua aspek, yang mencakup aspek keyakinan (*believe*), pikiran, sikap, dan perilaku.

Alhamdulillah keteladanan telah dilakukan oleh para pimpinan pada semua level baik pada level universitas, fakultas/lembaga/program pascasarjana, jurusan maupun program studi, di samping oleh semua dosen dan tenaga kependidikan lainnya, walaupun keteladanan yang diberikan baru hal-hal kecil. Untuk memberikan keteladanan memang masih belum menjadi kebutuhan bagi setiap warga UNY, bahkan dalam batas tertentu bagi pimpinan di semua level sekalipun. Oleh karena ke depan, keteladanan perlu kita jadikan budaya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun di tengah-tengah masyarakat.

Adalah suatu yang menyejukkan dan membanggakan telah dijumpai sejumlah mahasiswa yang pemikiran maju dan perilakunya sangat terpuji di UNY, namun masih lebih banyak yang memiliki keengganan untuk menegakkan perilaku yang berkarakter. Hal ini dapat dimaklumi, karena memang mereka hadir ke UNY untuk mendapatkan pendidikan yang berarti bagi mereka. Oleh karenanya sangat diperlukan sinergi dengan semua pihak, termasuk para akti-

vis. Semakin intens dan terbuka komunikasi dengan mahasiswa dapat diciptakan, kiranya semakin positif dan kondusif iklim kampus bagi pembinaan mahasiswa secara keseluruhan, sehingga pada ahirnya dapat diwujudkan lulusan yang benar-benar unggul dalam segala hal.

Ada dua faktor penting yang dapat berkontribusi bagi keberhasilan pembentukan karakter individu, pertama adalah peran utama keluarga dan kedua adalah peran media massa. Menurut hemat kami, dalam konteks pembentukan karakter mahasiswa lebih banyak ditentukan oleh media massa. Untuk dapat menjamin mahasiswa dapat terbentuk karakternya dengan baik UNY berusaha memberikan bekal kepada mahasiswa untuk dapat men-filter semua informasi yang dibawa media massa. Di saat yang sama UNY berusaha menghimbau semua media massa ikut bertangungjawab mengawal informasi yang dipublikasikan jauh dari nilai-nilai yang mengkontaminasi pikiran dan hati mahasiswa.

Penutup

Kehadiran setiap individu di muka bumi memiliki dua tugas utama, yaitu menjadi hamba Allah dan khalifah di atas bumi. Posisi yang sangat bermartabat ini perlu terus dijaga. Untuk menjaga martabat manusia, upaya yang sangat strategis adalah pendidikan. Walaupun tidak sedikit dijumpai manusia yang mengabaikan pentingnya pendidikan.

Dalam prakteknya, pendidikan lebih banyak diorientasikan untuk mengasah otak yang hasilnya lulusan yang pintar, padahal sisi lain yang harus mendapat perhatian penuh adalah mencerahkan dan mensucikan hati, sehingga dapat menjadi individu yang baik. Untuk dapat tercipta individu yang baik, sangat diperlukan pendidikan karakter, yang diharapkan mampu menghasilkan lulusan sebagai warga negara yang baik, yang bermanfaat bagi dirinya, agama, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Menyadari akan *core business* UNY, yaitu sebagai universitas yang berbasis pendidikan, kiranya UNY memliki tanggung jawab penuh untuk menghasilkan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. UNY sangat berharap dapat berkontribusi dalam melahirkan lulusan yang berkarakter, yang memiliki jati diri jelas, yang sanggup menjadi agen perubahan menuju kehidupan yang lebih baik di masa-masa mendatang di manapun berada.

Untuk mewujudkan impian itu tentu sangat membutuhkan kebersamaan dan sinergi dengan berbagai pihak terkait. Tidaklah mudah dapat membangun kebersamaan baik secara internal maupun eksternal. Karena itu diperlukan upaya yang serius untuk membangun *common vision* dalam memantapkan UNY menjadi *Leading in Character Education.*

Memang tidak mudah mengundang semua pihak untuk mengawal program besar Pendidikan Karakter di UNY, karena masih dijumpai keengganan di semua lini. Sangat disadari bahwa setiap perubahan, inovasi atau reformasi pada awalnya selalu berhadapan dengan keengganan untuk berubah. Oleh karena itu dengan penuh optimis semua pimpinan perlu terus berkonsolidasi dalam mengawal implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan esktra kurikuler, sehingga dapat menghasilkan lulusan UNY yang berkarakter.

Kurikulum

Kurikulum 2004 pada dasarnya dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis kompetensi.

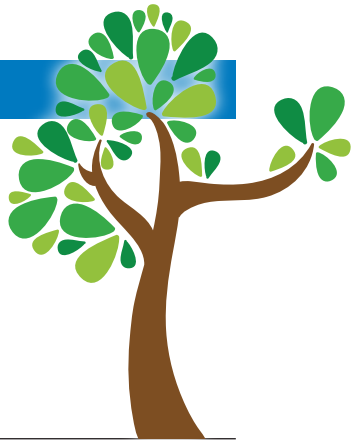

Telaah Kritis Kurikulum 2004: Konsep, Persiapan, dan Pelaksanaan

Pengantar

Persiapan perbaikan Kurikulum 1994 dilakukan sejak tahun 2001 sebagai konseksuensi logis adanya perubahan yang terjadi secara eksternal dan kesadaran diri secara internal akan eksistensi bangsa Indonesia yang memiliki segala keragaman yang harus diapresiasi. Persiapan tersebut dilakukan dengan ujicoba terbatas terhadap sejumlah sekolah pada semua jenjang, khususnya jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang selanjutnya diperluas jumlah unit sekolah yang lebih besar, sehingga diharapkan pada tahun 2004 dapat dimulai penerapannya secara resmi pada sejumlah terbatas sekolah yang memiliki kesiapan. Atas dasar itulah Kurikulum ini untuk sementara dapat dinamakan sebagai Kurikulum 2004.

Untuk mengharapkan hasil yang memuaskan dengan diterapkannya Kurikulum 2004, maka segala persiapan baik yang berkenaan dengan perbaikan substansi maupun teknisnya perlu diupayakan secara optimal. Secara substansial perlu disiapkan berbagai materi utama dan pendukungnya yang diharapkan mampu memberikan kontribusi secara berarti bagi pencapaian tujuan pendidikan. Sedang secara teknis perlu disiapkan sejak persiapan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasinya.

Dalam kaitannya dengan Pengawasan Kurikulum 2004 yang lebih efektif terlebih-lebih dalam rangka mewujudkan *performace audit* yang merupakan salah satu fungsi dan peran utama seorang auditor dewasa ini, maka sangat diperlukan pengawasan terhadap segala kegiatan sejak persiapan kurikulum 2004, pelaksanaan (implementasi), sampai dengan evaluasinya. Untuk dapat menunjukkan kinerja pengawasan yang lebih efektif dan produktif, maka diperlukan pemahaman kritis terhadap kehadiran Kurikulum 2004.

Alasan Kelahiran Kurikulum 2004

Di dalam sejumlah dokumen yang ada, yang salah satunya dikemukakan oleh Dr. H. Ch. Soeprapto (2004) bahwa lahirnya Kurikulum 2004 pada dasarnya telah ditopang dengan sejumlah argumentasi kuat, baik dikaitkan dengan faktor internal maupun eksternal. Faktor internal misalnya dapat dikaitkan dengan adanya beberapa pendapat tentang Kurikulum 1994, antara lain:

a. Masih cukup padat materi dan terlalu banyak jam pelajarannya.
b. Kurang memberi peluang bagi guru dan siswa untuk lebih kreatif dan inovatif karena bersifat instruktif dalam bingkai sentralisasi (*monolitic design)* dan kurang memberi peluang berkembangnya potensi dan kebutuhan daerah.
c. Kurang menyentuh pendidikan anak seutuhnya, karena lebih berorientasi pada aspek kognitif akademis (*subject matter oriented* dan belum mengembangkan *life skills).*
d. Bersifat kurang luwes karena Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) yang terpusat dan seragam.
e. Pembelajaran masih bersifat klasikal dan belum memberikan makna yang dialogis dan menyenangkan bagi anak.

Sementara yang berkenaan dengan faktor eksternal, bahwa pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan-teknologi, dan seni-budaya berdampak terhadap sistem pendidikan nasional, termasuk perlunya penyempurnaan kurikulum.

Argumentasi yang dikemukakan tersebut sangatlah *common-sense,* hanya saja akan lebih mantap, jika didukung oleh sejumlah penelitian yang handal, sehingga perbaikan yang dilakukan lebih terarah dan benar-benar memenuhi kebutuhan lapangan. Demikian juga halnya bahwa perubahan kurikulum tidak hanya ditekankan pada upaya menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan zaman dan dunia, melainkan juga perlu dikaitkan dengan *pemenuhan keunikan individu* yang memang jauh lebih penting dalam menciptakan proses pendidikan yang efektif.

Selanjutnya bahwa Kurikulum 2004 pada dasarnya dikembangkan terutama berdasarkan *Market-Driven* (dan *Life Skills*) atau *Society-oriented curriculum.* Padahal untuk menjaga eksistensi kita, pertimbangan yang lebih komprehensif dan konsisten dengan tujuan pendidikan nasional, kurikulum yang seharusnya menjadi keinginan kita seyogyanya berdasarkan atas *Eclectic Curriculum,* yang tidak hanya memenuhi tuntutan pasar saja, melainkan juga kebutuhan individu, dan perkembangan ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) secara simultan (Longstreet and Shane, 1993).

Kurikulum 2004 memang diharapkan dapat memberikan jawaban untuk memenuhi keragaman individu, yang sebelumnya Kurikulum '94 nuansanya lebih bersifat generik seragam. Dengan kata lain bahwa kurikulum dikembangkan perlu disesuaikan dengan minat peserta didik, di samping perubahan sosial yang ada. Menurut hemat penulis, masih ada variabel lain yang justru sangat menentukan, di samping minat peserta didik, yaitu keragaman kemampuan dan bakat peserta didik.

Konsepsi Kurikulum 2004

Kurikulum 2004 pada dasarnya dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis kompetensi. Kompetensi diartikan sebagai kecakapan individu berkenaan dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang terjadi secara terus-menerus (Hatta: 2004). Menurut hemat penulis, kompetensi seharusnya tidak hanya direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak saja, melainkan juga dalam bersikap, sehingga memungkinkan individu yang memiliki kompetensi itu mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan tidak bersifat sementara atau final.

Kurikulum 2004 yang dikembangkan ini lebih diarahkan kepada pembentukan individu yang kompeten. Artinya, kurikulum ini sangat diwarnai oleh teori *Essensialisme.* Padahal untuk menghadapi tantangan zaman kini dan mendatang, seyogyanya individu yang seharusnya dihasilkan dari pendidikan adalah di samping individu yang kompeten, juga individu yang rasional dan bermoral, *well-adjusted,* dan menjadi agen perubahan sosial. Artinya, kurikulum yang diinginkan dibangun melalui integrasi secara fungsional di antara empat teori pendidikan, yaitu *perennialism, essensialism, progressivism,* dan *social-reconstructionism* (Ornstein/Levine:1985). Dengan demikian kurikulum yang dibangun secara konsisten dapat memanifestasikan apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional yang membentuk manusia seutuhnya.

Kompetensi pada hakekatnya dapat dipahami sebagai sesuatu yang tampak (kinerja sesuai dengan standar) dan tak-tampak (sebagai suatu konstruk). Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa untuk mengetahui kompetensi individu dapat dilihat kinerjanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Namun ketika kompetensi sebagai suatu konstruk, maka untuk mengetahui kompetensi individu dapat menggunakan instrumen yang dapat mengukur gejala perilaku yang mencerminkan konstruk kompetensi (Burke: 1995).

Hatta (2004) menegaskan bahwa ada sejumlah prinsip pengembangan, di antaranya yaitu (1) peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan nilai-nilai budaya, (2) keseimbangan etika, logika, estetika dan kinestetika, (3) penguatan

integritas nasional, (4) .... Menurut hemat penulis, prinsip-prinsip tersebut nampak cenderung terkait sekali dengan pengembangan substansi, namun bila dikaitkan dengan desain dasar pengembangan kurikulum, maka Longstreet dan Shane (1993) ada beberapa konsep, di antaranya: *(1) scope, (2) sequence, (3) articulation, (4) balance, dan (5) consistency.* Artinya bahwa dalam pengembangan kurikulum perlu dipertimbangkan tentang rentangan dan kedalaman materi pelajaran yang harus dipelajari, urutan materi pelajaran yang harus dihadapi (kontinyuitas atau kesinambungan dalam bahasa Hatta), dukungan terhadap materi lain sehingga munculnya secara simultan, keseimbangan antara kebutuhan anak dan tuntutan masyarakat, dan konsistensi antara kinerja siswa yang diinginkan dengan landasan filosofis yang mendasari pengembangan kurikulum.

Bertitik tolak dari konsep dasar tersebut di atas, maka dapat dicermati bagaimana substansi suatu bidang sejak SD sampai dengan SM misalnya dapat dijamin cakupan dan urutannya. Demikian pula antar tingkat dalam suatu unit sekolah. Kurikulum 2004 pada awalnya dikembangkan oleh dua pihak, pertama pihak Pusat Kurikulum dan kedua pihak unit utama. Pada pihak pertama, Kurikulum sejak dari awalnya diduga sudah dapat dikoordinasikan antara jenjang pendidikan atau unit sekolah, bahkan antar tingkat pada setiap unit sekolah, namun pada pihak kedua belum diketahui benar koordinasi yang dilakukan antar jenjang pendidikan atau unit sekolah. Semoga saja pada kedua belah pihak sudah dilakukan koordinasi yang intensif dan fungsional.

Prinsip pelaksanaan Kurikulum 2004 menurut hemat penulis telah dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan nasional, sehingga diharapkan dapat memberikan acuan bagi pelaksana kurikulum pada level mikro, yaitu kegiatan pembelajaran.

Diversifikasi kurikulum yang menjadi spirit Kurikulum 2004 perlu dilaksanakan secara bertanggungjawab, karena diversifikasi kurikulum merupakan manifestasi demokratisasi pendidikan, yang memungkinkan setiap peserta didik berhak mendapat perlakuan, baik itu pemberian materi maupun strategi, sesuai dengan kondisi objektif peserta didik (kemampuan dan minat) dan kondisi lingkungan di mana peserta didik berada. Dalam konteks ini sudah waktunya pendidikan inklusif menjadi suatu alternatif kebijakan yang patut diperjuangkan dan diterapkan bagi semua (UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 5 ayat 2,3, dan 4).

Pelaksanaan Kurikulum 2004

Pelaksanaan Kurikulum 2004 sepenuhnya diserahkan kepada sekolah sebagai ujung tombak implementasi kurikulum. Hal ini merupakan konsekuensi

logis dari kebijakan otonomi pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai institusi terdepan dan paling bertanggungjawab dalam proses pendidikan. Model manajemen pendidikan yang demikian memang berbeda secara berarti bila dibandingkan dengan penyelenggaraan pendidikan sebelumnya.

Dalam implementasi kurikulum, keterlibatan guru, kepala sekolah, konselor sekolah, personil lain adalah penting, di samping nara sumber lainnya dan orangtua. Kerjasama positif di antara mereka dijamin dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan penerapan kurikulum. Selanjutnya guru memiliki posisi yang strategis dan peluang yang sangat besar dalam mengembangkan kurikulum secara lebih bermakna. Kalau dipahami benar bahwa keberhasilan membangun pendidikan yang berkualitas pada hakekatnya sangat tergantung pada kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum pada tataran operasional. Hal ini dapat dilihat pada fakta di lapangan, bahwa walaupun dokumen kurikulumnya sama secara nasional, namun pada kenyataannya hanya ada sejumlah sekolah yang mampu menghasilkan lulusan berkualitas. Kondisi ini sebenarnya dapat diduga bahwa kualitas lulusan itu dipengaruhi oleh kinerja guru yang optimal dan handal dalam mengembangkan kurikulum di kelas.

Pengelolaan pembelajaran pada dasarnya juga merupakan bagian yang penting dalam implementasi kurikulum, sehingga tidak dapat lepas dari perhatian siapapun, karena efektivitas pengelolaan pembelajaran dapat menentukan kualitas kurikulumnya. Diversifikasi kurikulum juga sangat terkait dengan diferensiasi manajemen kelas, di samping metode dan teknik pembelajarannya. Dengan demikian penguasaan keragaman peserta didik merupakan langkah awal yang seharusnya dilalui oleh guru.

Sistem Penilaian

Sistem penilaian yang digunakan pada dasarnya sangat menentukan efektivitas implementasi kurikulum 2004. Ada yang menarik dalam pembicaraan tentang sistem penilaian. Bahwa sistem penilaian yang dikembangkan dalam implementasi kurikulum, di antaranya ada penilaian berbasis kelas.

Jika konsisten dengan perumusan kompetensi yang dikembangkan berdasarkan standar, maka untuk mengetahui kompetensi seseorang cukup dengan pengukuran hasil belajar, namun jika perumusan kompetensi dikembangkan berdasarkan standar dan isi-proses, maka penilaian berbasis kelas sangatlah relevan (Burke, 1995). Jika tidak salah mencermati bahwa kompetensi dikembangkan berdasarkan standar semata, sementara itu sistem penilaiannya menggunakan penilaian berbasis kelas.

Menyadari akan kewenangan yang diberikan kepada sekolah untuk menentukan keberhasilan peserta didik dalam pencapaian kompetensi, maka sema-

kin jelas bahwa kebijakan tentang Ujian Akhir Nasional (UAN) menjadi tidak relevan lagi. Artinya bahwa dalam masa transisi ini penerapan UAN perlu dipertanyakan relevansi dan efektivitasnya, di samping tidak sesuai dengan sistem penilaian dalam konteks Kurikulum 2004.

Manajemen dan Pengawasan Kurikulum 2004

Manajemen Kurikulum 2004 sebenarnya tergantung pada peran masing-masing, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sejalan dengan disentralisasi pendidikan, pemerintah pusat memiliki peran dan fungsi menyiapkan ketentuan umum dan berbagai pedoman implementasi kurikulum, sementara itu pemerintah daerah dan sekolah memiliki peran dan fungsi mengembangkan kurikulum, termasuk di dalamnya mengembangkan silabusnya. Pedoman implementasi kurikulum memang perlu dibuat oleh pemerintah pusat, namun perlu disadari bahwa tidak setiap aspek perlu dibuat pedoman sendiri-sendiri, sebagaimana yang terjadi pada penyiapan kurikulum untuk Sekolah Menengah Pertama (26 pedoman). Menurut hemat penulis pedoman-pedoman tersebut ada yang dapat digabungkan menjadi satu pedoman, misalnya pedoman umum pengembangan sistem penilaian ; pedoman khusus pengembangan sistem penilaian per mata pelajaran ; pedoman pengembangan tes diagnostik per mata pelajaran ; pedoman penilaian berbasis kelas ; pedoman penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor ; pedoman pembuatan laporan hasil belajar ; pedoman mendeteksi potensi peserta didik ; pedoman pengembangan dan evaluasi lintas kurikulum ; dan pedoman kenaikan kelas.

Selanjutnya berkenaan dengan supervisi dan pengawasan kurikulum 2004, maka ada sejumlah hal yang perlu menjadi kepedulian kegiatan supervisi dan kepengawasan, di antaranya: pedoman-pedoman kurikulum dengan segala aspeknya (struktur kurikulum dari TK/RA hingga SM/MA), program sosialisasi kurikulum, penguasaan para instruktur dan guru tentang substansi kurikulum, penguasaan para pengawas tentang substansi kurikulum, kinerja sekolah dalam implementasi kurikulum, dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan para tenaga pengawasan dapat menguasai segala komponen penting dari kurikulum 2004, sehingga pada akhirnya dapat memahami segala aspek kegiatan persiapan dan implementasi kurikulum, demikian juga dapat memberikan pembinaan lebih lanjut.

Bimbingan dan Konseling

Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah pada dasarnya merupakan salah satu sub sistem proses pendidikan yang besar artinya dalam mengantarkan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan *(the guidance and*

counseling services are the heart of educational process), sehingga layanan bimbingan dan konseling menduduki posisi yang strategis dalam implementasi kurikulum, di samping kegiatan pembelajaran. Walaupun layanan BK itu penting, namun dalam prakteknya dalam sosialisasi Kurikulum 2004 tidak selalu dipandang penting sebagai satu paketnya.

Pada hakekatnya diversifikasi materi kurikulum dan pendekatan pembelajaran tidak akan dapat menunjukkan efektivitas yang tinggi, manakala tidak dukung sepenuhnya oleh layanan BK. Dengan layanan BK yang efektif, pemberian pembelajaran remedial, pengayaan, dan percepatan tidak akan pernah dapat dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti.

Menyadari akan posisi layanan BK, maka setiap sosialisasi kurikulum dipandang perlu sekali layanan BK menjadi salah satu paketnya. Namun perlu menjadi perhatian juga bahwa materi layanan BK perlu dikemas sedemikian rupa yang dilandasi dengan paradigma baru, yaitu lebih diorientasikan pada pendekatan pengembangan, sehingga layanan BK lebih banyak dirasakan manfaatnya bagi semua siswa.

Upaya Persiapan dan Program Pendukung Kurikulum 2004

Persiapan implementasi Kurikulum 2004 dilakukan sangat serius melalui proyek pilot baik yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum sejak tahun ajaran 2001-2002, maupun yang dilakukan oleh Direktorat-direktorat terkait. Yang jelas bahwa secara serempak pada tahun ajaran 2004-2005 diluncurkan secara bertahap pada sejumlah sekolah yang dipilih. Ini berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya yang selalu dilakukan serempak. Mudah-mudahan tidak menimbulkan dampak yang berarti.

Program-program pendukung kurikulum 2004, seperti pendidikan kecakapan hidup, pendekatan *Contextual Teaching and Learning (CTL),* pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi, dan sebagainya adalah baik sekali untuk mendukung kehadiran Kurikulum 2004, namun konsep yang bagus tersebut perlu dikemas dengan baik, sehingga tidak kontra produktif.

Catatan terhadap Pelaksanaan Kurikulum 2004

Di samping kompentar-komentar tersebut di atas, maka ada sejumlah komentar-komentar secara spesifik sebagai berikut:

1. Catatan untuk implementasi Kurikulum 2004 untuk TK/RA-SD/MI

Ada dua hal penting yang perlu perlu mendapat perhatian dalam Kurikulum 2004 untuk TK/RA-SD/MI. *Pertama,* kurikulum untuk TK/RA kiranya kurang tepat, jika menggunakan pendekatan berbasis kompetensi, melainkan

yang lebih tepat jika program pendidikannya sesuai dengan tugas perkembangan anak *(Developmentally Appropriate Practices). Kedua,* kompetensi lulusan SD/MI secara rinci nampak jelas, melainkan belum nampak bahwa lulusan SD/MI itu seharusnya memiliki kompetensi membaca, menulis, dan berhitung 3 Rs *(Reading, Writing, and Arithmatics)*.

2. Catatan untuk implementasi Kurikulum 2004 untuk SMP/MTs

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari konsep dan persiapan pelaksanaan Kurikulum 2004 untuk SMP. Pertama, salah satu ciri Kurikulum 2004 adalah menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa sebagai hasil belajar *(learning outcome),* padahal jika memperhatikan kegiatan pembelajaran yang dirancang, kompetensi dapat juga dikembangkan melalui masukan dan proses. Burke (1995) menegaskan bahwa kompetensi dapat dicapai melalui *standard* yang terdiri atas hasil belajar *(learning outcomes)* dan melalui isi *(content)* yang terdiri atas masukan dan proses *(inputs and processes)*.

Kedua, Kurikulum 2004 adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan untuk mencapai tujuan nasional dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah dan sekolah. Pernyataan ini memberi kesan sangat kuat bahwa posisi peserta didik lebih cenderung sebagai objek daripada subjek. Perlakuan peserta didik sebagai objek pendidikan kiranya kurang relevan, karena bagaimana pun juga peserta didik harus ditempatkan pada posisi sentral yang harus dijaga eksistensi dirinya.

Ketiga, dalam rangka pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi, harus melakukan "competency need assessment test". Menurut hemat penulis penggunaan kata test merupakan ungkapan redunden, maka sebaiknya dihilangkan maksudnya sudah diwakili oleh assessment.

3. Catatan untuk implementasi Kurikulum 2004 untuk SMA/MA

Ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian. *Pertama,* pemberian kewenangan kepada sekolah yang sangat banyak bagi sekolah maju dan berada di tengah-tengah masyarakat maju dan peduli, cenderung akan mempercepat proses akselerasi pencapaian kemajuan sekolah, namun perlu diperhatikan bahwa pemberian kewenangan kepada sekolah yang sangat banyak bagi sekolah yang berkualitas rendah yang kemampuan masyarakat dan kepeduliannya rendah pula merupakan hambatan tersendiri. Padahal jumlah sekolah yang demikian relatif banyak. Maka untuk mendorong kemajuan bersama, perlu diupayakan pembinaan kolektif secara terarah, di samping dukungan sarana dan fasilitas.

Kedua, Kurikulum 2004 ini dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2004 sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah. Namun untuk mendapatkan kepastian, kiranya perlu kejelasan waktu setiap sekolah harus melaksanakan kurikulum 2004. Kesiapan sekolah pada hakekatnya sangatlah relatif.

4. Catatan untuk implementasi Kurikulum 2004 untuk SMK/MAK

Ada beberapa hal yang perlu dicermati apa yang terkandung dalam Kurikulum 2004 untuk SMK/MAK. *Pertama,* kurikulum dikembangkan sangat ditentukan oleh *Market Driven.* Pertimbangan akan lebih prospektif, jika dalam batas tertentu kurikulum juga memungkinkan peserta didik dapat menguasai prinsip-prinsip atau inti dari mata pelajaran, sehingga pada saatnya mereka dapat manfaatkannya untuk pengembangan diri.

Kedua, untuk menjamin lulusan SMK di semua wilayah, kiranya uji kompetensi tidak cukup dengan uji kompetensi yang bertaraf nasional, melainkan juga bertaraf internasional, karena sudah cukup banyak lulusan SMK yang dihadapkan pada lapangan kerja yang menuntut kompetensi bertaraf internasional, misalnya yang berada berdekatan dengan negara tetangga.

Ketiga, berdasarkan dukungan terhadap mutu, nampak bahwa posisi konselor sekolah belum dipandang sebagai komponen penting dalam pendidikan SMK/MAK. Menurut hemat konselor sekolah memiliki posisi yang penting juga terutama dalam memberikan bimbingan karier dan pribadi, sehingga peserta didik tidak hanya dituntut meraih kompeten tertentu, tetapi juga kecakapan personal-sosial dan wawasan karier, sehingga mereka memeliki kesiapan yang lebih mantap dalam memasuki masyarakat dan dunia kerja.

5. Catatan untuk implementasi Kurikulum 2004 untuk PKh

Pada dasarnya kurikulum PKh ada dua pilihan, artinya bahwa peserta didik yang bisa mengikuti program sekolah reguler, mereka dapat diberlakukan kurikulum reguler, namun peserta didik yang merasa kesulitan mengikuti program reguler, mereka perlu mendapatkan kurikulum tersendiri. Untuk pengembangan kurikulum PKh sebaiknya lebih bertumpu pada potensi dan tugas perkembangan anak daripada tuntutan masyarakat, walaupun dalam batas tertentu mereka perlu juga menyesuaikan diri pada perubahan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Penutup

Demikianlah beberapa telaah kritis terhadap Kurikulum 2004 baik berkenaan dengan konsep, persiapan, maupun implementasinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan bekal yang berarti, terutama bagi para auditor yang

dewasa ini lebih dituntut dapat memerankan dirinya secara produktif dalam audit kinerja daripada audit finansial. Memang banyak hal yang dapat diambil pelajaran dari kehadiran Kurikulum 2004, baik yang berkenaan dengan kelebihan dan keterbatasannya. Dengan memanfaatkan peluang dan ancaman yang ada, para auditor diharapkan menunjukkan sikap yang lebih arif terhadap kehadiran Kurikulum 2004, sehingga ke depan kehadiran para auditor juga dapat memberikan sumbangan yang bermakna bagi keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

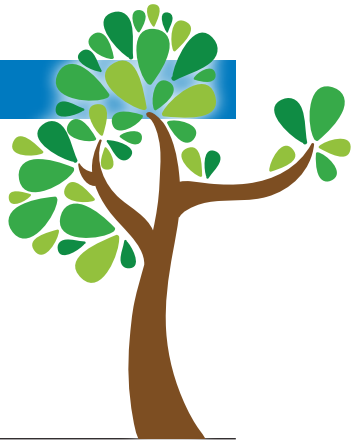

Catatan Terhadap Konsep Kurikulum 2013

1. Pentingnya pengembangan Kurikulum 2013, dapat diterima sepenuhnya, karena kondisi, kebutuhan dan karakteristik peserta didik berkembang dan tuntutan masyarakat dan perkembangan ipteks (bukan sekedar kebutuhan) berubah semakin cepat. Mari kita perhatikan bahwa perkembangan duplikasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi setiap 100 tahun pada 1700-1900an; terjadi setiap 20 tahun pada tahun 1940an; terjadi setiap 7 tahun pada tahun 1970an; terjadi setiap 2 tahun pada tahun 2004; dan diperkirakan terjadi setiap 35 hari pada 2015.
2. Persoalan standar nasional pendidikan dewasa ini belum terpenuhi hampir semuanya, misal: standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, dan standar sarana-prasarana, dan sebagainya. Karena itu ketika dilakukan pengembangan kurikulum dalam waktu yang sama kiranya perlu diupayakan secara terus menerus pemenuhan standar.
3. Tantangan masa kini dan masa depan, di antaranya: kapitalisme, pragmatisme, hedonisme, dan materialisme tidak dapat dihindari. Menurut hemat saya, kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh insan masa depan, selain yang dicantumkan dalam paparan, di antaranya kompetensi pengetahuan dasar, penguasaan sain dasar, dan melek digital bagi anak bangsa yang telah melewati pendidikan dasar.
4. Menurut hemat penulis, tantangan kemampuan masa depan tidaklah semata-mata terkait dengan kehidupan materialistik dan duniawiyah saja, melainkan juga kehidupan spiritualistik dan ukhrawiyah (hal 8). Karena itulah orientasi pendidikan perlu diupayakan secara optimal untuk membentuk manusia utuh.
5. Demikian juga halnya bahwa rumusan kompetensi, seyogyanya tidak hanya diturunkan dari kebutuhan saja (yang bersifat internal), melainkan juga

tuntutan *atau demand* (yang bersifat eksternal). Pada hakekatnya ada 2 jalan menuju kompetensi. Jalan **pertama**, untuk mengetahui kompetensi dapat dilakukan dengan penilaian proses dan penilaian yang berfokus kepada potensi atau bakat. Jalan **kedua,** untuk mengetahui kompetensi dapat dilakukan dengan penilaian terstandar. Hal ini meneguhkan konsep yang dimiliki oleh tim pengembang.

6. Menyadari akan kompleksitas pengembangan kurikulum, kiranya implementasi kurikulum perlu dilakukan secara menyeluruh dan bertahap, baik dikaitkan dengan jenis maupun satuan pendidikan. Misalnya: tahun 2013 untuk SD, SMP dan SMA, serta tahun 2014 untuk SMK dan Pendidikan Khusus (anak berkebutuhan khusus bisa dididik di sekolah khusus dan sekolah inklusif). Jika memperhatikan konsep yang ada, mengapa pengembangan kurikulum tersebut tidak dimulai dari pendidikan anak usia dini? Kita ingat bahwa Finlandia dan Swedia yang menunjukkan prestasi tertinggi siswanya, memberi perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan prasekolah.
7. Kurikulum 2013 diharapkan peran pemerintah sangat tinggi, apakah ini untuk semua jenjang, jenis, dan satuan pendidikan? Bagaimana dengan pendidikan di bawah institusi swasta atau *private* yang memiliki *values* dan visi tersendiri. Apakah yayasan dalam batas tertentu mendapatkan kesempatan untuk mengambil peran bersama-sama pemerintah. Demikian pula kita sangat menyadari bahwa posisi guru sebagai pengembang kurikulum *(curriculum developer)* tidak dapat diabaikan, di samping kepala sekolah. Mari kita perhatikan, adanya sekolah unggul atau favorit di setiap kota dan daerah, bukan karena dokumen kurikulumnya semata, melainkan banyak tergantung pada pengembang atau *implementor* kurikulum di sekolah. Menyadari kondisi ini kiranya peran guru perlu memperoleh peran yang cukup untuk berinovasi dan berimprovisasi, sehingga mampu berkontribusi bagi kesuksesan sekolah, dengan tetap menghargai peran pemerintah yang ingin meringankan beban guru.
8. Menyadari akan posisi Indonesia berkenaan dengan bidang-bidang tertentu dibandingkan negara-negara lain itu perlu sekali. Namun apakah itu sepenuhnya dibenarkan bahwa materi pelajaran harus disesuaikan dengan materi tes internasional, padahal dalam tujuan pendidikan nasional ditemukan aspek-aspek yang menunjukkan ciri-ciri tersendiri yang wajib kita capai, misalnya aspek nilai dan sikap (nilai-nilai moralitas).
9. Mari kita mengambil pelajaran dari Amerika Serikat (AS), bahwa prestasi anak-anak AS memang relatif kalah jauh dibandingkan dengan prestasi anak-anak negara maju lainnya untuk pendidikan menengah ke bawah, na-

mun untuk pendidikan tinggi, mahasiswa-mahasiswa AS jauh menunjukkan prestasi gemilang. Kebebasan berekspresi dan berpkir kreatif mendapatkan fasilitasi selama pendidikan menengah ke bawah, sedangkan pada saat studi di perguruan tinggi mereka leluasa menunjukkan pikiran kreatif dan mampu menghasilkan karya-karya inovatif. Wajar jika banyak Nobel didapatkan ilmuwan AS. Karena itu memikirkan pengembangan kurikulum pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, tidak bisa dipisahkan dengan kurikulum pendidikan tinggi. Untuk itu saya ingin sekali menyumbang pemikiran jika dikehendaki, bahwa tim pengembang kurikulum untuk pendidikan menengah ke bawah harus duduk bersama dengan pengembang kurikulum pendidikan tinggi, di samping pengembang kurikulum pada pendidikan non formal, dan pengembang pendidikan dan pelatihan di dunia usaha dan dunia industri.

10. Di satu sisi, anak-anak kelas awal SD diajari materi-materi yang terlalu sulit (hal 73), namun sedikit disayangkan bahwa materi yang diajarkan itu justru banyak tidak samanya dengan materi tes internasional. Dalam konteks ini, validitas internasional tentu dipertanyakan, atau isi kurikulum sekolah kita yang kurang relevan dengan kebutuhan. Menghadapi persoalan ini kiranya perlu segera diambil sikap. Yang penting kurikulum kita seharusnya sesuai dengan kebutuhan hidup bangsa kita, sehingga pendidikan kita efektivitas yang tinggi.
11. Mengingat pentingnya kreativitas bagi peserta didik, kiranya upaya pembelajaran yang mendorong kreativitas berkembang perlu terus diupayakan. Hal ini tidaklah mudah, karena *mindset* guru selama ini lebih cenderung mengedepankan berpikir konvergen atau konformis daripada berpikir divergent.
12. Memperhatikan konsep yang sudah disiapkan oleh tim pengembang kurikulum, saya memiliki kesan bahwa Kurikulum 2013 ini baru mengedepankan konsep umumnya, belum sampai pada pengembangan kurikulum per mata pelajaran, baik yang terkait dengan *scope* dan *sequence*-nya. Jika belum atau tidak dilakukan pengembangan kurikulum yang lebih detail, bisa dikhawatirkan bahwa kinerja guru tidak mengalami perubahan atau perbaikan.
13. Melakukan pengembangan kurikulum pada hakekatnya tidak hanya difokuskan pada penyelesaian kurikulum dan pembelajaran itu saja, melainkan ada 2 komponen utama lainnya, yang juga sama-sama pentingnya yaitu administrasi dan supervisi pendidikan dan layanan Bimbingan dan Konseling. Sangatlah disadari bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan kendali mutu yang dilakukan sekolah dan pengawas dengan baik dapat mengantar-

kan sekolah efektif dan berprestasi. Di samping itu untuk meraih keberhasilan akademik, karier, dan hidup, layanan Bimbingan dan Konseling memainkan peran yang sangat penting. (hal 87).

14. Target sasaran penatar nasional sudah dirancang sedemikian rupa, namun perlu dipertimbangkan juga adanya penatar untuk guru pendidikan khusus dan guru Bimbingan dan Konseling untuk SD, SMP, dan SMA/SMK.
15. Kesiapan implementasi, materi pembelajaran yang disiapkan untuk guru SMP dan SMA/SMK sebagian besarnya sama. Untuk hal ini ukuran dan proporsinya perlu ada kejelasan, terutama dikaitkan dengan tujuan atau kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa untuk menghadapi masa depan berbeda.
16. Berkenaan dengan desain implementasi kurikulum 2013, struktur Kurikulum untuk SD, dimungkinkan ada mapel IPA dan IPS untuk kelas IV sd VI (hal 5), mengapa Buku Kelas IV masih bernuansa Tematik (hal 15) sama dengan Buku Kelas I. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran SD kelas IV sampai dengan kelas VI kiranya perlu juga pembelajarannya bernuansa mapel, disamping pembelajaran tematik.
17. Berdasarkan kuota target implementasi untuk SMP dan SMA/SMK sebanyak 100%, sedangkan untuk SD sebanyak 30%. Jika kesiapan implementasinya sudah dapat dicapai optimal, kiranya target 100% perlu untuk semua satuan pendidikan, karena akan menjamin gerakan bersama secara serentak dan akan memperkokoh kemajuan bersama. Namun sekiranya belum menunjukkan kesiapan yang memadai, maka perlu dilakukan *pilot project* dengan target group yang relatif terbatas dan jumlah angka sesuai dengan kesanggupan, sehingga efisiensi anggaran dapat dicapai. Apalagi sejauh ini jumlah anggaran yang disiapkan begitu massif. Untuk dapat memberikan kepuasan bagi semua stakeholder perlu kehati-hatian, sehingga terhindar dari kerugian yang besar, yang tidak hanya terkait dengan aspek materiilnya, melainkan juga aspek sosialnya.
18. Jika Struktur kurikulum dan materi pembelajaran SMP dan SMA tidak berubah secara signifikan, bagaimana kesinambungan dan relevansi dari jenjang pendidikan terendah yang mengalami perubahan dan tantangan masa depan. Padahal kehadiran Kurikulum 2013 diharapkan juga ada nuansa penyesuaian materi dengan standar internasional. Hal ini perlu menjadi pertimbangan serius, karena pengembangan kurikulum seharusnya bersifat komprehensif.

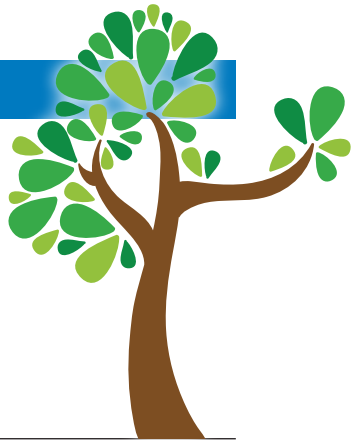

Perubahan Kurikulum, Sudah 'Sunnatullah'

PERTAMA-TAMA, mari panjatkan puji syukur ke hadlirat Allah swt yang telah memberi nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam acara yang sangat penting ini, *Seminar Nasional Menyongsong Implementasi Kurikulum 2013*. Semoga berjalan lancar dan bermanfaat bagi semua.

Kedua, shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi Besar Muhammad saw, yang telah memberikan bimbingan kepada kita, semoga kita dapat menjadi pengikutnya yang setia, dan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Aamiin.

Ketiga, perkenankan saya menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Wamen yang telah berkenan memenuhi undangan kita, di tengah-tengah kesibukan beliau. Semoga kita mendapatkan informasi yang up-todate bekenaan dengan kebijakan pendidikan nasional, terutama berkenaan dengan Kurikulum 2013.

Keempat, saya ingin sekali juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pembawa makalah, peserta, dan panitia yang memungkinkan acara ini dapat berlangsung dengan meriah dan hikmat, semoga kegiatan seminar ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua.

Salah satu subsistem penting pendidikan adalah kurikulum pendidikan.

1. Secara *sunnatullah* kurikulum selalu berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perubahan zaman, di samping pemenuhan kebutuhan individu.
2. Perjalanan pendidikan nasional telah mengalami perubahan/pembaharuan kurikulum dari waktu ke waktu. Secara historis, telah kita kenal Kurikulum 68, 75, 84, 94, 2004, hingga belakangan muncul kebijakan Kurikulum 2013.
3. Kita ingat, bahwa perkembangan ipteks, terlebih-lebih di saat teknologi IT memainkan peran penting dalam kemajuan ipteks. (tahun 1700 sd 1900

terjadi duplikasi temuan ipteks pada setiap 100 tahun, tahun 1940an pada setiap 20 tahunan, tahun 1970-an, setiap 7 tahunan; tahun 2004 pada setiap 2 tahunan, dan diprediksi tahun 2015an pada setiap 35-an hari. Menyadari akan hal, maka Pengembangan atau Pembaharuan kurikulum menjadi suatu kebutuhan.

4. LPTK memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengawalan Kurikulum, baik dalam pengembangan materi kurikulum maupun penyiapan SDM yang bertugas untuk sosialisasi atau desiminasi implementasi kurikulum.
5. Untuk dapat berpartisipasi secara optimal dalam implementasi Kurikulum 2013 ini kita sangat bersyukur akan memperoleh informasi langsung dari Pengembang utama, Bapak Wamendikbud bidang Pendidikan, Prof Dr Musliar Kasim, dengan kata lain, bahwa substansi yang kita dapatkan benar-benar *Mutawatir*. Karena itu kami sangat mengharapkan para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali informasi dan mendiskusikan secara optimal, sehingga kita dapat mengawal implementasi kurikulum di lapangan secara efektif.
6. Kami juga merasa perlu memberikan penghargaan yang tinggi kepada IKA, bahwa pada kesempatan ini, dalam rangka mensukseskan Dies Natalis UNY ke-49, dapat mewujudkan kegiatan ilmiah yang sangat dibutuhkan kita, terutama berkenaan dengan Kurikulum 2013.
7. Kami sangat berharap tahun depan IKA dapat mengupayakan Reuni Akbar Alumni UNY 2014 dalam rangka Ulang Tahun Emas, 50 Tahun UNY. dan sejumlah agenda penting yang dapat menggambarkan Kontribusi Alumni bagi Pembangunan Nasional, khususnya pembangunan pendidikan nasional.

Akhirnya dalam kesempatan yang sangat baik ini sekali lagi ingin menyampaikan ucapan penghargaan yang sangat tinggi dan ucapan terima kasih yang sangat banyak atas perkenan Bapak Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bidang Pendidikan yang benar-benar menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan beliau. Demikian pula Bapak Nara Sumber lainnya serta para pemakalah, sehingga Seminar ini memiliki nilai manfaat yang besar. Selain daripada itu sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan seijin Ibu dan Bapak sekalian, perekenankanlah saya membuka acara ini dengan mengucap Bismillaahirahmanirraahiim, semoga Allah swt meridloi kita. Aamiin..!

Tulisan ini merupakan sambutan sebagai Rektor UNY pada Seminar Nasional Menyongsong Implementasi Kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh IKA UNY pada 27 April 2013.

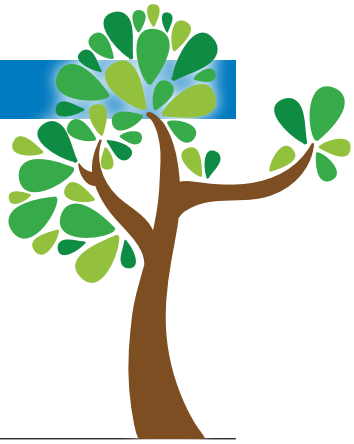

Mengawal Implementasi Kurikulum 2013

DENGAN selalu mengharapkan ridlo Allah swt, pada hari yang baik, 15 Juli 2013, Peluncuran Pelaksanaan Kurikulum 2013 secara resmi dilakukan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA, di SMA Negeri 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam konteks tempat, suatu kehormatan tersendiri bagi masyarakat pendidikan DIY, karena DIY menjadi tempat bersejarah untuk implementasi Kurikulum 2013 yang berlaku secara nasional.

Hingga dilakukan peluncuran, Kurikulum 2013 masih terus menjadi perdebatan luas, antara yang pro dan kontra. Fenomena pro dan kontra secara terbuka atau sembunyi-sembunyi di era demokrasi ini tidak bisa dihindari. Kita sangat menyadari bahwa pada hakekatnya tidak ada di dunia ini yang sempurna, termasuk Kurikulum 2013, kecuali kebenaran milik Allah swt. Karena itu yang penting kita selalu berusaha mencari solusi yang dijumpai di balik kebijakan Kurikulum 2013 tersebut.

Dalam konteks waktu, kita bersyukur bahwa peluncuran pelaksanaan Kurikulum 2013 bertepatan dengan Ramadan 1434 H. Bulan Ramadan sarat dengan keutamaan, terutama saat turunnya wahyu pertama dari Allah swt yang menandai kerasulan Muhammad. Mudah-mudah peristiwa ini memberikan spirit dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui implementasi Kurikulum 2013 yang terutama membawa misi pembinaan karakter dan kreativitas untuk menghadapi tantangan masa depan.

Posisi Pemerintah

Dengan penuh rasa tanggung jawab, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan kebijakannya bahwa Kurikulum baru untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, dinamai Kurikulum 2013. Penentuan pelak-

sanaan peluncuran Kurikulum 2013 hari ini sangatlah terkait dengan awal penyelenggaraan pendidikan Tahun Ajaran 2013-2014. Munculnya sikap kritis dan kontra dari seluruh lapisan masyarakat perlu diapresiasi oleh Pemerintah, sehingga dapat menjadi *feedback* untuk penyempurnaan kebijakan pendidikan nasional berkenaan dengan pengembangan kurikulum.

Wujud tanggung jawab Pemerintah dapat dilihat pada kesungguhan Pemerintah dalam menyiapkan dan mematangkan konsep kurikulum, mengembangkan silabus, menyiapkan (menulis dan mencetak) dan mendistribusikan buku teks atau bahan ajar baik berkenaan dengan buku peserta didik maupun buku pegangan guru, menyiapkan nara sumber untuk semua level, dan menentukan jumlah, memilih dan menatar guru, kepala sekolah dan pengawas target. Di samping itu upaya penting yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu membangun dan menjaga jaringan dan kerja sama yang sinergis dengan semua stakeholder, terutama dinas pendidikan, Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan (LPTK), dan organisasi profesi, serta yayasan penyelenggara pendidikan, sehingga dapat memperlancar proses implementasi kurikulum.

Untuk menuntaskan implementasi kurikulum 2013, pemerintah terus berkewajiban mengawal implementasi kurikulum secara tuntas, melanjutkan penulisan, pengadaan dan pendistribusian buku kelas atasnya, dengan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, di samping melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di lapangan dan selalu terbuka terhadap *feedback* dari semua kalangan.

Pengembang Kurikulum

Pengembang kurikulum dimaksudkan di sini adalah pengembang dokumen kurikulum 2013, yang pada hakekatnya bertanggungjawab dalam membangun rasional kurikulum, tujuan, dan struktur kurikulum serta juga mengembangkan silabus. Di samping itu pengembang kurikulum harus mengawal penulisan buku teks dan buku penunjang, serta sub sistem pendidikan dan pembelajaran lainnya.

Demikian juga pengembang kurikulum 2013 bertanggungjawab untuk diseminasi kurikulum hingga sampai target ujung tombak di sekolah, sehingga terbangun *common vision.* Dengan begitu diharapkan kita bisa terhindar dari distorsi dan pembiasan implementasi kurikulum, sehingga pelaksanan praktek pendidikan dan pembelajaran di kelas tetap terkendali. Dalam posisi ini pengembang kurikulum memainkan peran sebagai pengarah dan mediator implementasi kurikulum, di samping pengembang kurikulum yang mengetahui benar roh dan spirit kurikulum 2013.

Peran Guru dan LPTK

Guru pada hakekatnya memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal implementasi kurikulum di lapangan. Berdasarkan hasil banyak penelitian, guru memiliki sumbangan yang terbesar secara signifikan dalam implementasi kurikulum. Hal ini dibuktikan bahwa selama ini dokumen kurikulum secara nasional sama, namun pada prakteknya ada sekolah yang masuk katagori unggul, rata-rata, dan rendah. Diferensiasi katagori ini sangat diyakini berkaitan erat dengan kualitas kinerja guru dan kepemimpinan kepala sekolah.

Menyadari akan pentingnya posisi guru dan kepala sekolah, maka kerapihan diseminasi kurikulum terhadap guru dan kepala sekolah perlu diupayakan secara optimal. Untuk menjamin guru tetap terjaga komitmennya dalam memainkan perannya sebagai pengembang kurikulum di kelas *(curriculum developer in the classroom)*, kiranya guru perlu dilindungi keamanannya untuk dapat memberikan keteladanan akhlaq yang mulia dan budi pekerti, menciptakan inovasi dan mengembangkan kreativitasnya, di samping diberikan insentif yang memadai. Demikian pula untuk menjamin kepala sekolah dapat menegakkan kepemimpinan akademiknya, perlu dilindungi posisinya, sehingga mereka memiliki keberanian membuat keputusan yang visioner.

Selanjutnya, dalam mengawal implementasi kurikulum baik pada tataran pengembangan dokumen kurikulum, maupun pelaksanaan di sekolah, LPTK juga memainkan peran yang sangat strategis. Bahkan lebih jauh dari itu, LPTK dapat mengambil bagian dalam mengawal evaluasi kurikulum, sehingga kurikulum tetap terjaga relevansinya. Demikian juga, LPTK hendaknya selalu dapat memainkan peran penting sebagai katalisator dalam menjamin implementasi kurikulum yang kontekstual.

Akhirnya dengan menyadari kompleksitas persoalan pendidikan, terutama kurikulum untuk pendidikan dasar dan menengah yang tidak pernah berakhir, bahkan disinyalir akan semakin menantang di kemudian hari. Hal ini minimal ditunjukkan dengan masih terbatasnya jumlah buku teks untuk SMA, dan belum diluncurkannya buku teks untuk SMK yang sangat beragam konsentrasinya. Untuk itu pengawalan pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013, tidak hanya menjamin mekanisme implementasinya, melainkan juga dampaknya terhadap kualitas lulusan. Dengan pengawalan yang baik di semua aspek, diharapkan sekali Kurikulum 2013 menjadi solusi untuk menghasilkan generasi masa depan yang lebih baik.

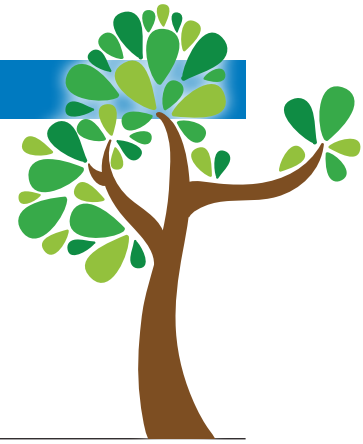

Menyoroti UNAS dan US

MENTERI Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh menegaskan, pemerintah mengambil keputusan tegas untuk tetap melaksanakan ujian (UNAS) saat menghadiri peringatan puncak Hari Internasional Penyandang Cacat di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (3/12), seperi dikutip *Antara.* Sikap tegas Mendiknas sangat diperlukan dan patut diapresiasi, karena seorang *top leader* dituntut untuk segera mengambil suatu sikap yang tegas di tengah-tengah ketidakpastian, walaupun "serangan" bertubi-tubi dari berbagai penjuru.

Keputusan ini tentu memberikan konsekuensi yang jelas dan luas, karena menyangkut banyak pihak, terutama peserta didik dan pendidik. Harus dapat dipastikan bahwa pelaksanaan UNAS memiliki *mashlahah* yang lebih banyak daripada *madharat*nya, baik ada tataran program dan materinya, pelaksanaannya, serta dampaknya.

Jika kita sebagai masyarakat mau jujur, maka kita harus dapat mengakui bahwa ada ketidak-*fair*-an di antara warga masyarakat dalam menghadapi UNAS dan USEK. Banyak unsur masyarakat, baik masyarakat umum, komunitas terdidik, para ahli, bahkan guru dan peserta didik pun ikut-ikutan menunjukkan ketidakpercayaan (*distrust*) dan "menghina" keberadaan UNAS, sebaliknya tidak pernah sedikitpun muncul anggota masyarakat yang mempersoalkan USEK. Padahal UNAS pada prakteknya disiapkan jauh lebih matang dan lebih baik, baik terkait dengan validitas, reliabilitas maupun tingkat kesulitannya; percetakan, pendistribusian, dan penyimpanan soal juga dijaga ketat; pengawasan ujian dilakukan ekstra ketat pula; pemindaian dilakukan secara cermat dan bertanggungjawab; dan penentuan kelulusan juga didasarkan pada standar yang jelas.

Alhasil, kelulusan peserta ujian cenderung menggambarkan potensi dan kemampuannya, kecuali pada kasus-kasus tertentu. Tidak sedikit kondisi ini

menimbulkan kemarahan massa, terlebih bagi yang tidak lulus. Bahkan masyarakat lain pun ikut-ikutan nimbrung menunjukkan antipatinya, kendatipun mereka tidak tahu menahu duduk persoalannya.

Sebaliknya USEK pada prakteknya disiapkan, dilaksanakan, dan dianalisis hasilnya tidak seketat UNAS, sehingga ada kecenderungan semua anak lulus dan menunjukkan nilai yang baik.

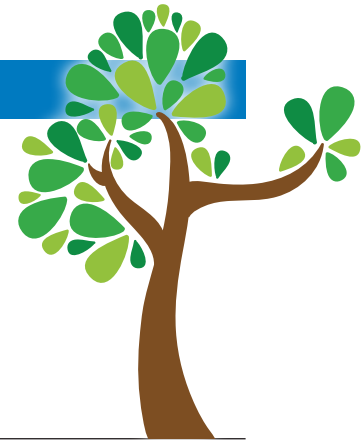

Refleksi UN dan UASBN

BARU saja hajatan Ujian Nasional (UN) bagi SMA-MA-SMK-SMLB dan SMP-MTs-SMPLB, dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD-MI-SDLB digelar serentak se Indonesia. Segenap panitia penyelenggara dan Tim Pemantau Independen (TPI), khususnya untuk UN telah bekerja keras dan sungguh-sungguh guna mensukseskan pelaksanaan UN di seluruh Indonesia. Namun secara empirik diakui bahwa masih cukup banyak dijumpai penyimpangan dan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan UN, sehingga sempat menimbulkan sedikit gejolak pada awal-awal pelaksanaan UN, sampai-sampai ICW (sebuah LSM yang berkecimpung dalam pemberantasan korupsi) ikut campur dalam merespons gejolak itu. Beruntunglah bahwa masyarakat tidak terlalu gampang terpancing oleh ungkapan-ungkapan yang provokatif, sehingga pelaksanaan UN dan UASBN, baik utama maupun susulan dapat berjalan lancar, tanpa ada halangan yang berarti.

Walaupun secara selintas pelaksanaan UN dan UASBN berlangsung lancar, kiranya masih tetap ditemui sejumlah persoalan. Setelah dilakukan identifikasi secara cermat kiranya ditemukan sejumlah persoalan, di antaranya: percetakan soal dan lembar jawaban ujian (LJU) yang beredar masih dijumpai cacat, pengepakan bahan ujian masih belum mantap, pengiriman soal ke pokja dengan kendaraan terbuka yang rawan kena hujan, pengiriman lembar jawaban ujian yang tidak tertata rapi, pengawasan ujian yang tidak mengikuti prosedur, dan pengepakan LJU yang menyalahi prosedur. Untuk lebih jelasnya, persoalan-persoalan tersebut dapat dideskripsikan lebih detil sebagai berikut.

Pertama, persoalan kualitas percetakan baik untuk soal maupun lembar jawaban nampaknya cukup mengganggu kelancaran ujian. Kondisi soal yang kosong dalam satu halaman, tinta yang berlebihan pada LJU, dan LJU yang berlipat-lipat. Kondisi ini dapat diatasi dengan pengerahan jumlah tenaga yang

lebih memadai dan kecermatan tenaga yang lebih tinggi, sehingga *cross check* pada setiap langkah percetakan dokumen soal dan LJU dapat dilakukan secara terkendali. Yang pada akhirnya dapat memberikan kepuasan, terutama bagi peserta ujian.

Kedua, pengiriman lembar jawaban ujian yang tidak tertata rapi, sehingga berpotensi untuk dapat diambil dan digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Kondisi ini berpotensi dapat memungkinkan seseorang melakukan pergantian jawaban siswa untuk "memperjuangkan" kelulusan. Oleh karena itu lembar jawaban seharusnya disimpan dan diamankan sehingga dapat dihindarkan dari tangan-tangan orang yang tak bertanggungjawab.

Ketiga, pengawasan ujian yang tidak mengikuti prosedur baik dalam memulai, berlangsungnya, maupun mengakhiri pengerjaaan ujian, akan dapat merugikan peserta ujian. Karena itu seorang pengawas diharapkan sekali *committed* dengan Pedoman Operasi Standar pelaksanaan ujian, sehingga dapat melayani dan menjamin kepuasan peserta ujian tanpa merugikan waktu dan pengerjaan ujian serta hasilnya, yang mencakup di antaranya: kapan dimulai pengisian data pribadi, kapan dimulai pengerjaaan soal, apa yang seharusnya ada di atas meja ujian, apa yang harus diisikan dalam berita acara, dan kapan harus mengakhiri ujian, serta bagaimana LJU hasil pengerjaan peserta ujian dikemas.

Keempat, pengepakan LJU yang menyalahi prosedur sehingga dapat merugikan peserta ujian. Pengepakan dan pengeliman amplop LJU yang kurang rapat, LJU tanpa dibungkus dengan plastik sebagai pelindung air, LJU tanpa dikoreksi lebih dulu, dan pengeliman amplop LJU dilakukan di luar kelas dan tanpa disegel dapat berpotensi merugikan peserta ujian. Oleh karena itu sangat diharapkan sekali pengawas dapat mengendalikan pelaksanaan ujian dengan penuh tanggung jawab, sehingga dapat memberikan jaminan atas objektivitas pelaksanaan ujian.

Mensukseskan UASBN

Secara umum dapat dikesankan bahwa UN 2008 dapat berlangsung lancar. Kiranya akan lebih bijak jika pengalaman pelaksanaan UN 2008 dapat dimbil manfaatnya untuk menghadapi pelaksanaan UASBN SD-MI-SDLB 2008, sehingga diharapkan penyelenggaraan UASBN 2008 secara serempak se Indonesia dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. Walau disadari sepenuhnya bahwa ada perbedaan penting antara UN dan UASBN terutama pengendali utamanya.

Jika UN dikendalikan langsung oleh BSNP baik itu berkenaan dengan pelaksanaan, pembuatan soal, maupun tim pemantau independennya, maka

UASBN hanya ditentukan rambu-rambunya dari BSNP sementara itu pelaksanaan, pembuatan soal, dan pemantauannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Untuk dikatahui bahwa penyiapan soal UASBN sebanyak 25%nya disiapkan oleh Pusat (BSNP) dan 75%-nya disiapkan oleh Daerah (Propinsi).

Untuk memberikan jaminan bahwa UASBN 2008 yang akan digelar pada 13, 14 dan 15 Mei 2008 dapat berlangsung lancar dan sukses, kiranya ada beberapa hal dapat diperhatikan. *Pertama,* kinerja percetakan dituntut dapat menghasilkan kualitas lembar soal dan jawaban yang baik, sehingga dapat dijamin keasliannya. Demikian pula pengepakan amplop-amplop soal diharapkan dapat disesuaikan kebutuhan UPT, sekolah dan ruang sehingga terhindar dari kebocoran soal.

Kedua, kinerja panitia diharapkan benar-benar mengikuti POS secara konsisten dengan tetap memperhatikan kondisi tempat ujian masing dengan penuh tanggung jawab, sehingga dapat menjamin akuntabilitas bagi publik. Yang pada akhirnya dapat memberikan kepuasan bagi semua stakeholders, tanpa menyisakan persoalan secara berarti.

Ketiga, peserta ujian UASBN diharapkan sekali dapat mengikuti tata tertib dan petunjuk yang ada, tanpa dibayang-bayangi oleh ketakutan yang berlebih-lebihan, karena boleh jadi dapat mempengaruhi kondisi selama menghadapi ujian. Dengan demikian diharapkan peserta ujian dapat menyelesaikan soal-soal ujian dengan penuh ketenangan dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Keempat, pengawas diharapkan sekali dapat menunjukkan kinerja yang optimal untuk mengamankan pelaksanaan ujian, terlebih-lebih tidak ada TPI untuk UASBN. Rahasia negara baik itu soal dan LJU hendaknya dijaga dengan sebaik-baiknya oleh pengawas, sehingga tidak merugikan peserta ujian dan sekolah. Dengan demikian, sejak menerima amplop soal dan memantau peserta ujian dalam mengisi semua data yang diperlukan - terutama data identitas diri, sampai dengan menyerahkan amplop LJU kembali ke panitia, pengawas benar-benar mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Kelima, orangtua diharapkan sekali memberikan *support* mental yang sebaik-baiknya dan do'a sebanyak-banyaknya, sehingga mampu memberikan dukungan spirit bagi anak-anaknya untuk mengikuti ujian, dengan harapan dapat berhasil yang sebaik-baiknya.

Akhirnya untuk dapat menjamin pelaksanaan UASBN SD 2008 yang efektif dan akuntabel, semua pihak diharapkan sekali *committed* dengan tugas pokok dan fungsinya masing. Walau anak SD diduga sangat kecil kemungkinan untuk melakukan penyimpangan, namun yang dikhawatirkan adalah ambisi kepala sekolah dan guru untuk dapat meluluskan peserta didiknya. Boleh jadi mereka dengan nekatnya mengkondisikan peserta ujian, bahkan pengawasnya untuk

berbuat longgar dalam melaksanakan tugas, sehingga peserta ujian dengan leluasa melakukan kerja sama. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi. Semoga kepala sekolah dan guru-guru mampu mengendalikan diri dari berbagai godaan, sehingga mampu mendidik kejujuran peserta didik sedini mungkin. Amiin.

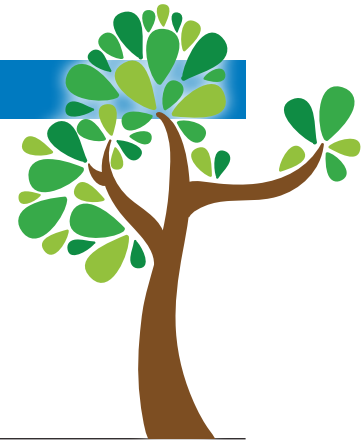

UNAS Dilarang?

MAHKAMAH Agung membuat kejutan bagi praktek pendidikan nasional dengan mengeluarkannya surat penolakan tertanggal 14 September 2009 terhadap permohonan pemerintah terkait dengan ujian nasional dalam perkara no. 2596 K/Pdt/2008. Dalam putusannnya berbunyi bahwa ujian nasional dilarang pelaksanaannya sebelum ada perbaikan profesionalisme guru, sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Terhadap keputusan ini, ada dua kubu yang bersikap, yaitu kubu yang kontra dan kubu yang pro terhadap penyelenggaraan UNAS.

Kelompok yang kontra terhadap UNAS, memahami keputusan MA itu dianggap sebagai keputusan yang final dan seharusnya diterima, karena UNAS tidak ada dasar hukumnya, UNAS melanggar HAM, UNAS dianggap satu-satunya penentu kelulusan, UNAS tidak menghargai posisi guru, UNAS membuat peserta didik *stress,* UNAS meniadakan fungsi pendidikan, UNAS hanya mementingkan aspek akademik, dan sebagainya. Masyarakat yang kontra posisi UNAS secara spontan bersukaria bahwa perjuangannya berhasil, bahkan mereka terus memperjuangkannya sampai kapanpun, bahwa keputusan bersifat final.

Kelompok yang mendukung terhadap UNAS, juga merasa tertantang dalam menghadapi keputusan MA yang menolak kasasi Pemerintah. Mereka berkeyakinan bahwa UNAS memiliki dasar hukum, tidak hanya UU Sisdiknas tahun 2003, melainkan juga PP No.19/2005; UNAS tidak melanggar HAM karena perumusan *passing grade* kelulusannya didasarkan atas masukan dari berbagai *stakeholders,* di samping itu ketidaklulusan peserta UNAS merupakan hal yang biasa bagi yang tidak mampu memenuhi ketentuan angka kelulusan; Nilai UNAS hanya salah satu variabel untuk penentuan kelulusan disamping siswa harus mampu menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang salah satunya ditandai dengan lulus ujian sekolah, siswa memperoleh nilai minimal 6

pada penilaian akhir untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan; UNAS tidak sepenuhnya menimbulkan stres, kalau sekiranya stress dalam konteks ini dapat juga dimaknai dengan stres positif; UNAS dapat dinilai memiliki edukatif, karena yang dijangkau bukan hanya aspek akademik saja, melainkan juga aspek lain misalnya disiplin, kejujuran, semangat untuk maju dan kompetisi secara sehat, kecakapan mengelola waktu, dan komitmen untuk menyelesaikan tugas/belajar.

Penulis bisa empati terhadap peserta didik yang merasa kecewa berat karena tidak lulus UNAS, demikian juga orangtua, guru, dan kepala sekolah Namun, sulit dipahami jika ketidaklulusan sepenuhnya dikaitkan dengan pelanggaran HAM, sehingga dapat dijadikan alasan oleh MA untuk menolak kasasi Pemerintah tentang pelaksanaan UNAS. Jika dikaji dengan benar, bahwa rumusan amar keputusan MA tidaklah otomatis dipahami adanya larangan melaksanakan UNAS.

Ada beberapa alasan yang cukup kuat untuk dapat mempertahankan UNAS dilaksanakan. **Pertama,** UNAS memiliki dasar hukum kuat, baik UU tentang Sisdiknas maupun PP tentang Standar Nasional Pendidikan. **Kedua,** secara empirik UNESCO menemukan bahwa ada kecenderungan UNAS di berbagai negara memiliki kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. **Ketiga,** UNAS bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, karena Ujian Sekolah dan kepribadian juga dapat memainkan peran penting untuk kelulusan tergantung pada keberanian sekolah (guru dan kepala sekolah). **Keempat,** UNAS dapat mendidik kejujuran peserta didik, guru, kepala sekolah, dan birokrat pendidikan. **Kelima,** UNAS dapat menjamin kompatabilitas dalam melanjutkan studi.

Untuk dapat menjamin UNAS lebih efektif, ada beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan, di antaranya: (1) perlu penegasan *passing grade* UNAS pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah yang dilakukan melalui konvensi semua pihak terkait; (2) perlu dijaga kredibilitas percetakan, pendistribusian, pelaksanaan, pengawasan, dan pemindaian; (3) perlunya keterlibatan perguruan tinggi, komite sekolah/dewan pendidikan dan organisasi profesi dalam menjaga kredibilitas pelaksanaan UNAS; (4) perlunya fasilitasi secara proporsional dan bertanggungjawab terhadap peserta didik yang kurang beruntung (fisik, sosial, ekonomi, geografis, dan kultural); (5) perlunya pengendalian yang sama antara UNAS pertama dan UNAS Ulangan; dan (6) perlunya dipertimbangkan pemisahan antara pernyataan tamat belajar dengan ketentuan kelulusan UNAS, sehingga setiap peserta didik yang tamat belum tentu lulus UNAS di sekolahnya.

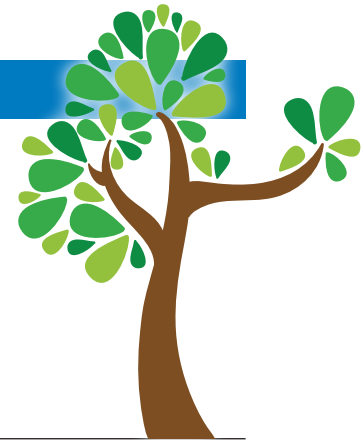

Mengulang Ujian Nasional 2009?

SECARA umum pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2009 untuk SMA/MA/SMK pada tanggal 20 s.d 24 April 2009 dan untuk SMP/MTs pada tanggal 27 s.d 30 April 2009 relatif berjalan lancar, walaupun ada sedikit masalah kecurangan yang ditemukan di beberapa tempat. Bahkan di luar dugaan, ditemukan juga adanya kesalahan langkah yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional, misalnya: masih dijumpai peserta ujian membawa *handphone* (HP) dan menggunakannya selama mengerjakan soal, kepala sekolah beramai-ramai mengerjakan soal cadangan untuk selanjutnya disebarkan hasil pekerjaannya ke peserta ujian, adanya kerja sama antara siswa dan gurunya untuk pengerjaan soal, kesalahan penyiapan materi soal, adanya kebocoran soal, dan masih ada beberapa ragam kecurangan/ kesalahan lainnya.

Atas dasar itulah maka Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai penanggung jawab UN berencana melakukan ujian ulang pada 8 s.d 12 Juni 2009 bagi 33 sekolah di 9 propinsi yang diidentifikasi ada masalah. Namun setelah dilakukan pembahasan khusus antara BSNP, DPR dan Mendiknas, akhirnya untuk sementara pelaksanaan UN ulang ditunda dan hingga kini belum ada kepastian waktunya, bahkan ada kecenderungan lain UN ulang akan ditiadakan. Rencana pelaksanaan UN ulang mendapat respons yang variatif, ada yang pro dan ada yang kontra. Kedua kubu memiliki argumentasi yang sama-sama kuatnya. Bagaimanapun juga UN ulang tidak bisa digantung, sehingga diperlukan suatu solusi yang bijak, edukatif dan bertanggungjawab.

Pihak yang kontra terhadap mengulang UN didasari atas asumsi bahwa peserta ujian perlu diberi pelajaran yang mendidik, sehingga tidak pada tempatnya, jika yang melakukan kecurangan dalam proses ujian diberikan toleransi sedemikian rupa. Termasuk kecurangan sistematispun, bukan merupakan suatu alasan yang kuat untuk mengadakan ujian ulangan. Karena sikap ini di-

pandang tidak menghargai kejujuran yang ditunjukkan peserta ujian lainnya. Semua kecurangan baik secara personal maupun kolektif berhak mendapatkan perlakuan sanksi yang tegas. Dengan demikian tindakan tersebut menjadi pendidikan bagi semua dan diharapkan berdampak positif untuk seterusnya.

Pihak yang bersikap pro terhadap mengulang UN didasari atas asumsi bahwa kesalahan terletak pada keteledoran panitia, sehingga pelaksanaan ujian tidak sesuai dengan standar prosedur operasional, misalnya: kesalahan mengeset materi soal, kebocoran yang terjadi ketika percetakan dan pendistribusian soal, dan sebagainya. Pemberian kesempatan untuk mengikuti ujian ulangan akan berdampak positif bagi peserta yang berpotensi, sehingga mereka dapat mengaktualisasikan diri secara optimal. Dengan demikian semua peserta ujian diharapkan mendapatkan kepuasan dalam mengikuti proses ujian nasional.

Persoalan mengulang UN, cepat atau lambat, harus segera ada penyelesaian, tidak bisa digantung, karena hal ini kan menimbulkan masalah yang serius bagi peserta ujian yang terkena persoalan ini, terutama yang tidak bersalah. Menurut hemat penulis, BSNP seharusnya segera memastikan peta persoalan. Jika ditemukan semua sekolah melakukan pelanggaran atau kecurangan, baik secara personal maupun kolektif, maka tidak sepatutnya mereka diberikan kesempatan untuk mengulang. Dengan harapan sanksi itu menjadi pelajaran yang berharga bagi pelaku maupun pihak lain. Hal ini sejalan dengan permintaan DPR. Namun sebaliknya jika ada sekolah yang teridentifikasi terkena akibat kesalahan prosedur, maka sudah sepatutnya sekolah mendapatkan hak untuk melaksanakan ulangan ujian, karena mereka tidak pada tempatnya untuk dirugikan akibat dari keteledoran orang lain. Hal ini perlu diusahakan dengan keras, semata-mata untuk menegakkan rasa keadilan.

Kedudukan hasil UN, memang bukan segala-galanya, karena selain hasil UN masih ada variabel lain yang dapat menentukan kelulusan seseorang, misalnya kepribadian peserta didik. Jika hasil UN di atas *passing grade,* maka tidak otomatis lulus, karena kepala sekolah berhak menjadikan peserta didik tidak lulus sepanjang dia menunjukkan kepribadian yang tercela. Walaupun UN bukanlah segala-galanya, UN tetap masih diperlukan, karena UN pada hakekatnya memilik nilai penting dalam memperbaiki kualitas pendidikan. Tentu UN masih tetap memiliki relevansi sepanjang semua pihak menyikapinya secara proporsional. Semoga!

Profesionalisme
Guru

Untuk tetap menjaga dan memelihara martabat profesi guru kiranya sangat diperlukan kehadiran kode etik guru profesional.

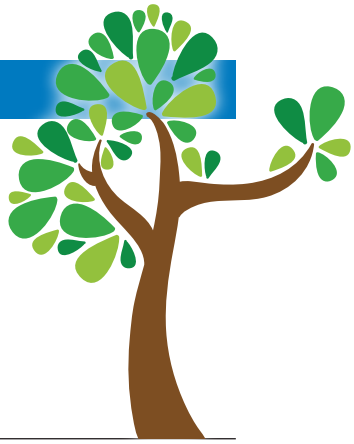

Guru Profesional

SECARA serentak hasil sertifikasi guru seluruh Indonesia mulai bisa diakses sejak 25 September 2007, tanpa terkecuali termasuk Rayon 11 Wil DIY dan Jateng. Artinya, sejak saat itu guru yang dinyatakan lulus sertifikasi berhak memperoleh Sertifikat Pendidik. Bahkan pada 29 September 2007 seluruh guru peserta sertifikasi guru di Rayon 11 yang dinyatakan lulus dari penilaian portofolio diundang untuk mengikuti pemantapan di UNY sambil diterimakan sertifikat pendidik.

Guru yang dinyatakan lulus patut bersyukur bahwa masa penantian yang lama telah dilalui dengan berhasil. Karena itu rasa syukur harus ditunjukkan dengan memantapkan niat untuk bekerja optimal dan mengajar lebih profesional. Namun guru yang belum dinyatakan lulus (baik yang perlu perbaikan portofolio maupun pendidikan dan pelatihan) perlu segera introspeksi, sehingga dapat ditemukan jalan keluar yang lebih baik dan konstruktif, yang pada akhirnya dalam waktu yang tidak lama dapat segera mencapai keberhasilan.

Kehadiran sertifikasi guru memang mengakibatkan sikap pro dan kontra. Sikap pro didasarkan pada bahwa guru sebagai suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, melainkan hanya mereka yang memiliki profesionalisme yang dibuktikan dengan kompetensi profesional, pedagogik, personal, dan sosial yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Untuk menjaga kondisi di lapangan, diharapkan sekali pemegang sertifikat pendidik bersikap rendah hati dan tawadlu' dengan menunjukkan tanggung jawab profesionalnya, bukan sebaliknya, bersikap sombong atau arogan, sehingga boleh jadi bisa menimbulkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Sikap kontra didasarkan pada kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa setiap orang bisa melaksanakan tugas mengajar, walau tanpa memiliki latar belakang pendidikan yang memadai. Demikian juga sertifikasi guru belum

bisa otomatis mendongkrak kualitas pendidikan, sebab tidak ada jaminan bahwa begitu terima sertifikat pendidik, guru akan mengubah kinerja secara cepat. Karena itulah setiap guru yang mendapatkan sertifikat pendidik, diharapkan sekali secara konsisten menunjukkan perilaku profesionalnya dan secara berangsur-angsur melakukan perubahan perilaku dan kinerja, sehingga wibawa guru profesional dihargai sepenuhnya oleh masyarakat.

Pemegang sertifikat pendidik pada hakekatnya memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga kredibilitas profesi guru, sehingga tidak boleh dijumpai seorang guru bersertifikat pendidik melanggar disiplin profesi guru, malas bekerja, kurang terampil, berwawasan terbatas, suka marah, dan sebagainya. Karena seorang pendidik yang bersertifikat seharusnya berperilaku terpuji, patut diteladani, siap mengayomi, mampu kendali emosi, dan berintegritas tinggi.

Untuk menunjukkan perilaku profesional pada prakteknya tidaklah mudah, banyak faktor yang menyebabkannya, baik faktor internal maupun eksternal. Untuk tetap menjaga dan memelihara martabat profesi guru kiranya sangat diperlukan kehadiran kode etik guru profesional. Selama ini memang organisasi guru, yang sering disebut dengan PGRI sebenarnya telah memiliki kode etik, namun untuk tuntutan guru kini dan masa mendatang, kiranya kode etik yang ada perlu didekonstruksi menjadi kode etik baru yang lebih mencerminkan guru profesional.

Guna mengupayakan hadirnya kode etik, perlu didirikan organisasi guru profesional yang diharapkan mampu menghasilkan kode etik atau secara bersama-sama dengan representasi komunitas guru profesional, masyarakat, dan pemerintah, sehingga kode etik dapat dijaga oleh suatu institusi, katakanlah semacam dewan guru profesional. Dengan demikian kekhawatiran terhadap kemungkinan munculnya penyimpangan oleh guru profesional dapat direduksi, bahkan dieliminir, sehingga wibawa guru profesional tetap terjaga. Semoga!

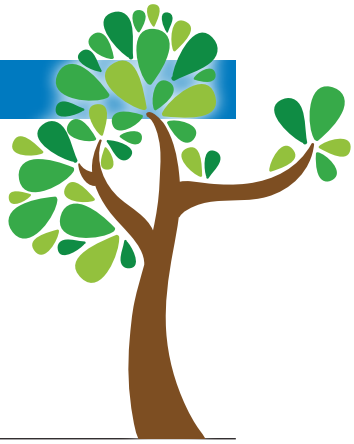

Agar Guru Bekerja Prima

SECARA historis, di awal kemerdekaan posisi guru sangat terhormat, di zaman orde baru posisi guru terpinggirkan, namun pada akhir-akhir ini profesi guru menapak ke arah kebangkitan. *Political will* pemerintah untuk meningkatkan martabat guru patut diapresiasi oleh segenap masyarakat dan bangsa Indonesia.

Seiring dengan itu, maka sangatlah tepat jika Hari Guru 2008 yang jatuh pada 25 November 2008 mengambil tema *"Guru yang Profesional, Bermartabat Sejahtera, dan Terlindungi Mewujudkan Pendidikan Bermutu"*.

Pendidikan bermutu merupakan dambaan semua untuk menghasilkan insan yang berkualitas, produktif, dan *well adaptive*. Mari kita renungkan firman Allah swt berbunyi: *Kam min fi-atin qaliilatin ghalabat katsiiratan bi idznillaah,* yang artinya: Berapa banyak kaum yang sedikit dan berkualitas yang mampu mengalahkan kaum yang banyak (yang tak berkualitas) atas seizin Allah swt" (Al-Ayat). Atas dasar itulah, maka harus menjadi komitmen semua untuk menciptakan pendidikan bermutu pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Jika penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun hampir mendekati tuntas, dan akan segera dimulai rintisan wajib belajar 12 tahun, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), maka upaya yang intensif sekarang yang perlu diusahakan adalah membangun pendidikan dasar yang bermutu sebagaimana yang menjadi amanat *Millineum Development Goals (MDGs)*.

Banyak faktor berkontribusi terhadap pendidikan bermutu, salah satu faktor utamanya adalah guru. Pada prakteknya, memang guru tidak selalu dapat memainkan peran yang strategis, terutama ketika guru belum mampu bekerja secara profesional dan hidupnya yang dalam ketidakpastian. Karena itu sangatlah wajar, jika guru yang tak berkinerja prima kurang mendapatkan penghargaan yang memadai. Tidak diragukan bahwa guru akan mampu berkontribusi

untuk peningkatan mutu pendidikan, jika gurunya profesional, bermartabat, sejahtera, dan terlindungi.

Guru profesional pada hakekatnya tidak hanya ditandai dengan pemilikan kompetensi saja yang sifatnya potensial, melainkan juga yang sama pentingnya adalah kinerja profesional yang tergambarkan dalam kegiatan instruksional dan edukatif, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Karena itu belumlah cukup, jika guru profesional hanya bersertifikat pendidik, tetapi kehidupan sehari-harinya tidak disiplin dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas instruksional dan edukatifnya.

Guru bermartabat merupakan posisi terpuji, karena guru tidak hanya terpenuhi syarat akademik, melainkan juga sayarat profesional dan integritas kepribadiannya. Guru bermartabat diyakini dapat membuat guru memiliki kepercayaan diri dalam menunaikan tugas profesionalnya, sehingga guru memiliki kemudahan untuk mentransformasikan nilai-nilai yang baik bagi pembentukan kepribadian anak. Namun sebaliknya jika guru jatuh dalam perbuatan tercela, sangat mungkin akan mengalami kesulitan untuk menunaikan tugas profesionalnya secara optimal.

Guru sejahtera merupakan syarat penting dalam menegakkan tugas profesionalnya. Dengan sejahtera, guru akan memiliki konsentrasi penuh dalam menjalankan tugasnya, bahkan bisa melakukan tugas apapun, kapanpun dan di manapun terkait dengan tanggung jawab sebagai pendidik. Penciptaan lingkungan yang kondusif dan pemberian kesejahteraan bagi guru secara memadai diharapkan sekali dapat membuat guru selalu bergairah dan bersemangat untuk bekerja secara berkualitas dan produktif. Sangat disayangkan jika kesejahteraan guru sudah ditingkatkan, namun tidak berdampak sedikitpun terhadap kedisiplinan dan prestasi kerja.

Guru terlindungi merupakan jaminan penting untuk ketenangan hidup dan bekerja. Terlindungi dalam konteks ini diharapkan sekali tidak hanya terkait dengan aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan hidup, melainkan juga terkait dengan perlindungan dari ancaman sanksi hukum terkait dengan tindakan guru terhadap peserta didik selama proses pendidikan.

Guru dalam batas tertentu harus mendapat jaminan keselamatan selama bertugas di daerah konflik, sebagaimana wartawan dalam menjalankan tugas profesional jurnalistik di medan perang. Demikian juga guru seharusnya mendapatkan sedikit kelonggaran untuk menerapkan hukuman fisik dalam batas tertentu terhadap peserta didik yang melanggar disiplin demi pembentukan keutuhan pribadinya, bukan justru dibayang-bayangi oleh ancaman pelanggaran HAM. Ingat bahwa ketegasan bersikap kadang-kadang sangat diperlukan.

Dengan mencermati tema Hari Guru 2008, kiranya PGRI sebagai organisasi profesi, seharusnya terus mengawal perjalanan karier guru profesional baik secara personal, kolektif, maupun institusional, dengan menegakkan kode etik secara bertanggungjawab, sehingga guru terus menjadi profesi terhormat, baik di mata manusia maupun di mata Allah swt. Ingat bahwa Allah swt adalah pendidik *(murabbi)* seluruh alam dan seisinya.

Demikian juga guru sendiri perlu terus menjaga dirinya dengan penuh amanah, sehingga dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, baik secara horizontal maupun vertikal. Masyarakat sebagai *stakeholders* diharapkan sekali secara aktif dan proaktif dapat mengawasi kinerja guru, sehingga guru dapat menunaikan tugas profesionalnya dengan baik yang mampu memfasilitasi proses humanisasi terutama bagi peserta didiknya, di samping masyarakat secara luas. Akhirnya saya ucapkan "Selamat Hari Guru Nasional ke XV dan Hari Ultah PGRI ke-63", semoga guru menjadi profesi yang semakin terhormat. Amiin.

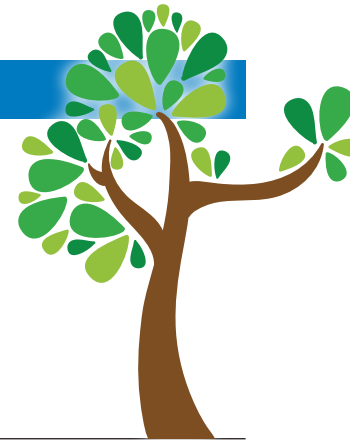

Pengembangan Profesionalisme Guru

Pengantar

Salah satu kunci penting dalam membangun kualitas pendidikan adalah guru. Dengan demikian sangatlah wajar bila akhir-akhir ini pengakuan dan penghargaan terhadap profesi guru semakin meningkat, yang diawali dengan dilahirkannya Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang segera akan diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Secara legal telah dinyatakan bahwa guru profesional dituntut untuk memiliki sejumlah kompetensi. Demikian juga secara akademik mereka juga dituntut mampu menampilkan kompetensi tertentu sebagai konsekuensi logis dari perubahan yang sangat dinamis terjadi di tengah-tengah masyarakat dewasa ini. Terlebih-lebih yang terjadi dewasa ini di Indonesia, desentralisasi pendidikan yang menjadi kebijakan utamanya. Dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, guru menjadi tumpuan yang sangat penting (Kelly, 1995).

Untuk menjamin efektivitas kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan, kiranya upaya pengembangan profesionalisme guru perlu terus diupayakan.

Hakekat Profesionalisme

Orstein dan Levine (1984) menegaskan bahwa pada dasarnya pekerjaan mengajar dapat dikatagorikan ke dalam tiga, yaitu mengajar merupakan *semi-profession*, *emerging profession,* dan *full profession.*

Pertama, mengajar dikatakan *semi-professional*, ketika mengajar itu hanya dapat dilakukan melalui pelatihan dalam jangka pendek, bahkan mengajar dapat terjadi oleh siapapun yang mengaku pernah diajar, karena itu mengajar cukup meniru saja tanpa latihan yang memadai.

Kedua, mengajar dikatakan *emerging profession* ketika mengajar di satu sisi dikatakan suatu profesi, di sisi lain dikatakan bukan suatu profesi, bahkan bisa

masuk katagori ambivalen. Di samping itu perlu diperjelas bahwa mengajar merupakan suatu pekerjaan yang menuntut penyesuaian yang terus menerus, seiring dengan perubahan tuntutan masyarakat yang terus berkembang, sehingga seorang guru harus terus menerus meletakkan *up-dating* ilmu dan materi, bahkan metodenya, sehingga kegiatan pembelajarannya benar-benar kontekstual.

Akhirnya, mengajar dikatakan sebagai *full profession,* karena mengajar merupakan suatu profesi yang anggotanya memiliki pengetahuan tertentu dan dapat menerapkan pengetahuannya untuk meningkatkan kesempatan dalam pemecahan masalah pendidikan (McNergney, Robert E. Dan Herbert, Joanne M. (2001). Secara rinci mengajar sebagai profesi menuntut sejumlah karakteristik, di antaranya:

1. Rasa melayani masyarakat: komitmen sepanjang waktu terhadap karier.
2. Pengetahuan dan keterampilannya berada di atas kemampuan orang pada umumnya.
3. Aplikasi riset dan teori terhadap praktek (berkenaan dengan problem kemanusiaan).
4. Membutuhkan waktu yang panjang untuk latihan spesialisasi.
5. Adanya kontrol terhadap strandar lisensi dan persyaratan masuk.
6. Otonomi dalam membuat keputusan tentang bidang kerja pilihan.
7. Suatu penerimaan tanggung jawab terhadap penilaian yang dibuat dan tindakan yang dipertunjukkan berkaitan dengan layanan yang diberikan berupa seperangkat standar penampilan.
8. Komitmen terhadap kerja dan klien yang diindikasikan dengan penekanan pada layanan yang diberikan.
9. Penggunaan administrator untuk memfasilitasi kerja profesional, sehingga ada kebebasan yang relatif dari perlakuan supervisi.
10. Organisasi bersifat otonom dan terdiri atas anggota-anggota profesi.
11. Adanya Asosiasi Profesi dan kelompok elite yang memberikan penghargaan terhadap prestasi individual.
12. Adanya kode etik yang membantu untuk mengklarifikasi masalah-masalah atau hal-hal yang meragukan berkaitan dengan layanan yang diberikan.
13. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap praktisi secara individual.
14. Prestise dan penghargaan ekonomik yang tinggi.

Di antara karakteristik-karakteristik di atas yang dipandang sangat penting adalah, (1) Pengetahuan dan keterampilannya di atas kemampuan orang pada umumnya, (2) Adanya kontrol terhadap standar lisensi dan persyaratan masuk

menjadi guru, (3) Otonomi dalam membuat keputusan tentang bidang kerja pilihan, dan (4) Prestise dan penghargaan ekonomik yang tinggi.

Jika memperhatikan beberapa karakteristik profesional dari suatu profesi guru, maka dapat dimaklumi bahwa guru sebagai profesi harus didukung oleh beberapa kompetensi. Broudy (Hager:1993) menyatakan, the CBTE approach mendefiniskan bahwa:

> *competence in terms of prespecified performances stated as segments of overt behaviour; it argues that practicing the performance directly is more efficient than achieving it indirectly through the conventional courses...competence training...contrasts an overt performance with the conventional program's promise of performance.*

Definisi tersebut memperkuat keyakinan bahwa kompetensi pada hakekatnya dapat diraih lebih baik melalui kegiatan praktis (pelatihan kompetensi) daripada melalui kegiatan perkuliahan yang bersifat konvensional. Kompetensi juga dapat dipahami sebagaimana yang dinyatakan pada UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dengan demikian kompetensi pada hakekatnya terdiri atas aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif.

Tuntutan Kompetensi Guru

Lebih khususnya berkenaan dengan kompetensi guru, pada RPP Guru, pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa kompetensi guru terdiri atas empat komponen, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi personal.

Selanjutnya pada RPP Guru pada pasal 4 ada lima ayat (ayat (3) sd (7) yang terkait dengan kompetensi guru, secara rinci dapat uraikan sebagai berikut. Pada pasal 4 ayat (3) dinyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat holistik. Sedangkan ayat (4) menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
b. pemahaman terhadap peserta didik;
c. pengembangan kurikulum/silabus;
d. perancangan pembelajaran;
e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;

g. evaluasi hasil belajar; dan
h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Ayat (5) menegaskan bahwa Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

a. mantap;
b. stabil;
c. dewasa;
d. arif dan bijaksana;
e. berwibawa;
f. berakhlak mulia;
g. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
h. secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
i. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Ayat (6) menegaskan pula bahwa kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

a. berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat;
b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; dan
c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik; dan
d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Mengingat orientasi makalah ini untuk guru, maka kompetensi yang dirumuskan baru untuk profesi guru. Karena itu, pembahasan ini belum diorientasikan untuk profesi tenaga kependidikan, karena hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pijakan kompetensi tenaga kependidikan, sebagaimana yang kompetensi pendidik, khususnya guru dan dosen.

Untuk melengkapi rumusan kompetensi-kompetensi tersebut di atas, kiranya setiap guru yang ingin tampil terbaik sebagaimana yang dikemukakan oleh Tammy Belavek, maka seorang guru seharusnya:

- memiliki misi.
- memiliki suatu keyakinan positif bahwa dia mampu bekerja dengan sukses bersama-sama peserta didik.

- mengenal bahwa pilihan yang dibuat memiliki dampak yang mendalam terhadap keberhasilan dirinya.
- mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang memungkinkan bagi guru untuk mengatasi setiap tantangan yang mereka hadapi.
- membangun hubungan positif dengan peserta didik. Mereka menyadari bahwa semakin banyak peserta didik percaya, semakin banyak keinginan peserta didik untuk belajar bersama guru.
- membangun hubungan yang positif dengan orangtua atau pengasuh.
- memelihara sikap yang positif.
- mengembangkan keterampilan berkomunikasi yang membantu guru memotivasi dan meningkatkan efektivitas kegiatan kelas.
- mengambil langkah yang diperlukan untuk hindari guru
- mengetahui penggunaan waktu dan usaha untuk memperoleh hasil yang terbaik dan kepuasan yang terbesar di luar mengajar.
- menjadi bagian dari keseluruhan tim sekolah.
- mengajar peserta didik dengan strategi pilihan, sehingga peserta didik dapat mencapai potensi yang tertinggi dan meraih keberhasilan.

Upaya Pengembangan Kompetensi

Ada beberapa tahap pengembangan profesional pendidik, terutama guru.

1. ***Fase persiapan awal***. Pada fase ini pelatihan yang diterima sebagai seorang calon guru adalah sejumlah pengalaman, baik terkait dengan aktivitas di dalam atau di luar kelas.
2. ***Fase induksi.*** Pada fase ini, merupakan tahun pertama mengajar yang dimulai dengan proses mensintesakan berbagai kewajiban yang dikehendaki oleh program pendidikan terkait.
3. ***Fase pengembangan berkelanjutan***. Pada fase ini pembimbing berpartisipasi dalam kesempatan-kesempatan pertumbuhan profesional di awal-awal tahunnya yang mampu mempertajam keterampilannya dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menemui kelompok setingkatnya serta mengembangkan rencana untuk tahun-tahun berikutnya.
4. ***Fase pembaharuan.*** Selama setiap fase, pembimbing mampu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dapat berperan untuk memperbaharui kegiatannya baik secara personal maupun profesional. Pembaharuan dapat mengarahkan kepada seorang profesional yang bermotivasi tinggi dan terlatih, sehingga dapat memenuhi tuntutan pekerjaannya.
5. ***Fase rekrutmen dan seleksi.*** Instruktur dan pembimbing bekerja dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan guru dalam mengembangkan

program rekrutmen, sehingga secara tidak langsung dapat membantu calon guru untuk menyiapkan diri dalam proses rekrutmen. Mahasiswa didorong untuk mengejar pilihan kariernya, sehingga pada akhirnya mereka bisa menampilkan diri secara optimal.

Pengembangan Karier Guru

Idealnya guru sebagai profesi, seharusnya kariernya berjenjang yang dimulai dengan guru pemula sampai dengan guru master. Penjenjangan itu menggambarkan tingkat kualitas kinerjanya, sehingga ada perbedaan antara yang benar-benar pemula dengan guru yang sudah mengabdi secara intensif dalam waktu yang lama. Sebagaimana Web, L. Dean, Metha, Arlena, and Jordan, K. Forbis (1996) mengemukakan bahwa profesi guru dapat terdiri atas empat kategori secara berjenjang, di antaranya:

1. Guru Pemula *(Beginning teacher)* 3-5 tahun
2. Guru profesional *(Professional teacher)* 3 tahun
3. Guru senior *(Senior Teacher)* minimal 5 tahun
4. Guru master *(Master Teacher)* setelah 5 tahun menjadi guru senior.

Penjenjangan tersebut di atas sungguh memberikan motivasi bagi setiap guru untuk meningkatkan terus kinerjanya, sehingga perbaikan profesionalisme guru dapat berlangsung secara terus menerus.

Namun apa yang terjadi di Indonesia dewasa ini, bahwa semua guru dapat melalui proses sertifikasi dengan syarat-syarat yang sangat variatif, dan sertifikat pendidik yang diberikan kepada guru profesional untuk sementara bersifat selamanya. Menyadari akan biaya yang sangat tinggi untuk sertifikasi guru, keinginan untuk penilaian secara periodik tidak dapat diwujudkan dengan mudah untuk sementara ini, sehingga sertifikat pendidik untuk guru hanya satu katagori. Kondisi demikian sebenarnya kurang motivatif, karena antara guru senior atau yunior yang berprestasi tidak ada bedanya. Walaupun demikian setiap guru diharapkan sekali dapat menjaga diri, memelihara, dan meningkatkan profesionalisme secara terus menerus. Untuk mendorong guru dapat memiliki komitmen dalam peningkatan profesionalisme guru, kiranya diperlukan strategi khusus untuk mendorong guru berprestasi.

Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru

Menyadari posisi guru sebagai pekerjaan profesional, kiranya memerlukan strategi pengembangan, sehingga ke depan guru semakin dihargai dan mampu memberikan layanan pendidikan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan se-

cara publik. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan profesionalisme guru, di antaranya:

1. Pengembangan Standar Profesional (Kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial). Upaya ini diperlukan untuk memantapkan formulasi kompetensi, sehingga memiliki nilai-nilai yang lebih fungsional.
2. Pengujian kompetensi, baik guru baru maupun lama. Untuk menjamin nilai profesionalisme guru, pengujian guru perlu dilakukan baik terhadap guru baru maupun lama, sehingga kompetensi selalu terjaga relevansinya. Hal ini berlaku seperti sekarang, bahwa untuk memulai proses pemilikan sertifikat pendidik, sebagai bukti sebagai guru profesional, maka semua guru harus melalui proses ujian. Untuk yang guru dalam jabatan menggunakan portofolio, dan untuk guru pra jabatan akan diberlakukan program pendidikan profesi.
3. Menekankan kualitas guru daripada kuantitas, walaupun dalam batas tertentu, kuantitas guru itu diperlukan. Ketersediaan guru memang sangat penting, terutama di daerah-daerah tertentu, apakah daerah terpencil, daerah perbatasan negara, namun yang jauh lebih penting adalah kualitas guru, sehingga diharapkan kehadiran mereka dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan.
4. Evaluasi kompetensi guru secara periodik. Untuk menjamin profesionalisme seorang guru, dirasakan perlu sekali dilakukan evaluasi periodik, sehingga kevalidan sertifikat pendidik tetap terjaga. Memang upaya ini untuk konteks di Indonesia rasanya berat sekali, mengingat untuk membuat seluruh guru harus bersertifikat pendidik saja diperlukan biaya yang sangat besar. Mudah-mudahan di masa-masa depan, ketika semua guru sudah memiliki sertifikat pendidik, evaluasi secara periodik dapat dilakukan. Walaupun demikian untuk konteks sekarang, sebaiknya dalam batas-batas tertentu penilaian secara periodik ini dapat dilakukan, walau masih relatif terbatas.
5. Pengembangan profesional *(inservice training).* Mengingat kebutuhan dan tuntutan lapangan dan *stakeholders* itu terus berubah dan meningkat, maka pengembangan profesional yang berupa *inservice training* merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Untuk menjamin efektivitas *inservice training,* diharapkan sekali relevansi program menjadi pertimbangan penting.
6. Penegakan kode etik. Keberlangsungan suatu profesi pada hakekatnya sangat bertumpu pada kode etik, sehingga organisasi profesi harus benar-benar fungsional. Jika PGRI berkeyakinan mampu membawa misi profesionalisme lebih tinggi daripada misi lainnya (katakanlah misi politis), maka

sudah sepatutnyalah PGRI harus mengawal penegakan kode etik, namun jika tidak mampu mengedepankan misi profesionalisme, maka sebaiknya dirintis organisasi profesi lainnya.

Penutup

Berdasarkan kajian sebelumnya, maka kompetensi pendidik menduduki posisi strategis dalam menentukan kualitas pendidikan, sehingga pemenuhan kompetensi pendidik menjadi sesuatu yang harus terus diupayakan, seiring dengan dinamika tuntutan masyarakat sebagai fitrah *human being* yang memiliki kebutuhan untuk berubah. Sadar akan kondisi tersebut dan tuntutan profesional yang terus berkembang, maka pengembangan kompetensi pendidik perlu terus diupayakan dengan melalui berbagai tahapan secara berjenjang.

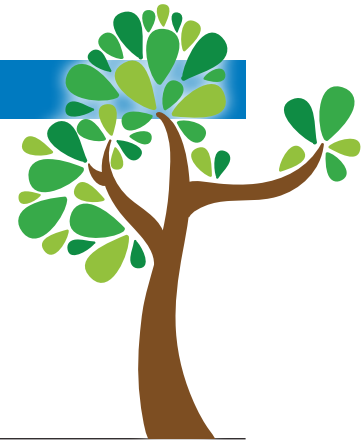

Profesionalisme Guru Madrasah

Pengantar

Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu kebijakan yang sangat penting dalam menghadapi era global. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan, salah satunya adalah profesionalisme guru. Hal ini juga berlaku bagi peningkatan madrasah pada semua jenjang, yang sementara ini masih berada jauh di bawah persekolahan umum, walau secara kasuistik ada sejumlah madrasah pada semua jenjang yang telah mampu menunjukkan kualitas yang dapat diandalkan.

Profesionalisme guru madrasah pada awal perkembangannya memang didukung sangat sedikit guru yang qualified. Namun berkat upaya Depag dan Yayasan, dari waktu ke waktu telah mengalami kemajuan, walaupun masih juga jauh dari diharapkan.

Menyadari akan hal tersebut, maka Depag kini menunjukkan langkah proaktif untuk menyambut Kurikulum baru. Walaupun demikian setiap orang menyadari sepenuhnya bahwa kehadiran kurikulum baru tidak dengan serta merta dapat memberikan jawaban untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tanpa didukung secara langsung dengan kehadiran dan kinerja guru, termasuk juga guru agama bidang fiqih. Karena profesionalisme guru jauh lebih menentukan dalam menggerakkan roda pendidikan menuju pendidikan yang bermutu.

Memahami Profesionalisme

1. Makna Profesional

Ornstein/Levine (1985) menegaskan bahwa *"An occupation involving relatively long and specialized preparation on the level of higher education and governed by its own code of ethics"*. Artinya bahwa profesi bukanlah hanya pekerjaan saja, melainkan suatu pekerjaan yang relatif memerlukan persiapan lama

dan spesifik berdasarkan tingkat pendidikan tinggi dan dikendalikan oleh kode etiknya sendiri.

2. Kriteria Sebuah Profesional

Berdasarkan Robin Ann Martin (2004) bahwa profesi dapat dikarakteristikkan sebagai berikut:

1. Memberikan suatu layanan sosial yang unik, tertentu, dan esensial.
2. Penekanannya pada teknik-teknik intelektual dalam menunjukkan layanannya.
3. Membutuhkan waktu yang lama untuk latihan keahliannya.
4. Rentangan otonominya luas baik sebagai praktisi secara individual, maupun kolektif.
5. Diterima oleh para praktisi akan tanggung jawab personalnya secara meluas akan penilaian yang dibuat dan tindakan yang ditunjukkan.
6. Penekanan organisasional pada layanan yang diberikan, daripada pemerolehan ekonomik.
7. Memiliki organisasi profesional yang mandiri.
8. Adanya kode etik.

Di samping kriteria tersebut, Ornstein/Levine (1985) mencoba membuat sebanyak 14 karakteristik yang dapat dimilik oleh sebuah pekerjaan yang profesional, di antaranya:

a. Rasa melayani masyarakat: suatu komitmen sepanjang waktu terhadap karir.
b. Pengetahuan dan keterampilannya di atas kemampuan orang pada umumnya.
c. Aplikasi riset dan teori terhadap praktek (berkenaan dengan problem kemanusiaan).
d. Membutuhkan waktu yang panjang untuk latihan spesialisasi.
e. Adanya kontrol terhadap standar lisensi dan persyaratan masuk.
f. Otonomi dalam membuat keputusan tentang bidang kerja pilihan.
g. Suatu penerimaan tanggung jawab terhadap penilaian yang dibuat dan tindakan yang dipertunjukkan berkaitan layanan yang diberikan: seperangkat standar penampilan.
h. Komitmen terhadap kerja dank lien: penekanan pada layanan yang diberikan.
i. Penggunaan administrator untuk memfasilitasi kerja profesional: kebebasan yang relatif dari adanya supervisi.
j. Suatu organisasi yang mandiri terdiri atas anggota-anggota profesi.

k. Asosiasi profesional dan kelompok elite yang memberikan penghargaan akan prestasi individual.
l. Adanya kode etik yang membantu untuk mengklarifikasi masalah-masalah atau hal-hal yang meragukan berkaitan dengan layanan yang diberikan.
m. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap para praktisi secara individual.
n. Prestise dan penghargaan ekonomik yang tinggi.

Mengajar sebagai Profesional

Menyadari akan kompleksitas karakteristik suatu pekerjaan yang profesional, maka guru memiliki posisi yang relatif. Amitai Etzioni (Ornstein/Levine: 1985), Mengajar dapat juga sebagai semi-profesional, karena pelatihan (guru) itu lebih pendek, statusnya kurang *legitimate* (rendah atau menengah), haknya untuk berkomunikasi kurang ditegakkan, kurang membutuhkan pengetahuan yang spesifik, dan mereka kurang memiliki otonomi dari perlakuan supervisi atau kontrol masyarakat, bila dibandingkan dengan profesi lain.

Robert Howsam (Ornstein/Levine: 1985), menyatakan bahwa mengajar seharusnya dipandang sebagai suatu profesi yang muncul *(emerging profession),* dan kemudian statusnya lebih tinggi daripada *semi-profesional,* mendekati dengan status profesi penuh. Dalam kaitannya dengan ini, profesi yang muncul dan penuh dikenal di dalam persidangan sebagai kompeten dalam memberikan persaksian ahli. Bertitik tolak dari ini, maka mengajar kini belum dipandang sebuah pekerjaan profesional secara penuh. Dengan kata lain bahwa mungkin tidak satupun profesi yang dapat memenuhi secara penuh karakteristik seseorang itu profesional, tanpa terkecuali profesi mengajar.

Setelah dilakukan pengkajian, ternyata guru setidak-tidaknya memenuhi sebagian karakteristik mengajar, di antaranya ada empat karakteristik yang sangat penting, yaitu: (1) mengajar didasarkan atas penguasaan pengetahuan dan keterampilan di atas kemampuan orang pada umumnya, (2) adanya kontrol terhadap standar lisensi atau persyaratan masuk, (3) otonom dan membuat keputusan tentang bidang-bidang kerja terpilih, dan (4) prestasi dan penghargaan ekonomik yang tinggi. Walaupun tidak ada satupun profesi yang memenuhi semua karakteristik sebuah profesi, namun guru tetap masih berada jauh di bawah profesi medis dan hukum.

Pengembangan Profesionalisme Guru

Untuk dapat mencapai profesionalisme guru, maka upaya yang dapat dilakukan adalah:

a. Pengembangan Standar Profesional (Kompetensi profesional, personal, dan sosial).
b. Pengujian kompetensi (baik guru-guru baru maupun lama).
c. Menekankan kualitas guru daripada kuantitas, walaupun dalam batas tertentu, kuantitas guru itu diperlukan.
d. Evaluasi guru secara periodik.
e. Pengembangan profesional (inservice training)
f. Penegakan kode etik.

Implikasi bagi Guru Madrasah Tsanawiyah

Berdasarkan atas beberapa hal atas, maka implikasi bagi Guru Madrasah Tsanawiyah, di antaranya:

a. Perlu ada atau dirumuskan standar kompetensi guru MTs bidang Fiqh dan Al-Quran & Hadits untuk menjamin kualitas pembelajarannya.
b. Pengujian kompetensi guru perlu dilakukan sejak awal rekrutmen, sehingga diperoleh guru yang *qualified.*
c. Perlu memberikan incentive bagi guru yang berkualitas, sehingga mampu mendorong untuk maju.
d. Untuk menjamin kualitas pendidikan, perlu dilakukan penilaian secara periodik terhadap guru MTs, sesuai dengan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya.
e. Dalam menjaga kesinambungan layanan profesional kependidikan, guru-guru perlu terus meng-*update* ilmunya.
f. Penegakan kode etik perlu dilakukan oleh organisasi guru MTs secara bertanggungjawab.

Penutup

Demikianlah beberapa hal penting untuk dijadikan bahan renungan dan diskusi dalam meningkatkan keprofesionalan guru Fiqh dan Al-Qur-an-Hadits yang seterusnya melakukan pencerahan, sehingga dapat menjamin terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif dan produktif. Karena itu yang penting bukan transformasi pengetahuan saja, namun lebih jauh dari itu adalah terjadinya proses pendidikan dan pembentukan kepribadian Muslim yang lebih baik.

Tulisan ini disajikan pada Workshop dan Orientasi Guru Agama Implemetasi KBK Al-Qur-an - Hadits dan Fiqh, se Prop. DIY tanggal 1-3 Juni 2004 di Wisma Haji, Yogyakarta.

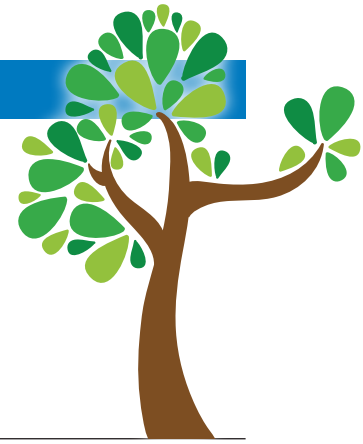

Pengembangan Moral Calon Guru SD dan TK Guna Mengantisipasi Demoralisasi Generasi Muda

Pengantar

SISI lain dari kemajuan ipteks (Ilmu, Pengetahuan, Teknologi dan Seni) yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia adalah dampak negatifnya terhadap kehidupan generasi muda, khususnya terjadi demoralisasi. Hal ini diperkuat dengan semakin semaraknya dan dominannya perilaku amoral yang mewarnai kehidupan generasi muda, dibandingkan dengan perilaku bermoralnya. Misalnya, penggunaan narkoba, praktek pergaulan bebas, cara berpakaian yang seenaknya, rendahnya sopan santun dalam pergaulan, tindakan kriminal dan sebagainya.

Fenomena-fenomena tersebut hampir menjangkau ke semua lapisan, bahkan dapat juga dalam batas tertentu melibatkan mahasiswa calon guru. Tentu saja hal ini tidak banyak menguntungkan bila dibiarkan secara terus menerus, karena cenderung dapat merusak kepribadiannya, sehingga sangat tidak kondusif bagi penyiapan dirinya dalam memasuki profesi keguruan.

Agar mahasiswa tersebut memiliki persiapan yang matang selama proses pendidikan, maka kiranya sangat penting setiap mahasiswa, tanpa terkecuali, memantapkan pembentukan dirinya, terutama kepribadian dan perilakunya yang memang merupakan faktor sangat penting dan strategis dalam menentukan keberhasilan profesinya, terlebih-lebih dalam menyiapkan generasi muda yang produktif dan beradab.

Profil dan Ideal Moral Generasi Muda dan Calon Guru SD & TK

Jika disadari benar bahwa modernisasi, industrialisasi, di satu sisi, memang membawa ke arah kemakmuran, namun di lain pihak cenderung menciptakan dehumanisasi, bahkan demoralisasi (Nurcholis Madjid, 1987). Dehumanisasi tidak hanya melibas kelompok tertentu, melainkan semua kluster manusia,

termasuk juga generasi muda. Bahkan boleh dibilang bahwa populasi generasi mudalah yang banyak terkontaminasi oleh dehumanisasi. Hal ini diperkuat dengan perilaku amoral yang didominasi oleh para generasi muda, baik yang dapat disaksikan secara langsung yang terjadi di hadapannya, maupun secara tidak langsung, sebagaimana yang terpampangkan lewat mass media, baik cetak maupun elektronik.

Yang lebih menarik lagi dapat saya kutip dari Proposal Kegiatan ini, bahwa moralitas mahasiswa PGSD dan PGTK pada akhir-akhir ini mengalami penurunan. Indikator penurunan itu misalnya, mahasiswa mengirim SMS *(Short Message Services)* kepada dosen dengan nada memerintah supaya mencari ruangan kosong untuk kuliah atau meminta dosen supaya menunggu; cara berpakaian mahasiswi yang memperlihatkan lekuk tubuh maupun cara berpenampilan mahasiswa yang terkesan "kumuh" seperti bersandal, berkaos oblong, dan berambut gondrong ketika mengikuti perkuliahan. Memang diakui bahwa fenomena tersebut.

Jika fenomena tersebut dibiarkan terus, maka sangatlah mungkin bahwa jumlah populasi mahasiswa yang menunjukkan kepribadian yang kurang menggembirakan semakin hari semakin membesar. Jika demikian halnya, sungguh memprihatinkan bagi kehidupan anak-anak masa depan, karena gurunya tidak memiliki kesiapan profesional yang memadai. Beauty (1996) menegaskan bahwa kepribadian merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi seorang guru yang profesional.

Selanjutnya perlu disadari bersama bahwa setiap generasi muda perlu menunjukkan moral yang membanggakan, karena hanya terletak di pundaknya lah masa depan suatu bangsa. Jika generasi mudanya berkepribadian, berperilaku, dan bermoral terpuji, maka masa depan bangsa insya Allah akan cemerlang dan menunjukkan kemajuan yang lebih berarti, namun sebaliknya jika generasi mudanya berkepribadian dan bermoral bobrok, maka masa depan bangsa terancam suram, bahkan cenderung mengalami kemunduran.

Terlebih-lebih Calon Guru SD & TK sangatlah dituntut dan diharapkan bahwa semasa kuliahnya perlu memiliki kepribadian dan menampilkan perilaku yang dilandasi moral religius yang terpuji, sehingga ketika pada saatnya nanti dalam memasuki dunia nyatanya akan mengalami kemudahan dalam menyesuaikan diri untuk menjadi guru SD dan TK yang bermakna bagi peserta didik pada khususnya, dan bagi masyarakat sekitarnya pada umumnya.

Hambatan dan Tantangan Mahasiswa PGSD dan PGTK

Adapun hambatan dan tantangan yang tidak dapat dihindari oleh Mahasiswa PGSD dan PGTK, di antaranya:

1. Hambatan:
   a. Niat yang tulus pada setiap mahasiswa tidak mudah dapat dimiliki secara konsisten (istiqomah).
   b. Mudahnya mengikuti budaya pop.
   c. Rasa malu yang tidak dimiliki oleh sebagian besar umat manusia.
   d. Rendahnya rasa bangga akan profesi.
   e. Dan lain-lain.
2. Tantangan:
   a. Penanaman nilai dan moral kepada anak menghendaki cara yang lebih sulit daripada penanaman aspek lainnya.
   b. Dampak negatif globalisasi, terutama bidang ekonomi dan politik.
   c. Pengaruh budaya asing negatif yang sulit dikonfrontasi.
   d. Masuknya informasi yang sulit difilter secara cermat.
   e. Semakin longgarnya penegakan hukum dan moral di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
   f. Penegakan disiplin yang tidak dilasanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
   g. Dan lain-lain

Upaya Strategis Pengembangan Moral Calon Guru SD dan TK

Berbagai upaya strategis yang dapat ditawarkan sebagai alternatif dalam pengembangan Moral Calon Guru SD dan TK.

- **Pihak individu yang bersangkutan:**
  1) Mengkondisikan diri dalam berpakaian dan berpenampilan rapi.
  2) Membiasakan cara berkomunikasi yang baik
  3) Membiasakan pergaulan antar mahasiswa, dengan dosen, dengan staf, dan orang lain di luar kampus dengan perilaku yang sopan.
  4) Memulai perbaikan diri dari diri sendiri, dari yang kecil, dan dari saat ini.
- **Pihak Institusi:**
  1) Penegakan disiplin dalam berpakaian dan penampilan fisik (rambut).
  2) Penegakan tatakrama dan etika pergaulan dalam kelas, kampus dan atau di luar kampus.
  3) Mengoptimalkan pemanfaatan waktu senggang dengan kegiatan terpuji.
  4) Memberikan rekognisi terhadap mahasiswa berkhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.
  5) Menciptakan kegiatan keagamaan secara tertib dan terarah bagi semua sivitas akademika.

6) Semua pihak di sekolah secara terus menerus mendukung digulirnya disiplin yang tegas selama dalam proses pendidikan.
7) Perilaku moral-religius perlu dijadikan variabel penentu dalam menetapkan kelulusan dan kesuksesan seseorang dalam studinya.

- **Pihak Masyarakat:**
  1) Masyarakat secara proaktif dapat melakukan kontrol terhadap mahasiswa dalam pergaulan sehari-harinya.
  2) Masyarakat memberikan sanksi sosial terhadap mahasiswa sekiranya melakukan pelanggaran yang berarti.
  3) Masyarakat memberikan kesempatan secara berarti kepada mahasiswa yang sedang dalam proses pembentukan diri dan kompetensinya.
  4) Masyarakat memiliki hak menggugat terhadap setiap penyimpangan secara berarti yang dilakukan oleh mahasiswa.

Penutup

Demikian beberapa hal yang dipandang penting untuk diperhatikan dalam rangka mengembangkan moral Calon Guru SD dan TK, sehingga pada akhirnya mereka dapat memerankan dirinya dengan rasa ketulusan dan kesungguhan menjadi guru yang kompeten (termasuk *caring, committed* dan *qualified*) tanpa ada beban lain yang tidak harus terjadi. Walaupun dirasakan sangat berat antara hak dan kewajiban dewasa belum sepenuhnya menggembirakan. Semoga di kemudian hari ketika saat-saat mengabdi telah tiba dan berlangsung kembali (terutama bagi yang sudah bertugas), saudara-saudara dapat memulai pengabdian dengan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

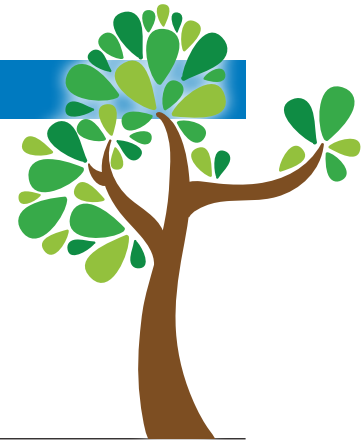

Sertifikasi Guru, Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan

Pengantar

Tantangan global akhir-akhir ini semakin meluas dan menjangkau ke semua bidang kehidupan, sehingga untuk bisa hidup survival dewasa ini sangat dibutuhkan kemampuan kompetitif. Karena itulah kualitas sumber daya insani menjadi suatu faktor yang sangat penting.

Untuk menghasilkan sumber daya insani yang berkualitas sangat diperlukan suatu sistem pendidikan yang handal dan berkualitas pula. Salah satu sub sistem dalam sistem pendidikan nasional yang memiliki faktor *determinant* besar adalah kehadiran dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan (terutama kepala sekolah). *Darling-Hammond & Sykes, (2003) menegaskan bahwa "strong connection between teacher quality and students' achievement is emerging as a key linkage in defining quality teaching). It is a reflection of how critical a teacher is to student learning. In fact, Darling-Hammond and Sykes (2003) indicate that the majority of parents and the public believe that having well qualified teachers in the classroom is the best way to improve schools.*

Dilihat dari segi kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan, terutama guru di Indonesia dipandang sudah memadai. Namun di balik itu masih tersimpan persoalan yang besar, yaitu aspek sebaran guru yang tidak merata, di samping kelayakan akademiknya.

Sertifikasi Guru sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

1. Dasar Hukum Sertifikasi Guru

Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan pijakan dalam sertifikasi guru, di antaranya:

a. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.
g. Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
h. Keputusan Mendiknas Nomor 122/O/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.

2. Pengertian, konsep dan pentingnya Sertifikasi Guru

a. Pengertian dan Konsep Sertfikasi Guru

Wang, Coleman, Coley & Phelps, (2003) dan Lackzo-Kerr & Berliner, 2002; Walsh, (2001) menyatakan bahwa *teacher certification is a regulatory practice employed by the states to ensure that schools have a quality professional in every classroom. Teacher Certification is defined as the formal approval to teach in a public school. Approval is based on candidates meeting specific requirements established by state regulation and reviewed by the state agency to verify that teacher preparation requirements have been fulfilled. In general, certification requires the completion of coursework (usually an undergraduate degree) in education and the subject matter they intend to teach.*

Dari pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru, baik yang prajabatan maupun yang dalam jabatan. Demikian juga sertifikasi guru merupakan suatu bukti formal untuk mengajar, baik di sekolah negeri maupun swasta. Dengan demikian sertifikasi dapat memberikan jaminan terhadap layanan pendidikan dan pembelajaran secara lebih profesional.

Dalam konteks Indonesia, sertifikasi bagi guru prajabatan dilakukan melalui pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah diakhiri dengan uji kompetensi. Sementara itu sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidkan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio. Walaupun pada prakteknya, tidak sedikit pihak yang kurang sependapat dengan penggunaan portofolio untuk proses sertifikasi. Karena pada kenyataannya, tidak sedikit dijumpai penyimpangan.

b. Pentingnya Sertifikasi Guru

Program sertifikasi guru memiliki nilai yang sangat strategis, terutama memberikan manfaat dalam:

1) menjamin kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran.
2) meningkatkan profesionalisme guru
3) meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan
4) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional

3. Teori yang mendasari penggunaan Portofolio dalam uji sertifikasi guru (kelebihan dan kekurangan).

Yang dipahami portofolio dalam konteks ini adalah portofolio karier. Berdasarkan *Wikipedia, the free encyclopedia* bahwa *Career portfolios are used to plan, organize and document education, work samples and skills. People use career portfolios to apply to college or training programs, get a job, get a higher salary, show transferable skills, and to track personal development. They are more in-depth than a resume, which is used to summarize the above in one or two pages. Crucial for portfolios in educational environments is a degree of reflection to take place on what is in the portfolio file. Career Portfolios are becoming common in high schools, college, and workforce development.*

Dengan memperhatikan pengertian portofolio tersebut, maka portofolio untuk sementara digunakan sebagai alternatif dalam proses sertifikasi guru, terutama dalam masa transisi ini. Mengingat jumlah guru untuk semua jenjang dan jenis pendidikan relatif banyak, sekitar 2,7 juta orang. Andaikan setiap guru dikenakan program pendidikan profesi selama 1 tahun sebagaimana yang tertuang dalam UU RI No. 14 tahun 2005, sungguh tidak mungkin guru sebanyak itu dalam waktu 10 tahun dapat dituntaskan. Jika mereka harus melakukan dengan dengan berbondong-bondong meninggalkan tempat kerja menuju LPTK untuk mengikuti program pendidikan profesi, maka yang terjadi bukan lagi meningkatkan kualitas pendidikan, melainkan akan dapat menurunkan kualitas pendidikan.

Karena itulah disadari bahwa ada kelebihan dan kekurangan penggunaan portofolio untuk proses sertifikasi guru. Kelebihannya di antaranya adalah:

a. Memberikan penghargaan terhadap pengalaman, kinerja dan karya guru.
b. Mampu mengakselerasi proses sertifikasi guru.
c. Memiliki efisiensi yang tinggi untuk proses sertifikasi.
d. Memberi kepercayaan kepada guru untuk menyusun dokumennya sendiri.

Sedangkan kekurangannya, di antaranya:

a. Terbuka bagi setiap guru untuk melakukan manipulasi dokumen.
b. Belum sepenuhnya menggambarkan kinerja riil di lapangan.
c. Guru yang tidak disiplin dalam menyimpan bukti-bukti kegiatan merasa dirugikan.
d. Kepala sekolah dan atau pengawas sering diragukan objektivitasnya dalam melakukan penilaian terhadap guru.

4. Fungsi dan Peran PT penyelenggara sertifikasi Guru dalam jabatan.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai penyelenggara sertifikasi guru (PSG) memiliki fungsi sebagai berikut:

a. merekrut tenaga asesor portofolio dan fasilitator PLPG
b. merencanakan penilaian portofolio dan pelaksanaan PLPG.
c. mengkoordinasikan penilaian portofolio dan pelaksanaan PLPG
d. memantau dan mengendalikan penilaian portofolio dan pelaksanaan PLPG.

Selain daripada itu, LPTK penyelenggara memiliki peran, di antaranya:

a. Penilai portofolio.
b. Pelaksana PLPG.
c. Pemberi sertifikat pendidik.
d. Pemberi advokasi untuk program sertifikasi guru.
e. Pengembang program sertifikasi guru.
f. Pengendali kinerja guru profesional.

5. Prosedur Sertifikasi Guru dalam dan Calon Guru.

a. Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui penilaian dokumen prestasi yang telah dimiliki guru selama mengajar (berdasarkan Permendiknas Nomor 18 tahun 2007). Penilaian portofolio tersebut diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah (Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007).

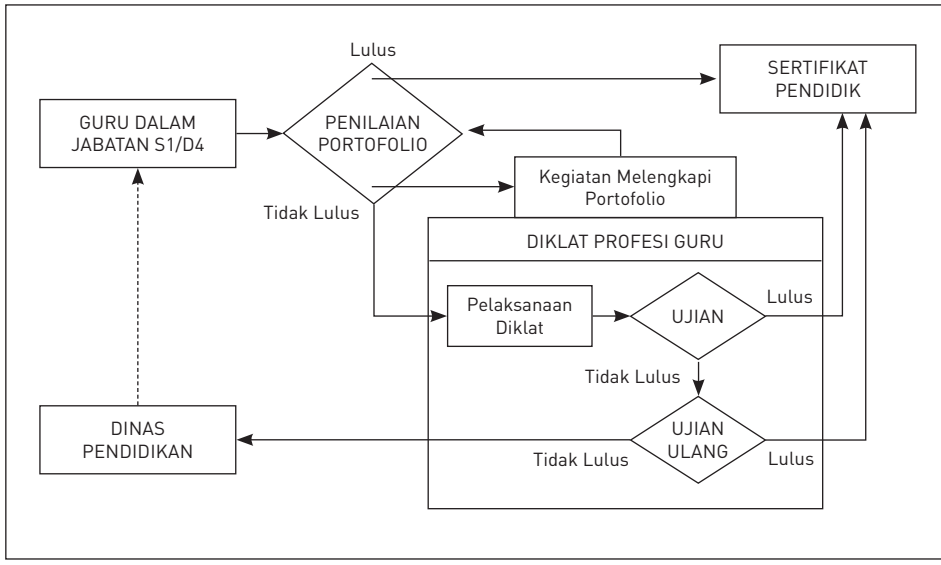

Gambar 1. Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio.

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio sebagaimana gambar di atas sebagai berikut.

1) Guru dalam jabatan peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio.
2) Dokumen portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelengara sertifikasi untuk dinilai.
3) Rayon LPTK Penyelengara Sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra.
4) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.
5) Apabila skor hasil penilaian portofolio telah mencapai batas kelulusan, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA). Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya.
6) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, Rayon LPTK menetapkan alternatif sebagai berikut.
   a) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio (melengkapi substansi atau MS) bagi

peserta yang memperoleh skor 841-849. Apabila dalam kurun waktu satu bulan peserta tidak mampu melengkapi akan diikutsertakan dalam Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

b) Mengikuti PLPG yang mencakup empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh Sertifikat Pendidik. Peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali (untuk materi yang belum lulus), dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

b. Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan selama-lamanya 2 semester (Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan). Pendidikan tersebut diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah (Keputusan Mendiknas Nomor 122/P/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan).

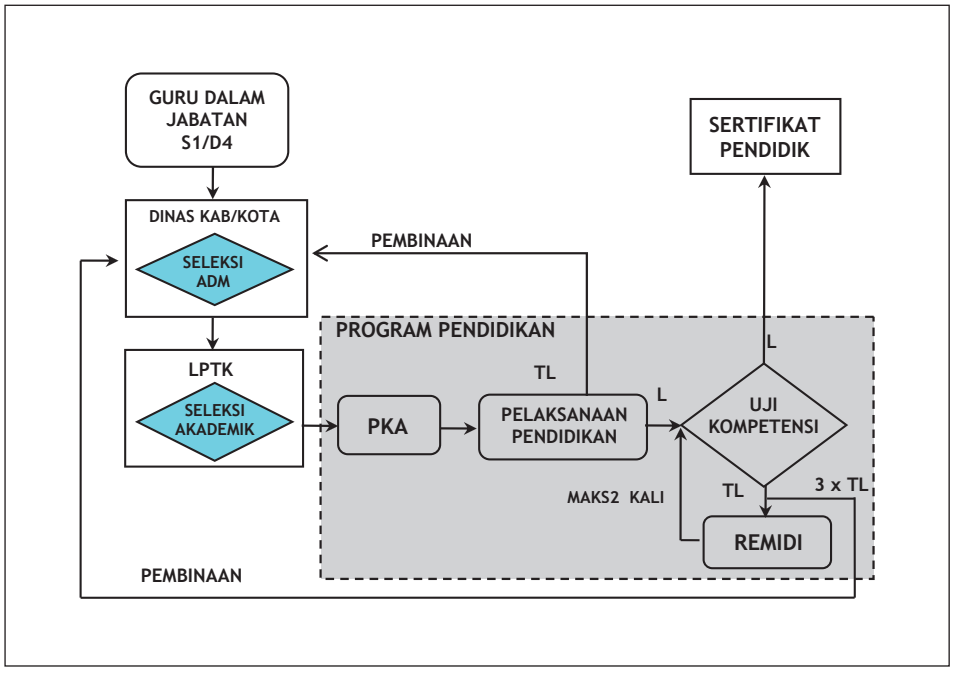

Gambar 2. Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan sebagai berikut:

a. Guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan mendaftar ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melengkapi berkas.
b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi administratif kepada calon peserta, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan 2 (dua) orang guru SMP per bidang studi dan 2 (dua) orang guru SD (tidak boleh kedua-duanya guru Penjas Orkes).
c. Rekap usulan calon peserta sertifikasi melalui jalur pendidikan beserta dokumen kelengkapannya dikirimkan ke Ditjen Dikti.
d. LPTK penyelenggara sertifikasi melalui jalur pendidikan bersama dengan Ditjen Dikti melakukan seleksi akademik untuk menetapkan calon peserta. Ditjen Dikti menetapkan alokasi jumlah peserta pada masing-masing LPTK yang ditunjuk.
e. Peserta yang lolos seleksi akademik mengikuti Penelusuran Kemampuan Awal untuk menentukan jumlah SKS yang wajib diambil selama mengikuti sertifikasi guru melalui jalur pendidikan.
f. Peserta mengikuti pendidikan maksimal 2 semester dan wajib lulus semua mata kuliah, sebagai syarat untuk mengikuti uji kompetensi. Peserta yang belum lulus ujian mata kuliah diberi kesempatan mengikuti pemantapan dan ujian ulang sampai 2 kali. Peserta yang tidak lulus dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pembinaan.
g. Peserta uji kompetensi yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti remidi di LPTK. Kesempatan remidi diberikan dua kali. Bila peserta gagal uji kompetensi yang ke-3, maka peserta dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pembinaan.

6. Program dan hasil Sertifikasi yang sudah dilaksanakan oleh rayon 11

Pada tahun 2007, Pelaksana Program Sertifikasi Guru Rayon 11 yang mencakup 9 kabupaten/kota wilayah Jateng dan 5 kabupaten/kota wilayah DIY memiliki program di antaranya:

a. Melakukan rekrutmen dosen untuk menjadi asesor dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai LPTK induk dan UNIVERSITAS Sanata Darma (USD), Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan Universitas Sarjana Wiyata (UST), sehingga diperoleh sebanyak 262 orang asesor.

b. Melaksanakan penilaian portofolio sebanyak 4 tahap, yaitu tahap September, Oktober, dan November 2007 serta Januari 2008. Tahap I dilakukan pada tangal 8-11 September 2007 dengan jumlah portofolio sebanyak 3420 eks (1710 guru). Tahap II dilakukan pada tanggal 5-9 Oktober 2007 dengan jumlah portofolio sebanyak 10.064 eks (5.032 guru). Tahap III dilakukan pada tanggal 10-11 November 2007 dan tanggal 17-20 November 2007 dengan jumlah portofolio sebanyak 11.010 eks (5.505 guru). Kemudian tahap IV dilakukan pada 29-30 dengan jumlah portofolio sebanyak
c. Melaksanakan pemantapan bagi peserta program sertifikasi guru yang dinyatakan lulus pada setiap akhir dari penyelenggaraan penilaian portofolio. Demikian juga selanjutnya diharapkan akan dilakukan pemantapan bagi yang lulus PLPG.
d. Melaksanakan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) bagi yang tidak lulus sebanyak 21 gelombang yang dimulai sejak Desember 2007 hingga pertengahan Maret 2008. Adapun secara keseluruhan jumlah yang mengikuti PLPG sebanyak 12,477 orang. Kuota 2006 jumlah peserta 1,159 yang lulus 884, melengkapi portofolio 13, dan mengikuti diklat 262. Kuota 2007 jumlah peserta 11,318 yang lulus 6,778, melengkapi portofolio 72, dan mengikuti diklat 4,468 orang. Dengan demikian yang mengikuti diklat secara keseluruhan sebanyak 4,730 orang. Sedangkan yang lulus diklat sekitar sekitar 198 orang.

7. Permasalahan/hambatan yang dihadapi Rayon 11 dalam sertifikasi guru

Kebijakan strategis pemerintah terhadap guru dewasa ini dapat dinilai sangat positif, terlebih dengan penegasan Presiden RI pada acara hari Guru Nasional 25 November 2007 di Riau Sumatera, bahwa perhatian yang tinggi diberikan bagi peningkatan kesejahteraan guru, karena di pundak mereka lah dipercayakan untuk menghasilkan generasi masa depan yang lebih baik. Namun yang lebih penting lagi, bahwa kesejahteraan yang diberikan dan ditingkatkan seharusnya diraih melalui *profesionalisme*. Dengan demikian upaya ini sungguh mengangkat martabat guru. Karena itulah semua guru tanpa terkecuali, utamanya guru profesional (yang sudah bersertifikat pendidik) harus mampu menjaga martabat ini dengan menunjukkan kinerja yang lebih baik dan produktif, bukan sebaliknya sehingga menciderai profesi guru yang sedang mulai ditata.

Di balik sisi positif tersebut di atas, ternyata proses sertifikasi guru dalam jabatan - melalui penilaian portofolio - yang merupakan bagian penting bagi perjalanan karier guru masih mendapat sorotan dari berbagai pihak. Hal ini terbukti dengan banyak masalah yang masih dijumpai dalam proses sertifikasi di seluruh Indonesia. Menurut hemat saya, seberat apapun masalah yang diha-

dapi jangan sampai menghentikan proses jalannya sertifikasi guru dalam jabatan, demikian juga sekecil apapun masalah yang dihadapi, diharapkan sekali jangan sampai diabaikan, karena boleh jadi dapat menghambat proses sertifikasi guru ke depan. Untuk itulah sangat dibutuhkan langkah konstruktif yang diwujudkan dengan upaya-upaya strategis, sehingga proses sertifikasi guru, yang sementara ini terjadi, terutama penilaian portofolio guru pada semua jenjang dan jenis pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta lebih *accountable*. Berdasarkan pertemuan antar pelaksana sertifikasi guru seluruh Indonesia, menurut hemat penulis ada beberapa masalah yang bisa diangkat, di antaranya.

a. Dijumpainya beberapa duplikasi dan pemalsuan dokumen (ijazah, sertifikat, makalah, dan sebagainya).
b. Kuota yang tidak terpenuhi oleh suatu kab/kota. Kondisi ini seharusnya tidak boleh terjadi, karena merugikan banyak guru yang sedang antri untuk mendapatkan haknya.
c. Pemahaman guru terhadap portofolio yang masih terbatas. Kondisi ini berdampak terhadap dokumen portofolio yang dihasilkan guru jauh dari yang diharapkan. Keadaan yang demikian sangat boleh terjadi, akibat dari kemampuan guru yang terbatas, namun yang sangat boleh terjadi sebagai akibat dari sosialisasi yang dilakukan dinas jauh dari memadai.
d. Pemberian kesempatan guru yunior untuk sertifikasi terutama non-PNS.
e. Kelayakan calon yang diajukan, terutama dikaitkan dengan kualifikasi akademiknya.
f. Sistem dokumentasi atau software untuk proses analisis data yang belum mantap.
g. Keterbatasan staf dan penyediaan dana untuk proses sertifikasi guru di dinas kabupaten/kota dan propinsi dapat berakibat pada keseriusan dalam mengawal program sertifikasi guru di daerah
h. Banyak dijumpai guru yang menentukan pilihan bidang atau bidang studi untuk guru profesionalnya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya (kualifikasi akademik).
i. Keterbatasan ragam asesor, sehingga menyebabkan ada guru yang tidak dapat dinilai dengan baik.
j. Program yang diberikan dari Jakarta terlalu *complicated* sehingga sebagian nilai tidak bisa memenuhi program. Oleh karena itu, banyak nilai yang terpaksa di-*entry* melalui *exell*.
k. Dokumen yang tersimpan di dalam gudang penyimpanan sampai tahap IV sudah memenuhi ruangan, sehingga menjadi permasalahan tersendiri ketika menerima dokumen yang akan datang (kuota 2008).

l. Peserta PLPG datang tidak sesuai mapel dikarenakan kesalahan penulisan nomor peserta, sehingga menyulitkan panitia dalam menerima peserta.
m. Formula SAK (Skor Akhir Kelulusan), bobot penilaian teman sejawat (antar teman) sebesar 30%. Sehingga tertanam kesan diklat sangat mudah meluluskan.

Penutup dan Rekomendasi

1. Penutup

Sangatlah dimaklumi bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa diabaikan dari profesionalisme guru. Untuk menjamin profesionalisme guru dipandang penting oleh banyak negara adanya program sertifikasi guru. Program sertifikasi guru sangat terkait dengan keberadaan guru, baik calon guru maupun guru dalam jabatan (senior atau yunior).

Mengingat jumlah guru dalam jabatan sangatlah banyak, sekitar 2,7 juta orang, sedangkan yang baru memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 baru sekitar 900.000 orang, maka dipandang perlu dipilih strategi yang efektif untuk program sertifikasi. Guru dalam jabatan dapat dikenai program portofolio dan pendidikan profesi tergantung pada kondisinya. Namun mayoritas mereka dikenai penilaian portofolio. Banyak komentar positif dan negatif terhadap pelaksanaan penilaian portofolio, namun semuanya itu disadari bahwa penilaian portofolio sebagai alternatif untuk sertifikasi guru mengandung nilai postif dan negarif. Oleh karena itu dalam implementasinya, diharapkan sekali dapat meminimalisir sisi kelemahan pelaksanaan portofilo, sehingga dapat lebih memuaskan bagi semuanya.

Pelaksanaan PLPG bagi yang tidak lulus penilaian portofolio bagi hampir semua peserta merasakan puas, karena PLPG mampu meng-update dan memberikan penyegaran serta pengalaman baru bagi guru. Bahkan ekstrimnya, sejumlah banyak peserta merasakan lebih daripada yang lulus portofolio. Oleh karena itu ke depan diharapkan sekali PLPG menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari penilaian portofolio.

Akhirnya apapun bentuk program sertifikasi guru, baik melalui penilaian portofolio maupun pendidikan profesi, semuanya kembali kepada yang bersangkutan, bagimana guru itu sendiri menjaga martabat profesinya, sehingga bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak dan bisa mempertanggungjawabkan di depan publik dan Allah swt.

2. Rekomendasi

Berdasarkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam program sertifikasi, maka ada sejumlah rekomendasi yang perlu dipertimbangkan, di antaranya:

a. Untuk dapat mengantisipasi merebaknya persoalan manipulasi sebaiknya ke depan guru peserta sertifikasi dipandang perlu menyerahkan dokumen aslinya satu eksemplar dan dokumen *foto copy* satu eksemplar. Khusus untuk ijazah, akta, dan lembaran SK kepegawaian dapat diberikan dalam bentuk foto copy yang terlegalisir oleh yang berwewenang. Setelah proses penilaian, dokumen asli dapat dikembalikan ke yang bersangkutan.
b. Untuk dapat memanfaatkan kesempatan penilaian portofolio, sebaiknya dapat digunakan oleh daerah lain, terutama yang masih dalam satu rayon, sehingga dana yang sudah disiapkan dapat direalisasikan secara optimal.
c. Untuk menyamakan bahasa program sertifikasi guru, sosialisasi tentang sertifikasi guru perlu terus digalakkan, baik melalui mass media maupun pertemuan-pertemuan, sehingga guru-guru dapat terhindar dari kesalah-pahaman dalam penyusunan portofolio. Yang lebih penting bahwa guru-guru dapat menampilkan portofolio dirinya masing-masing secara optimal.
d. Untuk dapat berlaku fair dan menghindari dari berbagai dugaan negatif terhadap penetapan calon peserta asesor, seyogyanya dinas pendidikan kota/kabupaten mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan, di samping itu perlunya ada ketentuan dari Jakarta untuk memberikan fleksibilitas penetapan rasio kuota antara guru non-PNS dan PNS.
e. Untuk menjamin validitas ijazah, ke depan diharapkan sekali Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi dapat mengeluarkan informasi tentang akredi-tasi program studi (PS) seluruh Indonesia yang mudah diakses, sehingga dapat membantu semua pihak yang terkait dalam seleksi guru untuk proses sertifikasi, terutama Dinas kabupaten/kota, Ditjen PMPTK, dan LPTK.
f. Untuk mengoptimalkan kinerja sertifikasi guru, sistem informasi manaje-men perlu dijadikan prioritas untuk dapat penanganan secara tuntas, se-hingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sertifikasi guru di masa-masa mendatang.
g. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi proses layanan sertifikasi guru, diharapkan setiap dinas kabupaten/kota dan propinsi, diharapkan dapat di-bentuk suatu tupoksi baru yang benar-benar memiliki tanggung jawab ter-hadap ketenagaan terutama penanganan program sertifikasi guru dengan dukungan dana yang memadai.
h. Untuk menjaga kelayakan ijazah, maka perlu ada ketegasan tentang tahun pemberlakuan ijazah S1/D4 yang relevan sebagai sarat mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan, apakah tahun 2008, 2009 atau kapan. Perlu disadari bahwa jumlah guru yang masih belum berkualifikasi S1/D4 masih sekitar 1,8 juta. Jika tidak segera ada ketegasan.

i. Untuk yang akan datang dalam menentukan kelulusan peserta PLPG perlunya dipertimbangkan untuk memasukkan sekor portofolio dalam rumus Skor Akhir Kelulusan (SAK).
j. Untuk menjamin kualitas kelulusan, maka formula SAK perlu dilakukan perubahan, terutama mengurangi bobot skor untuk penilaian antar sesama.

Saya yakin bahwa semua pihak yang terkait dengan program sertifikasi telah berusaha memberikan yang terbaik, walaupun demikian sekiranya masih ada celah untuk *sharing,* maka catatan kecil ini diharapkan sekali dapat memberikan manfaat bagi beberapa fihak, terutama bagi semua guru dapat dijadikan bahan instrospeksi dan rujukan bagi perbaikan kinerjanya sehingga tampil lebih baik dan produktif; bagi kepala sekolah dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan guru di bawah tanggung jawabnya, sehingga dapat membawa nama baik lembaganya, bukan sebaliknya; bagi pengawas dapat dijadikan rujukan untuk melakukan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas kepengawasannya; bagi kepala dinas dapat dijadikan untuk membenahi tupoksi dan perbaikan layanan guru, sehingga proses sertifikasi guru dapat dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel; bagi dinas propinsi dapat dijadikan rujukan untuk melakukan fasilitasi, koordinasi dan pengendalian proses sertifikasi; dan panitia rayon dapat meningkatkan efektivitas penilaian portofolio, pengendalian asesor dan pelaksanaan PLPG, sehingga mampu memberikan hasil penilaian portofolio dan PLPG secara objektif dan bertanggungjawab.

Akhirnya diharapkan sekali bahwa catatan kecil dapat dijadikan pertimbangan bagi Pelaksana Sertifikasi Guru di Departemen Pendidikan Nasional dan Konsorsium Sertifikasi Guru untuk merumuskan kebijakan baru dan program-program utamanya, sehingga penyelenggaraan, terutama untuk peningkatan kualitas pendidikan.

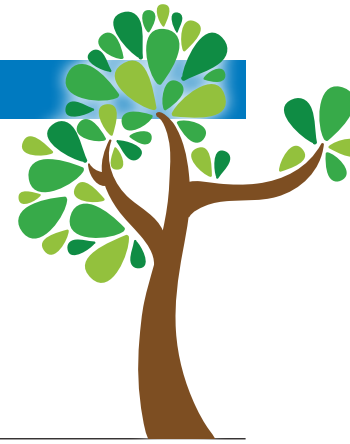

Kesejahteraan Guru Profesional

DEWASA ini setiap guru mengharapkan bisa menjadi guru profesional, karena guru profesional tidak hanya mendapatkan penghargaan akademik dan sosial, melainkan juga akan mendapatkan insentif ekonomik yang memadai. Karena itulah semua guru Indonesia sangat responsif ketika pemerintah merealisasikan kebijakan dan program sertifikasi guru, baik melalui penilaian portofolio maupun pendidikan dalam jabatan.

Alhamdulillah, untuk realisasi tahun pertama program sertifikasi tersedia kuota sebanyak 200.450 orang guru yang disiapkan oleh Pemerintah, tetapi disayangkan sekali bahwa hanya 180 ribuan yang lulus, karena sekitar 20 ribuan orang tidak bisa mengikuti penilaian portofolio dan akibat halangan tetap serta tidak lulus ujian kompetensi dari Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Setiap guru yang lulus sangat berharap bahwa tunjangan profesi akan segera didapatkan, namun pada kenyataannya bahwa baru sekitar 150 ribuan di antara mereka yang sudah menerima tunjangan (menurut KR 19 November 2008). Disinyalir bahwa hambatan pencairan tunjangan dapat disebabkan, di antaranya: 1) pendataan yang kurang rapi, 2) nomor dan nama rekening guru yang dikirimkan tidak tepat, 3) terbatasnya personil yang menangani tunjangan, 4) sistem informasi manajemennya belum terpadu, 5) dan sebagainya.

Alasan-alasan tersebut bisa saja dimaklumi, karena program sertifikasi guru merupakan program tahun pertama, sehingga masih banyak dijumpai persoalan yang semestinya itu tidak harus terjadi. Namun ke depan, semua persoalan tersebut harus dapat diantisipasi secara cermat dan waspada, sehingga tidak merugikan para guru.

Berdasarkan kondisi aktual tersebut, kiranya Pemerintah dan instansi terkait tidak boleh diam, bahkan harus sangat peduli terhadap keluhan dan "jeritan" para guru. Jangan sampai para guru terus merasa "di-dzalimi", walau

mereka sudah terlatih kesabarannya, namun kalau harga dirinya kurang mendapat rekognisi yang memadai, sangat boleh jadi mereka akan turun jalan untuk berdemo, walaupun itu kadang-kadang bertentangan dengan hati nuraninya.

Karena itu Pemerintah diharapkan segera bertindak cepat, sungguh-sungguh, dan tidak ditunda-tunda untuk segera menuntaskan persoalan ini, sehingga tidak berakibat kontra produktif. Mengapa hal ini harus segera mendapatkan solusi, karena berdasarkan informasi dari sejumlah guru yang sudah bersertifikat pendidik, bahwa mereka ternyata tidak menunjukkan perubahan secara berarti dalam kinerjanya, karena mereka belum yakin bahwa tunjangannya akan segera keluar.

Dengan begitu mereka dalam kesehariannya juga tidak pernah berusaha memperbaiki kinerjanya, walaupun sewaktu penerimaan sertifikat pendidik di UNY sudah mendapat "kontrak profesi". Mudah-mudahan, tunjangan profesi yang sudah diterima itu dapat segera berdampak kepada kinerjanya semakin lebih baik dan produktif. Jika tidak, pada saatnya guru profesional yang sudah menerima tunjangan akan mendapatkan *complaint* dari masyarakat, karena masyarakat telah membayar pajak yang salah satunya dialokasikan untuk membayar gaji semua pegawai pemerintah, termasuk tunjangan profesi bagi guru profesional. Ingat, bahwa guru profesional adalah seorang yang amanah *(trusted),* sehingga mereka tidak perlu harus terus diawasi, karena mereka tidak hanya mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, melainkan juga kepada Allah swt.

Sementara ini memang tunjangan profesi sifatnya masih terpisah dengan gaji pokok dan tunjangan fungsional guru. Untuk menghindari adanya kemacetan dan keterlambatan pemberian tunjangan profesi, kiranya lebih efektif dan terkendali, jika pemberian tunjangan profesi disatukan dengan gaji pokok dan tunjangan fungsionalnya terutama yang termasuk guru PNS. Sedang guru non-PNS dapat dikirimkan bersama-sama dengan tunjangan fungsionalnya.

Akhirnya, diharapkan sekali semua pihak yang terkait dengan pemberian layanan kesejahteraan bagi guru selalu melakukan koordinasi dan konsolidasi secara rutin, sehingga pengelolaan dan pengendalian pemberian kesejahteraan bagi guru ke depan semakin lancar. Yang tidak kalah pentingnya adalah transparansi dalam setiap pengelolaan kesejahteraan guru harus menjadi komitmen semua untuk menjamin akuntabilitas publik, sehingga dapat terhindarkan dari aktivitas penarikan-penarikan yang tidak perlu terjadi terhadap guru profesional. Semoga.

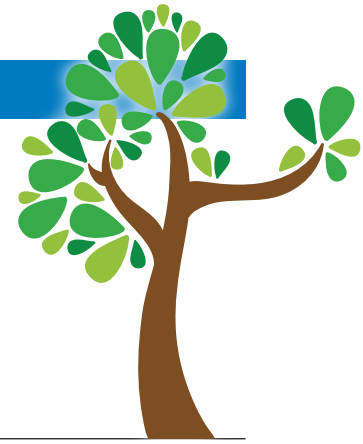

Gaji Guru Pasca Anggaran Pendidikan 20 Persen

PIDATO Presiden RI, Dr. Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 15 Agustus 2008, sungguh memberikan angin segar bagi masyarakat pendidikan, terutama dengan penegasannya bahwa tahun 2009 Pemerintah berencana menganggarkan sebanyak 20% APBN bagi sektor pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah memberikan prioritas pertama bagi sektor pendidikan.

Political will pemerintah tersebut patut mendapat apresiasi yang tinggi dari semua pihak, terutama komunitas pendidikan. Karena dengan adanya kenaikan anggaran pendidikan, diharapkan sekali dapat memberikan akses pendidikan secara seluas-luasnya dan meningkatkan mutu pendidikan bagi semua.

Bahkan lebih jauh dari itu, diharapkan sekali kenaikan anggaran dapat memberikan dukungan biaya bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru, karena gaji guru termasuk cakupan 20% APBN berdasarkan keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 24/PUU-V/2007 yang menguji pasal 49 ayat (1) UU No.20/2003 tentang Sisdiknas memutuskan bahwa *"Dana pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD"*. Keputusan ini mengoreksi pasal 49 ayat (1) UU No.20/2003 tentang Sisdiknas bahwa *dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Walaupun masuknya gaji guru dalam formula anggaran 20% APBN hingga kini masih dalam perdebatan.

Berbicara soal gaji guru, berarti bicara soal gaji pokok guru dan gaji berbagai tunjangan terkait dengan guru sebagai profesi sebagaimana yang diamanatkan pada UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 15 ayat (1) Penghasilan di atas kebutuhan minimum sebagaimana dalam pasal 14 ayat

(1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi." Jika ingin konsisten, maka semua tunjangan itu seharusnya segera dapat direalisasikan sepanjang segala persyaratannya dapat dipenuhi. Tidak ditunda-tunda, sehingga dapat menimbulkan kesan negatif masyarakat pendidikan terhadap kesungguhan pemerintah.

Di samping pemerintah perlu segera memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak guru sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang juga sama pentingnya adalah guru sebagai pekerja profesional berkewajiban secara moral menunjukkan kinerjanya yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Jika para guru mampu melakukannya, sungguh mereka dapat terhindarkan sejauh-jauhnya dari kecemburuan sosial di antara anggota masyarakat.

Sungguh tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi, jika semua tunjangan bagi guru dapat direalisasikan secara keseluruhan. Sementara itu mereka tidak mampu dan tidak mau melaksanakan tugas secara optimal sesuai dengan statusnya sebagai guru profesional. Bahkan kehadirannya tidak menunjukkan dampak positifnya, terutama bagi perbaikan kualitas pendidikan. Diduga sangat kuat bahwa kemarahan besar di antara masyarakat tidak dapat dihindari sebagai wujud protes terhadap pemerintah dan guru sendiri. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa pemerintah dinilai tidak mampu mengawal kebijakan secara total, di samping guru-guru dinilai tidak memiliki tanggung jawab akademik dan profesional secara berarti.

Untuk memberikan kepuasan bagi semua *stakeholders* dan untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka tidak ada pilihan yang terbaik bagi kita melainkan bahwa semua guru seharusnya menjaga dan menunjukkan komitmennya untuk berbuat yang terbaik, tanpa menunggu teguran dari kepala sekolah atau pengawas pendidikan terkait. Apalagi seorang guru profesional tentu sudah matang dan amanah *(trusted).* Jika hal ini dapat dilakukan secara terus menerus, maka pada akhirnya diharapkan sekali terjadi perbaikan pada proses pendidikan, bahkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Yang jelas bahwa berapapun yang dapat diperoleh guru dari berbagai jenis insentif, diharapkan sekali tidak dinikmati secara konsumtif, namun sebagiannya dapat disisihkan untuk menjaga keprofesionalannya dengan membelanjakan untuk penambahan koleksi informasi *upto-date* yang relevan dengan bidangnya, sehingga dapat mendukung eksistensinya sebagai guru profesional

yang bermartabat. Memang hal ini mudah diutarakan dan terasa sulit untuk diwujudkan, namun sebagai guru profesional tentu memiliki kebutuhan untuk menjaga amanah ini secara bertanggungjawab, sehingga saya berkeyakinan bahwa para guru akan dengan mudah dapat melaksanakannya. Semoga!

Pendidikan dan Konseling
Bagi Anak Berbakat

Individu yang sukses dalam kariernya lebih disebabkan oleh fungsi kerja keras daripada kecemerlangan potensi yang dimilikinya.

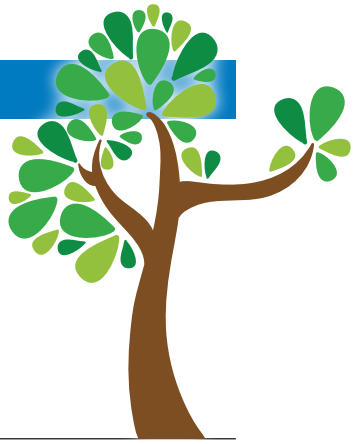

Mengenal Anak Berbakat Akademik dan Upaya Mengidentifikasinya

Pendahuluan

Keberbakatan hingga kini masih menjadi wacana yang sangat menarik, baik bagi yang terlibat langsung dengan persoalan keberbakatan maupun tidak. Bahkan menjadi lebih menarik lagi, karena banyak terjadi miskonsepsi terhadap keberbakatan. Secara umum "Keberbakatan dapat diartikan sebagai kemampuan unggul yang memungkinkan seseorang berinteraksi dengan lingkungan dengan tingkat prestasi dan kreativitas yang sangat tinggi".

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pertama, keberbakatan merupakan suatu kualitas yang dibawa sejak lahir (dengan kata lain keberbakatan itu bersifat alamiah), dan kedua, bahwa lingkungan keberbakatan adalah arena di mana anak berbakat memainkan peran di dalamnya). Karena itulah dapat dikatakan bahwa tingkat prestasi dan kreativitas yang tinggi dihasilkan dari interaksi yang terus menerus dan fungsional antara kemampuan dan karakteristik yang dibawa seseorang dari lahir dan yang diperoleh selama dalam kehidupannya.

Sering kita jumpai banyak pernyataan, seperti: "Dia adalah seorang seniman sejak lahir, dia adalah seorang ilmuwan yang dibesarkan oleh lingkungan pendidikan yang kondusif, dia adalah olahragawan terkenal yang dibesarkan dari lingkungannya, sebagainya. Yang jelas bahwa keberhasilan pada dasarnya tidak pernah datang kepada kita dengan mudah; Kita harus belajar dengan keras dan sungguh-sungguh. Semuanya menggambarkan bahwa keberbakatan itu pada hakekatnya memiliki beberapa faktor bawaan plus motivasi dan stamina untuk belajar kehidupan.

Menyadari akan kebutuhan untuk memahami keberbakatan dengan benar, kiranya perlu sekali mengenal profil anak berbakat, terutama anak berbakat akademik, serta upaya mengidentifikasinya.

Siapa Anak Berbakat Akademik

Banyak istilah yang dapat dipakai untuk menyebut anak berbakat, di antaranya: anak unggul, anak berkemampuan istimewa, anak superior, anak genius, dan masih banyak lagi sebutan lainnya. Secara konseptual pengertian anak berbakat juga berkembang dari tahun ke tahun. Pertama, anak berbakat adalah anak yang ditunjukkan dengan kemampuan tingkat kecerdasaan atau kemampuan umum *(g factor)* di atas rata-rata. Konsep ini diperkuat dengan teori faktor, bahwa kemampuan individu dapat dikatagorikan menjadi dua, yaitu kemampuan khusus *(s factor)* dan kemampuan umum *(g factor).* Berdasarkan konsep ini Komisi Pendidikan AS, Sidney P. Marland (1972) menetapkan definisi anak berbakat sebagai

"Gifted and talented children are those identified by professionally qualified persons who by virtue of outstanding abilities are capable of high performance. These are children who require differentiated educational programs and/or services beyond those normally provided by the regular school program in order to realize their contribution to self and society" Artinya kurang lebih: "Anak berbakat adalah anak yang diidentifikasi oleh orang-orang yang berkualifikasi profesional sebagai anak yang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka menghendaki program pendidikan yang sesuai atau layanan melebihi sebagaimana diberikan secara normal oleh program sekolah regular, sehingga dapat merealisasikan kontribusi secara bermakna bagi diri dan masyarakatnya.

Kemampuan anak dengan kinerja tinggi yang dapat merupakan prestasi dan atau kemampuan potensial dalam beberapa bidang, baik yang sifatnya kemampuan tunggal maupun kemampuan jamak, atau kombinasi di antara bidang-bidang itu di antaranya: kemampuan intelektual umum, bakat akademik spesifik, kemampuan produktif atau kreatif, kemampuan kepemimpinan, kemampuan bidang seni visual dan pertunjukan, dan kemampuan motorik. Dengan menggunakan definisi keberbakatan yang lebih luas, suatu sistem sekolah diharapkan mampu mengidentifikasi 10% s.d. 15% atau lebih dari populasi dapat disebut anak berbakat. Untuk memahami definisi tersebut di atas secara lebih mendalam, maka dipandang perlu melakukan deskripsi masing-masing bidang keberbakatan.

Kemampuan intelektual umum, bahwa orang umum seperti juga pendidik selalu mendefinisikan ini berkenaan dengan skor tes inteligensi yang tinggi – yang biasanya di atas 2 standar deviasi. Orangtua dan guru sering mengenal siswa yang memiliki kemampuan intelektual umum di atas rata-rata yang diindikasikan dengan tingkat perbendahaan kata yang tinggi, ingatan, dan penguasaan kata-kata abstrak, dan pemikiran abstrak.

Bakat akademik khusus, bahwa siswa dengan bakat akademik khusus diidentifikasi dengan penampilan yang unggul pada tes prestasi atau tes bakat dalam satu atau lebih dari satu bidang, seperti: prestasi matematika, sains. Pengelola pencarian bakat sering kali disponsori oleh sejumlah universitas dan institut dengan mengidentifikasi siswa yang berbakat akademik yang skornya 97 % atau lebih tinggi berdasarkan hasil tes prestasi terstandar dan tes bakat skolastik.

Kemampuan berpikir kreatif dan produktif, bahwa bakat ini merupakan kemampuan menghasilkan ide-ide baru dengan menyatukan elemen-elemen yang ada dan bakat untuk mengembangkan makna-makna baru yang berarti bagi masyarakat. Karakteristik siswa kreatif dan produktif mencakup keterbukaan terhadap pengalaman, menetapkan standar personal untuk evaluasi, kemampuan memainkan ide-ide, keinginan untuk menghadapi risiko, kesukaan terhadap kompleksitas, toleran terhadap ambiguitas, image diri yang positif, dan kemampuan menyatu dengan tugas. Siswa kreatif dan produktif diidentifikasi melalu penggunaan tes seperti *Torrance Test of Creative Thinking* atau melalui penampilan kreatif.

Kemampuan kepemimpinan, bahwa kepemimpinan dapat diidentifikasi sebagai kemampuan untuk mengarahkan individu atau kelompok untuk sampai kepada keputusan atau tindakan bersama. Siswa yang menampilkan kemampuan keberbakatan bidang kepemimpinan menggunakan keterampilan kelompok dan bernegosiasi dalam situasi yang sulit. Beberapa guru mengenal kepemimpinan melalui minat yang sungguh-sungguh dan keterampilan dalam pemecahan masalah. Karakteristik kepemimpinan mencakup kepercayaan diri, tanggung jawab, kerjasama, kecenderungan untuk mendominasi, dan kemampuan beradaptasi dengan mudahnya terhadap situasi yang baru. Siswa-siswa ini dapat diidentifikasi melalui instrumen seperti *the Fundamental Interpersonal Realtions Orientation Behavior.*

Seni visual dan pertunjukan, bahwa siswa berbakat bidang seni menunjukkan keberbakatan khususnya bidang seni visual, musik, tari, drama atau bidang-bidang terkait lainnya. Siswa-siswa ini dapat diidentifikasi dengan menggunakan deskripsi tugas seperti skala produk kreatif *(the Creative Product Scale),* yang dikembangkan untuk Sekolah Negeri Detroit oleh Patrik Byrons dan Beverley Ness Parke, Wayne State University.

Kemampuan psikomotorik, bahwa kemampuan ini mencakup kemampuan motorik kinestetik, seperti keterampilan praktik, spasial, mekanikal, dan fisikal. Kemampuan ini jarang digunakan sebagai suatu kriteria dalam program bagi anak berbakat.

Selain daripada pandangan tersebut di atas, ada pandangan-pandangan lain tentang keberbakatan. *Pertama***,** Robert Sternberg dan Robert Wagner (1982) menyarankan bahwa keberbakatan adalah suatu jenis *mental self-management*. Manajemen mental kehidupan seseorang dalam suatu cara yang konstruktif dan bertujuan memiliki tiga elemen dasar: mengadaptasikan dengan lingkungan, menyeleksi lingkungan baru, dan membentuk lingkungan. Sternberg dan Wagner menegaskan bahwa dasar psikologis yang sangat penting dari keberbakatan intelektual yang tersisa dalam kecakapan intuitif mencakup tiga proses utama, yaitu (1) memisahkan informasi yang relevan dan tak relevan, (2) mengkombinasikan informasi yang terpisah ke dalam keseluruhan yang utuh, dan (3) mengaitkan insformasi yang diperoleh pada saat ini dengan informasi yang diperoleh pada masa lalu.

*Kedua***,** Howard Gardner (1983) juga menyarankan suatu konsep *multiple intelligences,* bahwa ada beberapa cara untuk memandang dunia, yaitu: kecerdasan linguistik, logikal/matematik, spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, dan intrapersonal. Belakangan ini dilengkapi dengan kecerdasan naturalistik.

Ketiga, Joseph Renzulli (1986) menyatakan bahwa perilaku keberbakatan merefleksikan suatui interaksi antara tiga kluster dasar dari sifat-sifat manusia, yaitu kemampuan di atas rata, tingkat komitmen akan tugas yang tinggi, dan tingkat kreativitas yang tinggi. Menurut Renzulli, anak-anak berbakat adalah anak yang memiliki atau mampu mengembangkan kesatuan dari sifat-sifat itu dan menerapkannya untuk bidang-bidang apa yang bermakna dari kinerja manusia. Selain daripada itu juga dikatakan bahwa mereka adalah anak yang mampu mengembangkan suatu interaksi di antara tiga kluster, jika diberikan berbagai kesempatan dan layanan pendidikan yang tidak biasanya diberikan melalui program intsruksional pada umumnya.

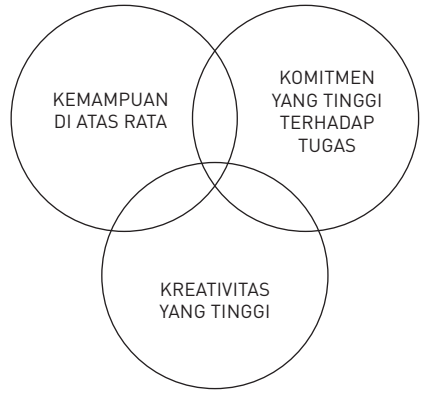

Gambar 1. Apa yang Membuat Keberbakatan (Renzulli, 1979)

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, maka Anak Berbakat Akademik (ABA) merupakan salah satu unsur keberbakatan yang sangat penting, di antara jenis keberbakatan lainnya. Artinya bahwa ABA merupakan salah satu katagori dari definisi *Marland Report,* dan juga salah satu sub katagori dari kemampuan di atas rata-rata, terutama kemampuan khusus, dari definisi Renzulli. Memang pada awalnya konsep keberbakatan yang diperkenalkan Renzulli, bahwa kemampuan yang dimaksudkan sebagai salah satu klusternya itu hanya menunjukkan kemampuan umum. Namun pada perkembangan lebih lanjut Renzulli (Sterndberg dan Davidson, 1986) menegaskan bahwa kemampuan di atas rata dipahami sebagai kemampuan umum dan khusus. Kemampuan khusus terdiri dari kemampuan memperoleh pengetahuan, keterampilan atau kemampuan untuk menampilkan satu keahlian atau lebih, misalnya kemampuan khusus bidang akademik, seni (musik, lukis, pahat), kepemimpinan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya ditegaskan oleh Kitano dan Kirby (1985) bahwa ABA adalah individu yang memiliki kemampuan potensial dan aktual di bidang akademik tertentu seperti: sains, matematika, ilmu pengetahuan sosial, dan humaniora. Keunggulan bidang akademik yang ditunjukkan dapat juga hanya satu bidang atau dua bidang, bahkan dapat juga semua bidang.

Roe (Kitano dan Kirby, 1985) menegaskan bahwa individu di sekolah yang mampu menunjukkan prestasi akademik unggul, ternyata tidak selamanya dia memiliki kecerdasan tinggi, padahal mereka yang memiliki bakat akademik pada umumnya berkecerdasan tinggi. Selain daripada itu individu yang sukses dalam kariernya lebih disebabkan oleh fungsi kerja keras daripada kecemerlangan potensi yang dimilikinya.

Selain daripada itu disadari bahwa ABA tidak selamanya mampu menunjukkan prestasi akademik yang unggul, karena boleh jadi disebabkan oleh beberapa faktor. Di antara mereka, ada yang tidak mampu menampilkan potensi akademiknya secara optimal. Mereka itulah yang disebut sebagai anak berprestasi kurang (*underachieving children*). Kelompok inilah yang cenderung sebagai populasi yang lebih banyak terjadi di Indonesia, karena model pendidikan yang diselenggarakannya cenderung lebih bersifat klasikal, dan belum memberikan perhatian dan layanan berdasarkan potensi dan kebutuhan peserta didik. Untuk menyelamatkan potensi ABA yang lebih banyak menjadi tumpuan masa dapan bangsa, diperlukan layanan pendidikan dan bimbingan yang relevan.

Karakteristik Anak Berbakat Akademik

Bila dikaitkan dengan definisi Renzulli, maka karakteristik Anak Berbakat, di antaranya sebagai berikut:

1. Menunjukkan kemampuan di atas rata-rata, terutama di bidang:
   a. Kemampuan Umum
      - Tingkat berpikir abstrak yang tinggi, penalaran verbal dan numerikal, hubungan spasial, ingatan, kelancaran kata.
      - Adaptasi terhadap dan pembentukan situasi baru dalam lingkungan eksternal.
      - Automatisasi pemrosesan informasi.
   b. Kemampuan Khusus:
      - Aplikasi berbagai kombinasi kemampuan umum di atas terhadap bidang-bidang yang lebih spesifik (Mis. Matematika, Sain, Seni, kepemimpinan)
      - Kemampuan memperoleh dan membuat penggunaan yang tepat sejumlah pengetahuan formal, teknik, dan strategi di dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu.
      - Kemampuan untuk memilih informasi yang relevan dan tak relevan dengan problem atau bidang studi tertentu.
2. Menunjukkan Komitmen yang terhadap tugas, yang diindikasikan dengan:
   a. Kemampuan yang tinggi terhadap minat, antusiasme, dan keterlibatan dengan suatu problem atau bidang tertentu.
   b. Ketekunan, daya tahan, ketetapan hati, kerja keras, dan pengabdian.
   c. Kepercayaan diri, adanya keyakinan mampu melaksanakan pekerjaan yang penting, bebas dari perasaan inferior, keinginan yang kuat untuk berprestasi.
   d. Kemampuan mengidentifikasi masalah di bidang-bidang tertentu.
   e. Menetapkan standar yang tinggi terhadap pekerjaan; memelihara keterbukaan diri dan kritik eksternal; mengembangkan rasa estetis, kualitas dan keunggulan pekerjaannya sendiri dan pekerjaan orang lain.
3. Menunjukkan kreativitas yang tinggi, yang diindikasikan dengan:
   a. Kelancaran, keluwesan, dan keaslian dalam berpikir.
   b. Keterbukaan terhadap pengalaman; Reseptif terhadap apa yang baru dan berbeda dalam pikiran, tindakan, dan produk dirinya sendiri dan orang lain.
   c. Ingin tahu, spekulatif, dan berpetualangan, keinginan untuk menghadapi risiko baik dalam pikiran maupun tindakan.
   d. Sensitif terhadap karakteristik ide dan sesuatu yang rinci dan estetik; keinginan untuk bertindak dan bereaksi terhadap stimulasi eksternal, ide-ide dan perasaannya sendiri.
   e. Sikap berani mengambil langkah atau keputusan menurut orang awam berisiko tinggi.

Selain daripada itu perlu dipahami bahwa di balik karakteristik AB, ada perilaku positif dan negatif yang muncul, sebagaimana yang dinyatakan oleh Little (2003), pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik AB dan Konsekuensi Perilakunya

Karakteristik	Perilaku Positif	Perilaku Negatif
Belajar dengan cepat dan mudah	Mengingat dan menguasai fakta-fakta dasar secara cepat	Mudah bosan, suka menggganggu anak lain
Membaca secara intensif	Membaca banyak buku dan menggunakan perpustakaan sendiri	Menolak tanggung jawab orang lain
Perbendaharaan kata sangat maju	Mengkomunikasikan ide-idenya baik sekali	Menimbulkan kemarahan
Tetap menjaga banyak informasi	Siap mengingat dan merespons	Memonopoli diskusi
Rentang perhatiannya sangat lama	Komitmen tinggi terhadap tugas atau proyek	Bertahan dengan kegiatan rutin kelas, tidak suka diganggu
Memiliki keingintahuan yang tinggi, punya banyak minat	Suka bertanya, dan puas dengan ide-ideanya	Terus gampang marah
Bekerja mandiri	Menciptakan dan menemukan di luar tugas yang diberikan	Menolak kerja dengan orang lain
Cermat dan jeli dalam mengamati sesuatu	Mengenal masalah	Mengoreksi orang dewasa secara kurang sopan
Memiliki rasa humor	Mampu mentertawakan dirinya sendiri	Membuat joke yang kejam atau trick terhadap orang lain
Memahami dan mengenal hubungan	Mampu memecahkan problem-problem sosial	Melakukan intervensi orang lain
Prestasi akademik tinggi	Mengerjakan tugas sekolah dengan baik	Sombong, tidak sabar terhadap lain.
Lancar dlm ekspresi verbal	Kuat di bidang verbal dan angka-angka; mengarahkan teman sebaya dengan cara-cara positif	Mengarahkan teman sebaya dengan cara-cara negatif
Individualistik	Memiliki teman sedikit; memiliki rasa keunikan sendiri	Bertahan terhadap apa yang diyakini
Memiliki dorongan diri yang kuat	Menghendaki arah dan bantuan guru yang minimal	Agresif dan menantang orang lain.

Berdasarkan karakteristik ABA, perilaku positif, dan negatifnya, maka selanjutnya dapat dikemukakan bahwa memiliki kebutuhan sebagai berikut:

1. keberbakatan intelektual cenderung membutuhkan, di antaranya:
   - Memperoleh informasi baru dan menantang ;
   - Mengejar pemenuhan minat yang bersifat spesifik ;
   - Memiliki kesempatan untuk mengkomunikasikan pengetahuannya ;
   - Mendapatkan perlakuan dengan kecepatan yang sesuai ;
   - Membutuhkan kegiatan yang menuntut kemampuan berpikir induktif dan pemecahan masalah ;
   - Menerapkan pengetahuan untuk masalah-masalah yang realistik.
   - Belajar menghargai perbedaan individu;
   - Menetapkan tujuan yang realistis untuk dirinya sendiri dan orang lain; dan
   - Berkenaan dengan isu-isu moral dan etik.
2. Keberbakatan akademik cenderung menghendaki kesempatan untuk:
   - Memperoleh kompetensi dasar, perbendaharaan kata teknis, dan pengetahuan lanjut dalam bidang akademik yang menjadi keunggulannya;
   - Berinterakasi dengan pemimpin di bidangnya;
   - Menerapkan pengetahuannya untuk pemecahan masalah-masalah mutakhir;
   - Mengkomunikasikan pengetahuannya; dan
   - Mengembangkan kemampuannya dalam bidang akademik dan sosial lainnya.
   - Berkeinginan menemukan hal baru atau ilmu baru yang tidak pernah ditambah untuk ukuran orang pada umumnya.

Tabel 2. Spatial dan Sequences Learners

Pembelajar Spasial	Pembelajar Sekuensial
• Pembelajar *step-by-step* • Belajar dengan *trial and error* • Pemikir analitik • Belajar secara berurutan dari bahan yang mudah ke sulit • Dapat menunjukkan kerja secara mudah. • Memiliki kemampuan baik di bidang komputasi • Memiliki kemampuan baik dalam *decoding* kata-kata. • Memiliki kemampuan baik di bidang Biologi dan Bahasa Asing • Belajar dari model yang ada terlebih dahulu. • Mungkin memerlukan repetisi untuk menguatkan belajar.	• Pembelajar keseluruhan-bagian • Belajar konsep seluruhnya dalam sekali waktu • Pemikir sistem – melihat hubungan yang kompleks • Belajar sistem yang kompleks secara mudah; berjuang untuk pekerjaan yang mudah • Sampai pada jawaban yang benar tanpa mengikuti langkah-langkah tertentu. • Memiliki kemampuan baik bidang penalaran matematika. • Lebih baik pada pemahaman membaca daripada decoding. • Memiliki kemampuan baik untuk bidang Geometri dan Fisika

• Sangat terorganisasikan belajarnya. • Mengikuti dengan baik petunjuk oral. • Belajar *phonics* dengan mudah • Baik dalam *spelling* • Baik untuk kegiatan mengingat atau hafalan. • Baik untuk tes yang dilaksanakan tiba-tiba. • Baik untuk tulis menulis • Bakat di bidang akademik	• Lebih suka mengembangkan metodenya sendiri untuk pemecahan masalah. • Belajar biasanya bersifat permanen; berhenti apabila terjadi pengulangan. • Mungkin tak terorganisasikan belajarnya. • Mungkin tak menaruh perhatian di kelas • Mungkin lemah untuk *phonics* • Mungkin lemah untuk *spelling*. • Mungkin lemah dalam mengingat; lebih suka terhadap hal-hal yang abstrak. • Mungkin lemah untuk tes yang dilaksanakan tiba-tiba. • Mungkin lemah dalam tulis menulis • Berbakat secara kreatif, teknologis, atau emosional

Identifikasi Anak Berbakat Akademik

Prosedur yang digunakan dalam proses identifikasi bersifat nondiskriminatif dikaitkan dengan ras, latar belakang ekonomik, suku, dan kondisi kecacatan. Dalam rangka identifikasi ABA, ada dua langkah penting, yaitu penjaringan (*screening*) dan *assessmen*.

1. Penjaringan (Screening)

a Nominasi guru

Observasi guru memungkinkan evaluasi perkembangan sepanjang waktu. Guru dapat mempertimbangkan cara siswa memecahkan masalah, seperti juga mempertimbangkan jawabannya. Guru-guru dapat juga melihat bagaimana siswa menggunakan waktunya, dan bagaimana beberapa indikator keberbakatan yang telah dikutip untuk diterapkannya. Juga, meminta siswa menjawab siapa yang paling pintar dan paling membantu di antara mereka dapat membantu guru dalam melakukan identifkasi.

b. Nominasi orangtua

Orangtua dapat memungkinkan pemberian rekomendasi berdasarkan pengamatannya yang lama terhadap bakat yang dimiliki anak. Berkaitan dengan itu, orangtua dapat memperhatikan tingkat penguasaan anak dalam tugas intelektual dan minat dan keingintahuan yang bervariasi. Pada kenyataannya, menyuruh orangtua untuk mempertimbangkan bakat anak adalah suatu cara yang baik untuk melibatkan orangtua dalam memberikan informasi yang sangat berharga bagi pemahaman anak yang lebih komprehensif.

c. Nominasi teman sebaya *(peer nomination)*
   Penunjukan teman sebaya dapat memberikan informasi tentang keunggulan anak berbakat dalam sekolah, baik berkenaan dengan keunggulan bidang akademik maupun bidang non-akademik, terutama kemampuan anak memecahkan masalah, kemampuan kepemimpinan, dan sikap kejujuran anak.
d. Prestasi akademik anak
   Posisi anak pada saat diidentifikasi memiliki nilai informasi yang sangat penting, terutama berkenaan dengan kedudukan prestasi terakhir siswa, di samping sejarah prestasi akademiknya, maupun non akademiknya yang sangat terkait dengan keunggulan anak dalam kinerjanya.
e. Portofolio
   Kemajuan sepanjang waktu, yang disertai dengan prestasi keseluruhannya, dapat dinilai oleh pemantau bahan-bahan yang tersimpan dalam portofolionya. Ini memungkinkan evaluasi dalam berbagai bidang, seperti belajar yang memiliki gaya tertentu dan penggunaan pengetahuan. Selain itu bahwa portofolio memungkinkan kegiatan asessmen kreativitas siswa melalui unjuk kinerja dalam berbagai even yang telah terdokumentasikan. Untuk membantu dalam membakukan evaluasi portofolio, sekolah dapat mengembangkan suatu daftar kriteria untuk dipertimbangkan, seperti: kompleksitas penyajian.
f. Produk kerja atau Kinerja yang bagus sekali
   Selama dalam sejarah kehidupan anak, perlu terus ditelusuri produk-produk karya siswa berbakat, baik yang dihasilkan secara voluntir maupun hasil lomba, yang dibuktikan dengan piala atau piagam penghargaan. Karya-karya mereka dapat didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat dijadikan bukti sebagai karya-karya yang berprestasi untuk melengkapi bukti-bukti lainnya.
g. Observasi
   Pengamatan terhadap perilaku anak berbakat, baik dalam kelas, maupun di luar kelas, terutama berkenaan dengan perilaku-perilaku yang menunjukkan kinerja baik sebagai pribadi maupun anggota kelompok, keluarga, atau masyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan konselor atau wali kelas yang memang bertanggung jawab dalam mendampingi kehidupan anak di sekolah
h. Mereview catatan siswa
   Siswa biasanya memiliki catatan pribadi. Melalui cara ini, dapat dilihat bagaimana catatan pribadi siswa tentang kegiatan di luar sekolah, misalnya, keanggotaan dalam suatu drama club, peran dalam kegiatan keluarga, dan serta peran di masyarakat. Yang juga sangat penting adalah bagaimana dengan konsistensi prestasi di sekolah.

i. Tes kelompok *(Group Test)*.
Tes kelompok dilakukan untuk menambah informasi tentang anak, baik berkenaan dengan informasi inteligensi maupun bakat skolastik dan prestasi belajarnya. Untuk itu perlu dilakukan tes inteligensi, tes bakat skolastik, maupun tes prestasi belajar.

2. Assesment

Berdasarkan hasil *screening,* maka selanjutnya dilakukan assessmen baik terkait dengan kemampuan kecerdasan umum, bakat skolastik dan bakat lainnya, maupun tingkat kreativitas dan komitmen akan tugas. Untuk melakukan assessmen tersebut, digunakan tes dan instrumen terstandar, di antaranya digunakan tes inteligensi, tes bakat skolastik, tes bakat, tes kreativitas, dan inventory komitmen akan tugas. Sebagian besar tes tersebut lebih bersifat individual.

Penutup

Demikian beberapa poin penting dalam mengenal anak berbakat akademik (ABA) yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang memerlukan perhatian dan kepedulian semua pihak, terutama para pendidik, para ahli, para orangtua, bahkan yang bersangkutan sendiri, sehingga ABA dapat mengembangkan diri secara optimal. Untuk mengenal secara umum profil ABA tidaklah terlalu sulit bagi siapapun, namun secara khusus dan profesional, hanya orang-orang tertentu lah yang diharapkan mampu mengidentifikasi ABA secara cermat, sehingga pembinaan lebih lanjut dapat dilakukan secara optimal.

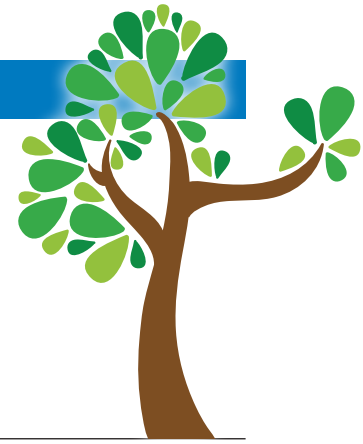

Anak Berbakat Berprestasi Kurang (*The Underachieving Gifted*) dan Strategi Penanganannya

Pengantar

Pada hakekatnya anak berbakat berprestasi kurang (AB2K) adalah suatu istilah yang ambigius, karena di satu sisi dia adalah individu yang memiliki potensi tinggi. Namun di sisi lain dia menunjukkan prestasi yang rendah. Anak berbakat berprestasi kurang (AB2K) dapat diidentifikasi pada semua level akademik, walau mereka sering kali baru teridentifikasi pada Sekolah Menengah. Berdasarkan informasi dari guru, anak berbakat berprestasi kurang (AB2K) sering menampakkan dirinya sebagai yang malas, tidak tertarik dalam belajar, bosan, dan *rebellious*, dan suka merasa jemu *(irksome)*.

Sebagaian besar guru sering kali mengatakan bahwa mereka pada hakekatnya masih bisa berbuat lebih baik daripada apa yang dilakukan pada saat itu. Dengan kata lain bahwa sebagian besar anak berbakat akademik cenderung menunjukkan gejala berprestasi kurang, karena mereka jarang sekali mendapatkan tantangan yang lebih berarti untuk memenuhi potensi yang dimiliki.

Menyadari akan kondisi tersebut, mungkin tidak ada situasi yang lebih mampu membuat frustasi bagi orangtua atau guru daripada hidup atau bekerja bersama dengan anak-anak yang tidak dapat tampil secara akademik sama baiknya dengan potensi yang dimilikinya. Anak-anak yang menunjukkan gejala-gejala yang demikian sering diberi sebutan sebagai anak berprestasi kurang. Pada titik mana gejala berprestasi kurang berakhir dan mulai muncul? Bagaimana dengan anak berbakat yang gagal di bidang matematika sementara dia mampu berprestasi sangat tinggi di bidang bahasa? Apakah anak berbakat berprestasi kurang terjadi secara tiba-tiba, atau gejala berprestasi kurang lebih baik didefinisikan sebagai seperangkat penampilan yang lemah untuk waktu yang lama? Tentu fenomena berprestasi kurang adalah sebagai sesuatu yang kompleks dan *multifaced*.

Menyadari akan kompleksnya persoalan berprestasi kurang pada anak berbakat, maka selanjutnya dikaji berbagai aspek secara lebih detail, demikian pula berbagai upaya yang dilakukan untuk penanganannya.

Definisi Anak Berbakat Berprestasi Kurang

Dalam pengertian yang lebih luas, individu yang berprestasi kurang *(under-achiever)* adalah individu yang tak bermotivasi. Mereka secara konsisten tidak menunjukkan usaha, bahkan mereka cenderung bekerja jauh di bawah potensinya. Dengan demikian, masalahnya bukanlah terletak pada kemampuan, melainkan terletak pada sikapnya. Mereka cenderung menghabiskan kesempatannya, sehingga melupakan masa depannya. Mereka biasanya menolak, melalui tindakannya, bahwa apa yang mereka lakukan sekarang memiliki dampak bagi masa depannya. Mereka tidak dapat melihat atau mengizinkan atau menerima bahwa ketidakmampuannya menyelesaikan tugas dan mengabaikan tanggung-jawabnya akan dapat menimbulkan kegagalan di masa depannya.

Pada dasarnya anak berbakat berprestasi kurang memiliki kemampuan intelektual untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Namun pada kenyataannya, mereka tidak memiliki kemampuan menuntaskan pekerjaan, tidak berfungsi secara mandiri, dan tidak berproduksi dalam waktu yang telah ditetapkan.

Untuk memahami secara komprehensif tentang anak berprestasi kurang, maka berikut ini akan dikemukakan sejumlah definisi sebagai berikut:

RUMUSAN DEFINISI ANAK BERPRESTASI KURANG MENURUT BEBERAPA AHLI*	
Penulis	**Definisi**
Bricklin & Bricklin (1967)	Siswa yang penampilannya di sekolah lebih lemah daripada yang diharapkan berdasarkan tingkat inteligensinya.
Fine (1967)	Siswa yang rentangan kemampuan intelektualnya berada pada rentangan sepertiga bagian atas dari kemampuan intelektual, tapi penampilannya secara dramatik berada di bawah tingkatannya.
Finney & Van Dalel (1966)	Siswa yang skor DAT *(Differential Aptitude Tests)* berada pada 25% bagian atas bidang verbal dan numerikal dan Indeks Prestasi Komulatif (IPK)-nya berada di bawah rata-rata dari semua siswa yang menjadi peserta DAT.
Gowan (1957)	Siswa yang berpenampilan 1 simpangan baku atau lebih bawahnya dari tingkat kemampuannya.
Newman (1974)	Siswa yang berprestasi secara signifikan berada di bawah tingkat yang diprediksikan oleh IQ-nya, yang ditunjukkan dengan IPK C atau di bawah potensinya secara signifikan)

Pringle (1970)	Siswa yang ber-IQ 120 atau di atasnya yang memiliki kesulitan pendidikan dan perilaku.
Shaw & McCuen (1980)	Siswa yang potensinya berada pada bagian dari 25% di atas berdasarkan Tes Kemampuan Umum (IQ di atas 110) yang memperoleh IPK di bawah rata-rata.
Thorndike (1963)	Siswa yang berprestasi kurang diukur dalam kaitannya dengan beberapa standar prestasi yang diharapkan atau diprediksikan.
Whitmore (1980)	Siswa yang mendemonstrasikan kemampuannya yang unggul untuk prestasi akademik, tetapi tidak dapat tampil secara memuaskan berdasarkan hasil tugas akademik dan tes prestasinya untuk keseharian-nya.
Zive (1977)	Siswa dengan IQ tinggi yang mempunyai prestasi rendah di sekolahnya.

Para peneliti (Raph, Goldberg, and Passow, 1966) dan beberapa penulis mutakhir (Davis and Rimm, 1989) telah mendefinisikan berprestasi kurang *(underachievement)* berkenaan dengan suatu kesenjangan antara suatu performansi sekolah dan beberapa kemampuan yang sering diindikasikan dengan suatu indeks IQ. Definisi ini, walau nampak jelas dan singkat, memberikan sedikit wawasan bagi orangtua dan guru yang bermaksud untuk menyelesaikan masalah ini dengan siswa secara individual. Cara yang lebih baik untuk mendefinisikan berprestasi kurang *(underachievement)* adalah mempertimbangkan berbagai komponen.

Pertama dan awal kalinya, bahwa berprestasi kurang *(underachievement)* adalah suatu perilaku yang dapat berubah sepanjang waktu. Sering kali berprestasi kurang *(underachievement)* dilihat sebagai suatu masalah sikap atau kebiasaan bekerja. Namun, perlu diketahui bahwa kebiasaan atau sikap dapat dimodifikasi secara langsung oleh perilaku.

Kedua, berprestasi kurang *(underachievement)* adalah sesuatu yang berkenaan dengan isi dan situasi yang spesifik. Anak-anak berbakat yang tidak berhasil di sekolah sering kali sukses dalam berbagai kegiatan di luar, seperti: olahraga, kegiatan sosial, dan bekerja setelah selesai sekolah. Bahkan seorang anak yang tampil secara kurang memuaskan untuk hampir pada semua mata pelajaran, mungkin menampilkan suatu bakat atau minat, paling tidak satu mata pelajaran. Dengan demikian, memberi nama seorang anak sebagai berprestasi kurang *(underachievement)* dapat juga mengurangi penghargaan terhadap setiap dampak positif atau perilaku yang ditampilkannya. Adalah lebih baik untuk memberikan *label* terhadap perilaku daripada anak (misalnya, anak itu lemah di matematika dan bahasa cenderung lebih baik daripada menyebut anak sebagai berprestasi kurang *(underachievement)*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat didefinisikan bahwa Anak Berbakat Berprestasi Kurang (AB2K) adalah anak berbakat yang menampilkan prestasi akademiknya lebih rendah secara berarti daripada potensi akademiknya, sehingga membtuhkan untuk bantuan dan fasilitasi yang sesuai untuk bisa mengoptimalkan perkembangan potensinya.

Karakteristik Anak Berbakat Berprestasi Kurang

Menyadari akan kompleksitas keberadaan Anak Berbakat Berprestasi Kurang, maka setidak-tidaknya karakteristik anak berbakat akademik di antaranya sebagai berikut:

1. Memiliki IQ yang sangat tinggi.
2. Memiliki kebiasaan kerja yang jelek.
3. Ketidakmampuan berkonsentrasi.
4. Kurang usaha dalam menjalankan tugas.
5. Minat yang kuat terhadap suatu bidang tertentu, sehingga melupakan akademiknya.
6. Pekerjaaannya sering tidak selesai.
7. Harga dirinya rendah.
8. Menampilkan frustasi emosional.
9. Bersikap negatif terhadap diri sendiri dan orang lain.
10. Tiadanya perhatian terhadap tugas yang sedang dihadapi.

Ada kecenderungan dua pola perilaku dasar, yaitu agresif dan menarik diri. Gambaran pola perilaku agresif, mencakup:

1) Penolakan yang terus menerus yang ditunjukkan dengan *complain*.
2) Mencari perhatian.
3) Mengganggu orang lain.
4) Penolakan yang terus menerus terhadap tugas yang ditetapkan.
5) Ketiadaan arahan diri dalam pembuatan keputusan.
6) Pemisahan yang terus menerus dari teman sebaya.

Gambaran pola perilaku menarik diri, mencakup:

1) Kurangnya komunikasi
2) Dikuasai oleh dunia fantasi
3) Bekerja sendiri
4) Sebentar dalam kelas ketika dalam penyelesaian pekerjaan.
5) Sedikit upaya dibuat untuk menjustifai perilaku.

Karakteristik dan pola-pola perilaku AB2K memang sering mewarnai perilakunya. Perilaku-perilaku tersebut seringkali menjadi indikator penting bagi orang lain untuk memberikan label, tanpa mempedulikan potensi apa yang ada di baliknya. Dengan demikian sangatlah wajar bahwa banyak terjadi AB2K yang tidak hanya merugikan anak-anaknya sendiri, melainkan juga merugikan keluarga dan masyarakat.

Penyebab Anak Berbakat Berprestasi Kurang

Whitmore (1980) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor sekolah yang menyebabkan gejala berprestasi kurang, di antaranya sbb:

1. Kurangnya respek yang tulus dari guru
2. Suatu iklim sosial yang kompetitif.
3. Tidak adanya fleksibilitas dan adanya kekakuan.
4. Penekanannya pada evaluasi eksternal.
5. Adanya sindrom kegagalan dan kondisi kritis yang mendominasi kecuali bagi orang-orang yang berprestasi.
6. Kontrol orang dewasa/guru secara konstan di kelas.
7. Kurikulum belajar yang tak apresiatif

Ford and Thomas (1997) berdasarkan studinya mengemukakan secara lebih komprehensif bahwa faktor-faktor yang menyebabkan berprestasi kurang, mencakup faktor sosio-psikologis, faktor yang terkait dengan keluarga, dan faktor yang terkait dengan sekolah.

1 Faktor Sosiopsikologis

Self-esteem yang rendah, kinerja akademik yang jelek, dan *self-concept* sosial berkontribusi secara signifikan terhadap prestasi siswa yang rendah. Ford, Harris, and Schuerger (1993) menyatakan bahwa identitas rasial harus juga dieksplorasi pada siswa berbakat minoritas. Bagaimana mereka merasakan akan nenek moyangnya dari sisi kesukuannya. Siswa berbakat minoritas yang tidak memiliki identitas rasial positif memungkinkan dapat menimbulkan tekanan yang negatif dari kelompok sebayanya.

Di samping faktor-faktor tersebut, perfekesinisme, kondisi emosional, tekanan untuk bertindak konformis, rasa tak berdaya, kurangnya kemandirian, perlawanan yang serius terhadap kekuasaan sekolah,

2. Faktor yang Terkait dengan Keluarga

Beberapa studi telah mengeksplorasi pengaruh variabel keluarga terhadap prestasi siswa berbakat minoritas. Selain itu Clark (1983) melalui studinya terhadap siswa berkulit hitam yang berstatus sosial ekonomi rendah yang anak mengalami gejala berprestasi kurang menunjukkan bahwa orangtuanya cenderung:

- Kurang optimistik dan perasaan yang terekspresikan tentang ketidakberdayaan dan tak berpengharapan.
- Kurang assertif dan terlibat dalam pendidikan anak-anaknya.
- Menetapkan harapan yang tak realistik bagi anak-anaknya.
- Kurang percaya diri berkenaan dengan keterampilan pengasuhan.

3. Faktor yang terkait dengan sekolah

Sejumlah faktor di sekolah yang berpengaruh terhadap prestasi siswa berbakat berprestasi kurang, di antaranya:

- Hubungan antara guru-siswa kurang positif,
- Memiliki waktu yang sedikit untuk memahami bahan.
- Iklim sekolah yang kurang *supportif*.
- Tidak termotivasi dan tak berminat untuk aktif di sekolah.
- Kurangnya perhatian terhadap pendidikan multikultural di kelas.
- Guru cenderung menunjukkan harapan yang lebih rendah terhadap siswa minoritas dan berpenghasilan rendah.
- Sekolah tidak memberikan program yang sesuai dengan kebutuhan anak berprestasi kurang.

Jika diperhatikan realitas yang ada di lapangan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi munculnya AB2K, yaitu **faktor fisikal**. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka kelengkapan organ tubuh dan tingkat kesempurnaan fisik, serta kualitas kondisi kesehatan Anak Berbakat Akademik mempengaruhi kinerja akademik

Penanganan Anak Berbakat Berprestasi Kurang

1. Intervensi AB2K

Reis, Sally M. & McCoach, D. Betsy (2000) menyatakan bahwa penanganan AB2K pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua intervensi yaitu intervensi konseling dan edukatif.

Intervensi konseling berkonsentrasi untuk mengubah dinamika personal dan keluarga yang membantu AB2K. Intervensi konseling dapat meliputi konseling individual, kelompok dan keluarga. Beberapa upaya dini untuk memperbaiki prestasi akademik AB2K melalui perlakuan konseling tidak menunjukkan keberhasilan (Baymur & Patterson, 1965; Broedel, Ohlsen, Profit, & Southard, 1965). Hal ini dapat dipahami, karena dalam sebagian situasi konseling, tujuan konselor tidaklah memaksa AB2K menjadi seorang AB2K yang sukses, tetapi lebih diorientasikan untuk membantu mereka membuat keputusan apakah sukses merupakan suatu tujuan yang dikehendaki, jika ya maka perlu membantu perubahan kebiasaan dan kognisinya. Weiner (1992) menetapkan bahwa ada empat intervensi yang berbeda terhadap empat kelompok AB2K yang berbeda; yaitu (1) menguatkan sistem *reward* yang kurang, (2) menghilangkan *handicap* kognitif dan emosional, (3) mengatasi kesenjangan pendidikan, dan (4) memodifikasi kecenderungan pasif dan agresif. Konselor dan terapis dapat membantu AB2K menguatkan sistem *reward* yang kurang, memodifikasi kecenderungan perilaku pasif dan agresif, dan menghilangkan gangguan emosional; pendidik dapat membantu AB2K mengatasi kesenjangan pendidikan dan menghilangkan atau mengkompensasi gangguan kognitif.

AB2K yang tak termotivasi mungkin melihat tidak ada alasan untuk menjadi siswa yang lebih baik. Ketika bekerja dengan AB2K bertipe ini, seorang konselor seharusnya menemukan cara-cara untuk mengimplementasikan sistem *reward* yang akan mendorong usaha skolastik siswa dan mengukuhkan kesuksesan akademik. Orangtua dari AB2K bertipe ini mungkin memperoleh manfaat dari strategi terapetik yang mendorongnya untuk berbicara secara positif tentang pendidikan, menunjukkan suatu minat terhadap kegiatan belajar anaknya, dan mengharagai pencapaian anaknya.

Walaupun AB2K bertipe pasif-agresif lebih memungkinkan mengindikasikan gangguan psikologis, tipe ini nampak cukup responsif terhadap psikoterapi (Weiner, 1992). Konseling terhadap tipe ini sangat efektif ketika siswa mencari layanan konseling atau setidak-tidaknya berpartisipasi di dalam proses konseling. Karena perilaku pasif-agresif anak-anak ini selalu muncul yang diwujudkan dengan melawan keluarga, maka intervensi konseling keluarga mungkin dapat membantu mengatasi AB2K tipe ini. Satu strategi konseling terhadap AB2K yang pasif-agresif, melibatkan bantuan orang dewasa untuk mengenal kemampuan dan minatnya, mengklarifikasi sistem nilai personalnya dan tujuan yang dikehendaki, serta melakukan penelusuran studi untuk melayani tujuannya sendiri daripada memenuhi kebutuhan orang lain. Walaupun telah terbukti banyak keberhasilan untuk intervensi konseling dalam penangan

AB2K, tetapi masih diakui bahwa ada sejumlah keterbatasan, karena semua layanan konseling dapat berhasil secara memuaskan.

Interversi edukatif bagi AB2K yang sangat terkenal dapat diwujudkan dengan sistem kelas khusus yang *part time* dan *full time* bagi AB2K (e.g., Butler-Por, 1987; Fehrenbach, 1993; Supplee, 1990; Whitmore, 1980). Dalam kelas-kelas ini, guru-guru berjuang untuk menciptakan suatu lingkungan yang nyaman untuk pencapaian prestasi siswa dengan mengubah organisasi kelas tradisional. Biasanya, rasio siswa:guru yang lebih kecil, guru dapat menciptakan tipe-tipe aktivitas mengajar dan belajar yang kurang konvensional, guru-guru memberikan kepada siswa beberapa pilihan dan kebebasan di dalam melatih pengendaliannya terhadap iklimnya, serta siswa didorong untuk menggunakan strategi belajar yang berbeda.

Studi Emerick mengindikasikan bahwa suatu tipe intervensi yang efektif adalah didasarkan pada kekuatan dan minat siswa (Renzulli, 1977; Renzulli & Reis, 1985, 1997). Dalam studinya yang mutakhir, peneliti menggunakan self-selected Type III dari Proyek Pengayaan sebagai suatu intervensi sistematik untuk siswa AB2K. Pendekatan secara spesifik mentargetkan kekuaran dan minat siswa sehingga membantu mengatasi gejala berprestasi kurang bidang akademik. (Baum, Renzulli, & Hebert, 1995b). Dalam suatu studi kualitatif teknik intervensi ini, lima gambaran utama dari proses pengayaan Tipe III yang berkontribusi terjadap keberhasilan intervensi. Faktor-faktor ini di antaranya sebagai berikut: hubungan dengan guru, penggunaan strategi self-regulation, kesempatan untuk meneliti topik-topik yang terkait dengan AB2K, kesempatan untuk bekerja berdasarkan bidang yang diminiati dalam suatu gaya belajar yang disukai, dan adanya waktu berinteraksi dengan kelompok sebaya.

2. Strategi dalam Mengatasi AB2K

a. Strategi Sekolah

Whitmore (1980) menjelaskan ada tiga tipe strategi yang dipandang efektif untuk mengatasi AB2K, yaitu di antaranya:

- **Strategi supportif.** Teknik dan desain kelas yang memungkinkan siswa merasa menjadi bagian dari "keluarga", bukan pabrik, yang mencakup metode, yaitu: mengendalikan pertemuan kelas untuk mendiskusikan kepedulian siswa; merancang kegiatan kurikulum berdasarkan kebutuhan dan minat anak; dan memungkinkan siswa untuk menghentikan tugas-tugas tentang berbagai mata pelajaran yang telah mampu mereka tunjukkan kompetensinya.

- **Strategi intrinsik.** Strategi ini mengakomodasi ide bahwa konsep diri siswa sebagai pembelajar sangat terkait dengan keinginannya yang kuat untuk berprestasi secara akademik. Dengan demikian, sebuah kelas yang mengundang sikap positif adalah memungkinkan kita untuk mendorong mereka berprestasi. Dalam kelas tipe ini, guru mendorong untuk berusaha, bukan hanya sekedar sukses; mereka menghargai masukan siswa dalam membuat aturan kelas dan wujud tanggung jawabnya; serta mereka memungkinkan siswa untuk mengevaluasi karyanya sendiri sebelum menerima suatu penilaian dari guru.
- **Strategi remedial.** Guru yang efektif dalam mengatasi perilaku *underachiever* mengenal bahwa siswa adalah tidak sempurna – bahwa setiap anak memiliki kekuatan dan kelemahan baik berkanaan dengan kebutuhan sosial, emosional, maupun intelektual. Dengan strategi remedial, siswa diberi kesempatan untuk mempercepat dalam bidang-bidang yang menjadi kekuatannya dan minatnya, sementara itu kesempatan diberikan untuk bidang-bidang spesifik yang dirasakan ada kesulitan belajar. Remediasi ini dilakukan dalam suatu lingkungan yang aman, suatu lingkungan yang kesalahan-kesalahan terjadi dianggap menjadi bagian dari belajar setiap orang, termasuk guru.

Selain daripada itu, Ford dan Thomas (1997) juga memberikan kontribusi bagi penanganan anak berbakat berprestasi kurang, di antaranya:

1. Penyesuaian kurikulum untuk promosi kesuksesan dan prestasi.
2. Pengajaran remedial untuk memperbaiki keterampilan akademik,
3. Memperbaiki keterampilan meniru dokumen.
4. Memperbaiki keterampilan studi,
5. Memperbaiki *self-management.*
6. Meningkatkan self esteem.

b. Strategi Keluarga

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mencegah dan mengatasi anak *underachiever*, yaitu:

- **Strategi supportif.** Anak berbakat hidup dalam iklim saling menghargai, tidak berkuasa, fleksibel, dan bertanya. Mereka memerlukan aturan dan pedoman yang *reasonable*, dukungan dan dorongan yang kuat, umpan balik positif yang konsisten, dan bantuan untuk menerima beberapa keterbatasan, baik berkenaan dengan mereka sendiri atau orang lain (Rimm, 1986).

- **Strategi instrinsik.** Apakah anak-anak berbakat menggunakan kemampuannya yang luar biasa dengan cara-cara yang konstruktif sebagian tergantung pada kepercayaan diri dan konsep dirinya. Menurut Halsted (1988), "anak berbakat intelektual tidak akan bahagia dan merasa sempurna sampai dia menggunakan kemampuannya sampai pada tingkat yang optimal. Karena itu orangtua dan guru melihat dan memahami perkembangan intelektual, sehingga dapat memberikan bantuan yang sesuai. Memberikan suatu lingkungan pendidikan dini dan sesuai dapat menstimulasi suatu rasa cinta sejak dini terhadap belajar. Sebaliknya anak muda yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dengan mudahnya akan menjadi redam, jika lingkungan pendidikan tidak menstimulasi; penempatan kelas dan pendekatan mengajar yang tidak tepat; anak mengalami guru yang tidak efektif; atau tugas yang secara konsisten terlalu sulit atau mudah.
- ***Praise versus encouragement.*** Penekanan yang berlebihan terhadap prestasi atau hasil belajar daripada usaha, keterlibatan, dan dorongan untuk belajar tentang topik yang menjadi minatnya adalah merupakan suatu perangkap orangtua secara umum. Garis antara tekanan (pressure) dan dorongan *(encouragement)* adalah halus, tetapi penting. Tekanan untuk tampil yang menekankan hasil seperti memenangkan piala dan mendapatkan A. Untuk anak yang berhasil memenuhi kemauan orangtua seperti itu anak mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi. Dorongan *(encouragement)* menekankan pada usaha, proses yang digunakan untuk mencapai, langkah yang diambil untuk mencapai tujuan, dan perbaikan. Langkah ini meninggalkan penilaian kepada anak. AB2K diduga merupakan individu yang *discouraged* yang memerlukan dorongan, tetapi cenderung menolak penghargaan yang artifisial atau tidak tulus. (Kaufmann, 1987).
- **Strategi remedial.** Dinkmeyer and Losoncy (1980) memperhatikan orangtua menolak *discouraging* anak-anaknya dengan dominasi, inensitivikasi, mendiamkan, atau intimidasi. Komentar yang *discouraging*, misalnya: Jika kamu anak yang berbakat, mengapa kamu dapat D untuk bidang studi...?" atau "Saya telah memberikan kamu sesuatu, mengapa kamu demikian...? tidak akan pernah efektif. Kompetisi yang berlangsung secara konstan mungkin mengarahkan ke *underachievement*, terutama ketika seorang merasa apakah seperti seorang pemenang atau yang kalah. Kursus tentang keterampilan belajar, kursus tentang pengelolaan waktu, atau tutorial khusus mungkin tidak akan efektif jika siswa itu yang sudah lama mengalami gejala berprestasi kurang. Sebaliknya tutorial khusus mungkin sangat membantu bagi AB2K yang mengalami kesulitan akademik dalam waktu pendek. Umumnya, tutorial khusus bagi seorang AB2K sangat membantu ketika

seorang orang tutor dipilih secara berhati-hati untuk menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kursus keterampilan belajar yang bersifat luas atau tutor-tutor yang tidak memahami AB2K cenderung lebih bersifat kurang baik daripada baiknya.

c. Strtaegi Kolaboratif

Pada kenyataannya bahwa terjadinya AB2K tidak bisa dilepaskan dari faktor keluarga dan sekolah secara terkait, sehingga upaya menanganinya perlu adanya kolaborasi antara keduanya. Rimm (Colangalo and Davis, 1995) menemukan bahwa penanganan sindrom *Underachiever* yang melibatkan kolaborasi antara sekolah dan keluarga dalam implementasi melalui enam langkah, yaitu:

1. Assessmen
2. Komunikasi
3. Mengubah Harapan
4. Identifikasi Model Peran
5. Koreksi kekurangan
6. Modifikasi pengukuhan.

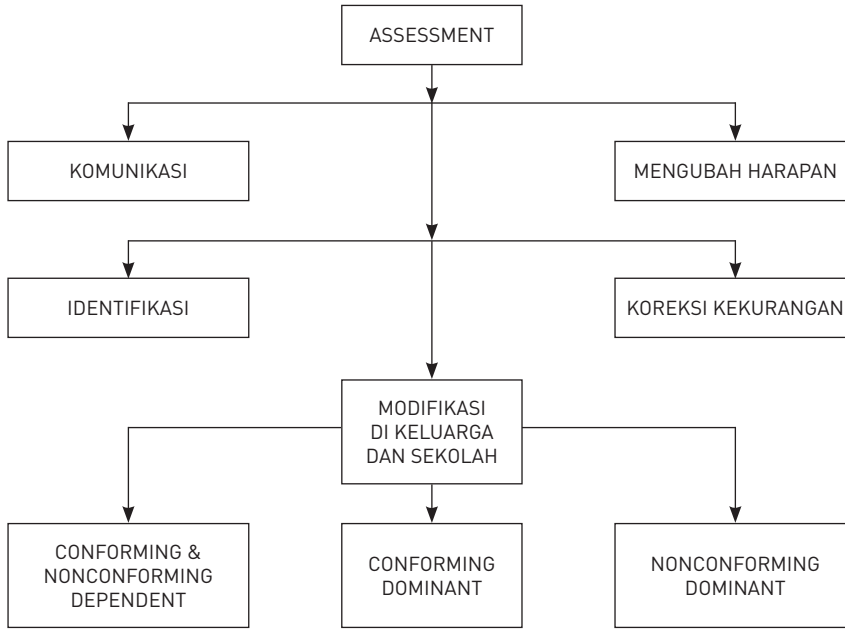

Model Trifocal Untuk Penanganan Sindrom *Underachiever*

Kesimpulan

Pada kenyataannya, beberapa Anak Berbakat Akademik (ABA) yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, mampu menunjukkan prestasi yang tinggi secara optimal ketika belajar berada dalam lingkungan akademik yang terstruktur, tetapi ada cukup banyak di antara mereka yang berisiko berprestasi kurang, jika mereka tidak dapat membuat prioritas, tidak dapat menfokuskan sejumlah kegiatan yang terpilih, dan tidak mampu membuat rencana jangka panjang.

Di sisi lain, ada sejumlah siswa yang berprestasi kurang, tetapi mereka tidak merasa nyaman atau *discouraged*. Mereka cenderung agak tidak senang ketika di SMP dan SMA (karena organisasi dan struktur pendidikan yang kaku), tetapi mereka cenderung bahagia dan sukses ketika belajar di suatu lingkungan pendidikan yang memiliki suatu organisasi dan struktur yang berbeda. Dalam kondisi yang demikian mereka akan mampu mengatasi persoalannya sendiri. AB2K memang muncul dari berbagai faktor yang kompleks, namun apapun kondisinya kehadiran guru dan orangtua yang berarti dalam menangani AB2K dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.

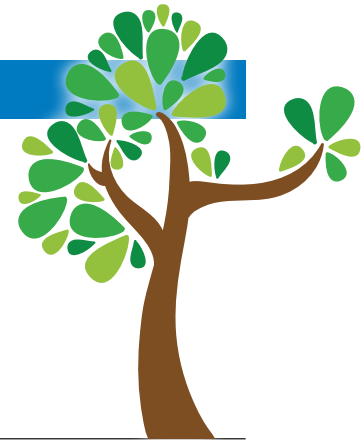

Pengelolaan Pendidikan Anak *'Gifted'*

Pengantar

Pengalaman Reformasi Pendidikan Amerika Serikat sangatlah bermanfaat bagi kebangkitan bangsa Indonesia yang sedang mengalami krisis dewasa ini. Pendidikan Amerika Serikat melakukan pembaharuan yang serius, terutama ketika bangsa Amerika Serikat melihat prestasi yang dicapai bangsa Rusia pada tahun 1957 yang mampu meluncurkan Sputnik, sebuah pesawat angkasa luar. Pembaharuan sistem pendidikan yang dilakukan tentu saja menjangkau pada pendidikan anak *gifted,* sehingga dapat dirasakan hasilnya berupa kemajuan ipteks dan banyaknya para ilmuwan yang handal di tingkat nasional maupun internasional. Yang pada akhirnya temuan-temuan yang dihasilkan para ilmuwan AS dapat menempatkan bangsa AS di bagian terdepan bangsa-bangsa lain, yang ditandai dengan banyaknya nobel yang diterima.

Seiring dengan itu, kiranya tidak berlebihan jika bangsa Indonesia pada awal abad 21 ini harus merasa dikejutkan oleh kemajuan bangsa-bangsa tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura yang berada jauh di atas bangsa Indonesia. Dengan kesadaran akan krisis multidimensional yang dialami dewasa ini, bangsa Indonesia perlu bangkit dengan membangun sistem pendidikan nasional, terutama bagi anak-anak *gifted* yang merupakan aset bangsa yang sangat tinggi nilainya bagi kejayaan bangsa di masa depan.

Bertitik tolak dari itulah pada akhir abad 20 dan berlanjut pada awal abad 21 telah dilakukan suatu rintisan yang relatif lebih serius dan meluas untuk membangun sistem pendidikan bagi anak *gifted,* terutama bagi anak *gifted* bidang akademik. Berbagai upaya yang sungguh-sungguh telah dilakukan oleh semua *stakeholders* guna memperoleh hasil pendidikan yang memuaskan semua pihak. Secara pragmatis, alhamdulillah upaya yang telah dilakukan tidak terlalu mengecewakan, namun secara idealis kiranya perlu dilakukan penataan

yang lebih efektif dan terarah, sehingga diharapkan ada upaya-upaya lain yang lebih konstruktif.

Makna Keberbakatan *(Giftedness)*

Konsep keberbakatan *(giftedness)* terus mempengaruhi pemahaman mutakhir tentang inteligensi, kreativitas, fungsi otak, dan konsep diri. Pemahaman terhadap keberbakatan *(giftedness)* dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang berkembang secara dinamik. Penerimaan definisi keberbakatan *(giftedness)* tergantung sepenuhnya pada apa yang masyarakat kenali sebagai bidang penampilan yang *sangat bernilai.* Mendefinisikan keberbakatan *(giftedness)* secara detail dapat juga menimbulkan masalah penamaan atau penyebutan dan eksklusivitas *(labeling and exclusivity).* Namun di balik itu pendefinisian diyakini mampu memberikan suatu dasar bagi para pendidik untuk dapat merencanakan strategi penanganan yang sesuai.

Pertama-tama, Sir Francis Galton (Davis dan Rimms, 1989) yang pertama-tama memperkenalkan keberbakatan *(giftedness)* dengan sebutan genius. Selanjutnya teori faktor menurut Spearman (Kitano dan Kirby, 1984) menyatakan bahwa anak berbakat lebih ditentukan oleh nilai IQ sebagai representasi dari faktor umum *(general factor).*

Kedua, inteligensi seseorang dipahami lebih komprehensif lagi, di antaranya Thurstone yang menjelaskan bahwa ada tujuh faktor (sebagai kemampuan utama) yang melandasi tes inteligensi. Demikian juga Guilford yang memperkenalkan Model Struktur Intelektual melalui model tiga dimensi unik (operasi, produk, dan isi). Gardner (1983) melalui bukunya *Frames of Mind* mengembangkan *Multiple Intellgience,* yang semula tujuh inteligensi dan terakhir menjadi delapan inteligensi.

Ketiga, inteligensi yang dipandang sebagai bagian dari faktor utama dalam keberbakatan *(giftedness)* menurut Renzulli (1979) yang dikatakan bahwa keberbakatan *(giftedness)* adalah suatu interaksi fungsional antara tiga kluster, yaitu kemampuan umum di atas rata-rata, kreativitas yang tinggi, dan komitmen tugas yang tinggi. Tapi pada akhirnya Renzulli (Sternberg dan Davidson, 1986) mengoreksi kemampuan umum di atas rata-rata, menjadi kemampuan di atas rata-rata yang mengandung makna kemampuan umum dan kemampuan khusus.

Setelah memperhatikan perkembangan definisi tentang keberbakatan *(giftedness),* maka sangat diperlukan rumusan definisi yang mendasar. Adalah disadari bahwa definisi yang dirumuskan secara luas berikut ini diharapkan dapat memberikan sebuah titik awal yang sesuai untuk identifikasi dan pemberian layanan pendidikan, bahwa Anak Gifted adalah anak-anak yang unggul, atau memiliki potensi untuk berprestasi unggul dalam bidang kemampuan

umum atau spesifik, kreativitas, dan komitmen akan tugas yang memerlukan layanan pendidikan khusus untuk berkembang optimal, sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat.

Keyakinan ini adalah inklusif untuk semua bidang kemampuan, non-diskriminasi berdasarkan gender, asal kultural atau latar belakang sosio-ekonomik, dan memberikan kesempatan untuk pencapaian keunggulan. Hal ini mencakup siswa yang terisolasi secara geografis dan yang mengalami kecacatan. Sementara itu keyakinan ini merupakan suatu titik awal yang berguna, ada suatu kebutuhan untuk mengenal siswa *gifted* yang tak teridentifikasi – terutama anak yang berprestasi kurang dan tak-beruntung.

Generalisasi singkat berikut ini dapat dibuat untuk menjelaskan keberbakatan *(giftedness):*

- Keberbakatan *(giftedness)* bersifat *multifacet* dan dapat eksis dalam satu atau beberapa bidang kemampuan.
- Siswa *gifted* menunjukkan kemampuan luar biasa pada fase-fase perkembangannya yang berbeda dan kemampuan ini dapat disertai oleh komitmen akan tugas, dan kreativitas. Perilaku *gifted* tidaklah perlu dimanifestasikan seiring dengan tuntutan kurikulum tradisional, atau mereka mendemonstrasikan melalui cara-cara yang dapat diterima secara sosial.
- Keberbakatan *(giftedness)* adalah bersifat *developmental,* dan keberbakatan *(giftedness)* menjadi nampak pada fase kehidupan yang berbeda.
- Setiap individu memiliki kualitas-kualitas yang spesifik (bersifat unik), sementara karakteristik-karakteristik umum dapat diidentifikasi, DAN tidak ada dua siswa *gifted* yang menunjukkan sifat dan kebutuhan yang identik.
- Siswa *gifted* dapat ditemukan di semua kelompok sosioekonomik, kultural, dan kecacatan.
- Beberapa faktor mempengaruhi pencapaian potensi siswa, di antaranya meliputi: penghargaan dari budaya sendiri, pemerolehan keterampilan yang diperlukan untuk memfasilitasi pencapaian prestasi, pengembangan konsep diri yang positif, dan dukungan keluarga, masyarakat, dan sekolah yang sesuai.

Pentingnya Pendidikan Anak Gifted

Ada beberapa alasan bahwa pendidikan anak *gifted* itu penting. *Pertama,* secara politis bahwa anak *gifted* perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan layanan lainnya sesuai dengan potensinya, sehingga tidaklah dapat dibenarkan jika anak *gifted* mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak yang memiliki kemampuan rata-rata.

Kedua, secara pedagogis bahwa anak *gifted* memerlukan dukungan khusus, karena walaupun anak *gifted* itu memiliki keunggulan ternyata pada praktek hidupnya tidak dengan sendirinya mereka mampu mengembangkan potensi dirinya tanpa dukungan secara khusus, termasuk juga program dan fasilitas yang secara khusus diperlukan untuk pengembangan diri *anak gifted.*

Ketiga, secara psikologis bahwa anak *gifted* akan lebih mendapatkan keuntungan secara berarti dari pendidikan yang sesuai daripada pendidikan dengan program reguler.

Keempat, secara sosiologis bahwa anak gifted bagi negara merupakan suatu sumber yang sangat berharga terutama untuk mengatasi persoalan kemanusiaan dan bangsa.

Kelima, secara legal formal, bahwa anak *gifted* berhak mendapatkan pendidikan yang dijamin oleh UUD 1945 pasal 31 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.. Selanjutnya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Bab IV, pasal 5, ayat (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu: dan ayat (4) warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus; pasal 12:, ayat (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pendidikan Anak *Gifted* di Indonesia dalam Perspektif Historis

Pada tahun 1970-an, tepatnya dimulai tahun 1974, Indonesia telah menaruh perhatian terhadap anak berkemampuan unggul dengan pemberian beasiswa. Sayangnya program ini belum terprogram dengan rapi, sehingga hasilnya pun belum bisa ditunjukkan secara meyakinkan, terlebih-lebih dalam implementasinya belum menunjukkan konsistensinya sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan dengan baik. Selain daripada itu pada periode ini dikembangkan sistem maju berkelanjutan *(continuous progress*) pada Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) di 8 IKIP Negeri yang secara implisit mengakui akan keberadaan anak-anak gifted.

Pada tahun 1980-an, sebagai periode perintisan karena pengembangannya sudah dimulai dengan kajian yang intensif, pemerintah melalui Balitbang Dikbud, Depdikbud telah menyelenggarakan identifikasi anak *gifted* pada semua jenjang, yaitu SD, SMP dan SMA. Program secara kongkrit dimulai sejak tahun 1982, namun berakhir pada tahun 1986, karena alasan finansiil. Ironis sekali, dukungan pemerintah menjadi menghilang secara tiba-tiba.

Pada tahun 1990-an, yang dapat disebut tahap perluasan konsep dan pengayaan praktek dengan berkembangnya sekolah-sekolah unggulan atau plus baik sekolah negeri maupun swasta yang ditandai dengan sekelompok perwira tinggi ABRI dalam kerja sama dengan perguruan Taman Siswa, mendirikan SMA Taruna Nusantara. Tujuannya adalah mendidik anak-anak yang *gifted* unggul dengan menjaring lulusan SMP dari ranking 1 sampai 10. Sekolah ini memberi kesempatan kepada anak bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Banyak bukti keberhasilan yang ditunjukkan oleh sekolah ini, sehingga sekolah ini memberikan dorongan baru kepada daerah-daerah untuk mendirikan sekolah yang sejenis, misalnya: di Medan dan Bandung.

Pada tahun 2000-an, hingga sekarang dengan dikembangkannya varian baru dalam pendidikan anak berbakat dalam bentuk program percepatan belajar (akselerasi) dan diperkenalkannya model inklusi dalam pendidikan. Dalam konteks ini pemerintah mencoba mengembangkan program pendidikan untuk anak *gifted* dengan alternatif program pendidikan akselerasi, yang ditargetkan untuk semua jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Program ini tepatnya dimulai pada tahun ajaran 2001 untuk sejumlah SMA dan SMP.

Program Percepatan Belajar sebagai Alternatif Penanganan

Ada beberapa alasan bahwa program akselerasi dipandang relevan untuk membantu anak *gifted* akademik, sebagaimana kata Barbara Clark, (1983), dan Michael C. Pyryt (2003), karena program akselerasi memiliki beberapa keuntungan yang di antaranya:

a. Siswa *gifted* cenderung memilih teman-teman yang lebih tua karena tingkat kematangannya sering menunjukkan kesamaan dengan mereka.
b. Akselerasi dapat diterapkan di sekolah manapun.
c. Akselerasi memungkinkan siswa mampu memasuki kariernya sesegera mungkin, yang akhirnya berkonsekuensi pada produktivitas yang lebih.
d. Karena menghabiskan waktunya lebih sedikit di sekolah, maka biaya pendidikan anak *gifted* lebih sedikit.
e. Siswa program akselerasi dalam bekerja sama baiknya, bahkan sering lebih baik daripada siswa yang lebih tua di kelasnya.
f. Ada sedikit kebosanan dan ketidakpuasan bagi anak-anak yang cemerlang dengan program biasa.
g. Ketika dimasukkan program akselerasi, di sebagian besar laporan untuk anak di atas rata-rata, penyesuaian sosial dan emosionalnya biasanya tinggi.

h. Pada umumnya, guru dan administrator sekolah bertentangan dengan program akselerasi, sementara itu orangtua dan siswa, terutama yang mengalami akselerasi pro dengan program akselerasi.
i. Untuk sukses, program akselerasi harus berlanjut dan terkoordinasikan.
j. Akselerasi memungkinkan maju berdasarkan kesiapan akademik/perkembangan daripada kemajuan kronologis.
k. Akselerasi mendukung konsep kesiapan dan filsafat pendidikan yang memberikan suatu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak.
l. Anak *gifted* dapat belajar isi yang lebih sulit sesuai dengan tingkat perkembangannya yang lanjut.
m. Mereka dapat memperkecil kesulitan dari prestasi yang kurang dan kebosanan yang menyertainya.
n. Beberapa anak-anak yang maju secara intelektual juga maju dalam perkembangan sosial dan emosionalnya, karena itu perlu ditempatkan pada posisi yang lebih baik bersama anak-anak yang lebih tua.
o. Akselerasi memperbaiki motivasi, kepercayaan dan penampilan.
p. Akselerasi memungkinkan penyelesaian pelatihan profesional lebih dini.
q. Akselerasi memberikan kesempatan pilihan kurikuler yang fleksibel.

Lynne Mackenzie-Sykes (1996) mengemukan juga keuntungan program akselerasi bagi anak *gifted* yang dirumuskan secara padat, di antaranya adalah:

1. Efisiensi belajar meningkat.
2. Efektivitas belajar meningkat.
3. Pengakuan dan penghargaan terhadap kemampuan dan prestasi.
4. Pilihan eksplorasi akademik meningkat.
5. Dimungkinkannya siswa mendapatkan kelompok teman sebaya yang baru.
6. Waktu untuk kariernya meningkat.
7. Produktivitasnya meningkat.

Lynne Mackenzie-Sykes (1996) berdasarkan pendapat Hollingworth, (1942); Passow, (1958); Marland, (1972); Stanley, (1979); Southern & Jones, (1991) menyatakan bahwa ada sejumlah konsekuensi negatif, jika anak *gifted* akademik tidak diberikan program akselerasi, di antaranya:

a. Frustasi dan kebosanan pendidikan.
b. Prestasi dan produktivitas rendah.
c. Mengembangkan rasa apatis terhadap pendidikan formal dan putus sekolah lebih awal.

d. Harapan akademik yang lebih rendah.
e. Motivasi belajar yang menurun dan kebiasaan belajar yang jelek.
f. Kesulitan menyesuaikan dengan kelompok sebaya yang tidak *sharing* minat dan kepedulian yang bersifat lanjut.

Walaupun program akselerasi memiliki keuntungan dan kelebihan, sejumlah pihak ada juga yang menentang terhadap akselerasi, di antaranya:

a. Kebosanan yang dihasilkan dari kurangnya tantangan dapat dieliminasi dengan cara yang lain dan lebih baik, yaitu dengan cara pemanfaatan waktu di kelas – pengayaan.
b. Siswa-siswa yang lebih muda secara intelektual matang, tetapi secara sosial dan emosional tidak diuntungkan, sehingga ada kecenderungan kesempatan untuk kepemimpinan di bidang non akademik lainnya mungkin saja ditolak, karena ketidakmatangan bidang fisik dan sosial.
c. Karena kecepatan kematangan berbeda, perkembangan anak mungkin berhenti. Karena itu dia mungkin tidak siap mengikuti kemajuan yang cepat di dalam beberapa bidang perkembangan. Kesenjangan yang serius dapat menyebabkan penampilan yang lebih lambat.
d. Anak-anak akan dirampok masa kekanak-kanakan dan mereka mungkin akan mati sebelum menyelesaikan sekolahnya.
e. Akselerasi tidak dilihat sebagai program bagi anak *gifted.* Program ini meninggalkan siswa sebagai seorang penerima ilmu yang pasif daripada sebagai pembuat keputusan yang aktif jika siswa tidak diberi kesempatan mengatakan apa yang dipelajari dan bagaimana pengetahuan dipelajari, tetapi hanya membuat keputusan yang mengasumsikan beban kerja tambahan.
f. Beberapa siswa memiliki gaya pribadi dan belajar yang lebih cocok dengan pengayaan daripada percepatan.

Bertitik tolak dari rasional tersebut di atas nampak bahwa sangatlah beralasan bahwa program akselerasi dapat dijadikan alternatif dalam memberikan perlakuan terhadap siswa *gifted* akademik. Jika tidak, maka kerugian yang dirasakan jauh lebih besar daripada keuntungannya.

Mengembangkan Program Percepatan Belajar (PPB) bagi Anak *Gifted* pada SD, SMP, dan SMA

1. Makna Akselerasi

Walaupun PPB (akselerasi) memiliki banyak keuntungan tetapi tidak secara otomatis keuntungan-keuntungan dapat diperoleh, karena ada sejumlah per-

syaratan yang harus dipenuhi bahwa PPB (akselerasi) itu dapat dilaksanakan dengan baik. Setidak-tidaknya ada sejumlah pertanyaan yang harus dapat dijawab sebelum PPB (akselerasi) diterapkan:

1. Apakah anak mampu menguasai materi dengan kecepatan yang lebih dibandingkan dengan teman seusia kronologisnya.
2. Apakah anak mamahami konsep pada tingkat tertentu secara lebih mendalam daripada teman sekelasnya?
3. Apakah anak menampilkan kematangan emosional dalam mengatasi tuntutan anak kelas atasnya?
4. Apakah anak menampilkan kecakapan sosial yang dikehendaki untuk mengatasi tuntutan anak kelas atasnya?
5. Apakah orangtua, anak dan guru sepakat untuk penempatan pada kelas atasnya?

Jika kelima pertanyaan tersebut direspons dengan jawaban ya, maka anak dapat dimasukkan dalam program akselerasi.

Walaupun kelima pertanyaan tersebut dapat dipenuhi, ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan, terutama bagi anak *gifted* akademik yang berusia muda sekali. Untuk menyelamatkan potensi anak *gifted* usia dini, sebaiknya sekolah dan orangtua lebih berhati-hati dalam membuat keputusan, jangan sampai kontra produktif. Mereka memiliki kebutuhan belajar yang sangat unik, sehingga perlu sekali dipenuhi. Jika tidak, maka dapat dimungkinkan terjadi kesenjangan perkembangan yang pada akhirnya dapat mengganggu perkembangan lebih lanjut. Yang jelas ada sesuatu yang penting yang seharusnya diperhatikan bahwa kesempatan belajar pada usia dini, terutama usia 3 sampai 5 tahun, memainkan peran yang sangat berarti bagi terbagunnya fondasi belajar yang terbangun berdasarkan kepercayaan diri dan ingin tahu.

Selain dari itu yang sangat penting adalah siswa *gifted* akademik perlu dihindarkan diri dari upaya menggambungkan anak *gifted* akademik yang berusia di atasnya, karena perlakuan ini dapat mengakibatkan prestasinya tidak sebaik mereka, yang akhirnya dapat menurunkan harga dirinya. Dalam posisi demikian siswa *gifted* tidak lagi mampu menyelamatkan potensi yang dimilikinya.

Akselerasi pada dasarnya merupakan praktek pendidikan yang memberikan kepada siswa materi dan tugas yang biasanya disiapkan bagi siswa yang lebih tua atau kelas di atasnya. Program akselerasi melibatkan penggunaan kurikulum sekolah yang ada, walaupun PPB juga mencakup bahan-bahan tambahan. Misalnya, PPB memberikan topik-topik yang biasanya untuk kelas enam diberikan kepada siswa kelas lima. PPB sangatlah bermakna ketika suatu distrik

sekolah memiliki suatu kurikulum yang mapan dan program tahun-tahun berikutnya menunjukkan peningkatan tingkat kesulitan. PPB mengimplikasikan bahwa siswa yang memiliki kemajuan secara akademik akan maju lebih cepat melalui sistem sekolah daripada melalui siswa lainnya. Ini berarti, mengadaptasikan kurikulum bagi siswa *gifted* akademik lebih relevan daripada memberlakukan suatu kurikulum bagi semua siswa dengan usia sama. Hal ini berimplikasi pula bahwa siswa yang mendalami bidang studi yang lebih maju akan menerima kredit akademik dan promosi berdasarkan tingkat penguasaannya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka semakin jelas makna akselerasi. Sebagaimana Pressy (1949) yang mendefinisikan akselerasi sebagai kemajuan melalui suatu program pendidikan pada kecepatan yang lebih tinggi atau pada usia yang lebih muda dibandingkan yang konvensional. Artinya bahwa akselerasi memungkinkan siswa *gifted* akademik dapat mencapai kemajuan melalui suatu program pendidikan dengan penyelesaian yang jauh lebih cepat atau dalam usia yang lebih muda daripada teman lainnnya yang seusia kronologis.

Namun Eddie Bragget, Professor of Education pada *Charles Sturt University* di New South Wales (NSW) menggambarkan suatu perbedaan yang penting antara akselerasi dan siswa yang *accelerated (accelerated learners).* Dia menjelaskan bahwa siswa yang *accelerated (accelerated learners)* merupakan seseorang yang sedang bergerak, atau telah bergerak melalui suatu program secara lebih cepat daripada individu lainnya dan sekarang mampu berpikir yang lebih maju; karena ini, mereka memahami hasil karya yang kreatif atau isi materi yang lebih sulit daripada lainnya. Sebaliknya, akselerasi menunjuk pada setiap prosedur yang memungkinkan sekolah mengurus siswa yang accelerated *(accelerated learners).* Dengan demikian dapat dipahami bahwa PPB (akselerasi) tidak selalu berarti bahwa siswa sedang dibuat untuk mempercepat dan belajar lebih cepat, tetapi hendaknya lebih pada pemahaman bahwa sekolah memungkinkan anak dapat maju sebagaimana yang mendekati kecepatan alamiahnya.

2. Tipe Akselerasi

Ada banyak pilihan program percepatan (akselerasi) belajar bagi siswa *gifted* akademik baik pada sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama.

Rentang dan Tipe Program Akselerasi (Sumber: Southern & Jones, 1991, hal. 2-3)

1. Masuk sekolah lebih awal	Siswa dimungkinkan masuk sekolah terutama pada usia lebih awal pada kelas satu SD.
2. Lompat kelas atau penempatan lebih awal.	Siswa dapat dipindahkan lebih awal dari teman sekelasnya. Hal ini dapat dilakukan selama tahun ajaran atau awal tahun ajaran.

3. Berlanjut *(Continuous)*	Siswa diberikan materi yang dianggap maju sesuai dengan prestasi mutakhirnya sepanjang siswa siap.
4. Pengajaran berdasarkan kecepatan sendiri	Siswa diberikan materi-materi yang memungkinkannya dapat berlanjut sesuai dengan kecepatan belajarnya sendiri.
5. Akselerasi isi atau mata pelajaran	Siswa ditempatkan pada sebagian hari dengan siswa yang berada di kelas di atasnya untuk satu mata pelajaran atau beberapa tanpa dimasukkan ke dalam kelompok kelas di atasnya.
6. Kelas kombinasi	Siswa ditempatkan di kelas-kelas di mana dua kelas atau lebih dikombinasikan. Penataan dapat digunakan yang memungkinkan anak yang lebih muda dapat berinteraksi dengan anak-anak yang lebih tua baik secara akademik maupun sosial.
7. Pemadatan kurikulum	Siswa diberikan dengan jumlah yang kurang baik berkenaan dengan kegiatan pengantar, pelatihan, reviu, dan sebagainya. Waktu dihemat digunakan untu maju lebih cepat dalam penyelesaian kurikulum.
8. Telescoping kurikulum	Siswa menghabiskan waktu lebih sedikit daripada siswa yang normal berkenaan dengan *course of study* (misalnya: materi pelajaran 1 tahun diselesaikan 1 semester, atau menyelesaikan SD kurang dari 6 tahun)
9. Mentorships	Siswa diangkat menjadi seorang mentor yang memberikan latihan dan pengalaman yang bersifat lanjut dalam satu bidang isi materi pelajaran.
10. Progran ekstrakurikuler	Siswa didaftar sebagai peserta mata pelajaran terentu atau program liburan panjang yang dapat dikonversikan dengan pengajaran atau kredit mata pelajaran (misalnya: materi bahasa dan matematika yang diberikan di universitas).
11. Pendaftaran pada dua program bersamaan	Siswa yang mengambil mata pelajaran pada kelas tertentu dan menerima kredit untuk penyelesaian yang berhasil dari suatu mata pelajaran pada kelas yang lebih tinggi.
12. Penempatan lebih awal *(Advanced placement)*	Siswa mengambil suatu matakuliah sewaktu di sekolah menengah yang menyiapkan dirinya mengambil ujian yang dapat dikonversikan dengan kredit di universitas dengan penampilan yang istimewa.
13. Kredit melalui ujian	Siswa menerima kredit (untuk tingkat sekolah menengah atau universitas) berdasarkan penyelesaian ujian dengan hasil yang memuaskan.
14. Koresponden	Siswa mengambil mata pelajaran sekolah menengah atau matakuliah universitas melalui mail atau presentasi video dan audio.
15. Masuk lebih awal pada sekolah menengah atau universitas	Siswa dimungkinkan dapat memasuki suatu program pengajaran lebih awal.(Setidak-tidaknya satu tahun lebih awal).

Di samping alternatif di atas, beberapa pilihan akselerasi juga melibatkan pengelompokan kemampuan: Anak-anak yang telah memperoleh suatu tingkat pendalaman yang sama harus dikelompokkan bersama-sama untuk mengambil

penempatan yang lebih maju atau kelas akselerasi. Beberapa pilihan akselerasi ini secara logik memiliki keterkaitan, misalnya: suatu "kelas yang tak bertingkat" melibatkan pemadatan kurikulum atau telescoping kurikulum; pendaftaran secara bersamaan selalu berimplikasi pada akselerasi mata pelajaran, dan pemadatan kurikulum berimplikasi pada penempatan lebih awal dalam tahun-tahun berikutnya.

3. Efektivitas penggunaan program akselerasi

Pada kenyataannya program akselerasi tidak selalu memiliki efektivitas yang tinggi, karena sangat tergantung pada penggunaannya. Program akselerasi sangat mungkin lebih sesuai bagi anak *gifted* akademik daripada anak-anak yang memiliki kemampuan rata-rata. Namun perlu diyakini bahwa semua keputusan berkenaan dengan intervensi bagi anak *gifted* akademik perlu disesuaikan dengan data berkenaan dengan dirinya, sehingga dapat membuat penempatan yang tepat.

Demikian juga apapun bentuk akselerasi yang dipilih perlu melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses penempatan dan perencanaan program, di samping pengendalian selama proses pendidikannya, sehingga efektivitas program dapat terus dijaga. Lebih lanjut berikut ini akan dikemukakan beberapa hal yang membuat program akselerasi dapat berfungsi efektif, di antaranya:

1. Ketika petunjuk penyelenggaraan yang jelas diberikan.
2. Ketika petunjuk penyelenggaraan diimplementasikan secara benar dan evaluasi secara benar terhadap implementasi petunjuk.
3. Ketika sikap guru itu positif.
4. Ketika tingkat keberbakatan *(giftedness)* sesuai dengan tipe program akselerasi.
5. Ketika monitoring dan evaluasi dilakukan dengan benar.

Program akselerasi selalu harus dirancang secara berhati-hati, dari penjaringan awal sampai kepada pemantauan semua aspek kemajuan siswa selama masa-masa implementasi program dan di luarnya. Program akselerasi yang berhasil akan mengevaluasi secara terus menerus terutama berkenaan dengan:

1. Bagaimana baiknya program itu bekerja.
2. Faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap keberhasilan akselerasi.
3. Faktor-faktor apa yang menajamkan implementasi program.
4. Bagaimana program itu menampilkan fungsinya lebih baik.

4. Tingkat keberbakatan dan derajat program akselerasi

Silverman (1989) and Gross (1992) setuju bahwa anak yang gifted yang luar biasa memerlukan program yang secara dramatik berbeda dengan anak-anak *gifted* yang biasa. Penelitian menyarankan bahwa siswa *gifted* yang luar biasa sangat cocok diberi program akselerasi yang radikal dengan menerapkan lompat kelas sesuai dengan kecepatannya. Adalah penting bahwa siswa-siswa ini diberikan pengayaan berpikir lateral pada setiap fasenya. Siswa *gifted* yang luar biasa diharapkan tetap bersama teman-teman sebayanya atau dipercepat dengan hanya satu tahu dengan risiko mendapat penolakan dan isolasi sosial dari teman sebayanya.

Hasil penelitian selama empat dekade secara konsisten telah menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti akselerasi mendapatkan keuntungan secara akademik dan diuntungkan secara sosial atau emosional. Bahkan pengalaman Australia pun mendukung temuan-temuan ini. Penelitian Rochmat Wahab (2003) menguatkan bahwa kecakapan sosial-personal anak *gifted* akademik di tiga SMA di Yogyakarta menunjukkan katagori baik, bahkan ada yang baik sekali sebanyak 6 orang dari 45 orang, dan tak seorang pun yang kategori kurang. Dengan demikian program akeselerasi memberikan nilai positif, kendatipun hingga kini program akselerasi masih menerima kecaman dari berbagai pihak yang belum tentu benar adanya. Namun semuanya itu sangatlah bermanfaat, sehingga dalam penerapannya, semua pihak diharapkan lebih berhati-hati.

Realitas Program Percepatan Belajar (Akselerasi) dan Problematikanya

Secara informal program percepatan belajar (akselerasi) di Indonesia telah diterapkan dalam berbagai bentuknya, misalnya melalui lompat naik kelas, masuk lebih awal di SD, sistem promosi kelas, maju berkelanjutan (*continuous progress)* melalui modul, dan sebagainya. Penyelenggaraan program percepatan belajar (akselerasi) secara informal dalam hal ini dimaksudkan bahwa program ini dilangsungkan tanpa ada surat izin resmi dari birokrat, tetapi hanya berdasarkan perundang-undangan yang ada.

Namun secara formal program percepatan belajar (akselerasi) dilaksanakan sejak tahun sejak tahun 2001 baik di SMA, yang kemudian disusul pada program percepatan belajar (akselerasi) pada SMP dan SD. Sekolah-sekolah yang ditunjuk secara formal oleh pejabat atasannya telah berusaha melaksanakan program dengan sebaik-baiknya berdasarkan sumber daya alam dan manusia, serta kepedulian dan keterlibatan masyarakat pada umumnya atau masyarakat profesi dan orangtua pada khususnya

Pada kenyataannya kehadiran program percepatan belajar (akselerasi) masih merupakan kontroversi dan menghadirkan sikap pro dan kontra baik secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka melalui mass media. Sikap pro dan kontra muncul dapat disebabkan oleh pendirian yang apriori dan atau realitas pelayanan yang ada. Pada hakekatnya sikap pro dan kontra itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan pada uraian rasional program percepatan belajar (akselerasi) di atas.

Sikap pro muncul pada hakekatnya didasarkan atas kebutuhan riil yang harus dihadapi anak *gifted* akademik, di samping keberhasilan yang telah mereka tunjukkan. Demikian pula sikap kontra pada hakekatnya muncul atas pemahamannya bahwa anak *gifted* akademik tidak perlu memperoleh layanan khusus, karena biaya dan perlakuan diskriminatif cenderung mengarahkan kepada pembentukan masyarakat elit.

Variasi sikap terhadap kehadiran program percepatan belajar (akselerasi) dapatlah dipahami, karena setidak-tidaknya oleh sejumlah faktor, di antaranya: pemahaman konsep terhadap anak *gifted* akademik, rekrutmen peserta, cara penanganan program percepatan belajar (akselerasi) dan layanan bimbingan. *Pertama,* anak *gifted* akademik yang mendapatkan layanan sementara ini adalah anak yang memiliki kemampuan matematika dan sain, padahal pada kenyataannya tidak selalu mereka memiliki keduanya, boleh jadi mereka hanya memiliki potensi unggul pada salah satu bidangnya saja. Oleh karena itu perlu dipersiapkan diferensiasi program pendidikan yang benar-benar mampu memfasilitasi dukungan terhadap setiap jenis keberbakatan.

Kedua, rekrutmen yang terjadi pada kenyataannya tidak selalu dilakukan oleh tenaga ahli dan tim yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, sehingga hasilnya belum menggambarkan anak yang benar-benar memiliki kompetensi unggul. Untuk menjamin pelaksanaan program akselerasi harus benar-benar dijamin keandalan sistem rekrutmennya.

Ketiga, penyelenggaraan program akselerasi sebenarnya banyak pilihan, namun untuk sementara ini yang baru diterapkan hanyalah berbentuk kelas khusus, yang cenderung dapat mengarah kepada pembentukan sekelompok anak yang eksklusif. Untuk itu perlu dikembangkan program akselerasi dalam bentuk lain, atau program lainnya yang dapat dipilih anak *gifted* untuk mengembangkan diri secara optimal, misalnya berbentuk program pengayaan.

Keempat, layanan bimbingan secara konvensional yang diberikan kepada anak *gifted* yang dilayani dengan sistem kelas khusus cenderung bersifat reaktif, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi saja. Untuk itu diperlukan layanan bimbingan dengan pendekatan perkembangan yang memungkinkan dapat mengembangkan perkembangan personal dan sosial anak berbakat.

Alternatif Lain Pengelolaan Pendidikan Anak *Gifted*

Salah satu alternatif lain yang paling utama dalam menagani anak *gifted* adalah sistem pengayaan. Sistem pengayaan cenderung lebih diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan anak *gifted* secara individual melalui upaya memperluas, memperdalam, dan mempercepat penguasaan kurikulum reguler. Kitano dan Kirby (1984) menegaskan bahwa ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk program pengayaan terutama untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, di antaranya: (1) Belajar mandiri *(independent study),* (2) kesempatan untuk belajar cepat dan melakukan tes lebih awal, sehingga waktunya bisa digunakan untuk mempelajari unit yang sama lebih mendalam dan materi lain yang diminati, (3) menerapkan proses berpikir tingkat yang lebih tinggi, (4) menghadirkan pembicara tamu, (5) menjadi mentor sebaya, (6) memberikan materi untuk tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu khususnya untuk anak *gifted* yang berada tingkat Sekolah Menengah dapat diberikan program di antaranya: (1) sumber-sumber materi untuk tingkat perguruan tinggi, (2) pendidikan karier berbasis masyarakat, (3) program pertukaran, dan (4) *The International Baccaloureate* yang merupakan program standar internasional.

Untuk dapat menjamin program pengayaan dapat memiliki efektivitas yang tinggi, maka Kough (Barbara Clark, 1983) menawarkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya:

(1) Guru harus mampu mengidentifikasi dan mendaftar siswa yang tergolong *gifted*.
(2) Guru harus mampu menunjukkan modifikasi kurikulum yang spesifik dibuat untuk siswa *gifted*.
(3) Harus ada seorang yang bertanggungjawab dalam melakukan supervisi terhadap keseluruhan program yang membantu dalam memberikan sumber belajar bagi guru yang reguler.

Howley, Howley, dan Pendarvis (Colangelo and Davis:1991), menjelaskan bahwa ada tiga pendekatan dalam pengayaan, yaitu (1) pendekatan yang berorientasi pada proses, (2) pendekatan yang berorientasi pada isi, dan (3) pendekatan yang berorientasi pada hasil.

Pertama, pendekatan yang berorientasi proses dalam pengayaan dirancang untuk mengembangkan proses mental yang lebih tinggi dan produksi kreatif. Siswa biasanya diajar langkah-langkah dari komponen-komponen satu model atau lebih, seperti: taxonomi tujuan kognitif menurut Blom, pemecahan masalah kreatif menurut Parne, Struktur Intelek menurut Guilford.

Kedua, pendekatan yang berorientasi isi dalam pengayaan menekankan pada presentasi bidang isi tertentu. Biasanya, kurikulum matematika, sains, bahasa, dan ilmu-ilmu sosial diberlakukan dengan ke dalam dan keluasan yang lebih besar.

Ketiga, pendekatan yang berorientasi produk dalam pengayaan menekankan terutama pada hasil atau produk pengajaran daripada isi atau proses. Produk-produk yang dapat dijangkau, seperti: laporan, novel, presentasi, atau yang tak dapat dijangkau, misalnya: kesehatan mental yang membaik.

Walaupun banyak pilihan program yang dapat dilakukan untuk program pengayaan bagi anak *gifted,* namun selama ini baik sebelum maupun setelah pendeklarasian program akselerasi, belum banyak orang yang menerapkannya. Anak *gifted* cenderung "dilayani secara paksa bersama-sama anak berkemampuan rata-rata". Diharapkan sekali program pengayaan dapat dijadikan alternatif dalam membantu anak-anak *gifted,* sehingga dapat berkembang secara optimal.

Penutup

Demikianlah beberapa pokok pikiran tentang pengelolaan pendidikan anak *gifted* di Indonesia dengan segala persoalannya. Walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menangani anak *gifted,* tidak berarti bahwa upaya mencari solusi terbaik harus berhenti. Artinya bahwa berbagai alternatif model dan pendekatan perlu terus dicari, sehingga dapat ditemukan model dan pendekatan yang lebih relevan baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak *gifted* sendiri, maupun kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Tulisan ini disajikan dan dibahas pada KONASPI ke VI di Denpasar, yang diselenggarakan oleh UNDIKSHA pada 17 sd 20 Nopember 2008.

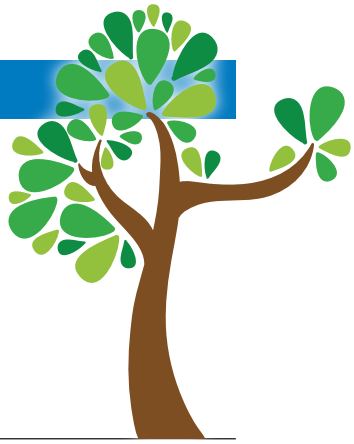

Konsep Dasar Penyelenggaraan Program Akselerasi Pendidikan

Pengantar

Anak berbakat akademik (ABA) sebagai individu yang memiliki potensi akademik tinggi merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga. Mereka akan tetap menjadi aset bangsa yang berharga, manakala mendapat perlakuan yang sesuai. Pada kenyataannya tidak semua mereka dapat mengaktualisasikan potensinya. Akibatnya potensi yang berharga itu menjadi sia-sia.

ABA pada dasarnya dapat diketahui sejak dini melalui penampilan perilakunya sehari-hari. Ketika mereka teridentifikasi akan lebih menguntungkan manakala dalam waktu sedini mungkin mereka mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai. Hal ini diperkuat dengan UURI No. 20 tahun 2003 tentang SPN pasal 5 ayat 3 yang menyatakan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Bahkan dalam UU Sisdiknas terdahulu pun, yaitu UU Sisdiknas No. 2 tahun 1989 sudah diamanatkan, pasal 8 ayat 2 yang menegaskan bahwa warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Walaupun demikian nampaknya mereka belum banyak yang memperoleh haknya sebagaimana semestinya.

Ada beberapa strategi layanan pendidikan yang dapat ditawarkan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan mereka, di antaranya: pengelompokan, pengayaan, dan percepatan (akselerasi). Program percepatan belajar bagi ABA di Indonesia untuk sementara ini merupakan pilihan yang dianggap tepat untuk semua jenjang. Strategi ini danggap masih kontroversi oleh masyarakat, walaupun demikian sekolah masih menganggap strategi ini sebagai pilihan sementara. Untuk dapat menghindari dari kerugian yang besar, maka pada kesempatan ini akan dibahas lebih mendalam.

Rasional Program Perecepatan Belajar (Akselerasi)

Ada alasan-alasan bahwa program akselerasi dipandang relevan untuk membantu ABA, sebagaimana kata Barbara Clark, (1983), Michael C. Pyryt (2003), karena memiliki beberapa keuntungan yang secara rinci, di antaranya:

a. Siswa berbakat cenderung memilih teman-teman yang lebih tua karena tingkat kematangannya sering menunjukkan kesamaan dengan mereka.
b. Akselerasi dapat diterapkan di sekolah manapun.
c. Akselerasi memungkinkan siswa mampu memasuki kariernya sesegera mungkin, yang akhirnya berkonsekuensi pada produktivitas yang lebih.
d. Karena menghabiskan waktunya lebih sedikit di sekolah, maka biaya pendidikan anak berbakat lebih sedikit.
e. Siswa program akselerasi bekerja sama baiknya, bahkan sering lebih baik daripada siswa yang lebih tua di kelasnya.
f. Ada sedikit kebosanan dan ketidakpuasan bagi anak-anak yang cemerlang dengan program biasa.
g. Ketika dimasukkan program akselerasi, di sebagian besar laporan untuk anak di atas rata-rata, penyesuaian sosial dan emosionalnya biasanya tinggi.
h. Pada umumnya, guru dan administrator sekolah bertentangan dengan program akselerasi, sementara itu orangtua dan siswa, terutama yang mengalami akselerasi pro dengannya.
i. Untuk sukses, program akselerasi harus berlanjut dan terkoordinasikan.
j. Akselerasi memungkinkan maju berdasarkan kesiapan akademik/perkembangan daripada kemajuan kronologis.
k. Akselerasi mendukung konsep kesiapan dan filsafat pendidikan yang memberikan suatu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak.
l. Mereka dapat belajar isi yang lebih sulit yang sesuai dengan tingkat perkembangannya yang lanjut. Jika mereka diberi tantangan bekerja pada tingkat yang sesuai, maka cara ini akan membantu memuaskan kebutuhan intelektual dan mengarahkan ke sikap yang lebih positif terhadap sekolah dan belajar. Kebiasaan studi yang baik tumbuh dari pengalaman belajar yang menantang secara konsisten yang dapat menghasilkan anak mampu mengatasinya dengan berhasil.
m. Mereka dapat memperkecil kesulitan dari prestasi yang kurang dan kebosanan yang menyertainya.
n. Beberapa anak yang maju secara intelektual juga maju dalam perkembangan sosial dan emosionalnya, karena itu perlu ditempatkan pada posisi yang lebih baik bersama anak-anak yang lebih tua. Anak berbakat biasanya menikmati berteman dengan anak-anak yang lebih tua, karena mereka memi-

liki minat dan kemampuan yang sama dan mampu menunjukkan kemampuan berpikir dan bekerja yang sama dan memiliki harapan yang lebih tinggi. Ditempatkan dengan anak-anak yang lebih tua dapat mencegah penolakan dan isolasi dari temannya yang sebaya. Terbukti bahwa usia emosional lebih berkaitan dengan usia mental daripada usia kronologis.

o. Akselerasi memperbaiki motivasi, kepercayaan dan penampilan. Anak-anak yang dipaksa mengikuti waktu dapat menjadi bosan dan frustasi yang pada akhirnya dapat mengarahkan kepada perilaku yang jelek dan *self-esteem* yang rendah. Kebosanan dan frustasi dapat mengarahkan anak-anak menjadi menghilang dan mati. Akselerasi dapat juga mengurangi kekuan dan arogansi.
p. Akselerasi memungkinkan penyelesaian pelatihan profesional lebih dini.
q. Akselerasi memberikan kesempatan pilihan kurikuler yang fleksibel.

Lynne Mackenzie-Sykes (1996) mengemukan juga keuntungan akselerasi bagi anak berbakat yang dirumuskan secara padat, di antaranya adalah:

1. Efisiensi belajar meningkat.
2. Efektivitas belajar meningkat.
3. Pengakuan dan penghargaan terhadap kemampuan dan prestasi.
4. Pilihan eksplorasi akademik meningkat.
5. Dimungkinkannya siswa mendapatkan kelompok teman sebaya yang baru.
6. Waktu untuk kariernya meningkat.
7. Produktivitasnya meningkat.

Walaupun program akselerasi memiliki keuntungan dan kelebihan, sejumlah pihak ada juga yang menentang terhadap akselerasi, di antaranya:

a. Kebosanan yang dihasilkan dari kurangnya tantangan dapat dieliminasi dengan cara yang lain dan lebih baik, yang mengurangi waktu yang dihabiskan di kelas – pengayaan.
b. Siswa-siswa yang lebih muda secara intelektual matang, tetapi secara sosial dan emosional tidak diuntungkan, dan karena kesempatan untuk kepemimpinan di bidang non akademik lainnya mungkin ditolak karena ketidakmatangan bidang fisik dan sosial.
c. Karena kecepatan kematangan berbeda, perkembangan anak mungkin berhenti. Karena itu dia mungkin tidak siap untuk kemajuan yang cepat di dalam beberapa bidang perkembangan. Kesenjangan yang serius dapat menyebabkan penampilan yang lebih lambat.

d. Anak-anak akan dirampok masa kekanak-kanakan dan mereka mungkin akan mati sebelum menyelesaikan sekolahnya.
e. Akselerasi tidak dilihat sebagai program bagi anak berbakat.
f. Ini meninggalkan siswa sebagai seorang penerima ilmu yang pasif daripada sebagai pembuat keputusan yang aktif jika siswa tidak diberi kesempatan mengatakan apa yang dipelajari dan bagaimana pengetahuan dipelajari, tapi hanya membuat keputusan yang mengasumsikan beban kerja tambahan.
g. Beberapa siswa memiliki gaya pribadi dan belajar yang lebih cocok dengan pengayaan daripada percepatan.

Lynne Mackenzie-Sykes (1996) berdasarkan pendapat Hollingworth, (1942); Passow, (1958); Marland, (1972); Stanley, (1979); Southern & Jones, (1991) menyatakan bahwa ada sejumlah konsekuensi negatif, jika anak berbakat akademik tidak diberikan program akselerasi, di antaranya:

a. Frustasi dan kebosanan pendidikan.
b. Prestasi dan produktivitas rendah.
c. Mengembangkan rasa apatis terhadap pendidikan formal dan putus sekolah lebih awal.
d. Harapan akademik yang lebih rendah.
e. Motivasi belajar yang menurun dan kebiasaan belajar yang jelek.
f. Kesulitan menyesuaikan dengan kelompok sebaya yang tidak sharing minat dan kepedulian yang bersifat lanjut.

Bertitik tolak dari rasional tersebut di atas nampak bahwa sangatlah beralasan bahwa program akselerasi dapat dijadikan alternatif dalam memberikan perlakuan terhadap siswa berbakat akademik. Jika tidak, maka kerugian yang dirasakan jauh lebih besar daripada keuntungannya.

Realitas Program Percepatan Belajar (Akselerasi) dan Problematikanya

Secara informal program percepatan belajar (akselerasi) di Indonesia telah diterapkan dalam berbagai bentuknya, misalnya melalui lompat naik kelas, masuk lebih awal di SD, sistem promosi kelas, maju berkelanjutan, *continuous progress* melalui modul, dan sebagainya. Penyelenggaraan program percepatan belajar (akselerasi) secara informal dalam hal ini dimaksudkan bahwa program ini dilangsungkan tanpa ada surat izin resmi dari birokrat, tetapi hanya berdasarkan perundang-undangan yang ada atau tidak.

Namun secara formal program percepatan belajar (akselerasi) dilaksanakan sejak tahun sejak tahun 2001 baik di SMA, yang kemudian disusul pada program percepatan belajar (akselerasi) pada SMP dan SD. Sekolah-sekolah yang ditunjuk secara formal oleh pejabat atasannya telah berusaha melaksanakan program dengan sebaik-baiknya berdasarkan sumber daya alam dan manusia, serta kepedulian dan keterlibatan masyarakat pada umumnya atau masyarakat profesi dan orangtua pada khususnya

Pada kenyataannya kehadiran program percepatan belajar (akselerasi) masih merupakan kontroversi dan menghadirkan sikap pro dan kontra baik secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka melalui mass media. Sikap pro dan kontra muncul dapat disebabkan oleh pendirian yang apriori dan atau realitas pelayanan yang ada. Pada hakekatnya sikap pro dan kontra itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan pada uraian rasional program percepatan belajar (akselerasi) di atas.

Sikap pro muncul pada hakekatnya muncul didasarkan atas kebutuhan riil yang harus dihadapi anak berbakat akademik, di samping keberhasilan yang telah mereka tunjukkan. Demikian pula sikap kontra pada hakekatnya muncul atas pemahamannya bahwa anak berbakat akademik tidak perlu memperoleh layanan khusus, karena biaya dan perlakuan diskriminatif cenderung mengarahkan kepada pembentukan masyarakat elite.

Variasi sikap terhadap kehadiran program percepatan belajar (akselerasi) dapatlah dipahami, karena setidak-tidaknya oleh sejumlah faktor, di antaranya: pemahaman konsep terhadap anak berbakat akademik, rekrutmen peserta dan cara penanganan program percepatan belajar (akselerasi).

Pertama, anak berbakat akademik yang mendapatkan layanan sementara ini adalah anak yang memiliki kemampuan matematika dan sain, padahal pada prakteknya tidak selalu mereka memiliki keduanya, boleh jadi mereka hanya memiliki potensi unggul pada salah satu bidangnya saja.

Kedua, rekrutmen yang terjadi pada kenyataannya tidak selalu dilakukan oleh tenaga ahli dan tim yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, sehingga hasilnya belum menggambarkan anak-anak yang benar-benar memiliki kompetensi yang unggul.

Ketiga, penyelenggaraan program akselerasi sebenarnya banyak pilihan, namun untuk sementara ini yang baru diterapkan hanyalah berbentuk kelas khusus, sehingga dapat berakibat pada kurangnya fleksibilitas kurikulum di lapangan.

Mengembangkan Program Percepatan (Akselerasi) Belajar (PPB) bagi Anak ABA pada SD dan SM

1. Makna akselerasi

Walaupun PPB memiliki banyak keuntungan tetapi tidak secara otomatis keuntungan-keuntungan dapat diperoleh, karena ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bahwa PPB itu dapat dilaksanakan dengan baik. Setidak-tidaknya ada sejumlah pertanyaan yang harus dapat dijawab sebelum PPB diterapkan:

1. Apakah anak mampu menguasai materi dengan kecapatan yang lebih dibandingkan dengan teman seusia kronologisnya.
2. Apakah anak mamahami konsep pada tingkat yang lebih mendalam daripada teman sekelasnya?
3. Apakah anak menampilkan kematangan emsional dalam mengatasi tuntutan anak kelas atasnya?
4. Apakah anak menampilkan kecakapan sosial yang dikehendaki untuk mengatasi tuntutan anak kelas atasnya?
5. Apakah orangtua, anak dan guru sepakat untuk penempatan pada kelas atasnya?

Jika kelima pertanyaan tersebut direspons dengan jawaban ya, maka anak dapat dimasukkan dalam program akaselerasi.

Walaupun kelima pertanyaan tersebut dapat dipenuhi, ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan, terutama bagi anak berbakat akademik yang berusia muda sekali. Untuk menyelamatkan potensi anak berbakat usia dini, sebaiknya sekolah dan orangtua lebih berhati-hati dalam membuat keputusan, jangan sampai kontra produktif. Mereka memiliki kebutuhan belajar yang sangat unik, sehingga perlu sekali dipenuhi. Jika tidak, maka dapat dimungkinkan terjadi kesenjangan perkembangan yang pada akhirnya dapat mengganggu perkembangan lebih lanjut. Yang jelas ada sesuatu yang penting yang seharusnya diperhatikan bahwa kesempatan belajar pada usia dini, terutama usia 3 sampai 5 tahun, memainkan peran yang sangat berarti bagi terbagunnya fondasi belajar yang terbangun berdasarkan kepercayaan diri dan ingin tahu.

Selain dari itu yang sangat penting adalah siswa berbakat akademik perlu dihindarkan diri dari upaya menggambungkan anak berbakat akademik yang berusia di atasnya, karena perlakuan ini dapat mengakibatkan prestasinya tidak sebaik mereka, yang pada akhirnya dapat menurunkan harga dirinya. Dalam posisi demikian siswa berbakat tidak lagi mampu menyelamatkan potensi yang dimilikinya.

Akselerasi pada dasarnya merupakan praktek pendidikan yang memberi kepada siswa materi dan tugas yang biasanya disiapkan bagi siswa yang lebih tua atau kelas di atasnya. Program akselerasi melibatkan penggunaan kurikulum sekolah yang ada, walaupun PPB juga mencakup bahan-bahan tambahan. Misalnya, PPB memberikan topik-topik yang biasanya untuk kelas enam diberikan kepada siswa kelas lima. PPB sangatlah bermakna ketika suatu distrik sekolah memiliki suatu kurikulum yang mapan dan program tahun-tahun berikutnya menunjukkan peningkatan tingkat kesulitan. PPB mengimplikasikan bahwa siswa yang memiliki kemajuan secara akademik akan maju lebih cepat melalui sistem sekolah daripada melalui siswa lainnya. Ini berarti bahwa mengadaptasikan kurikulum bagi siswa berbakat akademik lebih relevan daripada memberlakukan suatu kurikulum bagi semua siswa dengan usia sama. Ini berimplikasi pula bahwa siswa yang mendalami bidang studi yang lebih maju akan menerima kredit akademik dan promosi berdasarkan tingkat penguasaannya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka semakin jelas makna akselerasi. Sebagaimana Pressy (1949) yang mendefinisikan *akselerasi sebagai kemajuan melalui suatu program pendidikan pada kecepatan yang lebih tinggi atau pada usia yang lebih muda dibandingkan daripada yang konvensional.* Artinya bahwa akselerasi memungkinkan siswa berbakat akademik dapat mencapai kemajuan melalui suatu program pendidikan dengan penyelesaian yang jauh lebih cepat atau dalam usia yang lebih muda daripada teman lainnya yang seusia kronologis.

Namun Eddie Bragget, Professor of Education pada Charles Sturt University di New South Wales (NSW) menggambarkan suatu perbedaan yang penting antara siswa yang *accelerated (accelerated learners) dan* akselerasi. Dia menjelaskan bahwa siswa yang accelerated *(accelerated learners)* merupakan seseorang yang sedang bergerak, atau telah bergerak melalui suatu program secara lebih cepat daripada individu lainnya dan sekarang mampu berpikir yang lebih maju; karena ini, mereka memahami hasil karya yang kreatif atau isi materi yang lebih sulit daripada lainnya. Sebaliknya, akselerasi menunjuk pada setiap prosedur yang memungkinkan sekolah mengurus siswa yang accelerated *(accelerated learners).* Dengan demikian dapat dipahami bahwa PPB (akselerasi) tidak selalu berarti bahwa siswa sedang dibuat untuk mempercepat dan belajar lebih cepat, tetapi hendaknya lebih pada pemahaman bahwa sekolah memungkinkan anak dapat maju sebagaimana yang mendekati kecepatan alamiahnya.

2. Tipe akselerasi

Ada banyak pilihan program percepatan (akselerasi) belajar bagi siswa berbakat akademik baik pada sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama.

Rentang dan Tipe Program Akselerasi (Sumber: Southern & Jones, 1991, hal. 2-3)

1. Masuk sekolah lebih awal	Siswa dimungkinkan masuk sekolah terutama pada usia lebih awal pada kelas satu SD.
2. Lompat kelas atau penempatan lebih awal.	Siswa dapat dipindahkan lebih awal dari teman sekelasnya. Ini bisa dilakukan selama tahun ajaran atau awal tahun ajaran.
3. Berlanjut *(Continuous)*	Siswa diberikan materi yang dianggap maju sesuai dengan prestasi mutakhirnya sepanjang siswa siap.
4. Pengajaran berdasarkan kecepatan sendiri	Siswa diberikan materi-materi yang memungkinkannya dapat berlanjut sesuai dengan kecepatan belajarnya sendiri.
5. Akselerasi isi atau mata pelajaran	Siswa ditempatkan pada sebagian hari dengan siswa yang berada di kelas di atasnya untuk satu mata pelajaran atau beberapa tanpa dimasukkan ke dalam kelompok kelas di atasnya.
6. Kelas kombinasi	Siswa ditempatkan di kelas-kelas di mana dua kelas atau lebih dikombinasikan. Penataan dapat digunakan yang memungkinkan anak yang lebih muda dapat berinteraksi dengan anak-anak yang lebih tua baik secara akademik maupun sosial.
7. Pemadatan kurikulum	Siswa diberikan dengan jumlah yang kurang baik berkenaan dengan kegiatan pengantar, pelatihan, reviu, dan sebagainya. Waktu dihemat digunakan untu maju lebih cepat dalam penyelesaian kurikulum.
8. Telescoping kurikulum	Siswa menghabiskan waktu lebih sedikit daripada siswa yang normal berkenaan dengan *course of study* (misalnya: materi pelajaran 1 tahun diselesaikan 1 semester, atau menyelesaikan SD kurang dari 6 tahun)
9. Mentorships	Siswa diangkat menjadi seorang mentor yang memberikan latihan dan pengalaman yang bersifat lanjut dalam satu bidang isi materi pelajaran.
10. Progran ekstrakurikuler	Siswa didaftar sebagai peserta mata pelajaran terentu atau program liburan panjang yang dapat dikonversikan dengan pengajaran atau kredit mata pelajaran (misalnya: materi bahasa dan matematika yang diberikan di universitas).
11. Pendaftaran pada dua program bersamaan	Siswa yang mengambil mata pelajaran pada kelas tertentu dan menerima kredit untuk penyelesaian yang berhasil dari suatu mata pelajaran pada kelas yang lebih tinggi.
12. Penempatan lebih awal *(Advanced placement)*	Siswa mengambil suatu matakuliah sewaktu di sekolah menengah yang menyiapkan dirinya mengambil ujian yang dapat dikonversikan dengan kredit di universitas dengan penampilan yang istimewa.
13. Kredit melalui ujian	Siswa menerima kredit (untuk tingkat sekolah menengah atau universitas) berdasarkan penyelesaian ujian dengan hasil yang memuaskan.
14. Koresponden	Siswa mengambil mata pelajaran sekolah menengah atau matakuliah universitas melalui mail atau presentasi video dan audio.
15. Masuk lebih awal pada sekolah menengah atau universitas	Siswa dimungkinkan dapat memasuki suatu program pengajaran lebih awal.(Setidak-tidaknya satu tahun lebih awal).

Di samping alternatif di atas, beberapa pilihan akselerasi juga melibatkan pengelompokan kemampuan: Anak-anak yang telah memperoleh suatu tingkat pendalaman yang sama harus dikelompokkan untuk mengambil penempatan yang lebih maju atau kelas akselerasi. Beberapa pilihan akselerasi ini secara logik memiliki keterkaitan, misalnya: suatu "kelas yang tak bertingkat" melibatkan pemadatan kurikulum atau telescoping kurikulum; pendaftaran secara bersamaan selalu berimplikasi pada akselerasi mata pelajaran, dan pemadatan kurikulum berimplikasi pada penempatan lebih awal di tahun-tahun berikutnya.

3. Efektivitas penggunaan program akselerasi

Pada kenyataannya program akselerasi tidak selalu memiliki efektivitas yang tinggi, karena sangat tergantung pada penggunaannya. Program akselerasi sangat mungkin lebih sesuai bagi anak berbakat akademik daripada anak-anak yang memiliki kemampuan rata-rata. Namun perlu diyakini bahwa semua keputusan berkenaan dengan intervensi bagi anak berbakat akademik perlu disesuaikan dengan data berkenaan dengan dirinya, sehingga dapat membuat penempatan yang tepat.

Demikian juga apapun bentuk akselerasi yang dipilih perlu melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses penempatan dan perencanaan program, di samping pengendalian selama proses pendidikannya, sehingga efektivitas program dapat terus dijaga. Lebih lanjut berikut ini akan dikemukan beberapa hal yang membuat program akselerasi dapat berfungsi efektif, di antaranya:

1. Ketika petunjuk penyelenggaraan yang jelas diberikan.
2. Ketika petunjuk penyelenggaraan diimplementasikan secara benar dan evaluasi secara benar terhadap implementasi petunjuk.
3. Ketika sikap guru itu positif.
4. Ketika tingkat keberbakatan sesuai dengan tipe program akselerasi.
5. Ketika monitoring dan evaluasi dilakukan dengan benar.

Program akselerasi selalu harus dirancang secara berhati-hati, dari penjaringan awal sampai kepada pemantauan semua aspek kemajuan siswa selama masa-masa implementasi program dan di luarnya. Program akselerasi yang berhasil akan mengevaluasi secara terus menerus terutama berkenaan dengan:

1. Bagaimana baiknya program itu bekerja.
2. Faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap keberhasilan akselerasi.
3. Faktor-faktor apa yang menajamkan implementasi program.
4. Bagaimana program itu menampilkan fungsinya lebih baik.

4. Tingkat keberbakatan dan derajat program akselerasi

Silverman (1989) and Gross (1992) setuju bahwa anak yang berbakat yang luar biasa memerlukan program yang secara dramatik berbeda dengan anak-anak berbakat yang biasa. Penelitian menyarankan bahwa siswa berbakat yang luar biasa sangat cocok diberi program akselerasi yang radikal dengan menerapkan lompat kelas sesuai dengan kecepatannya. Adalah penting bahwa siswa-siswa ini diberikan pengayaan berpikir lateral pada setiap fasenya. Siswa berbakat yang luar biasa diharapkan tetap bersama teman-teman sebayanya atau dipercepat dengan hanya satu tahu dengan risiko mendapat penolakan dan isolasi sosial dari teman sebayanya.

Hasil penelitian selama empat dekade secara konsisten telah menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti akselerasi mendapatkan keuntungan secara akademik dan diuntungkan secara sosial atau emosional. Bahkan pengalaman Australia pun mendukung temuan-temuan ini. Penelitian Wahab (2003) menguatkan bahwa kecakapan sosial-personal anak berbakat akademik di tiga SMA di Yogyakarta menunjukkan katagori baik, bahkan ada yang baik sekali sebanyak 6 orang dari 45 orang . Dengan demikian program akeselerasi memberikan nilai positif, kendatipan hingga kini program akselerasi masih menerima kecaman dari berbagai pihak yang belum tentu benar adanya. Namun semuanya itu sangatlah bermanfaat, sehingga dalam penerapannya, semua pihak diharapkan lebih berhati-hati.

Kesimpulan

Program Percepatan Belajar (PPB) atau Program Akselerasi merupakan salah satu alternatif yang dipandang efektif dalam membantu anak berbakat akademik untuk dapat berkembang secara optimal, terlepas dari keterbatasan yang ada di baliknya. Demikian pula pilihan tipe program akselerasi perlu disesuaikan dengan kondisi siswa dan kemampuan lembaga, baik yang berkenaan dengan pengembagan akademik, sosial-emosional, kreativitas, fisik, dan moral. Tentu saja prosedur yang dilalui dalam menerapkan program akselerasi perlu diikuti dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam rekrutmen, sehingga tidak terjadi kontra produktif. Yang sering kali terjadi, bahwa pada prakteknya yang salah teknisnya, namun yang disalahkan justru esensinya. Semoga dengan melakukan kajian kritis terhadap substansi ini, penyelenggaran program akselerasi di Kota Yogyakarta dapat terus ditingkatkan.

Tulisan ini disajikan dan dibahas dalam acara Pembinaan Penyelenggaraan Program Akselerasi di Yogyakarta, pada 14 September 2004, yang diselenggarakan di SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta.

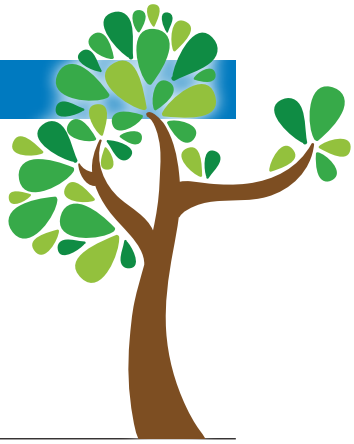

Kontribusi Konseling Sosial-Personal untuk Keberhasilan Studi Anak Berbakat Akademik

PERTAMA-TAMA, dengan rasa *tawadlu*, saya panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan segala karunia, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada terhingga, sehingga saya dapat berdiri di depan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar sebagai jabatan akademik tertinggi. Semoga Allah Swt. selalu meridlai saya dalam mengemban amanah ini, sehingga bermanfaat bagi agama, kehidupan dan kemanusiaan. Amin.

Kedua, salawat dan salam, semoga tetap tercurahkan atas junjungan Nabi Muhammad saw., yang selalu memberikan inspirasi bagi kehidupan karier saya, sehingga saya dapat meneladani dan menerapkan "firman Allah Swt." yang pertama bagi Rasulullah saw. untuk mencerdaskan kita semua.

Ketiga, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi serta selamat datang kepada para hadirin yang mulia yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi saksi langsung bagi pengukuhan guru besar saya, semoga semuanya menjadi amal kebaikan yang mendapatkan pahala dari-Nya. Amin.

Keempat, dengan segala kerendahan hati perkenankan pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul "Kontribusi Konseling Sosial-Personal untuk Keberhasilan Studi Anak Berbakat Akademik."

Hadirin yang berbahagia,
PENDAHULUAN

Pada hakikatnya keberhasilan hidup itu menjadi kebutuhan dan tujuan setiap individu. Apa arti pemberian kehidupan dari Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa, jika kehidupan itu tidak mengantarkannya dapat meraih keberhasilan

hidup. Keberhasilan hidup yang dimaksudkan tidak hanya terkait dengan kehidupan di dunia, melainkan juga kehidupan di akhirat. Menyadari akan pentingnya keberhasilan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, maka Rasulullah saw memberikan nasihat kepada kita untuk selalu berdoa, yaitu *"Rabbanaa aatina fiddun-ya hasanataw wafil aakhirati hasanataw waqinaa 'adzaaban naar* (QS, Al-Baqarah, 2:201). Hal ini diperkuat juga oleh Imam Ghozali dalam kitabnya yang berjudul *"Ihya' Ulumuddin."* yang menekankan akan pentingnya pencarian kebahagiaan dunia dan akhirat secara seimbang.

Jika semua individu menghendaki keberhasilan hidup, maka sudah dapat dipastikan anak berbakat akademik (selanjutnya saya singkat ABA)-pun memiliki impian untuk meraih keberhasilan dalam hidupnya, apalagi potensi dan prestasi akademiknya yang lebih baik dan tinggi daripada temannya yang sebaya. Kitano dan Kirby (1986) menyatakan bahwa ABA adalah anak yang memiliki potensi dan prestasi di bidang akademik tertentu (sains, matematika, ilmu sosial, atau humaniora) secara cemerlang dan istimewa. Agar ABA dapat berkembang secara optimal diperlukan bantuan yang relevan, sehingga anak tersebut dapat berkontribusi secara memuaskan bagi orang lain, masyarakat, bangsa, kemanusiaan, dan agamnya.

Lebih jauh dapat dipahami bahwa ABA pada hakikatnya adalah individu yang memiliki kemampuan menonjol dalam satu atau beberapa bidang akademik, baik itu matematika, sains, ilmu sosial, maupun humaniora. Kemampuan-kemampuan tersebut diperoleh informasinya melalui tes terstandar yang dilaksanakan oleh ahlinya. Kitano dan Kirby (1986) juga mengemukakan bahwa karakteristik umum ABA, di antaranya:

- *long attention span for activities related to a specific academic area,*
- *advanced understanding of concepts, methods, and terminology of the specialized field,*
- *ability to apply concepts from the specialized field to activities in other subjects,*
- *willingness to devote large amounts of time and effort to achieve high standards in a specific academic field*
- *competitiveness in a specific academic area and motivation to do one's best,*
- *rapid learning in the specialized field.*

Atas dasar karakteristik tersebut, maka ABA dapat diindikasikan sebagai individu yang memiliki cakupan konsep yang luas**,** kemampuan menerapkan konsep, keuletan, motivasi, kesanggupan berkompetisi, dan kecepatan belajar, sehingga mereka berpotensi meraih prestasi yang membanggakan.

Selanjutnya, berbicara soal prevalensi anak-anak sekolah, maka berdasarkan pendekatan statistik, jumlah ABA sekitar 1 sampai dengan 5 persen pada kelompok usianya (Davis and Rimm, 1989). Angka ini sangatlah besar, jika diasumsikan jumlah anak usia sekolah di Indonesia sekitar 50 juta, maka jumlah ABA usia sekolah seluruh Indonesia sebanyak 500 ribu s.d. 2.5 juta anak usia sekolah.

Alangkah sungguh ruginya, jika ABA yang berpotensi sukses justru gagal dalam studi dan karier, bahkan gagal dalam mengarungi kehidupan, apakah kehidupan di dunia saja ataupun di akhirat saja, atau kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Dalam era globalisasi dewasa ini, meraih keberhasilan dalam studi, karier ataupun dalam hidup di dunia bukanlah sesuatu yang mudah, pelbagai tantangan yang sifatnya terbuka datang silih berganti. Demikian juga meraih keberhasilan studi ABA selama mengikuti studi dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi tidaklah mudah, karena banyak gangguan dan hambatan baik terkait dengan kegiatan belajar maupun kegiatan di luar belajar, terutama pengaruh negatif media massa yang sangat meluas. Gallagher dan Gallagher (1994) menyatakan bahwa ada kecenderungan anak berbakat menunjukkan ketakutan sosial yang lebih besar daripada anak pada umumnya, terutama takut terhadap perang, kemiskinan, atau perubahan iklim, yang ketakutannya sering kali diwujudkan dalam kanvas melalui lukisannya. Kondisi ini sedikit banyak berdampak terhadap aktivitas belajar ABA.

Pada umumnya masyarakat, bahkan di antara kita berpendapat bahwa ABA yang memiliki keunggulan dan keistimewaan kecerdasan dan bakat pada hakikatnya memiliki peluang yang sangat tinggi untuk meraih keberhasilan belajar, karier, dan hidup. Sebagai individu yang berpotensi unggul, ABA sudah seharusnya mensyukuri potensi itu melalui upaya-upaya optimal, sehingga dengan mudah dapat meraih keberhasilan studi, karier, dan hidupnya. Mensyukuri nikmat Allah Swt. merupakan suatu yang sangat dianjurkan, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S., Ibrahim, 14:7. Namun, pada kenyataannya seringkali dijumpai orangtua dan guru yang mengabaikan potensi anak atau mengelola potensi anaknya secara kurang tepat dan proporsional, yang mengakibatkan anak tidak mampu mengaktualisasikan diri selama pertumbuhan dan perkembangannya. Pada akhirnya, mereka mengalami *underachievement* yang berujung pada kegagalan dalam studi, karier, bahkan mengalami kegagalan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Mari kita perhatikan catatan tentang kegagalan anak berbakat akademik. **Pertama,** Joan Freeman *said:*

that of 210 children in her study, maybe only half a dozen might have been what we might consider conventionally succesful. ... Freeman tracked the development of children who had exceptionaly ability in fields such as maths, art music from 1974 to the present day." (http://spicezee. zeenews.com/articles/ story 71702. htm).

Kegagalan tersebut diduga bahwa ABA tidak diperlakukan secara tepat dan dicuri masa kanak-kanaknya, serta ABA banyak mendapat tekanan dari orangtua dan guru di sekolah, dibandingkan dengan anak-anak sebaya lainnya.

Kedua, pada mulanya seorang anak bernama Donald mampu menunjukkan kemampuan bidang matematika, musik, dan membaca puisi. Pada perkembangan lanjut dia sangat suka dengan bidang astronomi. Namun terjadi fenomena menarik, ketika berada di TK dia mendapat sebutan "anak bodoh" dari gurunya, karena dia tidak mau mengerjakan tugas mewarnai dan suka sekali mengganggu kegiatan teman lainnya. Bahkan, ketika memasuki SD dia menunjukkan perilaku yang menyimpang dan jarang menyelesaikan tugasnya. Melihat kondisi seperti itu, gurunya menyebutnya sebagai anak bermasalah belajar dan perilaku. Mengamati kondisi tersebut, orangtuanya (yang ahli matematika) membawa anaknya ke psikolog. Untuk menghadapi Donald, psikolog memberikan terapi bermitra dengan guru-guru pendidikan khusus, di samping tutor di bidang astronomi. Tutor mengenalkan Donald dengan seorang ahli astronomi yang bekerja di suatu universitas. Pada pertemuan pertama sungguh mengejutkan, karena ahli astronomi sangat terkesan dengan tingkat pemahaman Donald di bidang astronomi. Atas dasar itulah maka Donald ditempatkan di tingkat pertama program studi astronomi dan sungguh mengejutkan bahwa dia mampu menjadi mahasiswa yang berada pada peringkat pertama (Kitano dan Kirby, 1986). Masih banyak contoh ABA yang tidak berhasil studinya yang disebabkan oleh banyak faktor.

Mengapa di antara ABA ada yang tidak berhasil meraih kesuksesan studi, karier, dan hidupnya? Dalam perspektif psiko-sosial, setidak-tidaknya ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang sering muncul sebagai penyebab ketidakberhasilan studi, karier, dan hidup anak berbakat akademik, di antaranya: memiliki komitmen rendah, perfeksionis, kurang terampil berkomunikasi, dan kurang *self-dicipline*. Faktor eksternal yang sering menjadi penyebab di antaranya: orangtua yang kurang perhatian dan kurang kasih sayang serta memaksakan kehendaknya, guru yang mengabaikan potensi anak, kepemimpinan sekolah yang tidak memiliki perhatian dan program khusus untuk ABA, konselor sekolah yang kurang efektif dalam memberikan layanan konseling sosial-personal, masyarakat cenderung memperlakukan sama untuk semua siswa.

Suatu gambaran nyata yang masih terjadi di sekitar kita, bahwa orangtua, guru, dan masyarakat sering berkeyakinan bahwa ABA itu tidak perlu mendapatkan bimbingan dan konseling, karena dianggap memiliki potensi yang cemerlang sehingga ABA dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Di samping itu, ABA tidak perlu diberlakukan secara khusus, karena dia memiliki potensi yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun, pada praktiknya masih cukup banyak dijumpai ABA berprestasi kurang, yang secara statistik diperkirakan sekitar separuh dari jumlah ABA. Sebanyak sekitar 10 s.d. sampai dengan 20 % dari ABA mengalami *drop out* (Davis dan Rimm, 1989). ABA berprestasi kurang cenderung melakukan praktik bunuh diri, terlibat dalam kenakalan, dan sebagainya (Gallagher dan Gallagher, 1994).

ABA yang menunjukkan gejala berprestasi kurang tidak dapat dibiarkan, karena hal itu akan berdampak kurang baik dan menimbulkan rasa frustasi, serta kekecewaan berat bagi semua pihak, baik bagi anak itu sendiri, orangtua, sekolah, maupun masyarakat.

Dampak yang kurang baik tersebut di atas, dalam batas tertentu, dapat menimbulkan kerugian bagi negara karena negara kehilangan orang-orang yang unggul. Padahal, individu yang unggul berpotensi kuat dalam menghasilkan karya besar yang mampu berdampak besar terhadap kesejahteraan rakyat, martabat manusia, dan mengharumkan nama bangsa.

Untuk menfasilitasi ABA berprestasi kurang dapat berkembang secara optimal dan sukses serta mengantisipasi timbulnya kegagalan studi, karier, dan hidupnya di kemudian hari, maka ABA perlu sekali mendapatkan pendidikan yang tepat, terutama layanan bimbingan dan konseling yang relevan.

Hadirin yang berbahagia,
KESUKSESAN ANAK BERBAKAT AKADEMIK

Sternberg (1996), menegaskan bahwa *"the best predictors of success in the real life world are creative, practical, and analitical intelligence"*. Beliau menegaskan bahwa IQ bukan segala-segalanya untuk mengukur keberhasilan hidup. Banyak ditemukan informasi bahwa tes inteligensi terstandar menunjukkan bias, karena anak-anak berkulit hitam dan hispanik (keturunan Spanyol) kurang diuntungkan dari pengerjaan tes itu. Karena itulah Sternberg berusaha untuk mengembangkan tes inteligensi kreatif dan praktikal. Walaupun demikian, ada pandangan lain bahwa IQ dan prestasi belajar memiliki kontribusi yang relatif sedikit terhadap keberhasilan (termasuk keberhasilan studi, karir, dan hidup).

Dewasa ini ada sejumlah tokoh yang menyikapi secara kritis terhadap peran IQ bagi penentu keberhasilan hidup. Terutama tokoh *Emotional Intelligence*

dan *Social Intelligence*, yaitu Colemen (2006). Demikian juga tokoh baru lainnya *Spiritual Intelligence* dan *Emotional Spiritual Quotien* (baca *Intelligence*) oleh Danah Zohal lahir dan berpendidikan di USA. http://en.wikipedia.org/wiki/ Danah_Zohar) dan Ary Ginanjar A. (lahir dan berpendidikan di Indonesia). Berdasarkan banyak hasil studi diyakini bahwa faktor non-intelektual jauh menentukan keberhasilan studi, karir, bahkan hidup seseorang, termasuk di dalamnya komunitas ABA.

Mari kita perhatikan kondisi empirik ABA yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Gambaran ABA pada kenyataannya adalah sangat variatif. **Pertama,** ada ABA yang teridentifikasi sejak dini, mendapatkan perlakuan sejak dini, dan dapat menunjukkan prestasinya sejak dini pula. Yang selanjutnya memperoleh perlakuan, baik berupa pendidikan maupun konseling yang sesuai, sehingga selama masa pertumbuhan dan perkembangannya dapat dilalui secara optimal, yang pada akhirnya mereka dapat menunjukkan prestasi akademik yang optimal juga. Selain studi sukses, mereka dapat meraih karir yang sukses pula, bahkan mereka dapat membangun kehidupan yang sukses pula (setidak-tidaknya di dunia).

Kedua, ada ABA yang terditeksi pada usia dini dan selanjutnya memperoleh pendidikan yang tepat, terutama pengembangan kemampuan akademik. Mereka dapat menunjukkan prestasi akademik yang terbaik, namun sangat disayangkan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Selain itu, ada di antara mereka yang dapat memperoleh pekerjaan, akan tetapi mereka tidak mampu meraih prestasi selama karirnya. Mereka ini sungguh sangat disayangkan, karena prestasi akademiknya tidak memiliki arti penting bagi karirnya dan diyakini mereka memiliki persoalan sosial-personal. Hal ini diperkuat dengan adanya kasus alumni salah satu PTN ternama di Yogyakarta, bahwa si "X" yang lulus dengan IPK 3,9 mengalami kesulitan mencari kerja sebagai akibat dari lemahnya kecakapan berkomunikasi.

Ketiga, ada ABA yang diketahui sejak usia dini, selanjutnya memperoleh perlakuan yang relevan, sehingga mereka dapat meraih sukses dalam studi dan karirnya. Namun sangat disayangkan mereka mengalami kegagalan dalam hidupnya, mereka tidak dapat menikmati kehidupan dalam keluarga yang penuh kedamaian, demikian juga mereka tertolak hidupnya di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka mengalami hidup dalam kesendirian. Kondisi yang demikian menggambarkan bahwa mereka jauh dari hakikat kehidupan yang sukses, padahal mereka memiliki potensi unggul. Kondisi ini juga diyakini bahwa mereka berkecenderungan memiliki persoalan sosial-personal. Hal ini dikuatkan dengan suatu kasus, seorang Guru Besar dan Doktor "Y" dan pernah menduduki posisi dekan yang tidak puas dengan satu gelar Doktor, masih terus

mengejar keahlian di bidang lain, bahkan kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya. Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terarah, bahkan menjadi anak nakal, yang akhirnya keluarga menjadi pecah. Dalam kondisi ini, keberhasilan karir tidak memberikan jaminan keberhasilan hidup dalam keluarga dan masyarakat.

Keempat, ada ABA yang teridentifikasi pada awal pertumbuhannya, namun mereka tidak mendapatkan kelanjutan perlakuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan selama pertumbuhan dan perkembangannya. Akibatnya, mereka mengalami kegagalan dalam studi dan karirnya, bahkan yang lebih parah lagi mereka mengalami kegagalan hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Dalam kondisi yang demikian mereka sungguh mengalami kerugian yang sangat berarti, karena potensi unggul yang dimiliki tidak dapat mengantarkan mereka untuk meraih kesuksesan apapun selama hidupnya. Sebagai contoh, ada seorang anak teridentifikasi sebagai ABA pada usia prasekolah, pada saat di TK dan di SD dia tidak mendapatkan kasih sayang yang sehat dan sangat dilindungi, sehingga terjauhkan dari pergaulan dengan temannya sebaya. Kondisi yang demikian semakin meyakinkan bahwa kegagalan hidupnya dapat disebabkan oleh persoalan sosial-personal.

Mencermati gambaran tersebut di atas, maka dapat dirumuskan bahwa tidak semua ABA, sukses studinya; tidak semua ABA yang berhasil studinya, sukses karirnya; tidak semua ABA yang berhasil studi dan karirnya, sukses hidupnya. Atas dasar itu maka ABA yang berhasil studi, karir dan hidupnya adalah anak yang diyakini memiliki kecakapan sosial-personal yang dapat dikelola secara terus menerus dalam hidupnya, bukan untuk kepentingan studi dan karir saja, melainkan juga untuk kepentingan hidup dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan beragama. Perlunya menguasai kecakapan personal dan sosial memperkuat sabda Rasulullah saw. yang berbunyi, "Saya dibangkitkan Allah Swt. di atas bumi, semata-mata untuk menyempurnakan akhlaq (*Innamaa bu'ist-tu liutammimaa makaarimal akhlaaq – Al- Hadts*)".

Atas dasar itulah, maka keberhasilan studi ABA seharusnya tidak diukur berdasarkan pencapaian prestasi akademik semata, melainkan yang jauh lebih penting adalah kecakapan sosial-personal. Dalam praktiknya, bahwa kelulusan ABA, bahkan penentuan pemberian penghargaan prestasi terhadap ABA, seharusnya tidak cukup ditentukan oleh pemerolehan prestasi akademik semata, melainkan juga oleh integritas kepribadian dan moralitasnya.

Menyadari akan pentingnya kecakapan sosial-personal, maka untuk dapat mengelola kecakapan sosial-personal ABA secara efektif dan efisien selama proses pendidikan, kiranya sangat diperlukan strategi konseling yang relevan.

Hadirin yang berbahagia,
PENTINGNYA KONSELING BAGI ANAK BERBAKAT AKADEMIK

Banyak karakteristik yang dimiliki anak berbakat yang tidak dapat dilepaskan dari kondisi personal dan lingkungan. Namun beberapa karakteristik anak berbakat yang menyangkut sensitivitas yang tinggi, bersifat idealis, adanya dorongan yang tinggi untuk unggul, dan memiliki rasa keadilan yang sangat tinggi sungguh berkonsekuensi terhadap munculnya sejumlah masalah. Silverman (VanTassel-Baska, 1998) mengemukakan sejumlah masalah yang dihadapi anak berbakat sebagai konsekuensi dari karakteristiknya itu, di antaranya:

- *Confusion about the meaning of giftedness,*
- *Feeling of differences,*
- *Feeling of inadequacy,*
- *Relentless self-criticisme,*
- *Increased levels of inner conflict,*
- *Lack of understanding from others,*
- *Unrealistic expectation of others,*
- *Hostility of others toward of the gifted child's abilities.*

Persoalan-persoalan inilah yang menyebabkan pentingnya program konseling di sekolah. Berdasarkan potensi yang dimiliki anak berbakat, maka untuk membantu perkembangannya secara optimal sangatlah diperlukan fasilitasi dan bimbingan orang dewasa lainnya yang secara profesional dapat diwujudkan melalui layanan konseling.

Pentingnya konseling bagi ABA juga diperkuat oleh Silverman (1993) bahwa konseling sangat diperlukan untuk membantu ABA dalam mengatasi sikap masyarakat, dan membantu mereka untuk mencari jalan keluar terhadap sistem pendidikan yang tidak dirancang untuk mengoptimalkan kemajuannya. Dengan demikian, konselor diharapkan mampu memberikan bantuan emosional dan psikologis bagi ABA dan guru-gurunya, serta orang tuanya, untuk melakukan modifikasi program kurikuler dan strategi layanan konseling, sehingga sesuai dengan potensi dan kebutuhan ABA.

Hadirin yang berbahagia,
ISU KONSELING BAGI ANAK BERBAKAT AKADEMIK

Berdasarkan pendapat Kitano dan Kirby (1986), bahwa karakteristik ABA, terutama aspek personal dan sosial dapat dikemukakan sebagai berikut; **pertama,** karakteristik personal terdiri atas (1) akumulasi informasi yang banyak tentang emosi yang belum dibawa ke dalam kesadaran, (2) sensitivitas yang

luar biasa terhadap harapan dan perasaan terhadap orang lain, (3) rasa humor yang tinggi, (4) kesadaran diri tinggi yang diiringi oleh rasa berbeda dengan orang lain, (5) idealisme dan rasa keadilan, yang muncul pada usia dini, (6) perkembangan dini *inner locus of control* dan kepuasan, (7) kedalaman dan intensitas emosi yang luar biasa, (8) harapan yang tinggi terhadap diri sendiri dan orang lain, sering mengarahkan kepada tingkat frustasi yang tinggi dengan dirinya sendiri, orang lain, dan situasi, (9) perfeksionis, (10) kebutuhan yang kuat untuk konsistensi antara nilai yang abstrak dan tindakan pribadi, (11) tingkat pertimbangan moral yang tinggi, (12) keterlibatan dan kepedulian yang dini terhadap pengetahuan intuitif, ide-ide dan fenomena metafisik, (13) keterbukaan terhadap pengalaman di bidang intuisi, dan (14) kreativitas tampak di semua bidang usaha.

Kedua, karakteristik sosial ABA dapat digambarkan sebagai berikut: (1) memiliki motivasi terhadap kebutuhan aktualisasi diri, (2) memiliki kapasitas kognitif dan afektif yang maju untuk konseptualisasi dan pemecahan masalah sosial, (3) memiliki kecakapan kepemimpinan, (4) memiliki kecakapan pemecahan masalah sosial dan lingkungan, dan (5) menunjukkan keterlibatan pada *meta-needs* masyarakat (misalnya, keadilan, keindahan, kebenaran).

Berdasarkan karakteristik ABA tersebut ada sejumlah isu pokok yang terkait dengan kehidupan anak berbakat. Menurut Whitesell (1990), Colangelo (dalam Calangelo and Davis, 1991), Piirto (1994), dan Sisk (2009) bahwa ada 10 isu utama dalam layanan konseling bagi anak berbakat, termasuk di dalamnya ABA, di antaranya:

(1) *divergent thinker:* ABA cenderung jujur terhadap kompleksitas isu, menekankan pada keinginan yang kuat untuk memahami, memperoleh bantuan dalam membangun perasaan diri yang lebih kuat, memperoleh bantuan untuk belajar mendengar sesuatu keadaan yang terfokus, dan membutuhkan dorongan untuk membuat hubungan yang positif.
(2) *excitability:* ABA membutuhkan kemampuan *self- regulation* dan *self control,* memelihara tingkat dorongan berbuat yang nyaman, menemukan kepuasan terhadap upaya-upaya yang kreatif dan yang bernuansa intelektual.
(3) *sensitivity:* ABA memiliki kebutuhan untuk tahu berkenaan dengan orang yang tidak bertanggungjawab akan sesuatu, mengapa seseorang itu memberikan sesuatu kepadanya saat pemberiannya tidak dapat diterima, bagaimana menerima suatu hadiah dari orang lain, menentukan hambatan perasaan, dan bagaimana menentukan jarak dirinya dengan orang lain secara fisik atau mental.

(4) *perseptiveness:* ABA belajar tentang kapan dan/atau bagaimana mempercayai persepsinya sendiri, bagaimana menjadi dapat dipercaya, belajar menghadapi perbedaan pendapat, belajar menghargai perasaan orang lain, dan mencoba untuk menjadi pengamat orang lain atau bermain peran.
(5) *entelechy:* ABA secara positif menunjukkan komitmen secara *intens* kepada orang-orang lain dan ide-idenya, simpatik, empatik, dan terlibat dalam penyebab-penyebab yang bersifat lokal atau global. Sebaliknya, yang bersifat negatif adalah anak berbakat akademik cenderung menunjukkan gangguan personal dan frustasi, terlalu banyak menghadapi tanggung jawab, merasa bertanggungjawab terhadap sesuatu, dan perasaan berdosa.
(6) *self-concept,* merupakan salah satu bidang yang berarti dalam riset konseling bagi anak berbakat. *Self-concept* dipandang sebagai suatu struktur kognitif yang kuat yang mampu memediasi interpretasi dan respons terhadap kejadian dan perilaku yang diarahkan kepada indvidu. Dengan kata lain, *self concept* mencakup persepsi diri dan evaluasi diri. Bagi ABA bahwa yang penting adalah *academic* and *social self-concept.*
(7) *self-esteem* merupakan suatu aspek psikologis yang sangat penting mendapat perhatian tersendiri bagi anak-anak yang diidentifikasi sebagai ABA. Pada awal pertumbuhan dan perkembangan ABA yang sering mendapatkan apresiasi dan rekognisi muncullah *self-esteem.* Kebanggaan ini ternyata tidak selalu diikuti dengan usaha belajar dan bekerja yang sungguh-sungguh. Akibatnya, prestasi menjadi rendah dan berada di bawah potensinya *(underachiever).* Tentunya, yang diharapkan adalah *self-esteem* dapat menjadi *positive motive* untuk belajar dan bekerja lebih baik.
(8) *perfectionisme* pada hakikatnya di satu sisi dapat dianggap sebagai suatu kesulitan psikologis yang ditandai dengan adanya kebutuhan yang berlebihan untuk mencapai dan menjadi yang terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas. Namun, di sisi yang lain *perfectionisme* dapat bernilai positif ketika dapat memberikan kepuasan yang tinggi dan kontribusi kreatif berdasarkan konteksnya. Sifat ini sering muncul pada ABA, karena mereka menyadari akan potensinya yang unggul. Sangatlah beralasan jika mereka tidak hanya selalu ingin menghasilkan karya yang baik, melainkan selalu menjadi yang terbaik. Namun, pada kenyataannya tidaklah semudah itu, karena untuk meraih prestasi terbaik kadang ditentukan oleh faktor non-intelektual dan sosial.
(9) *counseling with parents* sangat diperlukan karena tidak semua orang tua memiliki informasi yang cukup tentang kebutuhan pengembangan ABA. Untuk membantu ABA berkembang optimal, sangatlah diperlukan dukung-

an dari orangtua, baik berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan emosional, stimulasi intelektual, maupun pengalaman edukasional.

(10) *underachievement* merupakan salah satu isu konseling yang sangat penting mendapat perhatian, karena mengabaikan anak *underachievement* berdampak kurang positif dan merugikan sekali terhadap ABA. Untuk menghadapi ABA yang *underachievement* sangat diperlukan pendekatan terhadap guru dan orangtua.

Jika diperhatikan isu-isu tersebut, sungguh kompleks persoalan ABA, sehingga kebutuhan layanan konseling bagi ABA merupakan suatu yang mutlak. Tidaklah sepenuhnya benar bahwa di sekolah-sekolah favorit, kebutuhan konseling tidak terlalu penting dibandingkan dengan kebutuhan konseling di sekolah biasa. Peserta didik yang ada di sekolah favorit, diyakini bahwa ABA-nya dipandang sudah mampu menyelesaikan masalahnya sendiri atau sudah mampu dengan sendirinya untuk memenuhi kebutuhannya yang unik. Padahal, kenyataannya tidak sedikit ABA yang masih memerlukan bantuan yang relevan untuk pengembangan dirinya secara optimal, yang tidak hanya untuk meraih keberhasilan studi, melainkan juga untuk meraih keberhasilan karier dan hidupnya.

Hadirin yang berbahagia, KONSELING SOSIAL-PERSONAL

Silverman (1993) menegaskan bahwa secara keseluruhan tujuan program konseling pengembangan yang didasarkan atas kebutuhan anak berbakat di antaranya:

> *(1) Understanding of their strengths and weaknesses, (2) Self-acceptance and recognition of their limitations, (3) Commitment to nurturing their abilities, (4) Development of internal locus of control, (5) Acceptance of mistakes as learning experiences, (6) Conflict resolution skills, (7) Problem-solving skills, (8) Awareness, understanding, and acceptance of others, (9) Communication skills, (10) Ability to be assertive rather than aggressive, (11) Interpersonal skills, (12) Leadership and decision making skills, (13) Knowledge or stress reduction technique, (13) Ability to view themselves and events with humor.*

Tujuan program konseling pengembangan bagi anak berbakat ini masih bersifat umum, artinya bahwa program konseling mencakup seluruh aspek, mental, fisik, emosi, dan sosial, juga untuk semua jenis anak berbakat. Dalam konteks ini konseling lebih difokuskan kepada konseling sosial-personal dan diorientasikan untuk anak berbakat akademik (ABA).

Konseling sosial-personal pada hakikatnya lebih menitikberatkan pada preservasi perbedaan afektif. Konseling sosial-personal bagi ABA adalah suatu upaya yang sangat strategis untuk pengembangan kehidupan ABA, karena dari semua aspek yang ada dalam kehidupan manusia, aspek sosial-personal merupakan jantung dari kehidupan manusia. Aspek akademik dan karier itu sangat penting pada ABA, namun yang jauh lebih penting adalah aspek sosial-personal, karena aspek sosial-personal memiliki pengaruh yang sangat penting dalam meraih keberhasilan setiap individu, terutama ABA, baik terkait dengan keberhasilan studi, karier, maupun hidupnya.

Berdasarkan hasil studi Gardner (1983) dan Colangelo, Assouline, and Ambroson (1992) yang diperkuat dengan hasil studi Wahab (2003) dinyatakan bahwa kecakapan sosial-personal dapat didefinisikan sebagai kecakapan yang berkenaan dengan pemerolehan kesadaran diri dan kolektif, harga diri *(self-esteem),* pembuatan keputusan, manajemen waktu, resolusi konflik, keterampilan berkomunikasi, penghargaan terhadap perbedaan dan kerja sama, dan keterampilan kepemimpinan, sehingga dapat menunjukkan pribadi yang berintegritas dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan. Untuk memahami lebih jauh tentang kecakapan-kecakapan tersebut, maka dapat diikuti penjelasannya sebagai berikut:

Pertama, memperoleh kesadaran diri dan kesadaran kolektif. Memperoleh kesadaran diri dan kolektif dapat diartikan sebagai kecakapan individu dalam memahami diri sendiri sebagai makhluk pribadi dan sosial *(self and collective-awareness)*. Untuk dapat memahami dirinya sebagai makhluk pribadi, maka individu harus mengatahui karakteristik dirinya, baik yang menyangkut kemampuan, minat, maupun aspirasinya dan keberadaannya sebagai makhluk sosial, maka individu harus menyadari atas norma-norma sosial atau agama yang mengikat dirinya.

Kedua, memperbaiki harga diri *(self-esteem, self-concept, self-worth, self-acceptance,* dan sebagainya). Paling tidak mengenai istilah ini ada sekitar 15 yang berbeda (Strein, 1995). Pada dasarnya rasa harga diri terkait dengan elemen kognitif, afektif, dan evaluatif. Elemen kognitif dapat dikarakteristikkan dengan rasa memiliki kekuatan dan rasa percaya diri, elemen afektif dapat diindikasikan dengan rasa harga diri yang tinggi dan rendah, dan elemen evaluatif dapat diindikasikan dengan apa yang seharusnya seorang lulusan dapat lakukan *(ideal standard),* yaitu sebagai manusia sempurna *(insan kamil),* yang secara fitrah diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang terbaik.

Ketiga, membuat pilihan sehat dan keputusan efektif. Kecakapan ini merupakan kecakapan pribadi yang sekaligus kecakapan sosial, sehingga tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan mengendalikan dirinya sendiri, melainkan

juga kemampuan mengendalikan orang lain, karena pembuatan keputusan seringkali melibatkan orang lain. Adapun kecakapan membuat pilihan yang sehat dan keputusan efektif dapat diidentifikasi melalui kemampuan membuat keputusan, mengidentifikasi sumber informasi, menentukan tujuan, dan mengambil tindakan yang perlu untuk mencapai tujuan. Persoalan hidup adalah persoalan pilihan, karena setiap pilihan seharusnya bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Keempat, manajemen waktu. Kecakapan mengelola waktu sangat memerlukan adanya komitmen diri yang kuat dengan dilandasi tanggung jawab, yang tidak hanya terkait dengan dirinya sendiri, orang lain, melainkan juga dengan Tuhan. Dalam kata hikmat disebutkan bahwa waktu adalah laksana pedang, jika tidak dapat menggunakannya dengan benar, maka waktu itu akan membunuh diri sendiri (*Al-waqtu kas-saiif, fain taqta'hu qatha'aka*). Oleh karena itu, dengan dilandasi tanggung jawab, maka upaya manajemen waktu yang efektif dan efisien merupakan kecakapan yang penting bagi eksistensi setiap individu. Kecakapan mengelola waktu dapat dilihat melalui kemampuan menentukan prioritas, mengelola beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan, mengalokasikan waktu yang seefisien mungkin untuk memenuhi batas waktu, dan bersemangat dalam memulai pengerjaan tugas.

Kelima, kemampuan resolusi konflik. Kemampuan resolusi konflik merupakan kemampuan personal dan kemampuan sosial, karena konflik yang terjadi tidak hanya pada level personal, melainkan juga pada level sosial. Kemampuan resolusi konflik dapat diketahui melalui kemampuan mengidentifikasi sumber konflik, kecakapan resolusi konflik emosi, kecakapan resolusi konflik nilai, dan kecakapan resolusi konflik perilaku. Dalam menghadapi resolusi konflik sangat diperlukan kemampuan negoisasi, kompromi, dan *problem solving* dengan mengedepankan prinsip *win-win solution,* sehingga berdampak sehat dan positif terhadap kedua belah pihak yang terlibat (Sisk, 2009).

Keenam, keterampilan berkomunikasi. Kecakapan ini merupakan kecakapan menggunakan instrumen yang diperlukan dalam membangun relasi sosial, sehingga individu dapat menangkap dan menyampaikan ide kepada orang lain (sebagai pasangannya). Kecakapan ini dapat diindikasikan dengan kemampuan membuat percakapan, kecakapan berkomunikasi secara lisan dan tertulis, dan kecakapan berkomunikasi nonverbal yang berupa simbol, gerakan, dan isyarat sesuai dengan konvensi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang komunikatif. Untuk itu dalam membangun komunikasi perlu berdasarkan prinsip *"khatibun naasa 'ala qadri 'uqulihim"* yang artinya berbicaralah dengan orang lain sesuai dengan kadar kemampuannya, sehingga terhindar dari fitnah.

Ketujuh, respek terhadap perbedaan individual dan kerja sama. Kecakapan ini sangat terkait dengan kepentingan setiap individu yang menghadapi kondisi masyarakat yang plural dan hiterogen. Kecakapan ini dapat ditunjukkan dengan kemampuan menghargai orang lain, bersikap positif terhadap orang lain, dan kesediaan dan kemampuan membantu dan bekerja sama. Kita sangat sadar bahwa perbedaan pendapat tidak harus dipandang secara negatif, melainkan perbedaan seharusnya dipandang sebagai hal yang positif. Sabda Rasulullah saw. berbunyi "bahwa perbedaan di antara ummatku adalah rahmat" (*ihktilaafii ummatii rahmatun*").

Kedelapan, keterampilan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan merupakan keterampilan yang sangat diperlukan oleh setiap individu, terlebih-lebih ketika berada dalam kehidupan berkelompok atau berorganisasi. Dengan demikian, kehadirannya lebih fungsional dan kontributif. Adapun keterampilan kepemimpinan dapat diindikasikan dengan kemampuan mengkoordinasikan kerja teman sebayanya dan bawahannya, mendorong hubungan kelompok yang positif, mengarahkan dan membimbing orang lain, mendelegasikan tugas-tugas kerja, dan memotivasi orang lain.

Kesemua kecakapan tersebut antara satu dan lainnya saling terkait, sehingga bermakna bagi kehidupan ABA, baik sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Sengaja konstruksi katanya dibalik, yaitu "konseling sosial-personal", karena dengan menyebutnya sosial lebih dahulu akan mengundang secepatnya hadir kata personal, yang disambung dengan "-" (*hyphen*) yang mengandung arti bahwa antara aspek sosial dan personal selalu terkait dan tidak dapat dipisahkan, bahkan bersifat kontinum, karena dalam praktik kehidupan kita pada hakikatnya setiap individu tidak bisa dipisahkan dari orang lain.

Hadirin yang berbahagia,
Pilihan Strategi Konseling Sosial-Personal

Pada hakikatnya layanan konseling yang diharapkan sekali untuk pengembangan kecakapan sosial-personal ABA adalah konseling perkembangan (Myrick, 1993). Dengan demikian, layanan konseling bagi ABA lebih cenderung diarahkan untuk tindakan preventif dan pengembangan daripada tindakan kuratif dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan ABA. Fokus layanan konseling perkembangan bagi ABA diyakini memiliki konsistensi yang tinggi dengan arah layanan konseling untuk semua *(Guidance for all)*. Layanan konseling perkembangan memang diperlukan untuk semua, sebagai upaya penting untuk mencegah munculnya persoalan dan menopang pengembangan diri secara optimal, serta untuk mengatasi persoalan yang dihadapi ABA (fungsi sekunder).

Menyadari akan kondisi objektif ABA, bahwa setiap individu itu memiliki keunikan potensi dan kebutuhan, maka layanan konseling sosial-personal dapat dilakukan secara individual atau kelompok (Silverman, 1993), baik di dalam ruang konseling, kelas, maupun di luar ruang konseling atau kelas, bahkan di tempat terbuka lainnya. Yang penting bahwa *setting* konseling yang dipilih didasarkan pada keinginan untuk pencapaian keefektifan layanan konseling. Demikian juga *setting* konseling dapat diterima oleh ABA dengan baik dan nyaman, serta dirasakan aman.

Perrone (Silverman, 1993) menegaskan bahwa anak-anak berbakat dapat dibantu untuk mengembangkan empati, keterampilan sosial, *social assertiveness,* keterampilan kepemimpinan, keterampilan membuat keputusan, dan keterampilan evaluasi diri melalui konseling kelompok dan konseling individual. Di samping itu, dikemukakan bahwa anak berbakat dapat dibimbing, bagaimana membangun persahabatan baru dan siap menjadi teman baru bagi anak lain, bagaimana sensitif dengan orang lain, dan bagaimana mengembangkan kemampuan mengkritik yang konstruktif. Hal ini sangat penting bagi anak berbakat, karena mereka dapat menghindarkan diri dari kecenderungan untuk hidup yang egosentris dan individualis. Kondisi inilah yang sangat sering dikhawatirkan oleh kebanyakan orang. Jangan sampai mereka menyikapi nikmat menjadi laknat, melainkan menyikapi nikmat menjadi rahmat dan manfaat.

Berdasarkan target layanan konseling, strategi konseling dapat diwujudkan dengan strategi konseling kelompok dan strategi konseling individual. **Pertama,** untuk menerapkan konseling kelompok, biasanya diperlukan suatu topik yang menjadi instrumen penting untuk menciptakan diskusi yang hidup. Topik itu ada yang bersifat terstruktur dan terbuka. Topik yang bersifat terstruktur cenderung digunakan lebih mudah, terutama dirasakan oleh konselor pemula. Konselor tinggal memilih tema-tema penting yang tersedia untuk konseling ABA, misalnya topik yang diperlukan, di antaranya: memahami keberbakatan, harapan pribadi *(self-expectation),* harapan orang lain, merasa berbeda, tekanan teman sebaya, sensitivitas, toleransi, struktur keluarga dan tanggung jawab terhadap orang lain, dan latihan kepemimpinan.

Dalam mempraktikkan konseling kelompok yang menggunakan topik-topik yang telah tersedia, diawali dengan memilih salah satu topik yang dipandang paling menarik dan relevan dengan kebutuhan ABA saat itu. Setelah suatu topik dipilih, semua peserta didik (konseli) *sharing* pengalaman dan pengetahuannya untuk menangani masalah itu. Dalam situasi seperti itu semua konseli memperoleh pengalaman yang berarti, sehingga pada saatnya konseli dapat menerapkannya untuk mengatasi persoalan itu, tanpa bergantung pada orang lain. Konseling kelompok juga bermakna untuk menumbuhkan rasa respek

dan peduli di antara mereka. Penentuan kelompok bersifat dinamis, sepanjang kelompok itu dapat bekerja secara produktif, maka kelompok itu dapat dipertahankan terus. Jika pada saatnya terjadi penurunan efektivitas kelompok, maka perlu dilakukan *re-grouping* untuk menciptakan iklim yang lebih segar dan memperkaya pengalaman konseli dalam menghadapi masalah dan mengembangkan potensi atau memenuhi kebutuhan.

Silverman (1993) menegaskan ada salah satu persoalan yang cukup serius pada anak berbakat, bahwa konseling preventif bagi anak berbakat dapat berlangsung dengan baik, jika mereka itu merasa aman. Padahal, mereka seringkali memiliki rasa kurang aman secara emosional dalam kelompok yang heterogen. Mereka sering kali menunjukkan *concern* yang berbeda, sehingga konsekuensinya bahwa kelompok itu tidak akan mampu mengundang semua konseli untuk berkontribusi secara optimal, karena terbatasnya pengalaman untuk setiap topik yang tersedia. Kendatipun mereka tidak dapat berkontribusi penuh terhadap setiap problem, dalam batas tertentu sangat diharapkan dapat meng-*encourage* untuk ditemukan cara yang lebih baik dalam mengatasi perbedaan, yang memang tidak dapat diabaikan dalam setiap kelompok. Kata Alfred Adler bahwa *man is unique*. Dalam kondisi yang demikian memang perlu ditumbuhkan rasa respek antarindividu untuk meningkatkan produktivitas dalam konseling kelompok. Dalam konteks memenuhi kebutuhan ABA untuk pengembangan kecakapan sosial-personal, sebagaimana yang dilakukan oleh Wahab (2003) melalui studinya, maka teknik yang efektif digunakan untuk konseling perkembangan adalah bermain peran, *brainstorming,* pemberian tugas, dan studi kasus.

Kedua, untuk strategi konseling individual, Silverman (1993) menyatakan bahwa di balik keunggulan potensi ABA, ternyata dijumpai juga sejumlah kasus di luar dugaan kita. Ada yang mengekspresikan bahwa saya berharap saya sudah mati. Kondisi yang demikian tidaklah bijak jika dinilai bahwa konseli itu berusaha menunjukkan perilaku untuk menarik perhatian. Berbagai keluhan yang muncul di antara anak berbakat sangat memerlukan respons yang cepat, tanpa ditunda-tunda baik dari orangtua, teman sebaya, guru, maupun dari konselor, sehingga terhindar dari eskalasi sampai pada upaya bunuh diri, terjun ke dunia kenakalan, kehilangan minat untuk berprestasi, memisahkan diri dari keramaian, dan sebagainya. Dalam situasi yang seperti ini ABA diharapkan sekali tidak dibiarkan hidup dalam kesendirian dan perlu terus mendapatkan pendampingan yang intensif.

Di samping fenomena tersebut, ada beberapa tanda bahwa konseling individual itu sangat diperlukan terkait dengan adanya kompetisi yang intens, adanya isolasi sosial, terjadinya alienasi dari keluarga, ketidakmampuan meng-

ekspresikan atau mengontrol marah, manipulasi yang berlebihan, berprestasi kurang yang berlebihan, depresi atau kebosanan yang terus menerus, adanya bukti *abuse*, dan pengalaman traumatik di saat kini atau hilangnya orang yang paling dicintai.

Anak berbakat usia dini lebih suka dan lebih senang diberi layanan konseling melalui teknik terapi bermain, karena melalui permainan seperti wayang, boneka, dan dialog serta aktivitas bersama-sama terapisnya, mereka dapat memperoleh kesempatan yang cukup untuk mengekspresikan frustasi dan konflik dalam dirinya. Bagi anak berbakat kelompok remaja dan dewasa dapat diberi tindakan layanan konseling melalui wawancara konseling yang tampak lebih dewasa. Konselor untuk ABA dapat bekerja lebih produktif dan dapat terhindar dari misinterpretasi terhadap wawancara konselingnya, jika konselor itu mengenal jati diri anak berbakat secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan konselor terus hidup bersama-sama mereka dalam kesehariannya.

Konseling individual memang sangat diperlukan bagi anak berbakat untuk mengatasi persoalan dirinya, terutama berkenaan dengan pengembangan diri *(self-development)* untuk aspek personal ABA. Konseling individual diharapkan sekali dapat membantu ABA dalam memperoleh kesadaran diri dan kolektif *(self and collective awaraness),* belajar keterampilan resolusi konflik, belajar keterampilan mengelola waktu, belajar membuat keputusan, mengatasi isu yang ada, mengembangkan kemandirian, dan mengaktualisasikan potensi dirinya. Dengan kata lain, konseling individual seharusnya dipandang sebagai suatu cahaya positif dan diupayakan secara aktif untuk tindakan preventif dan pengembangan daripada tindakan rehabilitatif. Dalam konteks memenuhi kebutuhan ABA, terutama untuk pengembangan kecakapan sosial-personalnya, Wahab (2003) melalui studinya telah menemukan keefektifan konseling individual melalui teknik pemberian tugas, wawancara konseling, dan *game,* terutama dalam pengembangan kesadaran diri dan kolektif, perbaikan *self-concept,* latihan mengelola waktu, dan latihan membuat keputusan.

Pilihan tentang strategi konseling kelompok atau individual sangatlah tergantung pada tema dan topik konseling, selain tergantung pada kondisi konseli, konselor atau lingkungan yang menyertai. Namun semuanya ditentukan oleh kecakapan konselor dalam membuat keputusan tentang strategi yang tepat untuk memberikan bantuan yang terbaik bagi pengembangan diri konseli secara optimal. Di sinilah seorang konseli diuji keprofesionalannya, sehingga kehadirannya sangat berarti bagi ABA.

Hadirin yang berbahagia,
SIMPULAN

Kesuksesan hidup merupakan impian setiap individu, tidak terkecuali ABA, apalagi mereka memiliki potensi dan prestasi unggul. Siapapun yang mendapat karunia dan kenikmatan luar biasa dari Allah Swt., sudah menjadi kewajibannya untuk mensyukuri dengan menjaga dan mengembangkan potensinya agar dapat diwujudkan secara optimal, sehingga dapat mengantarkan keberhasilan dalam studi, karier, dan hidupnya.

Pada kenyataannya bahwa tidak semua ABA dapat mengaktualisasikan keunggulan potensinya itu dengan baik, sehingga mereka gagal dalam studinya, atau dalam karier, bahkan dalam hidupnya. Untuk mengantisipasi kegagalan itu, maka kehadiran konseling sangatlah diharapkan, terutama konseling sosial-personal. Dengan konseling sosial-personal, diharapkan dapat menjadikan ABA mampu menunjukkan eksistensinya sebagai individu yang memiliki *self identity* yang jelas, *self concept* yang positif, dan *self-esteem* yang terpuji, di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Demikian juga ABA dapat menunjukkan respek kepada orang lain dan diterima oleh orang lain sebagai insan selalu memberikan manfaat.

Konseling sosial-personal bagi ABA seharusnya lebih diorientasikan untuk peningkatan dan perbaikan aspek personal dan sosial ABA, terutama terkait dengan kecakapan *self and collective awaraness,* perbaikan konsep diri dan harga diri *(self-concept and self-esteem),* kecakapan membuat keputusan, kecakapan mengelola waktu, kecakapan berkomunikasi, kemampuan resolusi konflik, respek kepada orang lain, dan kecakapan kepemimpinan. Adalah diyakini bahwa sekiranya layanan konseling sosial-personal ini dilakukan dengan baik dan komprehensif dengan teknik relevan, pasti mampu mengantarkan keberhasilan ABA dalam studi, karier, dan hidupnya. Namun, di balik itu perlu diantisipasi berbagai faktor yang mengganggu keefektifan layanan konseling guna menghindari kegagalan ABA dalam hidupnya.

Pendekatan konseling yang dipandang lebih efektif bagi ABA adalah konseling perkembangan, karena konseling perkembangan lebih tepat untuk pemenuhan kebutuhan dan pengembangan potensi ABA, sehingga dapat dicapai pertumbuhan dan perkembangan ABA secara optimal.

ABA adalah *human being,* baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya, teknik konseling yang dapat dipilih adalah menggunakan konseling kelompok dan konseling individual. Pemilihan konseling kelompok atau individual untuk pengembangan ABA, sangat tergantung pada tema-tema dan konteks lainnya, misalnya jumlah ABA, karakteristik ABA, kondisi lingkungan, dan tingkat keahlian konselor. Apapun teknik yang dipilih,

konselorlah yang menjadi penentu dalam pemilihan strategi konseling dengan segala justifikasinya. Yang penting bahwa konselor dalam bekerja diharapkan bertumpu pada kode etik yang ada dan diyakini.

Pemberian layanan konseling sosial-personal kepada ABA memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena dapat mengupayakan ABA mengaktualisasikan diri secara optimal, dan menjadikan diri ABA dapat eksis sebagai hamba Tuhan (personal) dan *khalifah* di atas bumi (sosial). Dengan begitu, ABA diharapkan sekali mampu menggapai keberhasilan studi, karir, dan hidupnya, karena ABA sudah dapat menguasai diri dan lingkungannya secara produktif. Walaupun pada kenyataannya gangguan dari dalam yang berupa dorongan, hasrat, dan perasaan yang kurang positif, ditambah dengan ancaman, gangguan, dan tantangan dari luar, yang berupa pergaulan bebas, pengaruh media massa yang kurang sehat, dan konflik sosial yang semakin meluas semua dapat diatasi. Diyakini bahwa dengan adanya komitmen secara vertikal, internal, dan horisontal yang terbangun secara terpadu, maka segala persoalan yang menghalangi pencapaian kesuksesan hidup ABA, insya Allah dalam batas tertentu dapat dihindari dan diatasi.

Hadirin yang berbahagia,
PENUTUP

Akhirnya, sebagai hamba yang lemah dan sadar akan eksistensi diri saya yang memiliki ilmu sangat sedikit (*wamaa utiitum minal-'ilmi qaliila*), maka perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur ke hadlirat Allah swt yang telah menganugerahkan karunia, nikmat, taufik, dan hidayah-Nya, terutama berupa kemampuan, kekuatan, dan kemauan kepada saya, sehingga saya dapat meraih Guru Besar, sebagai jabatan akademik tertinggi di tengah-tengah kesibukan saya. Untuk mensyukuri nikmat yang besar itu, insya Allah saya berusaha terus untuk menjaga komitmen dalam pengembangan akademik di masa-masa mendatang untuk menawarkan solusi dalam menghadapi isu-isu pendidikan pada umumnya, di samping isu-isu Pendidikan Khusus, Bimbingan dan Konseling, dan Pendidikan Anak Berbakat pada khususnya.

Selanjutnya, saya ingin sekali menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang telah mengeluarkan SK kenaikan jabatan Guru Besar. Demikian juga Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional yang telah melakukan penilaian angka kredit saya, sehingga dapat menetapkan bahwa saya berhak mendapatkan jabatan Guru Besar. Yang tidak kalah pentingnya adalah Tim Penilai angka kredit, Tim *review* karya ilmiah, dan Tim tujuh dan Senat UNY yang telah menyetujui bidang keilmuan dan pengusulan kenaikan jabatan Guru Besar, serta Tim

Penyelaras Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar yang telah berkontribusi dalam proses pengusulan Guru Besar saya, di antaranya Prof. Dr. Wuradji, MS, Prof. Dr. A. Gafur, Prof. Dr. Siti Partini, Prof. Dr. Nurfina Aznam, Apt., Prof. Dr. Haryadi, dan Prof. Dr. Sodiq A. Kuntoro. Karena itu, saya menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi kepada beliau-beliau, sehingga kami bisa menyampaikan naskah pidato ini lebih *readable* dan komunikatif.

Demikian juga, terima kasih yang tiada terhingga saya sampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan, dosen (teman sejawat), dan karyawan pada tingkat universitas, fakultas/lembaga/PPs, jurusan/prodi, dan unit-unit lainnya, terutama Fakultas Ilmu Pendidikan dan Jurusan PLB, serta para senior dan sejawat WSPK (Wahana Studi Pengembangan Kreativitas), demikian juga segenap pimpinan Ormawa pada tingkat universitas, fakultas, dan jurusan, atas dukungan dan kontribusinya yang tiada terhingga, sehingga saya dapat meraih jabatan akademik tertinggi. Mudah-mudah dapat bermanfaat bagi mereka semua. Amien.

Kontribusi yang tidak kalah pentingnya, kiranya dari rasa lubuk hati yang mendalam saya menunjukkan pengakuan bahwa keberhasilan ini juga tidak dapat lepas dari bimbingan, asuhan, dukungan, dan fasilitasi semua senior, guru, dan pembimbing saya yang patut kami ungkapkan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sejak saya memasuki karier di UNY hingga sekarang. Kiranya dari lubuk hati yang mendalam, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang telah diberikan kepada saya bermanfaat dan mendapatkan balasan pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Swt.

Disadari sepenuhnya, bahwa pencapaian jabatan akademik saya tidak dapat lepas dari bimbingan promotor saya ketika meraih gelar Doktor (Dr.) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, yaitu Prof. Dr. Rochman Natawijaya, Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. dan Prof. Dr. H. Dedi Supriyadi, M.Pd. Demikian juga bimbingan dari *academic advisor* dan beberapa dosen yang berkontribusi signifikan ketika saya meraih gelar Master of Art (MA) di the *University of Iowa,* USA, di antaranya Prof. David Shepardson, Ph.D, Prof. Paul Retish, Ph.D, Prof. Albert Hood, Ph.D., Prof. Michale Collangelo, Ph.D., dan S. Assouline, Ph.D, dan ketika meraih gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) di IKIP Bandung (UPI), yaitu Prof. Dr. Conny R. Semiawan, Prof. Dr. H. Rochman Natawijaya, dan Prof. Dr. H. Muh. Djawad Dahlan. Demikian juga ketika saya mendapatkan bimbingan skripsi untuk meraih gelar sarjana (Drs), di IKIP Bandung dari Prof. Drs. H. Much. Amin dan Prof. Dr. H. Abin Syamsudin Makmun, MA., serta bimbingan bidang akademik dan kepemimpinan dari Prof. Drs. H. Numan Sumantri, (M.Sc.), sebagai Rektor IKIP Bandung saat itu. Kepada se-

mua promotor, *academic advisor,* pembimbing dan seluruh dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya selalu berdoa, semoga apapun yang diberikan kepada saya selama proses bimbingan dan pendidikan merupakan ilmu yang bermanfaat yang terus mengalirkan pahala yang tiada terhingga dan tiada terbatas waktunya. Demikian juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu selama studi di jenjang S1, S2, dan S3, yang tidak jarang saya merepotkan. Semoga jabatan akademik tertinggi ini juga menjadi bagian dari kebahagian mereka, karena mereka telah mewarnai bentukan kepribadian saya yang teguh, ulet, nekat (dalam segala keterbatasan), dan sabar menunda kesenangan, sehingga dapat meraih capaian seperti sekarang ini.

Selain itu, semua dosen, guru-guru, dan sahabat-sahabat saya yang selalu siap *sharing* apa saja dengan saya ketika belajar di Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) Surabaya; belajar di Pendidikan Guru Agama Atas Negeri (PGAN) Mojokerto, Jatim; belajar di Pendidikan Guru Agama Pertama (PGAP) Pancasila Kesamben Jombang, Jatim; belajar di Madrasah Ibtida-iyah Al-Islamiyah Blimbing Kesamben Jombang, dan belajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Karangprabon, Blimbing, Kesamben, Jombang yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada saya, sehingga saya bisa *academically literate* dan memiliki pengetahuan dasar dan keterampilan organisasi. Semoga semuanya itu menjadi amal saleh dan ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Demikian juga mereka mendapatkan balasan dari Allah Swt.) yang tiada terhingga.

Pencapaian karier akademik saya pada hakikatnya tidaklah cukup hanya bertumpu atas pengalaman studi saja, melainkan juga pengalaman profesional, organisasi, dan birokratik bidang kependidikan dan nonkependidikan, dan kemasyarakatan. Karena itulah dari hati yang paling dalam dengan rasa *tawadlu* saya ingin menghaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para senior, mitra kerja dan kolega ketika saya aktif di Jakarta, bertugas sebagai Pembantu Rektor I dan Rektor UNY hingga sekarang. Semoga segala amal yang telah diberikan selama ini kepada saya, mendapatkan balasan dari Allah Swt. dengan pahala yang tiada terhingga.

Di samping itu, pada kesempatan yang sangat terhormat ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi kepada segenap para PR I (ketika itu saya pernah menjadi koordinator PR I) dan para Rektor ALPTK; Para Rektor PTN, (Ketika saya menjadi Bendahara Umum SNMPTN bagi PTN seluruh Indonesia dan Bendahara MRPTN); Rektor PTN, Kopertis V dan VI, dan beberapa Rektor PTS di DIY dan Jateng (di mana sekarang saya masih dipercaya sebagai Ketua BKS PTN-Kopertis se-DIY dan Jateng), Gubernur Provinsi DIY dan Bupati/Walikota se-DIY dan beberapa instansi terkait baik militer mau-

pun sipil yang telah berkontribusi bagi kelancaran saya dalam mengemban tugas kepemimpinan akademik di UNY.

Yang juga tidak kalah pentingnya adalah pada kesempatan yang baik ini, saya ingin sekali menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pengurus organisasi profesi, yaitu Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PB ABKIN) dan Pengurus Pusat Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia (APKHI). Melalui aktif dalam organisasi profesi, saya tidak hanya mendapatkan manfaat untuk meng-*update* keilmuan saya, melainkan juga dapat tetap menjaga kolegialitas sesama profesi, sehingga dapat *sharing* pengetahan dan pengalaman yang berharga bagi pengembangan profesi.

Selanjutnya saya ingin sekali menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada segenap pengurus, terutama para sesepuh dan senior di bidang organisasi kemasyarakatan, baik di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DIY, Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Wilayah DIY, Pengurus Masjid Syuhada, Yogyakarta, dan Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Wilayah DIY. Dari organisasi-organisasi inilah saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga bagi pengembangan kepemimpinan saya di manapun saya memainkan peran kekhalifahan.

Demikian juga saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman wartawan atau media massa, baik cetak maupun elektronik, yang telah berkolaborasi secara sinergis dalam mentransformasikan gagasan dan pemikiran saya ke masyarakat.

Hadirin yang berbahagia,

Saya sangat menyadari bahwa kehidupan saya tidak pernah bermakna, jika tidak mendapatkan uluran doa, pendidikan, bimbingan, asuhan, dukungan, dan pengertian dari semua keluarga saya. Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan puji syukur, rasa hormat dan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ibunda Maimunah *(almarhumah)* yang telah meninggalkan saya untuk selama-lamanya ketika saya berusia sekitar satu tahun, Ayahanda Abdul Wahab (*almarhum*) yang telah menghadap ke hadirat Allah Swt. ketika saya mengawali tugas di UNY tahun 1987. Demikian juga ibu Supiah (*almarhumah*) yang menemani ayahanda sepeninggal ibu kandung saya, yang telah menghadap ke hadlirat Allah swt bulan Ramadlan 1431 H, yang baru saja kita lewati, semoga almarhum dan almarhumah wafat dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan tempat terhormat di sisi-Nya. Amin

Selanjutnya dengan rasa rendah hati, saya ingin menyampaikan terima kasih, penghargaan yang sangat tinggi, dan rasa hormat kepada kedua mertua, Abah H. Abdullah (almarhum) yang telah menghadap ke hadirat-Nya pada 1988

dan Ibu Hj. Siti Washifah yang keduanya telah menerima saya sebagai menantu dan bagian keluarga besarnya, yang di balik itu tidak lepas dari seorang nenek, Ibu Nyai Sa'diyah, yang biasa saya sebut mak Aji Sa'diyah (Istri mbah KH. A. Wahab Hasbullah). Beliau-beliau juga selalu mengalirkan doa untuk kesuksesan dan kebahagiaan hidup saya sekeluarga. Saya selalu berdoa, semoga almarhum dan almarhumah selalu berada di sisi-Nya, diampuni segala dosa-dosanya, dan diterima segala amal kebaikannya, yang akhirnya dapat diterima di *jannatun na'iim,* dan semoga Ibunda Hj. Siti Washifah yang sekarang masih dapat bersama-sama kita di forum terhormat ini, selalu diberikan kesehatan dan kemampuan untuk terus meningkatkan ibadahnya, sehingga pada saatnya sekiranya dipanggil ke hadapan-Nya dalam keadaan *husnul khaatimah*. Amin.

Selanjutnya, saya juga ingin sekali menyampaikan ungkapan terima kasih kepada kedua kakak saya sekeluarga, Cak M. Abbas dan Cak Amin dan kedua adik saya sekeluarga Syamrodin dan Hafidun. Demikian juga kakak dan adik ipar saya, Mbak Mahmudah, Mas Mahmud, Mas Fauzi, Mbak Faiqah, Mbak Nahdziyah, Mbak Wahyuni (Dra., M.Pd.), Mas Abd. Rahman (Ir.), Dik Fathurahman (Ir.), Dik Ni'mawati (Dra.), Dik Rahmawati (Dra.), dan Nurul Hidayah, (SE.) beserta suami dan istri serta anak-anak dan cucu-cucunya, karena doa, dorongan, dan kebersamaan selama ini telah mampu mengantarkan saya untuk meraih cita-cita dalam hidupku.

Akhirnya, yang paling penting saya sampaikan adalah ungkapan rasa bahagia, bangga, dan senang yang tiada terhingga yang menggambarkan penghargaaan yang sangat tinggi dan banyak terima kasih kepada isteriku tercinta Anna Royana, B.A., ananda tersayang Erna Ashlihah Rochmat (S.Ked.), Muh. Faishal Rahman Rochmat, dan Muflihatul Baroroh Rochmat, yang telah berkorban banyak dalam menyertai perjalanan hidup dan karier saya dengan tiada hentihentinya berdoa, mendorong, dan mendukung suami dan ayahnya untuk terus maju melalui belajar dan berkarya, sehingga dapat bermanfaat bagi keluarga, umat, agama dan bangsa, serta kemanusiaan. Pengorbanan dan perjuangan dik Anna tercinta dan Ananda tersayang dengan siap ditinggal belajar dan bertugas di luar kota dan di luar negeri, telah mendapatkan jawaban sekarang. Jabatan akademik tertinggi, guru besar, hari ini telah ayah raih dengan jalan yang lancar tanpa ada halangan yang berarti. Semuanya itu berkat doa dan bantuan semua pihak, terutama doa isteri tercinta dan ananda tersayang. Ayah juga selalu berdoa, semoga isteri dan ananda tercinta terus setia menemani Ayah untuk menjaga amanah yang sangat berat ini, sehingga Ayah terus dapat berkarya yang lebih banyak dan lebih bermanfaat. Mari kita selalu berdoa, semoga tetap terjaga hati kita semua, sehingga jabatan akademik tertinggi ini dapat menambah kebaikan dan kemuliaan keluarga**.** Demikian juga, ayah dan ibu selalu berdoa,

semoga ketiga ananda tersayang menjadi anak saleh dan salehah yang selalu mendoakan kedua orangtua, dan terus rajin meraih cita-cita tertinggi, sebagai hamba Allah ber-*akhlaqul karimah*, ahli ilmu dan suka beramal, sehingga dapat berguna bagi agama, keluarga, bangsa, dan kemanusiaan Amin.

Hadirin yang berbahagia,

Akhirnya, perkenankan saya mengucakan terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan kesabaran Ibu, Bapak, dan saudara sekalian untuk mengikuti pembacaan naskah pidato pengukuhan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, jika selama proses pembacaan naskah pidato pengukuhan ini dijumpai hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Swt. mengampuni dan meridai kita semua. Amin.

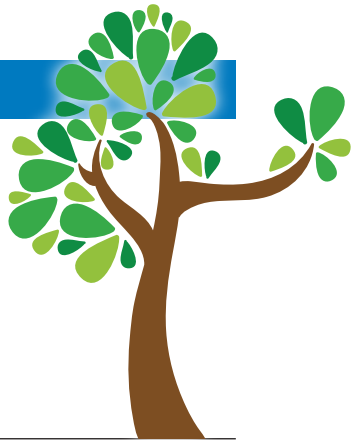

Konseling Bagi Anak Berbakat Akademik

Pendahuluan

Secara statistik jumlah anak berbakat akademik (ABA) sangatlah besar di Indonesia. Di antara mereka ada yang telah berhasil mewujudkan potensinya, sehingga dapat berprestasi optimal, namun sebagian besarnya cenderung belum berprestasi kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan penampilan sejumlah anak SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa di antara sejumlah PT dengan prestasi secara menakjubkan yang tidak hanya pada tingkat nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Jika dicermati lebih jauh, maka jumlah anak yang berprestasi masih jauh dari angka yang seharusnya. Kekurangberhasilan itu, tidak hanya disebabkan oleh persoalan kompleks yang dihadapi bangsa Indonesia, melainkan juga sistem pendidikan yang diterapkan belum banyak memberikan fasilitasi bagi perkembangan anak berbakat.

Di sisi lain arus globalisasi sangat menghendaki kemampuan kompetitif dalam berbagai hal di antara setiap warga Indonesia. Untuk dapat mengantarkan bangsa Indonesia di masa depan yang lebih prospektif dan mampu bersaing secara terbuka, maka sangatlah diperlukan sistem pendidikan yang mampu membangun keunggulan *(excellence)*. Untuk membangun keunggulan tersebut, bangsa Indonesia bertumpu pada individu-individu yang memiliki potensi dan prestasi cemerlang, salah satunya adalah ABA.

Hingga kini berbagai upaya telah dilakukan dalam membangun keunggulan, di antaranya melakukan reformasi hukum di bidang pendidikan, manajemen pendidikan, proses pembelajaran, kurikulum, dan sistem evaluasi. Namun pada kenyataannya semua upaya reformasi di bidang pendidikan belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Salah satunya adalah kinerja Bimbingan dan Konseling (BK) belum mampu menampilkan prestasi yang membanggakan terutama dalam memberikan pelayanan bagi anak berbakat akademik. Anak

berbakat akademik tidak hanya membutuhkan layanan BK tidak hanya untuk pengembangan potensinya, melainkan juga untuk mengatasi persoalan yang dimilikinya.

Berdasarkan pengalaman negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat, layanan bimbingan dan konseling (BK) merupakan suatu jantung proses pendidikan yang ternyata mampu menunjukkan kontribusi dalam mengakselerasi kemajuan pendidikan, yang pada gilirannya mampu membangun keunggulan.

Karakteristik Anak Berbakat Akademik

Anak Berbakat Akademik (ABA) pada hakekatnya dapat dikenali melalui pemahaman tentang karakteristik kebutuhannya. Kitano and Kirby (1986) menegaskan bahwa karakteristik ABA di antaranya: (1) memiliki rentangan perhatian yang lama dikaitkan dengan bidang akademik tertentu, (2) memiliki pemahaman konsep, metode, dan terminologi pada tingkat lanjut untuk bidang tertentu, (3) mampu menerapkan konsep-konsep dari bidang-bidang tertentu ke kegiatan-kegiatan dalam bidang lainnya, (4) adanya keinginan untuk mencurahkan sebagian besar waktu dan usahanya untuk mencapai standar yang tinggi dalam suatu bidang akademik tertentu, (5) adanya kemampuan kompetitif dalam bidang akademik tertentu dan motivasi untuk berbuat yang terbaik, (6) kemampuan belajar cepat dalam bidang studi tertentu, dan (7) memiliki keajegan dan dikendalikan oleh tujuan dalam bidang tertentu.

Karakteristik-karakteristik tersebut berkonsekuensi pada kebutuhan-kebutuhannya. Kitano and Kirby (1986) menjelaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi, di antaranya: (1) mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kompetensi fundamental, perbendaharaan teknis, dan pengetahuan lanjut dari suatu bidang yang dimilikinya, (2) berinteraksi dengan para pemimpin dalam bidangnya, (3) menerapkan pengetahuannya untuk penyelesaian masalah yang mutakhir, (4) mengkomunikasikan pengetahuannya, dan (5) mengembangkan kemampuan dalam bidang akademik dan sosial lainnya.

Apabila dikaitkan dengan kepentingan konseling maka VanTassel-Baska (1998) menegaskan bahwa karakteristik ABA dapat dikelompokkan menjadi: (1) kluster pertama, *aspek personal-sosial*: anak berbakat cenderung memiliki sensitivitas yang tinggi, rasa keadilan, dan perfeksionisme, (2) kluster kedua, *aspek akademik*: anak berbakat cenderung menunjukkan kemampuannya dalam memanipulasi sistem simbul yang abstrak, kecepatan retensi yang tinggi, kecepatan belajar dan menguasai lingkungan; dan (3) kluster ketiga, *aspek karir:* anak berbakat cenderung memiliki kemampuan melakukan beberapa hal dengan baik (multipotensialitas), minat yang bervariasi dan beragam, dan lokus kontrol internal yang tinggi (kemandirian). Variasi dan penonjolan sifat

dan kemampuan ABA sangat dipengaruhi oleh kondisi dan lingkungan yang melingkupinya.

Pentingnya Konseling Bagi Anak Berbakat

Banyak karakteristik yang dimiliki anak berbakat. Namun beberapa karakteristik anak yang menyakut sensitivitas yang tinggi, idealis, dorongan yang tinggi untuk unggul, dan rasa keadilan yang sangat tinggi sungguh berkonsekuensi terhadap sejumlah masalah. Silverman (Van tassel-Baska, 2001) mengemukakan sejumlah masalah, di antaranya: (1) kebingungan tentang makna keberbakatan, (2) perasaan akan perbedaan, (3) perasaan akan ketidaktepatan, (4) kritik terhadap diri sendiri, (5) tingkat konflik internal yang meningkat, (6) kurangnya pemahaman diri dari orang lain, (7) harapan dari orang lain yang tidak realistik, dan (8) *Hostility* orang lain terhadap kemampuan anak berbakat.

Persoalan-persoalan inilah yang menyebabkan pentingnya program konseling di sekolah. Di samping itu bahwa berdasarkan potensi yang dimiliki anak berbakat, maka untuk perkembangan anak secara optimal sangatlah diperlukan fasilitasi dan bimbingan orang dewasa lainnya yang secara profesional dapat diwujudkan melalui layanan konseling.

Perlunya konseling bagi ABA juga diperkuat oleh Silverman (1993) melalui pendapatnya bahwa konseling sangat diperlukan untuk membantu anak berbakat akademik dalam mengatasi sikap masyarakat, di samping membantu mereka untuk mencari jalan keluar terhadap sistem pendidikan yang tidak dirancang untuk mengoptimalkan kemajuannya. Dengan demikian konselor diharapkan mampu memberikan bantuan emosional bagi ABA dan guru, bahkan orangtuanya untuk melakukan modifikasi kurikuler dan strategi layanan konseling, sehingga sesuai dengan potensi dan kebutuhan ABA.

Isu Konseling Bagi Anak Berbakat

Berdasarkan karakteristik ABA ada sejumlah isu pokok yang terkait dengan khidupan anak berbakat. Whitesell (1990), menegaskan bahwa ada 5 isu utama dalam layanan konseling bagi anak berbakat:

(1) Pemikir yang divergen: Anak berbakat cenderung jujur tentang kompleksitas isu, menekankan pada keinginan yang kuat untuk memahami, memperoleh bantuan membangun perasaan diri yang lebih kuat, memperoleh bantuan untuk belajar mendengar terhadap suatu keadaan yang terfokus, dan membutuhkan dorongan untuk membuat hubungan yang positif.
(2) *Excitability*: Anak berbakat akademik membutuhkan kemampuan *self- regulation* dan *self control,* memelihara tingkat dorongan berbuat yang nya-

man, menemukan kepuasan terhadap upaya-upaya yang kreatif dan yang bernuansa intelektual.

(3) *Sensitivity:* Anak berbakat akademik memiliki kebutuhan untuk tahu, berkenaan dengan: orang yang tidak bertanggungjawab akan sesuatu, mengapa seseorang itu memberikan sesuatu kepadanya, saat ketika pemberiannya tidak dapat diterima, bagaimana menerima suatu hadiah dari orang lain, menentukan hambatan akan perasaan, dan bagaimana menentukan jarak dirinya dengan orang lain secara fisik atau mental.

(4) *Perseptiveness:* Anak berbakat akademik belajar kapan/bagaimana mempercayai persepsinya sendiri, bagaimana menjadi dapat dipercaya, belajar menghadapi perbedaan pendapat, belajar menghargai perasaan orang lain, dan mencoba untuk menjadi pengamat orang lain atau bermain peran.

(5) *Entelechy:* Anak berbakat akademik secara positif menunjukkan komitmen secara intens kepada orang-orang lain dan ide-idenya, simpatik, empatik, dan terlibat dalam penyebab-penyebab yang bersifat lokal atau global. Sebaliknya yang bersifat negatif, Anak Berbakat Akademik cenderung menunjukkan gangguan personal dan frustasi, terlalu banyak menghadapi tanggung jawab, dan merasa bertanggungjawab terhadap sesuatu, dan rasa dosa.

Selain daripada itu Colangelo (dalam Calangelo and Davis, 1991), juga mengemukakan sejumlah isu penting dalam konseling, yaitu *self-concept, counseling with parents, and underachievement.* Pertama, *self-concept* merupakan salah satu area yang berarti dalam riset konseling bagi anak berbakat. *Self-concept* dipandang sebagai suatu struktur kognitif yang kuat yang mampu memediasi interpretasi dan respons terhadap kejadian dan perilaku yang diarahkan kepada indvidu. Dengan kata lain bahwa *self concept* mencakup persepsi diri dan evaluasi diri. Bagi ABA, yang penting adalah *academic and social self-concept.*

Kedua, *counseling with parents* sangat diperlukan karena tidak semua orangtua memiliki informasi yang cukup tentang perkembangan kebutuhan pengembangan ABA. Untuk membantu ABA berkembang optimal, sangatlah diperlukan dukungan dari orangtua, baik berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan emosional, stimulasi intelektual, maupun pengalaman edukasional.

Ketiga, *underachievement* merupakan salah satu isu konseling yang sangat penting mendapat perhatian, karena mengabaikan anak *underachievement* berdampak kurang positif dan merugikan sekali terhadap ABA. Untuk menghadapi ABA yang underachievement sangat diperlukan pendekatan terhadap guru dan orangtua.

Jika memperhatikan isu-isu tersebut, sungguh kompleks persoalan anak berbakat akademik, sehingga kebutuhan layanan konseling merupakan suatu

yang mutlak. Oleh karena itu tidaklah sepenuhnya benar bahwa di sekolah-sekolah favorit, kebutuhan konseling menjadi tidak sepenting dibandingkan dengan kebutuhan konseling di sekolah biasa yang bukan favorit.

Komponen Konseling

1. Konseling sosial-pribadi

Konseling sosial-pribadi pada hakekatnya lebih menitikberatkan pada preservasi perbedaan afektif. Konseling sosial-pribadi bagi ABA adalah suatu upaya yang sangat strategis bagi pengembangan kehidupan ABA, karena dari semua aspek yang ada dalam kehidupan manusia, aspek sosial-pribadi merupakan jantung dari kehidupan manusia.

Berdasarkan hasil studi Gardner (1983) dan Colangelo, Assouline, and Ambroson (1992) yang diperkuat dengan hasil penelitian Wahab (2003) dinyatakan bahwa kecakapan sosial-pribadi dapat didefinisikan sebagai kecakapan yang berkenaan dengan pemerolehan kesadaran diri dan kolektif, harga diri *(self-esteem),* membuat keputusan, manajemen waktu, resolusi konflik, keterampilan berkomunikasi, menghargai perbedaan dan bekerja sama, dan keterampilan kepemimpinan, sehingga dapat hidup mandiri dan bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan. Untuk lebih jelasnya kata-kata kunci kecakapan sosial-pribadi dapat diikuti penjelasannya lebih lanjut.

Pertama, memperoleh kesadaran diri dan kolektif. Memperoleh kesadaran diri dan kolektif dapat diartikan sebagai kecakapan individu dalam memahami diri sendiri sebagai makhluk pribadi dan sosial *(self- and collective- awareness or consciousness)*. Untuk dapat memahami dirinya, maka individu harus tahu karakteristik dirinya, baik yang menyangkut kemampuan, minat, maupun aspirasi, di samping keberadaannya sebagai makhluk pribadi, sosial, dan beragama.

Kedua, memperbaiki harga diri *(self-esteem, self-concept, self-worth, self-acceptance,* dan sebagainya) paling tidak istilah ini ada sekitar 15 istilah yang berbeda (Strein, 1995). Pada dasarnya rasa harga diri terkait dengan berbagai elemen, elemen kognitif dapat dikarakteristikkan dengan rasa memiliki kekuatan dan rasa percaya diri, elemen afektif dapat diindikasikan dengan rasa harga diri yang tinggi dan rendah, dan elemen evaluatif dapat diindikasikan dengan apa yang seharusnya seorang lulusan dapat lakukan *(ideal standard)*.

Ketiga, membuat pilihan sehat dan keputusan efektif. Kecakapan ini merupakan kecakapan pribadi yang sekaligus kecakapan sosial, sehingga tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan mengendalikan dirinya sendiri, melainkan juga diperlukan kemampuan mengendalikan orang lain, karena keputusan pilihan dan keputusan yang dibuat seringkali melibatkan orang lain. Adapun kecakapan membuat pilihan yang sehat dan keputusan efektif dapat diidentifikasi

melalui kemampuan membuat keputusan, mengidentifikasi sumber informasi, menentukan tujuan, dan mengambil tindakan yang perlu guna mencapai tujuan.

Keempat, manajemen waktu. Kecakapan mengelola waktu sangat memerlukan adanya komitmen diri yang kuat dengan dilandasi tanggung jawab, yang tidak hanya terkait dengan dirinya sendiri, orang lain, bahkan dengan Tuhan. Dalam kata hikmat disebut bahwa waktu adalah laksana pedang, jika tidak bisa menggunakannya dengan benar, maka waktu itu akan membunuh diri sendiri. Oleh karena itu dengan dilandasi tanggung jawab, maka melakukan manajemen waktu yang efektif dan efisien merupakan kecakapan yang penting bagi eksistensi setiap individu. Kecakapan mangelola waktu dilihat melalui kemampuan menentukan prioritas, mengelola beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan, mengalokasikan waktu yang seefisien mungkin untuk memenuhi batas waktu, dan bersemangat dalam memulai pengerjaan tugas.

Kelima, kemampuan resolusi konflik. Kemampuan resolusi konflik merupakan kemampuan pribadi dan sekaligus kemampuan sosial, karena konflik yang terjadi tidak hanya terjadi pada level pribadi, melainkan juga pada level sosial. Adapun kemampuan resolusi konflik dapat ketahui melalui kemampuan mengidentifikasi sumber konflik, kecakapan resolusi konflik emosi, kecakapan resolusi konflik nilai, dan kecakapan resolusi konflik

Keenam, keterampilan berkomunikasi. Kecakapan ini merupakan kecakapan instrumen yang diperlukan dalam membangun relasi sosial, sehingga individu dapat menangkap ide dan mengkomunikasikannya kepada orang lain (sebagai pasangannya). Kecakapan ini dapat diindikasikan dengan kemampuan membuat percakapan, kecakapan berkomunikasi secara lisan dan tertulis, dan kecakapan berkomunikasi non-verbal kebutuhan.

Ketujuh, respek terhadap perbedaan individual dan bekerja sama. Kecakapan ini sangat terkait dengan kepentingan setiap individu yang menghadapi kondisi masyarakat yang plural dan heterogin. Kecakapan ini dapat ditunjukkan dengan kemampuan menghargai orang lain, bersikap positif terhadap orang lain, dan kesediaan dan kemampuan membantu dan bekerja sama.

Kedelapan, keterampilan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan merupakan keterampilan yang sangat diperlukan oleh setiap individu, terlebih-lebih ketika dia dalam kehidupan berkelompok atau berorganisasi. Dengan demikian kehadiran dia lebih fungsional dan kontributif. Adapun keterampilan kepemimpinan dapat diindikasikan dengan kemampuan mengkoordinasikan kerja teman sebayanya dan bawahannya, mendorong hubungan kelompok yang positif, mengarahkan dan membimbing orang lain, mendelegasikan tugas-tugas kerja, dan memotivasi orang lain.

Kesemua kecakapan tersebut antara satu dan lainnya saling terkait, sehingga bermakna bagi kehidupan ABA baik sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial.

Konseling sosial-pribadi dapat dilakukan secara individual atau kolektif *(individual or group counseling),* di dalam ruang konseling, kelas, atau di luar kelas, bahkan di tempat terbuka lainnya. Yang penting *setting* yang dipilih didasarkan pada pencapaian efektivitas layanan konseling, demikian juga dapat diterima oleh ABA dengan baik dan nyaman.

2. Konseling Akademik

Walaupun ABA memiliki keunggulan di bidang akademik, namun untuk pengembangan dirinya secara optimal, mereka masih memerlukan fasilitasi dan bantuan secara terarah. Berkenaan dengan itulah maka konseling akademik lebih menitikberatkan pada perencanaan program akademik yang sesuai dengan kebutuhan kognitif siswa. Namun tidak berarti bahwa bentuk layanan konseling akademik lainnya kurang berarti. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Whitesell (1998), bahwa konseling akademik bagi ABA lebih mengutamakan pada perencanaan akademik, perencanaan pendidikan berdiferensiasi, alternatif pendidikan, dan perencanaan karier. Secara lebih rinci jenis layanan konseling akademik bagi ABA sebagai berikut:

Pertama, Perencanaan akademik. Perencanaan akademik terdiri atas kegiatan yang difokuskan pada penentuan jurusan atau kegiatan ekstra kurikuler yang relevan, mentorship, pemagangan, keterampilan mengikuti tes, keterampilan membuat keputusan, dan keterampilan belajar.

Kedua, perencanaan pendidikan berdiferensiasi. Dalam rangka membuat rencana pendidikan berdiferensiasi, upaya yang perlu dilakukan adalah menentukan tujuan yang bersifat tahunan, menentukan *benchmark* kemajuan, menunjukkan data asesmen yang relevan, menentukan prosedur dan proses belajar, dan membuatkan rekomendasi dari konferensi staf.

Ketiga, alternatif pendidikan. Untuk dapat mengembangkan potensi akademik dan aspek lainnya yang terkait, maka perlu ditentukan dan dikembangkan sistem pendidikan yang relevan, yaitu bisa berbentuk program akselerasi atau pengayaan. Demikian pula perlu mengantisipasi dampak-dampaknya, sehingga pilihannya dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ABA secara optimal.

Keempat, perencanaan karir. Perencanaan karir yang penting dilakukan adalah berkenaan dengan memilih bidang minta, memilih sekolah atau perguruan tinggi yang sangat cocok dengan individu dan minatnya, memilih jurusan, dan memberikan *mentorship.*

Konseling akademik bagi ABA dapat dilakukan melalui konseling kelompok atau individual, tergantung mana yang dipandang lebih efektif bagi ABA, sehingga sangat diperlukan kemampuan konselor untuk mengidentifikasi kebutuhan dan jenis konseling yang diperlukan.

3. Konseling Karier

Kerr (1990) menegaskan bahwa ABA yang memiliki potensi akademik tinggi ternyata tidak selalu lancar dalam perjalanan hidupnya setelah sekolah menuju dunia kerja, karena dipengaruhi oleh sejumlah problem sosio-emosional dan kebutuhan ABA yang berbeda sebagai akibat dari satu atau berbagai kemampuan yang unik. Berikut ini Davis dan Rimm (1989) mengemukakan dua persoalan penting yang dapat berkontribusi terhadap kemampuan perencanaan karier ABA, yaitu multipotensialitas dan *early emergence*. Demikian pula upaya yang dapat dilakukan baik sebagai langkah pencegahan maupun penanganan.

Multipotensialitas adalah kemampuan menyeleksi dan mengembangkan sejumlah pilihan karier sebagai akibat dari berbagai minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki. Luasnya rentangan kesempatan yang tersedia cenderung meningkatkan kompleksitas pembuatan keputusan dan penentuan tujuan, bahkan dapat juga menunda pemilihan karier. Persoalan ini akan dihadapi secara berbeda oleh ABA pada jenjang pendidikan yang berbeda.

Pada tingkat SMP, karena keunggulan ABA dalam beberapa atau semua bidang, kesulitan membuat keputusan terus berlangsung. ABA mungkin juga dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan rekreasional tanpa menunjukkan minat yang jelas, bahkan mereka memiliki jadwal yang numpuk, sehingga mereka hanya memiliki waktu tersisa yang sangat sedikit untuk memikirkan dalam membuat keputusan yang mantap.

Pada tingkat SMA, problem membuat keputusan antara persoalan akademik dan karier merupakan akibat dari jadwal kegiatan kelas dan partisipasi yang tinggi dalam kegiatan sekolah. Beberapa ABA menerima kepemimpinan dari berbagai kelompok yang menjadi tempat kegiatannya di sekolah, kegiatan agama, bahkan organisasi masyarakat. Dengan demikian nampak tanda-tanda kecemasan dan keletihan, yang akhirnya dapat berakibat pada penundaan untuk memikirkan perencanaan dan pembuatan keputusan tentang kelanjutan studi dan pemilihan minat karier. Hal ini berakibat juga pada sejumlah ABA tidak berhasil menunjukkan prestasi akademiknya yang baik pada beberapa mata pelajaran.

Strategi intervensi yang diyakini relevan bagi ABA, di antaranya sebagai berikut sesuai dengan jenjang pendidikannya:

a. Sekolah Menengah Pertama:
   - Mendiskusikan makna dan nilai kerja.
   - Mendiskusikan nilai-nilai keluarga dan masyarakat yang terkait kerja.
   - Memberikan kesempatan kerja volunteer yang sesuai dengan minatnya.
   - Memberikan pengalaman untuk menghabiskan sedikit waktu dengan orang dewasa yang bekerja di tempat yang paling diminati.
   - Mengurangi keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial dan rekreasi dengan memprioritaskan pada beberapa kegiatan ekstrakurikuler.

b. Sekolah Menengah Atas:
   - Mencari tes vokasional yang sesuai dari konselor atau psikolog yang profesional.
   - Mendorong untuk mengadakan kunjungan ke perguruan tinggi atau jurusan-jurusan yang diminati.
   - Memberikan kesempatan untuk bekerja secara *volunteer* secara lebih meluas.
   - Mengeksplorasi kemungkinan magang dengan para profesional.
   - Memberikan bimbingan yang berbasis nilai yang menekankan pemilihan sebuah karir yang memiliki sarat nilai.
   - Mendorong untuk tidak konformis atau tidak memilih karier secara *stereotyped*.
   - Mengkspose kepada siswa model-model karier yang unik.

Early emergence adalah anak yang memiliki minat karier yang sangat tinggi. Memiliki ide atau komitmen sejak awal terhadap suatu bidang karier merupakan suatu karakteristik umum bagi ABA, karena itu *early emergence* seharusnya tidak dipandang sebagai masalah perkembangan, melainkan sebagai suatu kesempatan yang harus ditindaklanjuti untuk pengembangannya, bukan ditolak atau dirusak. Memberikan perlakuan terhadap *early emergence* berarti memberikan perhatian yang kuat terhadap keberbakatan, dengan memberikan latihan keterampilan yang perlu untuk meningkatkan kualitas kinerja dari bidang yang diminati. Seperti juga multipotensialitas, tanda-tanda *early emergence adalah sebagai berikut:*

(1) Pada tingkat SMP: ABA melanjutkan minatnya yang sangat tinggi dan mengekspresikan dorongan yang kuat untuk latihan lanjut dalam bidang keberbakatan dan minatnya. Pengembangan minat sosial tingkat dewasa tertunda karena suatu komitmen terhadap kerja yang merupakan bidang keberbakatannya atau karena tertolak oleh orang lain.

(2) Pada tingkat SMA: ABA mengembangkan suatu identitas yang kuat berkenaan dengan bidang keberbakatannya (misal: komputer, artis). Mereka mengekspresikan suatu dorongan yang kuat akan bantuan perencanaan sebuah karir sesuai dengan bidang yang diminatinya. Suatu dorongan untuk keterampilan tes guna mengikuti kompetisi dengan kelompok sebayanya.

Strategi intervensi yang mungkin dapat ditawarkan untuk *early emergence* pada jenjang pendidikan yang berbeda, di antaranya sebagai berikut:

a. Sekolah Menengah Pertama:
   - Memberikan dukungan dan dorongan selama latihan intensif.
   - Memberikan kesempatan sejumlah waktu untuk kerja sendiri.
   - Mencari kesempatan untuk latihan bekerja (mengikuti seorang profesional sehari penuh) sesuai dengan minatnya.
   - Menghindarkan penekanan ABA dari kegiatan sosial.

b. Sekolah Menengah Atas:
   - Melanjutkan dukungan, dorongan, dan waktu untuk sendiri.
   - Mencari kesempatan untuk magang dan pengalaman kerja di bidang yang diminati.
   - Mencari bimbingan karier dan seorang konselor yang familiar dengan bidang keberbakatannya atau dari seorang profesional di bidangnya.
   - Membuat suatu rencana detail untuk latihan dan pendidikan yang mengarahkan kepada tujuan karier yang terpilih, mencakup rancangan keuangannya.
   - Mengeksplorasi pendididikan di perguruan tinggi atau pelatihan pasca sekolah menengah sejak dini, baik melalui kontak maupun kunjungan.
   - Membantu ABA membangun hubungan dengan seorang mentor di bidangnya.

Konseling karier bagi ABA dapat diselenggarakan baik sebagai reaksi atas kebutuhan ABA, maupun sebagai langkah proaktif konselor untuk memfasilitasi ABA dalam pemilihan karier. Konseling karier dapat dilakukan secara individual atau kolektif tergantung pada kebutuhan konseling.

Model dan Strategi Konseling

Piirto (1994), Colangelo (2002), dan Milgram (1991) mengemukakan bahwa secara umum model dan strategi konseling bagi ABA dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konseling terapetik

Konseling terapetik dimaksudkan untuk memberikan perlakuan terhadap persoalan yang dihadapi oleh ABA, baik itu berkenaan dengan persoalan sosial-pribadi, akademik, maupun karier. Adapun strategi yang sering menunjukkan efektivitas yang tinggi bagi penyelesaian persoalan ABA, di antaranya sebagai berikut: pengelompokan dengan teman sebaya, menstrukturkan sistem, pembuatan jejaring, konseling/diskusi kelompok, terapi pustaka, pemberian model tokoh keagamaan, *mentorship,* pemagangan, konseling sebaya, konseling keluarga, konseling individual, dan kelompok pendukung.

2. Konseling preventif

Konseling preventif dimaksudkan untuk memberikan perlakuan terhadap ABA dengan berorientasi pada pencegahan akan terjadinya persoalan yang akan muncul di kemudian hari. Adapun strategi yang sering dijadikan pilihan, di antaranya: perencanaan akademik yang sesuai, mencegah perkembangan kelainan prilaku, mencegah *underachievement*, mencegah konflik sosial/akademik, menaruh perhatian terhadap kebutuhan afektif terhadap populasi khusus, perencanaan karier, dan menghindari dampak terhadap keluarga.

3. Konseling perkembangan

Konseling perkembangan dimaksudkan untuk memberikan layanan konseling yang berorientasi pada dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan ABA untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan kondisinya. Adapun strategi yang dilakukan di antaranya: memahami kekuatan dan kelemahan, penerimaan diri dan pengakuan terhadap keterbatasan ABA, komitmen untuk memelihara kemampuan ABA, pengembangan *internal locus of control,* penerimaan kesalahan sebagai pengalaman belajar, keterampilan mengatasi konflik, keterampilan pemecahan masalah, kesadaran, pemahaman dan penerimaan terhadap orang lain, keterampilan berkomunikasi, keterampilan kepemimpinan dan pembuatan keputusan, pengetahuan tentang teknik pengurangan *stress,* dan kemampuan memandang dirinya sendiri dan kejadian dengan humor.

Pilihan model konseling sangatlah tergantung pada kepentingan konseling, apakah konseling dimaksudkan untuk melakukan pencegahan, melakukan penanganan dan penyelesaian, atau melakukan pengembangan. Artinya kehadiran konseling bagi ABA sangat dinantikan pada saat kapanpun, sehingga tidak ada hari bagi ABA tanpa kebutuhan konseling, karena layanan konseling diperlukan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun.

Yang Seharusnya Melakukan Konseling

VanTassel-Baska (1998) menegaskan bahwa ada tiga pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pemberian layanan konseling bagi ABA, yaitu konselor sekolah, guru kelas, dan orangtua. Mereka sering tidak bersedia atau tidak terampil dalam memberikan konseling bagi ABA, karena itu salah satu alternatif untuk memberikan bimbingan ABA adalah guru ABA. Dalam beberapa *setting,* orang-orang yang bekerja dengan ABA untuk sejumlah waktu dalam sistem *"pulling out"* melihat perilaku ABA berdasarkan suatu tujuan dan dasar-dasar yang terus berkembang. Di samping itu mereka juga memiliki akses yang cukup bertemu dengan ABA berdasarkan jadwal yang mereka miliki. Sering kali, guru-guru ini juga yang mengetahui tentang hakekat dan kebutuhan anak berbakat, baik aspek kognitif maupun afektif. Dengan demikian, guru ABA mungkin merupkan posisi yang terbaik dalam memberikan bimbingan yang diperlukan oleh ABA.

Menyadari akan keterbatasan guru ABA, terutama untuk tugas mengajar lainnya, dalam memberikan layanan konseling bagi ABA, maka konselor sekolah seharusnya mengambil alih tugas ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga konselor mampu menunjukkan kinerja untuk semua siswa, seiring dengan *guidance for all.*

Di samping konselor, layanan konseling yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ABA secara menyeluruh dapat dilakukan oleh orangtua yang memang memiliki waktu yang cukup banyak hidup bersama-sama ABA di rumah. Setidak-tidaknya orangtua memiliki kepekaan dan kesediaan untuk memberikan dukungan, fasilitas, dan kemudahan bagi pemenuhan segala kebutuhan ABA untuk berkembang lebih optimal.

Untuk dapat menunjukkan kinerja optimal, baik bagi konselor, guru, maupun orangtua, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa hal penting:

1. Konselor hendaknya:
   - Terlatih dan teknik konseling secara umum.
   - Sensitif terhadap isu-isu afektif pada berbagai fase perkembangan.
   - Bersedia menyusun mentorship, magang, dan program khusus.
   - Terlatih melaksanakan dan menginterpretasi tes khusus dan inventori.
   - Familiar dengan teknik-teknik bermain peran.
   - Mampu mendiagnose bidang-bidang masalah berkaitan dengan pengembangan psikososial anak.
2. Guru hendaknya:
   - Sadar akan keunikan kebutuhan sosial dan emosi ABA.
   - Terlatih dalam teknik intrervensi yang efektif terhadap ABA.

- Sensitif terhadap isu-isu afektif.
- Bersedia mengatasi isu-isu psikososial yang terjadi sehari-hari di kelas.
- Terlatih untuk menterjemahkan informasi asesmen ke dalam program pilihan.
- Familiar dengan ABA yang dapat bermain peran.
- Mampu mengarahkan kegiatan anak dan mengelompokkannya secara tepat sehingga dapat membantu perkembangan psikososial.

3. Orangtua hendaknya:
   - Sadar akan keunikan kebutuhan anak untuk semua aspeknya.
   - Memiliki keterampilan sederhana untuk memenuhi kebutuhan anak.
   - Menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif bagi kegiatan anak di rumah.
   - Mendampingi anaknya untuk mengunjungi tempat-tempat yang mendidik.
   - Bersedia bekerja sama dengan konselor, guru, dan personal sekolah lainnya untuk kepentingan kemajuan anaknya.

Demikianlah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang ada di dekat ABA. Idealnya setiap pihak tidak harus mendominasi dalam mendidik dan mempengaruhi pertumbuhan ABA, melainkan yang penting adalah setiap pihak mampu menampilkan perannya sesuai dengan kebutuhan pada saat yang tepat. Lepas dari itu, untuk kepentingan layanan konseling diharapkan konselor sekolah mampu menunjukkan peran dan keterlibatannya secara optimal, sehingga mampu berbuat yang terbaik baik optimalisasi ABA dalam kehidupannya.

Penutup

Konseling bagi ABA merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari sedikitpun, kendatipun konselor dihadapkan sejumlah persoalan yang kompleks. Jika konselor tidak mampu menunjukkan kinerjanya secara optimal terutama bagi perkembangan ABA, maka konselor secara berangsur-angsur akan menghadapi penurunan *trust* yang sudah ada di tangannya.

ABA dengan segala karakteristik dan sifatnya menunjukkan perilaku dan kebutuhan yang berbeda dengan anak-anak sebayanya, sehingga konselor perlu sekali memahami hakekat dan perkembangan ABA guna memudahkan layanan yang akan diberikan. Dengan segala kelebihannya, ABA tetap masih memerlukan layanan konseling untuk dapat menuju kepada cita-citanya. Tanpa konseling yang tepat, tidak menutup kemungkinan potensi yang unggul pada ABA justru kontra produktif, tidak hanya merugikan dirinya saja, tetapi menimbul-

kan persoalan yang besar, baik bagi keluarga, sekolah, maupun masyarakat, karena mereka bisa saja melakukan bunuh diri, karena merasa frustasi secara mendalam akibat tidak mendapatkan pengajuan dari masyarakat. Akhirnya ABA yang memiliki berbagai keunggulan akan tetap unggul manakala mendapatkan perlakuan konseling yang sesuai pada saatnya.

Sangatlah disadari bahwa tulisan ini tidak akan dapat terwujud, jika tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu dalam mengakhiri tulisan ini, perkenankan penulis menyampaikan banyak terima kasih, semoga bantuan dan dukungan yang berupa apapun diterima sebagai amal kebajikan dan mendapatkan balasan yang sebanyak-banyaknya dan selalu dalam ridlo-Nya. Amien.

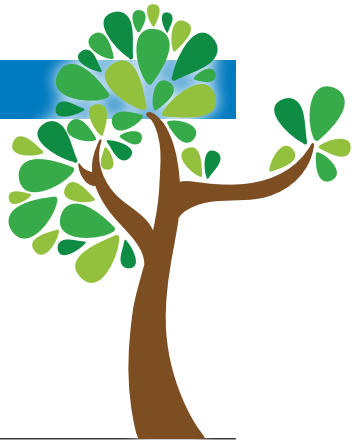

Bimbingan Sosial-Pribadi dalam Layanan BK Berbasis Kompetensi

Pengantar

Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan suatu bagian yang vital dari suatu proses pendidikan, sehingga BK menduduki posisi yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pendidikan, yaitu mengantar setiap individu untuk mencapai perkembangan optimal, sehingga dapat meraih keberhasilan hidup. Dengan begitu BK seharusnya dalam praksis pendidikan mendapatkan penekanan yang lebih berarti.(Lihat Gambar 1)

Kenyataannya, layanan BK pada SMA masih banyak diorientasikan untuk upaya terapetik, yang merupakan perwujudan paradigma Bimbingan Konseling Konvensional. Layanan BK lebih banyak diarahkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi para peserta didik, daripada memberikan dukungan untuk pengembangan potensinya.

Memang domain Bimbingan dan Konseling terdiri atas tiga, yaitu domain akademik/pendidikan, karier, dan personal-sosial. Namun domain yang menjadi inti *(core)*-nya adalah domain personal-sosial, karena kebahagiaan hidup yang sebenarnya, bukanlah terletak pada keberhasilan akademik atau karier, melainkan keberhasilan personal-sosial.

BK Berbasis Kompetensi

Ada dua definisi tentang Bimbingan Berbasis Kompetensi. Pertama, BK berbasis kompetensi memberikan suatu paradigma baru yang mengubah perspektif tentang kontribusi konselor dan tanggung jawabnya. Ada lebih dari satu cara untuk mendekati pengembangan suatu program berbasis kompetensi yang mungkin atau tidak mungkin mencakup tentang bagaimana bimbingan berinteraksi dengan aspek-aspek lainnya dari program pendidikan sekolah, seperti: alokasi waktu konselor, iklim sekolah, dan tanggung jawab konselor ter-

hadap pihak lainnya dalam sekolah. Namun, satu fokus yang penting adalah *perlunya menjamin bahwa semua siswa dapat meraih kompetensi spesifik yang mereka perlukan untuk menjadi siswa yang berhasil dan orang dewasa berhasil.*

Kedua, Program Bimbingan adalah bersifat *developmental* dan komprehensif dalam hal mana kegiatan-kegiatan bimbingan dilaksanakan secara regular dan terencana untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang spesifik. Walaupun kebutuhan mendesak dan krisis siswa dipenuhi, fokus utama suatu program perkembangan adalah memberikan pengalaman kepada semua siswa untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Program bimbingan adalah komprehensif dalam hal mana bahwa keseluruhan rentangan kegiatan dan layanan seperti asesmen, informasi, konsultasi, konseling, referral, penempatan, dan tindak lanjut *(follow-up and follow through).* (Gysbers & Henderson, 1988).

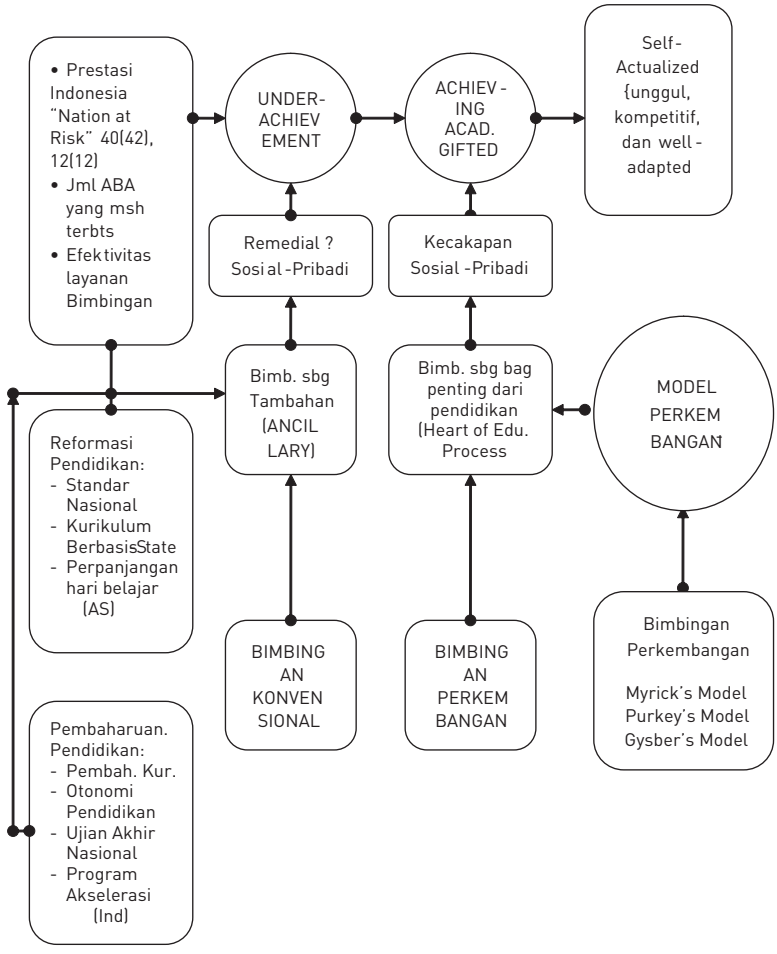

Gambar 1. Eksistensi Bimbingan dan Konseling

Berdasarkan dua pengertian tersebut, maka BK Berbasis Kompetensi pada hakekatnya merupakan suatu program BK yang bersifat *developmental* dan komprehensif yang dikembangkan untuk individu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga mencapai suatu kompetensi spesifik yang diperlukan untuk menjadi peserta dan orang dewasa yang berhasil.

Dengan memperhatikan hakekat BK berbasis Kompetensi, maka BK berbasis Kompetensi dapat juga disebut sebagai Bimbingan Perkembangan. Dalam rangka membangun suatu definisi yang lebih komprehensif, maka berikut ini akan dikemukakan suatu definisi bimbingan perkembangan yang dirumuskan oleh *The American School Counselor Association* (Myrick:1993) bahwa:

> *"Developmental guidance is that component of all guidance efforts which fosters planned interventions within educational and other human services programs at all points in the human life cycle to vigorously stimulate and actively facilitate the total development of individuals in all areas, (i.e., personal, social, emotional, career, moral-ethical, cognitive, and aesthetic) and to promote the integration of the several components into an individual's life style."*

Bimbingan Perkembangan dapat didefinisikan sebagai komponen dari semua usaha bimbingan yang memelihara intervensi-intervensi terencana dalam rangkaian program pendidikan dan layanan kemanusiaan lainnya pada semua hal dalam siklus kehidupan manusia untuk secara sungguh-sungguh mendorong dan secara aktif memfasilitasi perkembangan individu secara total dalam semua bidang (yang mencakup aspek personal, sosial, emosi, karir, moral-etika, kognitif, dan estetik) serta meningkatkan integrasi beberapa komponen ke dalam suatu gaya hidup individu.

Berdasarkan definsi tersebut di atas dapatlah dirumuskan bahwa definisi bimbingan perkembangan adalah suatu rangkaian layanan bimbingan secara bertanggungjawab dalam menfasilitasi perkembangan anak pada semua aspek kehidupannya, sehingga mereka dapat berfungsi dan berperan efektif selama siklus kehidupannya, terutama menjamin eksistensi dirinya sebagai individu dan atau anggota masyarakat yang bermartabat.

Fondasi BK Berbasis Kompetensi

Untuk memahami BK Berbasis Kompetensi lebih jauh, maka dapat dipahami sebagai berikut:

1. Prinsip Bimbingan Perkembangan:

Muro dan Kottman (1995) mengemukakan bahwa ada dua belas prinsip bimbingan perkembangan, di antaranya:

a. Bimbingan dan konseling perkembangan diperlukan oleh semua siswa. Dalam program pengembangan, kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling diasumsikan diperlukan oleh semua siswa. Artinya bahwa program pengembangan harus berkenaan baik dengan anak yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, karena setiap anak memiliki potensi yang berhak mendapatkan layanan untuk pengembangannya, terlebih-lebih ABA. Hal ini dipertegas oleh Myrick (1993) bahwa Bimbingan perkembangan adalah untuk semua siswa.
b. Bimbingan dan konseling memiliki fokus pada belajar anak. Karena tujuan sekolah adalah belajar, maka tujuan utama bimbingan dan konseling adalah membantu siswa untuk belajar. Bahkan juga dipertegas oleh Myrick (1993) bahwa bimbingan perkembangan diorientasikan untuk membantu siswa agar dapat belajar secara lebih efektif dan efisien.
c. Konselor dan guru memiliki fungsi bersama dalam program bimbingan perkembangan. Menyadari akan persoalan yang dihadapi siswa di kelas bersifat kompleks (akademik, sosial-pribadi, karier, dan lainnya), maka kolaborasi dan *teamwork* antara guru dan konselor menjadi penting, terlebih-lebih untuk kepentingan perkembangan anak.
d. Suatu kurikulum yang terorganisasikan dan terencana merupakan suatu bagian penting dalam bimbingan perkembangan. Semua program bimbingan perkembangan seharusnya berisi suatu kurikulum terencana dan terorganisasi secara berhati-hati (Myrick, 1993). Seperti juga kurikulum sekolah regular (matematika, IPA, IPS, dan sebagainya), kurikulum bimbingan perkembangan berisi tujuan yang membantu anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya yang normal.
e. Bimbingan perkembangan sangat berkenaan dengan penerimaan diri, pemahaman diri, dan peningkatan diri. Konselor perkembangan akan menfokuskan pada kegiatan yang dirancang untuk membantu anak dalam rangka mengetahui lebih banyak tentang dirinya sendiri dan menjadikan anak lebih menerima kehadirannya, serta menyadari akan kekuatan dirinya. Dengan kegiatannya cenderung diarahkan kepada peningkatan *self-esteem,* motivasi berprestasi, pembuatan keputusan, penentuan tujuan, perencanaan, keterampilan pemecahan masalah, efektivitas interpersonal, keterampilan berkomunikasi, efektivitas lintas budaya, dan perilaku bertanggung jawab.
f. Bimbingan dan konseling perkembangan berfokus pada proses pendorongan diri. Proses pengobaran semangat *(encouragement)* adalah lebih kompleks daripada yang sebagian besar orang yakini. Dengan demikian tidaklah cukup hanya dengan memberikan dorongan kepada anak, karena tindakan

korektif konselor atau guru tidaklah lebih menentukan daripada bagaimana anak sendiri merasakan dan merespon terhadap proses.

g. Bimbingan perkembangan menghargai perkembangan yang mengarah daripada akhir yang definitif. Konselor perkembangan memahami bahwa anak itu dalam proses menjadi. Dengan demikian konselor perkembangan dalam aktivitasnya lebih banyaknya menekankan pada efektivitas proses bimbingan daripada menekankan pada harapan akhir bimbingan.
h. Bimbingan perkembangan, ketika berorientasi tim, menuntut layanan konselor profesional yang terlatih. Program bimbingan perkembangan yang berhasil menghendaki upaya bersama semua personil sekolah. Walaupun demikian, untuk memaksimalkan efektivitas program bimbingan perkembangan, sangat diperlukan konselor perkembangan yang terlatih dan profesional. Karena diakui bahwa keterampilan konselor dapat mendukung dan meningkatkan usaha guru dan administrator sekolah.
i. Bimbingan perkembangan sangat berkenaan dengan identifikasi kebutuhan khusus sejak dini. Program bimbingan perkembangan menekankan identifikasi dini terhadap kebutuhan khusus anak. Karena dengan diketahuinya kebutuhan khusus anak sejak dini, anak dapat terbantu dalam pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.
j. Bimbingan perkembangan sangat berkenaan psikologi dalam praktek. Konselor perkembangan tidak hanya peduli terhadap hasil asesmen tentang kemampuan anak untuk belajar, melainkan juga tertarik bagaimana anak menggunakan kemampuannya. Apakah ada tantangan yang dihadapkan kepada anak berbakat? Bagi konselor perkembangan adalah apa yang anak lakukan dan tidak lakukan dengan kemampuan yang dimilikinya sama pentingnya dengan kemampuannya sendiri.
k. Bimbingan perkembangan memiliki landasan yang berkenaan dengan bidang psikologi anak, perkembangan anak, dan teori belajar. Prinsip-prinsip bimbingan perkembangan yang telah dikemukakan memiliki akar dalam psikologi anak, perkembangan anak, dan teori belajar. Jika bimbingan itu benar-benar bersifat *developmental*, maka program bimbingan harus didesain untuk memenuhi kebutuhan anak.
l. Bimbingan perkembangan adalah bersifat sekuensial dan fleksibel. Bimbingan perkembangan yang efektif harus bersifat fleksibel (Myrick, 1993) untuk memenuhi perbedaan individu dan terencana dengan sistematis, tidak bersifat acak.
m. Bimbingan perkembangan merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pendidikan (Myrick, 1993). Program bimbingan perkembangan yang efektif harus tidak terpisahkan dari kegiatan pengajaran, bahkan menem-

bus kepada lingkungan sekolah. Dengan demikian ketika adanya keinginan untuk sosialisasi bimbingan karier, maka dapat diupayakan dengan memasukkan materinya ke dalam kegiatan belajar menulis (mengarang).

2. Asumsi dasar Bimbingan Perkembangan

Dalam rangka mengembangkan Program Bimbingan Sosial-Pribadi berbasis Model Perkembangan, maka dipandang penting merumuskan asumsi dasar. Myrick (1993) menegaskan, asumsi dasar bimbingan perkembangan adalah:

- bahwa hakekat manusia mengerakkan individu secara sekuensial dan positif menuju ke peningkatan diri *(self-enhancement);*
- bahwa potensi individu adalah suatu asset yang sangat berharga bagi masyarakat dan masa depan kemanusiaan;
- bahwa pendekatan perkembangan mempertimbangkan hakekat perkembangan manusia mencakup tahapan dan tugas perkembangan umum yang sebagian besar individu alami sebagaimana mereka matang dari masa kanak-kanak ke dewasa;
- bahwa tujuan akhir pendekatan perkembangan adalah membantu siswa belajar secara lebih efektif dan efisien;
- bahwa program perkembangan menghendaki bantuan dari semua personil sekolah sehingga dapat mencapai tujuannya.

Blocher (1974) menyatakan tentang asumsi dasar konseling perkembangan adalah bahwa kepribadian manusia itu tumbuh secara optimal melalui interaksi sehat antara dirinya yang sedang tumbuh dan kebudayaan atau lingkungan. Bertolak dari situ, selanjutnya beliau merumuskan assumsi konseling perkembangan yang dirasakan beda dengan konseling atau psikoterapi, yaitu:

- klien tidak dianggap sebagai yang memiliki sakit mental;
- konseling perkembangan berfokus pada masa sekarang dan mendatang.
- klien adalah seorang klien, bukan seorang pasien.
- konselor perkembangan tidak bersifat netral atau amoral.
- klien dipandang sebagai seorang yang unik dan berharga yang sedang berusaha keras untuk mengembangkan suatu identitas dan mengimplementasikannya dengan suatu gaya hidup yang dia miliki sendiri.

Setelah mempertimbangkan dua pendapat tersebut di atas dan dalam konteks budaya yang menempatkan nilai moral di atas aspek-aspek lainnya, maka rumusan asumsi bimbingan perkembangan, di antaranya sebagai berikut:

a. Bimbingan merupakan jantungnya proses pendidikan.
b. Bimbingan perkembangan diperlukan semua siswa, terutama anak berbakat.
c. Klien adalah seorang individu yang berpotensi dan unik.
d. Setiap individu pada hakekatnya bergerak menuju ke peningkatan diri berdasarkan tugas perkembangan dan potensi dirinya.
e. Potensi individu berbakat adalah suatu asset yang sangat berharga bagi masyarakat dan masa depan kemanusiaan;
f. Bimbingan perkembangan bertanggungjawab menfasilitasi individu untuk dapat belajar secara efektif dan efisien.
g. Program bimbingan perkembangan yang efektif memerlukan keterlibatan semua personil secara optimal.
h. Konselor perkembangan dalam proses pendidikan bertumpu pada nilai yang disepakati.

3. Tujuan Bimbingan Perkembangan

Pada dasarnya tujuan konseling secara psikologis adalah menfasilitasi perkembangan. Hal ini dijelaskan oleh Tyler (Blocher, 1974) yang menyatakan bahwa *"The psychological purpose of counseling is to facilitating development"*. Dengan demikian perkembangan merupakan suatu kata kunci dari aktivitas konseling, walaupun pada prakteknya kegiatan konseling lebih banyak diorientasikan kepada upaya rehabilitatif dan terapetik.

Untuk mengarahkan kegiatan konseling yang memiliki misi menfasilitasi perkembangan, dipandang perlu sekali adanya penegasan. Dengan demikian perlu dieksplisitkan "kata perkembangan" yang ditambahkan kepada kata bimbingan atau konseling. Blocher (1974) mengetengahkan tujuan konseling perkembangan sebagai berikut:

> *"(1) helping an individual to become more fully aware of himself and the ways in which he is responding to the influences in his environment, (2) assists him to establish some personal meaning for his behavior and to develop and clarify a set of goals and values for future behavior, (3) maximizing human freedom, and (4) maximizing human effectiveness.*

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka bimbingan perkembangan bertujuan untuk menjadikan setiap individu lebih menyadari eksistensi dirinya yang memiliki kebebasan dan kedayagunaan secara manusiawi dan mengembangkan potensinya secara optimal, sehingga dia mampu bertanggungjawab kepada pencipta-Nya, memenuhi tuntutan lingkungan serta menghadapi tantangan masa depannya.

4. Model Bimbingan Perkembangan

Begitu posisi bimbingan diyakini sebagai jantung proses pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 1980-an (Ellis:1991), yang bukan lagi sebagai layanan dukungan tambahan, maka Model Bimbingan Perkembangan mulai dikembangkan. Setidak-tidaknya setelah masa itu ada tiga model bimbingan perkembangan yang diperkenalkan, yaitu *Norm Gysbers' Comprehensive Guidance Program Model, Robert Myrick's Teacher Advisor Program Model, dan William Purkey's Invitational Learning Model*.

Pertama, Model Program Bimbingan Komprehensif yang dikembangkan pertama kali oleh Norman Gysbers di Universitas Missouri-Columbia, merupakan suatu rencana yang inovatif, berbasis-program yang telah diadopsi hampir seluruh distrik di AS. Landasan Model ini adalah *Life Career Development,* bahwa perkembangan pribadi itu terjadi satu rentangan kehidupan seseorang melalui integrasi peran, *setting,* dan kejadian dalam suatu kehidupan seseorang. Karena itulah Model ini menekankan tiga domain pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu: (1) pengetahuan tentang diri sendiri *(self-knowledge)* dan keterampilan interpersonal *(interpersonal skills),* (2) peran, setting, dan kejadian kehidupan *(life roles, settings, and events),* dan (3) perencanaan karier hidup *(life career planning)*.

Model Program Bimbingan Komprehensif terdiri atas tiga landasan struktural dan komponen program interaktif. Landasan struktural – definisi, rasional, dan asumsi – menekankan sentralitas bimbingan dalam keseluruhan program pendidikan dan mendefinisikan hubungan antara bimbingan dan aspek lainnya dari kurikulum. Empat komponen program menggambarkan kegiatan-kegiatan utama dan peran - tanggung jawab personil yang terlibat dalam program pendidikan, yaitu kurikulum bimbingan, perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Salah satu rasional utama Model ini adalah memungkinkan konselor untuk mengontrol keseluruhan waktunya untuk pekerjaan bimbingan dengan mengalokasikan waktunya 100% waktunya untuk keempat program. Yang jelas bahwa Model ini diorientasikan semuanya untuk perkembangan siswa *(student development)*.

Kedua, Model Program Kepenasehatan Guru, yang dikembangkan oleh Robert D. Myrick, memungkinkan setiap siswa memerlukan seorang dewasa yang akrab di sekolah yang mengetahui dan peduli tentang dirinya dengan cara yang sangat pribadi. Penasehat tidak hanya bekerja dengan *advisee* (klien), melainkan juga memberikan konsultasi kepada guru, konselor sekolah, dan memberikan dukungan kepada personil sekolah tentang diri *advisee* (klien).

Model Program Kepenasehatan Guru dirancang untuk memberikan suatu kesempatan bagi semua siswa di suatu sekolah untuk berpartisipasi dalam

suatu kelompok yang kecil dan kohesif yang terdiri atas teman sebaya antara 15-25 orang yang dipimpin oleh seorang guru yang sensitif dan peduli yang mempromosikan dan memantau pengalaman pendidikan dan perkembangan siswa secara individual.

Kurikulum bimbingan bervariasi dari suatu sekolah ke sekolah lainnya, tetapi kurikulum itu pada umumnya diorientasikan kepada persoalan sosial-pribadi, akademik, dan karier. Beberapa keterampilan sosial-pribadi mencakup aspek saling berkenalan, *self-esteem,* dan manajemen waktu.

Ketiga, Model Program *Invitational Learning,* yang dikembangkan William W. Purkey, memberikan suatu cetak biru tentang apa yang konselor, guru, kepala sekolah, supervisor, dan pihak lainnya lakukan dan memperkaya lingkungan institusi secara fisik dan psikologis dan mendorong perkembangan orang yang hidup dan bekerja di sana. Belajar yang mengundang *(Invitational Learning)* didasarkan atas asumsi yang berbasis empat nilai mengenai hakekat individu dan potensinya, serta hakekat bantuan profesional, yaitu: *respect, trust, optimisme,* dan *intentionality*.

Di sekolah atau di organisasi lainnya, sesuatu itu berkaitan dengan sesuatu lainnya. Oleh karenanya, dalam penerapan *Invitational Learning,* individu dalam mencapai potensinya tidak bisa mengabaikan antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya.

Tujuan *Invitational Learning* adalah memberikan suatu keseluruhan lingkungan yang mengundang secara optimal, kepada para *helper* yang profesional sendiri dan dengan siapa mereka bekerja.

Setelah memperhatikan ketiga model tersebut, hal yang penting dipahami adalah menempatkan sentralitas bimbingan perkembangan dalam proses pendidikan, dan ketiga model itu menjaga martabat kemanusiaan, yang diwujudkan dengan penghargaan tertentu terhadap pentingnya kecakapan sosial-pribadi dalam menjawab isu sentral tentang kemunduran prestasi akademik.

Sistem Delivery BK Berbasis Kompetensi

1. Domain Bimbingan Sosial-pribadi

a. Hakekat Kecakapan Sosial-Pribadi

Secara historis Gardner (1983) menyatakan bahwa ada dua tokoh teori kepribadian, Sigmund Freud dan William James, yang memahami kepribadian manusia dari sudut pandang yang berbeda. Sigmund Freud, tokoh intelektual Eropa yang "pesimistik", memandang bahwa perkembangan psikis individu itu banyak dipengaruhi oleh faktor internal individu, sehingga sejarah masa lalunya dan faktor internal baik fisik maupun non fisik, sangatlah menentukan bentuk dan wujud kepribadiannya. Sebaliknya William James, tokoh intelek-

tual AS yang "optimistik", memandang perkembangan psikis individu itu sangat dipengaruhi oleh faktor eksternalnya, sehingga kondisi dan aktivitas sosial sangat menentukan bentuk kepribadiannya. Dengan memperhatikan kedua pandangan tersebut, maka Gardner menegaskan bahwa antara *intrapersonal* dan *interpersonal* merupakan dua variabel yang tidak bisa dipisahkan dalam perilaku individu, bahkan memiliki kedudukan yang sangat panting bagi kesuksesan hidup individu.

Dewasa ini kedua variabel tersebut direpresentasikan oleh suatu konsep yang sangat popular, yaitu *Emotional Intelligence* (Coleman, 1996), yang menyatakan bahwa *emotional intelligence is the single most important factor for personal adjustment, success in relationship, and in job performance.* Dengan demikian inteligensi emosional, tidak hanya menyangkut persoalan yang terkait dengan aspek *intra-personal* (pribadi) melainkan juga aspek *interpersonal* (sosial). Yang keduanya saling bersinggungan secara fungsional dalam wujud perilaku individu sehari-hari. Walaupun sebenarnya secara konseptual dan konstruk keduanya tidak sepenuhnya sama.

Pada hakekatnya kecakapan sosial-pribadi banyak dirumuskan secara berbeda, *intrapersonal* dan *interpersonal* (Gardner, 1993), *self-knowledge* dan *interpersonal skills* (Gysbers, 1975), dan atau *personal and social skills* (Myrick, 1993). Ketiga rumusan tersebut pada hakekatnya memiliki maksud dan pengertian yang relatif sama, yaitu menggambarkan antara kecakapan yang terkait dengan pribadi individu dan orang lain atau lingkungannya yang didasari dengan adanya komitmen *transcendental,* yaitu dengan pencipta-Nya. Kedua relasi intra dan inter pribadi merupakan suatu kesatuan yang secara fungsional sulit dipisahkan secara diskrit, sehingga kedua kecakapan dipandang lebih fungsional dan bermakna, manakala disatukan.

b. Definisi Kecakapan Sosial-Pribadi

Kecakapan sosial-pribadi secara komprehensif dapat dipahami sebagai pemerolehan kesadaran diri dan sosial (Gysbers, 1990 ; Evers etc.,1998), penerimaan diri dan harga diri atau *self-esteem* (Gysbers, 1990 ; Myrick, 1993), membuat pilihan yang sehat dan keputusan yang efektif (Gysbers, 1990), manajemen waktu (mengasumsikan bertanggung jawab atas perilakunya) (Gysbers, 1990 ; Evers etc.,1998), belajar resolusi konflik (Gysbers, 1990), keterampilan berkomunikasi (Evers etc., 1998), respek terhadap perbedaan individu dan bekerja sama (Gysbers,1990 ; Myrick, 1993 ; Evers etc., 1998), dan keterampilan kepemimpinan (Evers etc., 1998).

Berdasarkan berbagai rujukan tersebut di atas maka kecakapan sosial-pribadi dapat didefinisikan sebagai kecakapan yang berkenaan dengan pemer-

olehan kesadaran diri dan kolektif, harga diri *(self-esteem),* membuat keputusan, manajemen waktu, resolusi konflik, keterampilan berkomunikasi, menghargai perbedaan dan bekerja sama, dan keterampilan kepemimpinan, sehingga dapat hidup mandiri dan bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan. Untuk lebih jelasnya kata-kata kunci kecakapan sosial-pribadi dapat diikuti penjelasannya lebih lanjut.

Pertama, memperoleh kesadaran diri dan kolektif. Memperoleh kesadaran diri dan kolektif dapat diartikan sebagai kecakapan individu dalam memahami diri sendiri sebagai makhluk pribadi dan sosial *(self- and collective- awareness or consciousness)*. Untuk dapat memahami dirinya, maka individu harus tahu karakteristik dirinya, baik yang menyangkut kemampuan, minat, maupun aspirasi, di samping keberadaannya sebagai makhluk pribadi, sosial, dan beragama.

Kedua, memperbaiki harga diri *(self-esteem, self-concept, self-worth, self-acceptance,* dan sebagainya) paling tidak istilah ini ada sekitar 15 istilah yang berbeda (Strein, 1995). Pada dasarnya rasa harga diri terkait dengan berbagai elemen, elemen kognitif dapat dikarakteristikkan dengan rasa memiliki kekuatan dan rasa percaya diri, elemen afektif dapat diindikasikan dengan rasa harga diri yang tinggi dan rendah, dan elemen evaluatif dapat diindikasikan dengan apa yang seharusnya seorang lulusan dapat lakukan *(ideal standard)*.

Ketiga, membuat pilihan sehat dan keputusan efektif. Kecakapan ini merupakan kecakapan pribadi yang sekaligus kecakapan sosial, sehingga tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan mengendalikan dirinya sendiri, melainkan juga diperlukan kemampuan mengendalikan orang lain, karena keputusan pilihan dan keputusan yang dibuat seringkali melibatkan orang lain. Adapun kecakapan membuat pilihan yang sehat dan keputusan efektif dapat diidentifikasi melalui kemampuan membuat keputusan, mengidentifikasi sumber informasi, menentukan tujuan, dan mengambil tindakan yang perlu untuk mencapai tujuan.

Keempat, manajemen waktu. Kecakapan mengelola waktu sangat memerlukan adanya komitmen diri yang kuat dengan dilandasi tanggung jawab, yang tidak hanya terkait dengan dirinya sendiri, orang lain, bahkan dengan Tuhan. Dalam kata hikmat disebut bahwa waktu adalah laksana pedang, jika tidak bisa menggunakannya dengan benar, maka waktu itu akan membunuh diri sendiri. Oleh karena itu dengan dilandasi tanggung jawab, maka melakukan manajemen waktu yang efektif dan efisien merupakan kecakapan yang penting bagi eksistensi setiap individu. Kecakapan mangelola waktu dilihat melalui kemampuan menentukan prioritas, mengelola beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan, mengalokasikan waktu yang seefisien mungkin untuk memenuhi batas waktu, dan bersemangat dalam memulai pengerjaan tugas.

Kelima, kemampuan resolusi konflik. Kemampun resolusi konflik merupakan kemampuan pribadi dan sekaligus kemampuan sosial, karena konflik yang terjadi tidak hanya terjadi pada level pribadi, melainkan juga pada level sosial. Adapun kemampuan resolusi konflik dapat ketahui melalui kemampuan mengidentifikasi sumber konflik, kecakapan resolusi konflik emosi, kecakapan resolusi konflik nilai, dan kecakapan resolusi konflik

Keenam, keterampilan berkomunikasi. Kecakapan ini merupakan kecakapan instrumen yang diperlukan dalam membangun relasi sosial, sehingga individu dapat menangkap ide dan mengkomunikasikannya kepada orang lain (sebagai pasangannya). Kecakapan ini dapat diindikasikan dengan kemampuan membuat percakapan, kecakapan berkomunikasi secara lisan dan tertulis, dan kecakapan berkomunikasi non-verbal kebutuhan.

Ketujuh, respek terhadap perbedaan individual dan bekerja sama. Kecakapan ini sangat terkait dengan kepentingan setiap individu yang menghadapi kondisi masyarakat yang plural dan hiterogin. Kecakapan ini dapat ditunjukkan dengan kemampuan menghargai orang lain, bersikap positif terhadap orang lain, dan kesediaan dan kemampuan membantu dan bekerja sama.

Kedelapan, keterampilan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan merupakan keterampilan yang sangat diperlukan oleh setiap individu, terlebih-lebih ketika dia dalam kehidupan berkelompok atau berorganisasi. Dengan demikian kehadiran dia lebih fungsional dan kontributif. Adapun keterampilan kepemimpinan dapat diindikasikan dengan kemampuan mengkoordinasikan kerja teman sebayanya dan bawahannya, mendorong hubungan kelompok yang positif, mengarahkan dan membimbing orang lain, mendelegasikan tugas-tugas kerja, dan memotivasi orang lain.

2. Perencanaan Individual

Perencanaan Individual mencakup kegiatan bimbingan yang membantu semua siswa, dan orangtua atau wali siswa, untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola pribadinya, seperti halnya juga dalam belajar dan perencanaan karir. Dalam kegiatan ini, siswa mengevaluasi tujuan bimbingan bidang sosial-pribadi. Perencanaan individual pada dasarnya menekankan pada kegiatan interpretasi tes dan konseling informal. Perencanaan individual disajikan melalui strategi-strategi sebagai berikut: manajemen kasus *(case management),* penilaian individual *(individual appraisal),* kepenasehatan individual, penempatan dan *follow-up.*

Pertama, manajemen kasus *(case management),* konselor memonitor kemajuan dan rencana siswa dalam kaitannya dengan ranah sosial-pribadi.

Kedua, penilaian individual *(individual appraisal*), konselor membantu siswa dalam menggunakan informasi hasil penilaian diri. Mereka bersama-sama menganalisis dan mengevalusi kemampuan, bakat, minat, keterampilan, dan prestasinya. Penggunaan informasi penilaian yang sesuai, menjadi suatu dasar yang penting dalam mengembangkan rencana siswa jangka pendek dan panjang.

Ketiga, pertimbangan individual *(individual advisement),* pelibatan siswa, orangtua/wali siswa, dan staf sekolah dalam perencanaan suatu program yang memenuhi kebutuhan individual siswa adalah suatu bagian pertimbangan yang sangat penting. Konselor bekerja secara langsung dengan siswa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sosial-pribadi.

Keempat, penempatan dan tindak lanjut memungkinkan konselor membantu para siswa sebagaimana mereka maju melalui sekolah sampai dunia kerja. Para konselor menfokuskan diri pada kegiatan memberian informasi dan pertimbangan, membantu untuk menegakkan jaringan, dan melaksanakan konseling dalam menghadapi konflik interpersonal.

Contoh kegiatan perencanaan individual, yaitu: Bermain peran kesadaran karir; Diskusi eksplorasi karier; rencana 4 tahun membayangkan karir.

3. Layanan Responsif

Layanan responsif dimaksudkan untuk menangani urusan siswa yang mendesak yang tujuannya adalah pencegahan, intervensi, dan pengalihtanganan *(referral)* jika diperlukan. Dengan demikian layanan responsif terdiri atas mengkoordinasikan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan urusan siswa yang mendesak melalui konsultasi, konseling pribadi, konseling krisis, dan referal. Metode penyampaian ini diawali oleh siswa melalui referal diri, guru, orangtua atau wali siswa, para profesional dan kelompok pendukung lainnya.

Layanan responsif dilaksanakan melalui beberapa strategi. *Pertama,* konsultasi. Konselor berkonsultasi dengan siswa, orangtua atau wali siswa, guru, personil sekolah lainnya, dan agen-agen yang ada di masyarakat mengenai strategi membantu siswa. Konselor sekolah berperan sebagai penasehat siswa. Oleh karenanya layanan ini mencakup partisipasi dalam tim pengkajian siswa dan tim pengelolaan siswa.

Kedua, konseling personal membantu siswa dalam rangka meraih keberhasilan sekolah. Konseling ini diberikan melalui layanan kelompok kecil dan individu. Konseling personal membantu siswa dalam mengidentifikasi masalah, penyebab, alternatif, dan kemungkinan konsekuensi-konsekuensi, sehingga tindakan yang sesuai dapat dilakukan. Konseling tersebut secara normal diberikan dalam jangka pendek. Konselor sekolah tidak memberikan layanan terapi. Jika diperlukan, sumber-sumber referal yang sesuai akan digunakan.

Ketiga, konseling krisis memberikan layanan pencegahan, intervensi, dan tindak lanjut. Konseling dan dukungan diberikan kepada siswa dan keluarganya yang menghadapi krisis. Jika perlu, sumber-sumber referal yang sesuai digunakan. Konselor sekolah seharusnya memberikan suatu peran kepemimpinan dalam proses tim intervensi krisis di wilayahnya (kota/kabupatennya).

Keempat, referal, konselor memberi rujukan siswa dan orangtua atau wali siswa ke pusat-pusat layanan bantuan di masyarakat untuk mengatasi situasi dengan rentang waktu lama yang mencakup problem bunuh diri, kekerasan, kekejaman emosional, kekejaman fisik dan seksual, penolokan, penyalahgunaan obat, hamil muda, dan perceraian. Untuk menjamin dukungan, konselor perlu memelihara komunikasi terus menerus dengan pusat layanan bantuan yang terlibat dan siswa yang dirujuk. Sumber rujukan dapat mencakup: pusat konsultasi kesehatan mental, layanan sosial, dan layanan kenakalan remaja.

4. Dukungan Sistem

Komponen ini memberikan dukungan terhadap metode pelayanan sebelumnya. Komponen ini memiliki dua bagian, yaitu aktivitas manajemen dan aktivitas atau layanan yang diimplementasikan oleh staf konseling yang mendukung keseluruhan program pendidikan. Aktivitas manajemen mencakup anggaran, fasilitas, kebijakan dan prosedur, riset, dan pengembangan sumber. Kegiatan manajemen ini memungkinkan staf konseling berinisiatif dalam berbagai hal, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, pengembangan profesional. Konselor harus secara teratur meng-*up-date* pengetahuan dan keterampilan profesionalnya. Hal ini melibatkan diri untuk berpartisipasi dalam atau melaksanakan *in-service training,* menghadiri pertemuan profesional, menyelesaikan perkuliahan yang relevan, dan berkontribusi terhadap publikasi ilmiah.

Kedua, hubungan staf (sekolah) dan masyarakat. Konselor memberikan orientasi kepada staf dan anggota masyarakat tentang program bimbingan dan konseling melalui penggunaan surat kabar, media lokal, dan presentasi sekolah dan masyarakat. Konselor yang melayani masyarakat atau lembaga konsultasi akan menjadi contoh, bagaimana menggerakkan dukungan masyarakat. Demikian juga melayani komite kurikulum baik pada tingkat departemen maupun tingkat kelas dan terlibat dalam supervisi lapangan dan kegiatan yang membantu dalam menggerakkan dukungan staf.

Ketiga, konsultasi dengan guru dan staf lainnya. Konselor berkonsultasi dengan guru-guru dan anggota staf lainnya secara regular untuk memberikan informasi dan dukungan kepada staf serta menerima umpan balik terhadap kebutuhan siswa yang muncul dengan tiba-tiba.

Keempat, jangkauan ke orangtua atau wali siswa *(parent/guardian outreach).* Konselor siap memberikan dukungan dan infromasi yang terus menerus untuk orangtua atau wali mengenai anak-anaknya tentang perkembangan sosial-pribadinya, serta membangun kaitan penting lainnya antara kelas dan keluarga.

Kelima, jangkauan kepada masyarakat. Aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk membantu konselor dan guru, sehingga mereka dapat mengetahui banyak tentang sumber-sumber di masyarakat, budaya lokal, dan sebagainya, Jaringan konselor dengan agen layanan sosial didasarkan atas kegiatan periodik.

Sistem Manajemen BK Berbasis Kompetensi

1. Persetujuan Manajemen
   Konselor sekolah dan persetujuan administrator sekolah mencakup pernyataan tanggung jawab oleh setiap konselor tentang hasil program konselor yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir tahun.
2. Tim Penasehat
   Tim penasehat adalah sekelompok orang yang ditunjuk untuk mereviu hasil program bimbingan dan membuat rekomendasi. Mereka terdiri atas siswa, guru, otangtua, konselor, pengurus sekolah, dan anggota masyarakat.
3. Penggunaan data
   Program sekolah hendaknya dibangun atas dasar data yang ada. Penggunaan data untuk mempengaruhi perubahan dalam sistem sekolah adalah adalah bersifat integral yang menjamin bahwa setiap siswa mendapatkan keuntungan dari program konseling.
4. Rencana Tindakan
   Ada dua tipe rencana tindakan, yaitu rencana tindakan kurikulum bimbingan dan menutup kesenjangan rencana tindakan. Rencana tindakan kurikulum bimbingan mencakup 1) domain, standard dan kompetensi yang dimaksud, 2) deskripsi aktivitas nyata, 3) kurikulum atau bahan yang digunakan, 4) kegiatan yang harus diselesaikan, 5) orang yang bertanggungjawab untuk penyelenggaraan delivery, 6) alat untuk mengevaluasi keberhasilan siswa, dan 7) hasil yang diharapkan dari siswa. Menutup kesenjangan rencana tindakan juga menjelaskan data yang mendukung keputusan dalam memenuhi kopmetensi ini.
5. Penggunaan waktu
   Program konseling ini menghendaki sebagian besar waktu konselor untuk kontak langsung dengan siswa. Dengan demikian waktu siswa semata-mata untuk pencegahan dan pemenuhan kebutuhan siswa.

6. Kalender
   Kalender kegiatan bimbingan perlu dibuat untuk menjadi pegangan siswa, orangtua, guru, dan kepala sekolah, terutama untuk mendukung kelangsungan kegiatan bimbingan.

Akuntabilitas

Untuk menjamin akuntabilitas layanan BK, maka setidak-tidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, laporan hasil, yang mencakup proses, persepsi dan data hasil, menjamin program yang dilaksanakan, dianalisis untuk efekvitias, dan diubah dan diperbaiki sebagaimana diperlukan. Kedua, evaluasi kinerja konselor sekolah berisi standar dasar dari praktek yang diharapkan konselor sekolah dalam mengimplementasikan suatu program konseling sekolah. Standar kinerja berfungsi sebagai suatu dasar untuk evaluasi konselor dan suatu alat untuk evaluasi diri konselor. Ketiga, audit program memberikan bukti penjajaran dengan Model Nasional untuk Program Konseling Sekolah. Tujuan utamanya untuk mengumpulkan informasi untuk membimbing tindakan masa depan berkenaan dengan program dan memperbaiki hasil bagi siswa di masa depan.

Model Bimbingan Sosial-pribadi

Model Bimbingan Sosial-pribadi pada hakekatnya dapat dilakukan dengan menggunakan BK individual dan kelompok. BK individual terutama menangani individu yang bersifat unik, sementara itu BK kelompok terutama untuk menangani individu yang memiliki kebutuhan sama, terutama untuk layanan preventif dan pengembangan, di samping untuk layanan kuratif. Misalnya, untuk layanan pengembangan kecakapan sosial-pribadi, misalnya dapat digunakan teknik *life skills training*.

Penutup

Demikian beberapa pokok pikiran tentang Model Bimbingan Sosial Pribadi dalam layanan BK Berbasisi Kompetensi yang terutama masih berkisar tentang konsep dasarnya, sementara itu program dan implementasinya dapat disampaikan dan dibahas pada kesempatan lain mengingat waktu yang tersedia relatif terbatas.

Tulisan ini disampaikan dan dibahas dalam Seminar Majelis Guru Pembimbing SMA se-Kota Yogyakarta, pada tanggal 10 Maret 2004 di SMA Bopkri 1 Yogyakarta.

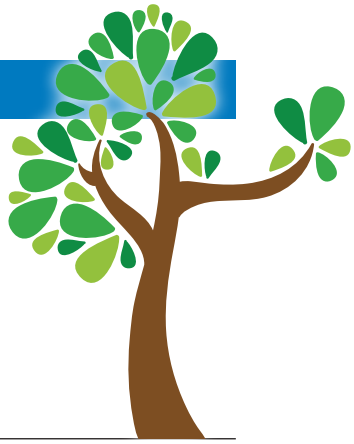

Pengembangan Tema-tema Penelitian dalam Konseling

Pendahuluan

Pada dasarnya rentangan pengalaman yang luas dapat memainkan peran yang penting bagi peneliti dalam mengembangkan topik penelitian. Dalam mengembangkan topik penelitian, seorang peneliti dapat melibatkan segala kemampuan, kreativitas, dan pengalamannya terutama terkait dengan bidang yang digelutinya. Tentu saja hal ini berlaku pula bagi peneliti bidang konseling.

Kiranya perlu disadari bahwa mengembangkan tema-tema penelitian sering kali sulit dilakukan, terutama bagi peneliti yang masih memiliki pengalaman, karena berpikir intuisinya terbatas, sehingga dalam merumuskan suatu masalah penelitian saja tidak mudah dilakukan. Di samping pengalaman, penguasaan metodologi penelitian dan implementasinya juga ikut berkontribusi bagi seseorang dalam merumuskan tema-tema penelitian.

Menyadari akan kondisi tersebut kiranya, lokakarya metodologi penelitian bidang konseling merupakan suatu upaya yang efektif untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam mengembangkan penelitian bidang konseling yang diawali dengan mengidentifikasi tema-tema mutakhir bidang konseling.

Desain Penelitian dalam Konseling

Jika memahami bidang kelimuan konseling, banyak ragam metodologi penelitian yang dapat dipilih, baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Pertama, jenis penelitian kuantitatif yang dapat dipilih di antaranya penelitian kausal-komparatif, penelitian eksperimental, dan penelitian korelasional. Kedua, jenis penelitian kualitatif yang dapat dipilih di antaranya penelitian kasus, penelitian naturalistik-ethnografik, dan penelitian fenomonologik. Bahkan belakangan ini sangat mengemuka pendekatan penelitian yang mulai menarik perhatian bagi semua bidang, termasuk bidang konseling, yaitu pen-

dekatan Penelitian dan Pengembangan (Reserach and Development) dan Penelitian Tindakan *(Action Research)*. Kedua penelitian terakhir ini sering kali dilakukan dengan menggunakan *mixed quantitive-qualitative research,* yaitu perpaduan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Pemilihan jenis penelitian oleh seorang peneliti sangat tergantung pada tema atau topik penelitian yang diangkat. Bahkan yag menarik adalah tidaklah sedikit terjadi bahwa pemilihan jenis penelitian bermula dari preferensi dari peneliti sendiri. Hal ini sangat terkait dengan penguasaan metodologi yang sudah menjadi bagian dari keahlian dirinya. Karena itu yang panting dalam konteks ini adalah apapun pilihan jenis penelitiannya, dalam implementasinya harus terjaga konsistensi di antara tahap dari tahap identifikasi masalah sampai dengan analisis datanya.

Identifikasi Tema-tema penelitian

Merumuskan tema penelitian merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangkaian kegiatan penelitian, karena itu tidaklah mudah kegiatan ini dilakukan oleh sembarang orang tanpa memiliki modal pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Karena itu antara peneliti yang berpengalaman dan tidak berpengalaman memiliki kemampuan yang berbeda secara berarti dalam merumuskan tema penelitian. Heppner (1992) mengatakan bahwa *the experienced researcher has a very large knowledge base, not only about one topic but about several other these topics in sophistical ways, identifying the most important findings, combining research findings, dovetailing an idea from one topic with another, and elaborating on or extending ideas in novel ways.* Pernyataan ini menegaskan bahwa betapa produktifnya peneliti berpengalaman dalam merumuskan tema-tema penelitian.

Selanjutnya ditegaskan bahwa kekayaan informasi dan pengalaman bidang konseling juga ikut mewarnai kemampuan peneliti berpengalaman dalam menghasilkan tema-tema penelitian. Sebagaimana ditegaskan juga oleh Heppner (1992) bahwa *the experienced counseling researcher often has a considerable wealth of information from his or her applied counseling experiences that can be the source of many ideas and hypotheses.*

Sebaliknya peneliti yang pemula (untuk menyebut *the inexperienced researcher*) pada dasarnya memiliki pengetahuan yang relatif kurang sekali dalam mengembangkan tema-tema penelitian, bahkan seringkali mereka cenderung mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi informasi yang sangat penting dan relevan. Heppner (1992) menyatakan bahwa *the inexperienced researcher has far less knowledge about specific reserach topics, and ofthen has trouble identifying the most important or relevant information. He has perhaps only a vague*

sense of the various rserach activities, and harbors doubts about his or her ability to do reserach as well as his or her interest in conducting research.

Setelah memperhatikan gambaran secara detail perbedaan antara peneliti berpengalaman dan peneliti yang kurang berpengalaman, maka upaya identifikasi tema-tema penelitian bidang konseling sangatlah membantu dalam mengembangkan kegiatan penelitian bidang konseling. Untuk kepentingan ini dapat dilakukan beberapa langkah. Pertama, memulai dengan mengumpulkan informasi tentang penelitian terdahulu, baik dalam bidang konseling maupun di luar bidang konseling. Selanjutnya, membaca jurnal secara reguler yang disertai dengan mendiskusikan temuan-temuan yang ada di jurnal dengan orang lain yang membaca jurnal tersebut. Akhirnya berkonsultasi dengan *research supervisor.*

Berdasarkan penelitian terdahulu di bidang konseling, Heppner (1992) mengemukakan ada empat isu utama terkait dengan pembuatan tema penelitian, yaitu tema yang terkait dengan minat kita, tema yang terkait dengan riset terdahulu, tema yang terkait dengan peranan teori, dan tema yang terkait dengan penggunaan riset dalam menjawab persoalan kehidupan nyata. Untuk lebih jelasnya berikut akan dirinci lebih lanjut.

Pertama, tema yang terkait dengan minat. Tema ini dapat diyakini memiliki kontribusi banyak bagi pengembangan bidang konseling. Tema ini bisa lahir dari apa yang sangat kita dambakan untuk diteliti tanpa memandang kondisi yang ada, misalnya minat atau bidang konsentrasi kita, misalnya: bagi yang berminat bidang konseling sekolah, tema yang mungkin bisa diangkat tema tentang penangan kesulitan atau kegagalan belajar; bagi yang berminat bidang psikologi klinis, tema yang dapat diangkat adalah terkait dengan penanganan kondisi traumatik baik akibat perlakuan keras dalam rumah tangga, akibat bencana alam yang dahsyat, maupun akibat lainnya; bagi yang berminat bidang konseling keluarga, tema yang dapat diangkat adalah tema tentang penanganan disharmoni keluarga; bagi yang berminat bidang konseling multi kultural, tema yang dapat diangkat adalah penanganan anak yang menghadapi masalah konflik sosial; bagi yang berminat bidang konseling bagi anak berbakat, tema yang dapat diangkat adalah penanganan anak *underachiever*, dan sebagainya.

Kedua, tema yang terkait dengan riset terdahulu. Tema penelitian ini tidak bisa dipisahkan dari hasil penelitian terdahulu. Tema penelitian ini lebih diorientasikan untuk menjawab kebutuhan pengembangan teori sebelumnya. Di samping itu dapat diorientasikan untuk menambah satu konstruk, dua konstruk atau lebih bagi teori sebelumnya. Demikian juga tema ini dapat terkait dengan pengembangan instrumen baru, bahkan juga untuk pengembangan suatu model. Walaupun penelitian yang orisinal itu baik sekali, namun dalam bidang

konseling kiranya sudah cukup bahwa basis pengetahuan konseling itu meningkat setapak demi setapak, antara satu teori atau konsep yang satu dengan lainnya sangat terkait, bahkan hampir selalu terjadi teori yang belakangan selalu terkait dengan teori sebelumnya. Dalam konteks ini model R & D *(Research and Development)* sangat tepat diterapkan, di samping penelitian korelasional, penelitian eksperimen dan penelitian tindakan kelas. Dalam konteks ini tema penelitian yang dapat diangkat, di antaranya: pengembangan konsep tentang kesuksesan studi, pengembangan instrumen evaluasi domain afektif, pengembangan model program bimbingan akademik, sosial-personal, atau karier pada jenjang SD, SMP atau SMA.

Ketiga, tema yang terkait dengan peranan teori. Sejumlah riset bidang konseling seringkali menerapkan atau menguji teori-teori kepribadian, perilaku manusia, dan proses persuasi dalam konseling. Misalnya, Stanley strong (1968) mengawali dalam mengkonseptualisasikan konseling sebagai suatu proses pengaruh sosial dan menggunakan riset dan teori tentang persuasi dari disiplin psikologi sosial untuk mengembangkan suatu model pengaruh dua-fase dalam konseling. Sesudah itu banyak sekali penelitian yang telah menguji persuasi atau proses pengaruh sosial dalam konseling. Demikian juga, perspektif teoretik lainnya yang mempengaruhi konseling yaitu model perkembangan dalam pelatihan konselor. Dalam konteks ini kiranya tema-tema penelitian yang bisa dikembangkan adalah teori-teori konseling dikaitkan dengan teori-teori di luar konseling yang mungkin dapat bermanfaat bagi tugas keprofesional konselor, misalnya teori-teori konseling dikaitkan dengan teori-teori komunikasi, teori-teori moral, dan sebagainya.

Keempat, tema yang terkait dengan penggunaan riset dalam menjawab persoalan kehidupan nyata. Pada kenyataannya sungguh banyak penelitian bidang konseling berasal dari persoalan nyata dalam kehidupan. Demikian juga, suatu cara lainnya untuk mengidentifikasi tema penelitian adalah merenungkan apa yang tidak diketahui dan tidak jelas tentang proses konseling, program-program perlakuan, atau program *outreach*. Berkaitan dengan ini tema-tema penelitian yang dapat diangkat di antaranya: konseling terhadap anak yang *drug-addicted,* konseling traumatik pasca gempa dan ancaman gunung meletus, penerapan konseling sibernetik, pengembangan kompetensi profesi konselor, pengembangan konseling Islami, dan sebagainya.

Memilih tema penelitian

Sejumlah tema penelitian tersebut di atas masih dapat dikembangkan lagi seiring dengan perkembangan ilmu dan dinamika sosial dan budaya. Walaupun demikian untuk kepentingan praktis, kita dapat memilih di antaranya tema-

tema yang ada. Untuk pemilihan tema penelitian, setidak-tidaknya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, di antaranya: kemampuan metodologi dan penguasaan substansi, kemanfaatan yang akan diperoleh, fisibilitas untuk dapat diteliti, biaya dan waktu yang tersedia, subjek dan sumber informasi yang dapat dijangkau, cakupan wilayah penelitian, dan lainnya.

Penutup

Demikianlah beberapa hal penting terkait dengan identifikasi tema-tema penelitian bidang konseling. Mudah-mudah dapat dijadikan *triger* dalam mengembangkan kegiatan penelitian, baik untuk pengembangan keilmuan konseling, maupun pengembangan program konseling, sehingga profesi konseling semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh *stakeholders*. Yang jelas disiplin konseling secara terus menerus membutuhkan upaya riset dan pengembangan seiring pergeseran kebutuhan individu dan perubahan masyarakat dan bangsa.

Tulisan ini dibahas dalam Lokakarya Pengembangan Tema-tema Penelitian Bidang Konseling yang diselenggarakan Jurusan PPB FIP UNY pada 28 Juni 2006 di Kampus Karangmalang Yogyakarta.

Pendidikan Tinggi

Keberadaan umat Islam sebagai hamba dan khalifah Allah di atas bumi tidak akan mampu menampilkan dirinya secara berarti baik secara duniawiyah maupun ukhrawiyah, manakala tidak tercerahkan akal dan qalbunya.

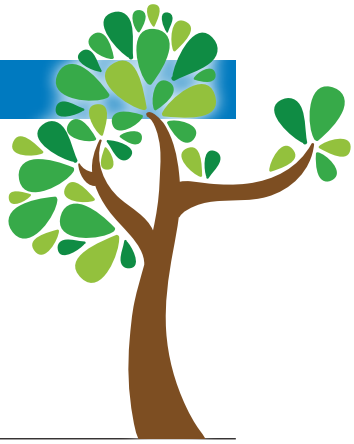

Tantangan dan Pengembangan 'Center of Excellence'

Pengantar

- Tuntutan kompetisi dalam era global tidak dapat dihindari.
- Bangsa Indonesia berada dalam krisis multidimensional yang berkepanjangan.
- Indonesia dewasa ini berada dalam masa transisi menuju Indonesia baru
- Untuk menghadapi kondisi objektif tersebut diperlukan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan warga yang bermoral, bermartabat, terdidik, dan kompeten.

Kondisi Pendidikan dan Mahasiswa Dewasa Ini

- Aksesibilitas pendidikan masih rendah, terutama jenjang PT, yang hanya sekitar 13% dari populasi. Demikian juga kualitas pendidikan di Indonesia masih berada jauh di bawah bangsa-bangsa lainnya, khususnya di Pasifik.
- Pendidikan nasional masih menghadapi teka-teki yang besar, ketika menghadapi pengelolaan pendidikan yang didasarkan pada "kebijakan otonomi".
- Kualitas pendidikan ditunjukkan baru oleh sejumlah kecil siswa atau mahasiswa yang menggembirakan, baik dilihat dari penguasaan substansi, bahasa, maupun kepemimpinan, tetapi sebagian besar masih perlu pembinaan.
- Mahasiswa cenderung menunjukkan sifat pragmatis, hedonis, dan realis, sehingga masih belum menunjukkan kelompok generasi yang membanggakan, padahal masa depan bangsa ada di pundak mereka.

Ideal Mahasiswa

- Mahasiswa sebagai generasi muda terpilih pada dasarnya memiliki tanggung jawab moral sebagai *moral force* dalam gerak pembangunan.

- Mahasiswa dapat menunjukkan fungsi dan perannya secara optimal manakala mereka mampu membangun dirinya dengan sikap, pikiran, dan amal secara produktif.
- Mahasiswa yang produktif secara vertikal dan sosial, manakala mereka sebagai cendekiawan nuda menjaga komitmen dirinya dan bergerak dengan orientasi populis daripada birokratik.
- Kini berada dengan status mahasiswa, besuk menjadi pemimpin. *(Now is a student, tomorrow would be a leader)*

Hambatan dan Tantangan Mahasiswa Indonesia

- Hanya *sebagian kecil* mahasiswa yang mampu menunjukkan kompetensi akademik dan motivasi belajar yang membanggakan.
- Minimnya mahasiswa dalam keterampilan berbahasa Asing.
- Tuntutan lulusan PT yang memiliki kemampuan kompetitif semakin meningkat.
- Semakin derasnya pengaruh budaya asing (hedonistik dan pragmatik) melalui informasi global yang semakin sulit difilter.

Strategi Pembinaan Mahasiswa

- Perlu dibangun institusi pembinaan mahasiswa yang dilandasi oleh nilai-nilai keunggulan.
- Institusi pembinaan mahasiswa seharusnya dipandang sebagai laboratorium sosial yang visioner yang didukung oleh anggota pengurus yang memiliki komitmen tinggi.
- Institusi pembinaan mahasiswa yang produktif perlu terus dihidupkan dengan program-program yang memberdayakan semua anggota dan institusi.
- Institusi pembinaan mahasiswa harus didasarkan pada prinsip dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa.
- Institusi pembinaan mahasiswa dapat berkembang secara progresif, manakala dapat diupayakan jejaring (networking) secara terus menerus.
- Institusi pembinaan mahasiswa perlu terus mengembangkan kecakapan problem solving berkenaan dengan isu-isu keumatan baik pada level lokal, nasional, maupun global.
- Mahasiswa, terutama yang menjadi pemain utama institusi pembinaan mahasiswa, perlu menunjukkan keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan.

Penutup

- Pusat Keunggulan Mahasiswa (Center of Student Excellence) harus dipandang sebagai kebutuhan oleh setiap mahasiswa.

- Untuk dapat menjamin eksistensi SCE perlu didukung dengan komitmen yang tinggi di antara para anggotanya dengan dukungan para stakeholder lainnya.
- Semoga upaya yang terpuji ini mendapat dukungan dari Allah swt.

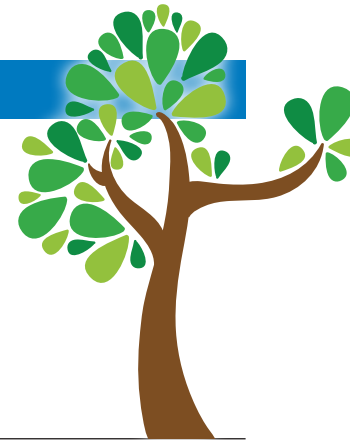

Kebijakan UNY dalam Pengembangan KKN

Pengantar

PADA dasarnya universitas tidak hanya bertanggungjawab dalam pengembangan keilmuan, namun yang juga sama pentingnya bahwa universitas memiliki tanggung jawab sosial (Bok, 1982). Karena itulah universitas tidak harus menjadi menara gading *(Ivory Tower)* melainkan menara air *(Water Tower),* artinya bahwa universitas berdiri tegak tidak hanya untuk kemegahan, melainkan keberadaannya seharusnya bisa memancarkan air kehidupan bagi sekitarnya. Dengan demikian UNY sebagai suatu universitas yang handal, seharusnya mampu memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya sebagai wujud tanggung jawab sosialnya.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial, Bok (1982) menegaskan bahwa *universities have obligation to serve society by making the contribution they are uniquely able to provide*. Dari pernyataan ini dapat ditangkap suatu makna, bahwa setiap universitas dalam menunjukkan tanggung jawab sosialnya diwujudkan dalam kontribusinya yang bersifat unik sesuai dengan visi dan misinya. Dengan demikian UNY sebagai universitas yang masih memiliki misi utama yang salah satunya bidang pendidikan, merasa perlu untuk menfokuskan tanggung jawab sosialnya di bidang pendidikan, tanpa mengabaikan bidang lainnya, terlebih-lebih bidang yang relevan.

Dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya, UNY memandang bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah suatu program pendidikan kurikuler yang sangat diandalkan. Karena program KKN dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan segala kemampuan, kecakapan dan keterampilan hidupnya dalam menghadapi persoalan kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat.

Pada prakteknya, program KKN di universitas, ada yang sudah ditiadakan, ada juga yang masih dipertahankan. Universitas yang meniadakan program KKN memandang bahwa KKN dinilai sudah tidak relevan lagi karena tidak memberikan manfaat yang banyak, bahkan dipandang Assidiqie (2005) sudah tidak efektif lagi, dengan beberapa alasan:

*Pertama***,** terbatasnya kemampuan mahasiswa, mahasiswa tidak dapat memecahkan semua permasalahan yang ada di suatu desa. Dalam konteks ini mahasiswa dianggap sebagai "dewa penolong".

Kedua, kemampuan bersosialisasi mahasiswa. Kehidupan mahasiswa di kampus tentu sangat berbeda dengan nilai dan norma sosial dalam masyarakat desa. Kondisi ini mengharuskan seorang mahasiswa untuk menghormati budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Ternyata banyak mahasiswa yang tidak bisa menyesuaikan gaya hidupnya dengan kondisi yang ada di lokasi KKN.

Ketiga, ketidaksesuaian lokasi KKN. Pelaksanaan KKN seharusnya dilakukan di lokasi yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk menggali potensi daerahnya. Kriteria penentuan lokasi KKN harus didasarkan kondisi masyarakat setempat yang perlu untuk diberdayakan.

Keempat, dalam kelompok mahasiswa yang mengikuti KKN biasanya terdapat mahasiswa dari berbagai jurusan. Hal ini sesuai dengan program KKN yang dilaksanakan dengan pendekatan multidisipliner. Namun, kondisi ini akan menyebabkan setiap mahasiswa menjadi kesulitan untuk menerapkan ilmunya masing-masing.

Sebaliknya universitas yang mengharuskan program KKN sebagai salah satu program kurikuler berpendapat bahwa KKN tidak hanya mampu mendukung pengembangan personal *(personal development),* melainkan juga pemberdayaan masyarakat *(community empowerment)* dan pengembangan institusi *(institutional development).* Dengan demikian apa yang kemungkinan bisa dicapai oleh progam KKN jauh lebih banyak daripada jumlah sks-nya.

Berdasarkan berbagai pertimbangan UNY mengambil sikap bahwa KKN diyakini masih relevan untuk dijadikan salah satu program kurikuler. Karena UNY menyadari bahwa UNY memiliki mahasiswa sebagai intellectual capital yang harus terus didukung pengembangannya yang optimal, sementara masyarakat yang memiliki *material capital* perlu terus didukung pengelolaannya secara lebih produktif, serta pemerintah daerah yang memiliki *human capital* perlu terus dilakukan pemberdayaan. Untuk lebih mewujudkan tanggung jawab sosialnya yang lebih bermakna dan meningkatkan efektivitas dan relevansi program KKN dipandang perlu dikembangkan berbagai macam KKN, di antaranya: KKN Konvensional, KKN Tematik (Hadapi Bencana, Penuntasan Wajar Dikdas, dan Pemberantasan Buta Aksara, dan KKN-PPL).

Pentingnya KKN

Ada beberapa alasan yang melandasi perlunya KKN di UNY, di antaranya:

1) Untuk membentuk lulusan yang utuh (cendekia, mandiri, dan bernurani) perlu peningkatan kecakapan hidup *(academic, vocational, personal, social, dan moral)*.
2) Untuk siap menghadapi tantangan hidup kini dan mendatang diperlukan kompetensi dasar yang mencakup kecakapan *managing self, communicating, managing people and taks, and mobilizing innovation and change (Evers, Rush, Berdrow)*.
3) Mahasiswa yang sudah memiliki jumlah satuan kredit semester (sks) tertentu diasumsikan bahwa mereka sudah memiliki kemampuan dan kesiapan diri untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
4) Program dan kegiatan KKN yang diorientasikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat cenderung lebih menarik dan bermakna.
5) Masyarakat yang menerima program dan terlibat dalam kegiatan KKN cenderung lebih *welcome and friendly*.

Orientasi KKN

UNY dalam tanggungjawabnya yang berkenaan dengan *Community outreach,* sangat berkepentingan mengembangkan berbagai jenis KKN, di antaranya:

*Pertama***,** KKN Konvensional, yaitu KKN yang diarahkan untuk meningkatkan kecakapan hidup mahasiswa, sehingga pada akhirnya mereka siap menjadi warga negara yang baik dan memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat dapat membangun warga dan wilayahnya menjadi lebih baik. Karena itu kegiatan yang menjadi agenda penting dalam KKN Konvensional adalah semua aktivitas yang terkait dengan seluruh potensi masyarakat dan daerah, baik yang berkenaan dengan potensi sosial maupun alam atau fisik.

*Kedua***,** KKN Tematik (Hadapi Bencana, Penuntasan Wajar Dikdas, dan Pemberantasan Buta Aksara)

Kontekstual pada kesempatan ini lebih diorientasikan pada tema-tema tertentu yang menjadi kebutuhan masyarakat, pemerintah atau universitas. Artinya bahwa program KKN yang dirancang dan kegiatan KKN yang dilaksanakan di lapangan hendaknya lebih diarahkan pada kegiatan *recovery* persoalan masyarakat dan mewujudkan cita-cita universitas untuk pembentukan kapasitas mahasiswa. Misalnya, KKN dengan tema hadapai bencana, maka KKN lebih diorientasikan untuk membantu masyarakat dalam kegiatan recovery fisik, rehabilitasi mental, dan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal.

KKN dengan tema Penuntasan Wajar Dikdas, lebih diorientasikan dengan identifikasi anak-anak yang belum sekolah pada usia 7 sampai dengan 15 tahun dengan diketahui berbagai faktor penyebabnya, sehingga dapat dirumuskan alternatif penangannya.

KKN dengan tema pemberantasan buta aksara lebih diorientasikan untuk identifikasi warga yang masih buta huruf, identifikasi potensi warga dan daerah, dan mencari alternatif solusi untuk penanganan buta aksara sesuai dengan kondisinya.

Ketiga, KKN-PPL pada hakekatnya diorientasikan untuk memberikan kesempatan mahasiswa terlibat dalam memberdayakan masyarakat pendidikan, sehingga agenda kegiatannya lebih pada identifikasi persoalan-persoalan fisik atau non fisik yang dapat menghambat dan menunjang proses pendidikan, sehingga dapat ditemukan berbagai alternatif dan upaya yang mampu memberikan dukungan bagi kelancaran proses pendidikan di tempat mana KKN itu berlangsung.

Meningkatkan Produktivitas KKN

KKN sangat memerlukan upaya-upaya yang sistematis, sehingga dapat menunjukkan produktivitas tinggi. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan, di antaranya:

a. Persiapan kemampuan dan keterampilan

Jauh sebelum terjun ke medan KKN, sangatlah dipandang perlu mahasiswa mempersiapkan diri, baik berkenaan dengan kemampuan atau kecakapan, dan keterampilan tertentu yang terkait dengan tema yang dipilih dalam kesempatan KKN periode ini. Kemampuan atau kecakapan dan keterampilan yang sesuai akan menambah kepercayaan diri peserta KKN, sehingga ketika terjun di medan mereka dapat menyelesaikan tugas secara produktif. Persiapan bekal lainnya tentu tidak kalah pentingnya, misalnya segala peralatan yang diperlukan di medan KKN terutama untuk kegiatan pendidikan dan lainnya terkait yang akan dilakukan.

b. Penguasaan medan

Medan KKN pada periode ini memiliki karakteristik tersendiri, terlebih-lebih dikaitkan dengan bencana gempa tektonik yang meluluhlantahkan berpuluh-puluh ribu bangunan rumah dan fasilitas publik, sehingga kehidupan ekonomi dan pemerintahan menjadi lumpuh. Banyaknya polusi barang bekas dan reruntuhan bangunan, kondisi lingkungan wilayah gempa relatif terganggu.

Untuk dapat memasuki wilayah yang tepat dan pengembangan program rehabilitasi dan restrukturisasi yang tepat, sangatlah diperlukan penguasaan medan bagi setiap calon mahasiswa KKN. Penguasaan medan dapat difokuskan pada penguasaan informasi tentang lingkungan fisik dan sosialnya, serta tata cara kehidupan masyarakat yang akan menjadi tempat KKN. Karena itulah observasi dan studi pendahuluan sangat diperlukan sebelum terjun ke lapangan.

c. Kesiapan mental

Kesiapan mental bagi mahasiswa peserta KKN merupakan sesuatu yang sangat penting, karena kemantapan diri, stabilitas emosi, rasa ingin membantu, dan seikap optimisme sangat diperlukan dalam memasuki medan akibat bencana. Jika kesiapan mental tak dimiliki, sangat diduga kemampuan melaksanakan kegiatan KKN tidak akan mampu menunjukkan produktivitas yang tinggi. Dengan demikian setiap peserta KKN harus merasa yakin, bahwa secara psikologis telah memiliki persiapan untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam memberdayakan masyarakat. Jika tidak, maka akan berakibat fatal baik bagi diri sendiri maupun orang lain atau khususnya masyarakat tenpat KKN.

d. Kecakapan sosial dan kepemimpinan

Persoalan yang akan dihadapi di medan KKN sungguh kompleks, sehingga diperlukan penyelesaian secara kolektif. Atas dasar itulah maka setiap peserta KKN seharusnya mampu membangun interkasi antar pribadi dalam kelompoknya. Demikian juga yang tidak kalah pentingnya, peserta KKN harus mampu mengembangkan interaksi dengan masyarakat tempat KKN.

Dalam konteks ini peserta harus mampu menunjukkan keterampilan kepemimpinannya dalam memberdayakan masyarakat.

e. Kolaborasi dengan pemerintah, institusi lain, dan masyarakat

Upaya recovery wilayah bencana adalah menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, institusi non pemerintah (LSM), dan masyarakat. Oleh karena itu peserta KKN perlu sekali membangun kolaborasi, baik dengan pemerintah, institusi non pemerintah (LSM) maupun dengan masyarakat sendiri sebagai stakeholder utamanya. Kolaborasi dapat dilakukan sejak perencanaan dibuat, sampai dengan implementasi, sampai dengan kegiatan monitoringnya.

f. Kegiatan KKN hendaknya bersifat inovatif

Kegiatan KKN yang rutin biasanya memiliki dampak yang kurang meluas, sehingga KKN dapat juga diabaikan keberadaannya bahkan ditiadakan, karena KKN tidak menarik, karena kegiatannya sangat tidak menantang. KKN yang

seharusnya dikembangkan, hendaknya bersifat inovatif, sehingga mampu memberikan perspektif baru dan manfaat yang lebih banyak. Sesuatu yang inovatif cenderung berpotensi untuk menantang.

g. Pendampingan perlu ditingkatkan efektivitasnya

Dalam setiap pelaksanaan KKN, tak terkecuali program KKN ini, peserta KKN akan dampingi oleh DPL. Hal ini tidak berarti bahwa mahasiswa KKN tidak mampu melaksanakan tugas sendiri, namun diyakini bahwa untuk dapat melaksanakan tugas yang lebih terarah dan optimal, kehadiran DPL yang bertanggungjawab untuk mendampingi mahasiswa. Tentu saja pendampingan yang dikehendaki, bukan sekedar formalitas, namun diharapkan DPL dapat menunjukkan keberadaan dan keterlibatannya secara lebih fungsional.

Problem yang dihadapi mahasiswa dan upaya mengatasinya

1. Problem

Adapun problem yang diduga dapat menghambat mahasiswa KKN di antaranya sebagai berikut:

a. Mental
   Mental warga masyarakat yang tradisional dan terbelakang atau terganggu sebagai akibat dari bencana yang telah menimpa sering kali menghambat kelancaran pelaksanaan KKN. Dalam konteks ini sikap tergantung yang sering ditunjukkan oleh masyarakat.
b. Kesehatan lingkungan
   Wilayah target KKN biasanya memiliki lingkungan fisik atau alam yang kurang sehat dan kurang menguntungkan, sehingga menjadi persoalan tersendiri bagi pelaksanaan KKN.
c. Sosial dan budaya
   Kehidupan sosial dan budaya masyarakat target KKN biasanya menunjukkan keunikan tersendiri, yang kadang-kadang kondisinya jauh berbeda dengan kehidupan sosial dan budaya mahasiswa KKN.
d. Rasa Traumatik
   Rasa traumatik cenderung terjadi pada masyarakat akibat bencana. Kondisi ini mempengaruhi kesehatan mental anak-anak.
e. Sikap apatis mahasiswa
   Sikap *reluctant* mahasiswa untuk terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat sering kali menghambat kelancaran implementasi program KKN.

2. Upaya Solusi:

Berdasarkan persoalan yang dihadapi mahasiswa, ada beberapa upaya solusi yang dapat dilakukan, di antaranya:

a. Dalam menghadapi persoalan mental, mahasiswa perlu melakukan pendekatan secara intens dan alamiah, sehingga setiap individu dapat menemukan jati dirinya sendiri. Mengingat setiap individu itu unik, maka dalam melakukan rehabilitasi mental perlu pendekatan yang sehumanis dan sealamiah mungkin.
b. Untuk dapat mempercepat terbentuknya lingkungan sehat, maka mahasiswa KKN baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif bersama-sama warga dan masyarakat dapat memprioritaskan terciptanya lingkungan sehat dengan melakukan pembersihan secara total, tidak setengah-setengah. Dalam kondisi ini benar-benar diperlukan pembersihan lingkungan secara gotong royong, walau tidak mudah dilakukan.
c. Untuk dapat mengatasi persoalan sosial budaya, perlu sekali mahasiswa menciptakan interkasi antar pribadi secara sehat dengan secara proaktif melibatkan diri dalam berbagai akitivitas sosial, apakah itu dalam kegiatan gotong royong atau pertemuan-pertemuan dengan warga dengan *sharing* berbagai pengalaman dan keterampilan.
d. Untuk dapat menghadapi penduduk yang traumatis, sangat diperlukan penyikapan yang positif dan berhati-hati dengan menjaga diri dari perkataan dan perbuatan yang sensitif. Demikian juga mahasiswa dapat menciptakan berbagai kegiatan yang menyenangkan.
f. Untuk dapat menghadapi mahasiswa KKN yang memiliki sikap reluctant, maka diperlukan pendekatan persuasif terhadap mahasiswa, sehingga mereka menyadari akan tanggung jawab sosialnya sebagai anggota masyarakat terdidik.

Penutup

Demikian beberapa pokok pikiran berkenaan dengan kebijakan KKN di UNY sebagai suatu keharusan bagi UNY terkait dengan tanggung jawab sosialnya untuk bisa merespons dan memenuhi kebutuhan masyarakat DIY dan mampu menyiapkan diri mahasiswa untuk suatu saat siap menjadi warga negara yang baik. Mudah-mudahan KKN yang dirancang di UNY dapat ikut serta memberikan kontribusi bagi penyelesaian persoalan warga masyarakat DIY khususnya, demikian juga warga dan masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama bidang pendidikan. Karena itu kehadiran mahasiswa ke masyarakat, diharapkan menjadi bagian dari solusi masalah, bukan lagi menjadi bagian dari

masalah, tanpa terkecuali, baik itu bidang studi kependidikan maupun non kependidikan.

Akhirnya dengan KKN, diharapkan mampu meningkatkan self-awareness dan collective-awareness, sehingga mahasiswa siap menjadi "pelayan masyarakat" atau *"khaadimul ummah"* di tengah-tengah masyarakat.

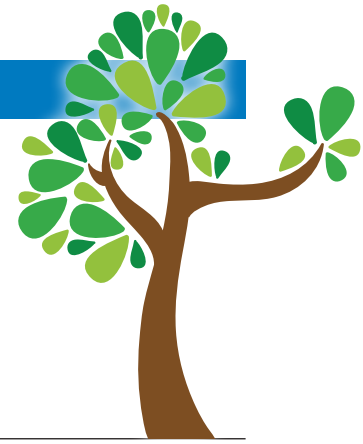

Membelajarkan Tradisi Intelektual Ummat sebagai Proses Pendidikan Masyarakat Berkebangsaan

Pengantar

Manusia dijadikan Allah swt tidak dalam kesendirian, namun dijadikannya dalam bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dengan demikian tak seorang pun di antara kita, ummat Islam, baik sebagai individu maupun masyarakat yang bisa bebas dari keanggotaan suatu bangsa. Artinya, ummat Islam di manapun berada seharusnya menyadari posisinya sebagai masyarakat berkebangsaan.

Untuk menjadi masyarakat berkebangsaan secara fungsional, tidaklah berlangsung secara alamiah, melainkan melalui suatu proses yang terencana secara sistematis. Oleh karena itu upaya yang dianggap paling tepat untuk memenuhi tujuan tersebut adalah membangun sistem pendidikan yang mantap. Sistem pendidikan yang mantap pada dasarnya diyakini mampu memerankan dirinya secara efektif dan fungsional dalam mengantarkan setiap insan, termasuk juga ummat Islam sebagai manusia dan masyarakat yang humanis dan berkebangsaan.

Ummat Islam sebagai masyarakat berkebangsaan tidaklah akan mampu menunjukkan dirinya secara optimal hanya dengan bermodalkan ketaatan dan ketundukan saja, melainkan yang jauh lebih berarti bahwa ummat Islam harus mampu mengkespresikan loyalitasnya dalam berbangsa, terlebih-lebih dalam beragama yang dilandasi pikiran-pikiran kreatif, kritis dan sehat. Oleh karena itu, pembelajaran tradisi intelektual ummat apapun levelnya menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam sebagaimana yang salah satunya ditegaskan oleh Rasulullah saw, bahwa *"Addiinu wal-a'qlu, laa diina liman laa 'aqlaa lahu"*.

Misi utama Rasulullah saw dihadirkan di bumi ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah swt dalam Q.S. Al-Anbiyaa', (21), ayat 107 yang berbunyi *"Wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil*

'aalamiin". Ayat ini mengandung makna bahwa ummat Islam seharusnya mampu memerankan dirinya sebagai makhluk yang mampu memberikan manfaat bagi makhluk lain, terlebih-lebih bagi kemanusiaan. Dengan demikian suatu yang tidak terlalu sulit jika ummat Islam dituntut untuk hidup secara produktif dan konstruktif dalam memasuki masyarakat berkebangsaan.

Masyarakat berkebangsaan

Dalam konteks masyarakat berkebangsaan, ummat Islam seharusnya mampu menunjukkan eksistensi dirinya tidak hanya puas menjadi pengikut saja, melainkan yang jauh lebih ideal mereka diharapkan mampu memerankan dirinya sebagai bagian penting yang ikut memainkan peran strategis dalam masyarakat berkebangsaan. Terlebih-lebih hal ini didorong oleh semangat kekhalifahan sebagimana yang dihembuskan oleh Allah swt melalui firman-Nya dalam QS. Al Baqarah (2): 31 yang menyatakan *"Inni jaa'ilun fi al-ardhi khaliifah"*.

Kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat dan berkebangsaan memang sesuatu yang esensial dalam hidup bersama, terlebih-lebih hidup bersama-sama dengan orang lain (yang beragama selain Islam). Hal ini diperkuat oleh firman Allah swt lainnya dalam QS. Al-Imran (3):118 yang artinya *"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar golonganmu (non-Muslim karena) mereka selalu menimbulkan kesulitan bagi kamu, mereka menginginkan yang menyusahkan kamu. Telah nampak dari ucapan mereka kebencian, sedang apa yang disembunyikan oleh dada mereka lebih besar. Sungguh Kami telah jelaskan kepada kamu tanda-tanda (teman dan lawan), jika kamu memahaminya*".

Dengan memperhatikan ayat tersebut semakin jelas bahwa dalam posisi mayoritas sudah seharusnya setiap ummat Islam memiliki kebutuhan untuk dapat meraih kesempatan menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, terutama untuk menyelamatkan kehidupan ummat Islam dalam masyarakat berkebangsaan.

Selain daripada yang penting lainnya dalam masyarakat berkebangsaan, ummat Islam perlu menunjukkan keteladanannya dalam ketataan dan ketundukannya terhadap *ulil amri*, seiring dengan ketaatan kepada Allah swt dan Rasulullah saw. Hal ini dilandasi oleh firman Allah swt, dalam QS. Al-Nisa'(4): 59 yang berbunyi *"Yaa ayyuhalladziina aamanu athii'ullaaha wa athii'ur raasuul wa ulil amri minkum."* Ayat ini mengisyaratkan betapa pentingnya kita tunduk dan taat kepada *ulil amri* yang bertanggungjawab dalam kehidupan masyarakat berkebangsaan. Bahkan dalam suatu hadits disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda *"Hubbu al wathan min al imaan"*. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita mencintai bangsa dan tanah air.

Namun perlu disadari sepenuhnya bahwa ketaatan dan ketundukannya itu bukanlah tanpa pertimbangan. Selama ketaatan dan ketundukan terhadap ulil amri tidak bertentangan dengan Allah swt dan Rasulullah saw, maka kita tetap mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat, namun sekiranya itu bertentangan dengan Allah swt dan Rasulullah swt, maka kita tidak wajib taat dan tunduk. M. Quraish Sihab (1996) menunjukkan suatu kaidah yang berbunyi *"Laa thaa'ata li makhluuqin fi ma'shiyati al-khaaliq"*. Kaidah diperkut oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim, melalui Ibnu Umar bahwa *" 'Ala al-mar-i al-muslimi al-sam'a wa al-thaa'ata fiima ahabba au kariha illa an yumara bima'shiyatin falaa sam'an walaa thaa'atan'* yang artinya kurang lebih "Seorang Muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan *ulil amr*), suka atau tidak suka, kecuali bila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat.

Tradisi Intelektual dalam Islam

Tradisi intelektual merupakan suatu faktor penting dalam mencerahkan kehidupan ummat Islam. Oleh karena itu sangatlah dipahami bahwa ayat pertama Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah saw, yaitu berupa *Iqra bi ismi rabbika alladzii khalaq.* Menurut M. Quraish Shihab, (1992), kata "iqra" dalam ayat tersebut berarti menghimpun, menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-cirinya, dan sebagainya. Ini berarti bahwa Allah swt sangat menghendaki ummat Islam memandang penting terhadap tradisi intelektual dalam mengarungi hidupnya, yang tidak hanya dikaitkan dengan menunaikan ibadahnya saja, tetapi juga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Rasulullah saw bersabda *bahwa "Addiinu wal-a'qlu, laa diina liman laa 'aqlaa lahu"*. Hal ini menjelaskan bahwa dalam beragama sangat dibutuhkan penalaran yang benar, sehingga tidak mudah ummatnya tersesatkan dan mereka dapat menjalankan agama yang dilandasi aqal sehat.

Dengan memperhatikan rujukan tersebut di atas, jelas kiranya bahwa Islam sangat merekomendasikan ummatnya untuk mengembangkan tradisi intelektual, walaupun pada prakteknya mayoritas ummatnya dilihat dari data yang ada bahwa tingkat pendidikan ummat Islam di seluruh Indonesia khususnya, dan di dunia pada umumnya masih jauh dari yang seharusnya. Kondisi objektif ini merupakan tantangan besar bagi kita, sehingga terbentang di hadapan kita adanya suatu peluang yang mengundang untuk dapat berpartisipasi dalam mengembangkan tradisi intelektual ummat dengan memulai dari sendiri.

Membangun Tradisi Intelektual sebagai Strategi Pendidikan Masyarakat Berkebangsaan

Membangun tradisi intelektual merupakan strategi yang efektif dalam membentuk ummat yang mampu menunjukkan peran kekhalifahannya di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu ummat Islam seyogyanya mampu mencerahkan dan mengembangkan tradisi intelektualnya melalui berbagai upaya sesuai dengan potensi dan kondisi ummat.

Pertama, mendorong setiap ummat Islam meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam menuntut ilmu, sehingga mereka memperoleh jaminan lebih baik dalam mengamalkan ajaran agama. Rasulullah saw bersabda bahwa barang siapa yang menghendaki dunia, maka capailah dengan ilmu, barang siapa yang menghendaki kehidupan di akhirat, maka capailah dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya, maka capailah dengan ilmu.

Kedua, mendorong setiap ummat Islam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif melalui bahsul masa-il dan diskusi secara sehat, sehingga mampu bersikap kritis terhadap ayat-ayat qauliyah dan kauniyah, dan ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Rasulullah saw bersabda :"Apabila seorang hakim menetapkan hukum melalui ijtihaad dan benar, maka dia kan diberi dua pahala, apabila dia salah, dia akan diberi satu pahala." Walau demikian sikap kritis terhadap taqlid dan ijtihad tetap diperlukan.

Ketiga, mendorong setiap ummat Islam berpikir dan bekerja sama dalam bidang kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, serta hidup antar manusia dalam era global melalui musyawarah dan mufakat yang dilandasi oleh hikmah ilahi.

Keempat, mendorong setiap ummat Islam untuk mengembangkan sikap dan kemampuan berpikir kontekstual dengan menghadapkan persoalan-persoalan aktual yang dihadapi ummat, sehingga relevansi ajaran agama Islam masih tetap terjaga sampai hari akhir.

Kelima, mendorong generasi muda Islam untuk menyikapi secara kritis pemikiran Islam kontemporer dari Fazlur Rahman, Mohamed Arkoun, Ali Syariati, Nashr Hamid Abu Zayd, Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Abdullahi Ahmed Na'im, Abdulkarim Soroush, dan sebagainya, dengan tetap bertumpu pada rujukan utama Al-Quran dan As-Sunnah secara bertanggungjawab, sehingga dapat memahami dan menjalankan ajaran Islam secara lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Demikianlah beberapa upaya yang dapat dilakukan ummat Islam dalam membangun tradisi intelektualnya, sehingga setiap langkah dan perilaku beragamanya selalu didasarkan atas ilmu dan kesadaran yang sebenarnya.

Penutup

Akhirnya dapatlah disadari bahwa keberadaan ummat Islam sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di atas bumi tidak akan mampu menampilkan dirinya secara berarti baik secara duniawiyah maupun ukhrawiyah, manakala tidak tercerahkan akal dan qalbunya. Untuk itulah maka upaya pembelajaran tradisi intelektual ummat merupakan suatu keniscayaan yang seharusnya diusahakan baik secara individual maupun kolektif.

Tulisan ini dibahas dalam kegiatan Pengajian I'tikaf Ramadlan XXI (PIR XXI) oleh LABDA Shalahuddin Yogyakarta, pada Jumat, 21 November 2003 di Pondok Pesantren Budi Mulia, Jl. Kaliurang, Yogyakarta

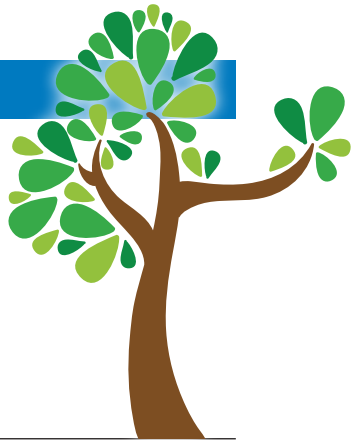

Psikologi Belajar

Pengantar

Aktivitas belajar merupakan suatu aktivitas yang kompleks dan bermakna. Dikatakan aktivitas yang kompleks karena kegiatan ini melibatkan berbagai variabel yang masing-masingnya memiliki kedudukan yang berarti dan saling memberikan pengaruh. Demikian juga disebut aktivitas bermakna, karena dengan belajar yang efektif, setiap individu dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal.

Aktivitas belajar pada dasarnya bukanlah menjadi kepentingan sekelompok usia tertentu, melainkan juga menjadi kebutuhan semua orang dengan ragam usianya, sebagaimana yang menjadi komitmen *"Life-long learning"*, termasuk peserta pelatihan pada kesempatan ini. Mengingat cakupan aktivitas belajar itu sangat luas, maka pelatihan sebagai bagian penting dari aktivitas belajar juga tidak dapat diabaikan.

Untuk dapat memahami lebih detail tentang aktivitas belajar, maka disiplin ilmu yang paling dekat dan berpotensi dapat membantu adalah psikologi belajar. Oleh karena itu dengan materi psikologi belajar diharapkan dapat memberikan kontribusi yang memadai bagi siapapun yang terlibat dalam kegiatan diklat di lingkungan TNI Angkatan Udara RI.

Pengertian Belajar

Ada beberapa definisi pokok tentang belajar. Pertama, *Learning can be defined as an experiencial process resulting in a relatively permanent change in behavior that cannot be explanined by temporary states, maturation, or innate response tendencies*. (Klein, 1996: 2). Kedua, *Kimble (John P. Houston:1976) defines learning as a relatively permanent change in behavior potentiality which occurs as a result of reinforced practice.*

Berdasarkan dua definisi tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang relatif permanen, sebagai hasil dari interaksi fungsional antara individu dengan dirinya sendiri, dan individu dengan lingkungan sekitarnya, yang bukan akibat dari kematangan dan tindakan yang tak bertujuan.

Ciri-ciri Belajar Orang Dewasa

1. Orang dewasa mempunyai pengalaman hidup dan pengalaman kerja yang cukup banyak. Pendidikan orang dewasa harus mulai dari apa yang sudah diketahui mereka dan mempunyai kaitan dengan pekerjaan, kepentingan, dan kehidupan sehari-hari.
2. Orang dewasa lebih suka menerima saran-saran daripada digurui. Pendidikan orang dewasa sebaiknya merupakan suatu proses kerjasama antar pelatih/pembina dan warga belajar dalam mengejar tujuan belajar.
3. Orang dewasa belajar sebaik mungkin apabila ia mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan secara penuh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilannya. Orang dewasa sudah belajar sejak kecil tentang mengatur hidupnya, dan oleh karena itu ia lebih suka melakukan sendiri sebanyak mungkin. Pendidikan orang dewasa akan mengutamakan aktivitas warga belajar dalam pelaksanaan proses belajar/mengajar.
4. Orang dewasa menyenangi hal-hal praktis. Pendidikan orang dewasa akan menggali pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dari warga belajar maupun pembina untuk memecahkan masalah-masalah nyata.

Teori Belajar

Belajar merupakan sesuatu yang memiliki pengertian yang banyak, sehingga untuk memahaminya perlu didekati dengan berbagai teori. Adapun teori belajar terdiri atas:

1. Teori Behavioristik

Teori ini menegaskan, belajar terjadi ketika pengalaman menyebabkan suatu perubahan yang relatif menetap pada pengetahuan dan perilaku individu.

Perubahan memang dapat terjadi tanpa tujuan, baik menjadi lebih baik maupun lebih jelek. Namun untuk dapat dikualifikasikan sebagai belajar, perubahan ini harus disebabkan oleh pengalaman, oleh interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Perubahan yang disebabkan oleh kematangan, juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai belajar. Perubahan yang temporer dikarenakan sakit, kelelahan, atau lapar, juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai belajar.

Berdasarkan teori ini ada empat proses belajar, yaitu *contiguity, classical conditioning, operant conditioning, dan observational learning.* Untuk lebih jelasnya dapat diikuti uraian sebagaiu berikut:

1) Contiguity: Belajar melalui Asosiasi Sederhana

Prinsip contiguity menyatakan bahwa kapanpun dua sensasi terjadi bersama-sama yang secara terus-menerus, keduanya akan terjadi terkait. Selanjutnya, ketika hanya satu dari dua sensasi (suatu stimulus) terjadi, sensasi yang lainnya akan diingat juga (suatu respons). Edwin Guthrie meyakini, "jika anda melakukan sesuatu dalam suatu situasi tertentu, saat berikutnya anda akan berada dalam situasi itu dan akan cenderung melakukan sesuatu yang sama lagi". Misalnya, ketika dikatakan dalam suatu waktu, sebutan "Jawa", maka seseorang akan mengaitkan kata tersebut dengan "Barat", "Tengah" atau "Timur".

Contiguity juga memainkan suatu peran utama dalam proses belajar yang lain dan lebih komplek, yang dikenal dengan Classical Conditioning.

2) *Classical Conditioning:* Memasangkan respon-respon otomatik dengan stimuli baru

Melalui proses *classical conditioning,* manusia dan binatang dapat belajar merespons secara otomatik terhadap suatu stimulus yang tidak memiliki efek sebelumnya atau suatu efek yang sangat berbeda. Respons yang dipelajari mungkin menjadi suatu reaksi emosional, seperti : takut atau senang, atau suatu respon psikologis, seperti ketegangan otot. *Classical Conditioning* ditemukan oleh Ivan Pavlov, seorang ahli psikologi Rusia pada tahun 1920-an.

Berdasarkan eksperimen Classical Conditioning Pavlov, seekor binatang datang merespons ke stimulus. Prosesnya sebagai berikut:

(a) Sebelum pengkondisian, unconditioned stimulus (daging, dalam hal ini) menimbulkan unconditioned respon (air liur), tapi conditioned stimulus (suara) tidak menyebabkan timbulnya respon. Selama pengkondisian the conditioned stimulus (suara) dimunculkan, sesegera diikuti dengan the unconditioned stimulus (daging). Setelah beberapa pasang, the conditioned stimulus (suara) menyebabkan timbulnya the conditioned response (salivation).

(b) Karya Pavlov juga mengidentifikasi tiga proses lainnya dalam classical conditioning, yaitu generalisasi, diskriminasi, dan extinction. Generalisasi, yaitu merepon dengan cara yang sama untuk stimuli yang sama. Deskriminasi, yaitu merespon secara berbeda kepada stimuli, tetapi tidak merupakan stimuli yang identik. Akhirnya, extinction yaitu penghilangan secara gradual terhadap suatu respon yang merupakan hasil belajar.

3) Operant Conditioning: Mencoba respons baru

Pembelajar secara sadar terlibat dalam belajarnya sendiri. Orang-orang secara aktif meng"operasi"kan lingkungannya untuk mencapai tujuan tertentu, atau untuk mencapai efek tertentu. Tindakan yang diarahkan oleh tujuan disebut operants. Proses belajar yang terlibat dalam mengubah perilaku operant (operant berarti perilaku yang secara sukarela dimunculkan oleh manusia atau binatang) disebut operant conditioning. Lebih jelasnya bahwa operant conditioning adalah belajar dalam hal mana perilaku sukarela atau disengaja diperkuat atau diperlemah oleh konskuensi (kejadian yang mengikuti suatu tindakan) atau antesenden (kejadian yang mendahului suatu tindakan).

Thorndike dalam konteks ini menghasilkan suatu hukum belajar yang penting, yang disebut: Law of Effect, yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang menghasilkan efek yang memuaskan akan diulang dalam situasi yang sama.

A.

Behavior	→	CONSEQUENCE Reinforcer	→	EFFECT 1) Strengthened behavior 2) Repeated behavior

B.

Behavior	→	CONSEQUENCE Punisher	→	EFFECT 1) Weakened behavior 2) Decreased frequency of behaviour

4) Analisis Perilaku Terapan (Applied Behavior Analysis)

Analisis Perilaku Terapan (Applied Behavior Analysis) adalah aplikasi prinsip belajar perilaku untuk mengubah perilaku. Metode itu sering disebut modifikasi perilaku, tetapi istilah ini memiliki konotasi negatif untuk beberapa orang dan sering disalahfahami.

Secara ideal, analisis perilaku terapan menghendaki spesifikasi yang jelas dari perilaku yang akan diubah, pengukuran perilaku yang berhati-hati, analisis reinforcer yang mungkin memelihara perilaku yang tak sesuai, atau yang tak diinginkan, intervensi yang didasarkan atas prinsip-prinsip perilaku untuk mengubah perilaku, dan pengukuran yang berhati-hati terhadap perubahan.

Dalam konteks ini dapat diwujudkan dengan penggunaan pujian secara tepat. Untuk memberikan pujian yang tepat dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(a) Hendaknya jelas dan sistematik dalam memberikan pujian. Misalnya: yakinlah bahwa pujian itu sangat terkait langsung dengan perilaku yang sesuai.
(b) Menghargai prestasi yang genuine. Misalnya: Jangan memberi penghargaan kepada siswa yang tak terlibat yang hanya supaya dia diam, dan tidak mengganggu dalam kelas.
(c) Menetapkan standar untuk penghargaan berdasarkan kemampuan dan keterbatasan individu. Misalnya: Berilah pujian terhadap kemajuan atau prestasi yang berkaitan dengan usaha siswa di masa lalunya.
(d) Memberikan penghargaan atas keberhasilan siswa berdasarkan usaha dan kemampuannya, sehingga siswa akan memperoleh kepercayaan bahwa keberhasilan akan mungkin terjadi lagi. Misalnya: Suruh siswa menjelaskan problem yang mereka hadapi dan bagaimana mereka memecahkannya.
(e) Jadikanlah penghargaan benar-benar memberikan pengukuhan. Misalnya: Jangan memberikan pujian yang tak layak kepada siswa hanya untuk mengimbangi kegagalan.

Selain daripada itu juga, ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam menggunakan hukuman:

(a) Usahakan untuk menstrukturkan situasi, sehingga anda dapat menggunakan pengukuhan negatif (mis. suatu kebijakan yang menghendaki sebuah mobil dikendarai lebih dari satu orang) daripada hukuman. Misalnya: Izinkan siswa untuk melarikan diri dari situasi yang tidak menyenangkan (menyelesaikan tugas-tugas tambahan) ketika mereka mencapai suatu tingkat kompetensi.
(b) Hendaknya konsisten dalam mengaplikasikan hukuman. Misalnya: Berikanlah hukuman sesegera mungkin.
(c) Hendaknya menfokuskan pada tindakan siswa, bukan pada kualitas personal siswa. Misalnya: Upaya menekan akan kebutuhan untuk mengakhir perilaku yang bermasalah.
(d) Hendaknya mengadaptasikan hukuman dengan pelanggaran. Misalnya: Jangan menggunakan PR sebagai hukuman untuk perilaku salah.

2. Teori Belajar Sosial

Albert Bandura (1986) meyakini bahwa teori belajar behavioral tradisional adalah tidak sempurna. Mereka hanya memberikan bagian dari penjelasan belajar dan mengabaikan aspek-aspek penting dari situasi, terutama pengaruh sosial yang penting terhadap belajar. Bandura membedakan antara pemerolehan pengetahuan (belajar) dan penampilan yang dapat diamati didasarkan pada

pengetahuan (perilaku). Dengan kata lain, Bandura menegaskan bahwa kita semua mengetahui lebih dari apa yang kita pertontonkan. Kejadian-kejadian lingkungan, faktor personal (seperti berpikir dan motivasi), dan perilaaku yang dilihat sebagai yang berinteraksi dan masing-masing saling mempengaruhi dengan yang lainnya dalam proses belajar. Bandura menyebut interaksi antar kekuatan ini adalah reciprocal determinisme.

Satu faktor yang terabaikan oleh teori behavioral tradisional adalah pengaruh yang sangat kuat dari *modeling* dan imitasi dalam kegiatan belajar. Orang dapat belajar hanya dengan mengobservasi orang lain yang belajar. Jika seseorang dapat belajar dengan mengamati, dia harus menfokuskan perhatiannya, mengkonstruksi imag, mengingat, menganalisis, dan membuat keputusan yang mempengaruhi belajar.

Ada lima kemungkinan efek dari belajar observasional, yaitu: (a) mengajar perilaku dan sikap baru, (b) mendorong perilaku yang ada, (c) mengubah larangan, (d) mengarahkan perhatian, dan (e) meningkatkan emosi.

3. Teori Belajar Kognitif

Teori Belajar Kognitif adalah seuatu pendekatan umum yang memandang belajar sesabagi suatu proses mental yang aktif untuk memperoleh, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Ini berarti bahwa para ahli teori sharing pendapat dasarnya tentang belajar dan memori. Para ahli teori kognitif meyakini bahwa belajar adalah hasil dari upaya kita untuk menjadikan kita memiliki sense terhadap dunia. Cara sebagaimana yang kita pikirkan tentang situasi, seiring dengan pengetahuan, harapan, dan perasaan kita, mempengaruhi bagaimana dan apa yang kita pelajari.

Membandingkan teori Kognitif dan Perilaku

Pandangan kognitif dan perilaku berbeda dalam asumsi tentang apa yang sedang kita pelajari. Berdasarkan pandangan kognitif, pengetahuan adalah dipelajari dan perubahan dalam pengetahuan membuat kemungkinan perubahan dalam perilaku. Dalam pandangan perilaku, bahwa perilaku baru itu sendiri dipelajari. Kedua teori meyakini bahwa pengukuhan *(reinforcement)* adalah penting dalam belajar, tetapi untuk alasan yang berbeda. Para ahli teori perilaku berpendapat bahwa pengukuhan itu menguatkan respons; sebaliknya para ahli teori kognitif melihat pengukuhan (reinforcement) sebagai sumber umpan balik. Umpan balik ini memberikan informasi tentang apa yang mungkin terjadi, jika perilaku-perilaku itu diulangi.

Pengetahuan dan Teori Kognitif

Pengetahuan adalah hasil dari belajar. Ketika kita belajar sebuah fakta, nama, peraturan badminton, kapan bertanya kepada teman tentang kesukaannya, atau penyebab Perang Teluk, kita mengetahui sesuatu yang baru. Dan pengetahuan adalah lebih dari produk akhir dari belajar yang paling akhir. Pendekatan kognitif menyarankan bahwa salah satu elemen yang sangat penting dalam proses belajar adalah apa yang individu bawa ke situasi belajar. Apa yang telaah kita ketahui menentukan seberapa banyak apa yang akan kita pelajari, ingata, dan lupa. Ronning dan Bruning (1990) menyatakan, "pengetahuan menciptakan persepsi kita, memfokuskan perhatian kita, dan adalah bahan ingatan kita".

Model Belajar Pemrosesan Informasi

Pendekatan pemrosesan informasi bertumpu pada komputer sebagai model belajar manusia. Seperti komputer, pikiran manusia mendapatkan informasi, menampilkan operasi untuk mengubah bentuknya ke isi, menyimpan informasi, mengambilnya lagi jika diperlukan, dan menggerakkan respons kepadanya.

Terkaitdengan model ini, untuk menggunakan ide-ide pemrosesan informasi dalam kelas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya:

(a) Yakinlah bahwa anda dapat menguasai perhatian siswa. Misalnya: Mulailah pelajaran dengan memberikan sebuah pertanyaan yang mendorong minat siswa terhadap topik.
(b) Bantulah siswa dengan memisahkan yang esensial dari detail-detail yang non-esensial, serta menfokuskan kepada infromasi yang sangat penting. Misalnya: ketika anda membuat sebuah poin, ulangan penting, ajukan pertanyaan kepada siswa untuk membuat parafrase, perhatikan informasi pada papan yang bertulis warna, atau minta siswa untuk menggarisbawahi poin yang penting tersebut.
(c) Bantulah siswa untuk membuat hubungan antara informasi yang baru dengan apa yang telah mereka ketahui. Misalnya: Beri suatu tugas yang secara spesifik memerlukan penggunaan informasi baru bersama-sama dengan informasi yang telah dipelajari.
(d) Berikan pengulangan dan reviu informasi. Misalnya: Mulailah kelas dengan suatu reviu singkat tentang tugas rumah.
(e) Sajikan bahan dalam bentuk yang jelas dan teroganisasikan. Misalnya: Buatlah tujuan pelajaran secara jelas.
(f) Fokuskan pada makna, bukan memorisasi. Misalnya: Dalam mengajar kata-kata baru, bantulah siswa mengaitkan kata-kata baru dengan sebuat kata yang terkait yang telah mereka fahami.

Motivasi dan Pembelajar

1. Pengertian Motivasi

Motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan internal yang mendorong, mengarahkan, dan memelihara perilaku. Para psikolog sedang meneliti motivasi telah menfokuskan pada tiga pernyataan dasar. Pertama, apa yang secara orisinil menyebabkan seseorang dapat mengawali perilakunya? Kedua, apa yang menyebabkan seseorang bergerak menuju ke tujuan tertentu,? Dan ketiga, apa yang menyebabkan seseorang tetap dalam mencoba untuk meraih tujuan itu?

Pada dasarnya motivasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu motivasi intrinstik, yaitu motivasi yang berasal dari faktor-faktor, seperti minat atau rasa keingintahuan., dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang diciptakan oleh faktor-faktor eksternal seperti hadiah dan hukuman.

2. Strategi untuk mendorong motivasi belajar

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mendorong motivasi belajar pada diri siswa, di antaranya adalah:

a. Memenuhi persyaratan dasar yang terdiri atas:
   1) memberikan suatu lingkungan kelas yang terorganisasi,
   2) menjadi seorang fasilitator yang suportif,
   3) berilah tanda karya yang menantang, tetapi tidak terlalu sulit.
   4) Buatlah tugas yang berharga.

b. Usahakan membangun kepercayaan diri dan harapaan yang positif
   1) Mulailah pekerjaan berdasarkan tingkat kemamapuan siswa
   2) Buatlah tujuan belajar yang jelas, spesifik, dan dapat dicapai.
   3) Tekankan untuk membandingkan dengan dirinya sendiri, bukan untuk kompetisi.
   4) Komunikasikan bahwa kemampuan akademik dapat diperbaiki.
   5) Berilah contoh yang baik untuk pemecahan masalah.

c. Tunjukkanlah nilai-nilai belajar
   1) hubungkanlah tugas belajar dengan kebutuhan siswa.
   2) Kaitkan kegiatan kelas dengan minat siswa.
   3) Tingkatkan rasa ingin tahu.
   4) Buatlah tugas belajar yang menarik.
   5) Tegakkan penggunaan ide-ide yang baru dan kefamilieran.
   6) Jelaskan hubungan antara belajar sekarang dan kehidupan berikutnya.
   7) Berikanlah insentif dan hadiah, jika diperlukan.

d. Bantulah siswa untuk tetap bertahan giat menjalankan tugas
   1) Berilah kesempatan yang sering kepada siswa untuk merespons.
   2) Berilah kesempatan yang sering kepada siswa untuk menghasilkan suatu produk.
   3) Hindari penekanan yang berat pada penilaian.
   4) Kurangi risiko tugas tanpa ada maksud menyederhanakan tugas.
   5) Berilah contoh untuk motivasi belajar.
   6) Ajarlah taktik belajar.

Prinsip-prinsip Belajar

Berdasarkan teori belajar di atas maka, beberapa prinsip belajar untuk orang dewasa dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Proses belajar akan diperkuat/dipercepat dengan membuat pelajar aktif dalam proses tersebut. *Untuk belajar secara efektif diperlukan aktivitas/gerakan.*
2. Frekuensi pengulangan adalah penting dalam penerapan pelajaran. *Tapi ingat, pengulangan harus bersifat berkala dan teratur.*
3. Pemberian penghargaan adalah penting, dan lebih mampu memperkuat daya ingat dan penyerapan daripada teguran. *Tetapi, teguran adalah lebih baik daripada si pelajar dibiarkan sama sekali.*
4. Penerimaan rangsangan berganda lewat beberapa indera lebih mengesankan dibanding lewat indera tunggal. *Melibatkan semua indera yang ada pada pelajar dalam melaksanakan proses belajar mengajar adalah lebih efektif.*
5. Pengetahuan yang baru hanya dapat ditambahkan berdasarkan pengetahuan yang dudah dimiliki pelajar dan ada hubungannya. *Mulailah dari apa yang mereka sudah ketahui.*
6. Pengetahuan baru lebih mudah diterima secara berangsur angsur dalam jumlah tertentu (secukupnya) menurut kemampuan masing-masing pelajar. *Menyajikan persoalan dalam garis besar terlebih dahulu, kemudian detailnya, lebih menguntungkan daripada sebaliknya.*
7. Proses belajar terjadi pada pihak pelajar, bukan pihak pengajar. Omong tidak sama dengan mengajar.
8. Pemberian contoh dan peragaan akan memperkuat proses belajar terutama untuk hal-hal yang menyangkut sikap dan keterampilan. Seorang akan mengajar sebagaimana dia diajar.
9. Hal yang bermakna lebih mudah diterima dan lebih lama diingat daripada yang kurang bermakna bagi pelajar. *Mengaitkan pelajaran dengan kepentingan dan kebutuhan pelajar*.

10. Bertambahnya unsur yang dipelajari menurunkan saya ingat; tapi meningkatkan daya-berpkir, daya mempertimbangkan, dan daya memutuskan. *Metode mengajar untuk penghafalan informasi berlainan dengan metode mengajar yang bertujuan untuk daya berpikir dan daya memecahkan masalah-masalah sulit.*
11. Penentuan dan penetapan tujuan belajar adalah penting agar si pelajar dapat mengetahui kemajuannya. *Menjelaskan tujuan belajar sebelum proses belajar dimulai, dan menjalankan pengajaran dengan urutan yang logis.*
12. Suasana belajar akan ikut menentukan tingkat keberhasilan pelajaran, kepuasan terhadap proses, dan daya penyerapan. *Menciptakan suatu suasana yang hidupndan mampu melibatkan semua pelajar secara aktif.*
13. Tiap pelajar mempunyai daya belajar berbeda-beda serta motivasi belajar yang berbeda pula. *Jangan menyangka bahwa semua pelajar sama, siapkan diri untuk menghadapi keanekaragaman manusia.*
14. Daya menyimpulkan dan daya membedakan akan ditingkatkan jika pelajar diberi kesempatan untuk menerapkan pelajaran baru pada situasi/kondisi/ dan masalah yang berbeda. *Memberikan kesempatan aga pelajar dapat menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah diperoleh pada masalah yang bervariasi dan dalam kondisi yang berbeda pula.*

Penutup

Demikia beberapa hal penting yang berkenaan dengan Psikologi Belajar, mudah-mudahan ide-ide pokok tersebut dapat memicu kegiatan pelatihan lebih lanjut dan dapat memperkaya terhadap informasi dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta. Semoga ada manfaatnya. Amiiin....

Tulisan ini disajikan dan dibahas dalam Penataran Tenaga Pendidik Kodikau 2003 yang diselenggarakan TNI AU RI Komando Pendidikan di gedung Yupiter Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, 19 Mei 2003.

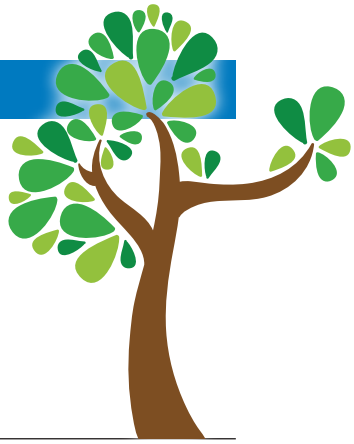

Menghadapi Kontroversi BHP

Pengantar

- Globalisasi memberikan dampak ke seluruh kehidupan manusia di permukaan bumi
- Untuk menghadapi globalisasi perlu sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif.
- PTN sebagai kekuatan moral dan intelektual merasa berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan menciptakan SDM yang berkualitas dan kompetitif
- PTN seyogyanya memiliki kemandirian untuk dapat menjawab perubahan global secara optimal.
- Otonomi yang diberikan kepada PTN mendapat respon yang variatif, ada yang pro dan kontra.

Mengapa BHP

- Mewujudkan otonomi pendidikan (MBS-M, otonomi PT).
- Tidak ada “diskriminasi“antara negeri dan swasta, diknas –non diknas
- Untuk merespon tuntutan globalisasi

Karakteristik BHP PT

- Moral force
- Kemandirian
- Keadilan
- Adaptabilitas

Tanggung Jawab Sosial BHP PT

- Secara reaktif, PT berkewajiban merespons arus globalisasi
- Secara proaktif, PT siap menjadi agen perubahan

Lingkup Otonomi BHP PT

- Pembukaan program studi
- Pengembangan kurikulum
- Pengembangan ketenagaan
- Pengelolaan pendanaan
- Pengembangan fasilitas

SDM yang Dibutuhkan untuk Menghadapi Perubahan Global

- Bermoral
- Kemampuan adaptif dan lentur/luwes,
- Kemampuan belajar sepanjang hayat,
- Kritis,
- Inovatif,
- Kreatif
- Dan mampu bekerja sama.

Beberapa Kepentingan Nasional yang Seyogianya Menjadi Perhatian PT

- Kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan otonomi daerah
- Responsif terhadap perkembangan/perubahan tuntutan dunia kerja
- Perluasan wawasan peserta didik melalui program lintas disiplin
- Promosi dan mengamankan bidang-bidang studi unggulan dan penting serta langka
- Menuju peningkatan mutu dan keunggulan
- Mengamankan pendidikan bagi mereka yang kurang mampu dan tak beruntung
- Peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya

Sikap Kritis terhadap BHP

- Adanya kekhawatiran melupakan pentingnya melindungi eksistensi institusi dan disiplin.
- Adanya tafsiran otonomi yang berlebihan.
- Adanya kecenderungan usaha nyata komersialisasi melalui pendidikan.
- Masih adanya keengganan dunia usaha dan bisnis untuk melakukan kerjasama dan sharing dana pendidikan dengan perguruan tinggi.
- Adanya persoalan sumber, pengelolaan, dan akuntabilitas pendanaan pendidikan.
- Keberadaan posisi, pengelolaan dan incentif terhadap personalia BHP (PT).

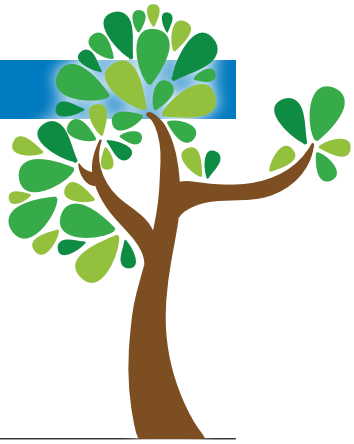

Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) Ditinjau dari Perspektif Filosofis dan Sosiologis

Pengantar

Kecenderungan Globalisasi yang muncul akhir tahun 1990-an menuntut seluruh bangsa se dunia untuk memiliki kemampuan kompetitif pada SDM dan institusi. Karena itulah diperlukan upaya yang sistematis untuk dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki komitmen tinggi untuk bersaing.

Untuk dapat menghasilkan SDM yang berkualitas sangatlah diperlukan perguruan tinggi yang benar-benar tangguh, yaitu PTN yang mandiri dan otonom dalam mengambil suatu sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. Di antara PTN-PTN di Indonesia, ada sejumlah PTN yang memiliki kemampuan untuk dapat melakukan pengelolaan sendiri secara bertanggungjawab, sehingga dipandang perlu adanya suatu pergeseran manajemen PTN secara birokratik menuju manajemen PT secara koorporatik,atau yang sudah populer disebut PT-BHMN.

Kehadiran PT-BHMN hingga kini masih dipandang sebagai suatu kontroversi. Hal ini wajar, karena PT-BHMN merupakan suatu inovasi manajemen PT. Setiap sesuatu yang inovatif pada awalnya selalu menghadapi sikap yang variatif, dari yang pro dan kontra. Oleh karena itulah perlu pemahaman dan pengkajian secara proporsional terhadap PT-BHMN sehingga tidak terjadi kontra produktif. Dalam kaitannya dengan itu, maka bahasan berikut akan lebih menekankan pada perspektif filosofis dan sosiologis terhadap PT-BHMN.

Perspektif Filosofis

Ada sejumlah nilai-nilai penting yang melandasi kehadiran PT-BHMN, di antaranya otonomi, keadilan, dan adaptabilitas. *Pertama otonomi,* bahwa PTN yang memiliki potensi besar akan lebih produktif, manakala PTN itu diberikan kemandirian dalam pengelolaan program, tenaga, keuangan, aset, dan peng-

awasannya, sehingga memudahkan untuk mencapai keunggulan akademik (academic excellence) yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan civitasnya. Otonomi mengindikasikan suatu kedewasaan, karena setiap langkah manajerial tidak berada pada posisi bergantung pada pihak lain, baik orang maupun institusi lain, tetapi didasarkan atas kemampuan dan tanggung jawab sendiri. Dengan demikian, tidaklah proporsional dan produktif, jika ada sejumlah PTN yang dipandang mampu melakukan pengelolaan sendiri, tetapi masih tetap bergantung pada pihak lain.

Dalam kondisi yang demikian tidak berarti pemerintah melepaskan tanggungjawabnya, karena dalam batas tertentu pemerintah juga masih ikut bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan yang dihadapi PT BHMN, dengan diwujudkan pada pemberian subsidi yang relatif masih cukup tinggi. Dengan otonomi tercipta keterbukaan yang luas bagi PT-BHMN untuk membangun *networking* dengan pihak dunia usaha dan industri sebagai stakeholders.

Kedua keadilan, PT-BHMN lebih menjamin perlakuan yang adil, karena subsidi yang diberikan oleh pemerintah lebih diutamakan kepada yang lebih berhak. Selama ini PTN secara tidak sadar memberi bantuan kepada setiap mahasiswa secara sama, tanpa membedakan latar belakang sosial ekonomi mahasiswa. Demikian pula memberikan incentive kepada semua tenaga tanpa mempertimbangkan secara jeli unjuk kinerjanya, sehingga setiap orang yang kinerjanya sangat produktif, akan tetap sama memperoleh gaji dan incentive yang sama dengan orang yang tidak produktif sekalipun. Kondisi ini pada hakekatnya merupakan praktek manajemen yang tidak mendidik

Walaupun misi PT-BHMN menjunjung keadilan, melainkan bagi sejumlah orang yang merasa tak diuntungkan oleh manajemen baru ini, baik terkait dengan posisi, pembebanan biaya, atau konsekensi-konsekuensi lain yang tak menguntungkan dirinya, jelas PT-BHMN dinilai sebagai PTN yang ”komersial”, ”diskriminatif”, atau ”eksploitatif”.

Ketiga adaptabilitas, PT-BHMN diharapkan lebih mampu menghasilkan produk-produk universitas, baik yang terkait dengan pendidikan maupun penelitian yang memiliki kualitas handal yang mampu bersaing tingkat nasional maupun internasional. Tradisi kualitas dalam kondisi ini diharapkan menjadi bagian kultur kampus yang sangat penting, sehingga setiap langkah dari orang atau institusi yang ada dalam lingkungan PT-BHMN selalu dikaitkan dengan kualitas.

Dalam kondisi yang demikian, diharapkan setiap lulusan dan produk lain yang dihasilkan baik berupa karya penelitian, karya tulis, atau karya-karya lainnya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pihak lain.

Perspektif Sosiologis

Dalam perspektif sosilogis, kehadiran PT-BHMN dapat dipandang dari dua sisi. *Pertama,* PT BHMN yang merupakan transformasi dari PTN merupakan dampak globalisasi. Hal ini terjadi karena perubahan sistem pendidikan yang terjadi di berbagai negara berkonsekuensi terhadap adanya perubahan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Demikian pula perubahan global sungguh menuntut kemampuan sumber daya manusia yang handal, adaptif, lentur, kreatif, inovatif, dan mampu bekerja sama. Untuk menghasilkan produk sumber daya manusia tersebut dibutuhkan suatu PT yang benar-benar memiliki kemandirian dan akuntabel.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nitsbit (1984) melalui *Megatrends*-nya, bahwa dewasa ini ada 10 kecenderungan, yang beberapa di antaranya: adanya pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi, *institutional help* ke *self help,* dan *hirarchies ke networking*. Bertitik tolak dari kecenderungan-kecenderungan, maka maka kehadiran PT BHMN merupakan salah konsekuensi logis dari kecenderungan global yang sedang bergulir.

Kedua, PT BHMN menjadi pusat perubahan *(agent of change).* PT merupakan suatu institusi yang memiliki kemampuan kontrol moral dan intelektual. Dengan potensi ini sangatlah beralasan bahwa PT menjadi ujung tombak dalam memerankan diri sebagai pusat perubahan dan pembaharuan yang ada di tengah-tengah masyarakat. PT–BHMN dalam konteks ini memiliki tanggung jawab memikul *fardlu kifayah* dalam memerankan diri sebagai *leader* atau *khalifah* dalam berbagai sektor kehidupan. PT-BHMN hendaknya lebih mampu menjadikan dirinya sebagai a water ivory, bukan a ivory tower. Perubahan yang ada, setidak-tidaknya di Indonesia seharusnya bermula dari universitas, terlebih-lebih seperti PT-BHMN yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengendalikan dan mewarnai perubahan dan pembaharuan yang ada.

Mengkritisi PT-BHMN

Implementasi PT-BHMN yang sudah berjalan sampai tahun keempat setelah keluarnya PP No. 61 tahun 1999 yang diperkuat dengan PP No. 152 sd 155 tahun 2000 kepada ke empat universitas, yaitu UI, UGM, ITB dan IPB, yang disusul dengan USU dan UPI, dengan segala argumentasinya hingga kini masih menyisakan banyak persoalan yang perlu terus klarifikasi dan pencerahan. Jika memperhatikan PP No. 61 tahun 1999 tersirat bahwa semua PTN diharapkan menuju ke arah PT-BHMN, tinggal kesiapan masing-masing, sehingga wajar ada sejumlah PTN yang terus sibuk menyiapkan diri, walaupun dewasa ini sudah mulai diproses bahwa setiap institusi pendidikan sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 53 UU no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa:

1. Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
2. Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
3. Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan

Terkait dengan pasal tersebut di atas, khususnya untuk perguruan tinggi dipertegas dengan pasal 50 dalam UU yang sama, dinyatakan bahwa Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Menyadari akan landasan hukum ini kiranya dalam implementasinya perlu disikapi secara kritis, karena ada beberapa alasan, di antaranya:

- Perlunya perlindungan terhadap institusi, bahwa diakui ada sejumlah bidang studi yang harus dilindungi dalam suatu PT-BHMN dan ada PT yang harus dilindungi dalam menerapkan PT-BHMN. Dalam kondisi seperti ini pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan dukungan secara optimal, sehingga kepentingan stakeholders, terutama bangsa dan negara dapat dipenuhi.
- Adanya tafsiran otonomi yang berlebihan. Penafsiran otonomi yang berlebihan biasanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehingga tidak dapat memenuhi visi dan tujuan PT-BHMN. Oleh karena itu dalam menggunakan otonomi untuk merumuskan kebijakan, mengelola personel, mengelola keuangan dan aset, dan lainnya perlu dilandasi dengan nilai-nilai moral yang dijadikan landasan berdirinya PT-BHMN.
- Adanya kecenderungan usaha nyata komersialisasi melalui pendidikan. Memang dibenarkan bagi PT-BHMN untuk melakukan *income generating* yang bertumpu pada potensi dan kemampuannya, namun arah dan mekanisme *income generating* perlu mempertimbangkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Demikian juga dalam pengelolaan dana yang perlu berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Perlu diketahui bahwa dewasa ini masih ada sejumlah PT yang tidak pernah membuat rincian laporan secara terbuka dalam setiap tahunnya.
- Masih adanya keengganan dunia usaha dan bisinis untuk melakukan kerja sama dan *sharing* dana pendidikan dengan perguruan tinggi. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena dapat membiarkan mereka kurang

memiliki *sense of responsibility* dalam penyiapan SDM yang berkualitas. Untuk itu PT-BHMN perlu terus melakukan perbaikan sistem manajemennya sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dunia usaha dan industri (DUDI).

Penutup

PT BHMN sebagai tema diskusi masih menarik terus untuk dikaji, karena tema ini terkait dengan kepentingan personal, sosial, dan institusional. Betapapun sempurnanya rasional yang dipakai landasan dalam membangun dan mengembangkan, PT-BHMN tetap masih bisa dinilai sebagai suatu yang sangat patut ditolak kehadirannya, sekiranya dalam proses implementasinya tidak didukung oleh personalia dalam membuat kebijakan dan operasionalisasi program yang dilndasi dengan hati nurani. Bahwa perubahan yang dilakukan adalah menuju yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan kemanusiaan.

Tulisan ini dibahas dalam Sarasehan Advokasi Nasional – Lembaga Mahasiswa PT BHMN dan PTN calon BHMN – dengan Tema Mengurai Benang Kusut Pendidikan di Indonesia" yang diselenggarakan BEM KM UGM pada 17 Desember 2004 di Kampus Bulaksumur Universitas Gadjah Mada.

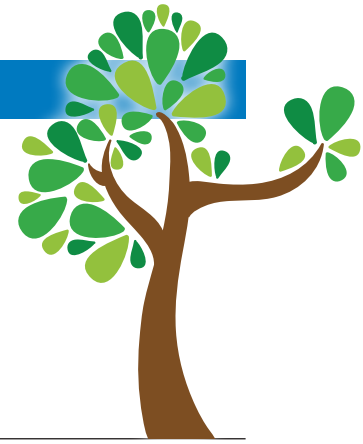

Perguruan Tinggi Yogyakarta

LULUSAN SLTA asal DIY menempati posisi tertinggi rata-rata nilai hasil SNMPTN 2010, baik bidang IPA maupun IPS. Kita juga disuguhi lagi berita yang sangat menyejukkan dan membanggakan bahwa DIY menghadirkan dua PTN-nya, yaitu Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta menempati dua dari lima posisi terhormat, juara umum dengan urutan UGM, ITS, UNY, IPB dan ITB dalam ajang bergengsi Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-33 di Denpasar, yang diselenggarakan pada 20 sd 23 Juli 2010.

Secara rinci perolehan medali di antara lima besar, di antaranya : UGM, 5 emas, 1 perak, perunggu; ITS 4 emas, perak perunggu; UNY, 4 emas, 2 perak, perunggu; IPB, 2 emas, perak, perunggu, ITB, 2 emas, perak, perunggu. Di samping lomba kreativitas ada juga kegiatan penunjangnya, yaitu English Speech Contest. Secara beruntun English Speech Contest dimenangkan oleh, Universitas Indonesia (juara I); Universitas Indonesia (juara II); Universitas Negeri Yogyakarta (Juara III): IPB (juara harapan I); UGM (juara harapan II); dan Univ Udayana (juara III).

Di antara prestasi mahasiswa tersebut menggambarkan bahwa prestasi mahasiswa PT yang di Yogyakarta menduduki posisi penting yang mengekspresikan kualitas proses pendidikan di PT Yogyakarta. Prestasi mahasiswa PT Yogyakarta diharapkan dapat berdampak terhadap kredibilitas lulusan PT Yogyakarta. Diharapkan sekali setiap lulusan PT Yogyakarta mampu menunjukkan performance-nya, baik aspek akademik maupun non-akademiknya.

Mengapa mahasiswa PT Yogyakarta dapat meraih prestasi yang membanggakan? Setidak-tidaknya ada beberapa faktor yang dapat diduga berpengaruh, di antaranya: komitmen mahasiswa, kultur akademik, dukungan kampus, dan dukungan dosen pembimbing.

Pertama, komitmen mahasiswa Yogya patut diapresiasi, karena mereka mampu tunjukkan idealisme sebagai intelektual muda yang perlu dibuktikan dengan belajar dan bekerja sungguh-sungguh terutama dalam peningkatan kompetensi dan kapasitas dirinya dalam menghasilkan inovasi yang sangat dibutuhkan dari waktu ke waktu.

Kedua, kultur akademik yang tercipta di Yogyakarta baik yang ada di lingkungan kampus maupun di luar kampus sangatlah kondusif, sehingga mampu mendukung mahasiswa yang memiliki motif berprestasi yang tinggi dapat terbantu dalam mewujudkan apa yang diimpikan.

Ketiga, dukungan kampus sangatlah memadai, baik penciptakan lingkungan fisik, penyediaan fasilitas, dan fasilitasi peratuan dan program bagi pengembangan potensi mahasiswa. Dengan begitu mahasiswa merasa terlayani secara optimal. Termasuk juga fasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai kejuaraan baik tingkat nasional, regional, maupun internasional. Dukungan pendanaan yang memadai dari universitas sangatlah membantu memahasiswa untuk berkompetisi dalam berbagai event.

Keempat, dukungan dosen pembimbing sangatlah berarti bagi mahasiswa untuk mewujudkan impiannya. Dengan adanya peningkatan dosen yang memungkinkan pelibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan ilmiah dan penelitian, maka mahasiswa memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk pengembangan dirinya. Kegiatan magang, baik sebagai asisten penelitian maupun bidang yang lainnya, mahasiswa secara diam-diam mendapatkan pengalaman aktivitas ilmiah yang sangat penting dalam memantapkan mahasiswa sebagai cendekiawan muda, juga semakin memiliki kepercayaan diri dalam berdiplomasi secaa ilmiah yang sangat dibutuhkan dalam lomba penelitian ilmiah.

Walaupun Yogyakarta memiliki keunggulan, namun di balik itu Yogyakarta juga memiliki pengaruh dalam pembentukan diri yang kurang agresif, bergerak lamban, dan kurang tantangan, sehingga semua mahasiswa Yogyakarta diharapkan mampu mengatasi potensi persoalan ini, yang dalam batas tertentu tidak bisa diatasi, akan menggangu perkembangan diri. Semoga Tuhan Yang Rahman selalu membimbing dalam pembentukan diri mahasiswa Yogya menuju generasi masa depan yang lebih baik.

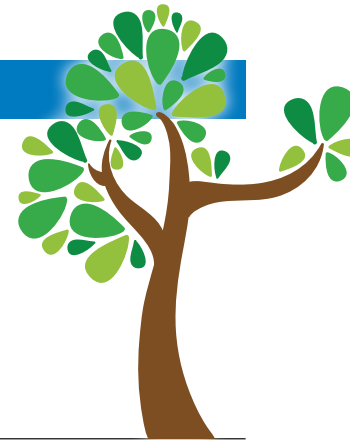

Kontribusi UNY untuk Pendidikan Karakter

PENDIDIKAN Karakter akhir-akhir ini menjadi buah bibir banyak orang, terlebih-lebih dalam masyarakat pendidikan. Wacana pendidikan karakter muncul secara terus bukan semata-mata disebabkan oleh kebijakan Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2, melainkan lebih jauh disebabkan oleh adanya keprihatinan masyarakat Indonesia terhadap dekadensi moral yang tidak kunjung selesai, serta masih banyaknya kejadian konflik antar kelompok, suku bangsa, golongan, dan status sosial yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Di satu sisi, reformasi di Indonesia sudah berhasil mendorong demokratisasi dan gerakan transparansi, namun di sisi lain reformasi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam batas tertentu masih belum mampu menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di sekitar kita masih dijumpai cukup banyak perilaku warga Indonesia, baik secara personal maupun kolektif, bertentangan dengan misi reformasi, apakah itu berupa perilaku amoral, perilaku eksploitasi terhadap sesama, perilaku korupsi, dan perilaku konflik antar sesama. Masih banyak lagi perilaku yang tak terpuji yang pada akhirnya merugikan banyak orang dan banyak pihak.

Menyadari kenyataan yang demikian dirasakan penting sekali adanya gerakan pendidikan karakter. Suatu usaha besar yang melibatkan semua pihak untuk mengawal pendidikan karakter bagi seluruh warga Indonesia, terlebih bagi individu yang masih tumbuh dan berkembang yang masih berada pada masa transisi. Karena itu pendidikan karakter bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan juga orangtua, institusi pendidikan, organisasi agama, dan masyarakat.

Untuk memperkuat pentingnya pendidikan karakter, kita ingat akan sabda Rasulullah saw, yaitu : *Innamaa bu'itstu liutammima makaarimal akhlaaq",*

artinya Sesungguhnya aku dibangkitkan di bumi ini untuk menyempurnakan akhlaq". Ini menegaskan bahwa betapa pentingnya akhlaq itu bagi kehidupan baik di mata manusia maupun Tuhan. Juga ditegaskan lagi Rasulullah, yaitu *"hubbul wathan minal iimaan",* artinya cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Hal ini menegaskan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung tinggi bangsa dan negaranya, tidak bersifat merusak apalagi menghacurkan.

Atas dasar itulah UNY memiliki tekad yang besar untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal pendidikan karakter untuk Indonesia. Ada beberapa alasan UNY ingin berkontribusi bagi pendidikan karakter di tanah tercinta ini.

Pertama, UNY memiliki visi menghasilkan insan bernurani, mandiri, dan cendekia. Artinya bahwa UNY memandang pentingnya moralitas dan spiritualitas dalam pembentukan lulusan. Jika seorang terdidik tidak bermoral, maka banyak pihak yang akan dirugikan. UNY sangat berkeinginan lulusannya justru memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Demikian juga UNY ingin menghasilkan lulusan yang cendekia dengan sifat utamanya memiliki tanggung jawab sosial *(social responsibility),* karenanya lulusan UNY harus memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, bangga akan tanah airnya.

*Kedua***,** UNY merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang memiliki *core business* bidang pendidikan. Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha memanusiakan manusia, sehingga manusia itu berkepribadian, berkarakter, dan beradab. Karena lulusan UNY sebagian besarnya akan menjadi pendidik, maka UNY sangat berkewajiban menjadikan pendidikan karakter sebagai komponen utama dalam proses pendidikannya.

*Ketiga***,** UNY menjadikan pendidikan karakter sebagai *icon*-nya. Karena itulah UNY memiliki keberanian moral untuk memberikan penghargaan akademik tertinggi Doktor Honoris Causa kepada Bapak Ary Ginanjar atas kemampuan akademik, perjuangan, dan setelah melalui pengkajian serius oleh sejumlah ahlinya, sehingga tetap *on the track*

Setelah memperhatikan posisi UNY dalam mengahadapi gerakan pendidikan karakter, kiranya perlu diidentifikasi kontribusi UNY dalam mengawal implementasi pendidikan karakter. UNY telah melakukan pembinaan moral keagamaan dan pembinaan perilaku terpuji terhadap semua unsur, baik dosen, karyawan, terlebih-lebih mahasiswa. Pembinaan kerohanian bagi dosen dan karyawan dilakukan secara periodik, baik berlangsung di kampus maupun di luar kampus. Pembinaan keagamaan bagi mahasiswa dilakukan melalui program dan kegiatan turorial untuk melengkapi kegiatan kurikuler.

Untuk internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan juga diupayakan melalui kegiatan perkuliahan, terutama diawali dengan mata kuliah umum yang akan dilanjutkan dengan mata kuliah bidang studi. Di samping itu, diupa-

yakan adanya kegiatan intensif melalui unit kegiatan kerohanian untuk setiap agama, Unit Kajian Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Resimen Mahasiswa, dan Pramuka.

Untuk mengimplementasikan pendidikan karakter tidaklah mudah karena ada minimal dua faktor penting, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, bahwa tidak semua individu itu memiliki kesiapan, kemampuan, dan kemauan untuk berperilaku baik, bahkan ada kecenderungan perbuatan merusak seringkali tampak dominan. Tidak semua dosen memiliki kemampuan dan penguasaan bidang agama, sehingga ada rasa takut untuk mengimplementasikan dalam proses pendidikan.

Di samping itu masih adanya kecenderungan untuk agresif, kurang empati, dan akomodatif terhadap orang lain yang berbeda pendapat dan keinginan. Faktor eksternal, adanya budaya asing yang agresif untuk menkontaminasi budaya kita, terutama di era informasi yang sangat terbuka. Adanya lingkungan masyarakat yang tak peduli terhadap perilaku yang tercela di tengah-tengah masyarakat.

Setelah memperhatikan kondisi tersebut, maka dapat ditawarkan berbagai upaya untuk mengoptimalkan kontribusi UNY terhadap implementasi pendidikan karakter. *Pertama*, memantapkan komitmen semua unsur untuk mengedepankan pentingnya pendidikan karakter, sehingga setiap individu dapat ikut andil dalam mengawal pendidikan karakter sesuai dengan kemampuannya. *Kedua*, mengupayakan setiap pimpinan di unit dan levelnya masing, bahkan termasuk di lingkungan mahasiswa untuk menjadi teladan dalam berperilaku yang santun. *Ketiga,* mengagendakan rutin forum pertemuan dan silaturahim antar individu atau institusi yang beragam, sehingga terbangun saling menghormati, respek, dan menolong. *Keempat*, membangun gerakan berprilaku konstruktif dan bermanfaat bagi orang lain, kelompok lain atau institusi lain.

Akhirnya kami yakin bahwa semua unsur yang berada di komunitas UNY, baik mahasiswa, dosen, karyawan, maupun alumni, perlu terus mengedepankan kebersihan dan kesucian hati dalam mengemban amanah sesuai dengan posisinya masing-masing, sehingga kehadirannya dapat menunjukkan perilaku yang terpuji, perilaku yang adil, perilaku yang mendatangkan kedamaian, dan perilaku yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Dengan demikian UNY tidak hanya dapat mengawal pendidikan karakter, melainkan juga insya Allah mampu memberikan kepuasan seluruh civitas academikanya, bagi masyarakat luas dan bagi kemanusiaan. Semoga!

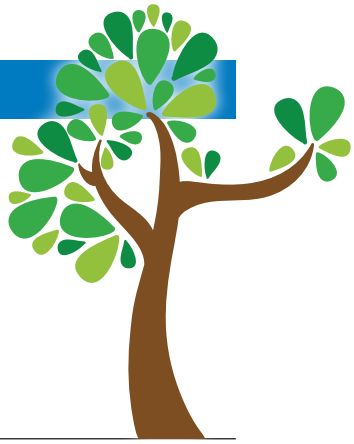

UNY Menuju 'World Class University'

GOR dan Stadion Atletik-Sepakbola UNY diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada 22 Januari 2008, yang disaksikan juga oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pemuda dan Olahraga, beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, serta Gubernur DIY.

Peristiwa ini sungguh bersejarah bagi keluarga besar UNY pada khususnya, masyarakat olahraga DIY dan bangsa Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu pantas kiranya bahwa kehadiran GOR dan Stadion seharusnya disyukuri dengan menjaga, memelihara, dan memanfaatkan secara optimal, sehingga ke depan UNY dapat bertambah fasilitas olahraga lainnya, terutama yang bertaraf internasional.

Fasilitas Olahraga Bertaraf Internasional

Kehadiran GOR dan Stadion di sebuah universitas mengingatkan saya ketika studi di luar negeri, terutama di Amerika Serikat (AS). Di AS setiap universitas yang bergengsi memiliki fasilitas olahraga yang relatif lengkap, karena diyakini bahwa fasilitas olahraga dapat menciptakan kesegaran fisik civitas akademika, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan studi. Bagaimana dengan fasilitas olahraga pada perguruan tinggi di Indonesia? Menurut hemat saya, hanya beberapa perguruan tinggi besar yang memilikinya, setidak-setidaknya perguruan tinggi yang membina program studi keolahragaan. Itupun baru beberapa LPTK bidang keolahragaan yang memiliki fasilitas olahraga bertaraf internasional. Menurut Pengurus Besar Persatuan Atlitik Seluruh Indonesia (PB PASI) bahwa di Indonesia hanya ada 10 stadion atletik bertaraf internasional, dan hanya satu di perguruan tinggi, yaitu Stadion Atletik-Sepakbola UNY.

Untuk diketahui, konstruksi Stadion Atletik UNY terutama synthetic tracknya dibangun dengan standar internasional yang menggunakan lapisan beton,

lapisan karpet (karet), dan lapisan sintetik dengan merk Regupol dari Jerman, bahkan pemasangan semua track itu dalam pengawasan langsung ahli dari Jerman. Sementara itu lapangan sepakbolanya didesain berdasarkan lapangan sepakbola Yokohama, Jepang yang konstruksinya dimulai dari lapisan bawah pipa *perporated,* geotekstil, batu kerakal besar, batu kerakal kecil, geotekstil, pasir halus, media tanam, dan rumput Bermuda dari Amerika Serikat yang sudah dikembangkan di daerah Jateng.

Sementara itu GOR yang dibangun dengan megah memiliki potensi yang dapat digunakan untuk event internasional, misalnya untuk cabang olahraga Bola Basket, Bola Voli, Bulutangkis, *Indoor Hocky,* Futsal, Tennis, Sepaktakraw, dan Bola Tangan). Bahkan kursi penonton untuk VIP diimpor dari Real Madrid Spanyol. Demikian juga tata lampu desain internasional yang memfokus pada tengah lapang yang tidak membuat silau penonton. Sirkulasi udara dalam GOR ditopang dengan ventilasi alam ditambah dengan kipas angin khusus yang mampu mengeluarkan embun, sehingga membuat sejuk. Yang juga sangat penting bahwa struktur bangunan GOR tidak tergoyahkan dan teruji oleh gempa 27 Mei 2008.

UNY Layak Masuk Universitas Taraf Internasional

Dalam perkembangan mutakhir, UNY merupakan salah satu dari 20 PT di Indonesia yang layak menjadi universitas kelas dunia. Di satu sisi, rekognisi ini memberikan motivasi yang sangat berarti bagi civitas academika UNY untuk mengakselerasi prestasinya dalam segala bidang, termasuk bidang ilmu olahraga, tetapi di sisi lain rekognisi itu menjadi tantangan bagi UNY ke depan.

Menurut Nian Chi Liu (2006) bahwa *World Class University,* setidak-setidaknya memiliki karakteristik, di antaranya: (1) *Top departements/ programs of the world*, (2) *Excellent research of international standard,* (3) *Best professors and student from the world,* (4) *Academic freedom and atmosphere of innovation,* (5) *Adequte financial resources adn facilities,* and (6) *Excellent leadership and effective governance.*

Jika diperhatikan karakteristik tersebut, maka Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) sebagai salah satu fakultas di UNY, secara potensial telah menunjukkan beberapa indikasi tersebut di antaranya ketiga program studinya berakreditasi A, terdapat sejumlah mahasiswa yang berprestasi bidang olahraga pada tingkat dunia, beberapa dosen FIK yang menjadi pelatih nasional dan konsultan internasional di luar negeri, FIK memiliki fasilitas olahraga yang bertaraf internasional, dan bahkan memenangkan hibah kompetensi yang bersumber dari dana luar negeri (I'MHERE Project).

Diawali dengan prestasi yang gemilang secara fisik, yang diwujudkan dengan pembangunan GOR dan Stadion, diharapkan sekali UNY mampu melengkapi institusinya dengan fasilitas bertaraf internasional, yang dilanjutkan dengan sistem manajemennya yang mendapatkan sertifikat ISO, sebagaimana yang telah diawali oleh dua program studi di bawah Fakultas Teknik, yaitu program studi pendidikan teknik mesin dan pendidikan teknik elektro.

Untuk dapat mengoptimalkan keberadaan GOR dan stadion, diharapkan sekali pemeliharaan dilakukan seprofesional mungkin sesuai dengan standar prosedur operasional, sehingga dapat terjaga kualitasnya. Demikian juga dalam pemanfaatannya diharapkan sekali GOR dan Stadion dapat diutamakan untuk penggunaan sebagai laboratorium pendidikan dan *home-based* penelitian bidang keolahragaan, sehingga dapat berkontribusi bagi perbaikan prestasi olahraga bangsa Indonesia menuju prestasi internasional. Yang juga sama pentingnya adalah GOR dan Stadion dapat diabdikan untuk perhelatan olahraga tingkat nasional dan internasional, dengan tetap mengakomodasi kebutuhan-kebutahan masyarakat olahraga setempat.

Implikasi

Jika memperhatikan kemajuan yang telah dicapai FIK, dengan tetap memperhatikan prestasi Fakultas Teknik melalui capaian ISO 9000-2001 untuk Program Studi Pendidikan Teknik Elektro dan Mesin, dan beberapa program studi untuk mahasiswa asing pada Program Pascasarjana, kiranya FIK telah berada pada proses menuju fakultas yang bertaraf internasional, walau masih banyak upaya yang perlu terus dilakukan ke depan, baik penataan kelembagaan, peningkatan kualifikasi dan keahlian dosen, penelitian-penelitian berstandar internasional, pengembangan proses pendidikan yang bermutu, maupun kebebasan akademik dan atmosfir inovasi.

UNY untuk menuju ke universitas yang bertaraf internasional, di samping berangkat dari modal yang telah dimiliki, secara kelembagaan dan perorangan, terus mengupayakan peningkatan diri, baik institusi pendidikan dan kualitas program pendidikannya, produktivitas dan kualitas riset yang berstandar internasional, peningkatan kuantitas dan kualitas dosen (kualifikasi akademik dan keahlian), peningkatan keunggulan kepemimpinan pada semua lini, maupun dukungan fasilitas di semua fakultas dan unit-unit pendukung yang bertaraf internasional. Di samping itu yang juga sangat penting ditempuh adalah membangun *networking* dengan universitas dan pusat riset di seluruh dunia, sehingga apa yang pernah dihasilkan oleh komunitas UNY baik kajian akademik maupun riset dari berbagai bidang ilmu yang dibina UNY dapat bermanfaat bagi masyarakat dunia, demikian pula sebaliknya.

Akhirnya apapun yang dilakukan dan dihasilkan oleh UNY dalam perjalanannya menuju universitas bertaraf internasional, diharapkan tetap memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai moral dan kebangsaan serta bertumpu pada keunggulan lokal, sehingga tidak tercerabut dari akar budayanya, sebagaimana yang tertuang dalam visi UNY, yaitu menghasilkan insan Indonesia yang cendekia, mandiri, dan bernurani.

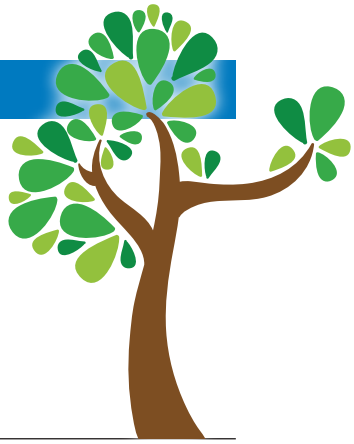

Pengembangan Akademik UNY Menuju 'World Class University'

DALAM rangka Dies Natalis UNY ke-45, panitia menetapkan tema Revitalisasi Peran UNY sebagai LPTK menuju *World Class University.* Tema ini sangat dilandasi oleh berbagai pertimbangan, 1) merespons salah satu kebijakan Ditjen Dikti yang berkenaan dengan *nation competitiveness* yang diperkuat dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kemampuan daya saing bangsa, 2) mewujudkan LPTK sebagai institusi yang bertanggungjawab atas kualitas pendidik dan tenaga pendidikan yang menjadi tumpuan peningkatan mutu pendidikan, 3) menyadari akan eksistensi UNY sebagai institusi yang memiliki *core business* bidang pendidikan, dan 4) memiliki potensi sebagai universitas bertaraf internasional yang dibuktikan dengan peraihan posisi ke-18 dari 33 PTN/PTS Indonesia, posisi ke 90 se Asia Tenggara, dan posisi ke 3310 di antara *public and private universities in the world* berdasarkan *Webometric 2009.*

Dengan segala kekuatan dan keterbatasan yang dimiliki, UNY bertekad untuk membuat rencana pengembangan bidang akademik, di antaranya (1) pengembangan pendidikan dan pengajaran, (2) pengembangan penelitian, dan (3) pengembangan pengabdian kepada masyarakat.

Pertama, pengembangan pendidikan dan pengajaran, UNY telah dan terus memantapkan status akreditasi institusi dan program studi, baik akreditasi nasional maupun internasional; melakukan rintisan program studi kelas internasional yang telah diawali dengan program praktek lapangan *bilingual* bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi untuk sejumlah program studi; pengembangan kurikulum untuk prodi kelas internasional; pengiriman sejumlah dosen untuk program *lecturer exchange* bagi prodi kelas internasional; pelatihan bahasa Inggris bagi dosen, mahasiswa, dan staf administrasi untuk menunjang layanan prodi kelas internasional; mengembangkan materi pembelajaran bagi prodi kelas internasional; mengembangkan proses pembelajaran yang

bernuansa kelas internasional dengan penggunaan *bilingual* dalam interaksi pembelajaran; menggunakan ICT untuk proses pembelajaran; mengembangkan perpustakaan yang mampu mengembangkan koleksi *e-book* dan *e-journal;* dan melakukan rintisan pendirian prodi pada fakultas lainnya untuk kelas internasional.

Kedua, pengembangan bidang penelitian UNY dewasa ini mencapai kemajuan yang berarti, baik kegiatan penelitian dengan dukungan dana kompetitif dari Dikti dan Pemerintah Daerah, maupun dukungan dana sendiri. Karya-karyanya pun sangat bermakna bagi masyarakat, karena itu tidak sepenuhnya benar pernyataan pada KR tertanggal 3 Mei 2009 pada halaman 11, bahwa penelitian UNY tidak membumi dan hanya untuk kepentingan pemerolehan poin untuk kenaikan jabatan. Bahkan beberapa tahun yang lalu UNY telah memperoleh beberapa PHK Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID) dan tahun 2008 UNY mendapat 2 Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Karena itulah UNY terus mendorong dosen untuk melakukan riset bersama dengan dosen-dosen dari universitas luar negeri; menfasilitasi dosen-dosen untuk membuat artikel yang diterbitkan di jurnal internasional; melakukan *joint research* dan *joint publication* dengan para ahli luar negeri.

*Ketiga***,** pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud UNY sebagai menara air bukan menara gading, terus diupayakan peningkatan dan pembinaan kegiatannya. UNY secara sadar membuat dan melakukan kegiatan sendiri dan berkolaborasi secara sinergis dengan institusi lain baik secara lokal, nasional maupun internasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik berupa hasil penelitian maupun kajian yang bermanfaat, sehingga terjadi proses pencerdasan dan peningkatan kesejahteraannya bagi mereka.

Untuk mewujudkan pengembangan bidang akademik, UNY terus berusaha membenahi sistem pendidikannya, termasuk merencanakan pemerolehan sertifikat ISO 17025 untuk laboratorium Sain dan sertifikat ISO 9001:2008 atau IWA 2 untuk bidang akademik sebagai kelanjutan dari pemerolehan sertifikat ISO 9001:2000 tentang Sistem Manajemen Mutu. Upaya ini mengindikasikan bahwa UNY memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan akademiknya yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepuasan bagi pelanggan dan *stakeholders* secara luas.

Selain itu secara keseluruhan, UNY akan memulai dengan konstruksi Kurikulum 2009 yang diharapkan sekali dapat mendukung tercapainya visi UNY untuk menghasilkan insan bernurani, mandiri dan cendekia. Untuk mewujudkan itu UNY memandang penting untuk mengembangkan sistem pendidikan yang menginternalisasikan nilai moral keagamaan baik pada tataran pengembangan silabus dan materi, maupun tataran proses pembelajaran, dan proses

penilaian, sehingga aspek moral diharapkan sekali menjadi variabel penting untuk penentuan keberhasilan studi.

Demikian juga untuk menjadikan insan mandiri, secara formal telah ditetapkan matakuliah pendidikan kewirausahaan menjadi mata kuliah wajib universitas dan didirikannya Pusat Pendidikan Kewirausahaan tingkat universitas yang secara simbolik dilakukan bersamaan dengan rangkaian dies natalis UNY ke-45. Upaya ini bukan sekedar untuk menyiapkan mahasiswa menjadi wirausaha muda, namun yang jauh lebih penting bahwa setiap lulusan UNY memiliki jiwa *intrepeneurship*, sehingga mereka memiliki kemandirian, ketangguhan, dan etos kerja yang baik.

Selanjutnya untuk menjadikan insan cendekia, secara formal telah diupayakan setiap dosen dapat mengkonstruksi materi dan mengelola proses pembelajarannya yang lebih dialogis dan *challenging.* Sedangkan secara inoformal dan non-formal, mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk mengadakan kegiatan ilmiah, baik berupa seminar, simposium, workshop, maupun diskusi, serta melakukan penelitian bersama-sama mahasiswa atau membantu para dosen. Selain itu, berbagai pelatihan kepemimpinan pada setiap level, terus dimulai dari tingkat dasar, menengah, sampai dengan tingkat lanjut.

Diharapkan sekali target yang dapat dicapai untuk terlibat dalam kegiatan kepemimpinan bisa semakin meluas, sehingga pada akhirnya setiap mahasiswa memiliki *leadership skills* yang sangat diharapkan di tengah-tengah masyarakat. Jika kecakapan ini dapat dicapai, maka setiap lulusan UNY dapat memainkan peran kecendekiaan secara optimal. Atas dasar itu, diharapkan lulusan UNY akan menjadi insan yang bermoral yang patut menjadi teladan bagi orang lain, dan dengan integritas yang tinggi dalam waktu yang sama menjadi pemimpin yang rendah hati (*tawadlu'),* yang mampu dan mau melayani orang lain. Memang untuk mewujudkan harapan yang baik tersebut tidaklah mudah, karena itu sangat dibutuhkan kerjasama di antara semua pihak secara sinergis.

UNY dalam waktu 45 tahun sebagai suatu universitas, jika dibandingkan dengan universitas di luar negeri, terutama di negara-negara Barat, misalnya *University of Oxford* yang didirikan pada 1096 di Inggris, *dan University of Leiden* yang didirikan pada 1575, di Perancis, bahkan *The University of Iowa,* USA yang didirikan pada February 25, 1847, tempat saya belajar, maka pada hakekatnya UNY belum dikatakan sudah berusia cukup, bahkan bisa dibilang baru berusia seumur jagung. Namun keutuhan, kesatuan, dan kekompakan di antara semua unsur keluarga besar UNY - dosen, mahasiswa, staf administratif dan alumni - sungguh telah memberikan banyak arti, sehingga mereka mampu mengantarkan UNY dapat meraih suatu posisi yang relatif membanggakan di antara universitas besar di Indonesia, terutama di bidang kependidikan.

Akhirnya untuk menuju UNY menjadi *World Class University,* dengan rasa *humble* sangat berharap masukan dan kritik konstruktif dari berbagai pihak untuk kemajuan UNY, sehingga UNY mampu memberi kontribusi yang semakin banyak, terutama sumbangan dalam perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia, paling tidak sudah ikut andil dalam meningkatkan pendidikan di wilayah Propinsi DIY dan Propinsi Jateng khususnya dan Indonesia pada umumnya. Semoga UNY ke depan terus menapak maju dan selalu dalam ridlo-Nya.

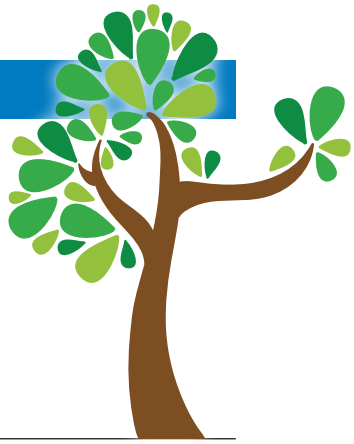

Meningkatkan Efektivitas Kepenasehatan Akademik

Pengantar

Pada hakekatnya tridharma perguruan tinggi (PT) merupakan pilar penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang salah satunya adalah pendidikan, bahkan layanan pendidikan merupakan kegiatan yang paling utama. Penyelenggaraan pendidikan di PT sangat bertumpu pada peran dosen. Di samping dosen memiliki tugas utama mengajar, meneliti dan melaksanakan pengabdian pada masyarakat, dosen bertugas membimbing mahasiswa (sebagai penasehat akademik). Pada kondisi inilah, dosen harus dapat mendampingi mahasiswa dalam proses pendidikannya, sehingga mereka dapat berhasil secara meuaskan baik di bidang akademiknya maupun non akademiknya.

Pada kenyataannya sebagian besar dosen Penasehat Akademik (PA), baru memberikan layanan bimbingan akademik yang bersifat administratif, bahkan jika tidak dalam pengendalian sistem dengan baik, ketika penggunaan ICT digunakan dalam proses layanan akademik, diduga dapat meniadakan peran PA secara signifikan. Yang pada akhirnya keberadaan PA dapat terabaikan.

Kondisi yang demikian sebenarnya tidak menguntungkan bagi proses penyelesaian pendidikan mahasiswa, karena mahasiswa tidak memperoleh pendampingan selama proses pendidikannya. Apabila daya tarik eksternal sangat kuat, boleh jadi mahasiswa tidak memperoleh apa-apa dari PA selama dalam proses pendidikannya. Padahal pendampingan yang intensif oleh PA diharapkan mampu mengantarkan mahasiswa dalam proses pembentukan diri secara lebih terarah, sehingga pada akhirnya mahasiswa dapat menyelesaikan studi secara optimal.

Menyadari akan dorongan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk pendidikan, kiranya perlu ditingkatkan efektivitas kepenasehatan akademik.

Fenomena Layanan Kepenasehatan Akademik

Apabila diamati secara selintas, selama ini layanan kepenasehatan akademik lebih banyak diorientasikan kepada beberapa kegiatan, di antaranya:

(1) Memberikan pengesahan kartu rencana studi (KRS),
(2) Memberikan rekomendasi untuk permohonan cuti kuliah,
(3) Memberikan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya untuk alih bidang studi, dan
(4) Memberikan persetujuan untuk pengajuan permohonan gelar tambahan.

Pertama, memberikan pengesahan KRS sebagai proses awal yang penting dalam setiap kegiatan semester. Kegiatan ini sering kali menjadi tak memiliki makna yang berarti, ketika dosen hanya memberikan tanda tangan pengesahan tanpa ada proses dialog secara berarti dengan mahasiswa.

Kedua, memberikan rekomendasi untuk permohonan cuti kuliah. Kegiatan ini juga sering masih bersifat administratif, karena semata-mata hanya memberikan pengesahan. Padahal seyogyanya perlu diawali kesepakatan bersama, sehingga pengambilan cuti benar-benar fungsional dan mendesak sifatnya.

Ketiga, memberikan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya untuk alih bidang studi. Kegiatan ini juga bersifat mendesak, jika terbukti dengan benar, bahwa mahasiswa yang bersangkutan mengalami ketidakcocokan dengan pilihan program studinya. Demikian juga mahasiswa mampu menunjukkan potensi dan minat yang lebih terhadap PS yang mau dipilih.

*Keempa*t, memberikan persetujuan untuk pengajuan permohonan gelar tambahan. Layanan ini mungkin dapat terjadi pada perguruan tinggi yang memiliki fleksibilitas program pendidikan *double degree*.

Atas dasar rumusan dan uraian di atas nampak bahwa tidak berlebihan jika peran yang dimainkan PA selama ini lebih menonjol pada layanan adiministratif, belum nampak secara berarti layanan edukatifnya. Bahkan dengan penggunaan ICT yang tanpa mempertimbangakan aspek akademiknya, boleh jadi keberadaan PA tidak banyak berarti, apalagi jika PA kurang *literate* bidang ICT, mereka tidak bisa mengontrol kemajuan mahasiswa secara menyeluruh.

Kebutuhan Mahasiswa Baru

Berdasarkan kajian KRAMER & WASHBURN (1983), bahwa mahasiswa baru cenderung memiliki banyak kebutuhan, di antaranya: (1) Kepenasehatan & informasi akademik, (2) Kepenasehatan karier, (3) Bantuan dalam menghadapi transisi emosional memasuki perguruan tinggi, (4) Bantuan dalam memahami berbagai persyaratan dan aturan yang ada, (5) Bantuan dalam memasuki

lokasi dan wilayah baru, (6) Bantuan dalam membuat transisi sosial untuk memasuki kehidupan kampus, (7) Bantuan dalam membuat transisi intelektual di kampus, dan (8) Bantuan dalam menetapkan tujuan akademik dan personal

Pertama, Kepenasehatan & informasi akademik. Persoalan ini merupakan esensi dari layanan kepenasehatan akademik. Hal ini dipertegas oleh hasil studi Brady (1978) bahwa layanan kepenasehatan & informasi akademik merupakan kebutuhan utama dalam orientasi.

Kedua, Kepenasehatan karier. Karier merupakan aspek yang perlu disiapkan sedemikian rupa oleh mahasiswa, sehingga tidak boleh diabaikan dari kegiatan kepenasehatan akademik. Abel (1977) menegaskan bahwa seharusnya kegiatan PA lebih diorientasikan kepada *grades,* studi, memilih konsentrasi program pendidikan, dan menentukan pilihan karier.

Ketiga, Bantuan dalam menghadapi transisi emosional memasuki perguruan tinggi. Kehidupan di PT pada hakekatnya menuntut persiapan mental tersendiri, karena terdapat suasana transisional antara dunia sekolah dan universitas. Banyak kegiatan yang menuntut kemandirian. Untuk menghadapi tantangan itu, PA diharapkan mampu memfasilitasi mahasiswa dalam menghadapi transisi emosional tersebut.

Keempat, Bantuan dalam memahami berbagai persyaratan dan aturan yang ada. Banyak aturan-aturan baru yang muncul di universitas, yang tidak ditemui di sekolah. Karena PA diharapkan mampu memberikan bantuan kepada mahasiswa dalam memahami berbagai aturan di kampus, sehingga dapat mengikuti proses pendidikan dengan lancar.

Kelima, Bantuan dalam memasuki lokasi dan wilayah baru. Wilayah kampus yang kompleks perlu dikenali semua, sehingga dapat mengakses dan memanfaatkannya secara optimal, sehingga dapat mendukung berbagai kegiatan pendidikan yang diperlukan. Untuk itu perlu pendampingan PA yang lebih terarah.

Keenam, Bantuan dalam membuat transisi sosial untuk memasuki kehidupan kampus. Kampus yang merupakan komunitas akademik pada hakekatnya menghendaki cara hidup yang berbeda dengan di sekolah, karena itu kehadiran PA sangat diharapkan untuk membantu mahasiswa dalam menghadapi transisi sosial dari komunitas sekolah ke komunitas kampus.

Ketujuh, Bantuan dalam membuat transisi intelektual di kampus. Kehidupan kampus sangat kental dengan dunia intelektual, karena kampus merupakan tempat berkumpulnya para intelektual. Untuk dapat berhasil mempersiapkan para intelektual muda, sangat diperlukan bantuan PA yang lebih intensif.

Kedelapan, Bantuan dalam menetapkan tujuan akademik dan personal. Menetapkan bidang keilmuan dan orientasi personal seringkali merupakan hal

yang sulit dilakukan oleh mahasiswa, sehingga diperlukan sekali pembimbingan yang terarah.

Menyadari akan sejumlah kebutuhan tersebut, nampak sekali bahwa kehadiran PA pada hakekatnya bukan sebatas pemenuhan kebutuhan administratif, melainkan memfasilitasi segala kebutuhan mahasiswa sebelum, selama, dan sesudah mengukuti proses pendidikan.

Tujuan Program Kepenasehatan Akademik

Berdasarkan *(The National Academic Advising Association) bahwa tujuan utama kepenasehatan akademik adalah: "to assist students in the development of meaningful educational plans that are compatible with their life goals. Academic advising should be viewed as a continuous process of clarification and evaluation".* Artinya bahwa kepenasehatan akademik diharapkan mampu membantu mahasiswa dalam membuat rencana pendidikan yang bermakna, bahkan diharapkan dapat dikaitkan dengan tujuan hidupnya.

Menyadari akan tujuan tersebut, kiranya PA memiliki tanggung jawab yang penuh dalam membimbing mahasiswa untuk membuat keputusan yang penting berkenaan dengan tujuan hidup dan rencana pendidikannya. Jika memperhatikan tanggung jawab PA yang relatif berat, maka PA seharusnya mengikuti terus perjalanan pendidikan mahasiswa bimbingannya.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang cakupan tujuan program kepenasehatan, maka *The National Academic Advising Association* menguraikan lebih detil di antaranya:

- *Clarification of life and career goals*
- *Development of suitable educational plans*
- *Selection of appropriate courses and other educational experiences*
- *Interpretation of institutional requirements*
- *Increasing student awareness of educational resources available*
- *Evaluation of student progress toward established goals*
- *Development of decision-making skills*
- *Reinforcement of student direction*
- *Collecting and distributing student data regarding student needs, preferences, and performance for use in institutional policy-making.*

Tugas Penasehat Akademik

Berdasarkan tujuan kepenasehatan akademik, maka tugas PA adalah memberikan bantuan nasehat yang intensif melalui kontak secara teratur dengan mahasiswa bimbingannya. PA membantu mahasiswa mengeksplorasi berbagai

bidang minat, memilih mata kuliah, meneliti rencana karier yang dikaitkan dengan bidang ilmu yang ditekuni, dan mengembangkan rencana studi yang dikaitkan dengan tujuan pendidikannya.

Penasehat Akademik (PA) juga dapat melakukan referal ke pimpinan atau pusat-pusat layanan bantuan bagi mahasiswa, terutama untuk memperoleh bantuan bidang akademik, personal, dan karier; pengembangan kecakapan akademik, dan bantuan finansial untuk keperluan studi dan hidupnya, jika memang mahasiswanya sangat membutuhkannya**.**

Perlu juga diketahui suatu contoh yang dilakukan di *University of Iowa,* bahwa mahasiswa dapat juga hadir konsultasi ke PA, ketika mahasiswa:

- Memiliki pertanyaan tentang berbagai program pendidikan yang ditawarkan di kampusnya.
- Memiliki keinginan untuk merencanakan rencana perkuliahan untuk semester mendatang atau merencanakan konsentrasi program pendidikannya.
- Memiliki pertanyaan tentang proses registrasi.
- Menyiapkan untuk mendaftar perkuliahan semester mendatang. Mahasiswa tetap harus menemui PA-nya untuk pengesahan KRS-nya.
- Memiliki pertanyaan lainnya, misalnya "bagaimana menge-drop atau menambah mata kuliah", juga di mana memperoleh informasi tentang karier.
- Memiliki kesulitan akademik.
- Membutuhkan seseorang untuk membicarakan masalah-masalah pribadi.

Jika memperhatikan contoh yang dilakukan di University of Iowa, kiranya pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi tugas PA di universitas yang ada di Indonesia, hanya saja apa yang menjadi rambu-rambu dalam kepenasehatan akademik diterapkan secara konsekuen selama proses pendidikan.

Memperbaiki Keterampilan dan Kebiasaan Belajar

Untuk mengoptimalkan potensi mahasiswa, maka mahasiswa perlu dibantu dengan berbagai keterampilan dan kebiasaan belajar di antaranya:

- Time Management – Belajar mengelola waktu dengan baik.
- Test Taking – stategi menyipakan tes dan melaksanakan tes yang terbaik.
- Test Anxiety – taktik mengatasi kecemasan sebelum dan selama
- Paper Writing – cara membuat tulias ilmiah dan laporan penelitian atau studi kasus.

- Note Taking – belajar membuat catatan yang mencakup banyak isi dan mudah diingat.
- Reading Strategies – metode yang digunakan untu memperbaiki kemampuan membaca komprehensif.
- Motivation and Goal Setting – Belajar untuk meingkatkan motivasi dan menetapkan tujuan untuk memperbaiki prestasi dan kinerja.

Karakteristik Penasehat Akademik

1. Memiliki ketertarikan secara tulus untuk terlibat dalam kehidupan akademik mahasiswa.
2. Memahami situasi yang khas pada mahasiswa dan tuntutan mata kuliah.
3. Mampu bekerja secara baik dengan mahasiswa, tanpa ada perikau yang judgmental.
4. Mampu memecahkan masalah dan membimbing mahasiswa cara memecahkan masalah.
5. Memiliki cukup keluwesan untuk mengontrol ledakan emosi.
6. Berfungsi secara baik dalam situasi yang penuh stress dan mampu menjadi rujukan dalam menghadapi seseorang yang mengalami stress.
7. Bekerja dengan baik dan mampu menyesuaikan diri secara cepat.
8. Mampu bekerja secara cepat dan akurat.
9. Berkolaborasi dengan tim dan PA lainnya.
10. Mampu bekerja secara profesional sebagai staf pengajar di universitas.
11. Memiliki keterampilan dalam presentasikan ide-idenya.
12. Memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan profesional secara terus menerus, terutama dikaitkan dengan tugas kepenasehatan akademik.

Strategi Kepenasehatan Akademik

Dalam memberikan layanan kepenasehatan akademik, seorang PA dapat memilih strategi, di antaranya:

1. Memberikan layanan secara reaktif terhadap mahasiswa secara *volunteer* (individual atau kolektif)
2. Memberikan layanan secara proaktif baik untuk tindakan preventif maupun tindakan terhadap yang enggan *(reluctant)* secara individual maupun kolektif.
3. Memberaikan Layanan terprogram untuk kepentingan pengembangan.

Penutup

Demikian beberapa pokok pikiran penting berkenaan dengan upaya meningkatkan efektivitas kepenasehatan, terlebih-lebih dikaitkan dengan penerapan ICT baik dalam pengelolaan pendidikan maupun kegiatan instruksional. Perlu diakui bahwa kehadiran PA di tengah-tengah proses pendidikan di universitas sangatlah strategis, terutama dalam mendampingi mahasiswa utuk mencapai tujuan hidup dan pendidikannya.

Namun pada kenyataannya, adanya seperti tidak adanya. Karena itulah kepenasehatan akademik perlu dikelola secara efektif dan efisien sehingga dapat berarti bagi proses pendidikan mahasiswa. Yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan kredibilitas institusi pendidikan di mana mahasiswa belajar.

Tulisan ini dibahas dalam workshop peningkatan sistem pembimbingan dosen wali/pembimbing akademik (DPA) mahasiswa FTSP UII pada 27 juni 2007.

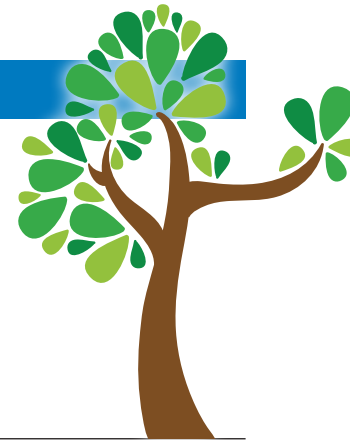

Mengembangkan KKN Kontekstual

Pengantar

Pada dasarnya universitas tidak hanya bertanggungjawab dalam pengembangan keilmuan, namun yang juga sama pentingnya universitas memiliki tanggung jawab sosial (Bok, 1982). Karena itulah universitas tidak harus menjadi menara gading *(Ivory Tower)* melainkan menara air *(Water Tower),* artinya bahwa universitas berdiri tegak tidak hanya untuk kemegahan, melainkan keberadaannya harus bisa memancarkan air kehidupan bagi sekitarnya. Dengan demikian UNY sebagai suatu universitas yang handal, harus mampu memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya sebagai wujud tanggung jawab sosialnya.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial, Bok (1982) menegaskan bahwa *universities have obligation to serve society by making the contribution they are uniquely able to provide*. Dari pernyataan ini dapat ditangkap suatu makna, bahwa setiap universitas dalam menunjukkan tanggung jawab sosialnya diwujudkan dalam kontribusinya yang bersifat unik sesuai dengan visi dan misinya. Dengan demikian UNY sebagai universitas yang masih memiliki misi utama yang salah satunya bidang pendidikan, merasa perlu untuk menfokuskan tanggung jawab sosialnya di bidang pendidikan, tanpa mengabaikan bidang lainnya, terlebih-lebih bidang yang relevan.

Dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya, UNY memandang bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah suatu program pendidikan kurikuler yang sangat diandalkan. Karena program KKN dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan segala kemampuan, kecakapan dan keterampilan hidupnya dalam menghadapi persoalan kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat.

Pada prakteknya, program KKN di universitas, ada yang sudah ditiadakan, ada juga yang masih dipertahankan. Universitas yang meniadakan program KKN memandang bahwa KKN dinilai sudah tidak relevan lagi karena tidak memberikan manfaat yang banyak, bahkan dipandang Assidiqie (2005) sudah tidak efektif lagi, dengan beberapa alasan,

*Pertama***,** terbatasnya kemampuan mahasiswa, mahasiswa tidak dapat memecahkan semua permasalahan yang ada di suatu desa. Dalam konteks ini mahasiswa dianggap sebagai "dewa penolong".

Kedua, kemampuan bersosialisasi mahasiswa. Kehidupan mahasiswa di kampus tentu sangat berbeda dengan nilai dan norma sosial dalam masyarakat desa. Kondisi ini mengharuskan seorang mahasiswa untuk menghormati budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Ternyata banyak mahasiswa yang tidak bisa menyesuaikan gaya hidupnya dengan kondisi yang ada di lokasi KKN.

*Ketiga***,** ketidaksesuaian lokasi KKN. Pelaksanaan KKN seharusnya dilakukan di lokasi yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk menggali potensi daerahnya. Kriteria penentuan lokasi KKN harus didasarkan kondisi masyarakat setempat yang perlu untuk diberdayakan.

Keempat, dalam kelompok mahasiswa yang mengikuti KKN biasanya terdapat mahasiswa dari berbagai jurusan. Hal ini sesuai dengan program KKN yang dilaksanakan dengan pendekatan multidisipliner. Namun, kondisi ini akan menyebabkan setiap mahasiswa menjadi kesulitan untuk menerapkan ilmunya masing-masing.

Sebaliknya universitas yang mengharuskan program KKN sebagai salah program kurikuler berpendapat bahwa KKN tidak hanya mampu mendukung pengembangan personal *(personal development),* melainkan juga pemberdayaan masyarakat *(community empowerment)* dan pengembangan institusi *(institutional development).* Dengan demikian apa yang kemungkinan bisa dicapai oleh program KKN jauh lebih banyak daripada jumlah sks-nya.

Berdasarkan berbagai pertimbangan UNY mengambil sikap bahwa KKN diyakini masih relevan untuk dijadikan salah program kurikuler. Karena UNY menyadari bahwa UNY memiliki mahasiswa sebagai intellectual capital yang harus terus didukung pengembangannya yang optimal, sementara masyarakat yang memiliki *material capital* perlu terus didukung pengelolaannya secara lebih produktif, serta pemerintah daerah yang memiliki *human capital* yang perlu terus dilakukan pemberdayaan.

Untuk lebih mewujudkan tanggung jawab sosialnya yang lebih bermakna dan meningkatkan efektivitas dan relevansi program KKN dipandang perlu dikembangkan KKN Kontekstual, yang secara konvensional sering disebut sebagai KKN Tematik. KKN Kontekstual diharapkan mampu memberikan man-

faat yang lebih besar bagi kemaslahatan masyarakat. Seiring dengan adanya bencana gempa bumi yang melanda Yogyakarta dan sekitarnya, maka pada kesempatan ini KKN UNY lebih diorientasikan pada penanganan persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah gempa.

Makna dan Rasional KKN Kontekstual

KKN Kontekstual pada hakekatnya dapat dipahami sebagai implementasi tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan kongkrit dan aktual masyarakat melalui program intra kurikuler. Artinya bahwa KKN Kontekstual mendorong mahasiswa untuk melakukan latihan mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat, yang selanjutnya melakukan penelaahan terhadap sejumlah ilmu (disiplin) dan konsep serta hasil penelitian yang relevan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut yang sedang dihadapi masyarakat yang menjadi target program KKN. Dalam kaitannya ini, mahasiswa tidak hanya mengerahkan segala pengetahuannya, tetapi juga keterampilan serta mewujudkan dalam perilakunya sehari-hari.

Dalam suasana seperti ini, mahasiswa diharapkan sejak dalam bangku kuliah telah menyadari keberadaannya bahwa apapun yang diperoleh di kampus baik melalui kegiatan pendidikan maupun penelitian, yang pada akhirnya harus dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks inilah universitas menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan tanggung jawab sosialnya terutama bagi kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa alasan melandasi perlunya KKN Kontekstual, di antaranya:

1) Untuk membentuk lulusan yang utuh (cendekia, mandiri, dan bernurani) perlu peningkatan kecakapan hidup *(academic, vocational, personal, social, dan moral)*.
2) Untuk siap menghadapi tantangan hidup kini dan mendatang diperlukan kompetensi dasar yang mencakup kecakapan *managing self, communicating, managing people and taks, and mobilizing innovation and change (Evers, Rush, Berdrow)*.
3) Mahasiswa yang sudah memiliki jumlah satuan kredit semester (sks) tertentu diasumsikan bahwa mereka sudah memiliki kemampuan dan kesiapan diri untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata.
4) Program dan kegiatan KKN yang diorientasikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat cenderung lebih menarik dan bermakna.
5) Masyarakat yang menerima program dan terlibat dalam kegiatan KKN Kontekstual cenderung lebih *welcome and friendly*.

Fokus KKN Kontekstual

KKN Kontekstual pada kesempatan ini lebih diorientasikan pada Peduli Bencana. Artinya bahwa program KKN yang dirancang dan kegiatan KKN yang dilaksanakan di lapangan hendaknya lebih diarahkan pada kegiatan *recovery* pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, dan bidang lainnya yang relevan.

1. Bidang pendidikan

Pendidikan dalam hal ini bisa berwujud pendidikan formal, pendidikan non formal, atau pendidikan informal. Hal ini mempertegas bahwa perhatian terhadap bantuan *recovery* pendidikan hendaknya lebih bersifat komprehensif, tidak parsial, sehingga tidak terjadi penanganan masyarakat yang bias.

Pendidikan formal lebih terkait dengan pendidikan persekolahan baik dari jenjang TK-RA, SD-MI, SMP-MTs, maupun SMA/SMK-MA/MAK. Dalam konteks ini program dan kegiatan KKN perlu terus diupayakan adanya bantuan baik terhadap institusi, personalia, maupun orangtua atau masyarakat untuk segera mampu menciptakan penyelenggaraan pendidikan yang efektif dengan melakukan berbagai modifikasi sesuai dengan kondisi yang ada. Pendekatan yang digunakan hendaknya bersifat fasilitatif, partisipatif dan memberdayakan, sehingga tercipta penyelenggaraan pendidikan yang sehat dan menggairahkan.

Pendidikan non-formal lebih dikaitkan dengan pendidikan kesetaraan, kelompok bermain, pendidikan kursus, program bebas buta keaksaraan, dan lainnya. Dalam konteks ini pendidikan nonformal perlu terus mengembangkan kegiatan penanganan anak usia dini yang lebih menyenangkan sehingga dapat mengatasi trauma fisik dan psikis sejak dini, serta mengembangkan program dan kegiatan pendidikan nonformal yang cenderung bersifat kompensatif dan memberdayakan. Dengan demikian masyarakat segera dapat terhindar dari keputusasaan dan ketakberdayaan, di samping memiliki optimisme dalam hidupnya. Pendidikan nonformal bisa bersifat keduniaan dan keakhiratan, artinya bahwa pendidikan nonformal dapat diarahkan untuk meningkatkan kecakapan hidup yang bermanfaat bagi hidupnya di dunia, di samping untuk meningkatkan kualitas hidup keberagamaannya yang dapat bermanfaat bagi hidupnya di akhirat kelak.

Pendidikan informal lebih dikaitkan dengan kegiatan pengasuhan dan pendidikan dalam keluarga. Dalam konteks ini pendidikan informal juga sangat penting, terutama untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak serta pembentukan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh keluarga dan masyarakat setempat. Pencerahan yang dilakukan terhadap keluarga sebaiknya cenderung bersifat motivatif dan fasilitatif, sehingga dapat terhindar dari sikap resisten.

2. Bidang Konseling Traumatik

Pada kenyataannya bencana gempa bumi di DIY dan Jateng tidak hanya berdampak terhadap kondisi psikologis orang yang terkena bencana dan menjadi korban, melainkan juga berdampak terhadap orang yang terkena bencana dan tidak menjadi korban. Kondisi inilah yang menyebabkan seseorang mengalami kondisi trauma psikis. Kondisi traumatik ini jika tidak segera dapat diatasi, cenderung akan berkepanjangan dan boleh jadi kondisi ini akan selalu menghambat seseorang dalam berbagai aktivitas hidupnya. Kondisi traumatik ini tidak mengenal usia, karena bisa mengena kelompok usia anak-anak, remaja, bahkan juga orang dewasa.

Untuk mengatasi individu yang traumatik, strategi yang paling efektif adalah pemberian konseling traumatik. Pendidikan, khususnya pembelajaran, tidak akan bisa berjalan efektif dan lancar, manakala peserta didik masih mengalami trauma secara berarti. Karena itu tindakan konseling traumatik sangat dibutuhkan bagi peserta didik sampai batas-batas tertentu, sehingga mereka mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik.

Demikian pula dalam dunia pekerjaan, orang dewasa tidak akan mampu melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya terutama ketika mengalami trauma psikis secara berarti. Dalam konteks inilah mereka juga perlu mendapatkan konseling traumatik. Persoalannya di sini adalah tidak semua penderita trauma bisa ditangani dengan suatu pendekatan.

Banyak pendekatan yang dapat dipilih, sehingga kondisi traumatik dapat diatasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ketepatan memilih pendekatan konseling traumatik sesuai dengan kliennya merupakan suatu yang sangat penting dalam melakukan pemulihan. Dengan demikian sangatlah mungkin dalam mengatasi kondisi traumatik, di satu sisi dapat mengandalkan pendekatan-pendekatan psikologis, di sisi lain dapat juga mengandalkan pendekatan-pendekatan sipritual.

Berkaitan dengan konseling traumatik, mahasiswa yang memiliki potensi membantu orang lain dan mengambil program studi bimbingan dan konseling diharapkan juga dapat menyiapkan dan meningkatkan diri dalam melakukan trauma psikologis baik bagi anak-anak, remaja maupun orang-orang dewasa.

3. Bidang Penyadaran terhadap kecacatan

Bencana gempa bumi ternyata juga dapat menyebabkan sejumlah orang yang harus mengalami kelumpuhan, amputasi, dan kecacatan lainnya. Pada kenyataannya tidak semua mereka yang menyandang kecacatan secara pribadi memiliki kesiapan menerima kecacatan, demikian pula orangtua atau anggota keluarga lainnya. Dalam konteks inilah, pendampingan sangatlah diperlukan

bagi mereka, sehingga mereka dapat menerima kenyataan secara positif. Mahasiswa yang memiliki bidang ini sangatlah diharapkan mengkonsentrasikan diri untuk membantu mereka dalam membangun pengertian dan memperbaiki sikapnya, sehingga baik si korban maupun keluarganya dapat menghadapi kecacatan itu dengan sikap yang positif. Yang pada akhirnya dapat dibangun masyarakat yang inklusif.

4. Bidang Rehabilitasi fisik

Gempa yang mengguncang DIY dan Jawa Tengah ternyata meluluhlantakkan bangunan rumah dan fasilitas publik, terutama bangunan sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Kerusakan ini jelas mengganggu dan menghambat kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan aktivitas kehidupan masyarakat.

Untuk dapat mendukung kelancaran kegiatan pendidikan dan aktivitas sosial lainnya, perlu sekali dalam waktu yang singkat dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan sekolah dan institusi pendidikan lainnya. Dalam konteks inilah, mahasiswa yang memiliki bidang terkait, misalnya mahasiwa teknik bangunan dan perencanaan, teknik mesin, pendidikan geografi, dan lainnya perlu menyiapkan diri kemampuan dan keterampilannya, sehingga dapat berpartisipasi optimal dalam rehabilitasi fisik.

Meningkatkan Produktivitas KKN Kontekstual: Peduli Bencana

KKN Peduli Bencana sangat memerlukan upaya-upaya yang sistematis, sehingga dapat menunjukkan produktivitas tinggi. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan, di antaranya:

a. Persiapan kemampuan dan keterampilan

Jauh sebelum terjun ke medan KKN, sangatlah dipandang perlu mahasiswa mempersiapkan diri, baik berkenaan dengan kemampuan atau kecakapan, dan keterampilan tertentu yang terkait dengan tema yang dipilih dalam kesempatan KKN periode ini. Kemampuan atau kecakapan dan keterampilan yang sesuai akan menambah kepercayaan diri peserta KKN, sehingga ketika terjun di medan mereka dapat menyelesaikan tugas secara produktif. Persiapan bekal lainnya tentu tidak kalah pentingnya, misalnya segala peralatan yang diperlukan di medan KKN terutama untuk kegiatan pendidikan dan lainnya terkait yang akan dilakukan.

b. Penguasaan medan

Medan KKN pada periode ini memiliki karakteristik tersendiri, terlebih-lebih dikaitkan dengan bencana gempa tektonik yang meluluhlantahkan berpu-

luh-puluh ribu bangunan rumah dan fasilitas publik, sehingga kehidupan ekonomi dan pemerintahan menjadi lumpuh. Banyaknya polusi barang bekas dan reruntuhan bangunan, kondisi lingkungan wilayah gempa relatif terganggu.

Untuk dapat memasuki wilayah yang tepat dan pengembangan program rehabilitasi dan restrukturisasi yang tepat, sangatlah diperlukan penguasaan medan bagi setiap calon mahasiswa KKN. Penguasaan medan dapat difokuskan pada penguasaan informasi tentang lingkungan fisik dan sosialnya, serta tata cara kehidupan masyarakat yang akan menjadi tempat KKN. Karena itulah observasi dan studi pendahuluan sangat diperlukan sebelum terjun ke lapangan.

c. Kesiapan mental

Kesiapan mental bagi mahasiswa peserta KKN merupakan sesuatu yang sangat penting, karena kemantapan diri, stabilitas emosi, rasa ingin membantu, dan sikap optimisme sangat diperlukan dalam memasuki medan akibat bencana. Jika kesiapan mental tak dimiliki, sangat diduga kemampuan melaksanakan kegiatan KKN tidak akan mampu menunjukkan produktivitas yang tinggi. Dengan demikian setiap peserta KKN harus merasa yakin, bahwa secara psikologis telah memiliki persiapan untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam memberdayakan masyarakat. Jika tidak, maka akan berakibat fatal baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau khususnya masyarakat tempat KKN.

d. Kecakapan sosial dan kepemimpinan

Persoalan yang akan dihadapi di medan KKN sungguh kompleks, sehingga diperlukan penyelesaian secara kolektif. Atas dasar itulah maka setiap peserta KKN seharusnya mampu membangun interaksi antar pribadi dalam kelompoknya. Demikian juga yang tidak kalah pentingnya, peserta KKN harus mampu mengembangkan interaksi dengan masyarakat tempat KKN.

Dalam konteks ini peserta harus mampu menunjukkan keterampilan kepemimpinannya dalam memberdayakan masyarakat.

e. Kolaborasi dengan pemerintah, institusi lain, dan masyarakat

Upaya recovery wilayah bencana adalah menjadi tanggung bersama, baik pemerintah, institusi non pemerintah (LSM), dan masyarakat. Oleh karena itu peserta KKN perlu sekali membangun kolaborasi, baik dengan pemerintah, institusi non pemerintah (LSM) maupun dengan masyarakat sendiri sebagai stakeholder utamanya. Kolaborasi dapat dilakukan sejak perencanaan dibuat, sampai dengan implemntasi, sampai dengan kegiatan monitoringnya.

f. Kegiatan KKN hendaknya bersifat inovatif

Kegiatan KKN yang rutin biasanya memiliki dampak yang kurang meluas, sehingga KKN dapat juga diabaikan keberadaannya bahkan ditiadakan, karena KKN tidak menarik, karena kegiatannya sangat tidak menantang. KKN yang seharusnya dikembangkan, hendaknya bersifat inovatif, sehingga mampu memberikan perspektif baru dan manfaat yang lebih banyak. Sesuatu yang inovatif cenderung berpotensi untuk menantang.

g. Pendampingan perlu ditingkatkan efektivitasnya

Dalam setiap pelaksanaan KKN, tak terkecuali program KKN ini, peserta KKN akan didampingi oleh DPL. Hal ini tidak berarti bahwa mahasiswa KKN tidak mampu melaksanakan tugas sendiri, namun diyakini bahwa untuk dapat melaksanakan tugas yang lebih terarah dan optimal, kehadiran DPL yang bertanggungjawab untuk mendampingi mahasiswa. Tentu saja pendampingan yang dikehendaki, bukan sekedar formalitas, namun diharapkan DPL dapat menunjukkan keberadaan dan keterlibatannya secara lebih fungsional.

Problem yang Dihadapi Mahasiswa dan Upaya Mengatasainya

1. Problem

Adanya peristiwa gempa yang sangat mengejutkan di DIY dan Jateng, menimbulkan dampak yang sangat berarti baik bagi penduduk secara personal, maupun kolektif, demikian juga lingkungan yang rusak. Adapun problem yang diduga dapat menghambat mahasiswa KKN di antaranya sebagai berikut:

a. Mental
   Kesehatan mental anak-anak dan orang-orang di wilayah bencana mengalami kontaminasi yang sedemikian rupa, tidak hanya karena dikacaukan oleh perubahan fisik yang dramatis, melainkan juga masuknya banyak orang di wilayahnya yang membawa sikap yang berbeda dapat menyebabkan *split personality*.
b. Kesehatan lingkungan
   Banyak reruntuhan dapat merepotkan warga, terlebih-lebih anak-anak mengalami hambatan untuk bergerak bebas, karena ditakutkan oleh penyakit yang ditimbulkannya, misalnya tetanus. Demikian juga ketiadaan tempat pembuangan kotoran dapat mendorong mudahnya penyakit tumbuh dan berkembang. Kondisi ini pula diduga dapat menyebabkan mahasiswa KKN dibayang-bayangi oleh potensi penyakit yang ada di sekelilingnya.

c. Sosial dan budaya
   Masyarakat wilayah gempa pada hakekatnya memiliki kultur dan kebiasaan yang unik, boleh jadi berbeda secara berarti dengan latar belakang kehidupan mahasiswa. Model interaksi sosial yang membudaya di tengah-tengah masyarakat gempa yang berbeda secara berarti dengan kebiasaan mahasiswa dapat menghambat juga proses pemberdayaan yang akan dilakukan mahasiswa.
d. Rasa Traumatik
   Bencana gempa yang sangat mengejutkan sungguh membuat banyak orang, terlebih-lebih warga yang di daerah bencana mengalami trauma psikis dari yang level ringan sampai dengan yang berat. Rasa trauma ini menghilangnya membutuhkan waktu yang lama, terlebih-lebih bagi yang mengalami korban serius, baik hilangnya salah satu anggota keluarga, maupun kerusakan rumah secara total.

2. Upaya Solusi:

Berdasarkan persoalan yang dihadapi mahasiswa, ada beberapa upaya solusi yang dapat dilakukan, di antaranya:

a. Dalam menghadapi persoalan mental, mahasiswa perlu melakukan pendekatan secara intens dan alamiah, sehingga setiap individu dapat menemukan jati dirinya sendiri. Mengingat setiap individu itu unik, maka dalam melakukan rehabilitasi mental perlu pendekatan yang sehumanis dan sealamiah mungkin.
b. Untuk dapat mempercepat terbentuknya lingkungan sehat, maka mahasiswa KKN baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif bersama-sama warga dan masyarakat dapat memprioritaskan terciptanya lingkungan sehat dengan melakukan pembersihan secara total, tidak setengah-setengah. Dalam kondisi ini benar-benar diperlukan pembersihan lingkungan secara gotong royong, walau tidak mudah dilakukan.
c. Untuk dapat mengatasi persoalan sosial budaya, perlu sekali mahasiswa menciptakan interkasi antar pribadi secara sehat dengan secara proaktif melibatkan diri dalam berbagai akitivitas sosial, apakah itu dalam kegiatan gotong royong atau pertemuan-pertemuan dengan warga dengan sharing berbagai pengalaman dan keterampilan.
d. Untuk dapat menghadapi penduduk yang traumatis, sangat diperlukan penyikapan yang positif dan berhati-hati dengan menjaga diri dari perkataan dan perbuatan yang sensitif. Demikian juga mahasiswa dapat menciptakan berbagai kegiatan yang menyenangkan.

Penutup

Demikian beberapa pokok pikiran penting berkenaan dengan KKN Kontekstual sebagai suatu keharusan bagi UNY terkait dengan tanggung jawab sosialnya untuk bisa merespons dan memenuhi kebutuhan masyarakat DIY dan Jateng yang sedang menghadapi dampak bencana gempa yang tidak hanya meluluhlantahkan banyak bangunan hunian dan fasilitas umum yang menjadi kebutuhan banyak penduduk dalam setiap harinya. Mudah-mudahan KKN Kontekstual dapat ikut bserta memberikan kontribusi bagi penyelesaian persoalan penduduk DIY dan Jateng, terutama sektor pendidikan.

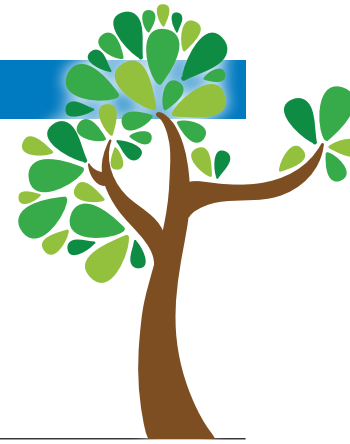

SPMB atau UMPTN?

SPMB atau UMPTN akhir-akhir ini merupakan salah satu isu pendidikan yang sedang menghangat. Hal ini diindikasikan dengan adanya tiba-tiba sejumlah 41 PTN berkeinginan keras untuk keluar dari Paguyuban SPMB Nusantara yang selama ini dipercaya oleh seluruh PTN se-Indonesia bertanggungjawab dalam proses rekrutmen mahasiswa baru. Mangapa demikian, karena diyakini pengelolaan SPMB, terutama aspek keuangannya, bertentangan dengan perundang-undangan yang ada, sehingga sangat potensial dapat mengancam keberadaan rektor sebagai pimpinan PTN.

Pada dasarnya, selama ini pengelolaan keuangan penerimaan mahasiswa baru, khususnya telah dipersoalkan tentang akuntabilitas dan transparansinya, namun dengan sikap yang tegas dari pihak Inspektorat Jenderal yang menengarai bahwa segala biaya untuk SPMB belum dikelola berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada. Sekiranya Paguyuban SPMB Nusantara tidak mau peduli tentang soal ini, maka ke 41 PTN pada tahun ini dengan terpaksa keluar dari Paguyuban SPMB Nusantara dan bersepakat membentuk Ujian Masuk Perguruan Tinggi Nasional (UMPTN) yang sekretariatnya di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya.

Penentuan pilihan sistem seleksi mahasiswa baru seharusnya bertumpu pada banyak manfaat, bukan hanya bermanfaat bagi pihak terbatas. Artinya, penentuan pilihan sistem seleksi mahasiswa seharusnya diutamakan untuk memberikan kepuasan bagi calon mahasiswa dan PTN, di samping aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SPMB selama ini merupakan suatu sistem yang terbangun sejak lama sebagai suatu sistem seleksi mahasiswa baru yang secara substansial terus berkembang sehingga baik substansi maupun mekanismenya yang dimulai dari tahap

persiapan, pelaksanaan, maupun penentuan hasil seleksi telah memiliki kemantapan yang tidak diragukan. Namun sedikit disayangkan bahwa dengan keluarnya undang-undang keuangan dan pengelolaan PNBP di PTN hingga kini Paguyuban SPMB Nusantara tidak mau peduli terhadap konsekuensi hukum yang mengena terhadap pimpinan PTN.

UMPTN dipandang sebagai suatu alternatif sistem seleksi mahasiswa baru yang terpaksa diambil oleh sejumlah PTN (yang hingga kini tercatat sebanyak 41 PTN), ketika Peguyuban SPMB Nusantara tidak mau menyesuaikan pengelolaan keuangan SPMB. Substansi UMPTN direncanakan menggunakan materi yang sama dengan SPMB dalam penyiapan tesnya, dengan harapan calon mahasiswa dapat mengikutinya dengan baik.

Idealnya, sistem seleksi mahasiswa baru untuk PTN seluruh Indonesia diharapkan sekali ada satu sistem yang disepakati oelh seluruh PTN dan dalam koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Depdiknas. Namun jika kedua jenis sistem seleksi mahasiswa tidak dapat dipadukan, maka diharapkan sekali pelaksanaan seleksi mahasiswa baru tahun 2008 tetap dalam koordinasi Ditjen Dikti, Depdiknas yang tidak merugikan PTN dan pimpinannya, terutama juga bagi calon mahasiswa yang akhir-akhir ini dihadapkan Ujian Nasional yang ditambah mata ujiannya dan dinaikkannya passing grade kelulusannya. Selain daripada itu keduanya diharapkan sekali tetap memberikan perhatiannya yang besar terhadap terbukanya akses bagi segenap anak bangsa dari berbagai penjuru, tanpa harus datang ke tempat PTN yang dituju. Atas dasar itulah maka SPMB sungguh diharapkan dapat bertoleransi.

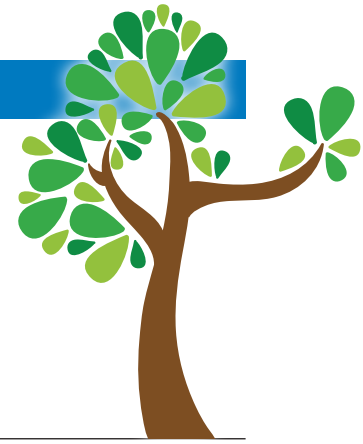

Menghadapi SNMPTN 2012

SNMPTN 2012 merupakan *event* tahunan yang sangat menarik dan mendapat perhatian dari khalayak luas, terutama lulusan SMA-MA-SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Setidak-tidaknya SNMPTN tahun ini diperebutkan calon mahasiswa sebanyak 230-an ribu melalui jalur Undangan dan 618.670 peserta tes melalui Jalur Ujian Tertulis.

Calon mahasiswa baru PTN perlu mencermati sejumlah persoalan yang mengiringi SNMPTN 2012, di antaranya: SNMPTN 2012 cenderung lebih kompetitif, karena diikuti 15 % lebih banyak daripada tahun sebelumnya; program studi (prodi) favorit dan tidak favorit menuntut kemampuan kompetitif yang berbeda, sedangkan setiap tahun ada beberapa prodi yang mengalami pergeseran animo; dan informasi pembiayaan studi melekat pada PTN, sehingga tidak sedikit calon mahasiswa yang menghadapi kesulitan ketika melakukan registrasi ulang berkenaan dengan pembiayaan.

Walaupun persoalan tersebut tidak bisa dihilangkan dan diabaikan, setidak-tidaknya SNMPTN 2012 memiliki sejumlah peluang, yaitu memberikan kesempatan bagi semua lulusan berpotensi untuk mengakses seluruh PTN dari manapun mereka berada; jumlah kursi relatif bertambah, karena terjadi penambahan kuota sejak awal, dan yang tidak registrasi ulang dari yang melalui jalur undangan; peluang untuk peserta SNMPTN 2012 dari keluarga miskin relatif sangat banyak, minimal 14 ribuan, bahkan dimungkinkan akan bertambah 8 ribuan dari APBNP.

Kesempatan emas dan sangat terbuka untuk memperebutkan kursi di PTN perlu diupayakan secara sungguh-sungguh. Setidak-tidaknya ada kiat untuk berhasil merebut kursi PTN. *Pertama,* peserta tes perlu mengawali dengan doa sesuai dengan agamanya dan konsentrasi penuh selama waktu pelaksanaan tes.

Kedua, peserta tes perlu meyakini pilihannya sendiri yang diwujudkan dengan persiapan yang sangat matang, apalagi dalam menghadapi pilihan prodi yang favorit.

Ketiga, peserta tes perlu juga waspada dan perlu sungguh-sungguh, tidak boleh sembrono, walaupun pilihannya bukan prodi favorit pada tahun sebelumnya, karena siapa tahu pada tahun ini justru diperebutkan jauh lebih banyak orang.

Keempat, peserta tes seharusnya mempelajari cakupan materi dan karakteristik soal tahun sebelumnya, sehingga secara substansial dan teknis sudah dikuasai, karena itu diharapkan sekali dapat menyelesaikan soal lebih efisien.

Kelima, perlunya peserta tes menjaga kejujuran pada semua proses (menghindari kecurangan) sejak pengisian format, pelaksanaan tes, sampai dengan pasca tes. Upaya ini sangat bermanfaat dalam memberikan jaminan keabsahan hasil pekerjaan tes, sehingga terhindar dari perlakuan pem-*blacklist*-an.

Keenam, peserta tes harus meyakini bahwa semua format Lembar Jawab Ujian (LJU) diisi sebagaimana petunjuknya, khususnya nomer tes dan kode soal, mengetahui persis lokasi dan tempat ujian, serta mengindari adanya penggunaan alat tulis yang salah dan kerusakan LJU.

Ketujuh, peserta tes perlu menghindari adanya intervensi dari orang lain yang diduga dapat menjerumuskan dirinya, karena setiap peserta harus memiliki keyakinan diri yang kuat dan tidak mudah digoyang orang lain.

Keberhasilan memasuki PTN melalui tes SNMPTN bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang, sehingga keberhasilan tes SNMPTN perlu diteruskan dengan bekerja keras untuk studi dan belajar kehidupan, sehingga dapat diraih keberhasilan yang lebih luas, dengan harapan bahwa derajat dan martabat dirinya sebagai insan mulia masih tetap terjaga.

Namun sekiranya masih belum berhasil, maka perlu keyakinan bahwa SNMPTN bukan akhir dari segala-galanya, karena peserta tes yang gagal telah memperolah pengalaman berharga untuk berjuang menghadapi Seleksi Mandiri.

Semoga kesabaran dalam menerima hasil apapun, dapat mendorong dan memberikan inspirasi untuk meraih prestasi pada kesempatan yang lain. Yang jelas kejujuran dan sportivitas dalam memasuki SNMPTN merupakan modal sosial yang jauh sangat berarti, dibandingkan dengan memasuki SNMPTN dengan menghalalkan cara. Semoga!

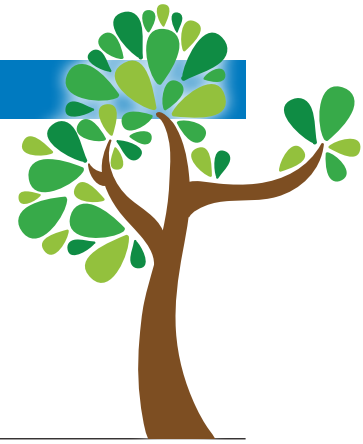

Hasil UN DIY dan SNMPTN

AKHIR-AKHIR ini posisi pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat Indonesia, terlebih-lebih masyarakat DIY sendiri. Hal ini disebabkan rendahnya posisi hasil Ujian Nasional (UN) SMA/MA/SMK tahun 2010 yang utama, dan diperparah lagi dengan hasil UN ulangan. Di balik fenomena tersebut, ternyata ada sisi lain dari kondisi pendidikan di DIY.

Seleksi Masuk Nasional Pendidikan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2010, justru menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan bagi masyarakat pendidikan di DIY. Mengapa demikian? Karena berdasarkan asal provinsi, nilai rata-rata yang diterima untuk bidang IPA di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia, lulusan SLTA asal DIY menduduki urutan pertama yang diikuti dengan Daerah Khusus Ibukota (DKI), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar), dan Sumatera Barat (Sumbar). Untuk bidang IPS, lulusan SLTA asal DIY juga menduduki urutan pertama diikuti dengan Jateng, Sumbar, DKI, dan Lampung. Hasil ini setidak-tidaknya menggambarkan bahwa kualitas pendidikan di DIY tidak bisa dipandang sebelah mata.

Bahkan hasil SNMPTN 2010 dapat memperkuat keyakinan kita bahwa pilihan belajar pada SLTA di DIY masih memberikan banyak harapan bagi yang ingin melanjutkan studi di PT, khususnya di PTN. Walaupun tidak bisa dipungkiri ada sejumlah orangtua asal DIY maupun luar DIY tiba-tiba merasa kecewa dan menyesal, bahkan berkeinginan keras untuk memindahkan anaknya dari DIY setelah melihat "kegagalan DIY" dalam UN 2010.

Bertitik tolak dari hasil SNMPTN 2010, maka ada beberapa *lesson learnt* yang dapat disampaikan, di antaranya: *pertama***,** bahwa penyelenggaraan pendidikan dan ujian nasional di DIY yang dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran, maka pada akhirnya dapat menunjukkan posisi DIY yang baik dan membang-

gakan. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa secara kasuistik masih ada sejumlah praktek ketidakjujuran dalam pengelolaan pendidikan di DIY.

*Kedua***,** bahwa rata-rata nilai hasil SNMPTN 2010 asal SLTA DIY yang menduduki posisi teratas memberikan makna bahwa proporsi lulusan SLTA DIY diduga memiliki peluang yang tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru pada PTN seluruh Indonesia, sepanjang pilihannya tidak menumpuk pada program studi favorit. Katakanlah data empirik tahun ini di luar dugaan, bahkan ditengarai ada sejumlah 58.120 peserta yang skornya di atas rata-rata seluruh peserta SNMPTN 2010, melainkan mereka tidak diterima di salah satu PTN-pun.

Ketiga, bahwa SNMPTN tahun-tahun mendatang dapat mengakomodasi hasil UN SMA/MA/SMK sepanjang kredibilitas UN dapat dijamin. Karena hal ini menyangkut rasa keadilan. Sebagai ilustrasi, bahwa skor 9 pada UN yang berasal dari daerah putih *(white areas),* akan memiliki nilai yang berbeda dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan skor 9 pada UN yang berasal dari daerah hitam *(black areas)*. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kiranya ada dua alternatif solusi untuk membuat UN dapat diakomodasi dalam SNMPTN, yaitu 1) mengupayakan semua provinsi memiliki kredibilitas yang sama dan 2) membuat indeks yang memungkinkan skor UN itu dikoreksi berdasarkan tingkat kejujuran yang terjadi pada level propinsi, kabupaten, atau sekolah, tergantung kondisi masing-masing.

Demikianlah beberapa hal penting yang patut direnungkan oleh semua pihak yang terkait. Semoga dengan hasil SNMPTN 2010, masyarakat DIY tetap memiliki rasa percaya diri dan masyarakat luar DIY tetap menaruh *trust* bahwa praktek pendidikan di DIY masih mempedulikan mutu, yang tidak hanya terkait dengan aspek akademiknya saja, melainkan juga aspek non-akademik, terutama nilai-nilai kejujuran. Untuk itu diharapkan sekali bahwa semua pihak bisa ikut terlibat menjaga dan mengawal pelaksanaan pendidikan yang bermartabat dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan mengeliminir praktek-praktek pendidikan yang kurang terpuji.

Pembinaan Pemuda, Masyarakat, dan Olahraga

Hanya pemuda-pemuda terdidik dan terlatihlah yang mampu memainkan peran secara produktif di zamannya.

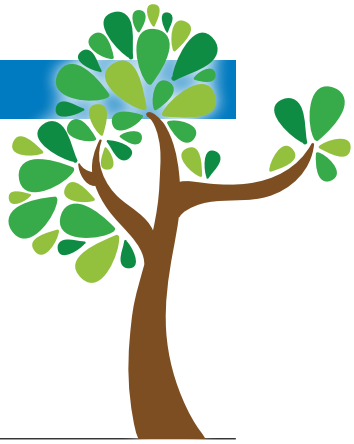

Sumpah Pemuda dan Pendidikan

TANGGAL 28 Oktober 2008, mengingatkan kita 80 tahun lalu dengan peristiwa Kongres Pemuda II yang berlangsung tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II terdiri atas dua rapat, yaitu rapat pertama Sabtu, 27 Oktober 1928, di *Gedung Katholieke Jongenlingen Bond* (KJB), Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, ketua PPI Soegondo *Djojopuspito* berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Moehammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan.

Jika kita perhatikan benar, bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang dapat memperkuat persatuan Indonesia. Memang dengan pendidikan kita dapat membangun kesadaran sejarah dan cita-cita bersama setiap peserta didik. Di samping itu melalui pendidikan diharapkan sekali dapat mengukuhkan satu visi *(common vision),* karena semua peserta didik terikat dengan tujuan dan fungsi pendidikan nasional.

Rapat kedua, Minggu, 28 Oktober 1928, di Gedung *Oost-Java Bioscoop,* membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis.

Rapat kedua ini sungguh memberikan penekanan yang sangat kuat terhadap pentingnya pendidikan. Ada tiga hal penting yang mendapatkan prioritas, bahkan hingga kini masih relevan.

Pertama, bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Pendidikan kebangsaan sangat berarti bagi pembentukan warga negara yang baik *(good citizen),* di samping dapat mendidik dan mendorong setiap warga negara cinta

terhadap tanah airnya. Ingat, *hubbul wathon minal iimaan,* yang artinya bahwa cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. (Al-Hadits). Dengan pendidikan kebangsaan yang efektif diharapkan dapat mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan, demikian juga meminimalisir kecenderungan berpikir dan bertindak secara separatis.

Kedua, perlunya keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Setiap anak fitrahnya merupakan individu yang utuh, sehingga untuk menjamin pembentukan diri yang utuh sangat diperlukan keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, baik itu yang berkenaan dengan visi, tujuan, materi, metode, maupun kondisi lingkungan. Jika dicermati fenomenanya, substansi akademik lebih banyak diberikan di sekolah, sebaliknya bahwa substansi non akademik, baik berkenaan dengan kehidupan personal dan sosial, maupun kehidupan religius cenderung lebih banyak diberikan di rumah. Walapun pada kasus-kasus tertentu suatu sekolah unggul telah mampu mengakomodasi secara optimal aspek akademik dan non-akademik. Lepas dari itu semua, antara sekolah dan rumah perlu terus menciptakan dialog-dialog produktif untuk menjamin keseimbangan layanan pendidikan di antara keduanya. Dialog-dialog dapat dilakukan secara langsung, baik *face to face*, maupun secara tak langsung lewat media elektronik.

Ketiga, bahwa anak juga harus dididik secara demokratis. Layanan demokratis sungguh menjamin dan mendorong anak untuk berekspresi secara bebas, sehingga ide-ide kreatif dapat berkembang secara optimal. Dalam kondisi yang demikian materi pendidikan lebih didasarkan atas kebutuhan dan potensi anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kita yakin bahwa negara dan bangsa yang demokratis akan berhasil, jika sejak dini pertumbuhan dan perkembangan setiap warganya dididik secara demokratis. Demokrasi bukan sekedar wacana, melainkan sudah menjadi bagian dari kesejarahan kehidupan setiap warganya.

Selain daripada tiga hal penting tadi, sungguh disadari bahwa setiap pemuda perlu mendapatkan pendidikan yang memadai, karena dengan pendidikan yang tepat dan relevan, pemuda akan menjadi aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara di masa kini, terutama di masa-masa mendatang. Hanya pemuda-pemuda terdidik dan terlatihlah yang mampu memainkan peran secara produktif di zamannya. Walaupun ada juga orang yang berhasil tanpa melalui pendidikan yang tinggi. Hal ini bersifat kasuistik, tidak bisa digeneralisir. Akhirnya, dengan memperingati hari Sumpah Pemuda ke 80 ini, diharapkan menjadi momen kebangkitan pemuda Indonesia menuju Indonesia yang lebih maju.

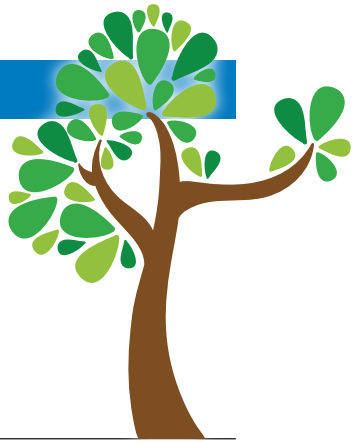

Isi-isu Pendidikan di DIY

Pengantar

Bangsa Indonesia dewasa ini dihadapkan persoalan-persoalan yang sangat kompleks. Secara eksternal, globalisasi dengan segala konsekuensinya, misalnya HAM dan demokratisasi, tidak dapat dihindarinya dari setiap kehidupan bangsa, baik untuk level individual maupun kolektif. Secara internal, krisis multidimensional yang berkepanjangan dan gerakan reformasi juga merupakan persoalan yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa yang harus disikapi.

Menyadari akan kondisi objektif tersebut, maka bangsa Indonesia untuk dapat eksis dan berkembang seiring dengan bangsa-bangsa lain maka perlu sekali membangun dirinya secara optimal, sehingga mampu menunjukkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang sanggup bersaing dalam percaturan di tengah-tengah kehidupan global, regional, nasional, maupun lokal.

Adapun salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut adalah menata, membenahi, dan mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pendidikan, karena pendidikanlah yang secara potensial memiliki kemampuan untuk memberdayakan bangsa Indonesia, sehingga kehidupannya lebih produktif.

Visi Pendidikan

Visi Pendidikan Nasional:adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Visi Dinas Pendidikan Propinsi DIY adalah menjadi katalisator menuju pemerataan pendidikan yang bermutu tinggi.

Visi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta (sebagai salah satu contoh) adalah menjadi pendorong terwujudnya kota Yogyakarta sebagai pusat pendidikan yang berkualitas dan terpecaya.

Misi Pendidikan

Untuk dapat mencapai visi tersebut, maka misinya, terdiri atas: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, (3) meningkatkan kesiapan input dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral agama, penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup, (4) meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, dan (5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun misi Dinas Pendidikan Propinsi DIY adalah (1) mewujudkan peningkatan pelayanan instansi dan sumber daya manusia dalam mendukung tugas bidang pendidikan, dan (2) mewujdukan peningkatan peran Dinas Pendidikan dalam mendorong perluasan kesempatan dan pemerataan pendidikan yang bermutu tinggi, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional, pemberdayaan lembaga pendidikan, dan pembaharuan sistem pendidikan berdasarkan prinsip desentralisasi serta otonomi pendidikan.

Demikian juga misi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta adalah meningkatkan peran instansi dalam mendorong pengembangan kualitas pendidikan dan pengajaran.

Analisis SWOT

1. Analisis SWOT pendidikan nasional

a. Kekuatan:

1) Adanya landasan hukum dasar dan organik mendukung bangkitnya kepedulian terhadap pendidikan.
2) Secara kuantitatif semakin meningkatnya ahli pendidikan di Indonesia.
3) Kesadaran akan pentingnya pendidikan semakin meluas dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
4) Secara statistik jumlah warga negara yang memiliki potensi unggul relatif cukup banyak.

b. Kelemahan:
   1) Masih minimnya kemampuan memberikan dukungan biaya pendidikan.
   2) Masih rendahnya produktivitas para ahli pendidikan baik sebagai pribadi maupun kolektif.
   3) Kemampuan majerial para birokrat pendidikan yang masih relatif rendah
   4) Daya saing setiap warga negara relatif rendah sebagai konsekuensi dari kehidupan yang sedikit tantangan.
   5) Masih terbatasnya jumlah lembaga pendidikan yang berkualitas.
c. Peluang:
   1) Masih adanya dukungan organisasi internasional terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional.
   2) Masih terbukanya kesempatan pendidikan di berbagai negara sahabat bagi warga negara Indonesia yang berpotensi.
   3) Semakin terbukanya peluang kerja di luar negeri.
   4) Semakin mudahnya informasi dapat diakses.
d. Ancaman:
   1) Semakin kuatnya daya saing bangsa lain dalam percaturan kompetisi di masyarakat.
   2) Diberlakukannya standar internasional dalam rekrutmen tenaga kerja.
   3) Semakin derasnya pengaruh budaya asing yang "kurang baik" memasuki Indonesia.
   4) Dampak negatif kemajuan ipteks yang semakin sulit diatasi dan dikendalikan.

2. Analisis SWOT pendidikan propinsi

a. Kekuatan:
   1) Tupoksi jelas, tegas dan memberi arah dalam pelaksanaan tugas.
   2) Jumlah SDM Dinas memadai dengan komposisi dan latar belakang pendidikan memadai.
   3) Jalur, jenjang dan jenis Pendidikan di DIY cukup banyak dan berada dalam lokasi relatif mudah dijangkau.
   4) Kualitas pendidikan di DIY relatif tinggi dibandingkan di daerah lain.
   5) Kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan memadai.
   6) Ada hubungan yang baik antar-Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota).
b. Kelemahan:
   1) Indikator keberhasilan kinerja aparat dinas dan pengelola pendidikan belum ada standard yang jelas termasuk penerapan *"reward and punishment"* belum berjalan.

2) Kewenangan dinas pada umumnya terbatas pada fasilitasi dan regulasi.
3) Pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan masih terbatas.
4) Koordinasi dan singkronisasi program masih belum optimal.
5) Kualitas pendidikan belum kompetitif dalam persaingan global.
6) Belum ada terobosan baru yang berpengaruh besar terhadap peningkatan mutu pendidikan.
7) Persaingan yang ketat antar lembaga pendidikan dalamk memperkokoh siswa/mahasiswa/warga belajar, di luar kontrol pemerintah/masyarakat yang berakibat dapat merugikan masyarakat.
8) Batas kewenangan Dinas dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi belum jelas.
9) Dana penyelenggaraan pendidikan terbatas.
10) Belum ada Perda tentang penyelenggaraan pendidikan DIY.

c. Peluang:
1) Kepercayaan masyarakat terhadap "Yogyakarta Kota Pendidikan" masih tinggi/
2) Lembaga-lembaga pendukung pendidikan seperti komite sekolah dan dewan pendidikan sudah terbentuk.
3) Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.
4) Biaya hidup sehari-hari relatif murah.
5) Apresiasi masyarakat DIY terhadap pendidikan cukup tinggi.
6) Sarana teknologi informasi mudah didapat.
7) Perhatian pengusaha/Kadin terhadap pendidikan cukup tinggi.

d. Ancaman
1) Pola globalisasi.
2) Persaingan antar daerah semakin ketat.
3) Merebaknya napza dan penyakit masyarakat lainnya.
4) Pengelolaan pendidikan terlalu berorientasi "bisnis"
5) Sosial ekonomi sebagian besar masyarakat relatif rendah.
6) Akulturasi budaya yang terlambat.
7) Rendahnya supremasi hukum.
8) Ada gejala menurunnya jumlah calon mahasiswa baru

3. Analisis SWOT pendidikan Kota Yogyakarta

a. Kekuatan:
1) Adanya Perda tentang Sotaker Dinas Pendidikan dan Pengajaran
2) Adanya komitmen dan aparatur Dinas dalam mengembangkan pendidikan.

b. Kelemahan:
   1) Terbatasnya tenaga ahli di bidang pendidikan
   2) Adanya sarana dan prasarana yang belum memadai.
c. Peluang:
   1) Adanya daya tarik pendidikan.
   2) Adanya sumber daya pendidikan.
d. Ancaman:
   1) Kondisi ekonomi masyarakat yang belum kondusif.
   2) Adanya kerawanan sosial masyarakat.

Isu Pendidikan

Setelah memahami visi, misi, dan analisis SWOT, maka isu-isu pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Isu pendidikan nasional:
   a. Belum meratanya kesempatan akses pendidikan
   b. Masih rendahnya mutu pendidikan pada semua jenjang.
   c. Masih banyaknya lulusan pendidikan yang belum siap memasuki kehidupan di tengah-tengah masyarakat.
   d. Masih rendah efesiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
   e. Masih rendahnya pemanfaatan ipteks dalam penyelenggaraan pendidikan.
   f. Masih terbatasnya partisipasi masyarakat, terutama bisnis dan industri terhadap penyelenggaraan pendidikan.
2. Isu pendidikan di Propinsi DIY:
   a. Kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu masih rendah, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus.
   b. Pencapaian mutu pendidikan masih belum stabil dan rendah dibandingkan dengan standar regional dan internasional, demikian pula yang terjadi pada lembaga pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
   c. Semakin banyaknya lulusan pendidikan dari semua jenjang yang belum dapat termanfaatkan oleh masyarakat, terutama anak-anak berkebutuhan khusus.
   d. Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan masih memuaskan, terutama manajemen pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus baik negeri maupun swasta.
   e. Pemanfaatan ipteks dalam proses pendidikan dan pembelajaran masih terbatas, terutama yang terjadi pada lembaga pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

f. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, terutama masyarakat bisnis dan industri bagi anak berkebutuhan khusus, walaupun partisipasi orangtua dan sejumlah ormas lebih besar daripada pemerintah.

3. Isu pendidikan di Kota Yogyakarta
   a. Terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan.
   b. Terbatasnya jumlah tenaga kependidikan yang sesuai.
   c. Terbatasnya peran serta masyarakat.
   d. Masih rendahnya efektivitas penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

Strategi pembangunan pendidikan

1. Strategi pembangunan pendidikan nasional:
   a. Pemerataan akses pendidikan yang bermutu.
   b. Efektivitas pendidikan agama untuk semua jenjang.
   c. Pengembangan Kurikulum yang mampu menyiapkan lulusan mampu menghadapi tantangan jaman.
   d. Perlunya proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
   e. Perlunya penilaian, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.
   f. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kependidikan.
   g. Peningkatan relevansi pendidikan dengan tuntutan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
   h. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
   i. Optimalisasi hasil kemajuan ipteks dalam meningkatkan mutu pendidikan.
   j. Peningkatan biaya pendidikan oleh pemerintah.
   k. Peningkatan keterlibatan orangtua dan masyarakat dalam proses pendidikan.
   l. Efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

2. Strategi pembangunan pendidikan propinsi DIY:
   a. Peningkatan akses pendidikan bermutu, terutama untuk anak usia SD dan SMP, namun bagi anak berkebutuhan khusus lebih ditekankan pada peningkatan angka partisipasinya dengan menambah ruang kelas sekolah, di samping perintisan program pendidikan terpadu dan inklusif.
   b. Pengembangan kurikulum perlu terus diupayakan untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan diri secara optimal, terutama bagi anak berkebutuhan khusus.

c. Pembelajaran perlu diciptakan lebih berkualitas dengan lebih banyak melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran.
d. Relevansi pendidikan perlu diupayakan bagi semua jenjang pendidikan, terutama peserta didik SMK dan berkebutuhan khusus perlu dibangun jaringan kerja dengan dunia industri dan bisnis, di samping persoalan pemasaran hasil karya peserta didik.
e. Peningkatan efisien dan efektivitas pengelolaan pendidikan dengan mengefektifkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara bertanggungjawab.
f. Mendorong keterlibatan orangtua dan masyarakat (baik tokoh, kelompok bisnis, industri) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bertanggungjawab yang dapat diwujudkan dalam bentuk Komite Sekolah atau Dewan Pendidikan, selain bentuk lain yang kontributif.
g. Meningkatan efektivitas kepengawasan pendidikan baik yang berkenaan dengan aspek managerial maupun akademiknya.

3. Strategi pembangunan pendidikan Kota Yogyakarta :
   a. Pemerataan mutu pendidikan pada semua jenjang baik negeri maupun swasta, terutama untuk TK sampai dengan SMP
   b. Peningkatan mutu pendidikan, di antarnya : melalui pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, pembinaan siswa, peningkatan mutu tenaga kependidikan, peningkatan prasarana-sarana, pengembangan perpustakaan, bantuan siswa yang berpotensi unggul.
   c. Peningkatan pengelolaan sekolah dan manajemen birokrasi sektor pendidikan.
   d. Peningkatan partisipasi orangtua dan masyarakat baik yang berkenaan dengan aspek akademik maupun non akademik.
   e. Peningkatan pembinaan pendidikan luar sekolah yang mampu menjadikan masyarakat yang illeterat bahasa dan ipteks.

Penutup

Demikian beberapa hal penting yang dapat dijadikan bahan diskusi dan membenahi platform Partai Keadilan Sejahtera bidang Pendidikan, semoga dapat bermanfaat *fid diini wad dun-ya wal akhirat.*

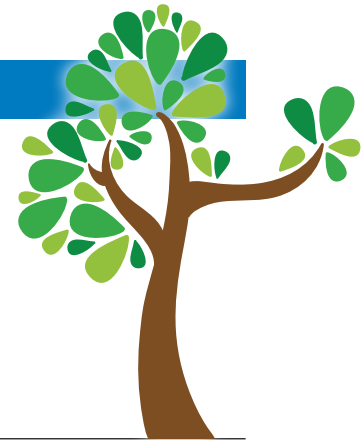

Refeleksi 66 Tahun HMI: Menuju Gerakan Intelektual Kreatif

Pengantar

Kita sadari bahwa kondisi kepemimpinan nasional kita mengalami "krisis". Kita telah melewati era reformasi kurang lebih 15 tahun, namun apa yang kita hadapi bahwa kita belum merasakan memiliki bangunan negara yang mantap. Menurut hemat kami bahwa hingga kini kita belum memiliki grand desain yang dapat kita terima, ke mana Indonesia ini akan kita bawa.

Partai politik sebagai sebagai salah satu pilar megara masih belum menunjukkan eksistensinya yang mantap, terbukti masih terjadi dinamika yang tinggi. Hal ini paling disebabkan oleh kinerja pimpinannya yang belum menunjukkan integritas yang tinggi. Tentu ini tidak bisa dilepaskan dari sistem tata negara kita yang belum mapan secara mantap.

Mengapa demikian, secara hipotetik bahwa secara internal pimpinan nasional dewasa ini setidak-tidaknya disupport oleh kelompok yang punya modal namun tidak memiliki profesionalisme di bidangnya, di samping kelompok aktivis yang tidak mapan program kaderisisasinya. Secara eksternal bahwa globalisasi dalam berbagai aspek telah mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, termasuk model demokrasi yang diterapkan (yang notabene dikatakan demokrasi murni) tidak seiring dengan demokrasi pancasila, yang lebih mengutamakan mufakat daripada pilihan langsung untuk semua hal. Dampak globalisasi lainnya yang juga tidak bisa dipisahkan adalah globalisasi bidang ekonomi dan budaya.

Globalisasi dan Kader Kita

Walaupun globalisasi itu dapat berdampak yang kurang baik bagi bangsa dan negara Indonesia, di samping memiliki dampak positif. Namun di era dewasa ini kita seharusnya juga menghadapi arus globalisasi ini sehingga kita bisa

eksis dan memberikan kontribusi bagi dunia. Ingat bahwa Globalisasi sebagai suatu keniscayaan, sehingga harus dihadapi dan tidak bisa dihindari. Mari ingat Megatrend oleh John Nisbit (tahun 1980an) telah mengingatkan kita pentingnya mengetahui tiga Era penting, Era Pertanian, Era Industri dan Era Informasi. Sebagian besar ramalan beliau dapat disaksikan dewasa ini.

Walaupun demikian kita menyadari bahwa kita tidak cukup menguasai dan memiliki informasi, namun yang jauh lebih penting adalah menguasai ide. Bagaimana dengan pengkaderan HMI selama ini, tentu saja kita telah aktif di dalamnya bahwa pengkaderan kita sudah optimal dilakukan dengan menyesuaikan dengan tantangan zaman. Namun mengapa kader-kader kita dewasa ini menghadapi masalah yang cukup serius.

Sebagai kader HMI seharusnya tidak memiliki adaptasi yang tinggi terhadap perubahan yang ada, namun pada prakteknya ternyata ada sejumlah kader yang "tergoda", sehingga kader kita menjadi "korban". Kader HMI seharusnya berhati-hati dalam menyikapi persoalan yang dihadapi oleh seniornya, tidak seharusnya bersikukuh bahwa seniornya harus dibela habis-habisan, padahal itu menyangkut kredibilitas. Untuk itu ke depan kader harsu lebih cermat dan berhati-hati. Saya sangat menggaris bawahi bahwa kader HMI adalah kader pilihan yang terus berusaha memperbaiki diri dengan berbagai upaya, termasuk juga keinginan untuk membangun Gerakan Intelektual Kreatif. Apalagi gerakan ini sejalan dengan perkembangan yang ada dewasa ini.

HMI dan Masa Depan

HMI sebagai organisasi kader, mari kita menengok salah satu karya Howard Gardner yang berjudul *"FIVE MINDS FOR THE FUTURE"* yang diterbitkan tahun 2008 oleh Harvard Business Press, Boston, Massachusetts. Buku ini menjelaskan bahwa dalam menghadapi masa depan kita perlu memiliki *five minds,* yaitu *the discipline mind, the synthesizing mind, the creating mind, the respectful mind, and the ethical mind. The discipline mind* dimaksudkan bahwa individu terdidik perlu memiliki suatu cara berpikir tertentu yang dikuatkan dengan penguasaan ilmu atau profesi tertentu. Dengan kata lain bahwa individu terdidik perlu memiliki minimal suatu keahlian tertentu yang diminati, dikuasai, dan dipegangi. Mengapa demikian, individu yang tidak memiliki *the discipline mind* tidak akan mampu meraih sukses dalam memenuhi tuntutan dunia kerja, bahkan boleh jadi akan terpinggirkan dari tempat tugas dan masyarakatnya.

The synthesizing mind dimaksudkan bahwa individu terdidik perlu menguasai informasi dari berbagai sumber yang selanjutnya dapat memahami, mengevaluasi dan mensintesanya, sehingga mendapatkan suatu rumusan yang logik dan bermakna. Individu terdidik yang tanpa memiliki *the synthesizing mind*

tidak akan mampu membuat keputusan-keputusan penting baik terkait dengan persoalan pribadi maupun profesionalnya. *The creating minds* dimaksudkan bahwa individu terdidik, yang didasarkan pada *discipline mind and synthesizing mind,* mampu menghasilkan suatu ide baru, pertanyaan yang tak familiar, penyegaran cara berpikir, dan sampai pada jawaban-jawaban yang tidak diduga. Bahkan kebaruan ide-ide itu dapat ditunjukkan dengan selangkah lebih maju dari produk terakhir dari komputer dan robot. Individu yang tanpa memiliki *the creating mind* akan diganti posisinya dengan program-program komputer dan akan digusur oleh orang-orang yang memiliki pikiran dan karya kreatif.

The respectful mind dimaksudkan bahwa kita seharusnya menyambut baik perbedaan antar indvidual manusia dan perbedaan antar kelompok manusia (perbedaan itu adalah fitrah), mencoba memahami perbedaan-perbedaan tersebut, dan berusaha bekerja sama dengan orang lain secara efektif. Dengan mengedepankan jaringan antar kita, maka kita akan menghindari dan menghilangkan rasa tidak toleran dan rasa tidak respek. Dengan demikian kehidupan damai dan harmoni bisa tercipta dengan baik, serta terhindarkan diri kita dari konflik. Individu terdidik yang tidak memiliki *the respectful mind* tidak akan dihargai dan disegani oleh orang lain, bahkan akan meracuni tempat kerja dan masyarakat.

The ethical mind dimaksudkan bahwa individu terdidik seharusnya bekerja yang mampu memenuhi di atas tujuan dan keinginannya sendiri, atau bagaimana dia dapat bekerja yang tidak hanya memenuhi keinginannya sendiri, melainkan juga untuk memenuhi hajat banyak orang. Individu yang tidak memiliki *the ethical mind* sangat potensial memperoleh kehidupan dunia yang jauh dari orang-orang bertanggungjawab. Ingat bahwa tak seorangpun yang menginginkan hidup di planet yang terpisah.

Dalam implementasinya, *five minds* dapat ditegakkan sendiri-sendiri, juga dapat diupayakan secara sinergis, sehingga individu itu tidak hanya perlu membangun suau cara berpikir sendiri, melainkan dalam waktu yang sama perlu membangun semangat respek terhadap orang lain yang memiliki cara berpikir yang berbeda. Demikian juga kemampuan berpikir dan karya kreatif tidak hanya untuk memenuhi obsesi sendiri, melainkan juga mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Ingat sabda Rasulullah saw, *"Khairunnaasi anfa'uhum linnaas",* yang artinya "Sebaik-baik dari kamu adalah yang memberikan manfaat bagi banyak orang".

Selain daripada itu, saya sangat menyadari bahwa kita kini harus menghadapi tantangan hidup di era abad 21 dan tidak bisa dihindari. Untuk sukses dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan tantangan, tidak cukup hanya dengan bermodal ijazah saja, melainkan penguasaan kecakapan tertentu yang

relevan. Daniel H. Pink (2005) melalui bukunya *A Whole New Mind,* menyatakan bahwa pada era abad 21, telah bergerak dari *Information Era ke Conceptual Era.* Artinya bahwa di Abad 21 seseorang akan berhasil hidupnya, jika dia menguasai konsep atau ide daripada hanya menguasai informasi saja. Dengan kata lain, bahwa menguasai informasi saja tidak cukup, kalau tidak menguasai konsep di balik itu. Dengan demikian kemampuan untuk mensinergikan fungsi otak kiri (berpikir sekuensial, logik, dan analitik) dan fungsi otak kanan (berpikir non-linier, intuitif, dan holistik), sangatlah diperlukan. Dengan mengoptimalkan sinergi kedua fungsi otak itu akan muncullah kemampuan kreatif yang memang menjadi kemampuan dasar untuk menghasilkan ide-ide baru yang sangat diperlukan dalam menghadapi dunia yang sangat cepat berubah.

Di samping itu untuk menghadapi realitas tantangan, ada sejumlah keterampilan tertentu yang harus dikuasai. NCREL and Metiri Group (2003) melalui tulisannya yang berjudul *"enGauge 21st century skills: Literacy in the digital Era",* menjelaskan bahwa ada empat kluster keterampilan yang harus dikuasai dalam menghadapi abad 21, yaitu:

Pertama, Digital-age Literacy yang mencakup berbagai kompetensi yang diharapkan di dunia kerja abad 21. Keterampilan itu di antaranya (1) melek kemampuan dasar *(basic literacy),* yaitu ***R****eading, w****R****iting, and a****R****ithmatics* (3 Rs), (2) melek ilmiah *(sientific literacy)*, yaitu pengetahuan umum dan memahami konsep dan proses ilmiah, (3) melek ekonomi *(economic literacy),* (4) melek teknologi *(technological literacy),* (5) melek visual *(visual literacy),* (6) melek informasi *(information literacy),* (7) melek kultural *(cultural literacy)*, dan (8) kesadaran global *(global awareness).*

Kedua, Inventing thinking. Seorang individu yang sukses perlu mengembangkan dan memelihara kecakapan hidup yang esensial sebagai berikut, yaitu (1) adaptabilitas dan mengelola kompleksitas *(adaptability and managing complexity),* kemampuan mengenal dan memahami bahwa perubahan adalah suatu yang konstan, dan untuk menghadapi perubahan secara positif adalah memodifikasi pikiran, sikap atau perilaku untuk mengakomodasi dan mengatasi lingkungan baru; (2) mengarahkan oleh diri sendiri *(self direction),* kemampuan bekerja secara mandiri, apakah berkenaan dengan mengembangkan tujuan atau rencana, mengelola waktu dan kerja, atau mengevaluasi pengetahuan atau proses belajar; (3) keingintahuan *(curiosity),* keinginan yang tinggi untuk belajar tentang sesuatu dan suatu komponen yang sangat penting untuk belajar sepanjang hidup; (4) kreativitas *(creativity);* (5) kemampuan menghadapi risiko *(risk taking);* dan (6) kemampuan berpikir tingkat tinggi *(higher-order thinking and sound reasoning).*

Ketiga, Effective communication, kemampuan untuk berkomunikasi baik dalam posisi sebagai individu maupun dalam kelompok. Adapun komunikasi efektif mencakup sebagai berikut, (1) bertim dan kolaborasi *(teaming and collaboration). Teaming* dimaksudkan sebagai situasi yang memungkinkan individu-individu melakukan *sharing* tujuan bersama, membawa kemampuan unik untuk penyelesaian pekerjaan yang akan dicapai, bekerja dalam lingkungan terstruktur, dan menunjukkan kepercayaan dan respek terhadap satu orang dan lainnya. Sementara kolaborasi dipahami sebagai interaksi yang kooperatif di antara anggota tim sebagaimana mereka bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan; (2) keterampilan interpersonal *(interpersonal skills),* keterampilan mengelola perilaku, emosi dan motivasi, untuk memelihara interaksi positif dengan individu dan kelompok lainnya. Termasuk juga kecakapan menyelesaikan konflik, di samping keterampilan menggunakan email, *teleconference dan video conference;* (3) tanggung jawab personal *(personal responsibility),* suatu tanggung jawab yang menghendaki seseorang untuk memehami adanya issu legal dan etik dikaitkan dengan teknologi dan mengelola dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab; (4) tanggung jawab sosial dan warga negara *(social and civic responsibility),* tanggung jawab ini menghendaki individu untuk memanaj dan menggunakan teknologi yang seharusnya diorientasikan untuk meningkatkan layanan publik dan melindungi masyarakat dan lingkungan; dan komunikasi interaktif *(interactive communication),* keterampilan ini menghendaki individu belajar berkomunikasi dengan menggunakan semua rentangan media dan teknologi, yang semuanya diorientasikan untuk desiminasi informasi secara bertanggungjawab.

Keempat, High productivity, individu perlu menguasai keterampilan ini untuk menjadi produktif. Keterampilan ini mencakup (1) memprioritaskan, merencanakan, dan mengelola untuk mencapai hasil *(prioritizing, planning, and managing for results),* kecakapan organisasional ini membantu individu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui menajamen waktu dan sumber daya secara efisien; (2) penggunaan yang efektif terhadap *real-world tools (effective use of real world tools),* hal ini mengendaki individu-individu menguasai teknologi mutakhir dan baru untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, untuk pemecahan masalah dan penyelesaian tugas yang efektif; dan (3) kemampuan menghasilkan produk-produk relevan dan berkualitas tinggi *(ability to produce relevant, high-quality products).* Kecakapan ini berkenaan dengan kemampuan menghasilkan produk-produk intelektual, informasional, atau material yang mampu memenuhi tujuan autentik.

Kami sangat menyadari bahwa berbagai keterampilan untuk sukses hidup di abad 21 tersebut cenderung bersifat duniawiyah, padahal kita sebagai um-

mat beragama memiliki kebutuhan dan tujuan lebih dari itu. Kita tidak hanya ingin hidup sukses dan bahagia di dunia saja, melainkan juga sukses dan bahagia di akhirat. Karena itulah, di samping seseorang itu dapat meraih kualifikasi akademik tertentu dan berbagai keterampilan untuk sukses di era abad 21, maka kita seharusnya tetap mengedepankan pentingnya religiusitas, moralitas, dan spiritualitas yang dapat dimanifestasikan dengan ketaqwaan, karena dengan ketaqwaan kita memiliki *privilage* untuk dapat meraih maqam di sisi Allah swt, sehingga dengan demikian Anda bisa memenuhi tugas utama sebagai hamba Allah yang taat dan khalifah di atas bumi yang amanah. Kami semua sebagai pendidik, hanya bisa pesan hiasilah hati, sikap, pikiran, dan perilaku Anda semua dengan nilai-nilai ketaqwaan yang disempurnakan dengan menjaga secara istiqamah untuk selalu taat dan berbuat kebaikan kepada kedua orangtua *(birrul walidain),* baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Insya Allah Anda akan meraih kebahagiaan dan ketenangan hidup di dunia hingga di akhirat kelak.

Penutup

Setelah memperhatikan uraian di atas dan perjalan HMI hingga ini, akhirnya dengan Refleksi 66 tahun HMI, diharapkan kader HMI ke depan tidak hanya menyiapkan kadernya menjadi pimpinan yang memiliki kemampuan generalis, melainkan juga kadernya dapat menjadi pimpinan di bidang keilmuan dan profesi yang dilandasi dengan nilai-nilai islami dan keindonesiaan.

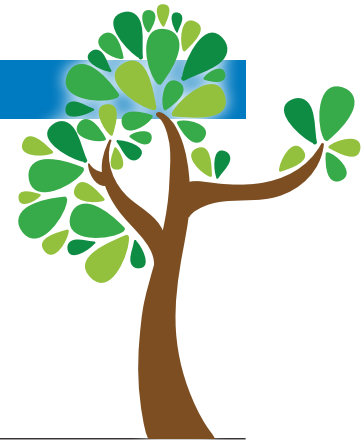

Memaknai Kebangkitan Nasional

AKHIR-AKHIR ini wacana kebangkitan nasional hampir mewarnai mass media dan forum-forum ilmiah seiring dengan keinginan untuk menghidupkan kembali spirit kebangkitan dalam mengawali abad kedua kebangkitan nasional. Spirit kebangkitan sebaiknya tidak hanya dipandang kebanggaan historis, namun seharusnya dipandang aset berharga dalam menatap hari depan yang penuh harapan. Spirit kebangkitan sungguh berarti ketika bangsa Indonesia ingin bangkit dari berbagai krisis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mendapat manfaat dalam memperingati seabad kebangkitan nasional, kiranya perlu pemaknaan kebangkitan nasional dalam beberapa perspektif, yang salah satunya adalah perspektif Islam.

*Pertama***,** kebangkitan nasional bertumpu pada moralitas bangsa (*moral human being*). Artinya bahwa bangsa Indonesia akan dan terus menjadi bermartabat, jika seluruh warga negaranya memiliki integritas moral yang tinggi, sebagaimana Rasulullah saw bersabda : *Innamaa bu'itstu li utammimaa makaarimal akhlaaq* (Al-Hadits), yang artinya : sesungguhnya saya (Rasulullah) dibangkitkan di muka bumi hanya semata-mata untuk menyempurnakan akhlaq. Mengapa akhlaq penting, dengan akhlaq antar warga bangsa dan dunia tercipta saling menghargai dan menghormati, bahkan tolong menolong, bukan sebaliknya saling merusak dan membunuh. Dalam kondisi ini tidak hanya menjamin kehidupan bahagia di dunia, melainkan juga di akhirat. Insya Allah.

Kedua, kebangkitan nasional bertumpu pada pemilikan pengetahuan *(knowledge society).* Artinya bahwa bangsa Indonesia akan dan menjadi dihargai dalam percaturan kehidupan global dan berpotensi memenangkan berbagai kompetisi terbuka, sekiranya warga negaranya berpendidikan dan berpengetahuan. Sebagaimana Allah swt tegaskan dalam satu satu ayatnya, *"yarfa'illahul ladziina aamanuu minkum walladziina uutul 'ilma darajaat..." (QS, Al-Mujaadalah*

11), yang artinya Allah swt akan mengangkat orang-orang beriman dan menuntut ilmu dalam beberapa derajat". Pemerolehan ilmu yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan diamalkan secara terus menerus sehingga bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan secara lebih meluas, insya Allah mampu mengangkat derajat hidup bagi masyarakat yang berpengetahuan. Oleh karena gerakan wajib menuntut ilmu secara fungsional perlu terus digalakkan dan ditingkatkan.

Ketiga, kebangkitan nasional bertumpu pada semangat kerja produktif. Artinya bahwa bangsa Indonesia akan dan menjadi bangsa dan masyarakat sejahtera, sekiranya warga negaranya memiliki etos kerja yang tinggi. Ingat penegasan Allah swt lewat firmannya, *...faidzaa qudliyatish sholaati, fantasyiruu fil ardli wabtaghuu min fadhlillaahi wadzkurullaaha katsiiran la'allakum tuflihuun' (Q.S. Al Jumu'ah, 10)*. Artinya ...Lalu apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah sebagian dari karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." Ayat ini mengisyaratkan bahwa tugas dalam kehidupan bukan hanya beribadah saja, melainkan mencari bekal untuk ibadah melalui bekerja yang sungguh-sungguh dengan etos kerja yang tinggi, bukan semata-mata untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya, melainkan juga harta yang halal dan baik (thayyib).

Keempat, kebangkitan nasional bertumpu pada semangat persaudaraan. Artinya bahwa bangsa Indonesia akan dan menjadi bangsa dan masyarakat bersatu dan kuat, apabila masyarakat dan bangsa Indonesia menjunjung tinggi persaudaraan sesama Islam (*ukhuwah islamiyyah),* persaudaraan sesama warga bangsa *(ukhuwah wathaniyyah)* dan persaudaraan sesama manusia *(ukhuwah basyariyyah)*. Sebaliknya jika kita terus membiarkan konflik berkepanjangan baik yang terjadi dalam dan antar agama, daerah, suku, dan lainnya, maka semuanya akan menghambat kebangkitan bangsa, bahkan bisa bercerai berai (na'udzubillah). Rasulullah bersabda *"Al jamaa'atu rahmatun walfurqatu 'adzaabun (Al Hadits)*, yang artinya "Bersatu itu rahmat dan bercerai adalah siksa". Ada kecenderungan fenomena konflik terjadi terutama disebabkan oleh kepentingan sendiri atau kelompok tanpa mempedulikan pihak lain, padahal semua insan yang lahir di muka bumi tercipta dalam keunikan, sehingga diperlukan saling respek di antara kita.

Untuk menciptakan keempat kondisi tersebut di atas tidaklah mudah, karena diperlukan jiwa besar dan semangat kebersamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Setiap warga bangsa perlu *fastabiqul khairaat*, berlomba-lomba berbuat kebajikan, bukan kebatilan dengan selalu mengharapkan ridla Allah swt. Dengan demikian bangsa Indonesia ke depan diharapkan memiliki kehidupan yang penuh rasa kedamaian, bukan peperangan dan pertengkaran; yang me-

nyejahterakan, bukan yang menyengsarakan; yang mencerahkan, bukan yang meredupkan; yang menyenangkan, bukan yang menyusahkan; yang optimis, bukan pesimis dan apatis; dan yang dinamis, bukan yang statis, sehingga seiring dengan tuntutan zaman tanpa mengorbankan jati diri sebagai individu dan bangsa. Semoga kita, tanpa terkecuali, bisa menjadi bagian penting walau sekecil apapun peran yang dapat dimainkan, dalam mengantarkan kebangkitan bangsa Indonesia ke depan. Amiin....

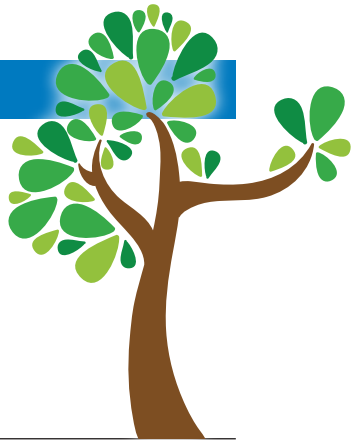

Menghargai Perjuangan Pahlawan

HARI Pahlawan pada dasarnya ditetapkan untuk mengenang pecahnya perlawanan bangsa Indonesia terhadap kehadiran sekutu yang ingin menguasai kembali Indonesia dari tangan Jepang yang terjadi di Hotel Tunjungan, Surabaya pada tanggal 10 November 1945 pukul 06.00. Kendatipun para sekutu yang terdiri atas Inggris, Belanda dan Amerika Serikat menggunakan senjata sangat canggih, namun bangsa Indonesia yang mendapatkan pertolongan dari Allah swt dan bermodal sejumlah kecil senjata yang diperoleh melalui rampasan dari Jepang ditambah dengan senjata bambu runcing, sanggup menghadapi perlawanan itu dengan hasil yang gemilang. Kendatipun di balik itu kita merasa duka yang mendalam, karena banyak pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi kurban tidak bisa dihindari.

Perlu disadari bahwa pecahnya pertempuran itu dimotivasi oleh semangat pahlawan, terutama untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang beberapa bulan sebelumnya baru saja diproklamirkan, di samping untuk menjamin kesatuan dan persatuan bangsa. Jasa para pahlawan yang sangat luar biasa sepatutnya mendapat penghargaan yang layak, sebagai tanda rekognisi atas pengorbanan jiwa dan raganya untuk Indonesia, karena hal ini sering kali terabaikan.

Di samping memberikan apresiasi, bangsa Indonesia sangat perlu untuk mengambil pelajaran dari peristiwa itu, yang di antaranya yaitu kemerdekaan merupakan hak bangsa dan individu yang harus diperjuangkan secara optimal, kesatuan dan persatuan merupakan modal utama untuk melawan sekutu yang bersenjata lengkap, dan kesadaran akan kekuatan dari Allah swt merupakan modal spirit yang kuat dalam menghadapi kekejaman penjajah.

Atas dasar itulah, maka untuk memperingati hari pahlawan, kita bangsa Indonesia merasa bertanggungjawab untuk (1) mengisi kemerdekaan dengan

berkarya yang berkualitas sebanyak-banyaknya sebagai tanda syukur kepada-Nya akan keahlian, kekuasaan, kekayaan, dan kebebasan yang dimiliki, (2) menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan perkasa yang didukung dengan rasa respek terhadap sesama, rasa toleran dan empati antar sesama, serta kemampuan resolusi konflik baik secara internal maupun eksternal, dan (3) selalu mengkondisikan umat manusia Indonesia untuk memiliki kesadaran transendental, memiliki ketaatan terhadap Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kekuatan yang tak terkalahkan.

Sungguh disayangkan bahwa kemerdekaan Indonesia yang telah mencapai 63 tahun, ternyata masih banyak warga Indonesia yang belum memperoleh manfaat dari kemerdekaan, walaupun kekayaan alam dan isinya tidak ternilai harganya. Akibatnya hidup mereka masih terus diselimuti oleh kemiskinan, kesengsaraan, kebodohan, dan kebobrokan moral. Dalam menyikapi hari pahlawan, kita bangsa Indonesia seharusnya secara personal atau kolektif berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana yang terungkap oleh para pejuang, "Jangan pernah tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi apa yang kau berikan pada negara".

Dalam perspektif pendidikan, untuk mewujudkan maksud tersebut, maka salah satu strategi yang paling efektif adalah mendorong guru sebagai "pahlawan" kehidupan untuk bekerja secara profesional dalam rangka mempersiapkan anak didik untuk siap menghadapi tantangan hidup pada zamannya. Karena itu, nama guru akan tetap menjadi harum, ketika pada saat tugas profesionalnya, guru membekali peserta didiknya dengan wawasan pengetahuan yang seluas-luasnya, kecakapan hidup yang relevan, dan bimbingan perilaku akhlaq mulia yang sangat diperlukan peserta didik, baik untuk hidup sebagai pribadi, anggota keluarga, warga sekolah, warga masyarakat, maupun personil di tempat kerjanya.

Akhirnya, agar Allah swt tidak sia-sia menjadikan kita, maka kita seharusnya mampu dan mau menghargai jasa para pahlawan, serta mau menjadikan kita sendiri sebagai "pahlawan" sesuai dengan bidang yang kita geluti sebagai wujud tugas kekhalifahan untuk menjadi model dan contoh bagi orang lain, sehingga mampu memberikan manfaat bagi banyak orang. Ingat kata hikmah, "*al-'ilmu bilaa 'amalin kasy-syajari bilaa tsamarin*", yang artinya: ilmu tanpa diamalkan, laksana pohon yang tiada berbuah. Karena itu, untuk jadi pahlawan sekarang adalah berjuang dan bekerja secara profesional untuk memberikan yang terbaik bagi keselamatan, kebaikan, dan kesejahteraan ummat. Semoga!

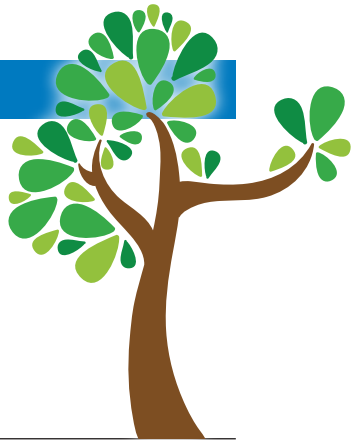

HUT RI ke-65: Masyarakat Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan

DALAM menyambut HUT Republik Indonesia ke-46 dengan tema Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, kita Sukseskan Reformasi Gelombang Kedua untuk Terwujudnya Kehidupan Berbangsa yang Makin Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Tema ini memiliki makna yang sangat berarti, karena memberikan spirit bagi kehidupan bangsa Indonesia yang lebih sehat, optimis, dan manusiawi.

Dengan memperingati HUT ke-46 ini, kita berharap mulai ada perubahan besar untuk menyempurnakan perubahan yang terjadi sejak 1998. Selama 12 tahun sudah terjadi pergeseran pusat kekayaan dan harta, dari sejumlah kecil orang, sekarang sudah menyebar ke lebih banyak orang; terjadi pergeseran hak politik perwakilan menjadi hak politik langsung; dan perlakuan hukum yang semula hanya terkonsentrasi pada rakyat biasa, sekarang perlakuan hukum sudah menjangkau ke para penguasa. Perubahan yang terjadi dewasa ini pada hakekatnya sudah ada, namun masih jauh dari yang kita harapkan. Karena itu dirasakan perlu dan mendesak untuk melakukan perubahan yang sangat signifikan, sehingga dapat mengantarkan bangsa yang lebih baik, damai, dan bermartabat.

Pertama, untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan, perlu sekali adanya pengendalian terhadap bisnis pengusaha besar, sehingga bisa di-*sharing*-kan dengan pengusaha menengah, demikian juga pengusaha menengah perlu didorong dapat meningkatkan *sharing*-nya dengan pengusaha kecil dengan terus mengupayakan peningkatan kuantitas dan pemberdayaan pengusaha kecil, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran secara berarti. Penertiban pajak terus dilakukan dengan pengelolaan yang lebih kredibel dan akuntabel, sehingga hasil pajak dapat berarti bagi pemberian subsidi bagi rakyat kecil. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjangkau

kepada semua. Sejalan dengan upaya ini, kiranya zakat, shadaqah dan infaq di tengah-tengah masyarakat perlu terus digalakkan dengan pengeLolaan yang profesional dan amanah, sehingga dapat memperkecil angka warga yang fakir, miskin, dan *dhaif*.

Kesejahteraan yang bersifat non-material juga sangat penting untuk mendapatkan perhatian. Dengan adanya pengaruh materialisme, kapitalisme, dan pragmatisme, kita tidak bisa membiarkan seluruh bangsa Indonesia menjadi korbannya. Karenanya seluruh institusi agama, tokoh dan ummatnya didorong untuk terus melakukan pembinaan terhadap ummatnya, sehingga kehidupan bangsa Indonesia lebih tenang dan damai. Dengan penguasaan ilmu agama dan pengamalannya yang terus terjaga, diharapkan dapat memperkecil terjadinya konflik sosial dan kehidupan yang saling respek dan toleran, sehingga kesejahteraan lahir batin dapat dirasakan oleh semua.

*Kedua***,** untuk menciptakan kehidupan yang lebih demokratis, kita perlu semangat demokrasi yang seharusnya kita bangun dan tegakkan dalam reformasi kedua. Demokrasi seharusnya menyangkut semua aspek kehidupan, setidaknya demokrasi bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Demokrasi politik yang selama reformasi pertama nampak belum ideal, karena masih belum mengindahkan konteksnya. Hal ini berakibat terhadap biaya sosial yang sangat tinggi. Menurut hemat saya, demokrasi politik baru dapat berjalan dengan efektif, jika semua warganya terdidik. Jika semua masyarakat Indonesia belum memiliki pendidikan minimal, maka wacana untuk pemilihan kepala daerah melalui perwakilan perlu dipertimbangkan.

Demokrasi ekonomi yang selama ini berjalan masih belum ideal, karena masih dijumpai monopoli ekonomi oleh kelompok penggiat ekonomi elite. Kelompok-kelompok itu tidak jarang mendapat *previlage* dan kemudahan yang tidak selalu dimiliki oleh kelompok lain. Karena itu perlu didorong implementasi program pembangunan di awal tahun, sehingga memberikan kelonggaran bagi semua pelaku pembangunan untuk bisa mengikuti pelelangan dan tanpa ada kesulitan yang berarti bagi kontraktor non-BUMN. Demikian juga perlu terus dilakukan pengendalian pendirian mall yang merasuk ke kota-kota kecil dan mini supermaket yang menjangkau ke desa-desa, sehingga pengusaha kelas menengah dan kecil terlindungi.

Demokrasi pendidikan yang selama ini berlangsung juga belum optimal, karena masih banyak orang yang kurang beruntung belum mendapatkan kesempatan pendidikan yang tepat dan sesuai. Hal ini disebabkan oleh penyediaan dana operasional pendidikan dari pemerintah yang masih jauh dari mencukupi, karena gaji guru masuk dalam minimal 20% dari APBD dan APBN. Untuk menjamin demokrasi pendidikan, kiranya perlu dilakukan tinjauan ulang ter-

hadap Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-V/2007 yang menguji Pasal 49 ayat (1) UU No.20/2003 tentang Sisdiknas memutuskan bahwa "Dana pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD". Rumusan ini dinilai lebih relevan dengan apa yang terkandung dalam UUD 1945, bahwa pendidik merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional. Konsekuensinya bahwa gaji pendidik harus dikeluarkan dari rumusan ayat tersebut, sehingga gaji pendidik (yang di dalamnya guru dan dosen) termasuk dalam alokasi dana pendidikan. Jika ini dibiarkan, maka tidaklah mungkin demokrasi pendidikan dapat direalisasikan secara optimal. Boleh jadi demokrasi pendidikan mengalami stuck.

Demokrasi sosial juga belum dapat dirasakan secara merata, karena masih terjadi hambatan komunikasi antar status sosial ekonomi di sejumlah tempat, terlebih-lebih di daerah perkotaan, perumahan elite, dan apartemen. Bahkan masih dijumpai juga sejumlah kasus konflik di beberapa tempat karena perbedaan kelompok, suku, golongan dan agama. Ke depan perlu terus digalang menjunjung tinggi menghargai spirit Bhinneka Tunggal Ika, dengan mengembangkan dan mengawal terus sikap toleran dan respek antar individu dan keompok yang ditopang dengan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan kemanusiaan.

Ketiga, untuk menciptakan bangsa yang makin berkeadilan, maka perlu dikawal penegakan hukum secara bertanggungjawab. Tiga pilar hukum harus benar-benar trusted dan kredibel. Indikator paling utama pada seorang pempinan kemampuan menegakkan rasa keadilan.

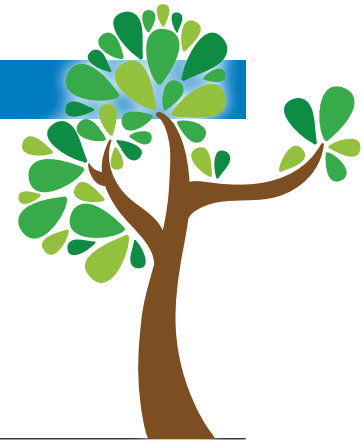

Partisipasi Masyarakat dalam Otonomi Pendidikan

Pendahuluan

Dunia telah mengalami perubahan yang sangat berarti, terlebih dengan dideklarasikannya globalisasi yang menempatkan demokrasi menjadi acuan utama dalam membangun suatu bangsa dan negara. Miftah Thoha (2000) menegaskan bahwa dewasa ini di Indonesia telah terjadi perubahan paradigma manajemen pemerintahan, yaitu: 1) dari orientasi manajemen pemerintahan yang sarwa negara menjadi berorientasi pasar, 2) dari orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian menjadi berorientasi demokrasi, 3) dari sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi kekuasaan, dan 4) dari sistem pemerintahan yang membatasi pada batas-batas dan aturan-aturan yang mengikat negara yang jelas menjadi tatanan pemerintahan yang cenderung *boundaryless organization*.

Dengan memperhatikan paradigma baru, maka demokrasi dan desentralisasi merupakan unsur yang sangat penting dan strategis diperhitungkan dalam membangun suatu negara yang berdaulat. Tentu saja manajemen pemerintahan ini berlaku juga bagi manajemen pendidikan nasional. Oleh karena itu agar pendidikan nasional di masa depan meraih keberhasilan sebagaimana yang menjadi harapan bangsa, upaya *repositioning* manajemen pendidikan perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Alhasil bahwa otonomi pendidikan merupakan suatu keharusan (*conditio sine qua none*).

Otonomi pendidikan secara sadar atau tidak mendorong semua pihak di daerah lebih mampu menunjukkan keterlibatannya dalam membangun pendidikan daerah, guna dapat mengantarkan anak bangsa mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya mampu mengangkat derajatnya sendiri, melainkan juga mampu bersaing melalui kinerjanya sehingga dapat menghadapi tantangan global.

Otonomi Pendidikan dalam Paradigma Baru

Selama ini sebagian kewenangan manajemen pendidikan nasional, terutama dalam pembuatan keputusan dipegang birokrasi pusat, sehingga birokrasi daerah lebih banyak bersifat reaktif, pasif, kurang inisiatif, dan sampai-sampai tidak berdaya, karena birokrasi daerah termasuk institusi pendidikan lebih banyak menjadi pelaksana apa yang menjadi keputusan pusat dalam banyak hal.

Setelah dideklarasikannya UU. No.22 dan 25 tahun 1999 dan PP No. 25 tahun 2000, maka sebagian besar kewenangan manajemen pendidikan lebih banyak didelegasikan kepada pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan nasional yang ada di daerah, terutama pendidikan persekolahan dari tingkat pra-sekolah hingga pendidikan menengah. Walaupun demikian kebijakan nasional, mulai dari perumusan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi tetap di tangan pemerintahan pusat.

Adapun kebijakan pendidikan tingkat daerah, mulai dari perumusan, pelaksanaan, dan monitoring sepenuhnya ada di tangan pemerintah daerah tanpa ada campur tangan yang berarti. Dalam situasi inilah otonomi manajemen pendidikan benar-benar ada di tangan pemerintah daerah. Daerah tidak lagi pasif dan reaktif, melainkan lebih aktif, pro-aktif dan kreatif dalam pengelolaan pendidikan di daerahnya.

Otonomi pendidikan harus menjadi kebutuhan, bukan lagi beban, sehingga segala konsekuensi otonomi pendidikan harus disikapi dengan semangat kerja keras dan bersama, karena berbagai persoalan pendidikan di daerah, baik yang berkenaan dengan kebutuhan pengembangan SDM dan persoalannya, sampai dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah, pemerintah dan masyarakat daerah lah yang mengenal dan memahaminya. Dengan demikian efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan serta relevansi jenis dan program pendidikan dapat terus ditingkatkan.

Selanjutnya perlu disadari kebijakan otonomi pendidikan tidaklah dimaksudkan untuk membebani pemerintah dan masyarakat daerah, melainkan secara konseptual didasarkan pada pertimbangan yang lebih menguntungkan. Hannaway and Carnoy (1993) menegaskan bahwa sentralisasi pendidikan memungkinkan adanya biaya yang tinggi dalam pembuatan kebijakan yang kadang-kadang tidak relevan dengan kemampuan daerah yang relatif heterogin. Di samping yang tidak kalah pentingnya, sentralisasi manajemen pendidikan dapat mengurangi akuntabilitas sekolah terhadap kostamernya. Dan sebaliknya dengan desentralisasi manajemen pendidikan diharapkan dapat memperbaiki kinerja birokrasi daerah dan sekolah, karena mereka terberdayakan, sehingga terjadi perbaikan, baik pengelolaan maupun akuntabilitasnya.

Mengapa Partisipasi Masyarakat

Selama ini partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional memang sudah nampak berarti, baik dukungan finansial maupun non-finansialnya (akademik, moral, dan sebagainya), baik melalui pendirian lembaga pendidikan formal dan non-formal maupun lembaga lain yang mendukung proses pendidikan nasional. Namun dirasakan sekali, bahwa dalam batas tertentu masyarakat masih relatif terbatas dukungannya. Hal ini terlihat pada kurangnya partisipasi orangtua yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah negeri, bila dibandingkan dengan orangtua yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah swasta.

Demikian pula masih minimnya partisipasi lembaga industri dan bisnis terhadap keberlangsungan praktek pendidikan nasioal baik yang ada di daerahnya sendiri, maupun daerah lain. Demikian pula kontrol masyarakat yang masih rendah terhadap berbagai hal yang mengkontaminasi nilai-nilai budaya bangsa yang berkembang di masyarakat, yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya penggunaan narkoba dan peredaran VCD terlarang, misalnya.

Untuk dapat lebih dipertanggungjawabkan pelaksanaan pendidikan nasional di daerah, sehingga hasil pendidikan itu benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. maka partisipasi masyarakat merupakan suatu kebutuhan, di samping menjadi kewajiban. Sebagaimana yang dinyatakan dalam UUPPN No.2/1989 bahwa pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

Pada dasarnya Wolf, Kane, and Strickland (1997) menegaskan partisipasi masyarakat memiliki sejumlah lima kekuatan, seperti : 1) efektivitas proyek meningkat, penggunaan pengetahuan, keterampilan dan sumber dapat memperbaiki desain dan implementasi proyek, 2) efisiensi proyek membaik, keterlibatan masyarakat dapat mengarahkan penggunaan sumber eksternal dan lokal yang lebih baik, misalnya material dan tenaga kerja, 3) kepercayaan diri dan pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat dapat membantu mengurangi mentalitas ketergantungan, 4) mencakup anggota masyarakat lebih luas, keterlibatan masyarakat dapat menghasilkan distribusi keuntungan yang lebih merata bagi orang-orang yang terabaikan, misalnya orang miskin, perempuan, minoritas, tak berdaya, dan sebagainya, dan kesinambungan proyek lebih terjamin, keterlibatan masyarakat dapat membantu untuk menjamin bahwa proyek melanjutkan fungsi secara benar.

Partisipasi masyarakat sebenarnya tidak hanya dapat memperlancar pelaksanaan pendidikan, melainkan juga mampu meningkatkan kualitas pendidikannya. White dan Barber (1997) menegaskan bahwa *hubungan dan kerjasama yang suportif antara keluarga dan masyarakat memiliki efek yang positif*. Hal ini

didukung penelitian Mortimore dkk (1988) terhadap siswa SLTP bahwa *ditemukan keuntungan yang positif di mana orangtua membantu di dalam kelas dan ketika study-tour, ada pertemuan tentang kemajuan anak secara rutin, ada sebuah ruang untuk orangtua di sekolah, dan ada suatu kebijakan pintu terbuka yang memungkinkan orangtua dapat hadir di sekolah kapan saja untuk urusan anaknya.*

Masyarakat yang sehat tidaklah mungkin hanya membiarkan pendidikan itu berlangsung apa adanya, karena mereka akan menghadapi risiko yang boleh jadi sangat merugikan. Untuk mencapai masyarakat yang lebih maju, maka masyarakat perlu peduli dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pendidikan dapat di wilayahnya. Masyarakat perlu merasa bertanggungjawab akan keberadaan pendidikan di wilayahnya, walupun didasari sepenuhnya bahwa pendidikan dasar boleh diklaim sebagai *public-goods* (artinya bahwa utamanya menjadi tanggung jawab pemerintah).

Wujud Partisipasi Masyarakat dalam Otonomi Pendidikan

Mengingat strategisnya partisipasi masyarakat dalam otonomi pendidikan, maka partisipasi masyarakat harus diwujudkan dalam berbagai bentuk:

Pertama, *partisipasi finansial* yang diwujudkan berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat, baik itu yang sifatnya donatur tetap maupun tidak tetap, ketika dibutuhkan uluran dana yang dikaitkan dengan tuntutan mendesak. Termasuk juga orangtua secara kolektif dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah, yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan misi pendidikan secara menyeluruh. Selain daripada itu, lembaga bisnis dan industri diharapkan dapat menyisihkan anggaran untuk pemberian beasiswa atau dukungan biaya operasional pendidikan.

Kedua, *partisipasi material* yang diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan, guna untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat untuk kegiatan belajar. Demikian juga masyarakat dimungkinkan dapat mendukung adanya fasilitas umum yang dapat digunakan dalam batas tertentu untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Sebaliknya masyarakat perlu mendukung terciptanya lingkungan fisik yang kondusif, sehingga tempat-tempat pendidikan dan latihan dapat terhindar sejauh-jauhnya dari polusi udara, suara, air, tanah, dan sebagainya. Lingkungan sehat yang diciptakan masyarakat akan memberikan dukungan yang berarti bagi keberlangsungan proses pendidikan.

Ketiga, partisipasi akademik yang ditunjukkan dengan kepedulian masyarakat yang dikaitkan dengan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Dukungan dapat diwujudkan dengan dukungan orangtua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak

yang berlangsung di luar sekolah. Demikian pula dapat dimungkinkan beberapa orangtua yang memiliki keahlian tertentu dapat menjadi orang sumber *(resource persons)* yang mampu memperbaiki kualitas pendidikan. Selain itu, tempat-tempat industri dan bisnis dapat memberikan sharing pengalaman dan kompetensinya melalui pemberian kesempatan untuk magang, praktek lapangan.

Masyarakat juga terbuka untuk melakukan kontrol terhadap proses pendidikan yang berlangsung, dikaitkan dengan tanggung jawab profesional tenaga kependidikan. Bila dijumpai guru dan ahli kependidikan lainnya kurang *committed* dengan tanggungjawabnya, maka masyarakat memiliki hak untuk mengajukan sejumlah rekomendasi kepada DPR dan pemerintah daerah (dinas), guna meminta pertanggungjawaban mereka.

Keempat, partisipasi kultural yang diwujudkan dengan perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang mampu menjaga martabat masyarakat setempat, sehingga masyarakat perlu ikut serta menjadi filter terhadap masuknya peradaban yang tidak sejalan dengan kultur dan nilai yang diyakini oleh masyarakat. Praktek perilaku yang dikehendaki tumbuh subur di sekolah, harus didukung dengan perilaku dan tradisi yag baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Kelima, partisipasi evaluatif, yang diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan.

Keenam, partisipasi mediatif, yang diwujudkan dengan membangun network dengan institusi birokrasi dan institusi pendidikan, sehingga dapat memudahkan peserta pendidikan mengakses informasi yang ada di masyarakat tanpa melalui prosedur birokrasi yang berbelit-belit.

Hambatan dalam Partisipasi Masyarakat

Wolf, Kane, dan Strickland (1997) menyatakan bahwa pada dasarnya ada beberapa potensi masalah yag dijumpai dalam partisipasi masyarakat:

Pertama, Orang - baik pembuat keputusan maupun masyarakat lokal - perlu untuk dididik kembali, sehingga dapat bekerja dalam model partisipatori. Struktur mungkin harus diubah menjadi lebih fleksibel, di samping situasi proses kegiatan yang baru sangatlah dikehendaki.

Kedua, partisipasi dapat melibatkan lebih banyak waktu, usaha, dan biaya daripada pendekatan konvensional *(top-down).* Misalnya ketika kita ingin menyelesiakan suatu masalah, maka harus melibatkan banyak orang dan butuh waktu yang lebih banyak juga, guna menjamin keterlibatan semua pihak yang terkait, untuk tetap dijamin partisipasi.

Ketiga, upaya lokal yang berserakan dan tidak terfokus hanya dapat memecahkan masalah jangka pendek, dan yang dapat dilihat selintas.

Keempat, keterbatasan informasi pada masyarakat kurang mendukung dalam berpartisipasi yang lebih aktif dalam proses kegiatan.

Strategi Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Untuk dapat mengefektifkan partisipasi masyarakat dalam otonomi pendidikan, maka dapat dilakukan berbagai upaya:

*Pertama***,** partisipasi masyarakat perlu didorong sampai pada partisipasi dalam pembuatan keputusan, baik yang berkenaan dengan pembuatan kebijakan dan program pendidikan di daerah dan sekolah, menyeleksi bahan dan materi pendidikan, substansi yang harus diajarkan, perencanaan anggaran dan monitoring belanja untuk kegiatan pendidikan, dan menseleksi personil di lingkungan institusi dan birokrasi pendidikan.

*Kedua***,** masyarakat *sharing*tanggung jawabnya dalam menciptakan iklim masyarakat dan sekolah yang lebih kondusif bagi terselenggaranya proses pendidikan, misalnya perwakilan masyarakat dapat menjadi tenaga voluntir dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pendidikan, organisasi masyarakat menerima dengan terbuka seluruh staf pendidikan siswa yang mengunjungi fasilitas yang dimiliki masyarakat, dan sebagainya.

Ketiga, masyarakat perlu terus melakukan pemantauan dan evaluasi kritis terhadap penyelenggaraan pendidikan, dengan tetap memberikan dukungan yang berarti melalui umpan balik yang konstruktif bagi perbaikan layanan pendidikan di wilayahnya.

*Keempat***,** masyarakat perlu terus mengupayakan dalam mengurangi alineasi sekolah dari masyarakat, karena pada dasarnya sekolah merupakan bagian daripada masyarakat. Kondisi yang demikian diyakini akan meningkatkan prestasi pendidikan peserta didik (Mohrman, Wohlstetter and Associates, 1994).

*Kelima***,** perlu adanya fleksibilitas yang berkenaan dengan struktur birokrasi, budgeting, lintas sektor, disain, perencanaan dan implementasi.

*Keenam***,** memberikan kepercayaan dan investasi bagi masyarakat lokal dengan memperkuat institusi lokal, membangun di atas fondasi lokal, dan sharing informasi.

Kesimpulan

Akhirnya dapatlah disadari bahwa partisipasi masyarakat bagi keberhasilan otonomi pendidikan menduduki posisi yang strategis, karena masyarakat pada dasarnya merupakan stakeholders pendidikan yang paling utama. Dengan demikian sangatlah tepat, jika masyarakat mendapatkan kesempatan yang seluas-

luasnya dalam pengambilan keputusan untuk berbagai persoalan yang penting dalam proses pendidikan. Atas dasar pengertian ini, maka otonomi pendidikan pada dasarnya memungkinkan terciptanya keyakinan bahwa pendidikan itu dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Mudah-mudahan bahan ini dapat memberikan urunan yang berarti baik dalam menghidupkan diskusi maupun untuk kepentingan pengembangan otonomi pendidikan yang sebentar lagi kita hadapi.

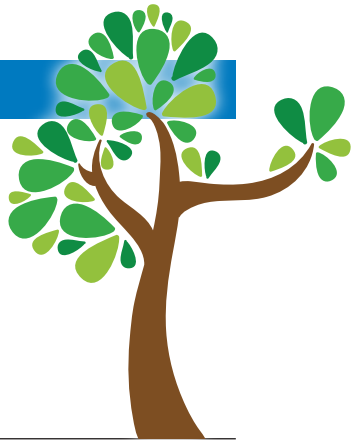

Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pesantren dalam Menghadapi Tantangan Global

Pengantar

Era Global dewasa ini sudah menjadi keniscayaan, apalagi globalisasi merupakan fitrah. Apakah terkait dengan kesadaran kita untuk saling menolong antara suku dan bangsa, ataupun kehadiran kita untuk rahmatan lil'aalamiin.

Isu Globalisiasi yang mencuat dewasa yang terawali dengan aspek ilmu pengetahuan, kini menjangkau ke seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Globalisasi memungkinkan tiadanya batas antar negara, komunikasi terbuka, dan budaya global menjangkau ke semua sudut dunia.

Untuk dapat survive, perlu kehadiran insan yang berkualitas untuk memenangkan persaingan terbuka dan menghadapi pengaruh budaya yang terbuka.

Pendidikan pesantren, sebagai salah satu sistem pendidikan nasional tidak bisa lepas dari tanggungjawabnya untuk menyiapkan lulusannya untuk mampu menghadapi tantangan global.

Pendidikan pesantren selama ini tampil sangat beragam, mulai yang lebih berorientasi kepada konservatisme sampai yang berorientasi kepada progresivisme atau pragmatisme bahkan idealisme. Kita harapkan ke depan pendidikan pesantren dengan paradigma baru mampu menghasilkan santri yang siap menghadapi tantangan jaman, termasuk tantangan zaman di era global dewasa ini.

Tantangn Global

Globalisasi:

a. Ekonomi dan bidang proses perdagangan

   Ekonomi negara maju memiliki akses dan transportasi lebih terbuka untuk melakukan investasi, akibatnya negara yang berkembang dirugikan lebih banyak, tidak hanya timbul kesenjangan, tapi juga kerusakan lingkungan,

dan pengangguran (industri yang efisien). Negara-negara berkembang tetap miskin kecuali Cina dan India.

b. Kesehatan dan pendidikan
Kesehatan dan pendidikan meningkat akibat globalisasi. Kemajuan teknologi kesehatan dan lainnya memungkinkan migrasi orang-orang dari negeri maju yang membawa penyakit ke negara berkembang. Sebaliknya Para ahli yang ada di negara berkembang pada lari ke negara lain, akibatnya negara berkembang didominasi oleh tenaga-tenaga yang kurang terampil. Akibatnya negara berkembang bisa dikuasai oleh negara-negara maju. Kondisi ini sangat membahayakan.

c. Budaya
Bangsa-bangsa berkembang memiliki kemudahan untuk mengakses budaya asing dan barat, lama kelamaan terjadi imitasi, yang akibatnya bangsa-bangsa di negara berkembang dapat melupakan identitasnya sendiri, tradisi, dan budaya sendiri.

Gerakan globalisasi menghasilkan dampak positif dan negatif, di antaranya:

1) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (teknologi informasi dan komunikasi).
2) Jejaring global antar bangsa.
3) Menguatnya persoalan multikultural
4) Kerusakan lingkungan
5) Sikap hidup individualistik
6) Gaya hidup kebarat-baratan.
7) Kehidupan yang materialistik dan kapitalistik, bahkan hedonistik.

Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pesantren

a. Tantangan Pesantren:

1) Bersifat internal
   (1) Tarik menarik antara manajemen personal dan institusional.
   (2) Pergantian generasi
   (3) Resistensi terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat dan negara.
   (4) Manajemen pendidikan pesantren yang variatif.
2) Bersifat eksternal
   (1) Perkembangan ipteks
   (2) Pengaruh ideologi, perilaku asosial
   (3) Masuknya informasi sarat budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai

b. Dinamika pesantren dari waktu ke waktu

(1) Pesantren era pra kemerdekaan

Pada era ini pesantren didirikan cenderung untuk tafaquh fiddiin dan untuk perjuangan kemerdekaan, jihad fi sabilillah melawan orangg-orang kafir yang kolonial. Mereka tidak hanya menjajah secara politis, melainkan menjajah kehidupan spiritual dan keimanan warga negara Indonesia.

(2) Pesantren pasca kemerdekaan era orde lama dan orde baru

Di era ini pesantren didirikan untuk pendalaman agama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab persoalan ummat baik terkait dengan aspek-aspek agama maupun aspek-aspek kehidupan lainnya, misalnya ekonomi, sosial, politik, ipteks, sehingga sistem pendidikan moderen berangsur-angsur masuk ke pesantren untuk meme nuhi hajat hidup ummat Islam menuju insan kamil.

(3) Pesantren di era pasca reformasi dan era digital

Di era ini pesantren mulai menerapkan demokrasi pendidikan dan e-learning, serta tegaknya pendidikan karakter. Karena itu sistem pendidikannya perlu menekankan pendidikan integratif, pendidikan komprehensif, dan pendidikan holistik.

Demikian juga pendidikan pesantren dewasa ini tidak hanya bersifat konvensional, dengan cara face to face, melainkan sistem delivery-nya dapat dilakukan secara digital atau online. Walau kita mengetahui kedua sistem itu miliki plus dan minusnya. Karena itu apapun pilihan sistem delivery-nya, kita bisa maksimalkan aspek positifnya dan minimalkan aspek negatifnya, untuk mencapai efektivitas dan efsiensinya.

c. Arah pendidikan pesantren

1) Pendidikan Pesantren bersifat reaktif
   a) Memenuhi kebutuhan untuk mendalami agama baik untuk kebutuhan personal maupun untuk kebutuhan dakwah.
   b) Memenuhi kebutuhan ummat untuk kepentingan rehabilitatif dan terapetik.
   c) Memenuhi kebutuhan ekonomik dan kesejahteraan hidup, sehingga memerlukan isi pendidikan yang bernuansa vokasional.
2) Pesantren bersifat proaktif
   a) Memenuhi kebutuhan bakat dan minat dalam bidang keagamaan.
   b) Menjadikan pesantren untuk menjadi pusat pemberdayaan ummat dan masyarakat sekitarnya.

c) Menjadikan pesantren sebagai tempat menggodok generasi potensil untuk menjadi pemimpin ummat di masa mendatang.
d) Menjadikan pesantren sebagai kholifah di semua bidang kehidupan.
e) Menjadikan pesantren yang mampu menjadikan santri sebagai pusat perubahan yang memberikan manfaat di masa-masa mendatang di manapun mereka berada.

Pesantren Menjadi Solusi Kini dan Mendatang

Di saat-saat perubahan sosial yang semakin cepat dan meluas, yang tidak segera diikuti oleh warga dan masyarakat, bahkan bangsa yang mampu merespons arus globalisasi dan dampak-dampaknya, baik positif maupun negatifnya, sekaligus untuk menyelamatkan ummat dan bangsa, kini sistem Pendidikan Pesantren yang dibangun secara komprehensif, menjadi pilihan solusi ummat. Walaupun demikian, pilihan sistem pendidikan pesantren yang memiliki fokus program dapat dibenarkan sepanjang diwarnai dengan penguasaan perubahan sosial dan kemampuan adaptasinya. Jika bangunan pendidikan pesantren benar-benar berorientasi secara futurologis, insya Allah santri mampu memberikan manfaat optimal. Di samping itu sangat perlu disadari bahwa keberlanjutan institusi pendidikan pesantren yang tergantung pada pola manajemen pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren yang dikelola secara sistem tanpa mengabaikan keberadaan pendiri dan tokoh penting di pesantren akan memiliki daya adaptasi yang baik dan sustainabilitas yang terjaga.

Menurut hemat saya, model pendidikan pesantren yang ideal adalah pendidikan yang mampu menunjukkan nilai-nilai konservatif yang sekaligus nilai-nilai pengembangan (developmental). Karena itu selama proses pendidikan sangat perlu menerapkan cara berpirik konvergen (konformis) dan cara berpikir divergen (lateral/kreatif).

Pendidikan pesantren seharusnya menjadikan santri yang ahli ibadah dengan menanamkan iman dan taqwa yang sungguh-sungguh, perlu terus memantapkan soft skills yang ditandai dengan akhlaqul karimah yang diwujudkan dengan menanamkan perilaku jujur, amanah, dan bertanggungjawab. Selain daripada, penanaman jiwa kemandirian dan spirit enterpreneurship, yang pada gilirannya spirit enterpreurship sanngat berarti bagi setiap santri di manapun dan kapanpun berada.

Yang juga tidak kalah pentingnya, untuk menjadikan khalifah di atas bumi, pendidikan pesantren perlu memberikan perhatian tersendiri untuk kecakapan sosial yang sangat bermanfaat bagi santri ketika merika harus terjun di tengah-tengah ummat, apakah menjadi kiai, muballigh, atau dai, atau juga sebagai pemimpinan atau tokoh bahkan anggota masyarakat yang mampu mengimple-

mentasikan nilai-nilai yang diperoleh di pesantren dalam pelaksanaan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari melalui keteladanan dan pencerahan.

Penutup

Bahwa era globalisasi akan mendatangkan hal positif dan negatif. Karena apapun alasan dan kondisinya globalisasi terus bergulir. Pendidikan pesantren tidak boleh menjadi korban globalisasi, melainkan harus mampu memainkan peran penting dan strategis, sehingga pendidikan pesantren tidak hanya mampu menghadirikan lulusan yang responsif terhadap arus globalisasi melainkan juga pendidikan pesantren mampu memainkan filter yang terbaik dan mampu menyiapkan program-program-program yang dapat memberikan jawaban terhadap tantangan globalisasi.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, kiranya pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin menyampaikan selamat kepada orangtua yang telah berhasil memberikan pengertian dan dorongan kepada anak-anak untuk memilih pesantren sebagai tempat pendidikan untuk mempersiapkan diri dalam menjawab tugas dari Allah swt sebagai *Abdulllah* dan *khalifatullah fil ardzi*. Modal awal yang sudah diperoleh di pesantren semoga dapat dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang sangat berat dengan melanjutkan studi dengan memilih bidang ilmu sesuai dengan bakat dan minatnya. Selanjutnya menjadi santri yang bisa bermanfaat di manapun berada.

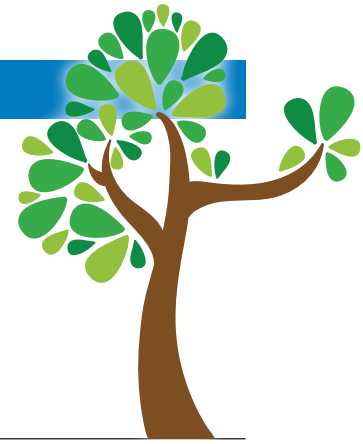

Peran Edukatif Media Massa dalam Mencerdaskan Masyarakat

PENDIDIKAN seharusnya dipandang sebagai pengembangan budaya nasional, bahkan pendidikan diyakini merupakan strategi yang paling efektif dalam membangun dan mengembangkan budaya nasional. Mengingat strategisnya posisi pendidikan, maka sistem pendidikan nasional harus ditata dengan benar dengan mempertimbangkan landasan filosofi bangsa.

Proses Pendidikan tidak sepenuhnya tergantung pada pendidikan formal (*schooling system*), melainkan juga ada institusi lain yang dapat memainkan peran besar, yaitu pendidikan non-formal dan informal, terutama melalui media massa. Karena media massa merupakan pilar kelima pendidikan, setelah keluarga, sekolah, masyarakat, dan rumah ibadah.

Peran media massa secara kuantitatif cenderung lebih banyak waktu yang mewarnai kehidupan manusia, dibandingkan dengan waktu efektif yang ada di sekolah, bahkan sampai media massa juga tidak bisa diabaikan dalam batas tertentu juga dapat menjangkau pendidikan formal.

Media massa dapat memainkan peran dalam transfer informasi tentang materi pendidikan dengan berbagai variasinya. Media massa juga mampu memberikan informasi yang sangat kaya dan *upto-date*, bahkan kualitas informasinya pun sangat baik dan tinggi. Di era informasi kini, memang media massa memainkan peran kunci juga dalam mengantarkan keberhasilan pendidikan.

Media massa dapat mentransformasikan nilai-nilai pendidikan melalui informasi yang didesiminasikan. Setiap informasi yang dikandung dalam media massa selalu mengandung nilai-nilai. Tentu nilai-nilai yang yang dikandung oleh media massa seharusnya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, memanusiakan manusia, dan bermanfaat bagi perbaikan martabat manusia. Tidak sebaliknya, bahwa informasi yang dikandung justru menjatuhkan martabat manusia.

Memang disadari bahwa media massa seringkali lebih mengedepankan pertimbangan bisnis, namun sebagai bagian dari sistem nasional, maka media massa memiliki tanggung jawab moral untuk mengakomodasi nilai-nilai moral dan kebangsaan. Dalam konteks ini tim redaksi diharapkan memainkan peran penting dalam menfilter informasi yang berpotensi dan berdampak kurang baik bagi setiap individu, masyarakat dan bangs.

Media massa juga kadang-kadang dapat menjadi instrument utama dalam modernisasi proses pendidikan, baik itu media massa cetak maupun elektronik. Misalnya dalam program Pendidikan Jarak Jauh yang sekarang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi peningkatan kualifikasi akademik para pendidik. Dengan target peningkatan kualifikasi akademik yang melonjak, maka cara yang paling strategis dan efisien adalah menggunakan media massa, terutama media massa elektronik.

Demikian juga media massa dapat dipakai untuk mempercepat proses penuntasan wajar, terutama bagi peserta didik yang berada di *remote area* atau daerah pinggiran. Hal ini juga tidak dapat diabaikan, bahwa dengan memperhatikan kondisi objektif geografi Indonesia, maka untuk menjamin terjadinya proses pendidikan untuk semua, kita harus memanfaatkan jasa media massa, dengan tetap menjaga komitmen untuk mempertahankan mutu.

Juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, ICT pada tataran tertentu dapat memberikan sajian materi dan proses pendidikan yang aktual, akurat, dan menyenangkan. Tidak sedikit materi pembelajaran yang tidak bisa disajikan oleh media yang manual, melainkan justru media massa yang jauh bisa lebih akurat, *up-to-date,* detil, komprehensif dan canggih.

Media massa juga memungkinkan dapat melakukan pembelajaran bersama antar peserta didik yang dipisahkan oleh geografi yang berjauhan. Pembelajaran *online* dapat juga berlangsung sama efektifnya, bahkan jika dikelola dengan baik, kadang-kadang lebih efektif bila dibandingkan dengan pembelajaran dengan modus tatap muka.

Media massa seharusnya mampu menampilkan *balance argumentation*, namun kadang-kadang tak bisa diabaikan bahwa apa yang disampaikan media masa lebih banyak persoalannya (barangkali hal ini yang bisa lebih mudah untuk menjadikan berita dan informasi itu menjadi *"news")*. Untuk itu perlu ada keseimbangan antara hal yang positif dan negatif, sehingga dapat diharapkan media massa dapat memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat.

Untuk menjadikan nilai tambah media massa, menurut hemat saya kiranya sudah waktunya setiap terbitan dan edisi laporan, ada berita dan kolom atau sesi khusus tentang pendidikan, baik itu berkenaan dengan berita/informasi maupun substansi pendidikan. Mengapa demikian, karena yang terjadi justru

berita tentang olahraga, politik, dan ekonomi atau bisnis yang kadang-kadang menghabiskan lembar atau menit dalam agenda media massa, baik tertulis maupun cetak. Penyampaian misi pendidikan lewat media massa tidak seharusnya berbentuk paket program tentang pendidikan, tetapi misi pendidikan dapat dimasukkan dalam agenda hiburan, cerita, lawakan, dialog, periklanan, dan lain sebagainya. Yang penting penyajiannya dapat dikemas senatural mungkin, sehingga para pembaca, pendengar, dan penonton dapat menangkap esensi dari message yang dikandung media massa.

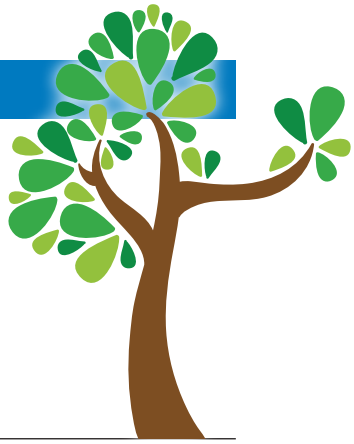

Haornas: Prestasi dan Kesejahteraan

TANGGAL 9 September 2009 kita peringati Hari Olahraga Nasional (HAORNAS). Sejak tahun kemarin, tahun ini dan tahun depan, HAORNAS di seluruh tanah air Indonesia tidak bisa dirayakan secara meriah, karena hari H-nya masih berada dalam suasana Ramadhan. Yang dapat dilakukan di seluruh Indonesia baru sebatas formalitas dan kegiatan olahraga bersifat minimal. Fenomena seperti ini tentu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak memikirkan kegiatan olahraga, baik untuk kepentingan pendidikan, prestasi, maupun rekreasi.

Semakin lama dan dewasa, Indonesia sebagai negara merdeka, sangatlah beralasan jika prestasi olahraganya semakin membaik dan olahraganya semakin mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi para atlet yang berprestasi. Sayang sekali, pada kenyataannya tidak. Lain halnya dengan apa yang terjadi di negara-negara lain, baik di negara-negara tetangga maupun negara-negara maju di belahan barat dunia, misalnya negara-negara di benua Eropa dan Amerika yang menjadikan olahraga sebagai salah satu objek bisnis yang menjanjikan, di samping untuk kepentingan menyehatkan dan menyejahterakan masyarakatnya sendiri.

Prestasi olahraga tingkat nasional kita masih jauh dari membanggakan, walau kita juga masih punya unggulan, baik bidang bulutangkis, tinju, tennis, bridge, maupun lainnya. Bahkan beberapa bidang olahraga unggulan tersebut pada akhir-akhir ini juga mengalami kemunduran. Diduga bahwa salah satu penyebabnya adalah rendahnya kejujuran, *fair play,* dan sportivitas, baik di antara atlet, pelatih, maupun pengurus cabang olahraga.

Ternyata kondisi kemunduran prestasi olahraga tidak hanya pada tingkat nasional, melainkan juga tingkat provinsi dan kabupaten kota, sebagaimana yang baru saja terjadi pada PORPROV DIY yang terjadi pada akhir Juli dan awal Agustus. Adanya sejumlah juara yang dibatalkan sungguh menjadi "pelajaran

penting" bagi semua pihak terkait, terutama atlet dan pengurus cabang olahraga daerah kabupaten/kota atau provinsi.

Haornas 2009 diyakini akan memiliki makna tersendiri dalam meningkatkan prestasi dan kesejahteraan masyarakat, jika ada perubahan *mindset* dan paradigma pembinaan olahraga, baik melalui pendidikan jasmani dan kesehatan, pembinaan olahraga prestasi, maupun pembinaan olahraga rekreasi.

Pertama, pendidikan jasmani dan kesehatan perlu diorientasikan untuk membangun *physical fitness,* membentuk keterampilan motorik halus dan kasar, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan otot dan postur tubuh yang benar, serta pertumbuhan dan perkembangan sel otak yang sebanyak-banyaknya. Hal ini sangat dipentingkan untuk membangun kecakapan dasar berbagai cabang olahraga dan kemampuan kognitif untuk menghadapi berbagai persoalan hidup.

Kedua, pembinaan olahraga prestasi dimaksudkan untuk mendorong setiap insan olahraga yang potensial, agar mampu menampilkan prestasi puncak melalui latihan dan pembinaan intensif. Jika prestasi dapat diraih secara provensial, nasional, atau dunia, maka pada saat itu terbangun kebanggaan. Karena menjadikan bendera daerah dan bendera negara tercinta dapat berkibar sebagai simbol eksistensi dan keunggulan.

Ketiga, pembinaan olahraga rekreasi dimaksudkan untuk menjamin kondisi fisik dan psikologis menjadi *fresh,* stabil, dan seimbang, bahkan menampilkan kebahagiaan hidup tersendiri. Jika kegiatan rekreatif yang dilakukan secara terarah, terkendali, kontinyu, dan seimbang, maka kondisi kesehatan dan kebugaran badan tetap dapat terjaga. Kondisi ini sungguh mendukung untuk kegiatan ibadah, belajar, bekerja, dan sosial. Insan yang sudah dewasa dan tidak berbakat olahraga, maka satu-satunya jenis olah raga yang dibutuhkan untuk menjaga diri "tetap muda" *(stay young)* adalah olahraga rekreatif.

Prestasi olahraga memang dibutuhkan oleh daerah dan negara sebagai salah satu strategi untuk menunjukkan kebesaran dan mengibarkan bendera daerah dan negaranya. Daerah dan negara untuk meraih prestasi memang sebaiknya berpikir visioner, bukan berpikir pragmatis, sehingga langkah yang harus dilakukan bukan hanya sekedar meraih prestasi, melainkan bagaimana meraih prestasi dan kejuaraan dengan cara yang sportif dan fair. Prestasi dan kejuaraan cabang olahraga yang diraih dengan cara yang tidak terpuji, baik melalui *dopping* obat maupun pembelian atlet, bukan hanya mencoreng muka nama daerah dan negara, melainkan juga mengancam integritas atlet sendiri dan men-*descouraging* para atlet daerah atau nasional yang potensial.

Untuk mendorong dan menjamin atlet berprestasi (profesional maupun amatir), perlu diberikan pendidikan dan penyucian hati, pelatihan motivasi

berprestasi, pendampingan psikologis, pelatihan fisik yang cukup, dan pelatihan teknis yang terarah. Atlet berprestasi perlu diberikan penghargaan dan *incentif* yang memadai, bahkan perlu diberikan jaminan kehidupan yang bersifat produktif, bukan yang bersifat konsumtif. Jika perlu atlet berprestasi dapat diangkat sebagai pegawai negeri atau swasta, sebagai pegangan hidupnya dengan tetap menjaga prestasinya.

Memang sangat disayangkan, atlet berprestasi di Indonesia kurang mendapat apresiasi, sehingga karier olahraga kurang menarik minat. Kita memang tidak bisa menyalahkan orang lain. Untuk membangun kebanggaan daerah dan negara di bidang olahraga, marilah dimulai dengan membangun atlet yang bermoral, sportif, dan fair dengan prestasi unggul, sehingga tampil anggun dan membanggakan.

PENGURUS WILAYAH

NAHDLATUL ULAMA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
uny

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.

Guru Besar FIP UNY, TMT. 1 Juni 2010